



**PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN
PERUNDANG -UNDANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA
TAHUN 2025 - 2029**



PIMPINAN DPRD KABUPATEN BARITO UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BARITO UTARA
NOMOR 8 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2026

PIMPINAN DPRD KABUPATEN BARITO UTARA,

Menimbang : bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, perlu menetapkan Keputusan DPRD Kabupaten Barito Utara tentang Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023, Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan DPRD Kabupaten Barito Utara Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Periode 2024-2029 (Berita Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2025 Nomor 7);

Memperhatikan : 1. Surat Bupati Barito Utara Nomor 329/25/Huk/2025 hal Penyampaian Program Pembentukan Perda (Propemperda) Tahun 2026

2. Notulen Rapat Pembahasan tanggal 21 November 2025 agenda Rapat Pembahasan Propemperda Tahun 2026;

2. Berita Acara Nomor 17/BA-DPRD/2025 tentang Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2026, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Keputusan ini menjadi Pedoman bagi Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Barito Utara dalam Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2026.
- KETIGA : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muara Teweh
pada tanggal 28 November 2025

KETUA DPRD
KABUPATEN BARITO UTARA,



MERY RUKAINI

Tembusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Barito Utara di Muara Teweh
2. Pimpinan DPRD Kab. Barito Utara di Muara Teweh
3. Masing-Masing Ketua Komisi DPRD Kab. Barito Utara di Muara Teweh
4. Ketua Bapemperda DPRD Kab. Barito Utara di Muara Teweh
5. Sekretaris DPRD Kab. Barito Utara di Muara Teweh
6. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Barito Utara di Muara Teweh
7. Arsip

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
NOMOR 8 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2026

PROGRAM PEMBENTUKAN PERDA (PROPEMPERDA) KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2026

NO	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		DISERTAI		INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN	KETERANGAN
				BARU	UBAH	NA	PENJELASAN ATAU KETERANGAN			
1	Raperda	Pengelolaan Kekayaan Intelektual	Mengatur tentang perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual yang ada atau lahir di daerah yang diciptakan oleh individu dan/atau pelaku usaha ataupun yang merupakan milik pemerintah daerah	Baru		✓			2026	✓
2	Raperda	Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dan Peternak	Mengatur tentang perlindungan serta hak pemberdayaan bagi petani dan peternak	Baru		✓			2026	✓
3	Raperda	Tenaga Kerja Daerah	- Kesempatan dan perlakuan yang sama - Perencanaan TKD dan informasi	Baru		✓			2026	✓

NO	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		DISERTAI		INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN	KETERANGAN
				BARU	UBAH	NA	PENJELASAN ATAU KETERANGAN			
			ketenagakerjaan - Pelatihan kerja TKD - Penempatan TKD - Perlindungan, pengupahan dan pemutusan hubungan kerja - Inventarisasi TKD - Peran pemerintah daerah dan pemberi kerja - Pelaporan - Sanksi Administrasi - Ketentuan Penutup							
4	Raperda	Pedoman Pemberian Nama Jalan dan Sarana Umum	Mengatur mengenai pemberian nama jalan dan sarana umum	Baru						
5	Raperda	Perubahan Status dan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Batara Membangun menjadi Perusahaan Perseroan Daerah	Mengatur mengenai Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Batara Membangun menjadi Perusahaan Perseroan Daerah, kegiatan usaha, Struktur Organisasi, Modal dan Kepemilikan, pengelolaan dan tata kelola, hak dan	Baru	-	-	Penjelasan	Sekretariat Daerah Bagian Ekonomi	2026	✓

NO	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		DISERTAI		INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN	KETERANGAN
				BARU	UBAH	NA	PENJELASAN ATAU KETERANGAN			
			kewajiban, Sumber daya manusia, laporan keuangan dan akuntabilitas, penggunaan laba dan deviden, dan mekanisme perubahan dan penggabungan							
6	Raperda	Perubahan Status dan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Air Minum menjadi Perusahaan Umum Daerah	Mengatur mengenai Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Air Minum menjadi Perusahaan Umum Daerah, kegiatan usaha, Struktur Organisasi, Modal dan Kepemilikan, pengelolaan dan tata kelola, hak dan kewajiban, Sumber daya manusia, laporan keuangan dan akuntabilitas, penggunaan laba dan deviden, dan mekanisme perubahan dan penggabungan	Baru	-	-	Penjelasan	Sekretariat Daerah Bagian Ekonomi	2026	✓

NO	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		DISERTAI		INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN	KETERANGAN
				BARU	UBAH	NA	PENJELASAN ATAU KETERANGAN			
7	Raperda	Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Utara Tahun 2019-2039	Penyusunan rencana pola ruang, struktur ruang dan kawasan strategis Kabupaten	-	ubah	-	Penjelasan	Dinas PUPR	2026	✓
8	Raperda	Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman	Menjamin keberlanjutan pemeliharaan dan pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas di lingkungan perumahan dan permukiman	Baru	-	-	Penjelasan	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	2026	✓
9	Raperda	Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	Mengatur mengenai: 1. Tugas dan kewajiban Pemerintah Daerah; 2. Kriteria dan Tipologi 3. Pencegahan; 4. Peningkatan Kualitas; 5. Penyediaan Tanah; 6. Pola Kemitraan; 7. Peran	Baru	-	NA	-	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	2026	✓

NO	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		DISERTAI		INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN	KETERANGAN
				BARU	UBAH	NA	PENJELASAN ATAU KETERANGAN			
			Masyarakat; 8. Karifan Lokal; 9. Pemberian Insentif; 10. Penyelesaian Sengketa; 11. Pendanaan dan Konfensasi; 12. Sanksi Administratif.							
10	Raperda	Kelembagaan Adat Dayak	Pengaturan tentang Kelembagaan kedadamaan yang memiliki peran penting bagi kehidupan dan keberadaan masyarakat adat dayak sehingga perlu dilestarikan, dikembangkan dan diberdayakan dengan memberikan kedudukan kewenangan, tugas, fungsi, dan peranan yang memadai sesuai dengan perkembangan dan tuntutan daerah otonom dalam bingkai Negara Kesatuan Republik	Baru	-	-	Penjelasan	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2026 ✓	Proses Penyusunan Raperda telah sampai pada Pembicaraan Tingkat I yaitu Pembahasan

NO	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		DISERTAI		INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN	KETERANGAN
				BARU	UBAH	NA	PENJELASAN ATAU KETERANGAN			
			Indonesia							
11	Raperda	Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang disabilitas di Kabupaten Barito Utara	Mengatur mengenai penyandang disabilitas sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan, sekurang-kurangnya meliputi hak, perencanaan, pelaksanaan, pemberdayaan, partisipasi masyarakat, kemitraan dan penghargaan	Baru	-	NA	Penjelasan	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2026	✓
12	Raperda	Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro	Memuat Pengaturan tentang: 1. Kemudahan dan Perlindungan Koperasi 2. Kemudahan, perlindungan, pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro; 3. Pemberdayaan Koperasi sebagai wadah Pengembangan Usaha Mikro; 4. Kewajiban dan	Baru	-	-	Penjelasan	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Barito Utara	2026	✓

NO	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		DISERTAI		INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN	KETERANGAN
				BARU	UBAH	NA	PENJELASAN ATAU KETERANGAN			
			Larangan; 5. Peran serta masyarakat dan Dunia Usaha 6. Monitoring, Evaluasi dan Pengawasan; 7. Sanksi Administratif; 8. Pendanaan.							
13	Raperda	Pedoman umum Pelaksanaan Pengarus Utamaan Gender dalam Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Utara	Memuat Pengaturan tentang: 1. Tugas dan Kewenangan; 2. Perencanaan dan Pelaksanaan; 3. Pemberdayaan; 4. Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi; 5. Partisipasi Masyarakat; 6. Pendanaan; 7. Pembinaan; dan 8. Sanksi Administratif.	Baru	-	-	Penjelasan	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2026	✓
14	Raperda	Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah	Penyediaan pangan pokok di daerah dan mempersiapkan ketersediaan pangan	Baru	-	-	Penjelasan	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	2026	✓

NO	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		DISERTAI		INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN	KETERANGAN
				BARU	UBAH	NA	PENJELASAN ATAU KETERANGAN			
		Daerah	daerah							
15	Raperda	Pengelolaan Persampahan	1. Sistem Pengelolaan Sampah; 2. Tata Cara Pengelolaan Sampah; 3. Waktu pembuangan sampah; dan 4. Sanksi terhadap pelanggaran Perda.	Baru	-	-	Penjelasan	Dinas Lingkungan Hidup	2026	Proses Penyusunan Raperda telah sampai pada Pembicaraan Tingkat I yaitu Pembahasan ✓
16	Raperda	Penyelenggaraan Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat	Mengatur tentang Penyelenggaraan Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat	Baru	-	-	Penjelasan	Dinas Lingkungan Hidup	2026	Proses Penyusunan Raperda telah sampai pada Pembicaraan Tingkat I yaitu Pembahasan ✓
17	Raperda	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Barito (RPPLH) Kabupaten Barito	Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Barito Utara	Baru	-	-	Penjelasan	Dinas Lingkungan Hidup	2026	

NO	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		DISERTAI		INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN	KETERANGAN
				BARU	UBAH	NA	PENJELASAN ATAU KETERANGAN			
		Utara								
18	Raperda	Pengelolaan Air Limbah	Pengelolaan air limbah Domestik dan Air Limbah Industri	Baru	-	NA	Penjelasan	Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas PUPR	2026	✓
19	Raperda	Penyelenggaraan Penanaman Modal di Kabupaten Barito Utara	Kegiatan Yang Berhubungan Dengan Penyelenggaraan Penanaman Modal	Baru	-	-	Penjelasan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Utara	2026	✓
20	Raperda	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2025-2030	Mengatur mengenai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2025-2030	Baru	-	-	Penjelasan	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	2026	✓
21	Raperda	Pertanggungjawab an Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025	Pengaturan tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD T.A 2025	Baru	-	-	Penjelasan	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset	2026	
22	Raperda	Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026	Pengaturan tentang Perubahan APBD T.A 2026	-	Ubah	-	Penjelasan	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset	2026	
23	Raperda	APBD Tahun Anggaran 2027	Pengaturan tentang APBD T.A 2027	Baru	-	-	Penjelasan	Badan Pengelolaan	2026	

NO	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		DISERTAI		INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN	KETERANGAN
				BARU	UBAH	NA	PENJELASAN ATAU KETERANGAN			
								Keuangan dan Aset		
24	Raperda	Perubahan atas Perda Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah	Mengatur tentang Perubahan Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan Menyesuaikan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah	Baru			Penjelasan	BPKA	2026	
25	Raperda	Perubahan atas Perda Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Mengatur tentang Penyesuaian penambahan objek Retribusi dan Tarif Retribusi	-	Ubah	-	Penjelasan	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	2026	

KETUA DPRD KABUPATEN BARITO UTARA,


MERY FUKAINI



**RANCANGAN PERATURAN
PERUNDANG -UNDANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA
TAHUN 2025 - 2029**



**BUPATI BARITO UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**RANCANGAN
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BARITO UTARA
NOMOR ... TAHUN ...**

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025-2029**



BAGIAN HUKUM	
SEKDA	m
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	
KABAG HUKUM	cha
PELAKSANA	

BUPATI BARITO UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA
NOMOR . . . TAHUN ...

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO UTARA,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 264 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

BAPPERIDA KAB. BARUT		
JABATAN		PARAF
SETDA	SEKDA	
	ASISTEN	
KEPALA		
SEKRETARIS		
KABID		
KASUBBAG/KASUBBID		
PELAKSANA		A

BAGIAN HUKUM	
SEKDA	<i>m</i>
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	
KABAG HUKUM	<i>Ma</i>
PELAKSANA	

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

BAPPERIDA K/AB. BARUT		
JABATAN		PARAF
SETDA	SEKDA	
	ASISTEN	
KEPALA		<i>g</i>
SEKRETARIS		<i>g</i>
KABID		<i>g</i>
KASUBBAG/KASUBBID		<i>g</i>
PELAKSANA		<i>A</i>

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

BAGIAN HUKUM	
SEKDA	<i>m</i>
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	
KABAG HUKUM	<i>Da</i>
PELAKSANA	

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

BAPPERIDA KAB. BARUT		
JABATAN		PARAF
SETDA	SEKDA	
	ASISTEN	
KEPALA		<i>g</i>
SEKRETARIS		<i>g</i>
KABID		<i>g</i>
KASUBBAG/KASUBBID		<i>g</i>
PELAKSANA		<i>A</i>

10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
12. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
13. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2023 tentang Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6870);
14. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6987);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887)

BAGIAN HUKUM	
SEKDA	<i>m</i>
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	
KABAG HUKUM	<i>Da</i>
PELAKSANA	

sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402);

BAPPERIDA KAB. BARUT		
JABATAN		PARAF
SETDA	SEKDA	
	ASISTEN	
KEPALA		<i>g</i>
SEKRETARIS		<i>g</i>
KABID		<i>g</i>
KASUBBAG/KASUBBID		<i>g</i>
PELAKSANA		A

- Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5941);
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6056);
- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
- Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6323);
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6633);
- Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6909);
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12

BAGIAN HUKUM	
SEKDA	<i>m</i>
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	<i>da</i>
KABAG HUKUM	
PELAKSANA	

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 186);

26. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 182);

27. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 112);

28. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 126);

29. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Tahun 2025 Nomor 19);

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1312);

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur

BAPPERIDA KAB. BARUT		
JABATAN		PARAF
SETDA	SEKDA	
	ASISTEN	
KEPALA		<i>da</i>
SEKRETARIS		<i>da</i>
KABID		<i>da</i>
KASUBBAG/KASUBBID		<i>da</i>
PELAKSANA		<i>A</i>

BAGIAN HUKUM	
SEKDA	m
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	
KABAG HUKUM	ola
PELAKSANA	

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

BAPPERIDA K/AB. BARUT		
JABATAN		PARAF
SETDA	SEKDA	
	ASISTEN	
KEPALA		g
SEKRETARIS		h
KABID		i
KASUBBAG/KASUBBID		j
PELAKSANA		A

35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
36. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan dan Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 149);
37. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
38. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1);
39. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 71);
40. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 81);
41. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 123);

BAPPERIDA KAB. BARUT		
JABATAN		PARAF
SETDA	SEKDA	
	ASISTEN	
KEPALA		
SEKRETARIS		
KABID		
KASUBBAG/KASUBBID		
PELAKSANA		A

42. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Utara Tahun 2019-2039 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 81);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Barito Utara Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA
dan
BUPATI BARITO UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- Daerah adalah Daerah Kabupaten Barito Utara.
- Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Barito Utara.
- Bupati adalah Bupati Barito Utara.
- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Utara.
- Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara.
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahunan.
- Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.

BAGIAN HUKUM	
SEKDA	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	
KABAG HUKUM	
PELAKSANA	

9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Barito Utara untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara untuk periode 5 (lima) tahun.
11. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumberdaya yang tersedia.
13. Musyawarah perencanaan pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan Daerah.
14. Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya daerah secara terencana untuk mewujudkan visi daerah.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
16. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
17. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
18. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
19. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
20. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran.
21. Kegiatan adalah sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya, baik berupa personal, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya sebagai masukan (*Input*) untuk menghasilkan keluar (*Output*), dalam bentuk barang dan jasa.
22. Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip Pembangunan Berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program.
23. Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat KLHS RPJMD adalah analisis sistematis, menyeluruh, dan partisipatif yang

menjadi dasar untuk mengintegrasikan tujuan Pembangunan Berkelanjutan ke dalam dokumen RPJMD.

BAB II
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Pasal 2

RPJMD Kabupaten Barito Utara Tahun 2025-2029 merupakan:

- a. penjabaran visi, misi dan program Kepala Daerah ke dalam strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program prioritas Kepala Daerah dan arah kebijakan keuangan daerah dengan memperhatikan RPJPD Kabupaten Barito Utara Tahun 2025-2045 dan KLHS RPJMD Kabupaten Barito Utara; dan
- b. dokumen perencanaan daerah yang memberikan arah sekaligus acuan bagi seluruh komponen pelaku pembangunan daerah dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berkesinambungan.

Pasal 3

Maksud dan tujuan penetapan RPJMD adalah untuk menetapkan pedoman perencanaan sebagai acuan dalam:

- a. penyusunan Renstra PD, RKPD, Renja PD dan perencanaan penganggaran; dan
- b. mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan Nasional, Provinsi dan Kabupaten.

Pasal 4

- (1) RPJMD sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I	PENDAHULUAN;
BAB II	GAMBARAN UMUM DAERAH;
BAB III	VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH;
BAB IV	PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH;
BAB V	PENUTUP

- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Dokumen yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD Kabupaten Barito Utara Tahun 2025-2029.

- (2) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD Kabupaten Barito Utara 2025-2029, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada Peraturan Perundang Undangan yang berlaku.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

- (1) Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan untuk menghindari kekosongan rencana pembangunan daerah, Kepala Daerah yang sedang menjabat pada tahun terakhir jabatannya menyusun RKPD untuk tahun pertama periode Jabatan Kepala Daerah berikutnya.
- (2) Dalam hal terjadinya perubahan yang bersifat parsial terhadap dokumen RPJMD, dan tidak mempengaruhi terhadap perubahan capaian sasaran, serta tidak mengubah target capaian sasaran akhir periode RPJMD, maka perubahan RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (3) Hal-hal yang berkaitan dengan pendanaan dan target indikator kinerja daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini bersifat indikatif sehingga apabila terjadi penyesuaian dituangkan dalam Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara untuk mendapat persetujuan dan penetapan DPRD Kabupaten Barito Utara.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara.

BAPPERIDA KAB. BARUT		
JABATAN		PARAF
SETDA	SEKDA	
	ASISTEN	
KEPALA		
SEKRETARIS		
KABID		
KASUBBAG/KASUBBID		
PELAKSANA		A

Diundangkan di Muara Teweh
pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO UTARA,

MUHLIS

Ditetapkan di Muara Teweh
pada tanggal ...

BUPATI BARITO UTARA,

SHALAHUDDIN

BAGIAN HUKUM	
SEKDA	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	
KABAG HUKUM	
PELAKSANA	

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN ... NOMOR ...

BAPPERIDA KAB. BARUT		
JABATAN		PARAF
SETDA	SEKDA	
	ASISTEN	
KEPALA		
SEKRETARIS		
KABID		
KASUBBAG/KASUBBID		
PELAKSANA		A

PENJELASAN
 ATAS
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA
 NOMOR ... TAHUN ...
 TENTANG
 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
 TAHUN 2025-2029

I. UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pada Pasal 5 ayat (2), RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati yang penyusunannya berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dengan memperhatikan RPJM Nasional. Selain daripada itu berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah diatur dengan Peraturan Daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Utara Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten serta memperhatikan RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah dan RPJMN. Mekanisme penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029 berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029 dilakukan dengan berdasarkan pada prinsip-prinsip: keterkaitan, konsistensi, kelengkapan dan kedalaman, serta keterukuran. Disamping itu secara terpadu juga menerapkan pendekatanpendekatan : partisipatif (*bottom up*), *top down*, teknokratik, politis, dan inovatif yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan, serta mengacu ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAGIAN HUKUM	
SEKDA	m
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	
KABAG HUKUM	Da
PELAKSANA	

Peraturan Daerah ini mencakup landasan hukum di bidang perencanaan pembangunan daerah oleh Pemerintah Daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahunan dan digunakan sebagai arahan kegiatan pembangunan sesuai dengan kewenangan daerah.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
- Cukup Jelas.
- Pasal 2
- Cukup Jelas.
- Pasal 3
- Cukup Jelas.
- Pasal 4
- Cukup Jelas.
- Pasal 5
- Cukup Jelas.
- Pasal 6
- Cukup Jelas.
- Pasal 7
- Cukup Jelas.

BAPPERIDA K/AB. BARUT		
JABATAN		PARAF
SETDA	SEKDA	
	ASISTEN	
KEPALA		
SEKRETARIS		
KABID		
KASUBBAG/KASUBBID		
PELAKSANA		A

BAGIAN HUKUM	
SEKDA	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	
KABAG HUKUM	
PELAKSANA	

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA NOMOR ...



**NASKAH AKADEMIK / KETERANGAN /
PENJELASAN / NASKAH URGENSI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA
TAHUN 2025 - 2029**



Terwujudnya Kabupaten Saritama yang Maju, Tumbuh dan Berkembang



**Terwujudnya Kabupaten Barito Utara
yang Maju, Tumbuh Pesat, Sejahtera,
dan Berkeadilan**





DAFTAR ISI



DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
DAFTAR GAMBAR	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR PETA	iv
BAB I. PENDAHULUAN	I-1
1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan	I-5
1.3. Hubungan Antara Dokumen	I-7
1.4. Maksud dan Tujuan	I-10
1.5. Sistematika Penulisan	I-10
BAB II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	II-1
2.1. Aspek Geografi dan Demografi	II-1
2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II-130
2.3. Aspek Daya Saing Daerah	II-176
2.4. Aspek Pelayanan Umum	II-285
2.5. Gambaran Umum Keuangan Daerah	II-295
2.6. Permasalahan dan Isu Strategis Daerah	II-325
BAB III. VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	III-1
3.1. Visi	III-1
3.2. Tujuan dan Sasaran	III-19
3.3. Strategi dan Arah Kebijakan	III-32
3.4. Program Prioritas Daerah	III-76
BAB IV. PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN DAERAH	IV-1
4.1. Program Perangkat Daerah	IV-1



4.2.	Kinerja Penyelenggara	IV-68
------	-----------------------------	-------

BAB V. PENUTUP	V-1
-----------------------------	------------

5.1.	Spirit Pembangunan Kabupaten Barito Utara	V-1
------	---	-----

5.2.	Kaidah Pelaksanaan.....	V-1
------	-------------------------	-----

5.3.	Skema Monitoring dan Evaluasi	V-3
------	-------------------------------------	-----

DAFTAR PUSTAKA



DAFTAR GAMBAR



DAFTAR GAMBAR

No	Judul Gambar	Halaman
1.1	Keterkaitan RPJMD dengan Dokumen Pembangunan Daerah	I-8
2.1	Kondisi Pertanian Tanaman Pangan di Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2022	II-33
2.2	Komposisi Luas Kelas IJE pada Jasa Ekosistem Penyediaan	II-38
2.3	Komposisi Luas IJE Berdasarkan Kategori pada Ekosistem Pengaturan	II-39
2.4	Komposisi Luas Kelas IJE pada Jasa Ekosistem Budaya	II-48
2.5	Komposisi Luas Kelas IJE pada Jasa Ekosistem Pendukung	II-49
2.6	Tren Populasi Ayam Pedaging	II-62
2.7	Tren Produksi Pangan	II-62
2.8	Tren Kemandirian Pangan	II-63
2.9	Tren IKLH Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023	II-66
2.10	Tren Proyeksi IKLH Kabupaten Barito Utara Tahun 2025-2045	II-67
2.11	Perbandingan Nilai IKLH Kabupaten Barito Utara Provinsi Kalimantan Tengah dan Nasional	II-68
2.12	Timbulan Sampah Kabupaten Barito Utara Tahun 2019-2023	II-75
2.13	Komposisi Sampah Berdasarkan Jenis Sampah di Kabupaten Barito Utara	II-76
2.14	Komposisi Sampah Berdasarkan Sumber Sampah di Kabupaten Barito Utara	II-78
2.15	Peta Pelayanan Pengelolaan Sampah di Ibukota Kabupaten Barito Utara	II-81
2.16	Capaian Kinerja Pengelolaan Sampah Kabupaten Barito Utara	II-82
2.17	Persentase Tempat Buang Air Besar di Kabupaten Barito Utara Tahun 2022	II-90
2.18	Tren Capaian Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten Barito Utara 2022-2024	II-101
2.19	Trend IRB Kabupaten Barito Utara dan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020-2024	II-102
2.20	Piramida Penduduk Kabupaten Barito Utara Tahun 2024	II-124
2.21	Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Indonesia, Provinsi Kalimantan Tengah, dan Kabupaten Barito Utara Tahun 2020-2024 ..	II-132
2.22	Perkembangan PDRB per Kapita Kabupaten Barito Utara Tahun 2020-2024	II-134
2.23	Tren Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Barito Utara Tahun 2020-2024	II-136
2.24	Tren Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Barito Utara Tahun 2020-2024	II-140
2.25	Nilai Tukar Petani Regional (Provinsi Kalimantan Tengah) Tahun 2024	II-142
2.26	Angka Harapan Hidup (AHH) Kabupaten Barito Utara Terhadap AHH Provinsi Kalimantan Tengah dan AHH Pusat Tahun 2020-2024	II-143
2.27	Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	II-157
2.28	Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	II-158
2.29	Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita ODGJ Berat	II-159



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Tahun 2025-2029**

2.30	Persandingan Capaian IPG Provinsi Kalimantan Tengah dengan IPG Nasional	II-174
2.31	Persandingan Capaian IPG Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah dengan IPG Provinsi dan IPG Nasional Tahun 2015	II-174
2.32	Persandingan IDG Provinsi Kalimantan Tengah dengan IDG Nasional Tahun 2011-2015	II-175
2.33	Kondisi Ekonomi Berkelanjutan Per Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah	II-175
2.34	Perbandingan IPM Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, dan Nasional.....	II-177
2.35	Target dan Realisasi Transformasi Digital Kabupaten Barito Utara.....	II-211
2.36	Perkembangan dan Struktur Pembentukan Modal Tetap Bruto Kabupaten Barito Utara Tahun 2020-2024	II-215
2.37	Pertumbuhan Modal Tetap Bruto Kabupaten Barito Utara Tahun 2020-2024	II-217
2.38	Perkembangan dan Struktur Perubahan Inventori Kabupaten Barito Utara 2020-2024.....	II-219
2.39	<i>Incremental Capital Ratio</i> (ICOR) Kabupaten Barito Utara 2020-2024	II-223
2.40	Pertumbuhan Ekspor (AHDK 2010, YoY) Kabupaten Barito Utara Tahun 2020-2024	II-226
2.41	Proporsi Ekspor Terhadap PDRB (AHDK) Kabupaten Barito Utara 2020-2024	II-226
2.42	Ekspor Kabupaten Barito Utara Tahun 2020-2024 (Perbandingan ADHB dengan ADHK).....	II-227
2.43	Perkembangan Impor Kabupaten Barito Utara Tahun 2020-2024.....	II-230
2.44	Perkembangan Net Ekspor Kabupaten Barito Utara Tahun 2020-2024	II-233
2.45	Panjang Jalan Menurut Tingkat Kewenangan Pemerintahan di Kabupaten Barito Utara Tahun 2022-2024	II-235
2.46	Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan Jalan di Kabupaten Barito Utara (km) Tahun 2022-2024.....	II-236
2.47	Panjang Jalan Menurut Kondisi Jalan di Kabupaten Barito Utara Tahun 2022-2024	II-238
2.48	Karakteristik Rumah Tangga Menurut Beberapa Indikator Kualitas Perumahan di Kabupaten Barito Utara Tahun 2022-2024.....	II-242
2.49	Persentase Rumah Tangga Menurut Beberapa Fasilitas Perumahan di Kabupaten Barito Utara (persen) Tahun 2022-2024.....	II-244
2.50	Persentase Rumah Tangga Menurut Status Kepemilikan Rumah Tinggal di Kabupaten Barito Utara Tahun 2022-2024	II-246
2.51	Status Desa di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024	II-249
2.52	Status Desa di Kabupaten Barito Utara Tahun 2024.....	II-250
2.53	Jumlah Desa Berdasarkan Status IDM di Kabupaten Barito Utara Tahun 2024	II-256
2.54	Inflasi Bulanan Provinsi Kalimantan Tengah Periode 2019-2024	II-257
2.55	<i>Heatmap</i> Inflasi Bulanan Pola Musiman Provinsi Kalimantan Tengah Periode 2019-2024	II-260
2.56	Komposisi PDRB ADHB Menurut Pengeluaran Kabupaten Barito Utara Tahun 2020-2024.....	II-263
2.57	PDRB Harga Konstan 2010 Kabupaten Barito Utara Tahun 2020-2024	II-265



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Tahun 2025-2029

2.58	Komposisi PDRB Atas Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Kabupaten Barito Utara Tahun 2020-2024	II-267
2.59	Persentase Distribusi PDRB Atas Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Kabupaten Barito Utara Tahun 2020-2024.....	II-267
2.60	Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Kabupaten Barito Utara Menurut Pengeluaran Tahun 2020-2024	II-269
2.61	Laju Pertumbuhan Indeks Harga Implisit PDRB Kabupaten Barito Utara Tahun 2020-2024.....	II-271
2.62	PDRB Kabupaten Barito Utara Menurut Komponen Pengeluaran Tahun 2024	II-274
2.63	PDRB dan PDRB per kapitas Kabupaten Barito Utara Tahun 2020-2024	II-276
2.64	Perkembangan Komponen Konsumsi Rumah Tangga di Kabupaten Barito Utara Tahun 2020-2024.....	II-278
2.65	Struktur Komponen Konsumsi Rumah Tangga di Kabupaten Barito Utara Tahun 2020-2024.....	II-281
2.66	Pertumbuhan Riil Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kabupaten Barito Utara Tahun 2020-2024	II-283
2.67	Indeks SPBE Kabupaten Barito Utara Tahun 2020-2024.....	II-286
2.68	Indeks Demokrasi Indonesia Kabupaten Barito Utara Tahun 2020-2024	II-287
2.69	Aspek Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2024	II-288
2.70	Target Realisasi dan Capaian Penyelesaian Pelanggaran di Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023	II-290
2.71	Nilai Rata-Rata Capaian Pelaksanaan Aksi HAM Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025	II-291
2.72	Tren Indeks Kemahalan (IKK) di Kabupaten Barito Utara Tahun 2019-2024	II-326
2.73	Delapan Program Terbaik Cepat (<i>Quick Wins</i>)	II-383
3.1	Keterkaitan Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Barito Utara dengan RPJMN Tahun 2025-2029 dan RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2029	III-4
3.2	Keterkaitan Misi Bupati dengan Isu Strategis RPJMD 2025-2029.....	III-19
3.3	Pohon Kinerja RPJMD Kabupaten Barito Utara 2025-2029	III-60
3.4	<i>Cascading</i> Kinerja RPJMD Kabupaten Barito Utara 2025-2029.....	III-63
3.5	Tahapan Pembangunan RPJMD Kabupaten Barito Utara	III-64
5.1	Alur Pendetailan Monitoring, Pengendalian, dan Evaluasi	V-6



DAFTAR TABEL



DAFTAR TABEL

No	Judul Tabel	Halaman
2.1	Luas Daerah Perkecamatan Kabupaten Barito Utara.....	II-2
2.2	Luas dan Persentase Kemiringan Wilayah Kabupaten Barito Utara...	II-3
2.3	Luas dan Persentase Jenis Tanah di Kabupaten Barito Utara	II-3
2.4	Luas dan Persentase Bentang Alam Kabupaten Barito Utara	II-9
2.5	Luas Persentase Formasi Geologi Kabupaten Barito Utara	II-10
2.6	Luas dan Persentase DAS di Barito Utara	II-11
2.7	Luas Lahan Pertanian per Kecamatan Tahun 2024	II-18
2.8	Luas Lahan Perkebunan Kabupaten Barito Utara	II-20
2.9	Luas Wilayah Perizinan Perkebunan Kabupaten Barito Utara.....	II-20
2.10	Luas Perizinan Eksploitasi Pertambangan Batubara.....	II-21
2.11	Luas Kawasan Hutan Menurut Fungsi/Status di Kabupaten Barito Utara.....	II-25
2.12	Luas Indikatif dan Areal Perhutanan Sosial (Revisi IX) Kabupaten Barito Utara	II-26
2.13	Luas Perizinan Berusaha Pengelolaan Hutan Alam (PBPHA).....	II-26
2.14	Luas Perizinan Berusaha Pengelolaan Hutan Tanaman (PBPHT).....	II-27
2.15	Daya Dukung Air di Kabupaten Barito Utara	II-32
2.16	Ketersediaan dan Kebutuhan Air Setiap Kecamatan di Kabupaten Barito Utara	II-32
2.17	Analisis Daya Dukung Lahan Berdasar Kondisi Eksisting Permukiman Tahun 2022	II-34
2.18	Jasa Ekosistem Penyediaan Kabupaten Barito Utara	II-38
2.19	Jasa Ekosistem Pengaturan di Kabupaten Barito Utara.....	II-40
2.20	Jasa Ekosistem Budaya di Kabupaten Barito Utara	II-48
2.21	Jasa Ekosistem Pendukung Kabupaten Barito Utara	II-49
2.22	Matriks Ketahanan Kecamatan-Kecamatan di Kabupaten Barito Utara.....	II-56
2.23	Jenis dan Luas Lahan Pertanian Kabupaten Barito Utara Tahun 2022-2024	II-59
2.24	Jenis dan Produksi Buah-Buahan di Kabupaten Barito Utara Tahun 2022-2024	II-59
2.25	Jenis dan Produksi Peternakan Kabupaten Barito Utara Tahun 2022-2024	II-60
2.26	Proyeksi IKLH Kabupaten Barito Utara Tahun 2025-2045	II-67
2.27	Luas dan Persentase Penggunaan Lahan Kabupaten Barito Utara ...	II-72
2.28	Komposisi Sampah Berdasar Sumber Sampah di Kabupaten Barito Utara Tahun 2019-2023.....	II-78
2.29	Volume Sampah yang Dihasilkan dari Pengelolaan Sampah di Kabupaten Barito Utara	II-80
2.30	Capaian Pengelolaan Sampah di Kabupaten Barito Utara.....	II-81
2.31	Capaian Kinerja Pengelolaan Sampah Kabupaten Barito Utara Tahun 2019-2023	II-83
2.32	Capaian Akses Air Limbah Domestik di Kabupaten Barito Utara	II-85
2.33	Jumlah KK Dengan Akses Terhadap Fasilitas Sanitasi yang Layak (Jamban Sehat) Menurut Kecamatan dan Puskesmas di Kabupaten Barito Utara	II-88



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Tahun 2025-2029**

2.34	Kondisi Sanitasi Air Limbah Domestik Masyarakat di Kabupaten Barito Utara	II-90
2.35	Sarana dan Prasarana Pengolahan SPALD-Setempat di Kabupaten Barito Utara	II-91
2.36	Sarana dan Prasarana Pengelolaan SPALD-Setempat di Kabupaten Barito Utara	II-93
2.37	Capaian Akses Air Limbah Domestik di Kabupaten Barito Utara	II-98
2.38	Cakupan Layanan Eksisting Pengelolaan Air Limbah Kabupaten Barito Utara Tahun 2023.....	II-100
2.39	Bahaya Bencana di Kabupaten Barito Utara Tahun 2024	II-102
2.40	Skor dan Kelas Risiko Bencana di Kabupaten Barito Utara Tahun 2024	II-103
2.41	Kejadian Banjir di Kabupaten Barito Utara Tahun 2023	II-105
2.42	Potensi Bahaya Bencana Banjir Kabupaten Barito Utara.....	II-106
2.43	Potensi Penduduk Terpapar dan Kerugian Bencana Banjir Kabupaten Barito Utara	II-106
2.44	Tingkat Risiko Bencana Banjir di Kabupaten Barito Utara.....	II-106
2.45	Potensi Bahaya Bencana Banjir Bandang Kabupaten Barito Utara....	II-109
2.46	Potensi Penduduk Terpapar dan Kerugian Bencana Banjir Bandang Kabupaten Barito Utara	II-109
2.47	Tingkat Risiko Bencana Banjir Bandang di Kabupaten Barito Utara...	II-110
2.48	Potensi Bahaya Bencana Tanah Longsor Kabupaten Barito Utara	II-112
2.49	Potensi Penduduk Terpapar dan Kerugian Bencana Tanah Longsor Kabupaten Barito Utara	II-113
2.50	Tingkat Risiko Bencana Tanah Longsor di kabupaten Barito Utara....	II-113
2.51	Potensi Bahaya Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan Kabupaten Barito Utara	II-115
2.52	Potensi Penduduk Terpapar dan Kerugian Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan Kabupaten Barito Utara	II-116
2.53	Tingkat Risiko Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Barito Utara	II-116
2.54	Potensi Bahaya Bencana Cuaca Ekstrem Kabupaten Barito Utara....	II-118
2.55	Potensi Penduduk Terpapar dan Kerugian Bencana Cuaca Ekstrem Kabupaten Barito Utara	II-119
2.56	Tingkat Risiko Bencana Cuaca Ekstrem di Kabupaten Barito Utara	II-119
2.57	Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Barito Utara Tahun 2020-2025.....	II-123
2.58	Jumlah Penduduk Kabupaten Barito Utara Menurut Kelompok Umur Tahun 2020-2024	II-123
2.59	Rasio Jenis Kelamin Penduduk Kabupaten Barito Utara Tahun 2020-2024	II-125
2.60	Distribusi Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Barito Utara Tahun 2024	II-125
2.61	Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Barito Utara Tahun 2020-2024	II-126
2.62	Proyeksi Penduduk Kabupaten Barito Utara Menurut Kecamatan Tahun 2026-2030	II-127
2.63	Ringkasan Kondisi Demografi Hasi Proyeksi Penduduk Kabupaten Barito Utara Tahun 2026-2030.....	II-128
2.64	Kelompok MHA di Kabupaten Barito Utara	II-129



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Tahun 2025-2029**

2.65	Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Barito Utara Tahun 2020-2024	II-131
2.66	Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Barito Utara Tahun 2020-2024 (dalam Miliar rupiah)	II-133
2.67	Kondisi Kemiskinan di Kabupaten Barito Utara Tahun 2020-2024	II-137
2.68	Perbandingan Kondisi Kemiskinan di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 dan 2024.....	II-138
2.69	Dimensi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Barito Utara Tahun 2020-2024	II-141
2.70	Angka Kematian Ibu (AKI) di Kabupaten Barito Utara Tahun 2020-2024	II-145
2.71	Angka Kematian Bayi Kabupaten Barito Utara Tahun 2020-2024	II-148
2.72	Prevalensi Stunting Kabupaten Barito Utara Tahun 2020-2024	II-150
2.73	Temuan Kasus HIV/AIDS, TB dan Malaria	II-151
2.74	Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi, Diabetes Melitus dan Orang dengan Gangguan Jiwa di Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2022	II-154
2.75	Capaian Indikator dalam Aspek Pendidikan di Kabupaten Barito Utara Tahun 2020-2024	II-162
2.76	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Mandiri Kabupaten Barito Utara Tahun 2023.....	II-166
2.77	Capaian Indikator Kinerja di Bidang Sosial Kabupaten Barito Utara Tahun 2020-2024	II-166
2.78	Capaian Kinerja Indikator Terkait Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif di Kabupaten Barito Utara Tahun 2023	II-170
2.79	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Barito Utara Tahun 2019-2024	II-176
2.80	IPM Kabupaten Barito Utara Tahun 2019-2023 Berdasar Jenis Kelamin.....	II-177
2.81	Angka Ketergantungan Penduduk Kabupaten Barito Utara Tahun 2019-2024	II-179
2.82	Indikator IPTEK, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi Kabupaten Barito Utara	II-181
2.83	Nilai Indeks Inovasi Daerah (IDI) Kabupaten Barito Utara Tahun 2019-2024	II-183
2.84	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB Kabupaten Barito Utara Tahun 2019-2024	II-185
2.85	Rasio PDRB Sektor Industri Pengolahan Kabupaten Barito Utara Tahun 2019-2024	II-187
2.86	Rasio PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Kabupaten Barito Utara Tahun 2019-2024.....	II-189
2.87	Rasio Kewirausahaan Kabupaten Barito Utara Tahun 2019-2024	II-191
2.88	Kondisi Siber dan Kapasitas TIK Kabupaten Barito Utara Tahun 2019-2024	II-193
2.89	Aspek-Aspek dan Komponen Keberlanjutan Perekonomian	II-195
2.90	Kondisi Ekonomi Berkelanjutan di Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022	II-195
2.91	Capaian Bauran Energi Baru dan Energi Terbarukan di Provinsi Kalimantan Tengah.....	II-199



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Tahun 2025-2029**

2.92	Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	II-214
2.93	Perkembangan dan Struktur Perubahan Inventori Kabupaten Barito Utara, 2020-2024	II-218
2.94	<i>Incremental Capital Output Ratio</i> (ICOR) Kabupaten Barito Utara Untuk Tahun 2020-2024	II-221
2.95	Ekspor Kabupaten Barito Utara Tahun 2020-2024	II-224
2.96	Perkembangan Impor Kabupaten Barito Utara 2020-2024	II-229
2.97	Perkembangan Net Ekspor Kabupaten Barito Utara 2020-2024	II-231
2.98	Panjang Jalan Menurut Tingkat Kewenangan Pemerintahan di Kabupaten Barito Utara	II-235
2.99	Panjang Jalan Menurut Permukaan Jalan di Kabupaten Barito Utara (km) Tahun 2022-2024	II-236
2.100	Panjang Jalan Menurut Kondisi Jalan di Kabupaten Barito Utara Tahun 2022-2024	II-237
2.101	Karakteristik Rumah Tangga Menurut Beberapa Indikator Kualitas Perumahan di Kabupaten Barito Utara Tahun 2022-2024	II-240
2.102	Persentase Rumah Tangga Menurut Beberapa Fasilitas Perumahan di Kabupaten Barito Utara Tahun 2022-2024	II-242
2.103	Persentase Rumah Tangga Menurut Status Kepemilikan Rumah Tinggal di Kabupaten Barito Utara Tahun 2022-2024	II-244
2.104	Status Desa di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022-2024	II-247
2.105	Rekapitulasi Status IDM Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024	II-248
2.106	Status IDM Desa di Kabupaten Barito Utara per Kecamatan Tahun 2024	II-252
2.107	PDRB Atas Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Kabupaten Barito Utara, 2020-2024 (Miliar Rp)	II-262
2.108	PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran Kabupaten Barito Utara Tahun 2020-2024	II-264
2.109	Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Kabupaten Barito Utara Tahun 2020-2024	II-266
2.110	Laju Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 Menurut Pengeluaran Kabupaten Barito Utara Tahun 2020-2024	II-268
2.111	Indeks Implisit PDRB Menurut Pengeluaran Kabupaten Barito Utara Tahun 2020-2024	II-270
2.112	Sumber Pertumbuhan PDRB Menurut Pengeluaran Kabupaten Barito, 2020-2024	II-272
2.113	PDRB Kabupaten Barito Utara Menurut Komponen Pengeluaran Tahun 2024	II-273
2.114	PDRB dan PDRB per Kapita Kabupaten Barito Utara Tahun 2020-2024	II-275
2.115	Perkembangan Komponen Konsumsi Rumah Tangga Kabupaten Barito Utara Tahun 2020-2024	II-277
2.116	Struktur Komponen Konsumsi Rumah Tangga Kabupaten Barito Utara Tahun 2020-2024	II-279
2.117	Pertumbuhan Riil Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kabupaten Barito Utara Tahun 2020-2024	II-281
2.118	Pertumbuhan Implisit (Indeks Harga) Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kabupaten Barito Utara Tahun 2020-2024	II-284
2.119	Tingkat Pelanggaran Ketertiban, Ketentraman, dan Keindahan Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023	II-289



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Tahun 2025-2029**

2.120	Kategori Penilaian Capaian Aksi HAM	II-292
2.121	Volume Penduduk Merasa Aman Berjalan Kaki di Lingkungan Tempat Tinggal Tahun 2020-2024	II-292
2.122	Capaian IDSD Kabupaten Barito Utara Tahun 2022-2024	II-293
2.123	Capaian IDSD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024	II-295
2.124	Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Barito Utara Tahun 2019-2024	II-297
2.125	Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2019-2024	II-299
2.126	Rasio Pajak Daerah Terhadap PDRB Kabupaten Barito Utara Tahun 2019-2024	II-299
2.127	Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2019-2024	II-303
2.128	Pembiayaan Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2019-2024	II-308
2.129	Neraca Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Utara Tahun 2019-2024	II-311
2.130	Proyeksi Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2025-2029 (Miliar Rupiah)	II-314
2.131	Perhitungan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Barito Utara	II-316
2.132	Perhitungan Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Barito Utara	II-318
2.133	Perhitungan Rasio Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2019-2024	II-319
2.134	Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal Kabupaten Barito Utara Tahun 2019-2024	II-321
2.135	Rasio Belanja Operasi Terhadap Total Belanja Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2019-2024	II-322
2.136	Rasio Belanja Modal Terhadap Total Belanja Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2019-2024	II-324
2.137	Indikator Permasalahan Infrastruktur Wilayah di Kabupaten Barito Utara	II-329
2.138	Permasalahan Infrastruktur Wilayah Kabupaten Barito Utara	II-330
2.139	Masalah dan Akar Masalah Pengelolaan Sampah	II-332
2.140	Masalah dan Akar Masalah Infrastruktur Sumber Daya Air	II-333
2.141	Masalah dan Akar Masalah Dokumen Perencanaan Tata Ruang	II-334
2.142	Masalah dan Akar Masalah Bidang Konektivitas dan Aksesibilitas	II-335
2.143	Rekapitulasi Permasalahan Infrastruktur Wilayah di Kabupaten Barito Utara	II-336
2.144	Masalah dan Akar Masalah Pendidikan	II-341
2.145	Masalah dan Akar Masalah Ketahanan Budaya dan Sosial Kabupaten Barito Utara	II-346
2.146	Masalah dan Akar Masalah Kesehatan Kabupaten Barito Utara	II-349
2.147	Masalah dan Akar Masalah Infrastruktur Dasar	II-351
2.148	Masalah dan Akar Masalah Industri Perdagangan Koperasi dan UMKM	II-352
2.149	Masalah dan Akar Masalah Kegiatan Pariwisata	II-353
2.150	Masalah dan akar Masalah Kualitas SDM dan Ketenagakerjaan	II-354
2.151	Masalah dan Akar Masalah Investasi	II-355
2.152	Masalah dan Akar Masalah Pemerataan dan Kesejahteraan Sosial ..	II-356



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Tahun 2025-2029**

2.153	Masalah dan Akar Masalah Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Berbasis Teknologi Informasi di Kabupaten Barito Utara	II-357
2.154	Permasalahan Lingkungan Hidup Utama Kabupaten Barito Utara	II-362
2.155	Kondisi Aktual Permasalahan Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Utara Tahun 2024.....	II-362
2.156	Masalah dan Akar Masalah Kualitas Lingkungan Hidup.....	II-365
2.157	Masalah dan Akar Masalah Pertambangan	II-366
2.158	Masalah dan Akar Masalah Perkebunan dan Industri Kelapa Sawit...	II-366
2.159	Permasalahan Lingkungan Hidup di Kabupaten Barito Utara	II-371
2.160	Permasalahan, Indikator, dan Dampak Utama Permasalahan Lingkungan Kabupaten Barito Utara	II-372
2.161	Isu Tantangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029	II-378
2.162	Isu Strategis Daerah Kabupaten Barito Utara	II-391
2.163	Kondisi Jalan Menurut Kondisi Jalan	II-393
2.164	Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan.....	II-393
2.165	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Utara Tahun 2021-2024	II-396
2.166	Indikator Sinkronisasi Pusat-Daerah Bidang Kesehatan	II-400
2.167	Tujuan dan Sasaran Peningkatan dan Pemerataan Ekonomi, Berkurangnya Kesenjangan, dan Kemiskinan di Kabupaten Barito Utara.....	II-403
2.168	Program Prioritas Peningkatan dan Pemerataan Ekonomi Kabupaten Barito Utara Tahun 2025-2029.....	II-404
2.169	Hasil yang Diharapkan Pelaksanaan Misi 4 Kabupaten Barito Utara 2025-2029	II-406
2.170	Tujuan dan Langkah Strategis dalam Mewujudkan Pendidikan Berkualitas.....	II-409
2.171	Daftar Desa yang Telah BABS NOL di Kabupaten Barito Utara	II-414
2.172	Matriks Evaluasi Isu Strategis Pemenuhan Air Bersih dan Sanitasi Layak Kabupaten Barito Utara	II-414
2.173	Cakupan Layanan SPM Kabupaten Barito Utara	II-417
2.174	Nilai Indeks SPBE, Domain, dan Aspek Kabupaten Barito Utara Tahun 2024	II-424
2.175	Keterkaitan Isu Strategis Daerah dengan Misi Kepala Daerah.....	II-428
3.1	Keterkaitan Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Barito Utara dengan RPJMN tahun 2025-2029 dan RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2029	III-2
3.2	Keterkaitan Misi Bupati dengan Isu Strategis.....	III-17
3.3	Matriks Tujuan,Sasaran Indikator dan Target Indikator Pembangunan 5 Tahun Kabupaten Barito Utara	III-20
3.4	Visi, Misi, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan	III-32
3.5	Kawasan Strategis Fokus RPJMD 2025-2029 Kabupaten Barito Utara	III-74
3.6	Arah Kebijakan RPJMD 2025-2029 Kabupaten Barito Utara.....	III-74
3.7	Hubungan RTRW Kabupaten Barito Utara dengan Misi RPJMD Kabupaten Barito Utara Tahun 2025-2029.....	III-75
4.1	Program Perangkat Daerah	IV-2
4.2	Proyeksi Rincian Anggaran per Urusan per Program Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2026	IV-58



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Tahun 2025-2029**

4.3	Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Barito Utara Tahun 2025-2029	IV-69
4.4	Indikator Kinerja Daerah (IKD) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kabupaten Barito Utara Tahun 2025-2029.....	IV-76
5.1	Skema Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi RPJMD Tahun 2025-2029	V-4
5.2	Jenis Forum Monitoring dan Evaluasi RPJMD Tahun 2025-2029	V-5



DAFTAR PETA





DAFTAR PETA

No	Judul Peta	Halaman
1.	Batas Administrasi Kabupaten Barito Utara	II-4
2.	Topografi Kabupaten Barito Utara	II-5
3.	Kelerengan Kabupaten Barito Utara	II-6
4.	Jenis Tanah Kabupaten Barito Utara	II-7
5.	Bentang Alam Kabupaten Barito Utara	II-12
6.	Formasi Geologi Wilayah Kabupaten Barito Utara	II-13
7.	Daerah Aliran Sungai (DAS) Kabupaten Barito Utara	II-14
8.	Cekungan Air Tanah (CAT Kabupaten Barito Utara	II-15
9.	Curah Hujan Kabupaten Barito Utara.....	II-17
10.	Lahan Pertanian di Kabupaten Barito Utara.....	II-23
11.	Lahan Pertambangan di Kabupaten Barito Utara.....	II-24
12.	Kawasan Hutan Kabupaten Barito Utara	II-28
13.	Perizinan Berusaha Pengelolaan Hutan Alam (PBPHA) Barito Utara .	II-29
14.	Perizinan Berusaha Pengelolaan Hutan Tanaman (PBPHT) Barito Utara.....	II-30
15.	Jasa Ekosistem Penyedia Air Bersih.....	II-35
16.	Jasa Ekosistem Penyedia Pangan.....	II-36
17.	Jasa Ekosistem Penyedia Serat	II-41
18.	Jasa Ekosistem Penyedia Bahan Bakar	II-42
19.	Jasa Ekosistem Penyedia Sumber Daya Genetik	II-43
20.	Jasa Ekosistem Pengaturan Tata Aliran Air dan Banjir	II-44
21.	Jasa Ekosistem Pengaturan Pencegahan dan perlindungan Bencana	II-45
22.	Jasa Ekosistem Pengaturan Pemeliharaan Kualitas udara	II-46
23.	Jasa Ekosistem Pengaturan Pengolahan dan Penguraian Limbah	II-47
24.	Jasa Ekosistem Budaya Tempat Tinggal dan Ruang	II-50
25.	Jasa Ekosistem Budaya Ekowisata	II-51
26.	Jasa Ekosistem Budaya Estetika	II-52
27.	Jasa Ekosistem Pendukung Pemeliharaan Kesuburan Tanah.....	II-53
28.	Jasa Ekosistem Pendukung Siklus Hara.....	II-54
29.	Jasa Ekosistem Pendukung Produksi Primer.....	II-55



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Tahun 2025-2029**

30.	Sebaran Infrastruktur SPALD Kabupaten Barito Utara.....	II-97
31.	Risiko Bencana Banjir Kabupaten Barito Utara.....	II-108
32.	Risiko Bencana Banjir Bandang Kabupaten Barito Utara	II-111
33.	Risiko Bencana Tanah Longsor Kabupaten Barito Utara	II-114
34.	Risiko Kebakaran Hutan dan Lahan Kabupaten Barito Utara.....	II-117
35.	Risiko Bencana Cuaca Ekstrem Kabupaten Barito Utara.....	II-120



BAB I PENDAHULUAN



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kabupaten Barito Utara akan semakin berperan penting dalam pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah ke depannya. Hal tersebut tidak lepas dari posisi Kabupaten Barito Utara yang berada pada paling timur provinsi dan berbatasan langsung dengan Kalimantan Timur sebagai Ibukota Negara Nusantara (IKN), sehingga potensi pengembangan wilayah sangat terbuka lebar baik dalam penyediaan kebutuhan pokok maupun salah satu destinasi yang menarik bagi tujuan investasi.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah yang memuat arah tema pembangunan berdasarkan zonasi, maka Kabupaten Barito Utara berfokus pada arah pembangunan pengembangan lumbung energi baru dan terbarukan Kalimantan, dan wilayah mitra dari kegiatan pembangunan IKN di Provinsi Kalimantan Timur. Lokasi Kabupaten Barito Utara yang berbatasan langsung dengan Provinsi Kalimantan Timur menjadikan daerah ini berpotensi menjadi wilayah mitra pembangunan IKN. Di samping itu, kabupaten ini juga diproyeksikan memiliki Kawasan Sentra Perikanan terpadu hulu-hilir sehingga dapat mendukung penyediaan sumber pangan dari perikanan untuk IKN. Di sisi lain, Kabupaten Barito Utara dan Kabupaten Murung Raya memiliki potensi energi baru dan terbarukan (EBT) yang besar berupa energi air dan surya, tetapi masih belum tergali secara optimal.

Mencermati potensi pengembangan wilayah yang termuat dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah, maka diperlukan keselarasan dengan RPJMD Kabupaten Barito Utara. RPJMD merupakan tindak lanjut atas ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Barito Utara Tahun 2025-2045, sehingga pemerintah daerah berkewajiban untuk menyusun RPJMD Tahun 2025-2029.

Pembangunan jangka menengah Kabupaten Barito Utara periode tahun 2025-2029 merupakan tahap pertama dari pelaksanaan RPJPD Kabupaten Barito Utara Tahun 2025-2045. Dengan dilantiknya Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Utara periode 2025-2029 pada tanggal 10 Oktober 2025, menjadi awal pelaksanaan pembangunan jangka menengah tahun 2025-2029. Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014



tentang Pemerintah Daerah, maka Kabupaten Barito Utara berkewajiban untuk menyusun dan menetapkan RPJMD Kabupaten Barito Utara Tahun 2025-2029 paling lambat 6 (enam) bulan setelah Bupati dan Wakil Bupati dilantik.

RPJMD merupakan penjabaran visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Penjabaran visi dan misi ini juga berpedoman pada dokumen RPJPD Kabupaten Barito Utara Tahun 2025-2045 yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2025-2045. Di dalamnya terdapat periodisasi pembangunan lima tahunan, yang dimulai pada tahun 2025-2029 dengan tema besar berkenaan dengan MAJU sebagai fondasi awal. Kata MAJU ini merupakan turunan daripada visi RPJPD Barito Utara yaitu MAJU, ADIL, TERARAH DAN BERKELANJUTAN. Periode ini merupakan periode dimana pembangunan Barito Utara diarahkan sudah berbasis pada kekuatan ekonomi hijau yang berorientasi ke depan dalam rangka menyelesaikan permasalahan pembangunan, kapasitas manusia yang meningkat dan semakin unggul. Selain itu, pada periode ini ketergantungan terhadap sumberdaya alam ekstraktif (pertambangan dan penggalian) mulai dikurangi.

RPJMD disusun selain berpedoman pada RPJPD Kabupaten Barito Utara Tahun 2025-2045 juga berpedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Barito Utara, memperhatikan RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2029 dan RPJMN Tahun 2025-2029, serta dokumen perencanaan lainnya. Dokumen RPJMD Kabupaten Barito Utara Tahun 2025-2029 memuat 5 (lima) bab meliputi Bab I Pendahuluan; Bab II Gambaran Umum Daerah; Bab III Visi, Misi dan Program Prioritas Pembangunan Daerah; Bab IV Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan Bab V Penutup.

Tata cara penyusunan RPJMD dilakukan sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Penyusunan RPJMD Kabupaten Barito Utara Tahun 2025-2029 dilakukan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029, meliputi:

- a. Pendekatan Teknokratik: dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah.
- b. Pendekatan Partisipatif: dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
- c. Pendekatan Politis: dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih kedalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD.
- d. Pendekatan Atas-Bawah dan Bawah-Atas: merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan.
- e. Pendekatan Holistik-Tematik: dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya.
- f. Pendekatan Integratif: dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan kedalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan Daerah.
- g. Pendekatan Spasial: dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.

Substansi RPJMD juga diperkaya dengan hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Tahun 2025-2029. Melalui hasil KLHS RPJMD, perencanaan pembangunan jangka menengah daerah dapat diintegrasikan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. Rencana pembangunan disusun dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, dan rekomendasi bagi pelaksanaan pembangunan 5 (lima) tahun ke depan. Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah disusun secara simultan dan berpedoman pada RPJMD. Sebagian substansi Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 merupakan bagian dari RPJMD. Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan jangka menengah. Selanjutnya, RPJMD yang telah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah akan menjadi pedoman bagi penyempurnaan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Utara.



RPJMD Kabupaten Barito Utara Tahun 2025-2029 diharapkan menjadi arahan pembangunan 5 (lima) tahun ke depan dalam upaya mendukung tercapainya visi pembangunan yaitu demi "TERWUJUDNYA KABUPATEN BARITO UTARA YANG MAJU, TUMBUH PESAT, SEJAHTERA, DAN BERKEADILAN". Visi tersebut akan dioperasionalkan dalam RPJMD sehingga dapat menjadi pedoman dan arah pembangunan selama 5 (lima) tahun. Mengingat pentingnya dokumen RPJMD Kabupaten Barito Utara Tahun 2025-2029, maka diharapkan seluruh entitas Kabupaten Barito Utara mampu berkontribusi dalam melaksanakan 7 misi Kepala Daerah yaitu:

- a. Mewujudkan sumber daya manusia yang religius, berakhlak, sehat, cerdas, produktif, berwawasan maju, terampil, mampu bersaing, kreatif, serta memanfaatkan kemajuan dan globalisasi teknologi informasi;
- b. Meningkatkan pembangunan infrastruktur secara adil dan merata dalam rangka menunjang peningkatan kualitas pembangunan perekonomian, kesehatan, pendidikan, pelayanan masyarakat, pemerintahan, kebudayaan, pemuda, dan olahraga;
- c. Mewujudkan peningkatan ekonomi masyarakat melalui pembangunan dan pemberdayaan pertanian rakyat secara terpadu, terarah dan berkelanjutan melalui usaha pertanian pangan, perikanan, peternakan, perkebunan, dan hortikultura untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan peningkatan produksi daerah;
- d. Meningkatkan produktivitas perekonomian melalui optimalisasi sektor-sektor potensial: kehutanan, perkebunan, pertambangan dan energi dalam memanfaatkan sumber daya alam secara berkeadilan bagi masyarakat dan dunia usaha serta seimbang dengan pelestariannya;
- e. Menciptakan pelayanan pemerintahan yang baik, mengayomi, bertanggung jawab, berkeadilan dengan didukung oleh aparatur pemerintah yang bersih, jujur, profesional, dan sejahtera;
- f. Meningkatkan peran serta lembaga adat dalam pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan untuk melestarikan nilai-nilai kearifan lokal, budaya, kesenian daerah, dan nasional; dan
- g. Meningkatkan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, fakir miskin, disabilitas, orang terlantar, dan lanjut usia (lansia).

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan RPJMD Kabupaten Barito Utara Tahun 2025-2029 berlandaskan pada beberapa dasar hukum, yaitu sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4256);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
7. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);

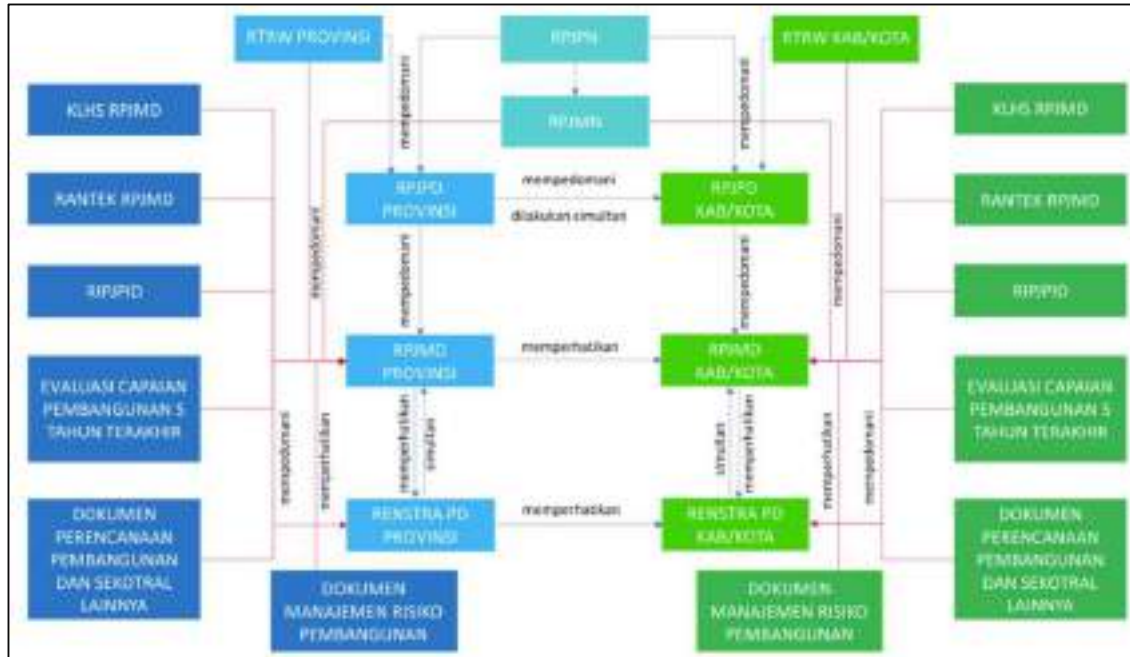
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
10. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
11. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
18. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 533);
19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 5);
20. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2029;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Barito Utara Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 Nomor 1);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Utara Tahun 2019-2039 (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 3);
23. 22. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran (Lembaran Daerah Tahun 2024 Nomor 4);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara tentang KLHS RPJMD Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Tahun)

1.3. Hubungan Antara Dokumen

Dua landasan hukum yang menjadi dasar untuk penyusunan perencanaan pembangunan pusat dan daerah adalah Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dicabut sebagian dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Tujuan SPPN adalah untuk menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi, baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah. Secara hirarki hubungan antara dokumen perencanaan pembangunan dari level pusat sampai provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana disajikan pada Gambar 1.1.



Gambar 1.1. Keterkaitan RPJMD dengan Dokumen Pembangunan Daerah.

Sumber: Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 2025.

1.3.1. Hubungan RPJMD Kabupaten Barito Utara dengan RPJPD Kabupaten Barito Utara

Dokumen RPJMD Kabupaten Barito Utara Tahun 2025-2029 disusun dengan berpedoman pada kebijakan pembangunan tahap 1 RPJPD Kabupaten Barito Utara Tahun 2025-2045. Langkah dalam menjadikan RPJPD sebagai pedoman dalam penyusunan RPJMD dilakukan dengan cara menyelaraskan sasaran, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan jangka menengah daerah dengan arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah.

1.3.2. Hubungan RPJMD Kabupaten Barito Utara dengan RTRW Kabupaten Barito Utara

RPJMD dan RTRW merupakan perencanaan non spasial dan spasial yang di dalamnya merumuskan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan dalam jangka 5 tahun yang ditetapkan melalui peraturan daerah. RPJMD Kabupaten Barito Utara adalah pedoman



penyelenggaraan pembangunan daerah dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan sampai tahun 2029. Adapun RTRW merupakan pedoman dalam perencanaan tata letak, pemanfaatan, dan pengendalian ruang wilayah kabupaten secara spasial agar dapat menjamin kelancaran pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan. Jadi, sinkronisasi dan sinerginitas substansi maupun implementasi kedua produk tersebut menjadi syarat utama yang tidak boleh bertentangan.

1.3.3. Hubungan RPJMD Kabupaten Barito Utara dengan RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah

Mandat pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang telah diregionalisasikan melalui RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah harus dapat diimplementasikan pada tataran Kabupaten/Kota. Untuk itu, dalam perumusan visi, misi, tujuan, target capaian, arah kebijakan dan sasaran strategis dalam RPJMD Kabupaten Barito Utara harus tetap berpedoman pada visi, misi, tujuan, target capaian, arah kebijakan dan sasaran strategis yang telah dirumuskan dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah.

1.3.4. Hubungan RPJMD Kabupaten Barito Utara dengan RPJMN

Penyusunan RPJMD Kabupaten Barito Utara senantiasa berpedoman pada visi, misi, tujuan, target, dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam RPJMN Tahun 2025-2029, termasuk juga penentuan periode waktu dan langkah-langkah pembangunan dalam interval lima tahun. RPJMD kabupaten Barito Utara disusun dengan memperhatikan keselarasan dengan RPJMN.

Langkah dalam menjadikan RPJMN sebagai pedoman dalam penyusunan RPJMD dilakukan dengan cara menyelaraskan sasaran, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan jangka menengah daerah dengan Asta Cita dan program prioritas nasional dengan memperhatikan kewenangan, kondisi, dan karakteristik daerah.

1.3.5. Hubungan RPJMD Kabupaten Barito Utara dengan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara

Penyusunan RPJMD Kabupaten Barito Utara dilakukan secara simultan dengan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Rancangan Awal RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah akan disusun bersamaan setelah pelantikan kepala daerah. Pada saat RPJMD ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, maka Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah disempurnakan sesuai dengan Peraturan Daerah tentang RPJMD.



1.3.6. Hubungan RPJMD Kabupaten Barito Utara dengan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Dokumen Perencanaan Pembangunan Sektoral Lainnya

RPJMD merupakan pedoman pembangunan jangka menengah yang akan dijabarkan ke dalam perencanaan tahunan. Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahun akan berpedoman pada RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah. Penyusunan RPJMD juga memperhatikan dokumen perencanaan pembangunan dan sektoral lainnya.

1.4. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan RPJMD Kabupaten Barito Utara Tahun 2025-2029 adalah memberikan pedoman pembangunan jangka menengah sebagai penjabaran visi, misi, dan program prioritas Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Utara untuk dapat dilaksanakan oleh seluruh pemangku kepentingan.

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penyusunan RPJMD Kabupaten Barito Utara Tahun 2025-2029, yaitu:

1. Teridentifikasinya gambaran kondisi daerah berdasarkan kinerja pembangunan beberapa tahun terakhir.
2. Teridentifikasinya permasalahan dan isu strategis daerah.
3. Tersedianya proyeksi kemampuan keuangan daerah untuk pembangunan jangka menengah.
4. Ditetapkannya tujuan dan sasaran sebagai penjabaran visi dan misi RPJMD.
5. Ditetapkannya strategi, arah kebijakan, dan program prioritas pembangunan daerah, serta program perangkat daerah.
6. Ditetapkannya Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD).
7. Terciptanya sinergi perencanaan kabupaten dengan provinsi dan nasional.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan RPJMD Kabupaten Barito Utara Tahun 2025-2029 terbagi atas 5 (lima) bab yakni sebagai berikut:

- a. **Bab I Pendahuluan:** memuat latar belakang, dasar hukum, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, serta sistematika penyajian RPJMD Tahun 2025-2029.

- b. **Bab II Gambaran Umum Daerah:** memuat kondisi daerah yang didukung dengan data dan informasi yang disajikan dalam 4 (empat) aspek yaitu Aspek Geografi dan Demografi; Aspek Kesejahteraan Masyarakat; Aspek Daya Saing; dan Aspek Pelayanan Umum. Selain itu memuat kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan kerjasama daerah. Pada bab ini juga memuat gambaran keuangan daerah yakni kondisi keuangan daerah selama beberapa tahun terakhir, dan proyeksi kemampuan keuangan untuk 5 (lima) tahun kedepan. Selanjutnya, di bab ini juga menyajikan hasil identifikasi permasalahan pembangunan dan rumusan isu strategis.
- c. **Bab III Visi, Misi, dan Program Prioritas Pembangunan Daerah:** bab ini memuat visi dan misi kepala daerah yang dijabarkan ke dalam tujuan dan sasaran disertai indikator kinerja dan targetnya per tahun. Dalam mencapai misi, tujuan dan sasaran maka ditetapkan strategi, arah kebijakan, dan program prioritas pembangunan daerah. Selanjutnya, guna mewujudkan sinergi pembangunan, maka pada bab ini dimuat dukungan pemerintah daerah terhadap program prioritas nasional.
- d. **Bab IV Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah:** memuat program pembangunan daerah, indikator kinerja, target dan pagu anggaran per tahun. Lebih lanjut, pada bab ini memuat kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang menyajikan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD).
- e. **Bab V Penutup:** memuat kesimpulan, kaidah pelaksanaan RPJMD, serta pedoman transisi pada saat RPJMD akan berakhir.



BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH



BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1. Posisi dan Peran Strategis Daerah

2.1.1.1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintah dan Pulau, Kabupaten Barito Utara memiliki luas wilayah 9.984,808 km² atau 6,51% dari luas wilayah Provinsi Kalimantan Tengah. Angka ini sedikit lebih kecil jika dibandingkan dengan luas berdasarkan data BPS (Kabupaten Barito Utara dalam angka Tahun 2023, dimana Kabupaten Barito Utara memiliki luas ± 10.152,25 km². Sedangkan berdasarkan dari data spasial Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Barito Utara, luas Kabupaten Barito Utara 10.097,61 km².

Batas wilayah administrative Kabupaten Barito Utara yaitu:

- Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Mahakam Hulu, dan Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur.
- Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur.
- Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah, dan Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan.
- Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah.

Secara administrasi Kabupaten Barito Utara terbagi menjadi 9 (sembilan) kecamatan, dengan 93 desa dan 10 kelurahan. Kecamatan yang memiliki wilayah terluas adalah Kecamatan Lahei dengan luas wilayah 3.042,923 km², atau 30,47% terhadap luas Kabupaten Barito Utara, kemudian Kecamatan Gunung Purei seluas 1.509,618 km² atau 15,12% dari luas Kabupaten Barito Utara, sedangkan kecamatan yang memiliki luas wilayah terkecil adalah Kecamatan Lahei Barat yaitu hanya 339,581 km² atau 3,40 % dari luas Kabupaten

Barito Utara. Secara terperinci luas wilayah masing-masing kecamatan dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1. Luas Daerah Perkecamatan Kabupaten Barito Utara

Kecamatan	Ibukota	Luas (km ²)	Kelurahan	Desa	Luas Wilayah Terhadap Luas Kabupaten%
Montallat	Tumpung Laung	683,841	4	6	6,85
Gunung Timang	Kandui	1.038,22	0	16	10,4
Gunung Purei	Lampeong	1.509,62	0	11	15,12
Teweh Timur	Benangin	945,84	0	12	9,47
Teweh Tengah	Muara Teweh	1.137,14	2	8	11,39
Lahei	Hajak	3.042,92	2	11	30,47
Teweh Baru	Trahean	805,001	2	8	8,06
Teweh Selatan	Lahei	482,641	0	10	4,83
Lahei Barat	Benao	339,581	0	11	3,4
Barito Utara	Muara Teweh	9.984,81	10	93	100

Sumber: Keputusan Menteri Dalam Negeri 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintah dan Pulau.

2.1.1.2. Letak dan Kondisi Geografis

Kabupaten Barito Utara adalah salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah yang berada di tengah-tengah Pulau Kalimantan dan terletak di daerah dekat khatulistiwa yaitu pada posisi 114°27'13,060"-115°9'9,884" Bujur Timur dan 0°2'43,564"-1°27'41,684" Lintang Selatan.

Topografi dan morfologi wilayah Kabupaten Barito Utara berupa dataran agak rendah yang membentang dari sebelah selatan ke timur, sedangkan ke arah utara merupakan daerah lipatan, patahan yang dijajari oleh pegunungan Muller/Schwaner. Berdasarkan analisis data DEMNAS (BIG, 2020), wilayah dengan ketinggian kurang dari 50 meter berada di bagian wilayah yang dilalui Sungai Barito terutama di Kecamatan Teweh Selatan, Kecamatan Teweh Baru, Kecamatan Montallat, Kecamatan Lahei Barat, dan sebagian Kecamatan Lahei, serta Kecamatan Gunung Timang. Selebihnya berada pada ketinggian dominan pada *interval* 100-250 meter yang tersebar secara dominan di wilayah utara Kecamatan Lahei, Kecamatan Teweh Timur, Kecamatan Gunung Timang, dan bagian barat Kecamatan Teweh Tengah, serta Gunung Purei. Wilayah dengan ketinggian lebih dari 500 meter hanya ditemukan di Kecamatan Gunung Purei.

Wilayah dengan kemiringan/kelerengan 0-8% (datar) meliputi hampir seluruh wilayah Kabupaten Barito Utara dengan luas 86,63%. Selanjutnya dengan kelerengan 8%-15%

(landai) seluas 8,26% yang secara dominan tersebar di Kecamatan Gunung Purei dan Kecamatan Teweh Tengah.

Tabel 2.2. Luas dan Persentase Kemiringan Wilayah Kabupaten Barito Utara

Kemiringan	Klasifikasi	Luas (ha)	Persentase (%)
0 % - 8 %	Datar	869.131,16	87,05
8 % - 15 %	Landai	79.250,68	7,94
15 % - 25 %	Agak Curam	33.766,09	3,38
25 % - 45 %	Curam	14.244,30	1,43
> 45 %	Sangat Curam	2.088,57	0,21
Total		998.480,8	100

Sumber: Analisis Data DEMNAS, BIG Tahun 2020.

Jenis tanah di Kabupaten Barito Utara terdiri atas jenis tanah alluvial yang terdapat di aliran sungai, regosol yang menyebar di bagian selatan wilayah kabupaten Barito Utara, podsolik merah kuning dengan induk batu-batuan dan batuan beku terdapat di wilayah perbukitan, kambisol dan okisol (laterit) terdapat di wilayah bagian atas dan merupakan jenis tanah yang paling luas dengan kondisi bergelombang dan berbukit.

Jenis tanah yang dominan di Kabupaten Barito Utara adalah tanah podsolik (72,67%), jenis tanah ini merupakan jenis tanah mineral tua yang terbentuk karena curah hujan yang tinggi dan suhu yang sangat rendah. Jenis tanah ini umumnya berwarna kekuningan dan kemerahan. Jenis tanah lain yang mendominasi di Kabupaten Barito Utara yakni jenis tanah podsolik merah-kuning (PMK) yang hampir menempati 12,70% wilayah Kabupaten Barito Utara, tanah jenis merupakan salah satu jenis tanah mineral tua dengan ciri warna kekuningan atau kemerahan. Warna kuning dan merah disebabkan karena longgokan besi dan aluminum yang teroksidasi. Mineral lempung penyusunnya didominasi oleh silikat. Sebaran jenis tanah di Kabupaten Barito Utara disajikan pada Tabel 2.3.

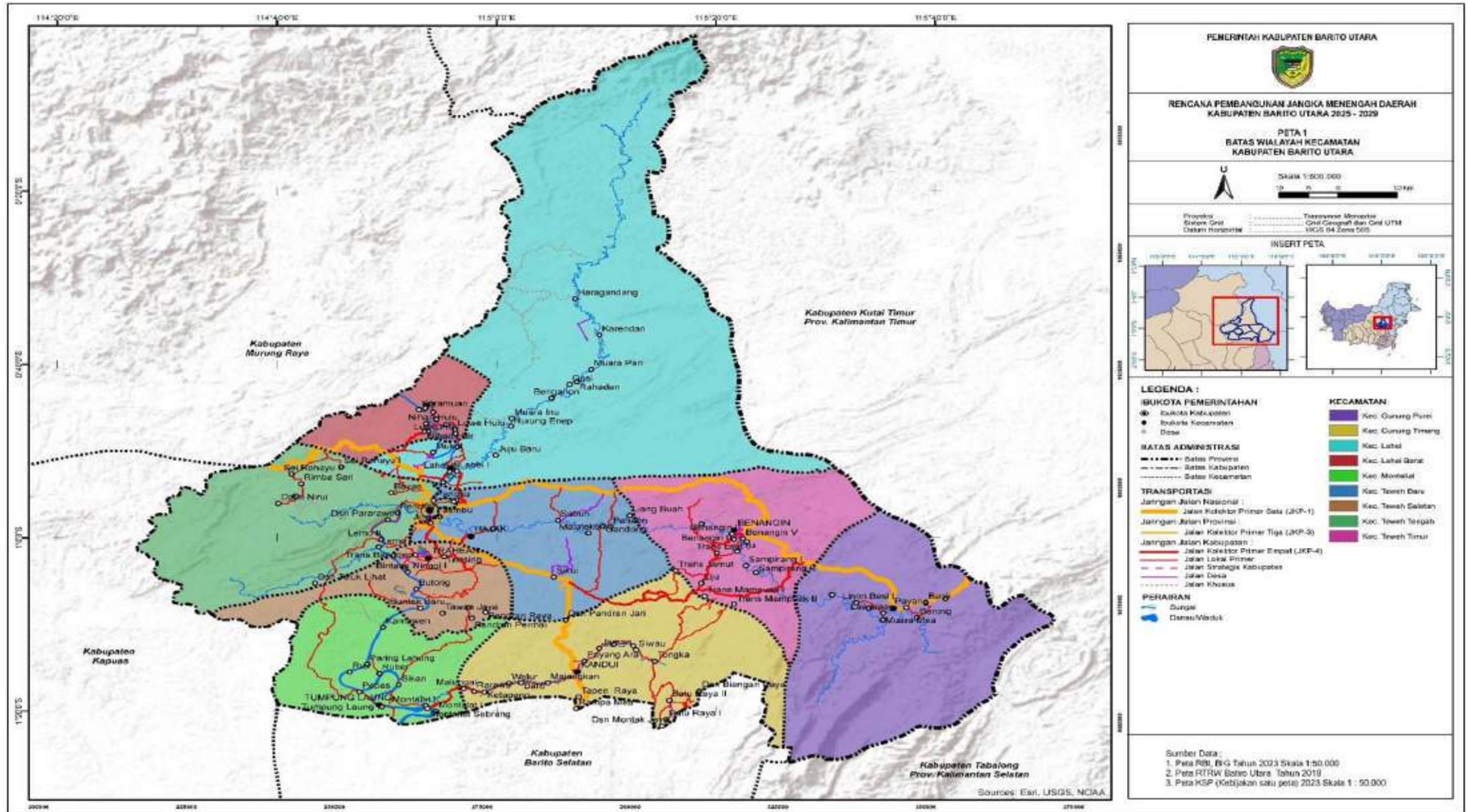
Tabel 2.3. Luas dan Jenis Tanah di Kabupaten Barito Utara

Jenis Tanah	Luas (Ha)	Persentase
Aluvial	4.662,34	0,47
Glei Humus	37.520,60	3,76
Latosol	5.001,35	0,50
Organosol	11953,17	1,20
Podsol	85.653,85	8,58
Podsolik	721.276,46	72,24
Podsolik Merah Kuning	128.442,81	12,86
Renzina	3.970,23	0,40
Total	998.480,80	100,00

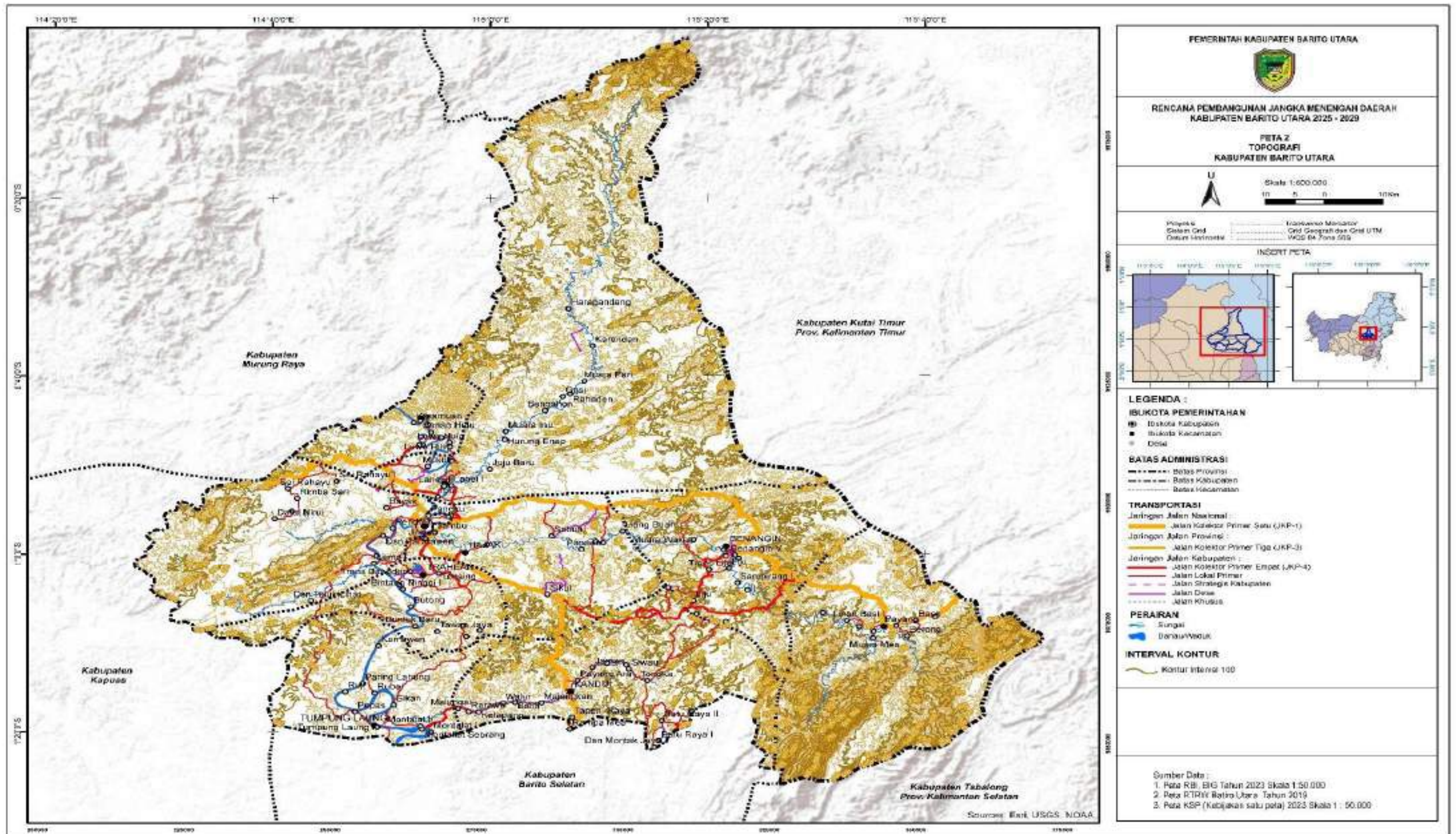
Sumber: Analisis Data Peta Tanah, Webgis Pertanian Tahun 2020.



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Tahun 2025-2029



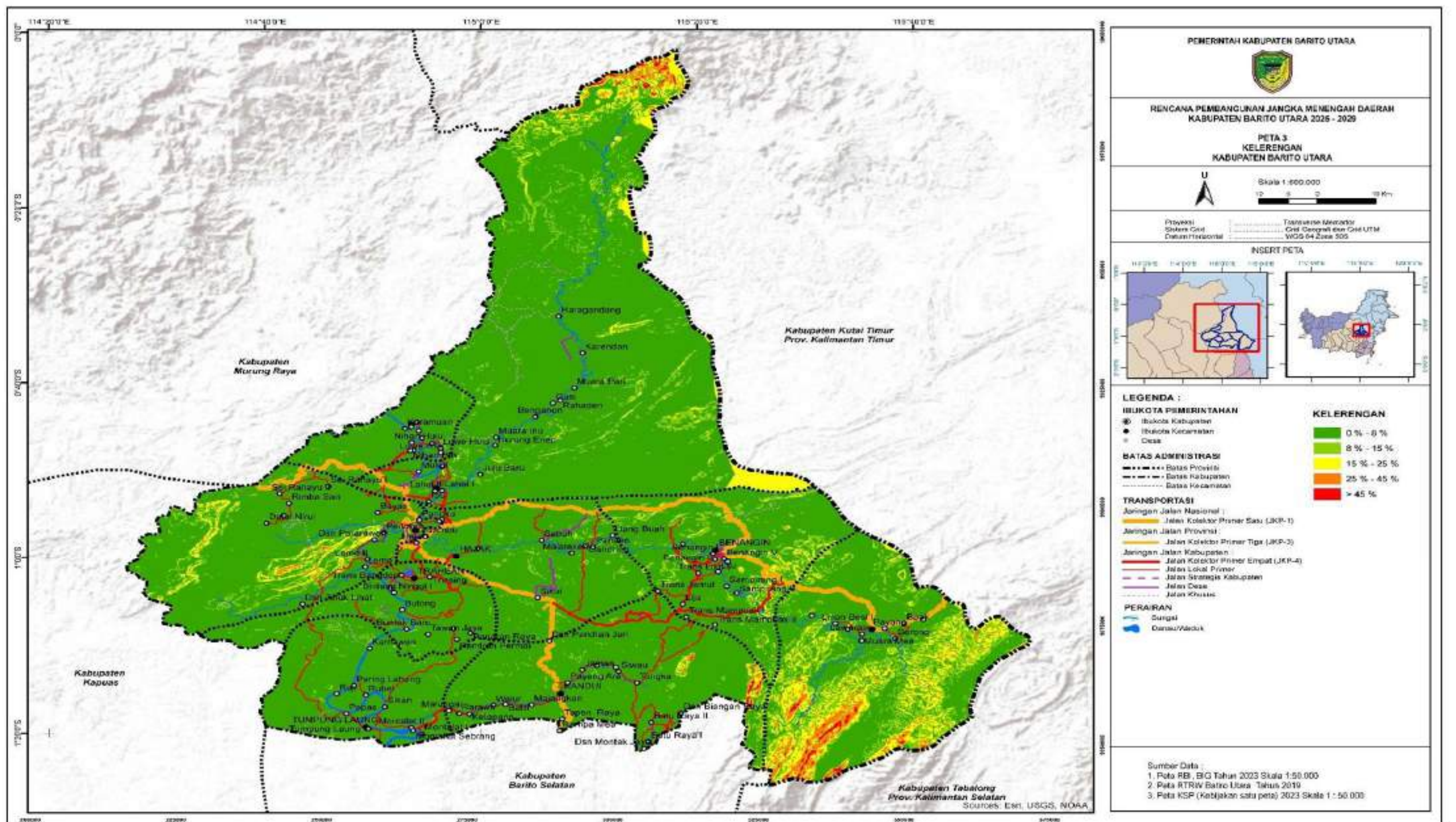
Peta 1. Batas Administrasi Kabupaten Barito Utara.



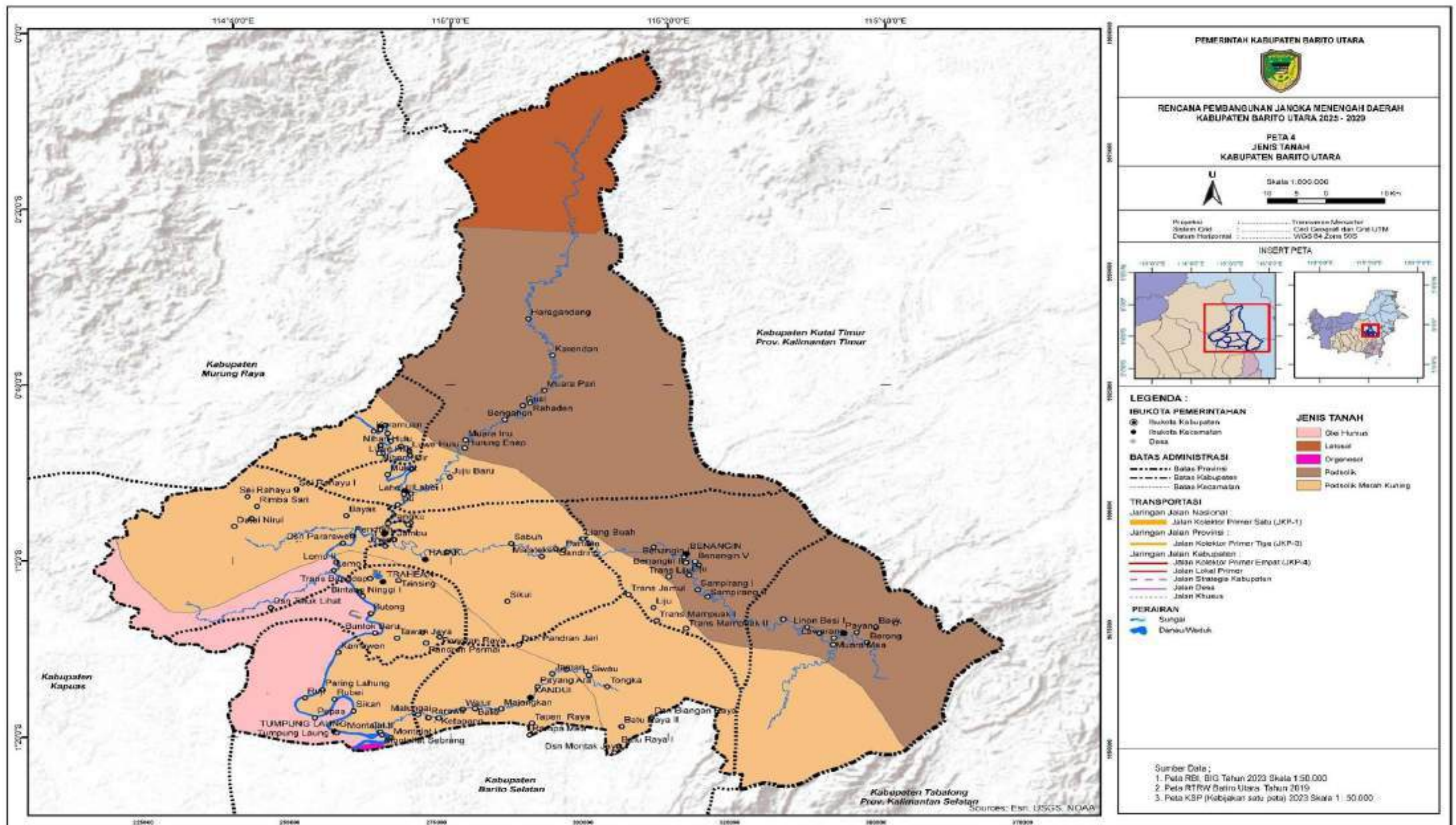
Peta 2. Topografi Kabupaten Barito Utara.



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Tahun 2025-2029



Peta 3. Kelerengan Kabupaten Barito Utara.



Peta 4. Jenis Tanah Kabupaten Barito Utara

2.1.1.3. Kondisi Bentang Alam

Berdasarkan Peta Karakteristik Bentang Alam Ekoregion Kalimantan yang tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.8/MENLHK/SETJEN/PLA.3/2018, Lembar MA-50-3, diketahui bahwa wilayah Kabupaten Barito Utara terdiri atas 4 bagian yakni sebagai berikut:

1) Dataran fluviomarin bermaterial alluvium

Dataran fluvial bermaterial alluvium merupakan bentuk lahan yang mempunyai relief dataran rata (*flat*) dengan kemiringan lereng datar hingga landai, tersusun atas material aluvium hasil proses deposisi fluvial (aliran permukaan atau sungai). Dataran ini memiliki fungsi lingkungan sebagai penyedia air bersih di permukaan yang bersumber dari air tanah dan sungai, lahan yang subur untuk dimanfaatkan pertanian dan perkebunan, serta sebagai pembentuk lapisan tanah baru hasil sedimentasi fluvial. Bentang alam ini tersebar di bagian selatan dan merupakan bagian endapan Sungai Barito dan secara administrasi tersebar di Kecamatan Montallat dan Kecamatan Teweh Selatan dengan luas 3,26% dari wilayah Kabupaten Barito Utara.

2) Perbukitan solusional karst bermaterial batuan sedimen karbonat

Perbukitan solusional karst merupakan bentuk lahan dengan relief perbukitan yang memiliki kemiringan lereng agak miring hingga sangat miring, tersusun atas material batuan sedimen karbonat, seperti batu gamping (*limestones*) yang membentuk topografi karst. Proses pelarutan (*solution*) telah membentuk bukit-bukit karst (*conical karst*) dan juga cekungan karst (*sinkhole*) atau bentuk lahan karst lainnya yang berdampingan. Perbukitan solusional karst ini memiliki fungsi lahan sebagai penyedia air tanah (dalam gua bawah tanah), sebagai tempat wisata alam, dan sebagai habitat fauna kelelawar. Bentang alam ini tersebar di bagian Kecamatan Gunung Timang dengan luas paling kecil yakni hanya 1,97% dari wilayah Kabupaten Barito Utara.

3) Perbukitan struktural lipatan bermaterial batuan sedimen non karbonat

Perbukitan struktural lipatan merupakan bentuk lahan dengan relief perbukitan yang memiliki kemiringan lereng agak miring hingga sangat miring, tersusun atas material batuan sedimen non karbonat, seperti batu pasir (*sandstones*), batu lempung (*claystones*), breksi (*breccia*), konglomerat (*conglomerate*) ataupun yang lainnya. Perbukitan terbentuk akibat aktivitas tektonik yang menghasilkan struktur geologi lipatan

pada batuan. Pola struktur lipatan ini di antaranya dicirikan oleh antiklin (*hogback and cuesta*), dan sinklin (*subsequent valley*). Perbukitan struktural lipatan ini memiliki fungsi lahan sebagai penyedia air permukaan (mata air, sungai kecil), daerah tangkapan hujan (*catchment area*), dan sebagai tempat wisata alam. Bentang alam ini tersebar di bagian Kecamatan Gunung Purei, dan sebagian paling utara Kecamatan Lahei dengan luas 6,14% dari wilayah Kabupaten Barito Utara.

- 4) Perbukitan struktural lipatan bermaterial campuran batuan sedimen karbonat dan non karbonat

Perbukitan struktural lipatan merupakan bentuk lahan dengan *relief* perbukitan yang memiliki kemiringan lereng agak miring hingga sangat miring, tersusun atas material campuran batuan sedimen karbonat dan non karbonat, seperti batu gamping (*limestones*), napal (*marls*), batu pasir (*sandstones*), batu lempung (*claystones*), breksi (*breccia*), konglomerat (*conglomerate*), atau yang lainnya. Perbukitan terbentuk akibat aktivitas tektonik yang menghasilkan struktur geologi lipatan pada batuan. Pola struktur lipatan ini di antaranya dicirikan oleh antiklin (*hogback and cuesta*) dan sinklin (*subsequent valley*). Perbukitan struktural lipatan ini memiliki fungsi lahan sebagai penyedia air permukaan (mata air, sungai kecil), daerah tangkapan hujan, dan tempat wisata alam. Bentang alam ini tersebar di semua wilayah bagian Kabupaten Barito Utara dengan luas 88,63% dari total luas wilayah.

Tabel 2.4. Luas dan Persentase Bentang Alam Kabupaten Barito Utara

Bentang Alam	Luas (ha)	Persentase (%)
Dataran fluvial bermaterial aluvium	32.631,93	3,27
Perbukitan solusional karst bermaterial batuan sedimen karbonat	19.546,25	1,96
Perbukitan struktural lipatan bermaterial batuan sedimen non karbonat	63.718,10	6,38
Perbukitan struktural lipatan bermaterial campuran batuan sedimen karbonat dan non karbonat	882.584,53	88,39
Total	998.480,80	100

Sumber: Peta Karakteristik Bentang Alam Ekoregion Kalimantan, KLHK (2021).

2.1.1.4. Kondisi Geologi

Berdasarkan Peta Geologi (P3G, 1994) terdapat 17 formasi geologi di Kabupaten Barito Utara, dimana yang paling luas adalah Formasi Warukin (38,55%), selanjutnya Formasi Tanjung (16,04%) dan Formasi Pamaluan (15,83%). Ketiga jenis ini mengandung batubara, sebagaimana disajikan pada Tabel 2.5.

Tabel 2.5. Luas dan Persentase Formasi Geologi Kabupaten Barito Utara

Formasi	Simbol	Luas (ha)	Persentase (%)
Anggota Batugamping Jangkan	Tomj	1147,71	0,11
Batupasir Haloq	Teh	24117,78	2,42
Endapan alluvium	Qa	16624,60	1,66
Formasi Beraí	Tomb	35295,29	3,53
Formasi Dahor	TQd	1910,52	0,19
Formasi Haruyam	Kvh	2487,80	0,25
Formasi Karamuan	Tomk	109933,04	11,01
Formasi Palaubalang	Tmpb	9709,29	0,97
Formasi Pamaluan	Tomp	161162,88	16,14
Formasi Pitap	Ksp	29174,40	2,92
Formasi Purukcahu	Tomc	6201,14	0,62
Formasi Tanjung	Tet	161192,53	16,14
Formasi Tuyu	Toty	32950,06	3,30
Formasi Ujoh Bilang	Tou	10683,64	1,07
Formasi Warukin	Tmw	395319,25	39,59
Intrusi Sintang	Toms	570,88	0,06
Total		998.480,80	100,00

Sumber: Analisis Data Peta Geologi, P3G Tahun 1994.

Pengendapan batuan Formasi Warukin terjadi pada awal susut laut (*regresi*) tersier. Formasi Warukin terdiri atas perselingan batupasir kuarsa, batulempung, serpih, dan batugamping. Pada batupasir dan batulempung karbonatan sering dijumpai konkresi besi. Lapisan batubara tebal >25 meter, hitam abu-abu, getas, kurang padu terdapat pada Formasi Warukin. Tebal batuan Formasi Warukin antara 250 meter dan 750 meter. Fosil yang ditemukan pada batuan ini adalah *Miogypsina* sp., *Cycloclypeus* sp., dan *Lepidocyclina* cf. *Sumatrensis*, diperkirakan berumur Miosen Tengah-Miosen Akhir. Lingkungan pengendapan laut dangkal (litoral) hingga paralis.

Formasi Tanjung diendapkan selama tahap awal genang laut tersier. Berdasarkan kandungan foraminifera *Nummulites javanus* (Verbeek) dan *Heterostegina* sp., serta foram kecil dari keluarga *Milliolidae*, maka Formasi Tanjung ini diendapkan pada lingkungan paralas-neritik berumur Eosen. Batuan dari Formasi Tanjung terdiri atas batupasir kuarsa berbutir halus, tebal lapisan antara 0,50 meter dan 1,50 meter, terdapat struktur sedimen lapisan sejajar dan silang siur; sisipan batulempung setempat menyerpih, tebal lapisan antara 0,20 meter dan 1,50 meter; terdapat sisipan batubara di bagian atas formasi berwarna hitam, kilat kaca, pejal, di bagian bawah formasi sisipan batubara tebal antara 0,50 meter dan 7,00

meter; terdapat sisipan batugamping berwarna abu-abu kecoklatan mengandung kepingan moluska dan foraminifera. Ketebalan Formasi Tanjung di atas 1000 meter.

Formasi Pamaluan disusun oleh batupasir kuarsa dengan sisipan batulempung, batugamping serpihan dan batulanau. Formasi batuan ini juga mengandung sisa tumbuhan, batubara, dan karbon. Berdasarkan analisis data palinologi Formasi Tanjung memiliki umur relatif lebih tua yaitu Eosen Akhir daripada Formasi Pamaluan yang berumur Oligosen-Miosen Awal.

Pada Formasi Tanjung ditemukan fosil palinomorf penentu umur Eosen yaitu polen *Proxapertites operculatus* dan *Proxapertites cursus*, sedangkan pada Formasi Pamaluan ditemukan fosil palinomorf penentu umur Oligosen yaitu *Cicatricosisporites dorogensis* dan penentu umur Miosen Awal yaitu *Florschuetzia levipoli*, juga terdapat kemunculan *Florschuetzia trilobata* dengan rentang umur Eosen Akhir-Miosen Tengah pada Formasi Tanjung dan Formasi Pamaluan.

2.1.1.5. Kondisi Hidrologi

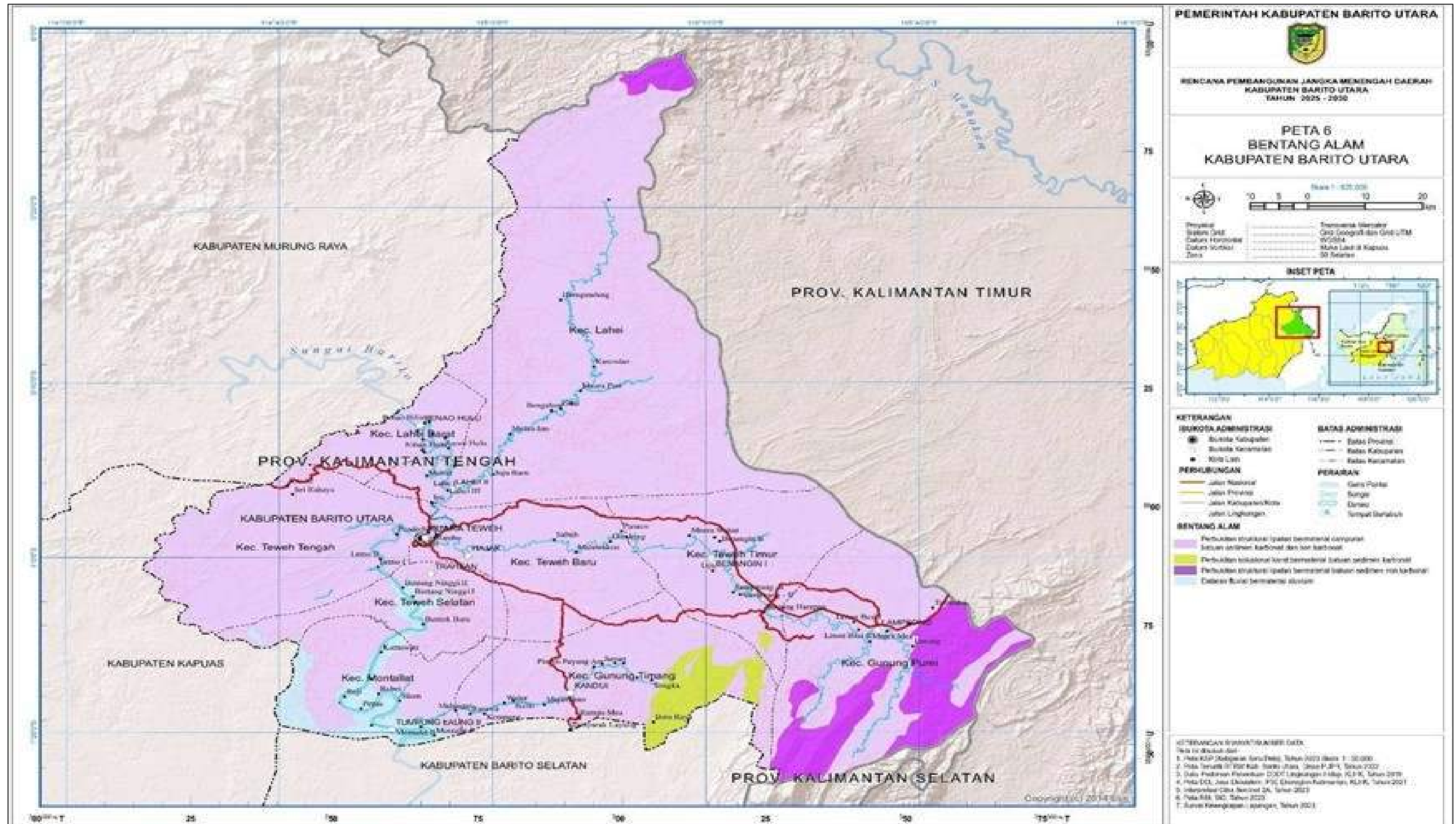
Sungai yang berada di Kabupaten Barito Utara adalah Sungai Barito yang sejalur dengan Kabupaten Barito Selatan dengan panjang sungai lebih kurang 900 Km dan lebar rata-rata 650 m dengan kedalaman rata-rata 8 m yang bermuara di Laut Jawa. Terdapat 3 anak sungai yakni Sungai Montallat, Sungai Teweh, dan Sungai Lahei.

Secara Daerah Aliran Sungai, wilayah ini termasuk dalam bagian DAS Barito yang terbagi atas 5 sub DAS yakni Sub DAS Biangin (10,45%), Sub DAS Lahei (34,39%), Sub DAS Montallat (9,74%), Sub DAS Pendrah (9,80%) dan Sub DAS Teweh (35,63%). Sedangkan untuk Cekungan Air Tanah (CAT), wilayah Kabupaten Barito Utara termasuk dalam bagian CAT Palangkaraya. Selain itu, di Kabupaten Barito Utara juga terdapat danau yang berada di sekitar Desa Butong Kecamatan Teweh Selatan.

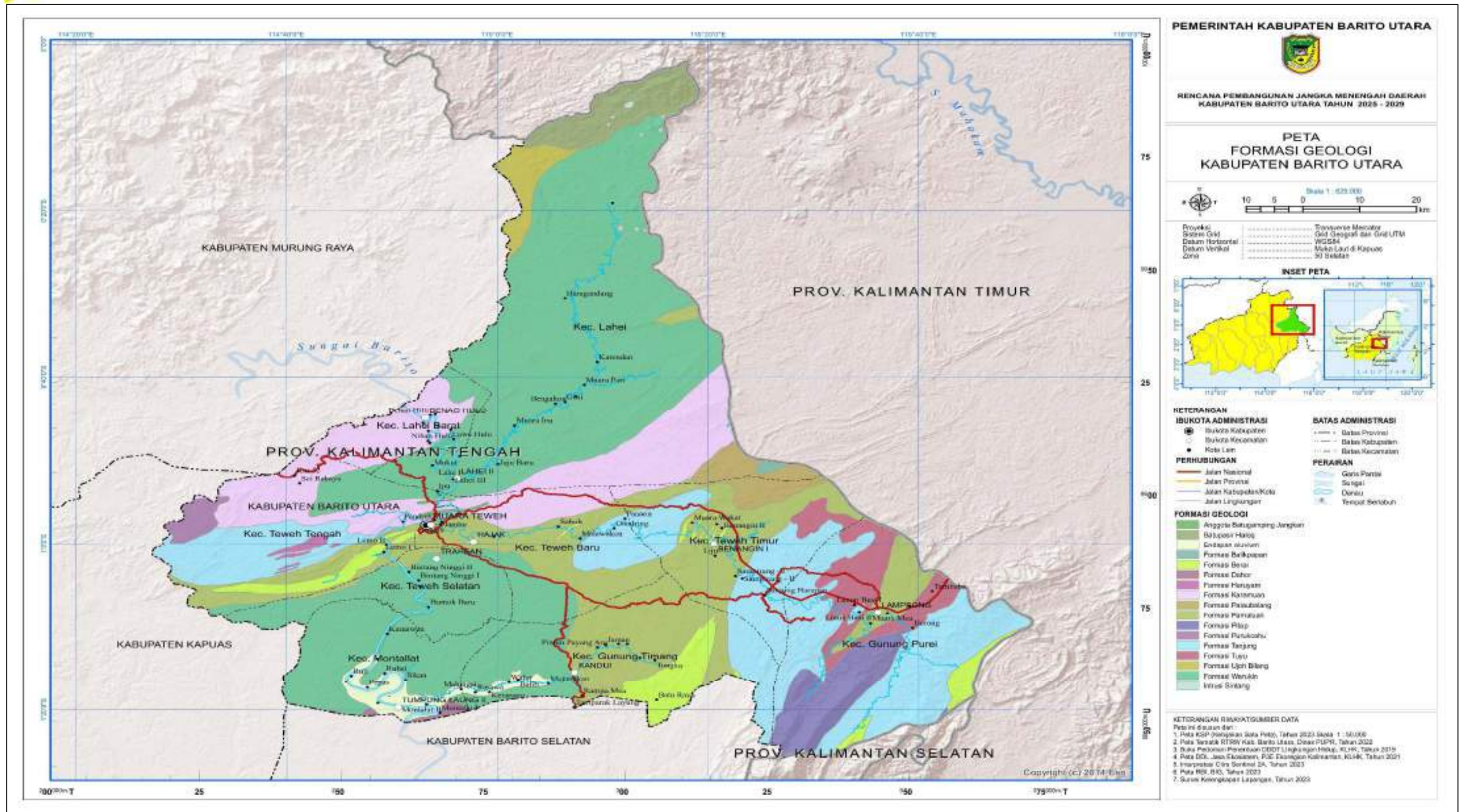
Tabel 2.6. Luas dan persentase DAS di Barito Utara

Nama DAS	Luas (ha)	Persentase (%)
DAS Biangan	104.351,75	10,45
DAS Lahei	343.327,97	34,39
DAS Montallat	97.206,36	9,74
DAS Pendrah	97.844,91	9,80
DAS Teweh	355.749,81	35,63
Kab. Barito Utara	998.480,80	100,00

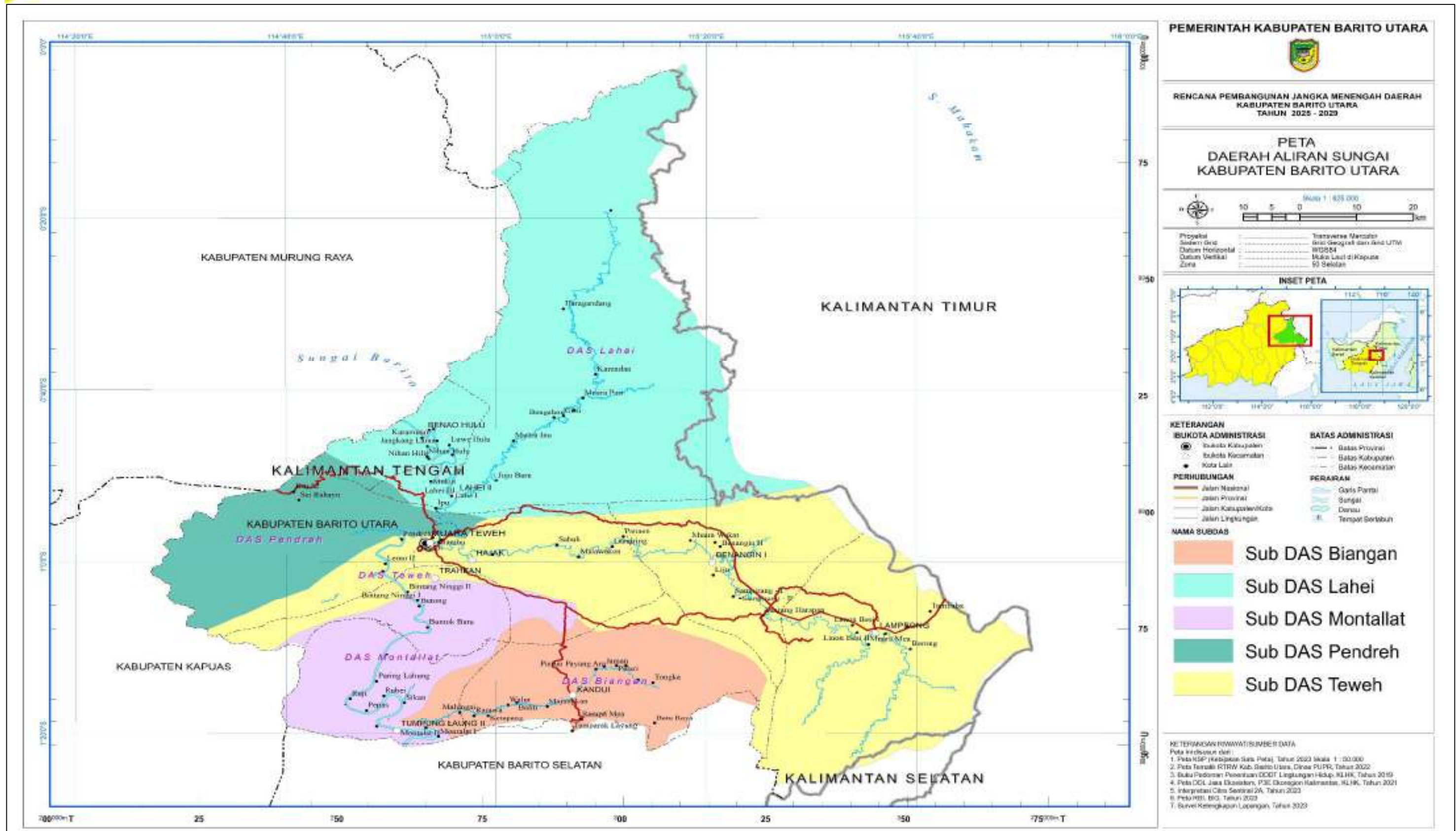
Sumber: Analisis Peta DAS, KLHK Tahun 2021.



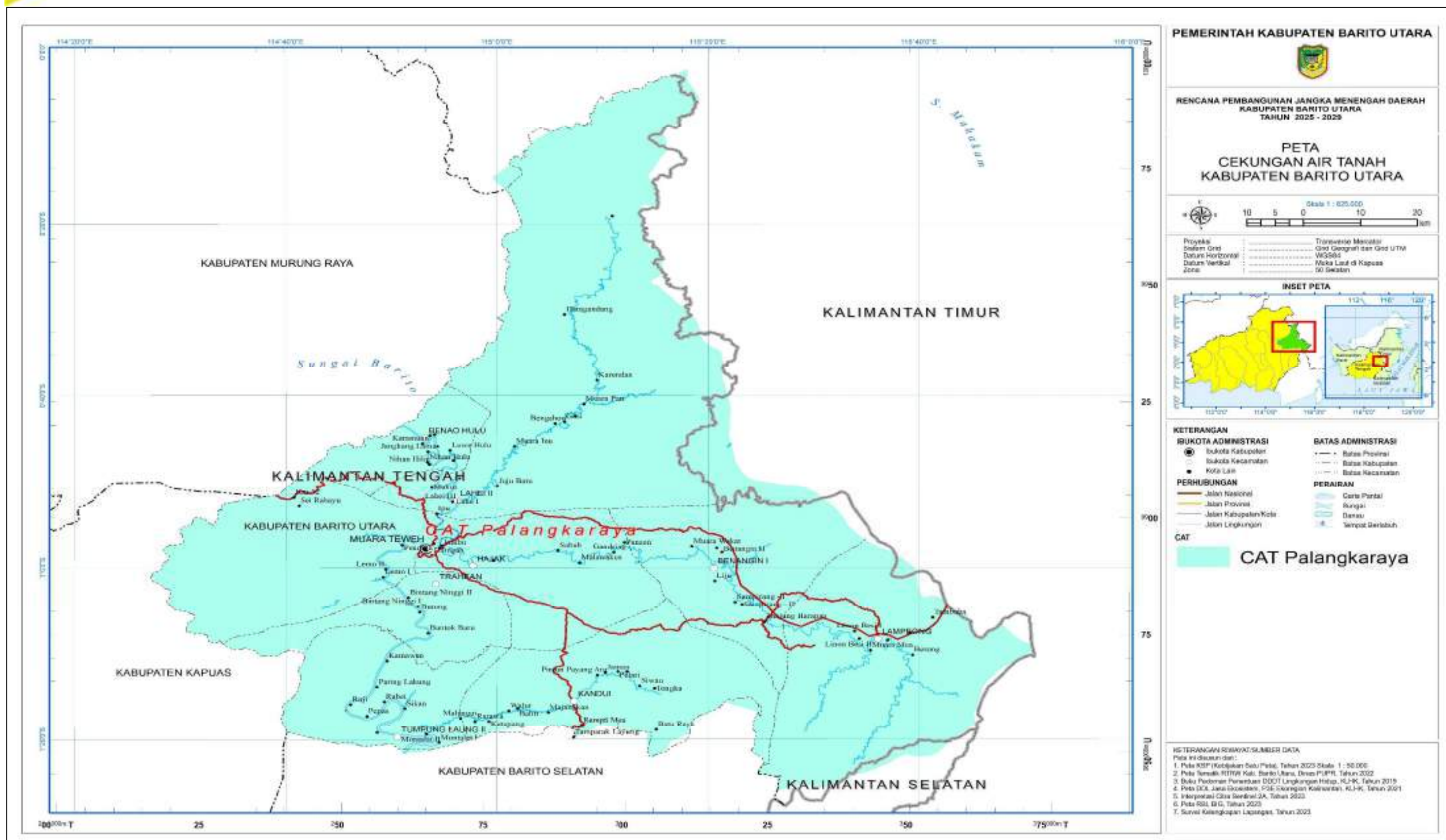
Peta 5.Bentang Alam Kabupaten Barito Utara.



Peta 6. Formasi Geologi Wilayah Kabupaten Barito Utara.



Peta 7. Daerah Aliran Sungai (DAS) Kabupaten Barito Utara.

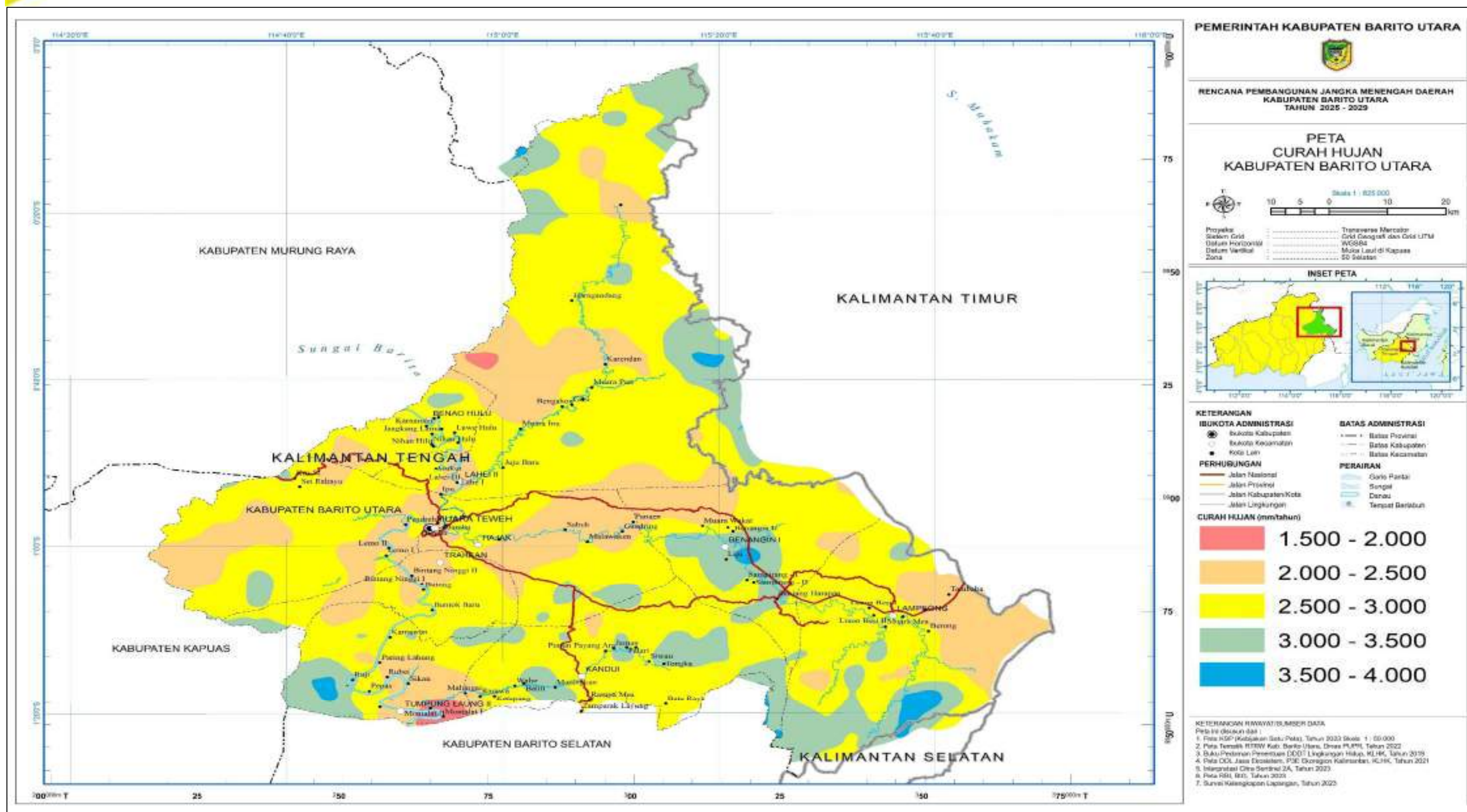


Peta 8. Cekungan Air Tanah (CAT) Kabupaten Barito Utara.

2.1.1.6. Kondisi Klimatologi

Iklim di wilayah Kabupaten Barito Utara termasuk ke dalam iklim basah. Berdasarkan data dari Stasiun Meteorologi Muara Teweh tahun 2020-2023, suhu udara di Kabupaten Barito Utara berkisar antara 19,80-35,80 °C, dengan suhu rata-rata berkisar 26,96-27,98 °C. Suhu maksimum terjadi pada musim barat (Februari) dan terendah pada musim timur (Juni). Kelembaban udara berkisar 48-100%, sedangkan tekanan udara berkisar 998,90-1011,50 mb. Kecepatan angin rata-rata 0,27-0,61 m/s dan kecepatan maksimum mencapai 8,23 m/s pada bulan Januari.

Rata-rata curah hujan berkisar 124,90-478,10 mm dengan jumlah hari hujan berkisar 14-22 hari hujan. Hujan tertinggi terjadi pada musim peralihan I, kemudian menurun dan mencapai curah hujan terendah pada musim timur, kemudian naik lagi pada musim peralihan II, selanjutnya pada musim barat kembali menurun. Curah hujan tahunan di wilayah Kabupaten Barito Utara dominan pada 2.500-3.000 mm/tahun, selanjutnya 2.000-2.500 mm/tahun, dan curah hujan terkecil sebesar 3.500-4.000 mm/tahun.



Peta 9. Curah Hujan Kabupaten Barito Utara.

2.1.2. Potensi Sumber Daya Alam

Potensi sumber daya alam di Kabupaten Barito Utara terdiri atas 4 sektor yakni pertanian, perkebunan, pertambangan, dan kehutanan. Lebih jelas terkait masing-masing sektor tersebut dijabarkan sebagai berikut:

2.1.2.1. Potensi Pertanian

Selama 5 tahun terakhir (2019-2023), sektor pertanian memiliki peran besar dalam perekonomian Kabupaten Barito Utara. Hal ini terlihat dari kontribusi sektor ini terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Barito Utara pada tahun 2023 yang menduduki posisi kedua setelah sektor pertambangan dan penggalian. Salah satu produk yang dihasilkan dari sektor pertanian adalah produksi tanaman hortikultura seperti sayuran, buah-buahan, biofarmaka, dan tanaman hias. Tercatat pada tahun 2023 sebagian produksi tanaman sayuran mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya, khususnya produksi tomat yang mengalami peningkatan drastis dari 73 kuintal menjadi 240 kuintal.

Selain hortikultura, sub-sektor peternakan juga memberikan kontribusi terhadap sektor pertanian di Kabupaten Barito Utara. Sub-sektor peternakan didominasi peternakan sapi potong, kambing, dan babi. Populasi ternak terbesar adalah babi sebanyak 2.857 ekor. Namun, jumlah ini mengalami penurunan dibanding tahun 2022. Sementara itu, peternakan unggas didominasi populasi peternakan ayam pedaging, ayam kampung, ayam petelur, dan itik (bebek). Di antara jenis-jenis ternak unggas tersebut, populasi ternak terbanyak adalah ayam pedaging sebanyak 1.039.352 ekor, yang mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Tabel 2.7 menyajikan luas lahan pertanian di Kabupaten Barito Utara yang terdiri atas lahan pertanian sawah dan lahan pertanian non-sawah. Luas lahan pertanian (sawah dan non sawah) di Kabupaten Barito Utara seluas 608.380 ha yang tersebar di 9 kecamatan.

Tabel 2.7. Luas Lahan Pertanian per Kecamatan Tahun 2024

Kecamatan	Lahan Sawah (ha)	Lahan Pertanian Non-Sawah (ha)	Total Lahan Pertanian (ha)
Montallat	1.192	35.744	36.936
Gunung Timang	916	85.369	86.285
Gunung Purei	0	146.655	146.655
Teweh Timur	500	52.622	53.122
Teweh Tengah	0	43.174	43.174
Teweh Baru	0	73.028	73.028
Teweh Selatan	1.532	43.232	44.764

Kecamatan	Lahan Sawah (ha)	Lahan Pertanian Non-Sawah (ha)	Total Lahan Pertanian (ha)
Lahei	0	45.497	45.497
Lahei Barat	0	78.919	78.919
Total	4.140	604.240	608.380

Sumber: Luas Lahan Menurut Penggunaan Kabupaten Barito Utara 2023 yang dirilis Juni 2024 oleh BPS Barito Utara Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Utara.

Produksi tanaman sayur-sayuran di Kabupaten Barito Utara selama tahun 2024 yang paling tinggi adalah komoditas cabai rawit sebesar 796,83 kuintal, sementara produksi paling rendah adalah komoditas bawang merah hanya sebesar 0,25 kuintal. Selain itu, produksi buah-buahan tertinggi adalah buah nangka/cempedak sebesar 10.256 kuintal, dan yang paling rendah adalah jenis melinjo yang produksi hanya sebesar 44,65 kuintal.

Secara keseluruhan, populasi ternak besar pada tahun 2024 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan produksi pada tahun 2023. Persentase penurunan terbanyak terjadi pada komoditas babi yang mengalami penurunan sebesar 1.048 ekor pada tahun 2024. Populasi unggas pada tahun 2024 mengalami kenaikan untuk jenis ayam pedaging. Di sisi lain terjadi penurunan produksi pada jenis ayam kampung, ayam petelur, dan itik/itik manila.

Jenis produksi perikanan budidaya paling besar di Kabupaten Barito Utara adalah keramba 5.880,62 ton (57,16%), kemudian kolam 4.344,67 ton, dan paling kecil adalah sawah/mina padi 1,25ton. Produksi subsektor perikanan paling tinggi berasal dari Kecamatan Teweh Tengah yang menghasilkan ikan sebanyak 4.058,64 ton.

2.1.2.2. Potensi Perkebunan

Subsektor perkebunan turut berkontribusi dalam perekonomian Kabupaten Barito Utara. Komoditas tanaman perkebunan yang dibudidayakan di Kabupaten Barito Utara di antaranya karet, kakao, kelapa sawit, kelapa, kopi, lada, pinang serta kemiri dengan komoditas tanaman karet sebagai produksi terbesar. Pada tahun 2023, dengan luas tanam sebesar 46.278 hektar dihasilkan lateks karet sebanyak 37.566,30 ton. Jumlah tersebut meningkat dibanding tahun sebelumnya (37.273,66 ton). Daerah penghasil lateks terbesar berada di Kecamatan Gunung Timang yang bisa menghasilkan lateks sebesar 9.135,20 ton.

Selain komoditas karet, 2 komoditas lain dengan produksi yang cukup tinggi yaitu kelapa sawit dan kakao. Dari seluruh luas areal tanaman perkebunan swasta dan perkebunan rakyat di Kabupaten Barito Utara pada tahun 2024, sebesar 46.278 ha ditanami karet dengan

produksi sebesar 37.664 ton. Kemudian, produksi kelapa sawit mengalami kenaikan dari 8.151,11 ton di tahun 2023 menjadi 8.284,17 ton pada tahun 2024.

Tabel 2.8. Luas Lahan Perkebunan Kabupaten Barito Utara

Jenis Tanaman	Produksi Tanaman Perkebunan Rakyat (ribu ton) (Ribu Ton)	Luas Areal Tanaman Perkebunan Rakyat (x000 Ha)
Karet/Rubber	37,7	46,3
Kelapa/Coconut	0,1	0,2
Kelapa sawit/Palm oil	8,2	6,4
Kopi/Coffee	-	-
Kakao/Cocoa	1,4	2
Teh/Tea	-	-
Jambu mete/Cashew nut	-	-
Pala/Nutmeg	-	-
Cengkeh/Clove	-	-
Gula tebu/Sugar cane	-	-
Tembakau/Tobacco	-	-

Sumber: Kabupaten Barito Utara Dalam Angka Tahun, BPS 2024.

Tabel 2.9. Luas Wilayah Perizinan Perkebunan Kabupaten Barito Utara

No	Izin Perkebunan	Luas (Ha)	Persentase (%)	
			HPH	Wilayah
1	CV Dua Putera	5.078,61	1,47	0,5
2	Koperasi Bahagia Benangin	4.822,31	1,39	0,48
3	Koperasi Bina Baru	2.944,18	0,85	0,29
4	Koperasi Erai Pakat	8.448,64	2,44	0,84
5	Koperasi Harapan Masa	3.950,73	1,14	0,39
6	Koperasi Karya Mandiri	2.611,72	0,76	0,26
7	Koperasi Mitra Usaha Putra Batara	2.175,27	0,63	0,22
8	Koperasi Ngoen Jaya	8.021,82	2,32	0,79
9	Koperasi Sekunder Mitra Ganda Perdana Sawit	21.502,47	6,22	2,13
10	Koperasi Surya Batara Perdana (Pencadangan)	12.814,74	3,71	1,27
11	PT Antang Ganda Utama	32.071,06	9,28	3,18
12	PT Bangun Batara Raya	5.207,89	1,51	0,52
13	PT Berjaya Agro Kalimantan	21.210,04	6,14	2,1
14	PT Citra Alam Perdana	20.936,15	6,06	2,07
15	PT Harapan Cahaya Mandiri	5.994,41	1,73	0,59
16	PT Karya Alam Perdana	13.308,02	3,85	1,32
17	PT Karya Borneo Sakti	16.292,98	4,71	1,61

No	Izin Perkebunan	Luas (Ha)	Persentase (%)	
			HPH	Wilayah
18	PT Karya Kudamas Agro	16.260,46	4,7	1,61
19	PT Kuda Karya Pertiwi	15.805,50	4,57	1,57
20	PT Kuda Usaha Mandiri	17.640,63	5,1	1,75
21	PT Lemo Jaya	6.381,03	1,85	0,63
22	PT Multi Persada Gatra Megah	6.261,35	1,81	0,62
23	PT Satria Abdi Lestari	20.029,57	5,79	1,98
24	PT Sawit Sumber Rezeki	17.863,92	5,17	1,77
25	PT Sinar Benua	6.885,98	1,99	0,68
26	PT Sinarindo Buana Selaras	5.045,40	1,46	0,5
27	PT Sumber Inu Porestri	3.934,38	1,14	0,39
28	PT Sumber Rahmat Sentosa	19.128,76	5,53	1,89
29	PT Wira Usaha Mandiri	23.058,51	6,67	2,28
Total		345.686,52	100	34,23

Sumber: Peta Tematik RTRW Kabupaten Barito Utara (Dinas PUPR Kabupaten Barito Utara, 2020).

2.1.2.3. Potensi Pertambangan

Sektor pertambangan dan penggalan terutama pertambangan batubara dan lignit merupakan penyumbang terbesar perekonomian sekaligus menjadi komoditas andalan Kabupaten Barito Utara. Hal ini terlihat dari kontribusi sektor ini terhadap nilai PDRB Kabupaten Barito Utara dalam 5 tahun terakhir selalu menjadi yang terbesar dibanding sektor lain. Kontribusi sektor pertambangan dan penggalan cenderung berfluktuatif dalam 5 tahun terakhir dengan kontribusi pada tahun 2022 sebesar 48,80%. Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku sektor ini di tahun 2023 senilai Rp6.223,55 miliar dengan laju pertumbuhan sebesar 5,71%.

Tabel 2.10. Luas Perizinan Eksploitasi Pertambangan Batubara

No	Eksploitasi Tambang	Luas (Ha)	Persentase (%)	
			HPH	Wilayah
1	PT Alam Bahtera Barito Raya	1.780,12	1,05	0,18
2	CV Annisa Sukses Mandiri	2.084,81	1,23	0,21
3	PT Arsy Nusantara	4.813,93	2,85	0,48
4	PT Arta Usaha Sarana	4.932,15	2,92	0,49
5	PT Arta Usaha Bahagia	3.197,69	1,89	0,32
6	PT Bangun Tiara	2.894,75	1,71	0,29
7	PT Batara Perkasa	4.980,52	2,94	0,49
8	PT Berkat Bumi Persada	4.668,86	2,76	0,46
9	CV Borneo Bangun Banua	3.901,71	2,31	0,39
10	PT Borneo Prima Coal Indonesia	4.780,37	2,83	0,47
11	PT Bumi Karunia Pertiwi	4.169,60	2,46	0,41



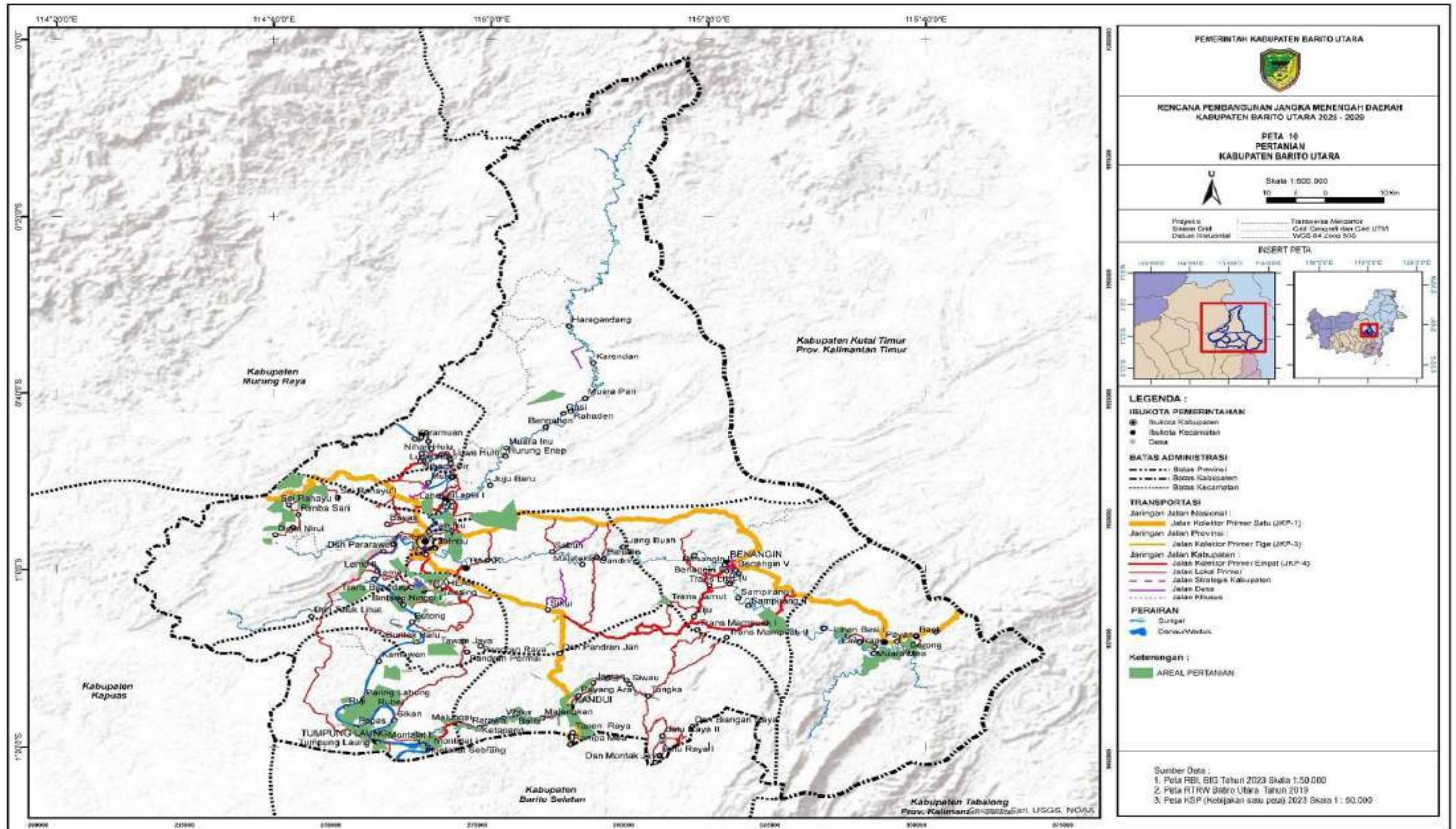
**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Tahun 2025-2029**

No	Eksplorasi Tambang	Luas (Ha)	Persentase (%)	
			HPH	Wilayah
12	CV Bunda Kandung	3.915,64	2,31	0,39
13	Byna Karya	521,21	0,31	0,05
14	PT Cakra Andatu Sukses	778,36	0,46	0,08
15	PT Cakrawala Cendana Putra	2.865,27	1,69	0,28
16	PT Cen Amin Mining	2.752,50	1,63	0,27
17	PT Duta Nurcahya	4.978,95	2,94	0,49
18	PT Duta Gemilang	3.233,14	1,91	0,32
19	PT Duta Sejahtera 1	4.891,51	2,89	0,48
20	PT Energitama Bumi Arum	4.944,70	2,92	0,49
21	Genta Coal Mini	1.087,95	0,64	0,11
22	PT Hamparan Karunia	14.111,18	8,34	1,4
23	PT Hamparan Mulya	4.280,82	2,53	0,42
24	PT Harfa Taruna Mandiri	4.114,91	2,43	0,41
25	Hikmah	2.090,44	1,24	0,21
26	Indo Tambang Raya Megah	1.152,30	0,68	0,11
27	CV Kara Elmas Madenleri	334,18	0,2	0,03
28	Karya Gemilang Limpah Rejeki	4.862,33	2,87	0,48
29	PT Kekal Adidaya	1.991,11	1,18	0,2
30	PT Lautan Hutan Lestari	1.687,92	1	0,17
31	PT Mega Multi Energi	4.979,11	2,94	0,49
32	PT Nantoy Bara Lestari	1.808,97	1,07	0,18
33	PT Pada Idi	4.972,94	2,94	0,49
34	PT Padang Anugerah	4.002,64	2,37	0,4
35	CV Permata Indah	3.270,65	1,93	0,32
36	PT Permata Mulya Agung	3.989,33	2,36	0,4
37	PT Rizki Baratama Energi	650,49	0,38	0,06
38	PT Satriati Jaya Sukses	91,92	0,05	0,01
39	CV Sinar Barito Global	126,41	0,07	0,01
40	PT Sinomast Mining	4.813,17	2,85	0,48
41	PT Sumatra Timur Indonesia	4.967,25	2,94	0,49
42	PT Suryabara Tambangandalas	3.160,40	1,87	0,31
43	PT Tambang Berkah Utama	4.979,29	2,94	0,49
44	PT Trisula Kencana Sakti	4.727,60	2,79	0,47
45	PT Trisula Kencana Sakti 2	4.937,84	2,92	0,49
46	PT Unirich Mega Persada	3.902,44	2,31	0,39
47	PT Utami Jaya Mulia	1.494,64	0,88	0,15
48	PT Victor Dua Tiga Mega	3.449,83	2,04	0,34
49	PT Yastra Energy	2.051,44	1,21	0,2
Total		169.175,27	100	16,75

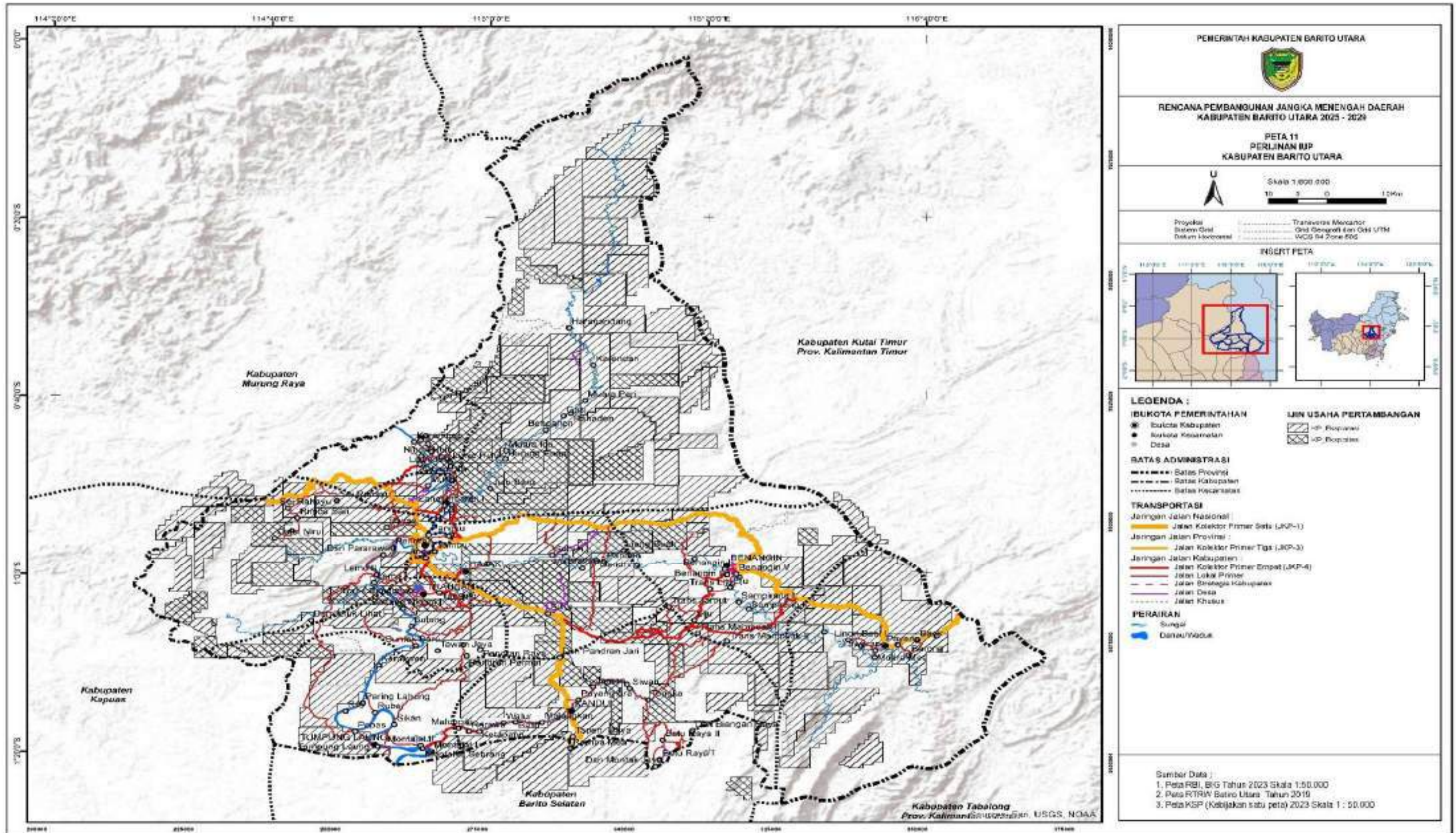
Sumber: Peta Tematik RTRW Kabupaten Barito Utara (Dinas PUPR Kabupaten Barito Utara, 2020).



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Tahun 2025-2029



Peta 10. Lahan Pertanian di Kabupaten Barito Utara.



Peta 11. Lahan Pertambangan di Kabupaten Barito Utara.
II-24

2.1.2.4. Potensi Kehutanan

Hutan merupakan salah satu alternatif untuk mengatasi masalah pengendalian daur air, erosi dan longsor lahan. Harapan ini perlu didukung bersama untuk diwujudkan, karena banyak manfaat dan fungsi dari keberadaan ekosistem hutan untuk mewujudkan harapan tersebut. Nilai peran hutan ditentukan oleh luas, jenis, sifat pertumbuhan, keadaan pertumbuhan, dan struktur hutannya. Ekosistem hutan juga dipengaruhi oleh keadaan iklim, geologi, sifat tanah dan geomorfologi, sehingga di dalam kegiatan pembangunan hutan harus memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhinya serta masalah kependudukannya (aspek sosial dan budaya).

Berdasarkan Peta Lampiran Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.6627/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/2021 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Tengah, sampai dengan Tahun 2020 terdapat 81,76 % lahan berfungsi sebagai kawasan hutan dari luas total wilayah Kabupaten Barito Utara. Dari seluruh total kawasan hutan tersebut, terbagi atas beberapa fungsi/status yakni Hutan Produksi Tetap (HP) 35,27%, Hutan Produksi Terbatas (HPT) 25,59%, Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi (HPK) 15,97%, Hutan Lindung (HL) 3,53%, dan Kawasan Suaka Alam/Kawasan Pelestarian Alam 0,59%, sedangkan untuk Areal Penggunaan Lain hanya 18,24%.

Tabel 2.11. Luas Kawasan Hutan Menurut Fungsi/Status di Kabupaten Barito Utara

No	Status dan Fungsi Kawasan	Luas (ha)	%
1	Hutan Lindung	35.294,13	3,53
2	Kawasan Suaka Alam/Kawasan Pelestarian Alam	5.846,52	0,59
3	Hutan Produksi Tetap	352.205,64	35,3
4	Hutan Produksi Terbatas	255.513,85	25,6
5	Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi	159.419,14	16
6	Areal Penggunaan Lain	182.139,88	18,2
7	Tubuh air	8.061,64	0,81
Total		998.480,80	100

Sumber: Peta Lampiran Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.6627/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/2021 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Tengah sampai dengan Tahun 2020.

Berdasar pada Peta Indikatif dan Areal Perhutanan Sosial (Revisi IX), luas indikatif dan areal perhutanan sosial di Kabupaten Barito Utara seluas 29.299,52 ha atau 3,49% dari total kawasan hutan Kabupaten Barito Utara, terdiri atas areal perhutanan sosial (PS) seluas

5.094,39 ha (0,607%) dan lokasi indikatif arahan perhutanan sosial seluas 24.205,13 ha (2,884%).

Tabel 2.12. Luas Indikatif dan Areal Perhutanan Sosial (Revisi IX) Kabupaten Barito Utara

No	Status Kawasan	Luas (ha)	Persentase (%)	
			Kawasan	Status Hutan
A	Areal Perhutanan Sosial	5.094,39	17,39	0,607
1	Hutan Produksi Tetap	3.139,47	10,72	0,374
2	Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi	1.954,93	6,67	0,233
B	Lokasi Indikatif Arahan Perhutanan Sosial	24.205,13	82,61	2,884
1	Hutan Produksi Terbatas	3.624,23	12,37	0,432
2	Hutan Produksi Tetap	20.580,90	70,24	2,452
TOTAL KAWASAN HUTAN		29.299,52	100,00	3,49

Sumber: Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6642 Tahun 2024 menetapkan Peta Indikatif dan Areal Perhutanan Sosial (Revisi IX).

Berdasar analisis peta tematik RTRW Kabupaten Barito Utara (2020), ada sebanyak 11 HPH yang mendapatkan perizinan berusaha pengelolaan hutan alam (PBPHA) dengan total luas hutan yang dikelola seluas 530.621,05 ha atau 52,55% dari luas kawasan hutan Kabupaten Barito Utara (Tabel 2.13). Selain untuk PBPHA, kawasan hutan di Kabupaten Barito Utara juga dikelola oleh perusahaan Hutan Tanaman Industri (HTI). Ada sebanyak 3 perusahaan yang mendapat izin berusaha pengelolaan hutan tanaman (PBPHT) dengan luas hutan yang dikelola seluas 51.995,90 ha atau 5,15% dari total kawasan hutan Kabupaten Barito Utara.

Tabel 2.13. Luas Perizinan Berusaha Pengelolaan Hutan Alam (PBPHA)

No	Hak Pengelolaan Hutan	Luas (ha)	Persentase (%)	
			HPH	Wilayah
1	PT Austral Byna	290.534,17	54,75	28,77
2	PT Barito Putra	17.061,76	3,22	1,69
3	PT Bina Multi Alam Lestari	28.563,41	5,38	2,83
4	PT Dasa Intiga	10.731,06	2,02	1,06
5	PT Fortuna Cipta Sejahtera	7.086,37	1,34	0,70
6	PT Indexim	50.440,85	9,51	5,00
7	PT Lestari Damai Indah Timber	8.193,59	1,54	0,81
8	PT Sindo Lumber	17.134,64	3,23	1,70
9	PT Sinergi	11.550,80	2,18	1,14
10	PT Timber Dana	24.820,98	4,68	2,46
11	PT Wana Inti Kahuripan Intiga	64.503,42	12,16	6,39
Total		530.621,05	100	52,55

Sumber: Peta Tematik RTRW Kabupaten Barito Utara, Dinas PUPR, Tahun 2020.

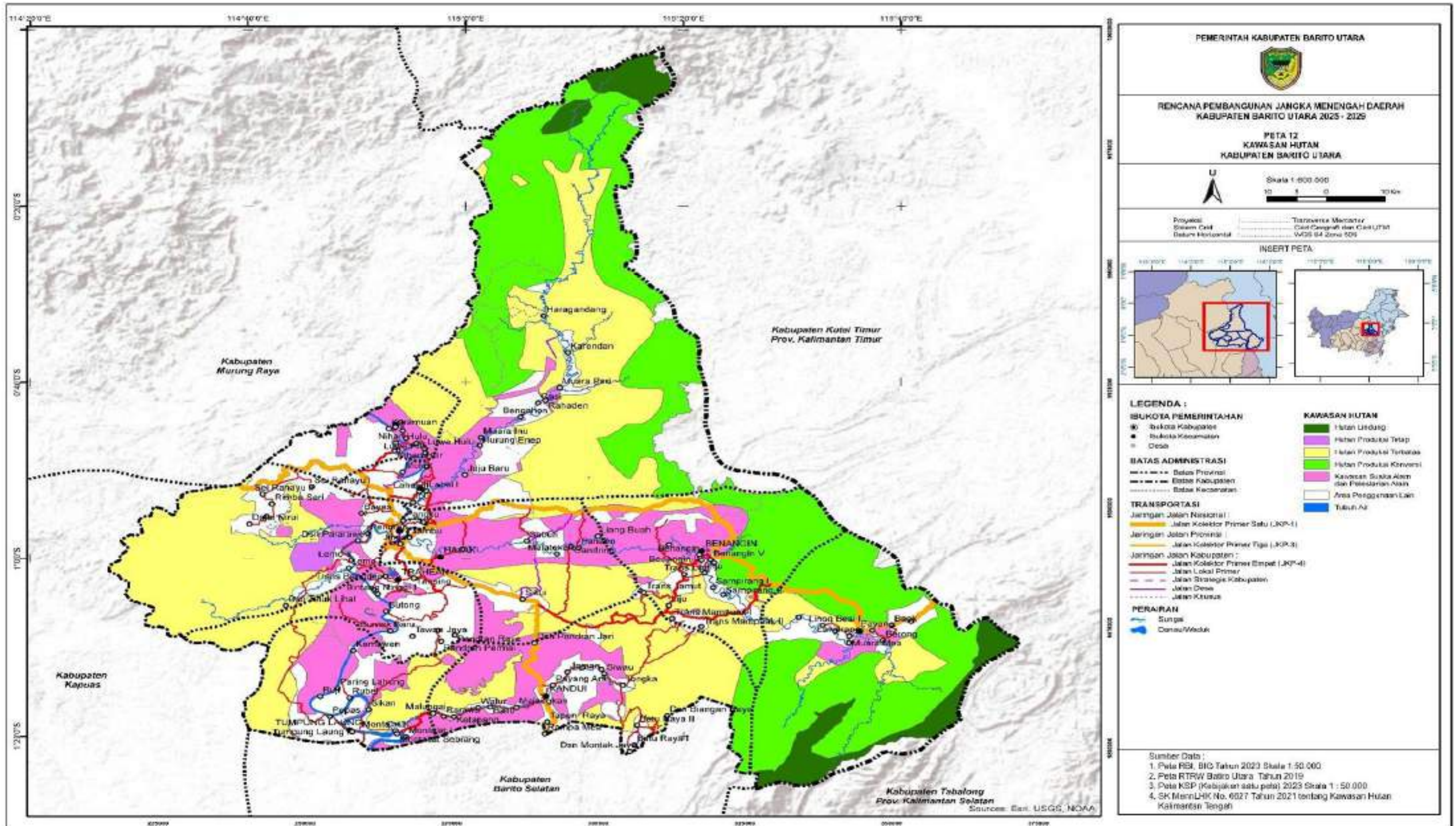
Tabel 2.14. Luas Perizinan Berusaha Pengelolaan Hutan Tanaman (PBPH)

No	Hutan Tanaman Industri	Luas (ha)	Persentase %	
			HPH	Wilayah
1	PT Rimba Berlian Hijau	11.361,62	21,85	1,13
2	PT Meranti Sembada	20.581,10	39,58	2,04
3	Areal Purwa	20.053,19	38,57	1,99
Total		51.995,90	100,00	5,15

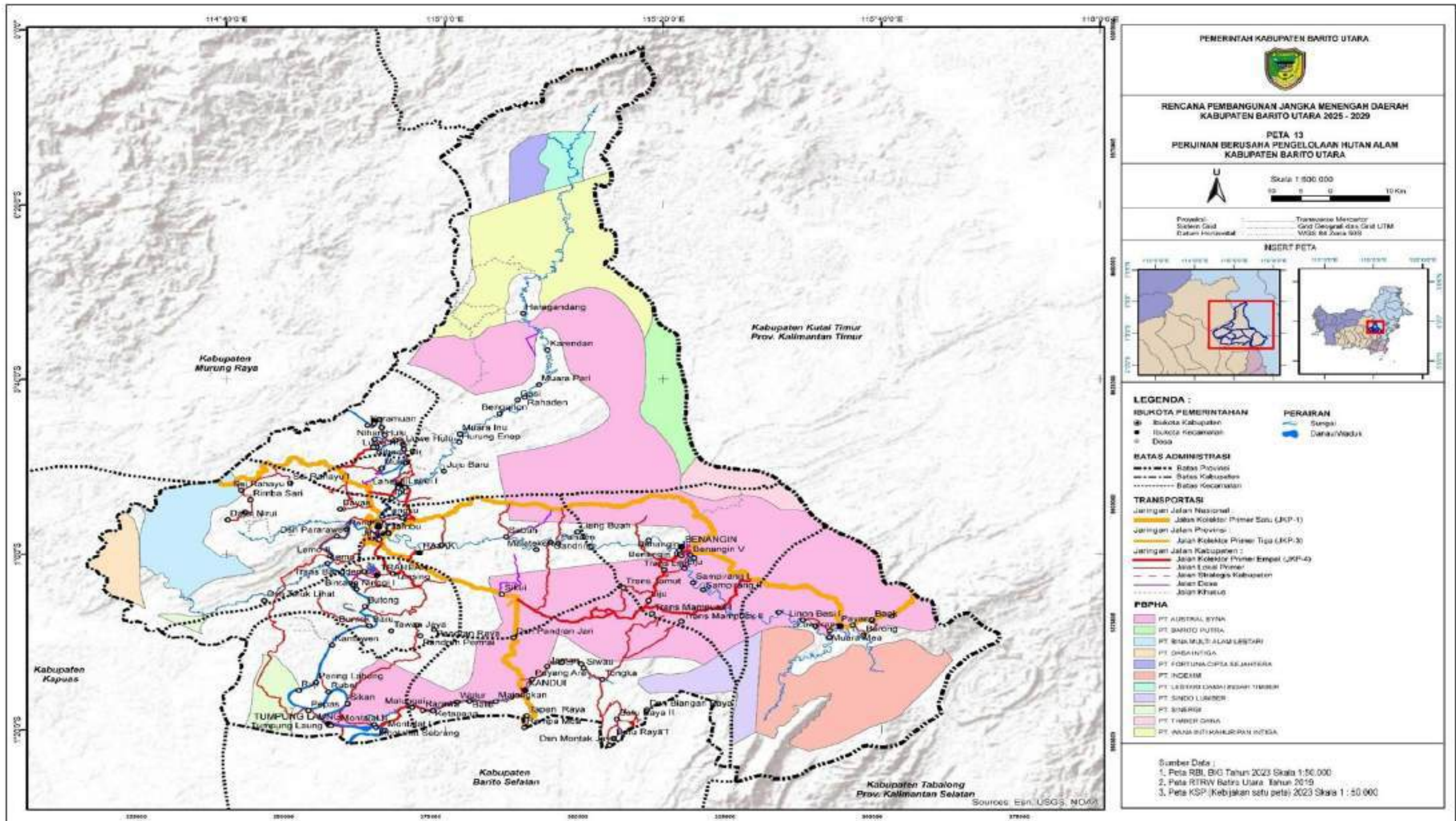
Sumber: Peta Tematik RTRW Kabupaten Barito Utara (Dinas PUPR Kabupaten Barito Utara, 2020).



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Tahun 2025-2029



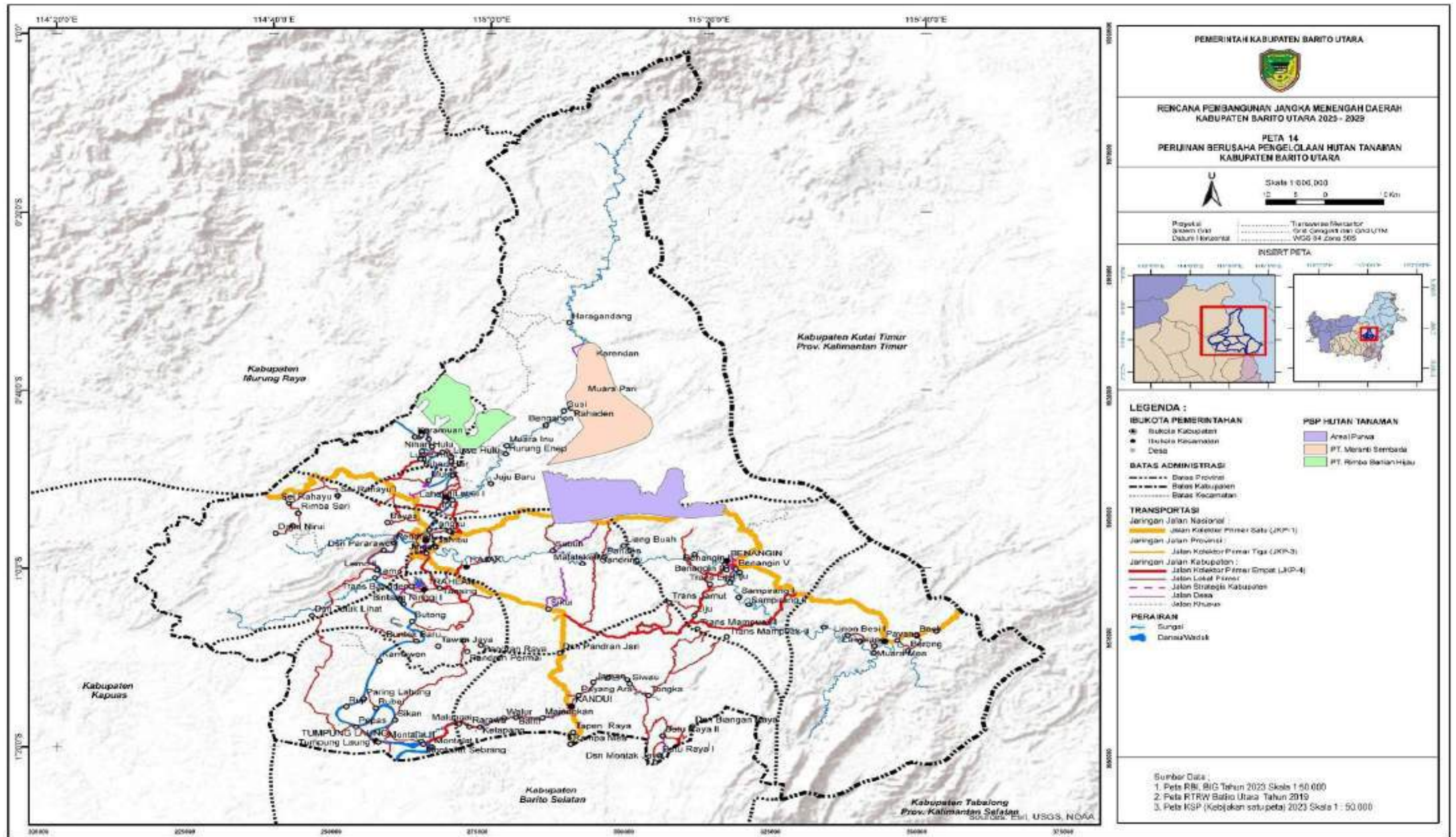
Peta 12. Kawasan Hutan Kabupaten Barito Utara.



Peta 13. Peta Perizinan Berusaha Pengelolaan Hutan Alam (PBPFA) Barito Utara.



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Tahun 2025-2029



Peta 14. Peta Perizinan Berusaha Pengelolaan Hutan Tanaman (BPHT) Barito Utara.

2.1.3. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

Pengertian Daya Dukung dan Daya Tampung seperti yang tertera dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yakni:

- Daya Dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk lain, dan keseimbangan antar keduanya.
- Daya Tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat energi, dan /atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.

Kapasitas sumber daya alam tergantung pada kemampuan, ketersediaan, dan kebutuhan akan lahan dan air, penentuan daya dukung lingkungan hidup dapat dilakukan berdasarkan pendekatan: Kemampuan lahan untuk alokasi pemanfaatan ruang dan Perbandingan antara ketersediaan dan kebutuhan lahan. Agar pemanfaatan ruang di suatu wilayah sesuai dengan kapasitas lingkungan hidup dan sumber daya, alokasi pemanfaatan ruang harus mengindahkan kemampuan lahan.

2.1.3.1. Status Daya Dukung Penyediaan Air

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Penentuan Daya Dukung Lingkungan Hidup dalam Penataan Ruang, perhitungan daya dukung air bertujuan untuk mengetahui secara umum apakah sumber daya air di suatu wilayah dalam keadaan surplus atau defisit. Hasil perhitungan daya dukung air dapat dijadikan bahan masukan/pertimbangan dalam penyusunan RPJMD atau revisi rencana tata ruang dan evaluasi pemanfaatan ruang dalam rangka penyediaan sumber daya air yang berkelanjutan.

Daya dukung air dianalisis dengan mempertimbangkan ketersediaan dan kebutuhan air di Kabupaten Barito Utara. Ketersediaan dihitung berdasarkan curah hujan dan koefisien limpasan di Kabupaten Barito Utara, sementara kebutuhan air dibagi menjadi kebutuhan air domestik dan kebutuhan air untuk lahan. Kebutuhan air domestik berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK 146 tentang Penetapan Daya Dukung dan Daya Tampung Air Nasional adalah sebesar 43,2 m³/kapita/tahun. Berdasarkan hasil analisis, ketersediaan air di Kabupaten Barito mencapai 149.822.931.000 m³/tahun.

Sementara itu, kebutuhan air total sebesar 471.321 m³/tahun. Terdapat selisih antara ketersediaan dan kebutuhan sebesar +149.351.601.000 m³/tahun (*surplus*).

Kondisi daya dukung air juga dianalisis secara spasial untuk memetakan daerah yang memiliki daya dukung air sudah terlampaui dan belum terlampaui. Diketahui sebesar 3% wilayah atau seluas 30.639,9 ha telah terlampaui dari segi daya dukung air, sebesar 97% atau seluas 972.403,8 ha belum terlampaui. Daerah dengan daya dukung air terlampaui tersebar di seluruh kecamatan. Kebutuhan air terbesar adalah untuk kebutuhan air untuk lahan.

Tabel 2.15. Daya Dukung Air di Kabupaten Barito Utara

Ketersediaan air	149.822.931.000 m ³ /tahun
Kebutuhan air	471.321.000 m ³ /tahun
A. Domestik	5.672.000 m ³ /tahun
B. Lahan	4.656.497.000 m ³ /tahun
Selisih	+149.351.601.000 m ³ /tahun

Sumber: KLHS RPJPD Kabupaten Barito Utara Tahun 2025-2045.

Tabel 2.16. Ketersediaan dan Kebutuhan Air Setiap Kecamatan di Kabupaten Barito Utara

No	Kecamatan	Ketersediaan (m ³ /tahun)	Kebutuhan (m ³ /tahun)	Selisih (m ³)
1	Gunung Purei	4.201.573.742	15.850.035	4.185.723.634
2	Gunung Timang	12.894.044.697	56.532.565,93	12.837.515.524
3	Lahei	19.170.527.701	54.999.771,76	19.115.533.625
4	Lahei Barat	4.035.796.966	19.871.858,56	4.015.924.083
5	Montallat	24.845.585.169	34.475.113,25	24.811.087.338
6	Teweh Baru	36.566.948.710	142.181.556,5	36.424.766.078
7	Teweh Selatan	23.481.449.132	92.237.786,41	23.389.223.829
8	Teweh Tengah	17.665.126.107	38.105.636,2	17.627.014.800
9	Teweh Timur	6.961.879.405	17.067.519	6.944.812.233
Total		149.822.931.631	471.321.842,6	149.351.601.145

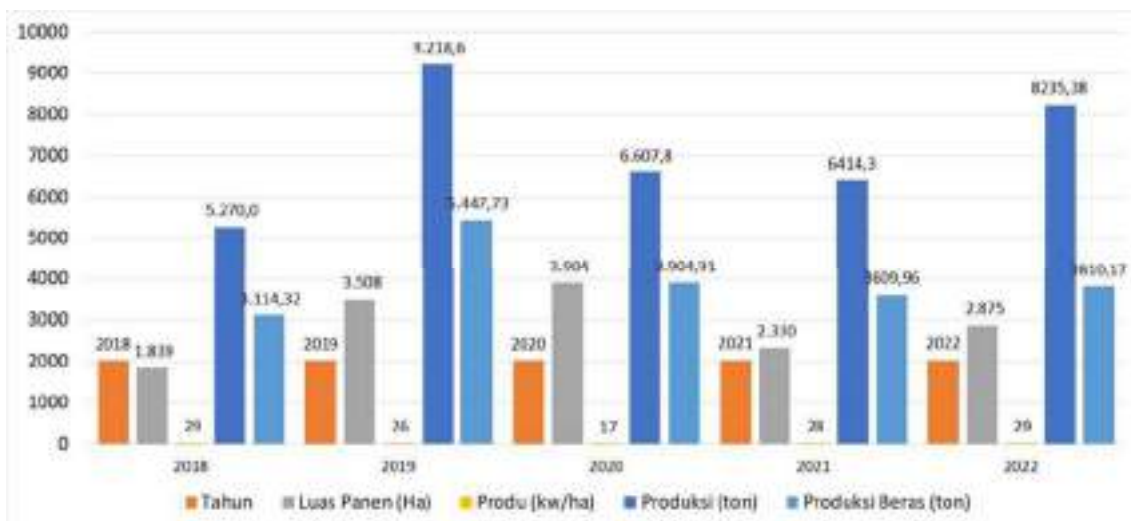
Sumber: KLHS RPJPD Kabupaten Barito Utara Tahun 2025-2045.

2.1.3.2. Status Daya Dukung Penyediaan Pangan

Perhitungan terkait Daya dukung lahan pertanian bertujuan untuk mengetahui ketersediaan lahan yang ada pada saat ini dan kebutuhan akan lahan pertanian pada akhir tahun perencanaan di suatu wilayah, hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Penentuan Daya Dukung Lingkungan Hidup dalam Penataan Ruang. Hasil dari perhitungan analisis daya dukung lahan pertanian digunakan untuk mengetahui apakah daya dukung lahan suatu wilayah dalam keadaan *surplus* atau *defisit*. Kondisi daya dukung lahan yang *defisit* menunjukkan bahwa ketersediaan lahan sudah tidak dapat memenuhi kebutuhan akan produksi pangan di wilayah tersebut,

sedangkan kondisi daya dukung lahan pertanian *surplus* menunjukkan bahwa ketersediaan lahan di suatu wilayah masih dapat mencukupi kebutuhan akan produksi pangan.

Berdasarkan data Kabupaten Barito Utara Dalam Angka Tahun 2023, produksi padi di Kabupaten Barito Utara dalam kurun 3 tahun terakhir (2020-2022) berfluktuatif, dimana pada tahun 2020 produksi padi (padi sawah) di Kabupaten Barito Utara sebesar 6.608 ton, menurun jika dibandingkan pada tahun 2019 yang mencapai 9.219 ton atau mengalami penurunan sebesar 2.610,74 ton atau 39,51%, meskipun naik dibandingkan dengan tahun 2018. Akan tetapi jika melihat produktivitasnya, tahun 2018 jauh lebih tinggi yakni 29 kw/ha, 26 kw/ha tahun 2019, dan hanya 17 kw/ha tahun 2020. Meskipun jika dilihat dari luas panen pada tahun 2018 hanya 1.839 ha, tahun 2019 sebesar 3.508 ha, dan 3.904 ha tahun 2020, sebagaimana disajikan pada Gambar 2.1.



Gambar 2.1. Kondisi Pertanian Tanaman Pangan di Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2022.

Jumlah produksi padi dan jumlah penduduk dengan mengacu data dari BPS (Kabupaten Barito Utara dalam Angka 2023), untuk konversi gabah kering giling ke beras sebesar 59,10% (Kabupaten Barito Utara dalam Angka 2023). Konsumsi beras mulai tahun 2020 berdasarkan hasil *prognosa* terkait konsumsi beras oleh Kementerian Pertanian sebesar 124 kg/orang/tahun. Asumsi konsumsi beras ini akan dipergunakan untuk perhitungan indeks daya dukung lahan pertanian yang ada di Kabupaten Barito Utara tahun 2022, 2025, 2030, 2035, 2040, dan 2045. Daya dukung lahan pertanian secara keseluruhan di Kabupaten Barito Utara pada tahun 2022 adalah 0,41 atau *defisit* sebesar 16.059 ton.

2.1.3.3. Status Daya Dukung Lahan Permukiman

Peningkatan jumlah penduduk berpengaruh terhadap kebutuhan perumahan yang merupakan salah satu kebutuhan pokok bersifat mendasar. Untuk dapat melangsungkan kehidupan dan penghidupan, penduduk membutuhkan tempat atau sarana berupa lahan untuk bermukim.

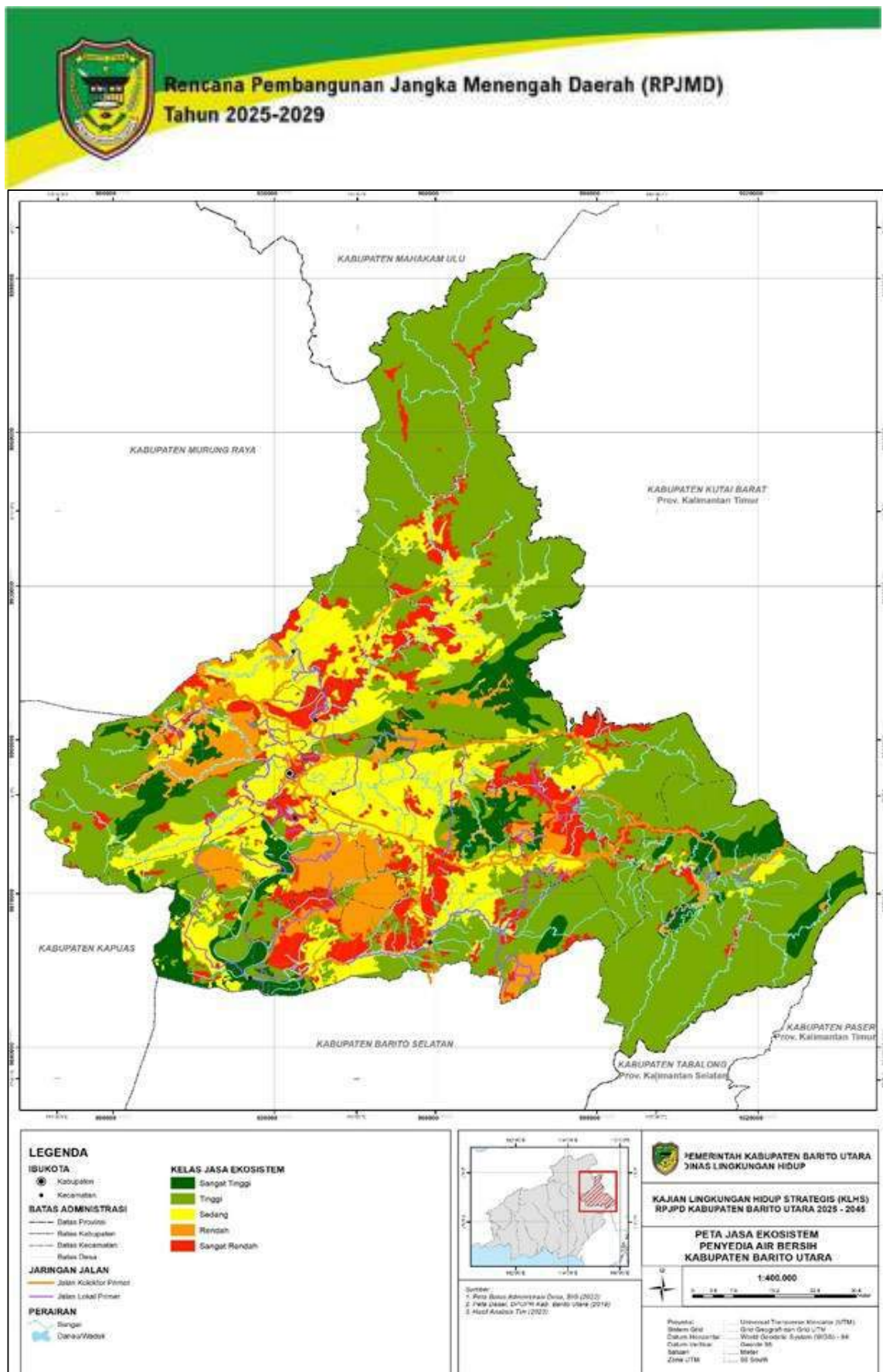
Analisis daya dukung permukiman merupakan unit analisis yang memperhatikan area pengembangan permukiman yang aman. Daya dukung lahan bangunan (pendekatan permukiman) dihitung untuk mengetahui daya dukung lahan untuk kawasan permukiman. Berdasarkan Pedoman Penentuan DDDLH (KLHK, 2014), penentuan daya dukung permukiman berdasarkan luas lahan permukiman terhadap jumlah penduduk dan koefisien luas kebutuhan ruang. Jika $DDP > 1$ artinya mampu menampung penduduk untuk bermukim, $DDP = 1$ artinya terjadi keseimbangan antara penduduk yang bermukim dengan luas wilayah yang ada, dan $DDP < 1$ artinya lahan tidak mampu menampung penduduk untuk bermukim dalam wilayah tersebut.

Secara *eksisting* daya dukung lahan untuk permukiman di Kabupaten Barito Utara masih mampu dengan nilai 2,09. Terdapat 4 kecamatan yang memiliki nilai $DDP < 2$ yakni Kecamatan Lahei, Kecamatan Teweh Baru, Kecamatan Teweh Selatan, dan Kecamatan Teweh Timur, meskipun masih dalam status mampu, sebagaimana disajikan pada Tabel 2.17. Kondisi ini mengindikasikan bahwa kawasan permukiman di Kabupaten Barito Utara tidak menyebar secara merata, sehingga pengembangan kawasan permukiman kedepan masih sangat luas.

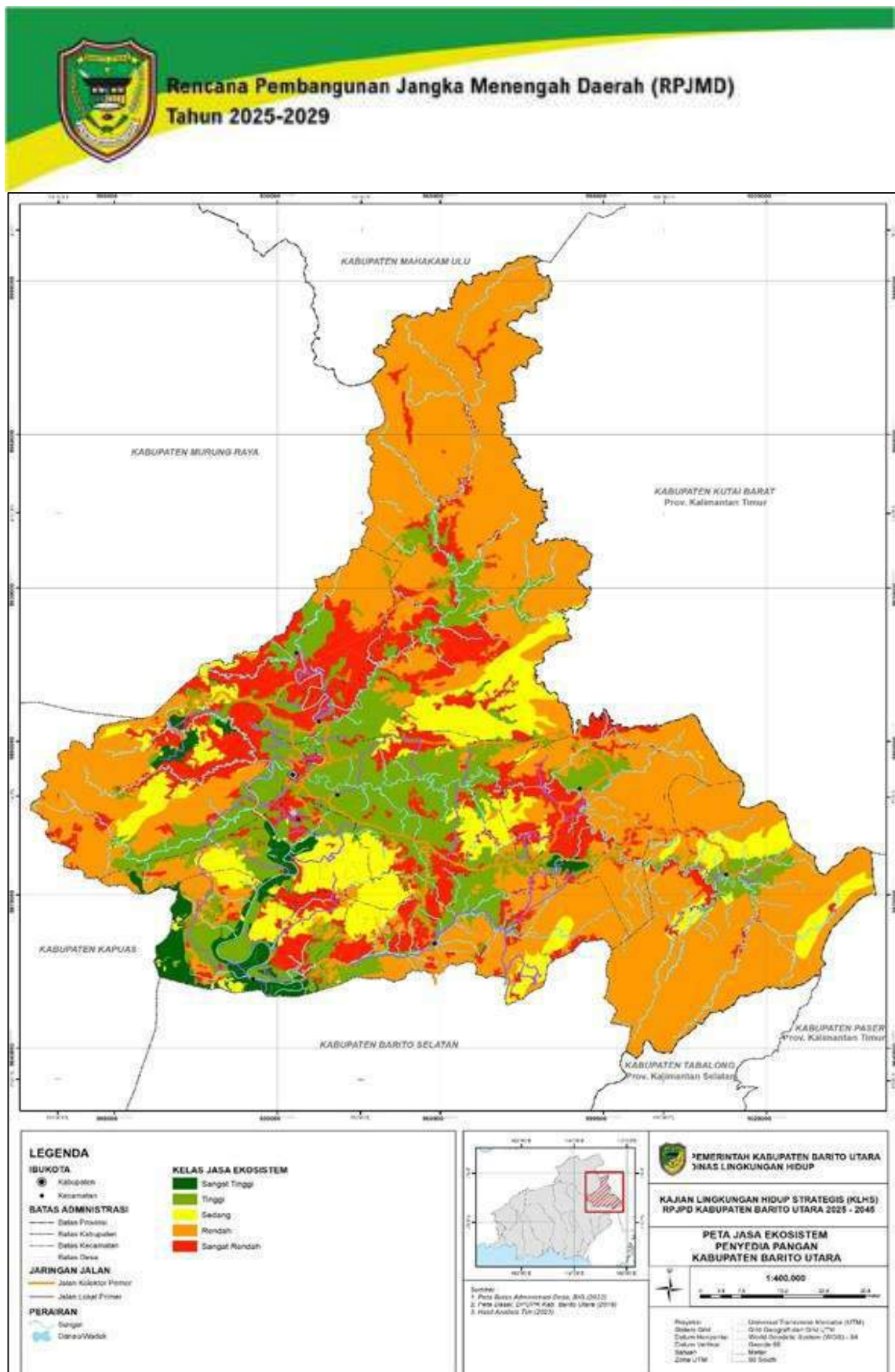
Tabel 2.17. Analisis Daya Dukung Lahan Berdasar Kondisi Eksisting Permukiman Tahun 2022

Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	LPm (m ²)	DDLH	Status
Gunung Purei	2.787	835.632	3,00	Mampu
Gunung Timang	12.863	2.711.414	2,11	Mampu
Lahei	14.111	2.865.000	2,03	Mampu
Lahei Barat	11.704	2.641.998	2,26	Mampu
Montallat	12.308	3.112.633	2,53	Mampu
Teweh Baru	23.010	4.037.442	1,75	Mampu
Teweh Selatan	15.643	1.960.183	1,25	Mampu
Teweh Tengah	61.321	14.539.442	2,37	Mampu
Teweh Timur	6.488	1.298.686	2,00	Mampu
Total	160.235	34.002.430	2,12	Mampu

Sumber: KLHS RPJPD Kabupaten Barito Utara Tahun 2025-2045.



Peta 15. Jasa Ekosistem Penyedia Air Bersih.
(Sumber: KLHS RJPD Kabupaten Barito Utara Tahun 2025-2045).



Peta 16. Jasa Ekosistem Penyedia Pangan.
(Sumber: KLHS RJPD Kabupaten Barito Utara Tahun 2025-2045).

2.1.3.4. Indeks Jasa Ekosistem

Jasa lingkungan atau yang juga dikenal sebagai jasa ekosistem, merujuk pada sumbangan ekosistem yang dapat memberikan manfaat kepada manusia, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk meningkatkan kesejahteraan mereka (TEEB, 2010; de Groot, 2012). Dengan kata lain, jasa ekosistem adalah keuntungan yang manusia peroleh dari berbagai fungsi ekosistem (MEA, 2005).

Dalam kerangka manfaatnya, jasa lingkungan dapat dikelompokkan menjadi jasa penyediaan, jasa pengaturan, jasa pemenuhan budaya, dan jasa pendukung. Daya dukung lingkungan hidup dilihat melalui jasa penyediaan, pemenuhan budaya, dan pendukung, sementara daya tampung lingkungan hidup dinilai melalui jasa pengaturan. Jasa ekosistem dinilai melalui jenis tutupan lahan dan ekoregion suatu wilayah. Ekoregion berguna untuk mengelompokkan kawasan dengan karakter dan fungsi ekologis yang serupa sehingga memudahkan dalam mengidentifikasi jasa ekosistem di area yang berbeda.

Kabupaten Barito Utara memiliki beragam jasa ekosistem yang diklasifikasikan ke dalam 4 kategori utama:

1) **Jasa ekosistem penyediaan**

Produk langsung dari ekosistem seperti pangan, air bersih, serat, bahan bakar fosil, dan sumber daya genetik. Mayoritas kategori berada pada tingkat tinggi–sangat tinggi, kecuali pangan yang dominan rendah karena wilayah lindung.

2) **Jasa ekosistem pengaturan**

Kemampuan ekosistem dalam mengatur proses alami seperti iklim, air, bencana, dan kualitas udara. Sebagian besar berada pada kategori tinggi–sangat tinggi, menunjukkan daya tampung lingkungan yang baik.

3) **Jasa ekosistem budaya**

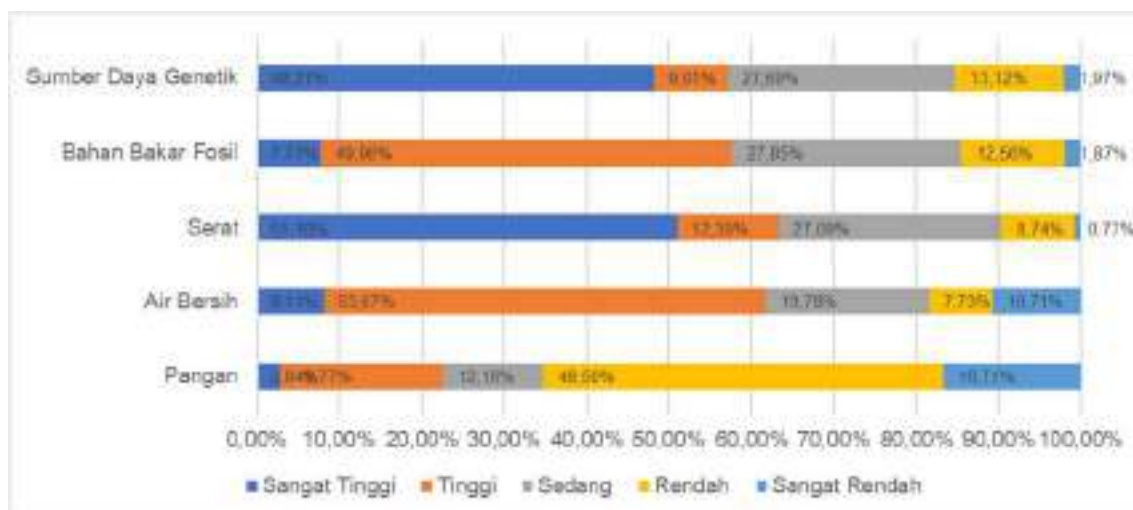
Manfaat ekosistem terhadap budaya dan kehidupan sosial seperti estetika, ekowisata, dan ruang hidup. Ekowisata dan estetika dominan sangat tinggi, sedangkan ruang hidup dominan sedang–rendah.

4) **Jasa ekosistem pendukung**

Fungsi dasar ekosistem seperti pembentukan tanah, siklus hara, produksi primer, dan biodiversitas. Didominasi oleh kategori tinggi–sangat tinggi, mencerminkan ekosistem yang sehat dan produktif.

5) Jasa ekosistem penyediaan

Jasa ekosistem penyediaan merupakan jasa ekosistem yang berperan dalam menyediakan produk dari ekosistem itu sendiri. Jasa ekosistem penyediaan mencakup pangan, air bersih, serat, bahan bakar fosil, dan sumber daya genetik. Secara keseluruhan, jasa ekosistem penyediaan didominasi oleh kategori tinggi-sangat tinggi. Jasa ekosistem penyedia pangan di Kabupaten Barito Utara didominasi oleh kategori rendah sebesar 49% (486.498,16 ha) yang menandakan kemampuan Kabupaten Barito Utara secara alami untuk menghasilkan pangan relatif rendah. Akan tetapi, produksi pangan di Kabupaten Barito Utara telah mampu mencukupi kebutuhan penduduknya. Wilayahnya didominasi dengan nilai jasa ekosistem rendah karena sebagian besar merupakan kawasan berfungsi lindung. Jasa ekosistem penyediaan air bersih didominasi oleh kategori tinggi sebesar 54% (538.367,15 ha), serat didominasi oleh kategori sangat tinggi 51% (512.570 ha), bahan bakar fosil didominasi oleh kategori tinggi sebesar 49% (501.103 ha), dan sumber daya genetika didominasi kategori sangat tinggi sebesar 48% (483.532 ha).



Gambar 2.2. Komposisi Luas Kelas IJE pada Jasa Ekosistem Penyediaan.

Sumber: KLHS RPJPD Kabupaten Barito Utara Tahun 2025-2045.

Tabel 2.18. Jasa Ekosistem Penyediaan Kabupaten Barito Utara

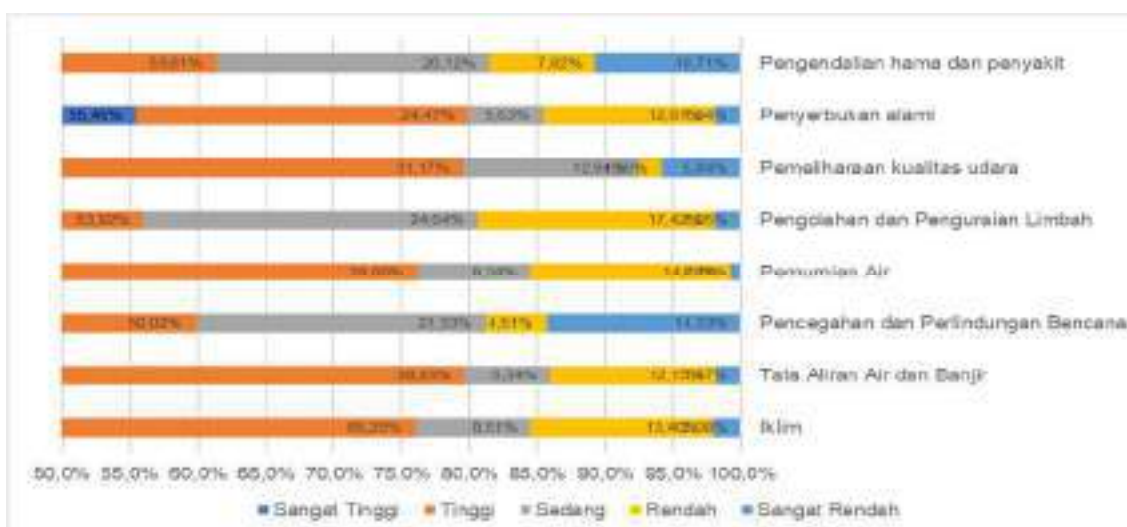
Jasa Ekosistem Penyediaan	Kategori				
	Sangat Tinggi	Tinggi	Sedang	Rendah	Sangat Rendah
Pangan (0,10-1)	2,84%	19,77%	12,18%	48,50%	16,71%
Luas (ha)	28.453,38	198.256,61	122.178,94	486.498,16	167.656,91
Air Bersih (0,09 – 1)	8,11%	53,67%	19,78%	7,73%	10,71%

Jasa Ekosistem Penyediaan	Kategori				
	Sangat Tinggi	Tinggi	Sedang	Rendah	Sangat Rendah
Luas (ha)	81.369,28	538.367,15	198.412,16	77.511,73	107.383,68
Serat (0,23-1)	51,10%	12,30%	27,09%	8,74%	0,77%
Luas (ha)	512.570,61	123.366,03	271.703,34	87.700,97	7.703,04
Bahan bakar fosil (0,19 – 0,720)	7,77%	49,96%	27,85%	12,56%	1,87%
Luas (ha)	77.887,57	501.103,37	279.327,83	125.970,70	18.754,53
Sumber daya genetik (0,17 – 0,98)	48,21%	9,01%	27,69%	13,12%	1,97%
Luas (ha)	483.532,28	90.368,76	277.740,52	131.616,81	19.785,62

Sumber: KLHS RPJPD Kabupaten Barito Utara Tahun 2025-2045

6) Jasa ekosistem pengaturan

Jasa ekosistem pengaturan merupakan kemampuan ekosistem untuk mengatur proses-proses alami dalam lingkungan, berupa pengaturan iklim, tata aliran air dan banjir, pencegahan dan perlindungan bencana, pemurnian air, penguraian limbah, pemeliharaan kualitas udara, penyerbukan alami, pengendalian hama dan penyakit. Seluruh jasa ekosistem pengaturan didominasi oleh kategori tinggi-sangat tinggi. Akan tetapi, beberapa jasa ekosistem belum dioptimalkan kinerjanya. Jasa ekosistem pengaturan merupakan salah satu pendekatan daya tampung lingkungan hidup sehingga perlu diperhatikan untuk meningkatkan kinerja jasa ekosistem pengaturan agar dapat menampung aktivitas penduduknya hingga di masa mendatang.



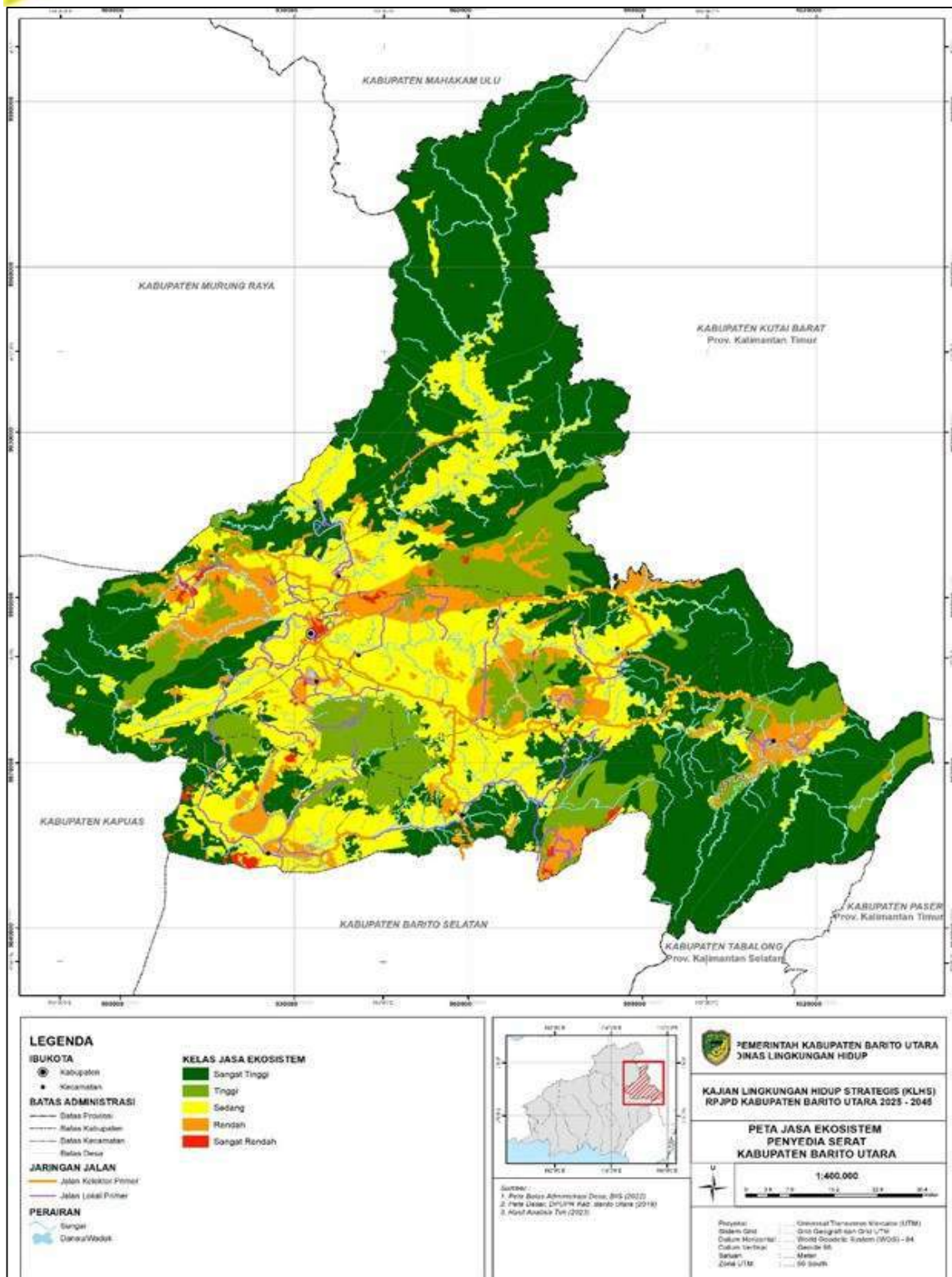
Gambar 2.3. Komposisi Luas IJE Berdasar Kategori pada Ekosistem Pengaturan.

Tabel 2.19. Jasa Ekosistem Pengaturan di Kabupaten Barito Utara

Jasa Ekosistem	Kategori				
	Sangat Tinggi	Tinggi	Sedang	Rendah	Sangat Rendah
Iklim	9,76%	66,25%	8,51%	13,40%	2,08%
Luas (ha)	97.858,41	664.548,36	85.339,06	134.416,10	20.882,07
Tata Aliran Air dan Banjir	49,41%	30,23%	6,34%	12,15%	1,87%
Luas (ha)	495.584,98	303.242,38	63.625,91	121.828,61	18.762,12
Pencegahan dan Perlindungan Bencana	9,81%	50,02%	21,33%	4,51%	14,33%
Luas (ha)	98.393,27	501.699,76	213.933,87	45.233,11	143.783,99
Pemurnian Air	48,19%	28,00%	8,34%	14,70%	0,77%
Luas (ha)	483.386,31	280.870,33	83.627,91	147.456,41	7.703,04
Pengolahan dan Penguraian Limbah	2,07%	53,92%	24,64%	17,42%	1,95%
Luas (ha)	20.756,60	540.844,17	247.159,37	174.687,49	19.596,38
Pemeliharaan kualitas udara	48,38%	31,17%	12,94%	1,66%	5,84%
Luas (ha)	485.315,71	312.658,20	129.775,59	16.681,86	58.612,64
Penyerbukan alami	55,45%	24,47%	5,53%	12,61%	1,94%
Luas (ha)	556.225,80	245.431,46	55.458,88	126.464,62	19.463,24
Pengendalian hama dan penyakit	7,74%	53,61%	20,12%	7,82%	10,71%
Luas (ha)	77.656,07	537.723,54	201.859,42	78.421,29	107.383,68

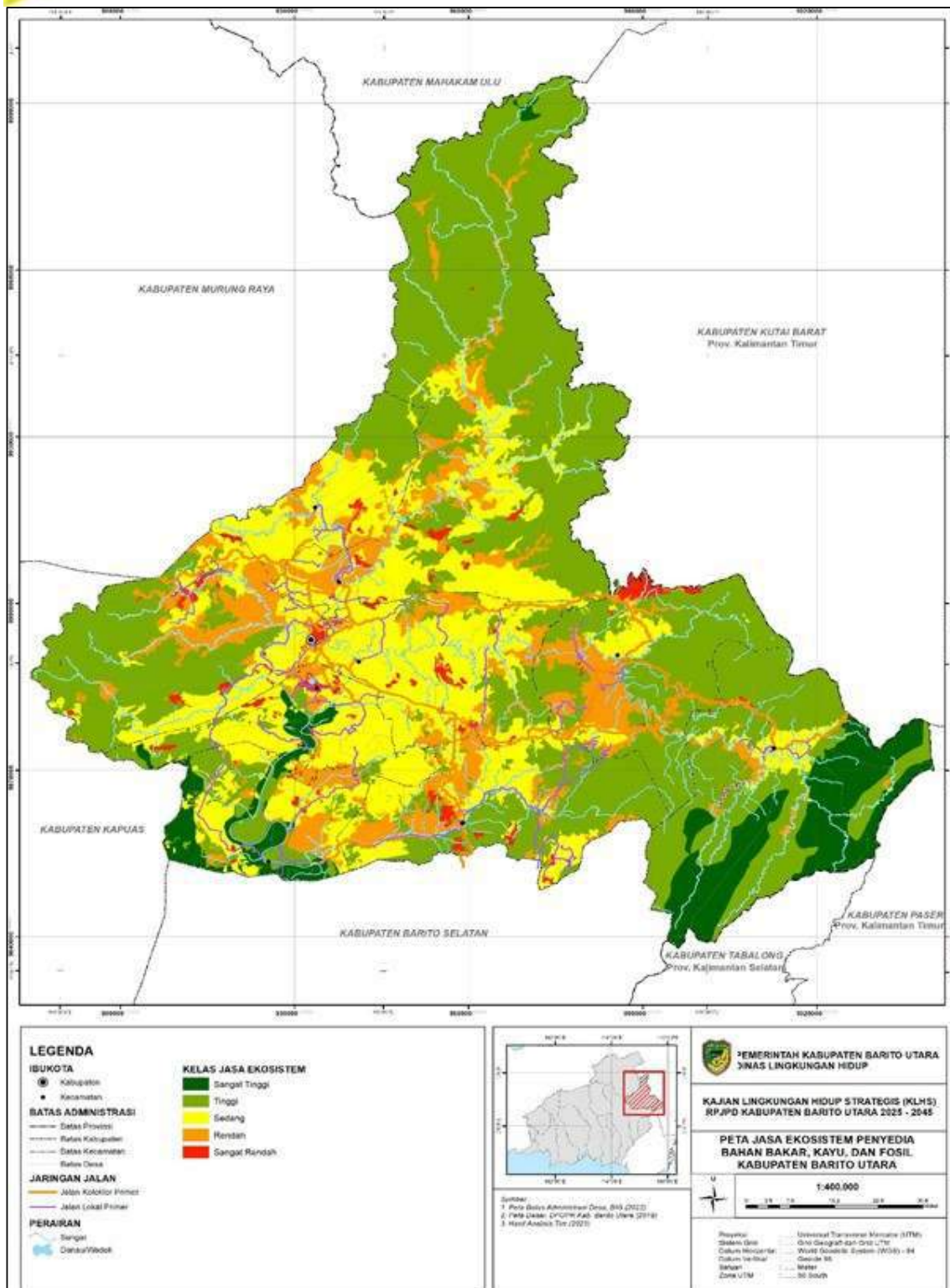
Sumber: KLHS RPJPD Kabupaten Barito Utara Tahun 2025-2045.

**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Tahun 2025-2029**

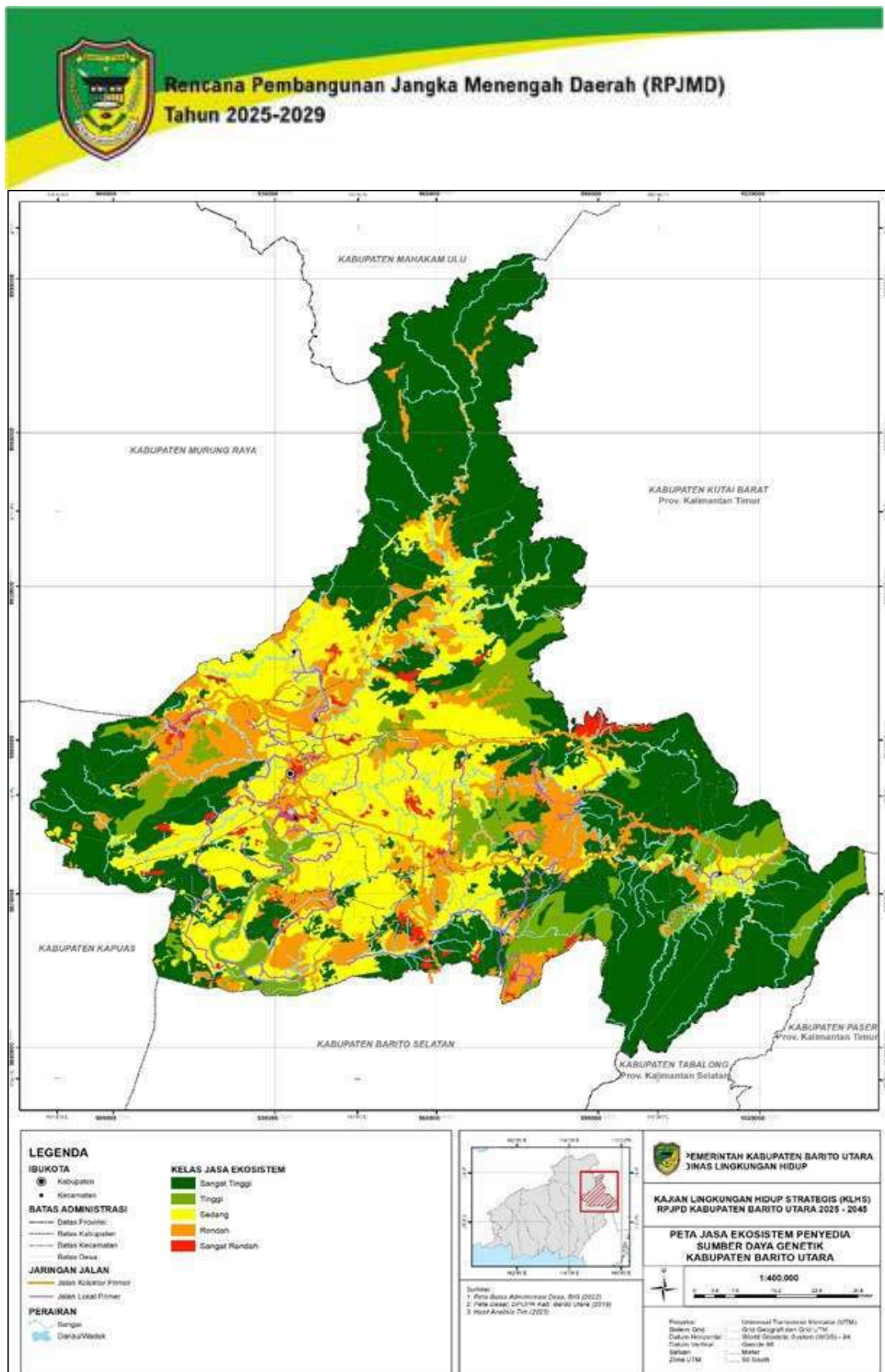


Peta 17.Jasa Ekosistem Penyedia Serat.
(Sumber: KLHS RPJPD Kabupaten Barito Utara Tahun 2025-2029).

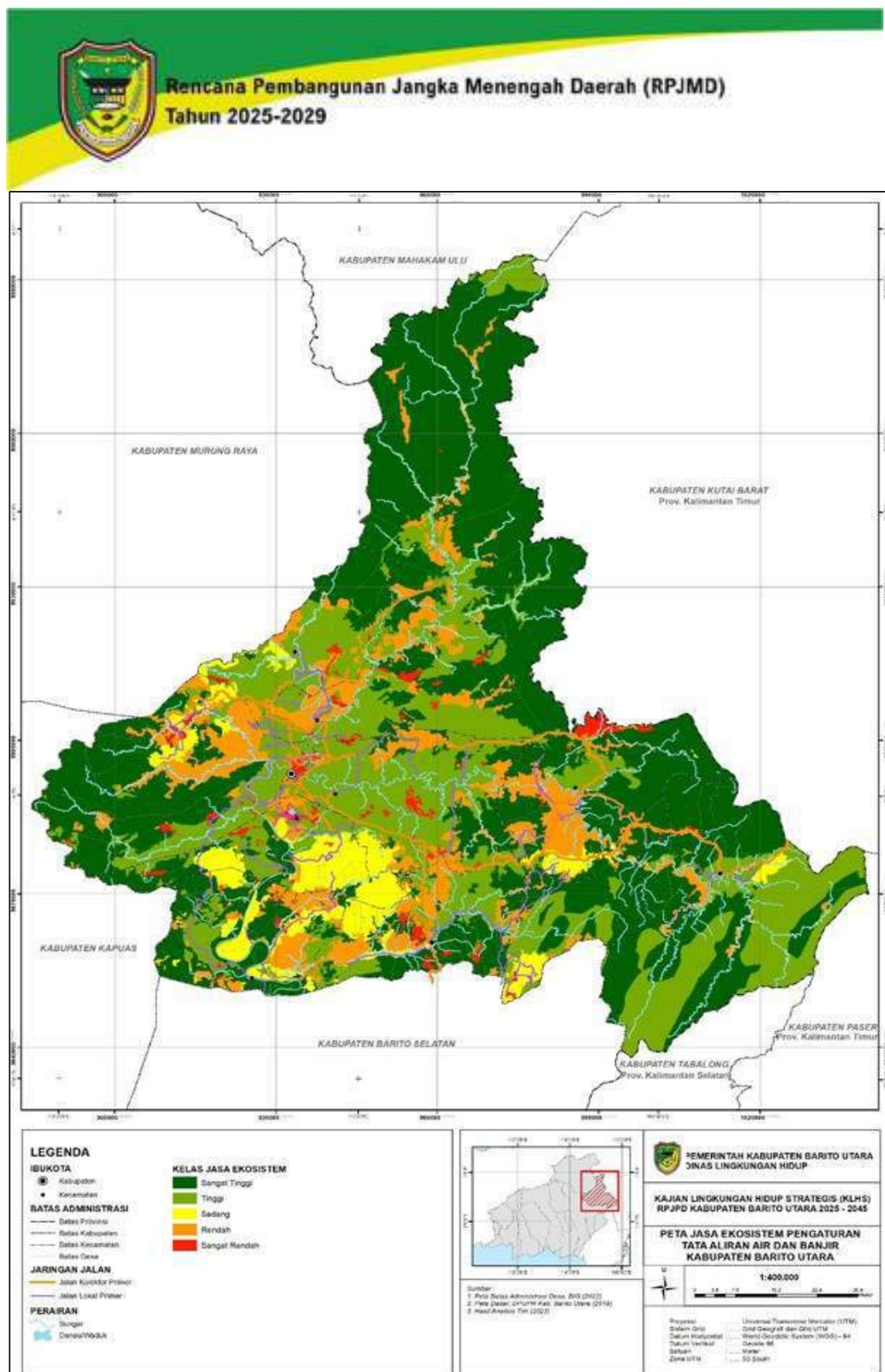
**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Tahun 2025-2029**



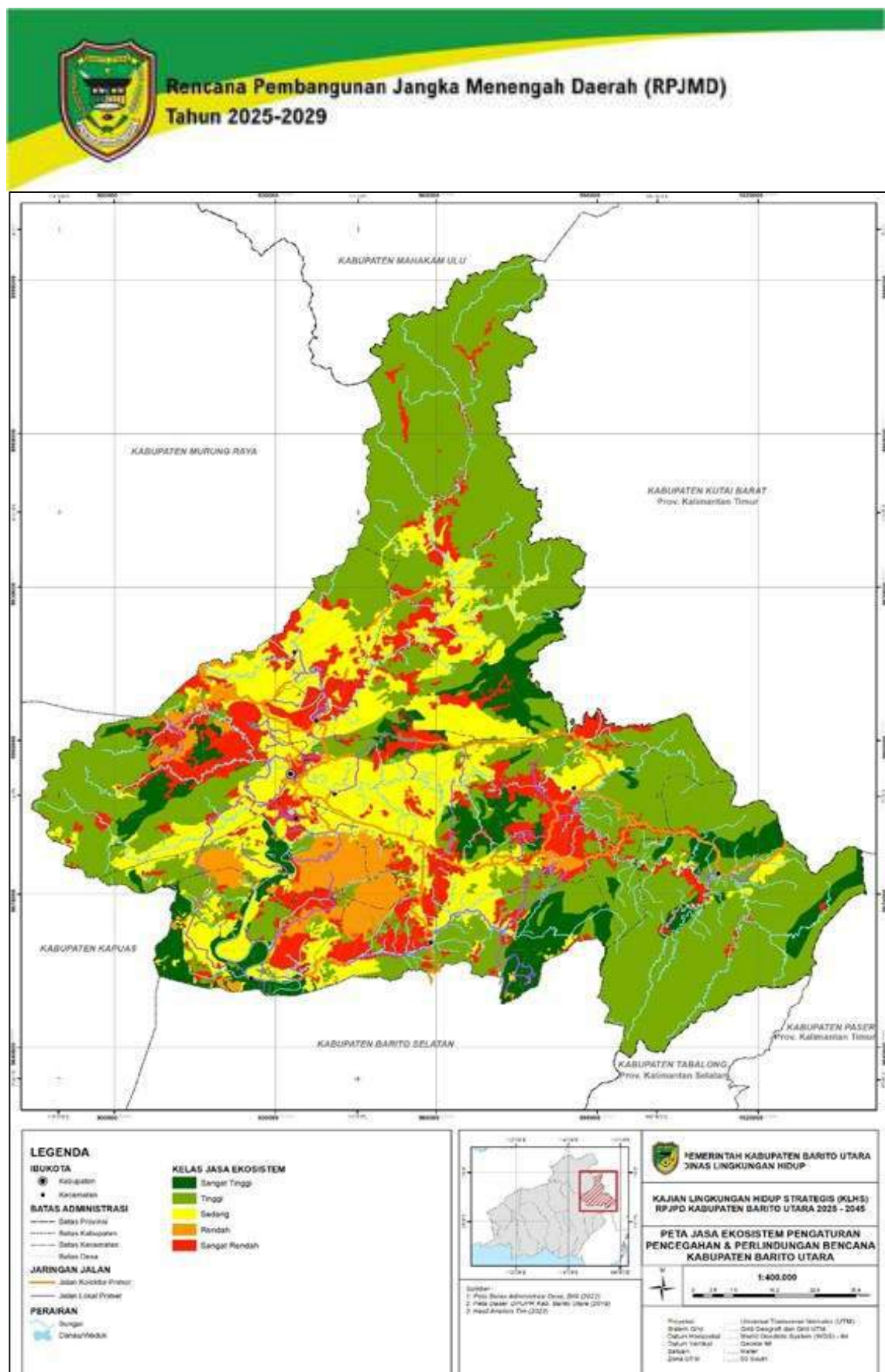
Peta 18. Jasa Ekosistem Penyedia Bahan Bakar.
(Sumber: KLHS RPJPD Kabupaten Barito Utara Tahun 2025-2045).



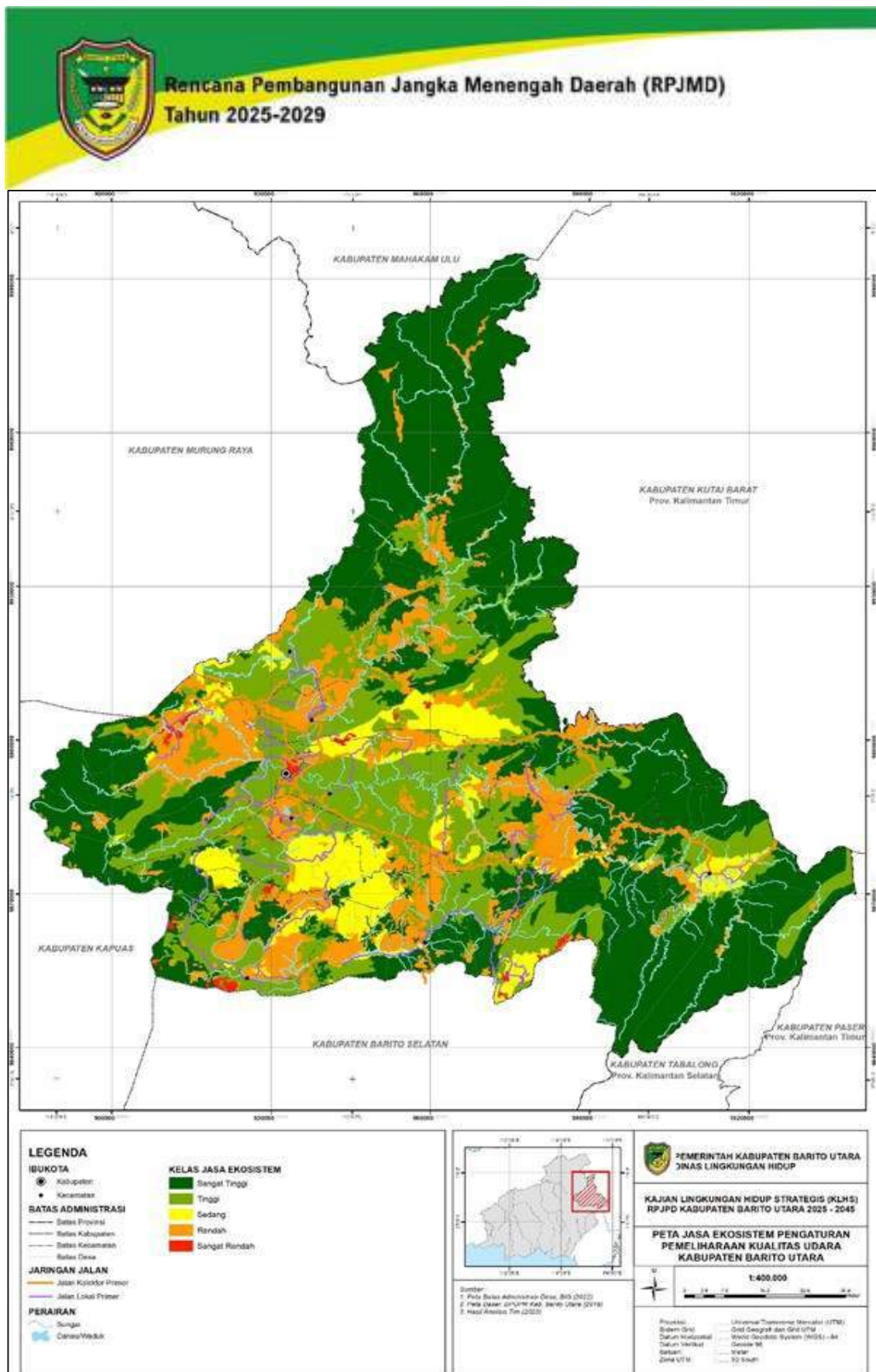
Peta 19. Jasa Ekosistem Penyedia Sumber Daya Genetik.
(Sumber: KLHS RPJPD Kabupaten Barito Utara Tahun 2025-2024).



Peta 20. Jasa Ekosistem Pengaturan Tata Aliran Air dan Banjir.
(Sumber; KLHS RPJPD Kabupaten Barito Utara Tahun 2025-2045).

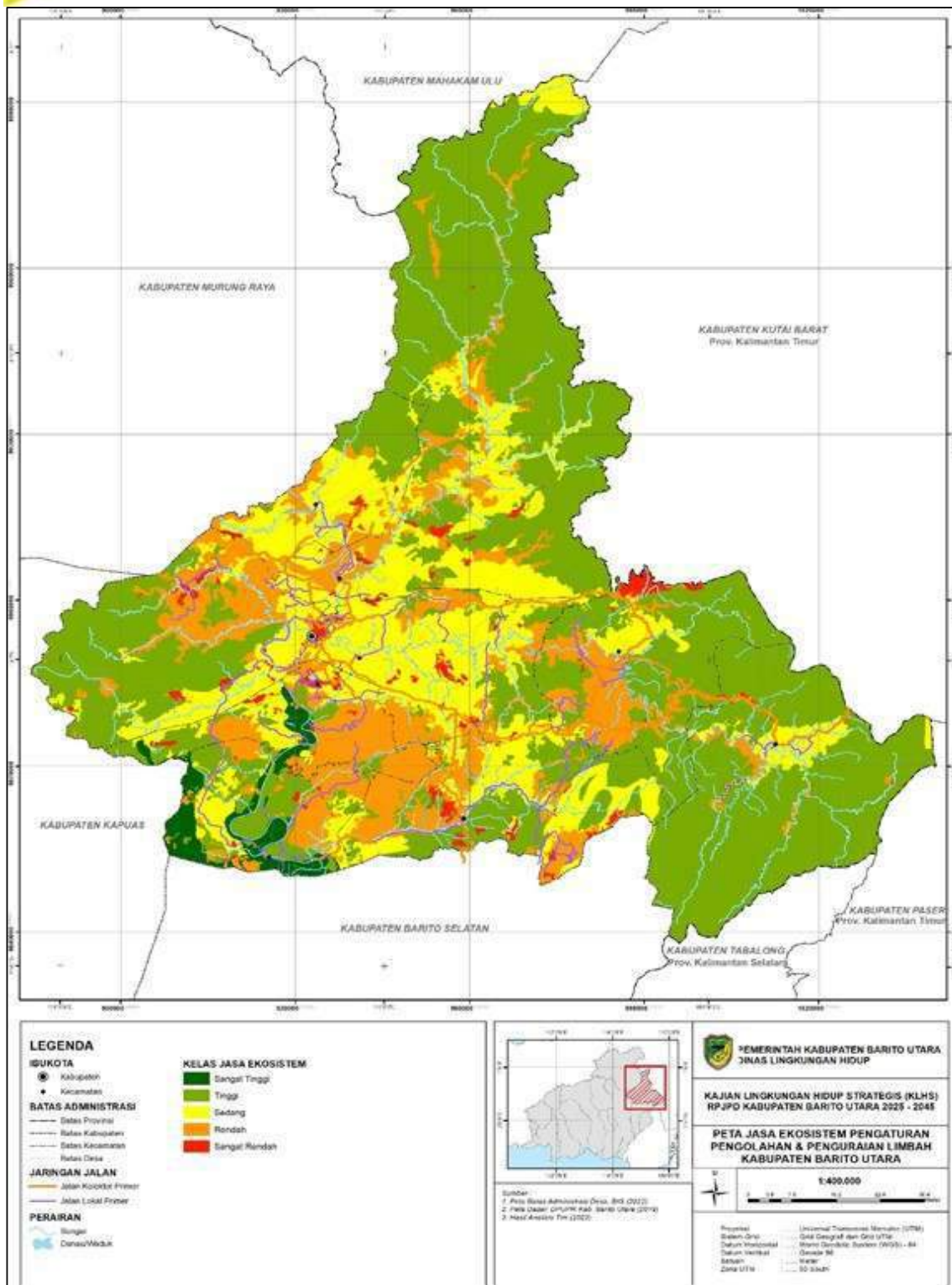


Peta 21. Jasa Ekosistem Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan Bencana.
(Sumber: KLHS RPJPD Kabupaten Barito Utara Tahun 2025-2045).



Peta 22.Jasa Ekosistem Pengaturan Pemeliharaan Kualitas Udara.
(Sumber: KLHS RPJPD Kabupaten Barito Utara Tahun 2025-2045).

**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Tahun 2025-2029**



Peta 23. Jasa Ekosistem Pengaturan Pengolahan dan Penguraian Limbah.
(Sumber: KLHS RPJPD Kabupaten Barito Utara Tahun 2025-2045).

7) Jasa ekosistem budaya

Jasa ekosistem budaya merupakan kemampuan alami ekosistem untuk memberikan manfaat berupa peradaban dan keanekaragaman budaya. Jasa ekosistem budaya terdiri dari tempat tinggal dan ruang hidup, ekowisata, dan estetika. Jasa ekosistem tempat tinggal dan ruang hidup didominasi oleh kategori sedang-rendah (74%), jasa ekosistem budaya ekowisata didominasi oleh kategori sangat tinggi (49%), dan jasa ekosistem budaya estetika didominasi oleh kategori sangat tinggi (49%). Diperlukan keseimbangan antar jasa ekosistem budaya untuk memberikan manfaat yang optimal bagi kehidupan masyarakatnya.



Gambar 2.4. Komposisi Luas Kelas IJE pada Jasa Ekosistem Budaya.

Sumber: KLHS RPJPD Kabupaten Barito Utara Tahun 2025-2045.

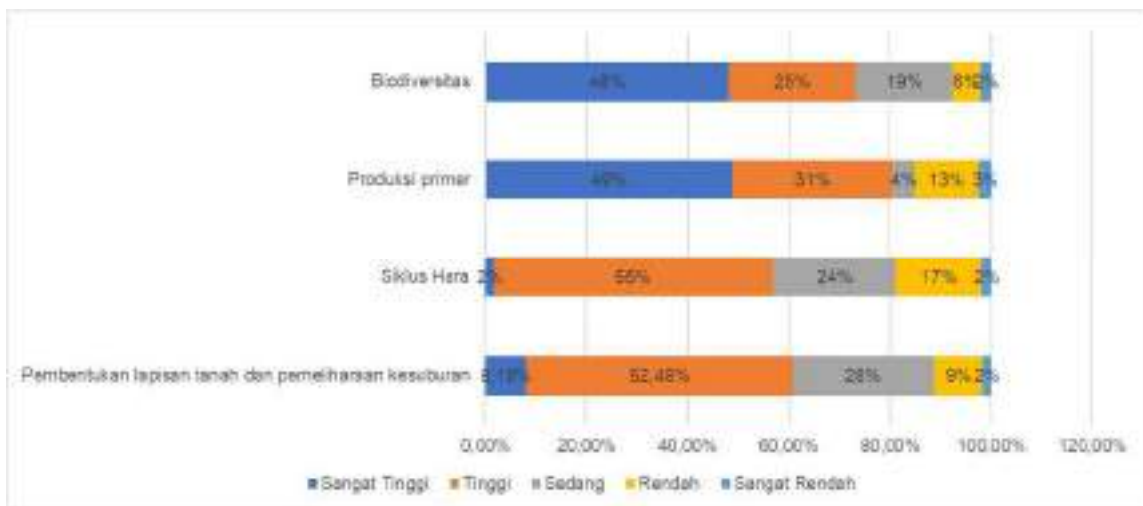
Tabel 2.20. Jasa Ekosistem Budaya di Kabupaten Barito Utara

Jasa Ekosistem Budaya	Sangat Tinggi	Tinggi	Sedang	Rendah	Sangat Rendah
Tempat Tinggal & Ruang Hidup	1,03%	7,53%	46,67%	28,12%	16,65%
Luas (ha)	10.363,74	75.526,20	468.090,54	282.093,34	166.970,17
Ekowisata	49,85%	11,02%	21,45%	3,95%	13,73%
Luas (ha)	500.006,20	110.581,75	215.137,59	39.607,25	137.711,20
Estetika	49,40%	7,26%	24,11%	14,28%	4,96%
Luas (ha)	495.495,97	72.775,86	241.811,68	143.199,28	49.761,21

Sumber: KLHS RPJPD Kabupaten Barito Utara Tahun 2025-2025.

8) Jasa ekosistem pendukung

Jasa ekosistem pendukung memberikan dukungan untuk terjadinya proses-proses alami yang terdiri dari jasa ekosistem pendukung biodiversitas, produksi primer, siklus hara, dan pembentukan lapisan tanah dan pemelihara kesuburan. Jasa ekosistem pendukung di Kabupaten Barito Utara didominasi oleh kategori tinggi-sangat tinggi. Hal tersebut berkaitan dengan kondisi tutupan lahan yang didominasi oleh fungsi lindung sehingga kinerja jasa ekosistem dalam memberikan dukungan proses alami tergolong sangat baik. Kinerja jasa ekosistem pendukung perlu dipertahankan untuk mempertahankan keberlanjutan lingkungan hidup dan keanekaragamannya.



Gambar 2.5. Komposisi Luas Kelas IJE pada Jasa Ekosistem Pendukung.

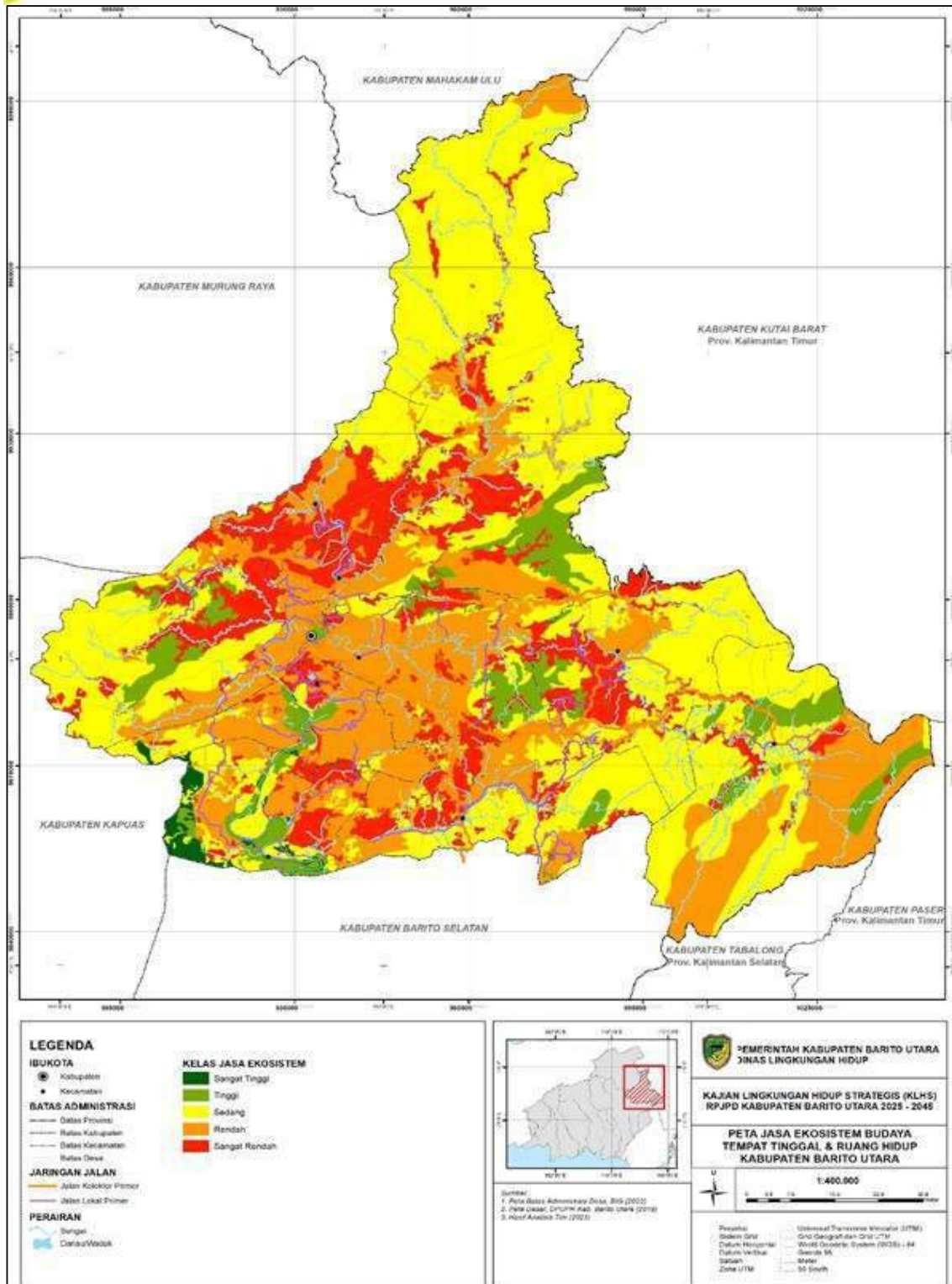
Tabel 2.21. Jasa Ekosistem Pendukung Kabupaten Barito Utara

Jasa Ekosistem Pendukung	Kategori				
	Sangat Tinggi	Tinggi	Sedang	Rendah	Sangat Rendah
Pembentukan lapisan tanah dan pemeliharaan kesuburan	8,18%	52,48%	28%	9%	2%
Luas Lahan (ha)	82.042,09	526.386,66	282.751,71	94.159,44	17.704,10
Siklus Hara	2%	55%	24%	17%	2%
Luas Lahan (ha)	17.864,58	552.490,21	244.870,32	168.222,51	19.596,38
Produksi primer	49%	31%	4%	13%	3%
Luas Lahan (ha)	491.266,57	315.138,24	43.457,75	127.661,39	25.520,05
Biodiversitas	48%	25%	19%	6%	2%
Luas Lahan (ha)	483.386,31	251.414,17	190.451,20	56.902,65	20.889,66

Sumber: KLHS RPJPD Kabupaten Barito Utara Tahun 2025-2025.



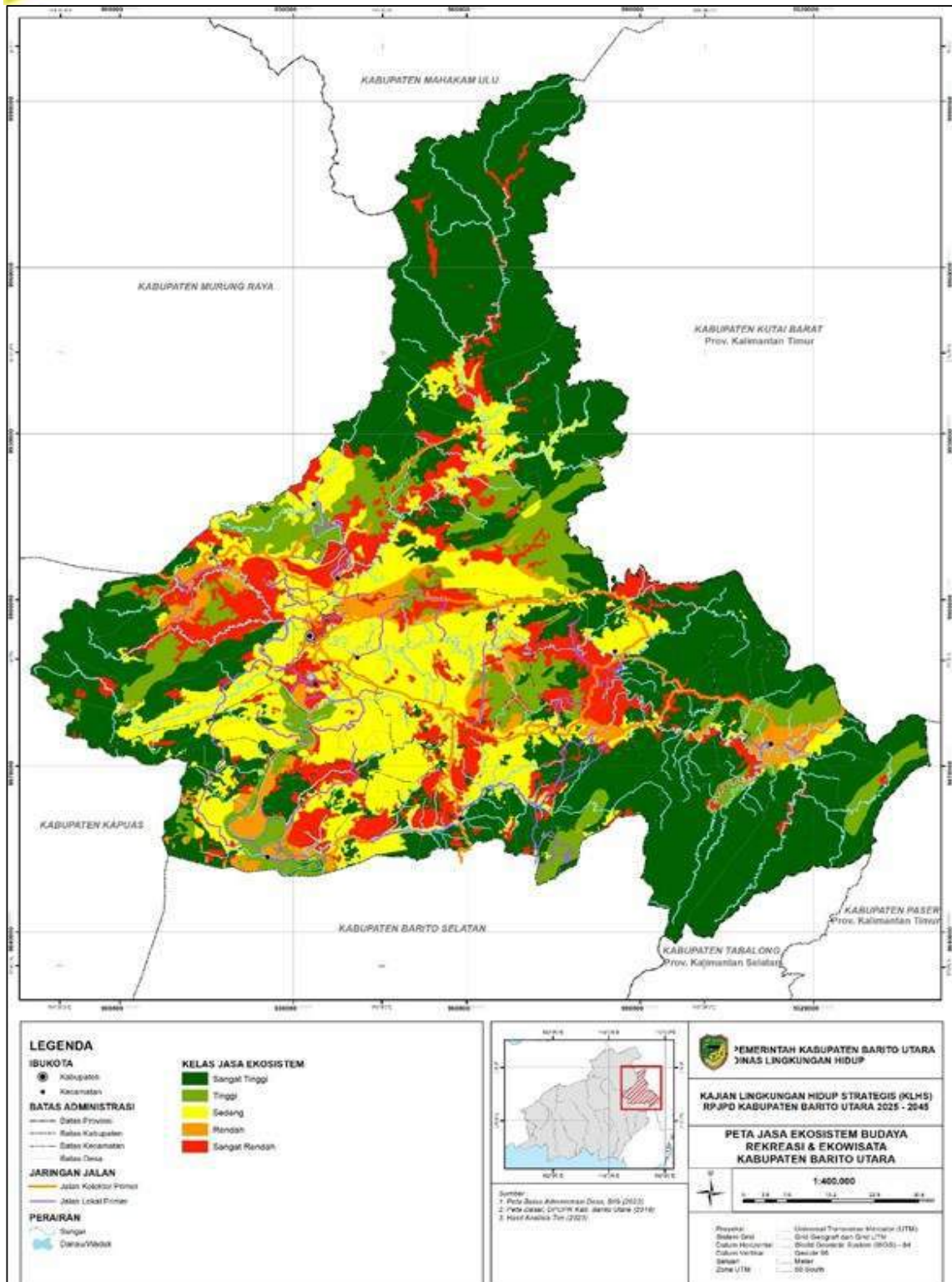
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Tahun 2025-2029



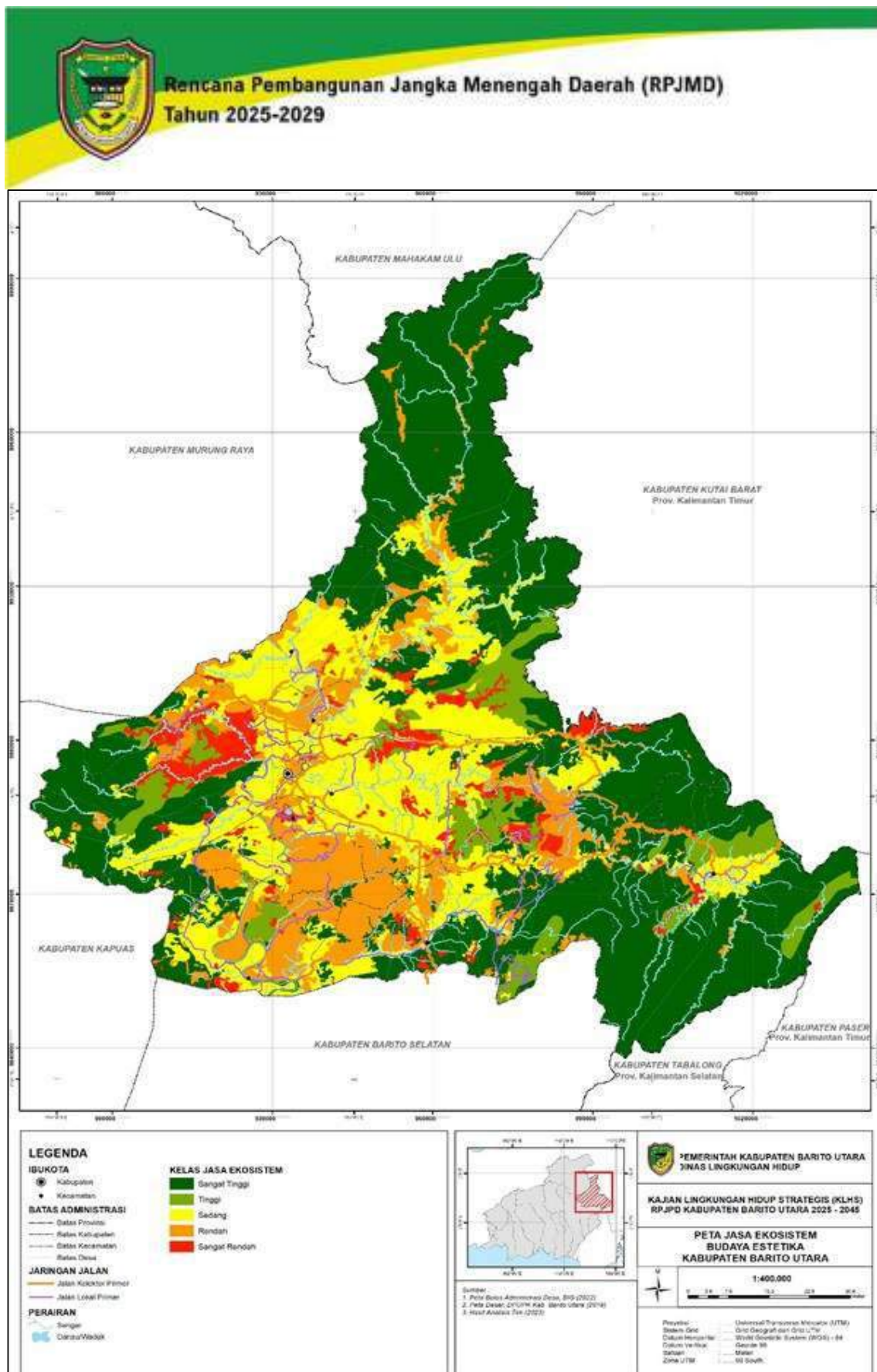
Peta 24. Jasa Ekosistem Budaya Tempat Tinggal dan Ruang Hidup.
(Sumber: KLHS RPJPD Kabupaten Barito Utara Tahun 2025-2045).



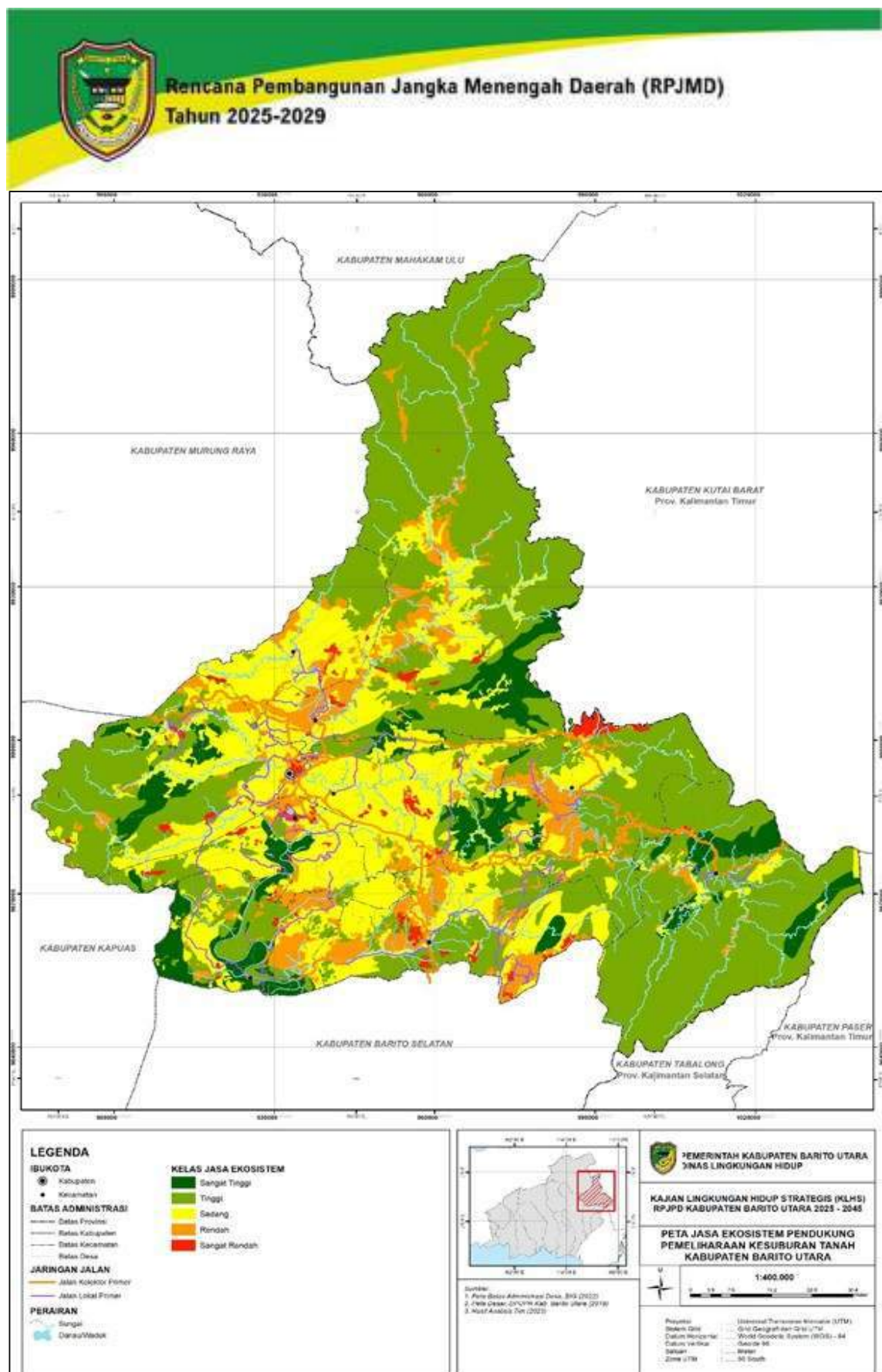
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029



Peta 25. Jasa Ekosistem Budaya Ekowisata.
(Sumber: KLHS RPJPD Kabupaten Barito Utara Tahun 2025-2045).



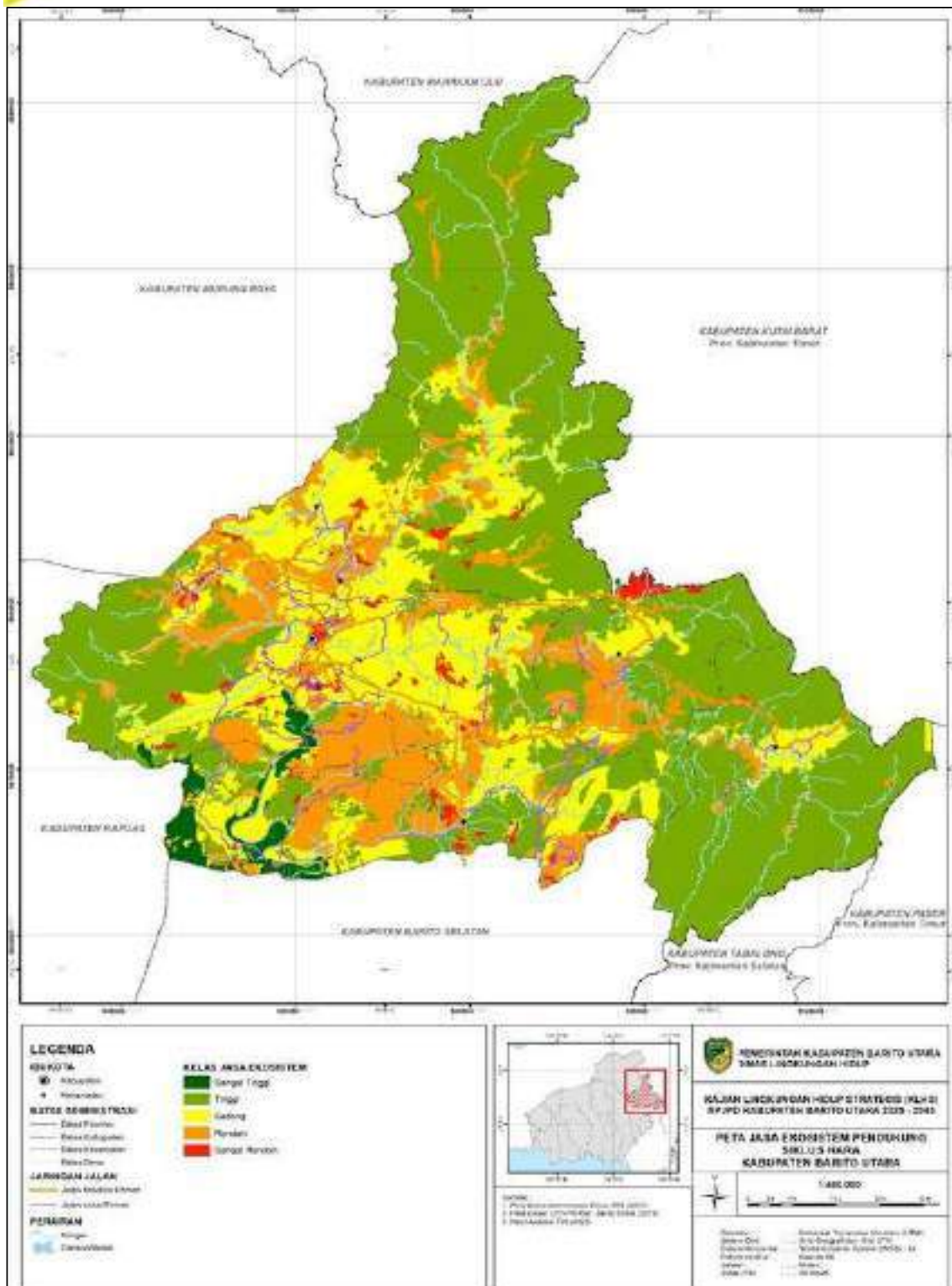
Peta 26. Jasa Ekosistem Budaya Estetika.
(Sumber: KLHS RPJPD Kabupaten Barito Utara Tahun 2025-2045).



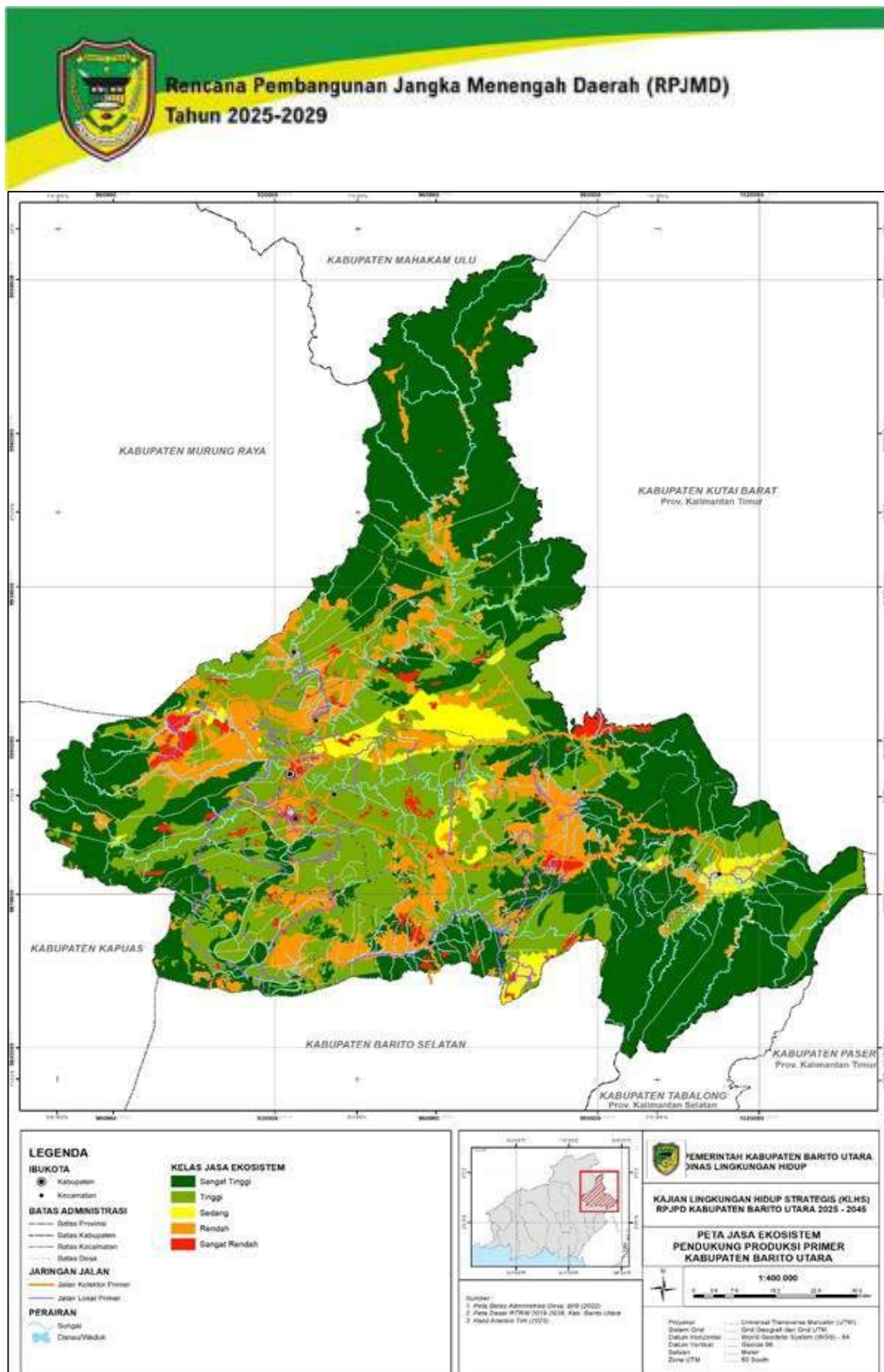
Peta 27. Jasa Ekosistem Pendukung Pemeliharaan Kesuburan Tanah.
(Sumber: KLHS RPJPD Kabupaten Barito Utara Tahun 2025-2045).



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Tahun 2025-2029**



Peta 28. Jasa Ekosistem Pendukung Siklus Hara.
(Sumber: KLHS RPJPD Kabupaten Barito Utara Tahun 2025-2029).



Peta 29. Jasa Ekosistem Pendukung Produksi Primer.
(Sumber: KLHS RPJPD Kabupaten Barito Utara Tahun 2025-2045).

2.1.4. Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan

Ketahanan energi, air, dan pangan merupakan pilar utama dalam mewujudkan kemandirian dan keberlanjutan pembangunan daerah. Kondisi berketahanan energi berarti daerah mampu memenuhi kebutuhan energi masyarakat dan kegiatan ekonomi secara mandiri, efisien, dan ramah lingkungan, dengan memanfaatkan potensi energi lokal seperti energi surya, air, biomassa, dan gas alam.

Berketahanan air mencerminkan kemampuan daerah dalam menjaga ketersediaan dan kualitas sumber daya air untuk kebutuhan domestik, pertanian, dan industri, melalui pengelolaan daerah aliran sungai (DAS), konservasi air tanah, dan infrastruktur air bersih serta sanitasi yang memadai.

Sementara itu, kemandirian pangan ditunjukkan oleh kemampuan daerah dalam memproduksi, mendistribusikan, dan mengelola bahan pangan secara berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, dengan tetap menjaga keberagaman sumber pangan lokal, meningkatkan produktivitas pertanian, dan memperkuat kelembagaan petani.

Secara terpadu, ketahanan energi, air, dan pangan mencerminkan kapasitas daerah dalam menghadapi perubahan iklim, tekanan ekonomi global, serta dinamika sosial, sehingga mampu menjaga kesejahteraan masyarakat dan stabilitas pembangunan jangka panjang.

Matriks ketahanan wilayah per kecamatan di Kabupaten Barito Utara, berdasarkan tiga aspek utama yakni energi, air, dan pangan. Data ini disusun secara kuantitatif dan kualitatif untuk mendukung perencanaan pembangunan berkelanjutan.

Tabel 2.22. Matriks Ketahanan Kecamatan-Kecamatan di Kabupaten Barito Utara

Kecamatan	Akses Energi	Ketersediaan Air	Produksi Pangan	Ketahanan Umum
Montallat	Sedang (PLTS & PLN terbatas)	Tinggi (dekat DAS Barito)	Tinggi (1.041 ha sawah + hortikultura)	Tinggi
Gunung Timang	Sedang (akses BBM terbatas)	Sedang (irigasi non-teknis)	Tinggi (916 ha sawah + peternakan)	Tinggi
Gunung Purei	Rendah (akses listrik minim)	Sedang (air permukaan terbatas)	Rendah (tidak ada sawah, dominan hutan)	Rendah
Teweh Timur	Tinggi (akses PLN stabil)	Tinggi (irigasi teknis tersedia)	Sedang (500 ha sawah + hortikultura)	Sedang
Teweh Tengah	Tinggi (pusat kota)	Tinggi (akses PDAM & sungai)	Rendah (tidak ada sawah)	Sedang
Teweh Baru	Tinggi (akses energi baik)	Tinggi (air tanah & sungai)	Sedang (non-sawah dominan)	Sedang

Kecamatan	Akses Energi	Ketersediaan Air	Produksi Pangan	Ketahanan Umum
Teweh Selatan	Sedang (akses energi cukup)	Sedang (irigasi terbatas)	Tinggi (1.532 ha sawah + peternakan)	Tinggi
Lahei	Sedang (akses BBM terbatas)	Sedang (air permukaan)	Sedang (non-sawah dominan)	Sedang
Lahei Barat	Rendah (akses energi minim)	Rendah (air terbatas)	Sedang (non-sawah dominan)	Rendah-Sedang

Keterangan:

- Akses energi: dinilai berdasar keberadaan jaringan PLN, PLTS, dan distribusi
- Ketersediaan air: berdasar akses terhadap sungai, irigasi, dan air tanah
- Produksi pangan: mengacu pada luas sawah, hortikultura, dan populasi ternak
- Ketahanan umum: sintesis dari ketiga aspek (akses energi, ketersediaan air, dan produksi pangan).

2.1.4.1. Ketersediaan Energi

Energi merupakan elemen vital dalam mendukung aktivitas masyarakat dan pembangunan daerah. Di Kabupaten Barito Utara terdapat dua sumber energi utama yang tersedia dan terus berkembang yakni energi listrik dan air bersih.

1) Listrik PLN

Sejak tahun 2021, listrik PLN telah menjangkau seluruh kecamatan di Kabupaten Barito Utara, termasuk Kecamatan Gunung Purei yang sebelumnya belum teraliri. Pada tahun 2022 tercatat sebanyak 41.008 pelanggan, meningkat sebesar 7,81% pada tahun 2023 menjadi 44.209 pelanggan. Pada tahun 2024 kembali mengalami peningkatan yang sama menjadi 47.525 pelanggan. Kenaikan jumlah pelanggan PLN setiap tahun ini mencerminkan bahwa peningkatan kebutuhan energi listrik di Kabupaten Barito Utara seirama dengan pertumbuhan dan kesejahteraan penduduk.

2) Air bersih PDAM

Pada tahun 2023 tercatat sebanyak 16.696 pelanggan PDAM di Kabupaten Barito Utara, kemudian mengalami peningkatan sebesar 4,68% atau naik menjadi 17.479 pelanggan pada tahun 2024. Adapun untuk air yang disalurkan pada tahun 2023 dan 2024 masing-masing 4.370.976,18 m³ dan 4.469.960,11 m³. Peningkatan jumlah pelanggan dan volume air yang didistribusikan menunjukkan bahwa akses terhadap air bersih semakin meluas, dan menjadi bagian penting dari kesejahteraan masyarakat.

Dari data di atas, menunjukkan kenaikan yang konsisten setiap tahun, mencerminkan peningkatan akses dan kebutuhan masyarakat terhadap layanan dasar energi dan air bersih di Kabupaten Barito Utara. Hal ini menunjukkan ketersediaan energi yang semakin baik dan

merata, ditandai oleh Listrik PLN yang menjangkau seluruh kecamatan, pertumbuhan pelanggan listrik dan air bersih yang konsisten, serta peningkatan volume distribusi air bersih. Ketersediaan energi yang stabil dan meningkat menjadi indikator positif bagi pembangunan daerah, peningkatan kualitas hidup, dan kesiapan menuju transformasi ekonomi berbasis infrastruktur.

2.1.4.2. Sumberdaya Air

Sumber daya air merupakan komponen vital dalam penyediaan layanan dasar, terutama dalam menjamin akses masyarakat terhadap air minum yang layak. Di Kabupaten Barito Utara, keberadaan dan pengelolaan sumber daya air menjadi indikator penting dalam menilai kapasitas tata kelola lingkungan dan pelayanan publik.

Ketersediaan air bersih tidak hanya bergantung pada potensi alamiah seperti sungai dan air tanah, tetapi juga pada infrastruktur distribusi, kualitas pengolahan, serta sistem pengawasan lingkungan. Sungai Barito sebagai tulang punggung hidrologi wilayah ini memiliki peran strategis dalam mendukung kebutuhan air domestik, pertanian, dan industri.

Akses terhadap air minum layak di Kabupaten Barito Utara terus ditingkatkan melalui program penyediaan sarana air bersih, baik melalui jaringan PDAM, sumur bor, maupun sistem penyediaan air minum berbasis masyarakat. Upaya ini sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), khususnya target 6.1 dan 6.2 yang menekankan pentingnya air bersih dan sanitasi untuk semua.

Namun demikian, tantangan masih dihadapi, seperti pencemaran air permukaan, keterbatasan cakupan layanan PDAM, serta degradasi daerah tangkapan air. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kebijakan pengelolaan sumber daya air secara terpadu, berbasis data, dan melibatkan partisipasi masyarakat.

2.1.4.3. Kemandirian Pangan

Kemandirian pangan adalah kemampuan suatu daerah untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakatnya secara berkelanjutan dari produksi lokal. Kabupaten Barito Utara menunjukkan potensi besar dalam sektor pertanian, peternakan, perikanan, dan perkebunan yang saling mendukung ketahanan dan kemandirian pangan.

1) Luas lahan pertanian

Lahan pertanian di Kabupaten Barito Utara yang mencakup sawah irigasi, ladang, dan perkebunan rakyat juga mengalami pertumbuhan. Luasnya lahan pertanian di kabupaten ini mengalami peningkatan dari 56.700 ha (2022) menjadi 57.718 ha (2023), dan terus meningkat menjadi 58.580 ha pada tahun 2024. Perluasan ini memperkuat fondasi produksi pangan dan mendukung intensifikasi pertanian.

Tabel 2.23. Jenis dan Luas Lahan Pertanian Kabupaten Barito Utara Tahun 2022-2024

Jenis Lahan	2022	2023	2024
Sawah irigasi teknis	2.100	2.150	2.200
Sawah tadah hujan	3.350	3.420	3.480
Lahan kering (ladang)	5.750	5.870	6.000
Perkebunan rakyat	45.500	46.278	46.900
Total	56.700	57.718	58.580

Luas lahan pertanian mengalami peningkatan sebesar $\pm 3\%$ per tahun, hal ini menunjukkan adanya komitmen daerah dalam memperluas basis produksi pangan dan mendukung ketahanan pangan jangka panjang.

2) Produksi buah-buahan

Produksi buah-buahan seperti nangka, mangga, dan durian terus mengalami peningkatan dalam rentang 2022-2024. Dari 30.800 kuintal pada tahun 2022, naik menjadi 32.150 kuintal pada tahun 2023, dan terus meningkat mencapai 33.272 kuintal pada tahun 2024. Peningkatan ini menunjukkan keberhasilan diversifikasi pangan lokal dan peningkatan kapasitas petani hortikultura.

Tabel 2.24. Jenis dan Produksi Buah-Buahan di Kabupaten Barito Utara Tahun 2022-2024

Komoditas	Produksi (kuintal/tahun)		
	2022	2023	2024
Nangka/Cempedak	9.800	10.050	10.256
Mangga	6.100	6.500	6.842
Durian	4.900	5.100	5.312
Pepaya	3.100	3.300	3.417
Duku/Langsar	2.700	2.850	2.980
Melinjo	42,00	43,50	44,65
Total	30.800	32.150	33.272

Produksi buah-buahan meningkat rata-rata 4–6% per tahun, dengan nangka/cempedak sebagai komoditas unggulan. Ini menunjukkan potensi kuat untuk diversifikasi pangan lokal.

3) Tanaman hortikultura

Produksi tanaman hortikultura di Kabupaten Barito Utara meliputi:

- Sayuran: produksi tomat meningkat signifikan dari 73 kuintal (2022) menjadi 240 kuintal (2023), dan cabai rawit menjadi komoditas sayur terbesar di tahun 2024 dengan 796,83 kuintal.
- Biofarmaka & Tanaman Hias: Turut berkontribusi dalam diversifikasi pangan dan potensi ekonomi lokal.

Peningkatan produksi hortikultura menunjukkan arah positif menuju swasembada sayur dan buah, meskipun beberapa komoditas seperti bawang merah masih rendah (0,25 kuintal).

4) Peternakan

Populasi ternak besar seperti sapi, kambing, dan babi mengalami penurunan dari 14.514 ekor (2022) menjadi 13.491 ekor (2023), dan 12.860 ekor (2024). Penurunan ini perlu diwaspadai karena dapat berpengaruh terhadap pasokan protein hewani lokal.

Tabel 2.25. Jenis dan Produksi Peternakan Kabupaten Barito Utara Tahun 2022-2024

Jenis Ternak	2022	2023	2024
Sapi potong	3.786	3.800	3.820
Kerbau	69	65	60
Kambing	3.145	3.160	3.180
Babi	7.514	6.466	5.800
Total	14.514	13.491	12.860

Populasi sapi dan kambing relatif stabil, namun populasi babi dan kerbau menurun signifikan. Ini perlu perhatian khusus untuk menjaga keberagaman sumber protein hewani. Ayam pedaging mengalami lonjakan populasi menjadi 1.039.352 ekor (2023), menjadi sumber protein hewani utama. Namun, ayam kampung, petelur, dan itik mengalami penurunan di tahun 2024. Kenaikan ayam pedaging mendukung pasokan daging lokal, namun penurunan unggas tradisional perlu diwaspadai untuk menjaga keberagaman sumber protein.

5) Perikanan budidaya

Kegiatan budidaya perikanan di Kabupaten Barito Utara terdiri atas budidaya keramba dengan produksi 5.880,62 ton/tahun (57,16%), budidaya kolam dengan produksi 4.344,67 ton/tahun, dan budidaya perikanan di sawah/mina dengan produksi 1,25 ton/tahun.

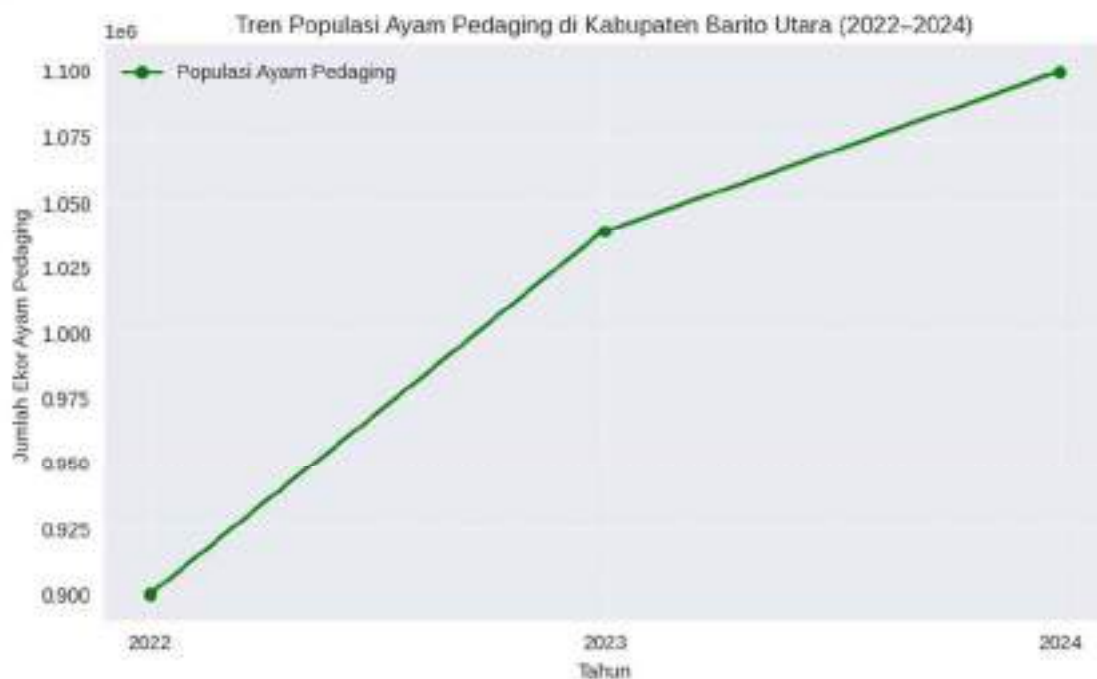
Di Kabupaten Barito Utara, budidaya perikanan menjadi tulang punggung pasokan ikan lokal, terutama dari kegiatan budidaya ikan keramba dan kolam. Wilayah terbesar sebagai pemasok ikan di Kabupaten Barito Utara berasal dari Kecamatan Teweh Tengah dengan produksi ikan sebesar 4.058,64 ton/tahun.

6) Perkebunan

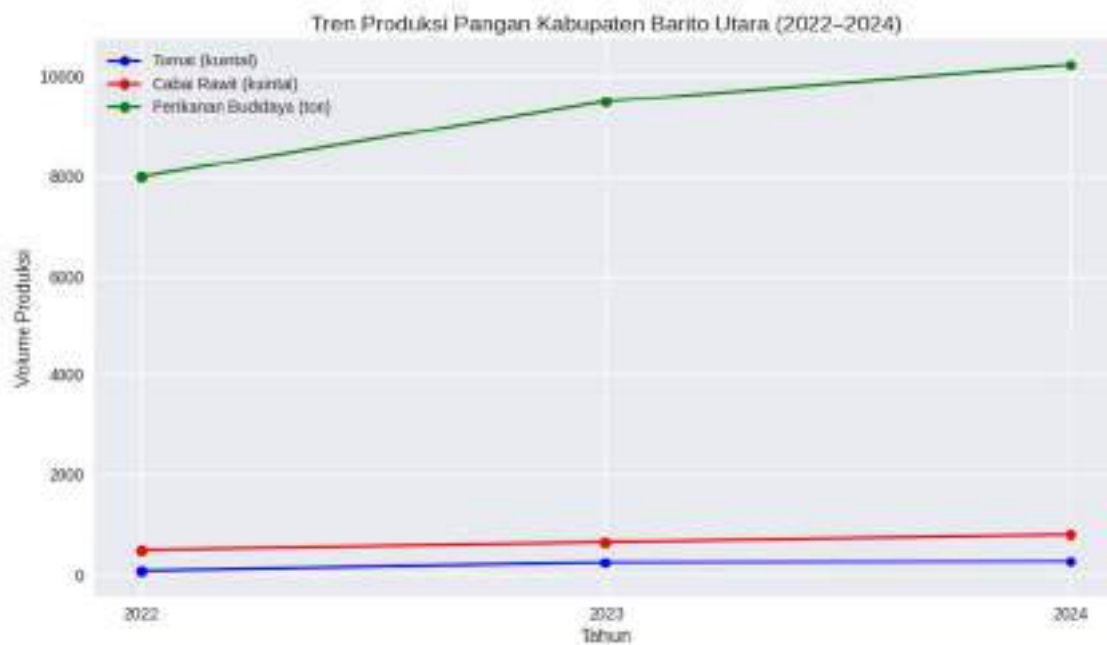
Sektor perkebunan di Kabupaten Barito Utara sangat berperan terhadap perekonomian dan daya beli masyarakat, meski sektor ini bukan sumber pangan langsung. Komoditas utama perkebunan di wilayah ini berupa perkebunan karet dan kelapa sawit. Perkebunan karet mendominasi dengan luas tanam seluas 46.278 ha, dan pada tahun 2024 menghasilkan produk lateks sebesar 37.664 ton. Adapun untuk komoditas kelapa sawit mengalami peningkatan produksi menjadi 8.284,17 ton pada tahun 2024, dari sebelumnya pada tahun 2023 produksinya sebesar 8.151,11 ton. Selain karet dan kelapa sawit, komoditas perkebunan lain berupa kakao. Komoditas ini memiliki luas lahan tanam sebesar 2.000 ha dan menghasilkan produk sebesar 14.000 ton.

Kabupaten Barito Utara memiliki modal kuat untuk kemandirian pangan, ditunjang oleh diversifikasi komoditas hortikultura, lonjakan populasi ayam pedaging, produksi perikanan budidaya yang tinggi, serta luas lahan pertanian yang besar dan tersebar.

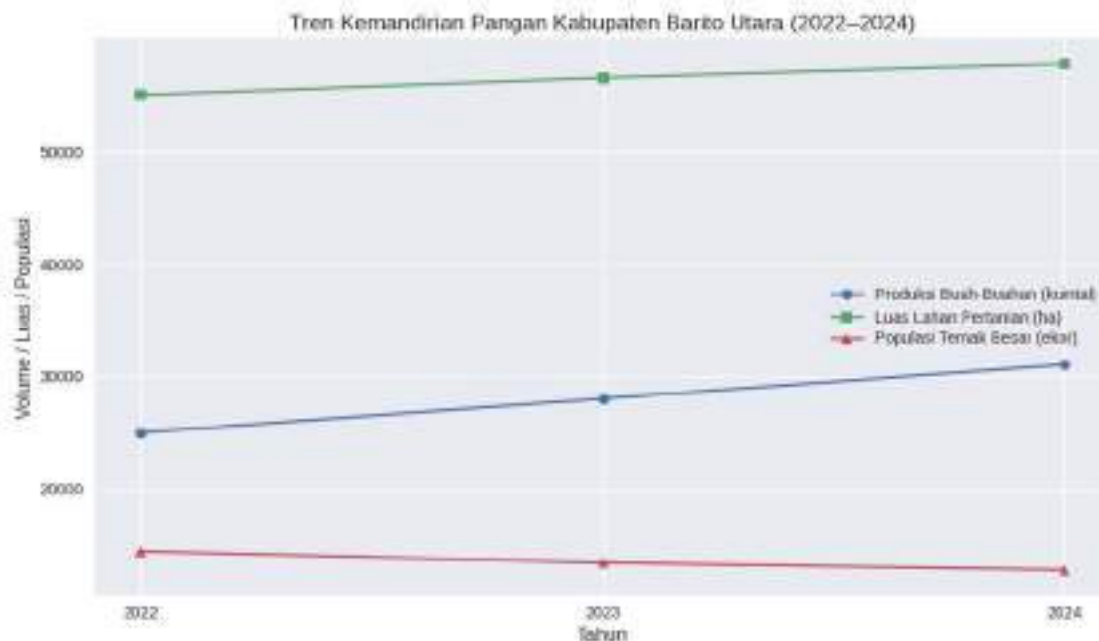
Namun, tantangan tetap ada, seperti rendahnya produksi komoditas strategis (bawang merah, melinjo), penurunan ternak besar dan unggas tradisional, serta ketergantungan pada komoditas perkebunan non-pangan. Sehingga perlu penguatan program intensifikasi dan diversifikasi pangan lokal, dukungan teknologi pertanian, serta pemberdayaan petani dan peternak untuk menjaga kesinambungan produksi dan distribusi pangan.



Gambar 2.6. Tren Populasi Ayam Pedaging.



Gambar 2.7. Tren Produksi Pangan.



Gambar 2.8. Tren Kemandirian Pangan.

Grafik yang tersaji pada Gambar 2.6-2.8 menggambarkan tren perkembangan kemandirian pangan Kabupaten Barito Utara pada rentang tahun 2022–2024, hal ini menunjukkan bahwa kemandirian pangan Kabupaten Barito Utara semakin kuat yang ditandai oleh peningkatan produksi komoditas lokal dan protein hewani.

2.1.5. Lingkungan Hidup Berkualitas

2.1.5.1. Kondisi Lingkungan Hidup

Kondisi lingkungan hidup di Kabupaten Barito Utara diukur menggunakan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yang mencakup penilaian kualitas air, kualitas udara, kualitas tutupan lahan, serta kondisi kualitas air laut. Nilai IKLH mencerminkan upaya-upaya perbaikan kualitas lingkungan hidup, serta upaya untuk mengukur performa perbaikan kualitas lingkungan hidup.

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 27 Tahun 2021 mengenai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, ada 3 indikator utama yang digunakan sebagai komponen untuk menghitung nilai IKLH.

- 2.1. Indikator Kualitas Air (IKA) yang dihitung melalui beberapa parameter, yaitu derajat keasaman (pH), kadar oksigen terlarut (DO), kebutuhan oksigen biologi (BOD),

kebutuhan oksigen kimia (COD), total padatan tersuspensi (TSS), kadar nitrat ($\text{NO}_3\text{-N}$), total fosfat (T-Phosphat), dan kandungan *fecal coliform* (*fecal coli*).

2.2. Indeks kualitas udara (IKU) dengan komponen penilaian berdasarkan parameter NO_2 , SO_2 , dan $\text{PM}_{2.5}$ yang diukur di beberapa Lokasi seperti permukiman, perkantoran, industri, dan transportasi.

2.3. Indikator kualitas tutupan lahan (IKL) dengan parameter pengukuran melalui perhitungan luas tutupan lahan, tutupan vegetasi non-hutan, termasuk semak belukar, ruang terbuka hijau, serta area rehabilitasi hutan dan lahan dalam wilayah yang diamati.

Selain 3 indikator di atas, ada tambahan komponen penilaian yaitu indeks kualitas air laut dengan komponen pengukuran berupa total padatan tersuspensi (TSS), oksigen terlarut (DO), minyak dan lemak, amonia total, dan fosfat (orto fosfat).

Nilai IKLH terbaru Kabupaten Barito Utara pada tahun 2024 adalah **75,93** dan dikategorikan **BAIK**. Nilai IKLH merupakan gabungan dari Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL). Perkembangan IKLH Kabupaten Barito Utara sejak tahun 2018 hingga 2024 menunjukkan adanya fluktuasi nilai yang mencerminkan tantangan dan upaya daerah dalam mengelola kualitas lingkungan hidupnya.

Pada awal periode, sekitar tahun 2018–2024, nilai IKLH berada pada kisaran sedang. Periode ini seringkali menjadi masa awal peningkatan kesadaran dan penataan regulasi lingkungan. Memasuki tahun-tahun pertengahan 2018–2022, terjadi perbaikan signifikan yang membawa nilai IKLH menuju kategori baik, hal ini didorong oleh peningkatan implementasi program pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, khususnya pada sub-indeks seperti IKA dan IKU. Namun, periode ini mungkin juga diwarnai dengan penurunan tajam sesekali (seperti pada 2018 atau 2019) yang dapat disebabkan oleh faktor musiman seperti kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang berpengaruh terhadap nilai IKU, atau peningkatan tekanan kegiatan ekonomi yang berdampak pada nilai IKA dan IKL.

Pada periode terkini, terutama menjelang tahun 2024, Kabupaten Barito Utara berhasil mencapai nilai IKLH yang kuat, yaitu 75,93. Nilai ini menempatkan kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Barito Utara dalam kategori BAIK. Pencapaian ini mengindikasikan bahwa upaya pemerintah daerah dalam sinkronisasi kebijakan pembangunan dan perlindungan lingkungan

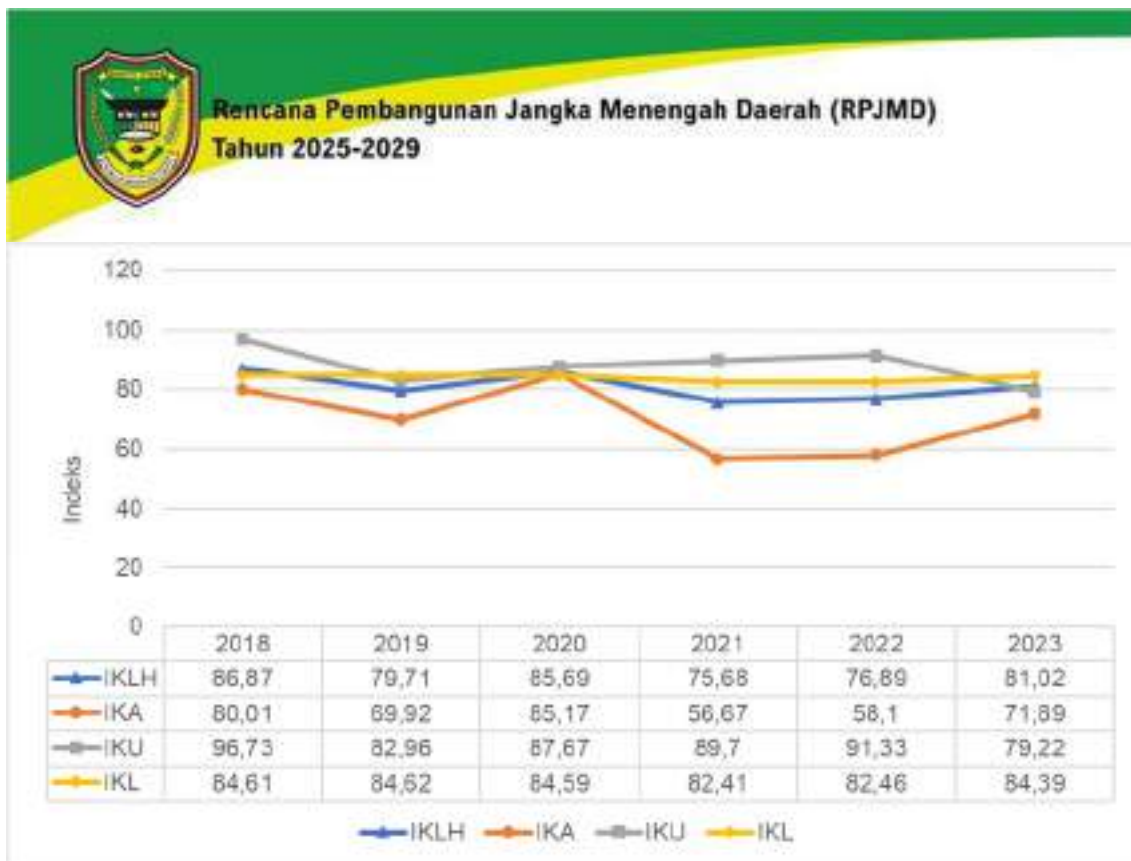


telah membuahkan hasil, memastikan bahwa pengelolaan air, udara, dan lahan secara keseluruhan berada pada kondisi yang terjaga dan berkelanjutan.

Pada awal dekade yaitu tahun 2011, saat kebijakan pengukuran IKLH mulai dirumuskan dalam indikator kinerja utama daerah, kondisi lingkungan hidup di Kabupaten Barito Utara masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain pengendalian pencemaran air, kualitas tutupan lahan, dan pengelolaan ruang terbuka hijau. Seiring waktu (khususnya memasuki pertengahan 2020-an) terjadi peningkatan kesadaran pemerintah daerah untuk menguatkan institusi pengujian lingkungan (misalnya Laboratorium Lingkungan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Utara) sebagai bagian dari dukungan teknis data kualitas lingkungan.

Pada tahun 2022, nilai IKLH yang tercatat 76,89 poin menunjukkan bahwa pendekatan pengelolaan lingkungan telah mengalami kemajuan dibanding target yang ditetapkan. Peningkatan ini bisa diartikan sebagai hasil dari peningkatan pemantauan kualitas air sungai utama (misalnya Sungai Lahei, Sungai Teweh, Sungai Montallat) serta kualitas udara melalui metode *passive sampler*. Namun demikian, kemajuan itu tidak berarti tantangan telah hilang. Tantangan masih ada yang meliputi kerusakan tutupan lahan, deforestasi atau perubahan penggunaan lahan yang belum sepenuhnya terkendali, serta potensi tekanan dari aktivitas industri dan pertambangan yang umumnya menjadi isu lingkungan di Kalimantan.

Upaya penyusunan KLHS RPJMD untuk periode 2025-2029 yang sedang berlangsung menunjukkan bahwa pemerintah daerah menyadari bahwa strategi jangka panjang diperlukan. Melihat prospek hingga 2024 dan seterusnya, jika tren pengelolaan lingkungan tetap diperkuat (dengan data monitoring yang konsisten, penegakan regulasi lingkungan aktif, dan partisipasi masyarakat meningkat), maka IKLH Kabupaten Barito Utara berpotensi melanjutkan kenaikan. Namun, jika faktor-kerusakan lingkungan (seperti pembukaan lahan, kebakaran hutan, aktivitas pertambangan) tidak dikendalikan, maka kenaikan bisa melambat atau bahkan stagnan, dan bukan tidak mungkin akan menurunkan nilai IKLH yang sudah dicapai. Adapun IKLH di Kabupaten Barito Utara dalam kurun waktu 2018-2022 dapat dilihat pada Gambar 2.9.



Gambar 2.9. Tren IKLH Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023.

Sumber: RPJPD Kabupaten Barito Utara 2025-2045 dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Utara.

IKLH merupakan indikator kinerja pengelolaan lingkungan hidup dari kabupaten/kota, provinsi, sampai nasional yang dapat digunakan sebagai bahan informasi untuk mendukung proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Berdasarkan data dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Utara (2024), menunjukkan IKLH selama 2018-2023 berfluktuasi dari 86,87 pada tahun 2018, turun menjadi 79,71 (2019), kemudian naik lagi pada tahun 2020 menjadi 85,69. Namun, pada tahun 2021-2022 mengalami penurunan yakni 75,68 pada tahun 2021 dan 76,89 pada tahun 2022, terakhir pada tahun 2023 kembali naik menjadi 81,02. Metode perhitungan IKLH mengalami perubahan, yakni sebelumnya menggunakan metode:

$$IKLH = (30\% \times IKA) + (30\% \times IKU) + (40\% \times IKTL)$$

Menjadi:

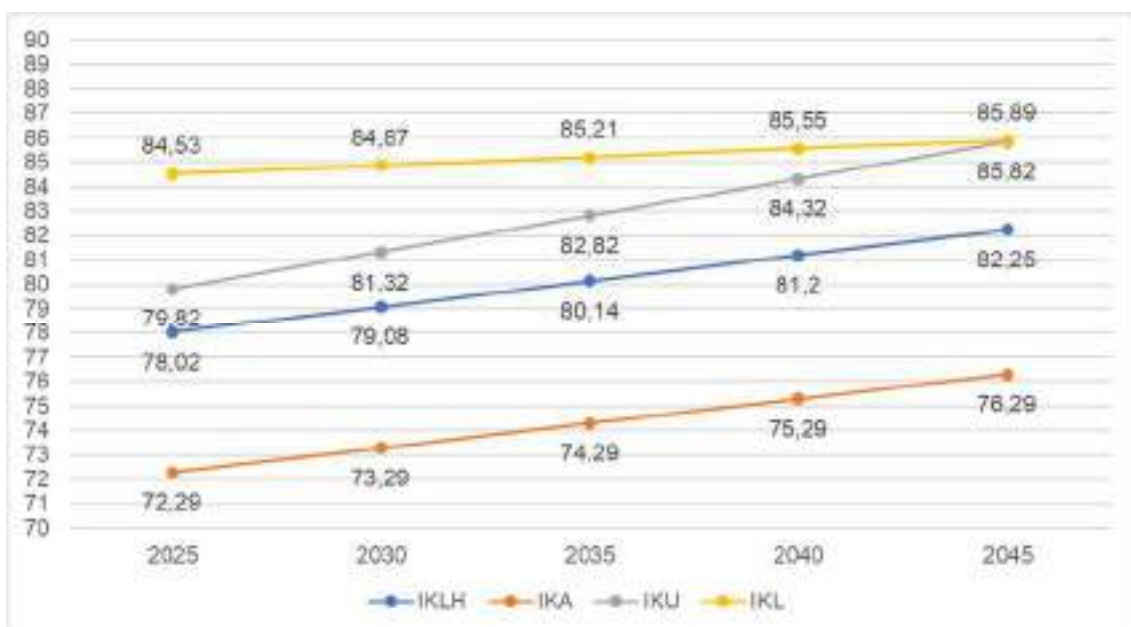
$$IKLH = (0,376 \times IKA) + (0,405 \times IKU) + (0,219 \times IKTL)$$

Berdasarkan perubahan metode perhitungan tersebut, maka nilai IKLH pada tahun 2023 mencapai 81,02 (kategori baik), yang mana ketika menggunakan metode perhitungan lama IKLH pada tahun 2023 adalah 79,94 (kategori baik). Adanya perubahan metode perhitungan mengakibatkan terjadinya kenaikan nilai IKA dari 55,71 menjadi 71,89, penurunan IKU dari 91,5 menjadi 79,22, dan kenaikan IKL dari 81,89 menjadi 84,39.

Target IKLH adalah persyaratan kinerja yang dapat diukur dan dapat dilakukan bagi sebagian dan seluruh organisasi yang timbul dari tujuan lingkungan, dan perlu disusun dan dilaksanakan untuk mencapai seluruh tujuan tersebut. Untuk target perlindungan dan pengelolaan kualitas lingkungan hidup Kabupaten Barito Utara selama kurun waktu 20 tahun (2025-2045) disajikan pada Tabel 2.26.

Tabel 2.26. Proyeksi IKLH Kabupaten Barito Utara Tahun 2025-2045

Uraian	Target				
	2025	2030	2035	2040	2045
IKLH	78,02	79,08	80,14	81,20	82,25
IKA	72,29	73,29	74,29	75,29	76,29
IKU	79,82	81,32	82,82	84,32	85,82
IKL	84,53	84,87	85,21	85,55	85,89



Gambar 2.10. Tren Proyeksi IKLH Kabupaten Barito Utara Tahun 2025-2045.

Proyeksi IKLH Kabupaten Barito Utara memiliki target rata-rata kenaikan 1 poin dalam 5 tahun, seperti target IKA diproyeksikan mengalami kenaikan rata-rata 1 poin, IKU diproyeksikan naik 1,5 poin dalam 5 tahun, IKTL diproyeksikan naik 0,34 poin dalam 5 tahun.

Pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan atau berkelanjutan merupakan upaya dalam menanggulangi masalah kerusakan lingkungan yang terjadi. Proses pembangunan yang berwawasan lingkungan merupakan usaha secara sadar dengan cara menggali sumber daya alam, tetapi tidak merusak sumber daya alam lainnya sehingga dalam

penggunaannya harus memperhatikan pemeliharaan dan perbaikan kualitas dari sumber daya alam tersebut.



Gambar 2.11. Perbandingan Nilai IKLH Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, dan Nasional.

2.1.5.2. Kawasan *Heart of Borneo* (HoB)

Kabupaten Barito Utara memiliki peran ekologis yang sangat vital karena merupakan bagian integral dari Kawasan Jantung Kalimantan (*Heart of Borneo*/HoB). HoB merupakan sebuah inisiatif konservasi transnasional yang melibatkan Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Secara fungsional, HoB termasuk wilayah Barito Utara, adalah sub-bagian krusial dari apa yang didefinisikan sebagai "Paru-Paru Dunia"; yakni hamparan luas hutan tropis basah yang berfungsi fundamental sebagai penyerap karbondioksida, penghasil oksigen, dan penyeimbang iklim global.

Keberadaan hutan di Kabupaten Barito Utara secara langsung mendukung tujuan utama inisiatif HoB yaitu pengelolaan sumber daya secara lestari berdasarkan prinsip konservasi dan pembangunan berkelanjutan. Hal ini berarti Kabupaten Barito Utara tidak hanya bertanggung jawab atas kualitas lingkungan hidup lokalnya, tetapi juga berkontribusi langsung pada stabilitas ekologi regional dan global. Oleh karena itu, setiap kebijakan pembangunan dan pengelolaan sumber daya alam di Kabupaten Barito Utara, khususnya yang berkaitan dengan

IKLH harus selaras dengan prinsip-prinsip konservasi HoB dalam upaya untuk memastikan fungsi vital kawasan ini sebagai penopang kehidupan global tetap terjaga.

Kabupaten Barito Utara merupakan salah satu wilayah penting di Provinsi Kalimantan Tengah yang memiliki posisi strategis dalam konteks konservasi global karena menjadi bagian dari HoB. Sebagai bagian dari wilayah ini, Kabupaten Barito Utara memiliki peran vital dalam menjaga keberlanjutan ekosistem Kalimantan yang menjadi rumah bagi keanekaragaman hayati tingkat tinggi, termasuk spesies endemik seperti orangutan, bekantan, dan berbagai jenis flora-fauna langka yang menjadi indikator kesehatan lingkungan tropis.

Secara geografis Kabupaten Barito Utara memiliki luas wilayah sekitar 8.300 km² dengan bentang alam yang didominasi oleh hutan tropis lebat, perbukitan, serta daerah aliran sungai (DAS) Barito yang menjadi tulang punggung ekosistem dan aktivitas sosial-ekonomi masyarakat. Bagian utara wilayah ini berbatasan langsung dengan Kabupaten Murung Raya, yang juga termasuk dalam lanskap prioritas konservasi HOB. Kawasan ini tidak hanya bernilai ekologis tinggi, tetapi juga mengandung kekayaan sumber daya alam seperti kayu, mineral, dan air, yang menjadikan pengelolaannya harus berimbang antara konservasi dan pemanfaatan ekonomi.

Program Inisiatif *HOB* sendiri merupakan kesepakatan internasional antara 3 negara (Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam) yang ditandatangani pada tahun 2007. Kesepakatan ini bertujuan untuk mengelola sekitar 22 juta ha kawasan hutan di Kalimantan secara lestari dan berkelanjutan dengan prinsip-prinsip konservasi ekosistem, peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal, dan pengendalian perubahan iklim. Di Indonesia, HoB dikenal dengan nama “Jantung Kalimantan”, yang kemudian diterjemahkan ke dalam kebijakan nasional dan daerah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) serta didukung oleh berbagai program di tingkat provinsi dan kabupaten.

Bagi Kabupaten Barito Utara, implementasi HoB tercermin dalam berbagai kegiatan seperti rehabilitasi hutan dan lahan kritis, perlindungan daerah aliran sungai, pengembangan ekowisata berbasis masyarakat, dan peningkatan kapasitas kelembagaan lingkungan hidup daerah. Pemerintah Kabupaten Barito Utara melalui Dinas Lingkungan Hidup telah mengintegrasikan prinsip HoB dalam dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) serta Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (KLHS RPJMD), sebagai bentuk komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan.

Dari perspektif ekologi, posisi Kabupaten Barito Utara di kawasan jantung Kalimantan menjadikannya sebagai penyangga ekologis penting bagi Provinsi Kalimantan Tengah. Hutan di wilayah ini berperan dalam mengatur tata air, menyerap emisi karbon, serta menjaga stabilitas iklim mikro. Selain itu, kawasan ini juga berkontribusi pada IKLH provinsi, terutama melalui peningkatan IKTL dan IKA yang cenderung membaik dalam beberapa tahun terakhir. Namun, tantangan besar masih dihadapi, antara lain tekanan dari aktivitas pertambangan batubara, perkebunan kelapa sawit, pembalakan liar, dan alih fungsi lahan. Aktivitas ini berpotensi menurunkan fungsi ekologis kawasan dan mengancam keutuhan hutan tropis yang menjadi inti dari HOB. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Barito Utara perlu terus memperkuat kolaborasi lintas batas administratif dan sektoral, baik dengan pemerintah provinsi, lembaga pusat, maupun negara tetangga dalam kerangka HoB, guna memastikan keseimbangan antara konservasi lingkungan dan pembangunan ekonomi tetap terjaga.

Secara keseluruhan, keberadaan Kabupaten Barito Utara di dalam kawasan jantung Kalimantan merupakan kebanggaan sekaligus tanggung jawab besar. Kabupaten ini tidak hanya berperan sebagai entitas administratif, tetapi juga sebagai penjaga paru-paru dunia tempat dimana keberlanjutan hidup manusia dan alam semesta saling terikat dalam harmoni ekosistem tropis. Dengan menerapkan prinsip “konservasi untuk kesejahteraan”, Barito Utara dapat menjadi contoh nyata bagaimana wilayah dengan potensi sumber daya alam tinggi mampu bertransformasi menjadi model pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan di tingkat lokal, nasional, bahkan global.

Kawasan jantung Kalimantan (*HOB*) adalah sebagian dari kawasan paru-paru dunia yang terletak di bagian wilayah Pulau Kalimantan yang telah disepakati bersama antara Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam untuk dikelola berdasarkan prinsip-prinsip konservasi dan pembangunan berkelanjutan. Inisiatif HOB yang di Indonesia bertujuan untuk pengelolaan lestari terhadap wilayah di Borneo seluas sekitar 265.000 km² (26,5 juta ha). Inisiatif ini telah disepakati dan diumumkan oleh menteri tiga negara tersebut pada pertemuan para menteri (*ministerial meeting*) yang diselenggarakan di Denpasar pada tanggal 12 Februari 2007. Selanjutnya, pada *Trilateral Meeting* yang diadakan di Pontianak, pada tanggal 4-5 April 2008, ketiga negara telah menyepakati dokumen *Strategic Plan of Action (SPA) of Heart of Borneo* sebagai arahan bagi ketiga negara anggota untuk mengembangkan Rencana Strategis dan Aksi Nasional (*National Strategic Plan of Action/NSPA*) oleh masing-masing negara.

Kawasan HoB di Indonesia kebanyakan terletak di sepanjang jajaran perbukitan Kalimantan sebelah utara. Di kawasan ini terdapat 13 wilayah perbukitan dengan ketinggian bervariasi antara 1.681 mdpl di Gunung Cemar di Kalimantan Barat hingga 2.987 mdpl di Gunung Makita di Taman Nasional Kayan Mentarang. Kondisi topografi di wilayah HoB Indonesia kebanyakan berupa tebing terjal. Kawasan ini juga memiliki tiga danau besar yakni Danau Jempang (15.000 ha) di Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur, Danau Semayang (13.000 ha), dan Danau Melintang (11.000 ha) di Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur.

Kawasan HoB di Indonesia terbentang sepanjang perbatasan Pulau Kalimantan dengan negara bagian Sarawak dan Sabah di Malaysia, yang kemudian diperluas hingga ke wilayah tangkapan air Pulau Kalimantan. Kawasan HoB seluas 16,8 juta ha ini kebanyakan ditutupi oleh hutan pegunungan tropis. Kawasan ini sesungguhnya merupakan koridor keanekaragaman hayati yang amat kaya, dan menghubungkan 4 kawasan konservasi dengan luas total mencapai 4,465 juta ha yaitu Taman Nasional Kayan Mentarang di Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara, Taman Nasional Danau Sentarum di Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat, Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya di Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat, dan Taman Nasional Betung Kerihun di Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat. Kawasan konservasi yang luasnya sekitar 40,89% dari HoB merupakan habitat yang sangat penting bagi ribuan spesies tumbuhan dan sekitar 900 spesies satwa liar, sehingga menjadikan Kalimantan sebagai wilayah yang memiliki kekayaan spesies tertinggi di Indonesia.

Spesies satwa liar yang ditemukan di kawasan tersebut antara lain 221 spesies mamalia, 358 spesies burung penetap, dan 254 spesies reptilia. Sekitar 34% dari spesies ini merupakan spesies endemik Kalimantan, termasuk Orangutan Kalimantan (*Pongo pygmaeus*) dan Gajah Kerdil (*Elephas maximus borneensis*). Kawasan konservasi tersebut juga memiliki fungsi sangat penting sebagai daerah tangkapan air bagi 17 sungai utama di Kalimantan (9 Daerah Aliran Sungai/DAS dan 8 sub-DAS), di antaranya adalah Sungai Mahakam, Sungai Barito, Sungai Kahayan, Sungai Katingan, Sungai Sesayap, Sungai Sembakung, Sungai Melawi, dan Sungai Kapuas, semuanya menyediakan air dan mengatur tata air ke bagian hilir di Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur.

Pengelolaan lahan yang ramah lingkungan dan penyusunan tata ruang yang tepat, dapat mengurangi dampak negatif yang mungkin ditimbulkan seperti bencana banjir,

kekeringan, dan tanah longsor. Berdasarkan hasil analisis citra satelit Sentinel perekaman tahun 2023 terdapat 14 jenis tutupan lahan di Kabupaten Barito Utara. Tutupan lahan paling dominan di Kabupaten Barito Utara berupa hutan sekunder sebesar 62,62%, selanjutnya pertanian campuran sebesar 17,65%. Untuk tutupan lahan berupa permukiman hanya sebesar 0,32%, sedangkan untuk sawah hanya 0,10%.

Tabel 2.27. Luas dan Persentase Penggunaan Lahan Kabupaten Barito Utara

Tutupan Lahan	Luas (ha)	Persentase (%)
Hutan primer	44.091,26	4,42
Hutan rawa primer	4.384,37	0,44
Hutan rawa sekunder	3.640,98	0,36
Hutan sekunder	625.241,01	62,62
Rawa	1.988,49	0,20
Semak belukar	4.018,96	0,40
Perkebunan sawit	46.103,84	4,62
Permukiman	3.232,04	0,32
Pertanian campuran	176.206,26	17,65
Pertanian lahan kering	59.822,43	5,99
Sawah	1.027,40	0,10
Sungai	7.565,54	0,76
Pertambangan	8.856,01	0,89
Tegalan/ladang	12.302,23	1,23
Total	998.480,80	100,00

Sumber: Dokumen RPJPD Kabupaten Barito Utara Tahun 2025-2045.

2.1.5.3. Pengelolaan Sampah

Penanganan persampahan di kabupaten Barito Utara hingga saat ini hanya bisa melayani wilayah ibukota kabupaten (Muara Teweh) dan sekitarnya yaitu kelurahan Melayu dan Lanjas serta wilayah luar kota yang relatif terjangkau unit pengangkut yaitu di jalan arteri dan jalan kolektor serta sebagian jalan di komplek perumahan. Sementara gang di permukiman padat menggunakan mobil *pick up* dan motor roda 3 (tiga). Secara umum kondisi pengelolaan sampah di Barito Utara belum maksimal mengingat terbatasnya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan walaupun Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang ada di KM. 13 Desa Ipu sudah menggunakan sistem *Sanitary Landfill* (luas TPA Barito Utara 5,3 ha dengan sel aktif seluas 1,2 ha).

Keterbatasan jumlah Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) dan belum adanya Tempat Pengolahan Sampah berdasarkan prinsi *Reduce*, *Reuse*, dan *Recycle* (TPS 3R) menjadi masalah tersendiri, khususnya di ibukota kabupaten. Rencana ke depan, Pemerintah daerah merencanakan membangun TPS 3R di komplek CBD Dermaga kelurahan Lanjas

sebagai wujud nyata pemerintah daerah dalam melaksanakan regulasi persampahan nasional.

Keberadaan sarana penampungan sampah sementara (TPS) di beberapa tempat menimbulkan polemik pada sebagian masyarakat karena fasilitas berupa bangunan permanen TPS relatif sulit untuk dibersihkan, dan kurangnya kesadaran masyarakat untuk tidak membuang sampah yang melebihi daya tampung TPS, dan bahan berbahaya lainnya. Keadaan ini memaksa pemerintah daerah untuk merubah bangunan permanen TPS menjadi sarana *portable* (bak sampah besar) yang relatif mudah dioperasikan dan dibersihkan. Retribusi jasa layanan sampah yang menjadi satu paket dengan penarikan jasa layanan PDAM masih perlu disempurnakan karena menimbulkan polemik ketidakpuasan sebagian masyarakat yang tidak terlayani jasa pengangkutan sampah tetapi masih tetap diwajibkan membayar retribusi sampah. Bentuk penyempurnaannya adalah dengan cara penarikan retribusi sampah hanya kepada warga yang terlayani pengangkutan sampah.

1) Kewenangan pengelolaan kebersihan

- a. Kewenangan pengelolaan kebersihan menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dan masyarakat secara keseluruhan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Kebersihan di Kabupaten Barito Utara pasal 4.
- b. Pemerintah daerah dalam pengelolaan kebersihan berupa (pasal 5):
 - Pemeliharaan kebersihan atas sampah di jalan umum (protokol), pengangkutan dan pembuangan atas sampah dari tempat dan fasilitas umum, Pengelolaan sampah di kota Muara Teweh sudah dilakukan melalui beberapa pendekatan baik dengan cara pengurangan maupun daur ulang/*recycle*. Upaya pengurangan sampah misalnya dalam penggunaan kantong plastik dan barang plastik telah diedukasikan melalui sekolah-sekolah antara lain dengan membagikan *tumbler* dan sedotan. Untuk mendukung kegiatan tersebut juga dibuat Surat Edaran Bupati kepada seluruh SOPD, instansi vertikal, Bank, serta dunia usaha lainnya. Melalui program Adipura, kegiatan pengelolaan sampah juga telah diperkenalkan ke sekolah-sekolah, lingkungan permukiman dan serta fasilitas umum (pasar, terminal, dan pelabuhan).
 - Pemeliharaan kebersihan atas sampah di pasar, pengangkutan dan pembuangan ke TPA

- Pengaturan dan penetapan lokasi TPS dan TPA
 - Pengangkutan sampah dari TPS ke TPA
 - Pembuangan atau pemusnahan dan pemanfaatan sampah.
- c. Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pengelolaan kebersihan atas sampah melalui kebijakan mengurangi sampah sejak dari sumbernya, pemanfaatan atau penggunaan kembali, daur ulang dan pengomposan sampah secara maksimal (pasal7).

2) Luas daerah pelayanan

Pengelolaan Kebersihan di Kabupaten saat ini masih berada di Ibu Kota Kabupaten Barito Utara yaitu kota Muara Teweh yang berada di Kecamatan Teweh Tengah, sedangkan lingkup pelayanan kebersihan meliputi 4 kelurahan yaitu kelurahan Melayu, Lanjas, Jambu dan Jingah dengan luas 22.117 ha.

3) Pengelolaan sampah

- a. Jumlah timbunan sampah pada sekitar 150-300 m³/hari yang terbagi 67 TPS/Kontainer permanen dan 40 Lokasi bak sampah profil.
- b. Jumlah volume sampah terangkut sekitar 150-286 m³/hari
- c. Jumlah sampah yang tidak terkelola sekitar 10-15 m³/hari
- d. Timbunan Sampah di TPA rata-rata setiap hari sekitar 286 m³/hari
- e. Timbunan Sampah se-Kabupaten Barito Utara 104.592 m³/tahun (untuk Kelurahan Melayu, Lanjas, Jingah dan Jambu dengan asumsi berdasarkan jumlah penduduk pada empat Kelurahan).

Pemilahan sampah dilakukan mulai dari tingkat RT, sekolah, perkantoran dan fasilitas publik dengan menyediakan bak/tong sampah (sampah organik dan sampah anorganik). Dengan proses pemilahan, sampah akan lebih mudah ditangani, untuk jenis sampah organik (sisa sayur dan buah-buahan) bisa dimanfaatkan sebagai kompos atau pupuk cair, dan untuk jenis sampah anorganik (botol/gelas plastik, kardus, kaleng, dan lain-lain) bisa dijual kembali ke bank sampah. Saat ini di Kabupaten Barito Utara untuk kegiatan pengomposan dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup, dan untuk bank sampah telah terdapat 5 (lima) bank sampah yang siap melayani para nasabah untuk menabung sampahnya. Timbunan sampah di Kabupaten Barito Utara mengalami peningkatan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir.



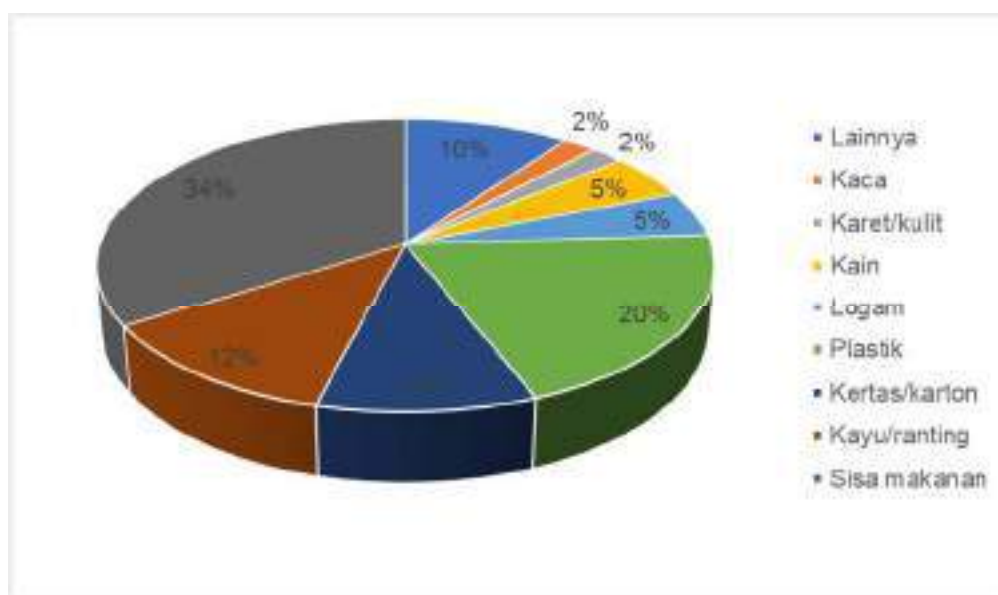
Gambar 2.12. Timbulan Sampah Kabupaten Barito Utara Tahun 2019-2023.

Berdasarkan data timbulan sampah Kabupaten Barito Utara dalam kurun waktu tahun 2019 hingga 2023, terlihat adanya tren peningkatan volume sampah yang cukup signifikan setiap tahunnya. Pada tahun 2019 dan 2020, timbulan sampah harian tercatat sebesar 52,29 ton per hari atau sekitar 19.084 ton per tahun. Angka ini menunjukkan kondisi relatif stabil pada awal periode, yang menggambarkan aktivitas ekonomi dan kepadatan penduduk yang masih dalam skala moderat. Namun, mulai tahun 2021, terjadi kenaikan volume sampah harian menjadi 63,37 ton per hari, dengan total timbulan tahunan mencapai 23.129 ton.

Peningkatan ini terus berlanjut pada tahun 2022 dengan timbulan sampah harian sebesar 61,93 ton per hari, sedikit menurun dibanding tahun sebelumnya namun tetap lebih tinggi dibanding periode tahun 2019–2020. Tren meningkat kembali pada tahun 2023, dimana timbulan sampah harian mencapai 65,30 ton per hari, atau setara dengan 23.833 ton per tahun, menjadi nilai tertinggi dalam 5 tahun terakhir.

Secara kumulatif, selama periode tahun 2019–2023 total timbulan sampah di Kabupaten Barito Utara mencapai 107.735 ton per tahun, dengan rata-rata harian sebesar 59 ton per hari. Kenaikan volume sampah ini berkorelasi dengan pertumbuhan penduduk, peningkatan aktivitas ekonomi, urbanisasi, serta pola konsumsi masyarakat yang semakin tinggi. Selain itu, berkembangnya sektor perdagangan, industri kecil, dan peningkatan penggunaan bahan kemasan sekali pakai turut mempercepat laju timbulan sampah di wilayah perkotaan seperti Muara Teweh. Tren tersebut menunjukkan bahwa sistem pengelolaan persampahan di Kabupaten Barito Utara perlu semakin diperkuat, baik dari aspek pengumpulan, pengangkutan, pemilahan, maupun pengolahan akhir.

Tanpa intervensi kebijakan dan infrastruktur yang memadai, peningkatan timbulan sampah berpotensi menimbulkan dampak lingkungan seperti pencemaran air dan udara, tumpukan sampah di TPA, serta gangguan estetika lingkungan perkotaan. Oleh karena itu, diperlukan strategi pengelolaan berbasis reduksi di sumber (*reduce*), pemanfaatan kembali (*reuse*), dan daur ulang (*recycle*) untuk menekan laju peningkatan timbulan sampah, sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan dan kebijakan *Zero Waste 2025* yang diusung oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).



Gambar 2.13. Komposisi Sampah Berdasarkan Jenis Sampah di Kabupaten Barito Utara.

Komposisi sampah berdasarkan jenis sampah di Kabupaten Barito Utara didominasi sisa makanan dengan proporsi sebesar 34% dari total timbulan sampah. Komposisi ini menunjukkan bahwa sebagian besar sampah di wilayah tersebut berasal dari aktivitas rumah tangga, pasar tradisional, dan sektor kuliner yang menghasilkan limbah organik tinggi. Sisa makanan yang melimpah ini sebenarnya memiliki potensi besar untuk diolah menjadi kompos atau pupuk organik melalui sistem pengelolaan berbasis masyarakat.

Komponen terbesar kedua adalah sampah plastik sebanyak 20%, yang menunjukkan tingginya penggunaan bahan plastik sekali pakai dalam aktivitas harian masyarakat, baik dalam bentuk kantong belanja, kemasan makanan, maupun botol minuman. Sampah plastik ini merupakan tantangan serius karena sifatnya yang sulit terurai dan berpotensi mencemari tanah serta perairan.

Selanjutnya, sampah kayu dan ranting mencakup sekitar 12%, disusul oleh kertas/karton sebanyak 10%. Kedua jenis sampah ini relatif mudah dikelola melalui proses daur ulang atau pemanfaatan kembali untuk energi biomassa. Jenis sampah logam dan kain masing-masing menyumbang sekitar 5%, yang umumnya berasal dari aktivitas industri kecil, rumah tangga, dan perbaikan barang. Sementara karet/kulit dan kaca masing-masing hanya menyumbang 2% dari total timbulan, menunjukkan kontribusi yang kecil tetapi tetap memerlukan sistem pengumpulan dan pemrosesan khusus.

Adapun kategori lainnya mencakup sekitar 10%, yang dapat berupa abu, debu, atau campuran material lain yang tidak teridentifikasi secara spesifik. Secara keseluruhan, pola komposisi ini menunjukkan bahwa di Kabupaten Barito Utara memiliki dominasi sampah organik (46%), yaitu dari sisa makanan dan kayu/ranting, yang menandakan adanya potensi besar dalam pengembangan pengelolaan sampah organik berbasis ekonomi sirkular. Namun demikian, tingginya porsi sampah plastik dan anorganik lainnya juga menuntut penguatan kebijakan pengurangan plastik sekali pakai, peningkatan fasilitas daur ulang, serta partisipasi masyarakat dalam pemilahan sampah sejak dari sumber.

Strategi pengelolaan terpadu yang menekankan prinsip *reduce, reuse, recycle* (3R) akan menjadi kunci untuk menekan volume timbulan dan meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah di Kabupaten Barito Utara. Mayoritas timbulan sampah di kabupaten ini didominasi oleh jenis sampah organik dan anorganik yang mudah didaur ulang atau dikomposkan. Sisa makanan menjadi komponen terbesar, menyumbang 34% dari total sampah, menunjukkan perlunya fokus pada pengelolaan sampah organik, baik melalui pengomposan atau pengolahan limbah makanan.

Komponen anorganik yang signifikan adalah plastik sebesar 20%, yang menempatkannya di posisi kedua dan menjadi indikasi utama perlunya program pengurangan penggunaan plastik sekali pakai dan peningkatan daur ulang. Gabungan dari sampah mudah terurai lainnya, yaitu kayu/ranting (12%), dan sampah anorganik berupa kertas/karton (10%) serta logam (5%) dan kain (5%), menunjukkan potensi besar untuk program bank sampah dan fasilitas daur ulang terpadu. Sementara itu, komponen seperti karet/kulit (2%), kaca (2%), dan lainnya (10%) merupakan persentase yang lebih kecil, namun tetap memerlukan penanganan spesifik. Secara keseluruhan, data ini menggarisbawahi pentingnya strategi pengelolaan sampah yang berorientasi pada pengurangan volume sampah organik di sumbernya, dan

peningkatan tingkat daur ulang untuk sampah anorganik guna menekan laju timbunan yang berakhir di TPA.



Gambar 2.14. Komposisi Sampah Berdasar Sumber Sampah di Kabupaten Barito Utara.

Tabel 2.28. Komposisi Sampah Berdasar Sumber Sampah di Kabupaten Barito Utara Tahun 2019-2023

Tahun	Volume Sampah (ton)						
	Rumah Tangga	Perkantoran	Pasar	Perniagaan	Fasilitas Publik	Kawasan	Lain
2023	32,50	5,20	24,00	2,00	1,50	2,00	1,50
2022	32,50	5,20	24,00	2,00	1,50	2,00	1,50
2021	32,50	5,20	24,00	2,00	1,50	2,00	1,50
2020	32,50	5,20	24,00	2,00	1,50	2,00	1,50
2019	32,50	5,20	24,00	2,00	1,50	2,00	1,50

Komposisi sampah berdasarkan sumber sampah di Kabupaten Barito Utara berasal dari rumah tangga dengan kontribusi sebesar 47% dari total keseluruhan. Hal ini menunjukkan bahwa aktivitas domestik seperti konsumsi harian, pengolahan makanan, serta penggunaan barang sekali pakai merupakan penyumbang terbesar dalam sistem persampahan daerah. Jenis sampah dari sektor ini umumnya berupa sisa makanan, plastik kemasan, kertas, dan limbah organik lainnya yang masih memiliki potensi untuk dimanfaatkan kembali melalui kegiatan pengomposan dan daur ulang.

Sumber terbesar kedua berasal dari pasar tradisional, yang menyumbang sekitar 35,64% dari total sampah. Pasar menjadi salah satu titik penghasil sampah utama karena

aktivitas perdagangan bahan makanan segar seperti sayur, buah, dan ikan yang menghasilkan limbah organik dalam jumlah besar. Selain itu, penggunaan kantong plastik dalam transaksi jual-beli juga menambah volume sampah anorganik yang sulit terurai. Oleh karena itu, pengelolaan sampah pasar memerlukan perhatian khusus melalui penerapan sistem pemilahan di sumber dan pengelolaan terpadu antara pedagang, pengelola pasar, dan pemerintah daerah.

Sementara itu, perkantoran berkontribusi sekitar 7,52%, yang sebagian besar berupa kertas, plastik, dan sampah domestik ringan dari aktivitas administrasi. Sektor perniagaan atau perdagangan jasa memberikan sumbangan sampah sebesar 3,33%, menunjukkan adanya peningkatan aktivitas ekonomi non-pasar seperti toko, warung, dan usaha mikro. Di sisi lain, fasilitas publik seperti sekolah, rumah ibadah, terminal, dan taman menyumbang 2,17%, sedangkan kawasan tertentu seperti area rekreasi, permukiman padat, dan tempat umum lainnya memberikan kontribusi 2,89%.

Adapun kategori lainnya hanya mencakup 1,45%, yang meliputi sumber-sumber campuran di luar kategori utama. Secara keseluruhan, data ini mengindikasikan bahwa pengelolaan sampah di Kabupaten Barito Utara perlu difokuskan pada dua sektor utama, yakni rumah tangga dan pasar, karena keduanya menyumbang lebih dari 80% total timbunan sampah daerah. Optimalisasi pengelolaan sampah dari dua sektor ini dapat dilakukan melalui peningkatan kesadaran masyarakat dalam memilah sampah, penerapan sistem bank sampah, serta penerapan *reduce-reuse-recycle* (3R). Selain itu, pemerintah daerah perlu memperkuat regulasi dan infrastruktur pengelolaan di sumber, seperti penyediaan fasilitas pemilahan, transportasi ramah lingkungan, serta pengembangan TPST dan TPA berbasis *sanitary landfill* agar timbunan sampah dapat dikendalikan secara efektif dan berkelanjutan.

Kewenangan pengelolaan persampahan di Kabupaten Barito Utara menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dan masyarakat secara keseluruhan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Kebersihan di Kabupaten Barito Utara. Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pengelolaan kebersihan atas sampah melalui kebijakan mengurangi sampah sejak dari sumbernya, pemanfaatan atau penggunaan kembali (daur ulang), dan pengomposan sampah secara maksimal.

Pengelolaan atau penanganan persampahan di Kabupaten Barito Utara saat ini dengan lingkup pelayanan kebersihan meliputi 4 (empat) kelurahan yaitu Kelurahan Melayu, Lanjas,

Jambu, dan Kelurahan Jingah dengan luas area kurang lebih 22.117 ha. Tabel 2.29 menyajikan data jumlah sampah yang dihasilkan dengan asumsi berdasarkan jumlah penduduk pada 4 (empat) kelurahan dan peta ruas jalan yang dilayani dengan pengangkutan sampah langsung di Kabupaten Barito Utara.

Tabel 2.29. Volume Sampah yang Dihasilkan dari Pengelolaan Sampah di Kabupaten Barito Utara

No	Uraian	Jumlah Yang Dihasilkan
1	Timbunan sampah (Terbagi 67 TPS/Kontainer permanen dan 40 lokasi bak sampah)	150 – 300 m ³ /hari
2	Volume sampah terangkut	150 – 286 m ³ /hari
3	Sampah yang tidak dikelola	10 – 15 m ³ /hari
4	Timbunan sampah rata-rata sampah di TPA setiap hari	286 m ³ /hari
5	Timbunan sampah se-Kab. Barito Utara	104.592 m ³ /hari

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kab. Barito Utara, 2021

Keterangan:

- Untuk Kel. Melayu, Lanjas, Jingah, dan Jambu dengan asumsi berdasarkan jumlah penduduk.

Secara umum kondisi pengelolaan sampah di Kabupaten Barito Utara belum maksimal mengingat terbatasnya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan, walaupun TPA yang ada di jalan negara Muara Teweh-Puruk Cahu Km. 13 Desa Ipu sudah menggunakan sistem *Sanitary Landfill* dengan luas TPA sekitar 5,3 ha dengan sel aktif seluas 1,2 ha.

Proses pengangkutan sampah ke TPA, dalam hal ini ditangani oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang melalui Bidang Tata Kota, sampah dari berbagai sumber (pasar, permukiman, sekolah, perhotelan dan tempat lainnya) ditampung sementara di TPS dan selanjutnya akan diangkut dengan menggunakan truk sampah ke lokasi TPA. Volume sampah yang diangkut dalam sehari rata-rata 57 ton/hari dengan jumlah penduduk Kabupaten Barito Utara sekitar 1.504.800 jiwa terbagi menjadi 3 (tiga) kelurahan yaitu Kelurahan Lanjas, Kelurahan Melayu dan Kelurahan Jingah.

No	Keterangan	Tahun 2021 (Ton/Tahun)	Tahun 2022 (Ton/Tahun)	Perubahan Tahun 2022–2021 (Ton/Tahun)	Perubahan Tahun 2022–2021 (%)
e	Pengangkutan*				
	Sampah Diangkut Ke Tempat Pengolahan Sampah (Residu Pemilahan)	-	-	-	-
	Sampah Diangkut Ke Tempat Pemrosesan Akhir (Residu Pengolahan)	-	-	-	-
f	Pengolahan	43,8	43,8	0	0
	Jumlah Sampah Terolah Menjadi Bahan Baku (Pakan Ternak, Kompos, Daur Ulang, Dan Upcycle)	43,8	43,8	0	0
	Jumlah Sampah Termanfaatkan Menjadi Sumber Energi	0	0	0	-
g	Pemrosesan Akhir	16.060,00	16.060,00	0	0
	Jumlah Sampah Yang Terproses Di Tempat Pemrosesan Akhir	16.060,00	16.060,00	0	0

Sumber: SIPSN LH Kab. Barito Utara, 2022.



Gambar 2.16. Capaian Kinerja Pengelolaan Sampah Kabupaten Barito Utara.



Tabel 2.31. Capaian Kinerja Pengelolaan Sampah Kabupaten Barito Utara Tahun 2019-2023

Tahun	Timbulan Sampah Tahunan (ton/tahun)	Pengurangan Sampah Tahunan (ton/tahun)	% Pengurangan Sampah	Penanganan Sampah Tahunan (ton/tahun)	% Penanganan Sampah	Sampah Terkelola Tahunan (ton/tahun)	% Sampah Terkelola	Daur Ulang Sampah Tahunan (ton/tahun)	Bahan Baku Sampah Tahunan (ton/tahun)	Recycling Rate
	A	B	B/A	C	C/A	B+C	(B+C)/A	D	E	(D+E)/A
2023	23.833,48	1.411,46	5,92	12.088,80	50,72	13.500,26	56,64	1.411,46	43,8	6,11
2022	22.603,87	1.429,46	6,32	9.168,80	40,56	10.598,26	46,89	1.429,46	43,8	6,52
2021	23.129,61	4.745,94	20,52	16.103,80	69,62	20.849,74	90,14	1.461,01	43,8	6,51
2020	19.084,10	4.177,03	21,89	13.545,15	70,98	17.722,18	92,86	1.005,49	40,15	5,48
2019	19.084,10	3.683,25	19,3	13.355,35	69,98	17.038,60	89,28	746,3	32,85	4,08

Capaian kinerja pengelolaan sampah Kabupaten Barito Utara berfluktuasi antara volume timbulan, pengurangan, dan penanganan sampah selama periode tahun 2019 hingga 2023. Secara umum, total timbulan sampah menunjukkan tren meningkat dari 19.084 ton pada tahun 2019–2020 menjadi 23.129 ton pada tahun 2021, kemudian 22.603 ton pada tahun 2022, dan mencapai 23.833 ton pada tahun 2023. Kenaikan ini menggambarkan peningkatan aktivitas ekonomi dan populasi di wilayah perkotaan seperti Muara Teweh, serta meningkatnya konsumsi masyarakat yang menghasilkan lebih banyak limbah domestik.

Dari sisi pengurangan sampah, capaian tertinggi terjadi pada tahun 2021 sebesar 4.745,94 ton, meningkat dari 3.683,25 ton pada tahun 2019, dan 4.177,03 ton pada tahun 2020. Namun setelah itu, capaian pengurangan mengalami penurunan tajam pada tahun 2022 dan 2023, masing-masing hanya mencapai 1.429,46 ton dan 1.411,45 ton. Penurunan ini dapat mengindikasikan bahwa program pengurangan di sumber sampah, seperti penerapan prinsip *reduce, reuse, recycle* (3R), bank sampah, serta edukasi pemilahan di rumah tangga belum berjalan secara optimal, atau menghadapi kendala teknis dan partisipasi di lapangan. Sebaliknya, capaian penanganan sampah menunjukkan pola yang relatif lebih baik hingga tahun 2021 dengan peningkatan dari 13.355 ton (2019) menjadi 13.545 ton (2020) dan kemudian melonjak ke 16.103 ton pada tahun 2021. Namun capaian ini, menurun drastis menjadi 9.168 ton pada tahun 2022, sebelum naik kembali menjadi 12.088 ton pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan adanya upaya pemerintah daerah untuk memperbaiki sistem penanganan, seperti pengangkutan, pemrosesan di TPA, serta penguatan armada operasional pada tahun 2023.

Jika dibandingkan secara rasio antara timbulan dan total pengurangan–penanganan menunjukkan bahwa sekitar 50–60% sampah masih belum tertangani secara optimal, terutama pada tahun 2022 ketika terjadi ketimpangan cukup besar antara volume timbulan dan kemampuan penanganan. Kondisi ini mengindikasikan perlunya peningkatan efektivitas sistem pengelolaan, baik melalui penambahan infrastruktur TPA yang memadai, optimalisasi TPST, peningkatan frekuensi pengangkutan, maupun pelibatan masyarakat dalam program pengelolaan berbasis sumber sampah.

Secara keseluruhan, tren tersebut menegaskan bahwa meskipun Kabupaten Barito Utara telah menunjukkan kemajuan dalam hal kapasitas penanganan sampah, upaya pengurangan di sumber sampah masih perlu ditingkatkan agar sejalan dengan target nasional pengelolaan sampah sebesar 30% pengurangan dan 70% penanganan pada tahun 2025

sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga (Jakstranas).

2.1.5.4. Akses Sanitasi Masyarakat

a. Cakupan pelayanan

Cakupan pelayanan memuat beberapa komponen yakni akses aman, akses layak, dan Buang Air Besar Sembarangan (BABS). Dengan adanya informasi cakupan pelayanan, dan target pelayanan sesuai dengan RPJMN 2020-2024 (%) dapat dilihat GAP terhadap target tahun 2024. Pemerintah daerah berupaya menekan angka BABS yang sampai dengan tahun 2024 ditargetkan 18% khususnya di wilayah bantaran sungai perkotaan seperti jamban terapung yang pembuangan limbah tinjanya langsung ke badan sungai, dan tidak menggunakan tanki septik, serta masyarakat yang tinggal di darat tetapi sanitasinya belum sesuai standar teknis.

Berdasarkan data STBM yang *update* pada September 2023 Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Utara, capaian akses aman mencapai 1,47%. Target akses aman Kabupaten Barito Tahun tahun 2028 yaitu 18%, sehingga masih terdapat GAP. Untuk capaian Akses layak sebesar 60,23% dengan rincian akses layak individu sebesar 55,17% dan akses layak bersama 5,06%. Target capaian Kabupaten Barito Tahun 2028 adalah 75% sehingga masih terdapat GAP untuk akses layak. Adapun akses belum layak yaitu 11,68%, dan BABS mencapai sebesar 28,08%.

Tabel 2.32. Capaian Akses Air Limbah Domestik di Kabupaten Barito Utara

Akses Aman	1,47%
Akses Layak (Tidak Termasuk Akses Aman)	60,23%
Akses Layak Individu (Tidak Termasuk Aman)	55,17%
Akses Layak Bersama	5,06%
Akses Belum Layak*	11,68%
BABS	28,08%
Total	100,00%

Sumber: STBM update per September 2023, Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Utara, 2023.

Akses sanitasi masyarakat di Kabupaten Barito Utara terus diupayakan melalui berbagai program pemerintah daerah untuk mencapai target sanitasi layak, meskipun data spesifik persentasenya belum tersedia. Pemerintah daerah fokus pada peningkatan akses sanitasi layak melalui kerjasama dengan masyarakat.

Definisi sanitasi layak fasilitas sanitasi yang memenuhi syarat kesehatan, seperti kloset yang menggunakan leher angsa dan tempat pembuangan akhir tinja yang menggunakan tangki septik atau Sistem Pengolahan Air Limbah (SPAL). Ketersediaan sanitasi yang layak dan aman merupakan indikator penting dalam pembangunan permukiman sehat dan berkelanjutan. Kabupaten Barito Utara selama 5 tahun terakhir (2020-2025) mengalami peningkatan tren terkait rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak. Konsep sanitasi layak sendiri sejak tahun 2018 mengalami perubahan yang mengedepankan aspek dasar kelayakan prasarana dasar kesehatan, yaitu memiliki fasilitas Buang Air Besar (BAB) sendiri.

Pengolahan air limbah domestik yang ada di kabupaten Barito Utara relatif membaik berkat komitmen pemerintah daerah melalui OPD terkait yang menangani air limbah. Pada tahun 2019, Kabupaten Barito Utara menunjukkan berkurangnya praktik BABS dari 54,7% pada tahun 2014 khususnya di wilayah perkotaan menjadi 47% pada tahun 2018. Pemerintah daerah berupaya menekan angka BABS pada tahun 2019 yang ditargetkan 0% khususnya di wilayah bantaran sungai perkotaan seperti jamban terapung yang pembuangan limbah tinjanya langsung ke badan sungai dan tidak menggunakan tanki septik, serta masyarakat yang tinggal di darat tetapi sanitasinya belum sesuai standar teknis. Salah satu permasalahan yang dihadapi kabupaten Barito Utara adalah belum tersedianya Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) untuk menampung dan mengolah lumpur tinja dari tangki septik (IPAL, MCK dan tangki septik warga) melalui truk tinja yang pada saat ini dioperasikan oleh pihak swasta.

Rencana pembangunan IPLT dilaksanakan di kawasan TPA Km. 13 Desa Ipu Kecamatan Lahei seluas $\pm 0,6$ ha yang rencana diusulkan pembangunannya pada tahun 2019 melalui dana APBN. Pada tahun 2017-2018 telah dibangun beberapa MCK di wilayah kelurahan di ibukota kabupaten, dan IPAL komunal berbasis masyarakat di Desa Hajak Kecamatan Teweh Baru. Pengangkutan lumpur tinja di wilayah kota masih dilayani penyedia jasa penyedot lumpur swasta dan limbahnya dibuang ke areal terbuka sehingga berpotensi mencemari lingkungan. Hal ini menjadi salah satu isu strategis sanitasi yang mendesak untuk ditangani di Kabupaten Barito Utara.

Rencana jangka menengah, Barito Utara memiliki IPLT yang mampu menampung limbah dari masyarakat maupun IPAL, MCK dan tangki septik limbah warga secara terintegrasi guna mengantisipasi volume limbah seiring pertumbuhan penduduk di wilayah dalam dan luar kota sepanjang jalan negara menuju Bandara Terinsing yang berpotensi sebagai kawasan

permukiman baru. Jumlah KK dengan akses terhadap fasilitas sanitasi yang layak (jamban sehat) menurut kecamatan dan puskesmas di Kabupaten Barito Utara dapat dilihat pada Tabel 2.33.

Tabel 2.33. Jumlah KK Dengan Akses Terhadap Fasilitas Sanitasi yang Layak (Jamban Sehat) Menurut Kecamatan dan Puskesmas di Kabupaten Barito Utara

No	Kecamatan	Puskesmas	Jumlah KK	Sharing/Komunal		JSSP		JSP		Keluarga dengan Akses terhadap Fasilitas Sanitasi yang Layak (Jamban Sehat)	%
				Σ Sarana	Σ Pengguna (KK)	Σ Sarana	Σ Pengguna (KK)	Σ Sarana	Σ Pengguna (KK)		
1	Teweh Tengah	Muara Teweh	2.452	0	0	624	624	1.132	1.132	1.756	71,6
		Lanjat	3.488	5	15	33	33	2.698	2.698	2.746	78,7
		Lemo	1.325	0	0	514	417	417	417	417	31,5
		Sei Rahayu	809	0	0	274	274	396	396	670	82,8
2	Lahei	Lahei I	3.073	0	0	322	322	1.327	1.327	1.649	53,7
		Lahei II	2.134	14	14	75	75	1.164	1.164	1.256	58,8
3	Gunung Timang	Kandui	1.308	74	74	0	0	1.234	1.234	1.308	100
		Ketapang	956	198	198	100	100	333	333	631	66
		Batu Rya	1.508	43	43	248	248	1.182	1.182	1.473	97,7
4	Montallat	T.P. Laung	3.054	243	243	244	244	1.183	1.183	1.427	46,7
5	Teweh Timur	Benangin	1.103	53	53	33	33	430	430	463	59,9
		Mampuak	885	11	11	33	33	433	433	477	53,9
6	Gunung Purei	Lampeong	899	161	161	19	19	511	511	691	76,9
7	Teweh Baru	Sikui	7.658	6	6	73	73	5.458	5.458	5.537	72,3
8	Lahei Barat	Benao	2.921	336	336	15	15	237	237	588	20,1
9	Teweh Selatan	Pir Butong	3.395	1.094	863	724	1.002	1.663	1.663	2.039	89,2
		Trahean	1.674	12	12	78	78	1.261	1.261	1.359	81,2
Jumlah			36.654	2.444	2.223	3.279	3.058	18.532	18.841	24.122	65,8

Keterangan: JSSP (Jamban Sehat Semi Permanen); JSP (Jamban Sehat Permanen)

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Utara, 2022.

Sistem pengelolaan air limbah di Kabupaten Barito Utara masih banyak menggunakan sistem pengolahan air limbah setempat (*on-site system*) baik itu secara individu dan di beberapa tempat secara komunal (*septic tank* komunal= 10 kk) yang dibangun oleh pemerintah. Dinas PUPR Kabupaten Barito Utara tengah membangun fasilitas MCK = 10 kk untuk membantu masyarakat MBR di areal padat penduduk perkotaan, dan juga IPAL komunal berbasis masyarakat (Sanimas) di Desa Hajak Kecamatan Teweh Baru.

Sementara sebagian warga masyarakat perkotaan yang bermukim di bantaran anak sungai di Kelurahan Muara Teweh langsung membuang limbahnya ke saluran atau sungai sehingga berdampak besar pada kesehatan warga. Sebagian besar masyarakat kabupaten Barito Utara masih menggunakan sistem pengelolaan air limbah *on site* berupa jamban keluarga. Selebihnya penduduk yang tinggal di tepi sungai memiliki jamban terapung yang langsung terbuang ke sungai. Pengelolaan limbah cair rumah tangga yang dilakukan masyarakat Kabupaten Barito Utara sebagai berikut:

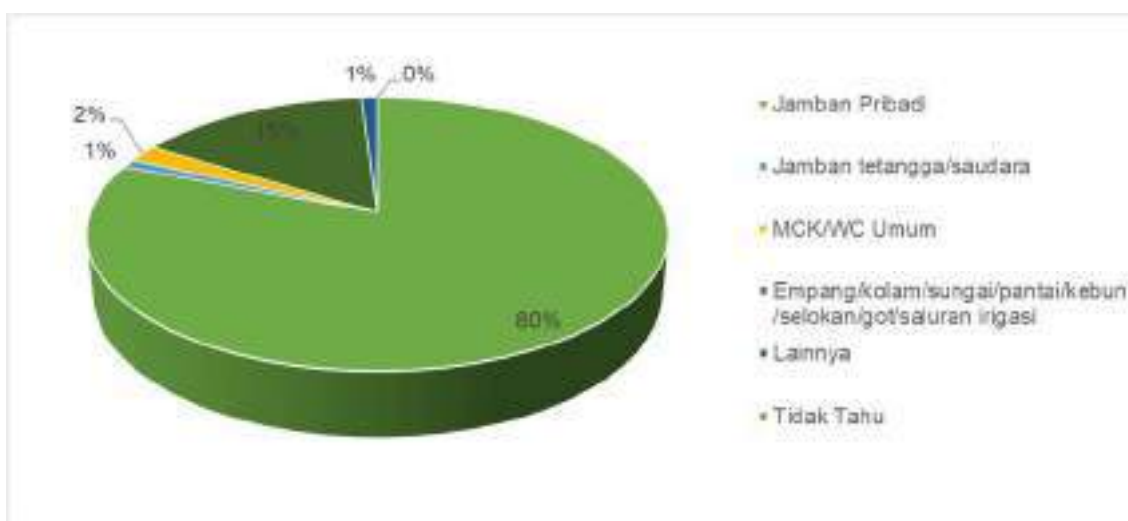
- 1) membuang air limbah rumah tangga ke got/parit/ saluran drainase dekat rumahnya dengan atau tanpa melalui pipa;
- 2) membuang ke sungai dengan atau tanpa melalui pipa;
- 3) menampung/meresapkan air limbah rumah tangga ke dalam lubang/kubangan terbuka yang dibuat dekat kamar mandi;
- 4) memakai air limbah rumah tangga untuk menyiram jalan.

Ada beberapa alasan yang mempengaruhi masyarakat dalam pengelolaan air limbah seperti disebutkan di atas adalah sebagai berikut:

- 1) belum adanya pelayanan pengelolaan air limbah rumah tangga seperti halnya persampahan;
- 2) cara yang dipilih relatif praktis dan tanpa biaya;
- 3) tidak adanya larangan/konsekuensi hukum dengan membuang air limbah langsung sungai.

Salah satu permasalahan yang dihadapi Kabupaten Barito Utara adalah belum tersedianya IPLT untuk menampung dan mengolah lumpur tinja dari tangki septik (IPAL, MCK dan tangki septik warga) melalui truk tinja yang pada saat ini dioperasikan oleh pihak swasta. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan, pada tahun 2023 sebanyak 21.802 (55,2%) rumah tangga di Kabupaten Barito Utara sudah memiliki jamban sehat permanen (JSP), 2.001 (5,1%) rumah tangga menggunakan jamban bersama/*sharing*, dan jamban sehat semi

permanen (JSSP) yaitu sebesar 4.617 (11,7%). Kabupaten Barito Utara saat ini belum mempunyai IPLT untuk menampung dan mengolah lumpur tinja dari tangki septic, hal ini menyebabkan angka akses aman di Kabupaten Barito Utara saat ini sebesar 0%. Oleh karena itu, Kabupaten Barito Utara perlu segera membangun IPLT. Pada tahun 2021 telah dibangun beberapa IPAL skala komunal di wilayah kelurahan di ibukota kabupaten yaitu Desa Batu Raya I Kecamatan Gunung Timang, Kelurahan Sei Rahayu I dan Sei Rahayu II Kecamatan Teweh Tengah.



Gambar 2.17. Persentase Tempat Buang Air Besar di Kabupaten Barito Utara Tahun 2022.

Tabel 2.34. Kondisi Sanitasi Air Limbah Domestik Masyarakat di Kabupaten Barito Utara

No	Nama Kecamatan	Jumlah KK	Jamban Sehat Semi Permanen (JSSP) RT	JSSP	Fasilitas Bersama (Sharing) RT	Sharing (%)	Jamban Sehat Permanen (JSP) RT	JSP
1	Gunung Purei	739	18	2,40%	143	19,40%	439	59,40%
2	Gunung Timang	3.254	636	19,50%	476	14,60%	1.941	59,60%
3	Lahei	3.646	162	4,40%	23	0,60%	1.753	48,10%
4	Lahei Barat	2.957	13	0,50%	385	13,00%	234	7,90%
5	Montallat	3.011	27	0,90%	74	2,40%	1.057	35,10%
6	Teweh Baru	5.683	142	2,50%	91	1,60%	4.827	84,90%
7	Teweh Selatan	3.847	431	11,20%	510	13,30%	2.361	61,40%
8	Teweh Tengah	14.644	2.957	20,20%	83	0,60%	8.457	57,70%
9	Teweh Timur	1.737	231	13,30%	66	3,90%	733	42,20%
	TOTAL	39.518	4.617	11,70%	2.001	5,10%	21.802	55,20%

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Utara dan Hasil Analisis, 2023.



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Tahun 2025-2029**

Tabel 2.35. Sarana dan Prasarana Pengolahan SPALD-Setempat di Kabupaten Barito Utara

No	Nama SPALD	Nama Desa/Kelurahan	Kecamatan	Koordinat (Latitude)	Koordinat (Longitude)	Kategori Prasarana SPALD	Kapasitas Desain (SR)	Kapasitas Terpakai (SR)	Kondisi Bangunan	Kondisi Operasional	Tahun Pembangunan /Rehabilitasi
1	TK. Mira Pakat	Batu Raya I	Gunung Timang	-1,32391331	115,279062	Tangki Septik Komunal	5-10	5	Baik	Berfungsi	2021
2	Balai Pertanian	Batu Raya I	Gunung Timang	-1,3239129	115,280728	Tangki Septik Komunal	5-10	5	Baik	Berfungsi	2021
3	Kantor BPD	Batu Raya I	Gunung Timang	-1,32532011	115,28434	Tangki Septik Komunal	5-10	5	Baik	Berfungsi	2021
4	Perpustakaan Desa	Batu Raya I	Gunung Timang	-1,32587564	115,285728	Tangki Septik Komunal	5-10	5	Baik	Berfungsi	2021
5	Pasar	Batu Raya I	Gunung Timang	-1,32689675	115,286239	Tangki Septik Komunal	5-10	5	Baik	Berfungsi	2021
6	Masjid dekat Jl. Negara M.Tewah - Puruk Cahu	Sei Rahayu II	Teweh Tengah	-0,88146667	114,68	Tangki Septik Komunal	50	20	Baik	Berfungsi Sebagian	2018
7	Kantor Desa	Sei Rahayu II	Teweh Tengah	-0,88166667	114,687778	Tangki Septik Komunal	50 - 20	5	Baik	Berfungsi Sebagian	2018
8	Gereja Bukit Harapan	Sei Rahayu II	Teweh Tengah	-0,88633012	114,689383	Tangki Septik Komunal	5-10	5	Baik	Berfungsi	2021
9	Gereja Katolik Santo Paulus	Sei Rahayu II	Teweh Tengah	-0,88361111	114,691944	Tangki Septik Komunal	5-10	5	Baik	Berfungsi	2021
10	Mushola di Tikungan Ke arah Km. 53 (Desa Rimba Sari)	Sei Rahayu II	Teweh Tengah	-0,88638889	114,691944	Tangki Septik Komunal	5-10	5	Baik	Berfungsi	2021

Sumber: Laporan Akhir RISPAL Kabupaten Barito Utara, 2023.

b. Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat (SPALD-T)

Sistem pengolahan air limbah terpusat (SPALD-T) merupakan sistem dimana fasilitas pengolahan air limbah berada di luar persil atau dipisahkan dengan batas jarak atau tanah yang menggunakan perpipaan untuk mengalirkan air limbah dari rumah-rumah secara bersamaan dan kemudian dialirkan ke IPAL. IPAL komunal merupakan sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengalirkan air limbah domestik dari sumber secara kolektif ke sub-sistem pengelolaan terpusat untuk kemudian diolah sebelum dibuang ke badan air penerima.



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Tahun 2025-2029**

Tabel 2.36. Sarana dan Prasarana Pengelolaan SPALD-Setempat di Kabupaten Barito Utara

No	Nama SPALD	Nama Desa/Kelurahan	Kecamatan	Koordinat (Latitude)	Koordinat (Longitude)	Kategori Prasarana SPALD	Kapasitas Desain (SR)	Kapasitas Terpakai (SR)	Kondisi Bangunan	Kondisi Operasional	Tahun Pembangunan/Rehabilitasi
1	Jalan Poros M. Teweh – Puruk Cahu (Jalan Lama)	Sei Rahayu II	Teweh Tengah	-0,88027778	114,6894444	Tangki Septik Komunal	5–10	5	Baik	Berfungsi	2021
2	Balai Basarah	Sei Rahayu I	Teweh Tengah	-0,86055556	114,7625	Tangki Septik Komunal	5–10	5	Baik	Berfungsi	2021
3	Gereja Imanuel	Sei Rahayu I	Teweh Tengah	-0,86305556	114,7641667	Tangki Septik Komunal	5–10	5	Baik	Berfungsi	2021
4	Gereja Katolik St. Fransiskus	Sei Rahayu I	Teweh Tengah	-0,87444444	114,7802778	Tangki Septik Komunal	5–10	5	Baik	Berfungsi	2021
5	Musholla	Sei Rahayu II	Teweh Tengah	-0,86472222	114,7786111	Tangki Septik Komunal	5–10	5	Baik	Berfungsi	2021
6	Masjid Shirulhuda	Kelurahan Jingah	Teweh Tengah	-0,87305556	114,7730556	Tangki Septik Komunal	5–10	5	Baik	Berfungsi	2021
7	Jl. Cempaka Raya	Kelurahan Jingah	Teweh Baru	-0,96277778	114,9077778	Tangki Septik Komunal	5–10	5	Baik	Berfungsi	2019
8	Jl. Juking Haru RT. 03	Kelurahan Jambu	Teweh Baru	-0,96027778	114,9105556	Tangki Septik Komunal	5–10	5	Baik	Berfungsi	2019



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Tahun 2025-2029**

No	Nama SPALD	Nama Desa/Kelurahan	Kecamatan	Koordinat (Latitude)	Koordinat (Longitude)	Kategori Prasarana SPALD	Kapasitas Desain (SR)	Kapasitas Terpakai (SR)	Kondisi Bangunan	Kondisi Operasional	Tahun Pembangunan/Rehabilitasi
9	Kuburan Muslimin Juking Haru RT. 03	Kelurahan Jambu	Teweh Baru	-0,96083333	114,9105556	Tangki Septik Komunal	5–10	5	Baik	Berfungsi	2019
10	Samping SDN 2 Jambu	Kelurahan Jambu	Teweh Baru	-0,94616667	114,9102778	Tangki Septik Komunal	5–10	5	Baik	Berfungsi	2019
11	Manggala	Kelurahan Jambu	Teweh Baru	-0,96805556	114,9141667	Tangki Septik Komunal	5–10	5	Baik	Berfungsi	2019
12	Jl. Poros M. Teweh – Lampeong	Kelurahan Jambu	Teweh Baru	-0,96583333	114,9085556	Tangki Septik Komunal	5–10	5	Baik	Berfungsi	2019
13	Langgar Darul Istiqomah Jl. Sarikaya	Kelurahan Lanjas	Teweh Tengah	-0,96416667	114,8966667	Tangki Septik Komunal	5–10	5	Baik	Berfungsi	2019
14	Jl. Akasia	Kelurahan Lanjas	Teweh Tengah	-0,96555556	114,8894444	Tangki Septik Komunal	5–10	5	Baik	Berfungsi	2019
15	Gg. Bahagia	Kelurahan Lanjas	Teweh Tengah	-0,96333333	114,8902778	Tangki Septik Komunal	5–10	5	Baik	Berfungsi	2019
16	Jl. Semoga Indah (Ujung)	Kelurahan Lanjas	Teweh Tengah	-0,95916667	114,8880556	Tangki Septik Komunal	5–10	5	Baik	Berfungsi	2019



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Tahun 2025-2029**

No	Nama SPALD	Nama Desa/Kelurahan	Kecamatan	Koordinat (Latitude)	Koordinat (Longitude)	Kategori Prasarana SPALD	Kapasitas Desain (SR)	Kapasitas Terpakai (SR)	Kondisi Bangunan	Kondisi Operasional	Tahun Pembangunan/Rehabilitasi
17	Jl. Semoga Indah V	Kelurahan Lanjas	Teweh Tengah	-0,95722222	114,8888889	Tangki Septik Komunal	5–10	5	Baik	Berfungsi	2019
18	Desa Bayas	Kelurahan Lanjas	Teweh Tengah	-0,91861111	114,8466667	Tangki Septik Komunal	5–10	5	Baik	Berfungsi	2019
19	Pasar	Kandui	Gunung Timang	-1,25527778	115,1211111	IPAL Komunal	50	30	Baik	Berfungsi	2022
20	Seberang Kantor Desa Tapen Raya	Tapen Raya	Gunung Timang	-1,26537279	115,1421029	MCK Kombinasi IPAL	50	20	Baik	Berfungsi Sebagian	2018
21	Gapura Perbatasan Barito Utara-Barito Selatan	Tapen Raya	Gunung Timang	-1,20957676	115,1513268	MCK Kombinasi IPAL	50	20	Baik	Berfungsi Sebagian	2018
22	Kantor Desa	Sei Rahayu I	Teweh Tengah	-0,86777778	114,7652778	MCK Kombinasi IPAL	50	20	Baik	Berfungsi Sebagian	2015
23	Masjid Al Muhajirin	Sei Rahayu I	Teweh Baru	-0,99727778	114,9694444	MCK Kombinasi IPAL	50	0	Rusak	Tidak Berfungsi	2016
24	Seberang Kantor BPD	Hajak	Teweh Baru	-0,99138889	114,9808333	MCK Kombinasi IPAL	50	50	Baik	Berfungsi	2018
25	SDN Lemo II Paramean	Lemo II	Teweh Tengah	-0,89166667	114,9	MCK Kombinasi IPAL	5–10	10	Baik	Berfungsi	2019



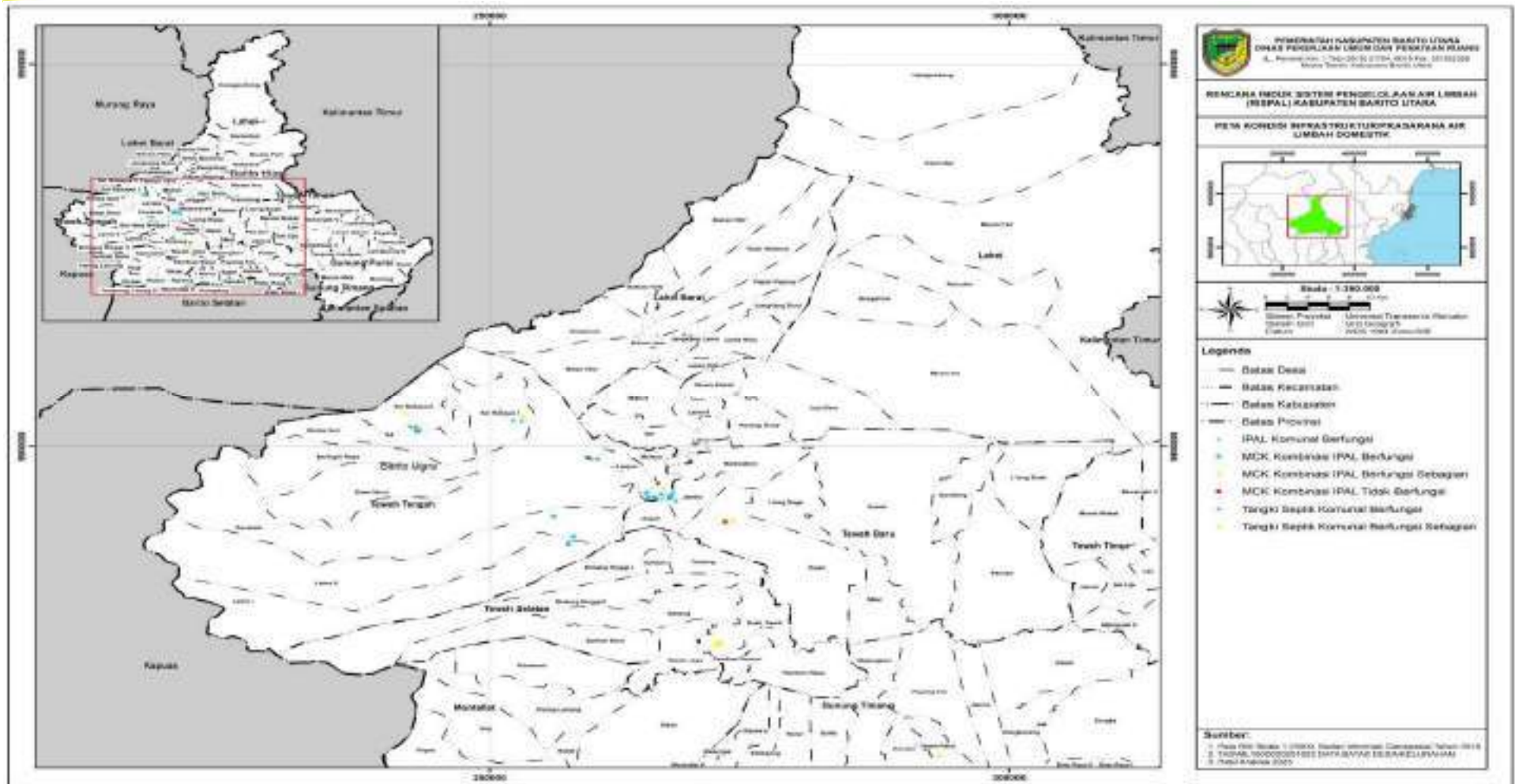
**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Tahun 2025-2029**

No	Nama SPALD	Nama Desa/Kelurahan	Kecamatan	Koordinat (Latitude)	Koordinat (Longitude)	Kategori Prasarana SPALD	Kapasitas Desain (SR)	Kapasitas Terpakai (SR)	Kondisi Bangunan	Kondisi Operasional	Tahun Pembangunan/Rehabilitasi
26	Mushalla As-Syifa	Lemo II	Teweh Tengah	-0,88888889	114,9	MCK Kombinasi IPAL	5–10	5	Baik	Berfungsi	2019
27	Masjid Nurul Iman Lapangan Badminton	Lemo I	Teweh Tengah	-0,91166667	114,9166667	MCK Kombinasi IPAL	5–10	5	Baik	Berfungsi	2020
28	UMKM Kawasan	Bukit Sawit	Teweh Selatan	-1,14555556	115,9222222	MCK Kombinasi IPAL	50	20	Baik	Berfungsi Sebagian	2020
29	Pasar Maranen	Bukit Sawit	Teweh Selatan	-1,34783333	115,9308333	MCK Kombinasi IPAL	50	10	Baik	Berfungsi Sebagian	2020
30	Mushola Al-Muhajirin Pasar Kampung	Bukit Sawit	Teweh	-1,13777778	114,9483333	MCK Kombinasi IPAL	50	20	Baik	Berfungsi	2016

Sumber: Laporan Akhir RISPAL Kab Barito Utara, 2023.



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Tahun 2025-2029



Peta 30. Sebaran Infrastruktur SPALD Kabupaten Barito Utara.



Tabel 2.37. Capaian Akses Air Limbah Domestik di Kabupaten Barito Utara

No	Nama Kecamatan	Nama Desa/Kelurahan	Jumlah KK	BABS	JSSP	SHARING	JSP	Tangki Septik Individu tidak disedot (RT)	Tangki Septik Komunal tidak disedot (RT)	Tangki Septik Individu yang disedot (RT)	Tangki Septik Komunal yang disedot (RT)	IPAL Permukiman (berbasis masyarakat dan berbasis institusi) (RT)	IPAL Kawasan (RT)	IPAL Perkotaan (RT)	IPAL Regional (RT)	Kondisi BABS	Kondisi Belum Layak	Akses Layak Bersama	Akses Layak Individu (Tidak Termasuk Aman)	Akses Aman
1	Gunung Purei	Baok	75	5	5	35	30	30	0	0	0	0	0	0	0	5	5	35	30	0
2	Gunung Purei	Berong	58	7	2	25	24	24	0	0	0	0	0	0	0	7	2	25	24	0
3	Gunung Purei	Lampeong I	91	6	0	58	58	58	0	0	0	0	0	0	0	6	0	58	0	0
4	Gunung Purei	Lampeong II	185	15	4	164	164	164	0	0	0	0	0	0	0	15	2	4	164	0
5	Gunung Purei	Lawarang	23	4	0	14	5	5	0	0	0	0	0	0	0	4	0	14	5	0
6	Gunung Purei	Linon Besi I	52	38	0	12	2	0	0	0	0	0	0	0	0	38	0	12	2	0
7	Gunung Purei	Linon Besi II	26	3	0	23	23	23	0	0	0	0	0	0	0	3	0	23	0	0
8	Gunung Purei	Muara Mea	91	9	0	29	27	27	0	0	0	0	0	0	0	9	0	29	27	0
9	Gunung Purei	Payang	75	0	2	19	54	54	0	0	0	0	0	0	0	0	2	19	54	0
10	Gunung Purei	Tambaba	71	16	1	5	50	50	0	0	0	0	0	0	0	16	1	5	50	0
11	Gunung Purei	Tanjung Harapan	18	17	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	17	0	1	0	0
12	Gunung Timang	Baliti	99	39	5	55	55	55	0	0	0	0	0	0	0	39	5	55	0	0
13	Gunung Timang	Batu Raya I	499	22	243	233	233	233	0	0	0	0	0	0	0	22	243	22	233	0
14	Gunung Timang	Batu Raya II	323	115	104	104	104	104	0	0	0	0	0	0	0	115	104	104	104	0
15	Gunung Timang	Jaman	89	6	0	83	83	83	0	0	0	0	0	0	0	6	0	6	83	0
16	Gunung Timang	Kandui	834	0	12	822	822	822	0	0	0	0	30	0	0	0	0	12	822	30
17	Gunung Timang	Ketapang	123	11	47	33	33	33	0	0	0	0	0	0	0	11	47	33	33	0
18	Gunung Timang	Majangkan	154	22	41	44	46	46	0	0	0	0	0	0	0	22	41	44	46	0
19	Gunung Timang	Malungai	141	0	0	35	106	106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35	106	0
20	Gunung Timang	Payang Ara	132	0	0	17	115	115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	115	0
21	Gunung Timang	Pelari	97	0	0	5	92	92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	92	0
22	Gunung Timang	Rarawa	91	0	0	26	65	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	65	0
23	Gunung Timang	Sangkuraang	110	0	0	27	83	83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	83	0



No	Nama Kecamatan	Nama Desa/Kelurahan	Jumlah KK	BABS	JSSP	SHARING	JSP	Tangki Septik Individu tidak disedot (RT)	Tangki Septik Komunal tidak disedot (RT)	Tangki Septik Individu yang disedot (RT)	Tangki Septik Komunal yang disedot (RT)	IPAL Permukiman (berbasis masyarakat dan berbasis institusi) (RT)	IPAL Kawasan (RT)	IPAL Perkotaan (RT)	IPAL Regional (RT)	Kondisi BABS	Kondisi Belum Layak	Akses Layak Bersama	Akses Layak Individu (Tidak Termasuk Aman)	Akses Aman
24	Gunung Timang	Siwau	33	0	9	19	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	9	19	5	0
25	Gunung Timang	Tapen Raya	94	0	0	15	79	79	0	0	0	0	0	0	40	0	0	15	79	40
26	Gunung Timang	Tongka	256	56	145	46	9	9	0	0	0	0	0	0	0	56	145	46	9	0
27	Gunung Timang	Walur	48	13	35	26	10	10	0	0	0	0	0	0	0	13	35	26	10	0
28	Lahei	Bengahon	79	0	0	7	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0
29	Lahei	Haragandang	170	0	0	61	61	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61	0
30	Lahei	Hurung Enep	160	0	0	11	11	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0
31	Lahei	Ipu	270	100	13	9	148	148	0	0	0	0	0	0	0	100	13	9	148	0
32	Lahei	Juju Baru	233	112	0	121	121	121	0	0	0	0	0	0	0	112	0	0	121	0
33	Lahei	Karendan	229	0	0	63	63	63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63	0
34	Lahei	Lahei I	348	117	23	1	207	207	0	0	0	0	0	0	0	117	23	1	207	0
35	Lahei	Lahei II	875	249	63	6	556	556	0	0	0	0	0	0	0	249	63	6	556	0

c. Penelaahan Strategi Sanitasi Kabupaten (SKK) Tahun 2023

Air limbah domestik merupakan air sisa aktivitas penduduk yang bersumber dari kegiatan mandi-cuci-kakus (MCK), dan dapur. Air limbah domestik harus terlebih dahulu diolah sebelum dibuang ke lingkungan, hal ini dilakukan untuk meminimalisir terjadinya pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh air limbah domestik. Berdasarkan SKK Kabupaten Barito Utara Tahun 2023 diperoleh informasi terkait akses layanan air limbah domestik Kabupaten Barito Utara berdasarkan wilayah perkotaan dan perdesaan yang mempunyai angka BABS 9,04% untuk perkotaan, sedangkan kawasan perdesaan mempunyai angka BABS yang lebih tinggi yaitu sebesar 19%.

Tabel 2.38. Cakupan Layanan Eksisting Pengelolaan Air Limbah Kabupaten Barito Utara Tahun 2023

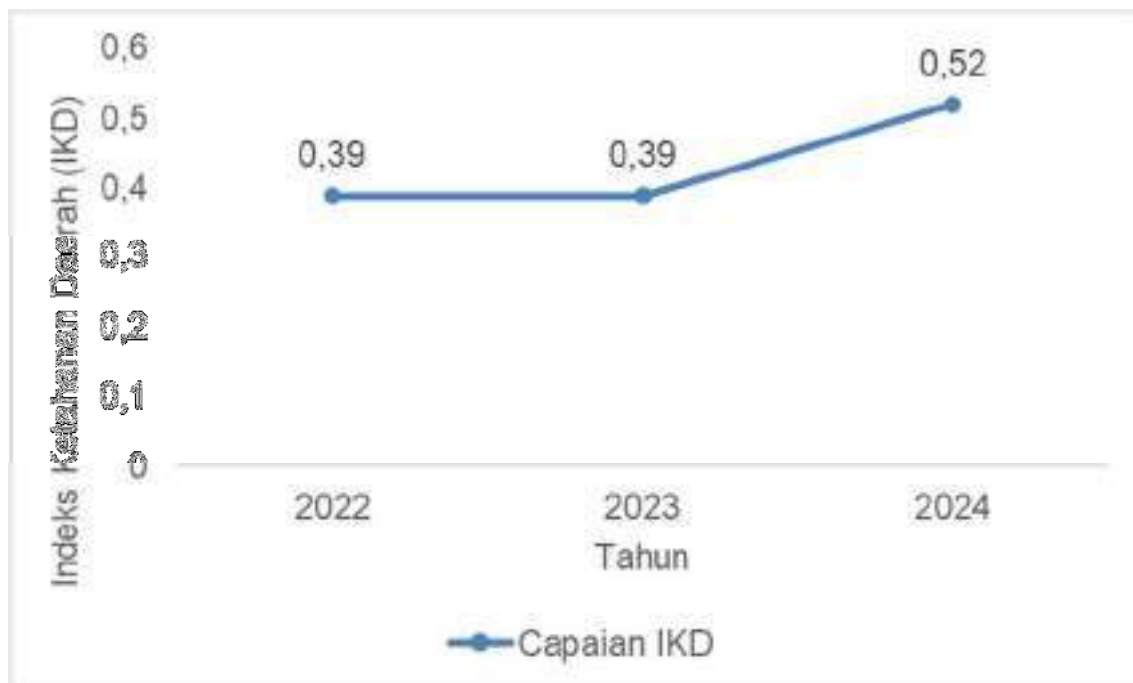
No	Sistem	Cakupan Layanan Eksisting (%)
Wilayah Perkotaan		
A	Akses Aman	0,68
B	Akses Layak	32,29
	Akses Layak Individu (Tidak Termasuk Aman)	31,05
	Akses Layak Bersama	0,55
C	Akses Belum Layak	5,4
D	BABS Tertutup	0
E	BABS di Tempat Terbuka	9,04
Wilayah Perdesaan		
A	Akses Aman	0,7
B	Akses Layak	34,23
	Akses Layak Individu (Tidak Termasuk Aman)	22,74
	Akses Layak Bersama	4,51
	Akses Layak Khusus Perdesaan (Leher Angsa–Cubluk)	6,28
C	Akses Belum Layak	0
D	BABS Tertutup	0
E	BABS di Tempat Terbuka	19
TOTAL		100

Sumber: Instrumen SKK Tahun 2023.

2.1.6. Resilensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

2.1.6.1. Indeks Ketahanan Daerah

Indeks Ketahanan Daerah (IKD) merupakan indikator yang mencerminkan kemampuan suatu wilayah dalam menghadapi dan menanggulangi risiko bencana serta dampak perubahan iklim. Indeks ini mencakup berbagai aspek seperti kapasitas kelembagaan, kesiapsiagaan masyarakat, serta keberlanjutan lingkungan dan infrastruktur. Capaian IKD Kabupaten Barito Utara pada tahun 2024 sebesar 0,52 (kategori sedang), mengalami kenaikan sebesar 0,13 dibanding capaian IKD Tahun 2022 dan 2023 dengan skor capaian sama-sama 0,39.



Gambar 2.18. Tren Capaian Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten Barito Utara 2022-2024.

Peningkatan capaian IKD ini menandakan bahwa adanya upaya penguatan kapasitas daerah, baik dari sisi kebijakan, perencanaan kebencanaan, maupun pelibatan masyarakat dalam pengurangan risiko bencana. Hal ini sejalan dengan menurunnya Indeks Risiko Bencana (IRB) Kabupaten Barito Utara yang mengalami penurunan IRB dari 120,40 pada tahun 2020 menjadi 110,95 pada tahun 2024.

2.1.6.2. Indeks Risiko Bencana

Indeks Risiko Bencana (IRB) merupakan hasil perhitungan yang digunakan untuk menilai kerentanan suatu wilayah terhadap berbagai jenis bencana. Pada tahun 2024, Kabupaten Barito Utara memiliki nilai IRB sebesar 110,95 (kelas risiko sedang), yang mengalami penurunan cukup signifikan dibanding tahun 2020 sebesar 120,40. IRB Kabupaten Barito Utara pada tahun 2024, berada di bawah Indeks IRB provinsi sebesar 117,48 (kelas risiko sedang).



Gambar 2.19. *Trend IRB Kabupaten Barito Utara dan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020-2024. (Sumber: Buku IRBI 2024, BNPB.)*

Bahaya bencana alam yang mengancam Kabupaten Barito Utara berupa bencana *orologyteorologi* (banjir, tanah longsor, kekeringan, banjir bandang, serta kebakaran hutan dan lahan). Bahaya bencana tersebut perlu menjadi perhatian dalam melakukan pembangunan serta menekan risiko (mitigasi) dari bencana alam tersebut.

Tabel 2.39. *Bahaya Bencana di Kabupaten Barito Utara Tahun 2024*

No.	Bahaya Bencana	Luas (ha)
1.	Banjir	160.887
2.	Banjir bandang	3.421
3.	Kekeringan	226.107
4.	Tanah longsor	177.410
5.	Kebakaran hutan dan lahan	384.538
6.	Cuaca ekstrem	206.217

Sumber: Inarisk BNPB, 2025.

Dari seluruh risiko bencana di Kabupaten Barito Utara, bencana banjir, kebakaran hutan dan lahan, serta kekeringan merupakan bencana dengan kelas risiko tinggi. Adapun untuk bencana gempa bumi, tanah longsor, dan cuaca ekstrem merupakan bencana dengan kelas risiko sedang.

Tabel 2.40. Skor dan Kelas Risiko Bencana di Kabupaten Barito Utara Tahun 2024

No.	Bencana	Skor	Kelas Risiko
1	Banjir	14,86	Tinggi
2	Gempa bumi	6,69	Sedang
3	Kebakaran hutan dan lahan	22,29	Tinggi
4	Tanah longsor	7,43	Sedang
5	Kekeringan	14,86	Tinggi
6	Cuaca ekstrem	8,42	Sedang

Sumber: Buku IRBI 2024, BNPB.

Kabupaten Barito Utara mengalami musim hujan antara bulan November hingga April, sementara musim kemarau terjadi antara Mei hingga Oktober. Perubahan cuaca yang ekstrem, termasuk hujan lebat dan suhu tinggi dapat memicu terjadinya bencana alam seperti banjir serta kebakaran hutan dan lahan.

Curah hujan tinggi selama musim hujan dapat menyebabkan terjadinya bencana alam seperti banjir dan banjir bandang di wilayah-wilayah tertentu, khususnya wilayah-wilayah yang berdekatan dengan sungai. Infrastruktur yang kurang memadai seperti saluran drainase yang tidak berfungsi secara efektif semakin meningkatkan bahaya bencana banjir di wilayah ini. Bencana banjir yang terjadi berakibat pada terjadinya kerusakan lahan pertanian, rumah, sarana publik, dan lebih fatal dapat menimbulkan korban jiwa.

Selama musim kemarau, peningkatan suhu dan pengeringan lahan menjadikan wilayah Kabupaten Barito rentan terhadap kebakaran hutan dan lahan. Kegiatan perladangan yang dilakukan dengan cara pembakaran pada saat pembukaan lahan menjadi salah satu faktor yang dapat memperparah terjadinya kebakaran. Kebakaran tidak hanya berakibat pada rusaknya (degradasi) hutan dan lahan, tetapi juga dapat menimbulkan dampak lain berupa penurunan kualitas udara yang akhirnya menimbulkan dampak turunan berupa gangguan kesehatan masyarakat serta gangguan transportasi (mengganggu jarak pandang).

Kerusakan dan hilangnya tutupan hutan dan lahan (degradasi dan deforestasi) akibat kegiatan konversi hutan untuk kegiatan perkebunan dan ekstraksi sumber daya alam lainnya berakibat pada penurunan kualitas lingkungan yang menimbulkan terjadinya cuaca ekstrem

(*global warming*). Berkurang atau hilangnya tutupan lahan membuat lingkungan (alam) kehilangan fungsinya untuk menyerap air hujan yang jatuh ke permukaan tanah, sehingga berakibat pada terjadi aliran permukaan yang besar (banjir), di sisi lain hilangnya vegetasi yang berfungsi sebagai pengikat tanah juga berakibat pada terjadinya bencana tanah longsor, serta bencana ekologis lainnya.

Upaya mitigasi dan adaptasi terhadap risiko bencana sangat penting. Pemerintah daerah dan masyarakat perlu bekerjasama dalam melakukan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan (*lestari*), meningkatkan sistem peringatan dini, dan membangun infrastruktur yang tahan (*adaptif*) terhadap dampak cuaca ekstrem yang terjadi.

2.1.6.2.1. Banjir

Banjir didefinisikan sebagai kenaikan drastis aliran sungai, kolam, danau, dan lainnya, dengan kelebihan aliran tersebut menggenangi keluar dari tubuh air (Smith & Ward, 1998). Apabila suatu peristiwa terendamnya air di suatu wilayah yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis maka banjir tersebut dapat disebut bencana banjir (Reed, 1995). Di sisi lain dalam Peraturan Kepala BNPB No. 2 Tahun 2012, disebutkan bahwa ukuran bahaya (*hazard*) dari banjir adalah ketinggian genangan.

Beberapa wilayah yang merupakan pinggir sungai dan cekungan-cekungan topografis di Kabupaten Barito Utara merupakan daerah-daerah yang memiliki risiko tinggi (*high risk*) terjadinya banjir. Bencana banjir yang terjadi di bagian hilir sangat terkait dengan aktivitas penggunaan lahan yang terjadi di wilayah hulu. Secara hipotesis dapat dikatakan bahwa semakin intensifnya perubahan penggunaan lahan di bagian hulu menyebabkan semakin tingginya tingkat bahaya banjir yang terjadi di bagian hilir.

Pada tahun 2023 kejadian banjir terjadi pada bulan Februari s/d Desember yang melanda beberapa wilayah (desa/kelurahan) di Kabupaten Barito Utara. Kejadian banjir tersebut bersumber dari beberapa aliran sungai, drainase, serta bendungan. Lebih jelas terkait kejadian banjir yang terjadi di Kabupaten Barito Utara disajikan pada Tabel 2.41.

Tabel 2.41.Kejadian Banjir di Kabupaten Barito Utara Tahun 2023

No.	Bulan	Wilayah Terdampak (Desa/Kelurahan)	Sumber Banjir
1.	Februari	Muara Teweh, Benao, dan Jambu	Sungai Barito
2.	Maret	Lampeong Jaman dan Pelari Karendan dan Haragandang Sei Rahayu I dan Rimba Sari Benao dan Muara Teweh	Sungai Teweh Sungai Montallat Sungai Lahei Sungai Berioi Sungai Barito
3.	April	Jaman dan Pelari Benangin	Sungai Montallat Sungai Benangin
4.	Juni	Kelurahan Melayu dan Lanjas	Drainase
5.	September	Kelurahan Melayu	Drainase
6.	November	Sei Rahayu dan Nihan Hilir Teluk Malewai Lahei I dan Lahei II	Sungai Suatu Sungai Barito Sungai Barito
7.	Desember	Rahaden Jamut Kandui, Jaman, Pelari	Sungai Lahei Bendungan Jamut Sungai Montallat

Sumber: Buku II DIKPLHD Kabupaten Barito Utara Tahun 2024.

a. Bahaya bencana banjir

Wilayah yang masuk ke dalam area rawan banjir merupakan wilayah dengan topografi datar dan berada di sekitar sungai. Penentuan kelas bahaya banjir dianalisis berdasarkan nilai ketinggian genangan. Wilayah dengan ketinggian genangan kurang dari atau sama dengan 75 cm termasuk dalam kategori bahaya rendah; wilayah dengan ketinggian genangan 75-150 cm termasuk ke dalam kategori bahaya sedang; dan wilayah dengan ketinggian genangan di atas 150 cm termasuk ke dalam kategori bahaya tinggi.

Peristiwa banjir merupakan kejadian tergenangnya suatu wilayah daratan yang normalnya kering dan diakibatkan oleh sejumlah hal antara lain air yang meluap yang disebabkan curah hujan tinggi dan semacamnya. Dalam beberapa kondisi, banjir bisa menjadi bencana yang merusak lingkungan, dan bahkan dapat menimbulkan korban jiwa. Oleh sebab itu, penanganan terhadap banjir selalu menjadi hal yang serius. Berdasar hasil analisis BPBD Provinsi Kalimantan Tengah, diketahui bahwa potensi bahaya banjir di Kabupaten Barito Utara termasuk dalam **Kelas Tinggi** dengan total luas wilayah tergenang sebesar 162.925 ha.

Tabel 2.42.Potensi Bahaya Bencana Banjir Kabupaten Barito Utara

No.	Kategori Bahaya	Luas (ha)
1.	Rendah	2.038
2.	Sedang	65.591
3.	Tinggi	92.297
Total		162.925
Kelas		Tinggi

Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Nasional-Provinsi Kalimantan Tengah 2022-2026.

b. Kerentanan Bencana Banjir

Kerentanan banjir didapatkan dari potensi penduduk terpapar dan kelompok rentan serta potensi kerugian, baik fisik, ekonomi, dan kerusakan lingkungan. Potensi jumlah penduduk terpapar dan potensi kerugian dianalisis kemudian ditampilkan dalam bentuk kelas kerentanan banjir.

Tabel 2.43.Potensi Penduduk Terpapar dan Kerugian Bencana Banjir Kabupaten Barito Utara

Uraian	Potensi
Jumlah penduduk terpapar (jiwa)	63.080
Kelompok Rentan	
Penduduk umur rentan (jiwa)	5.638
Penduduk miskin	3.157
Penduduk disabilitas	352
Kelas	Sedang
Kerugian (Juta Rupiah)	
Kerugian fisik	553.537
Kerugian ekonomi	348.495
Total kerugian	902.032
Kelas kerugian	Tinggi
Kerusakan Lingkungan (ha)	
Luas	22.870
Kelas	Tinggi

Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Nasional-Provinsi Kalimantan Tengah 2022-2026.

c. Risiko Bencana Banjir

Kajian risiko banjir merupakan penggabungan antara indeks/kelas bahaya bencana banjir, kelas kerentanan bencana banjir, dan kelas kapasitas daerah. Hasil penggabungan dari ketiga indeks/kelas bencana banjir akan menunjukkan kelas risiko bencana banjir di Kabupaten Barito Utara seperti tersaji pada Tabel 2.44.

Tabel 2.44.Tingkat Risiko Bencana Banjir di Kabupaten Barito Utara

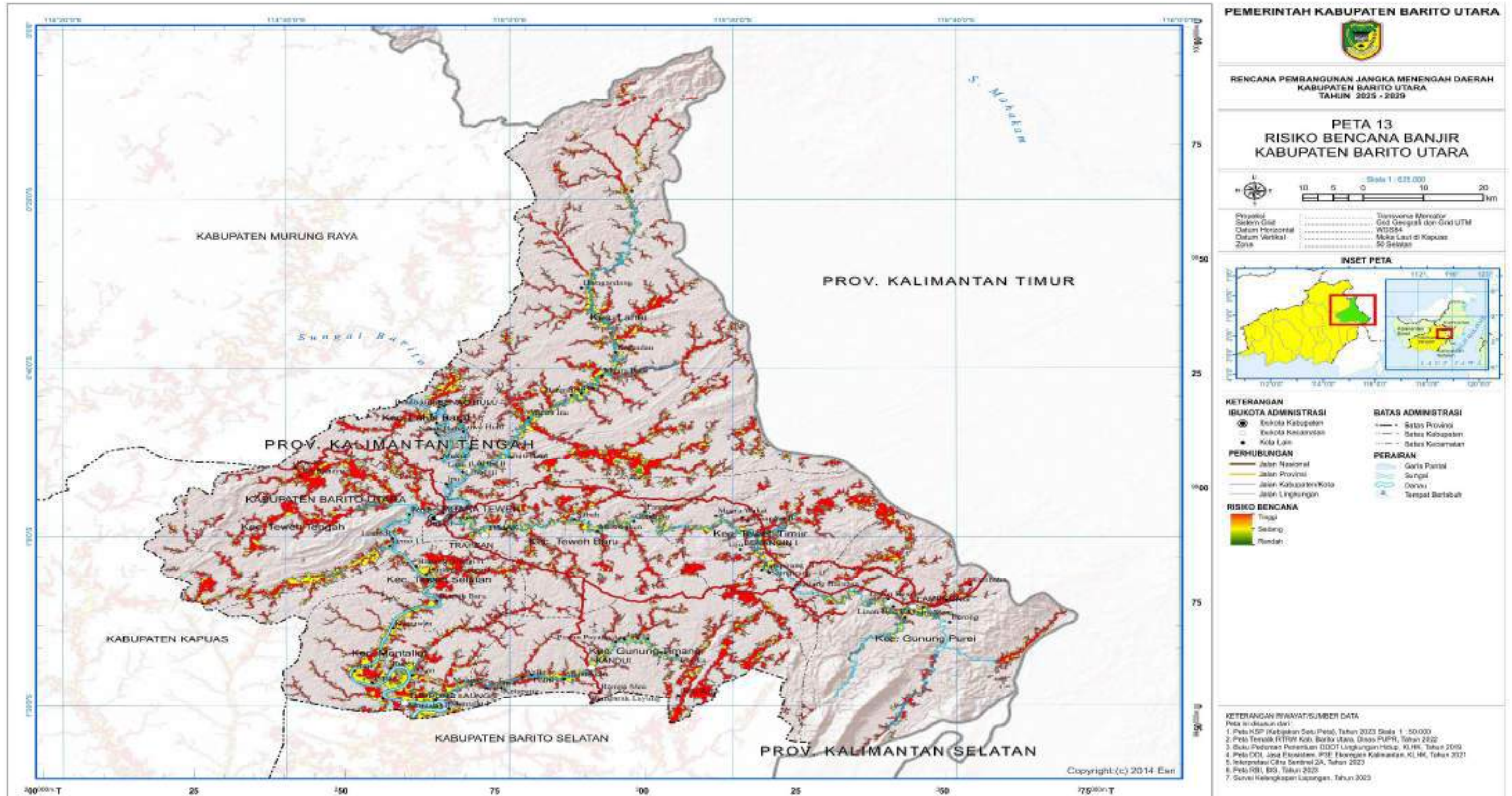
No.	Indeks/Kelas	Kategori
1.	Bahaya	Tinggi
2.	Kerentanan	Tinggi



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Tahun 2025-2029**

No.	Indeks/Kelas	Kategori
3.	Kapasitas	Rendah
4.	Risiko	Tinggi

Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Nasional-Provinsi Kalimantan Tengah 2022-2026.



Peta 31. Risiko Bencana Banjir Kabupaten Barito Utara.

2.1.6.2.2. Banjir Bandang

Banjir bandang adalah banjir besar yang terjadi secara tiba-tiba, karena meluapnya debit yang melebihi kapasitas aliran alur sungai oleh konsentrasi cepat hujan dengan intensitas tinggi, serta sering membawa aliran debris (sisa-sisa material atau partikel kecil) bersamanya, atau runtuhnya bendungan alam yang terbentuk dari material longsoran gelincir pada area hulu sungai. Ukuran bahaya banjir bandang diasumsikan setinggi 5 meter.

a. Bahaya bencana banjir bandang

Berdasar hasil kajian yang dilakukan oleh BPBD Provinsi Kalimantan Tengah, diketahui bahwa potensi bahaya banjir bandang di Kabupaten Barito Utara seluas 4.207 ha dengan kelas potensi banjir **Tinggi**.

Tabel 2.45.Potensi Bahaya Bencana Banjir Bandang Kabupaten Barito Utara

No.	Kategori Bahaya	Luas (ha)
1.	Rendah	285
2.	Sedang	1.221
3.	Tinggi	2.701
Total		4.208
Kelas		Tinggi

Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Nasional-Provinsi Kalimantan Tengah 2022-2026.

b. Kerentanan bencana banjir bandang

Kerentanan banjir bandang didapatkan dari potensi penduduk terpapar dan kelompok rentan serta potensi kerugian, baik fisik, ekonomi, dan kerusakan lingkungan. Potensi jumlah penduduk terpapar dan potensi kerugian dianalisis kemudian ditampilkan dalam bentuk kelas kerentanan banjir bandang.

Tabel 2.46.Potensi Penduduk Terpapar dan Kerugian Bencana Banjir Bandang Kabupaten Barito Utara

Uraian	Potensi
Jumlah penduduk terpapar (jiwa)	1.618
Kelompok Rentan	
Penduduk umur rentan (jiwa)	143
Penduduk miskin	131
Penduduk disabilitas	16
Kelas	Sedang
Kerugian (Juta Rupiah)	
Kerugian fisik	11.025
Kerugian ekonomi	24.314
Total kerugian	35.340
Kelas kerugian	Tinggi

Uraian	Potensi
Kerusakan Lingkungan (ha)	
Luas	14
Kelas	Rendah

Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Nasional-Provinsi Kalimantan Tengah 2022-2026.

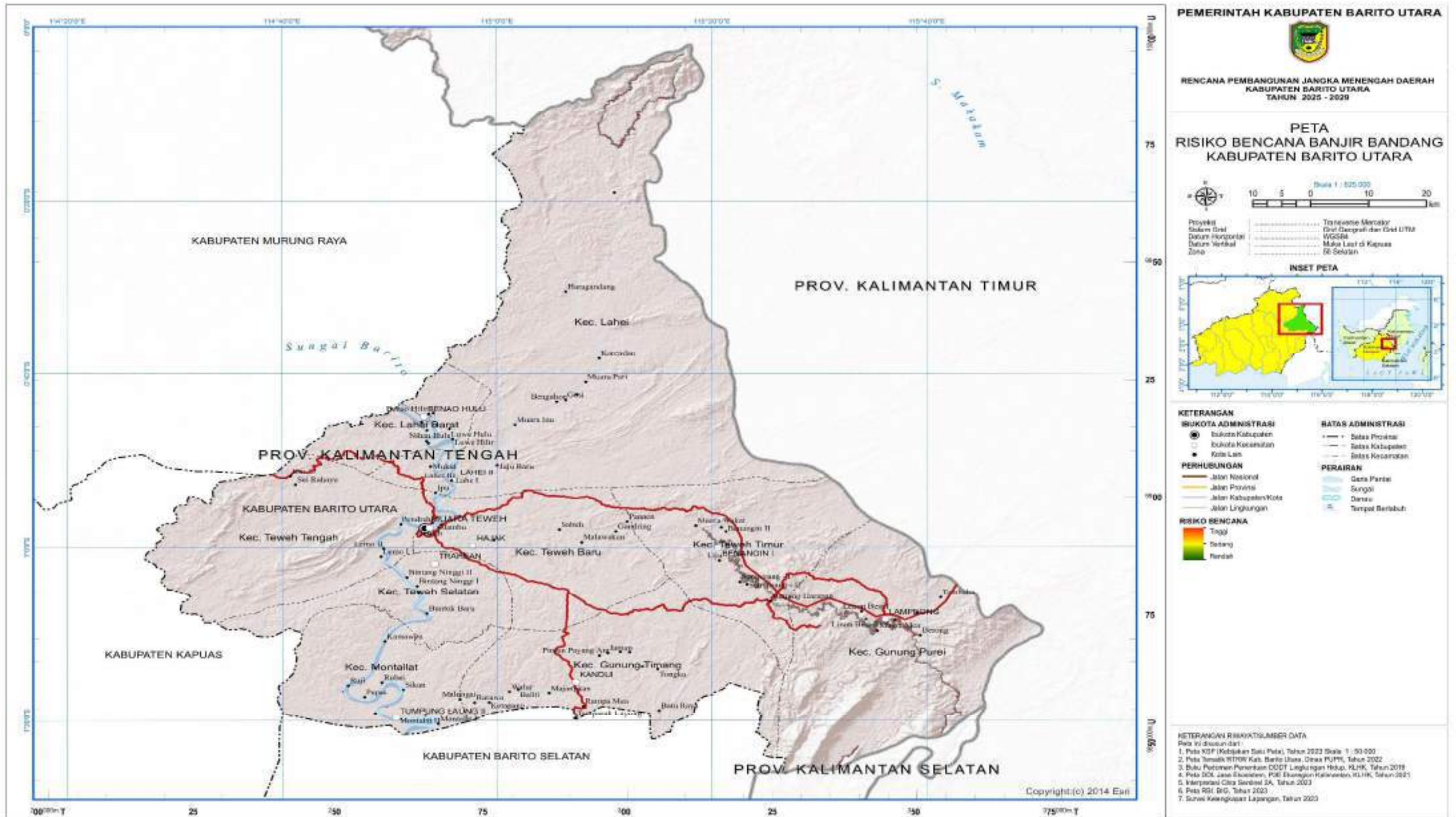
c. Risiko bencana banjir bandang

Kajian risiko banjir bandang merupakan penggabungan antara indeks/kelas bahaya banjir bandang, kelas kerentanan banjir bandang, dan kelas kapasitas daerah. Hasil penggabungan dari ketiga indeks/kelas banjir bandang akan menunjukkan kelas risiko bencana banjir bandang di Kabupaten Barito Utara seperti tersaji pada Tabel 2.47.

Tabel 2.47. Tingkat Risiko Bencana Banjir Bandang di Kabupaten Barito Utara

No.	Indeks/Kelas	Kategori
1.	Bahaya	Tinggi
2.	Kerentanan	Tinggi
3.	Kapasitas	Rendah
4.	Risiko	Tinggi

Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Nasional-Provinsi Kalimantan Tengah 2022-2026.



Peta 32. Risiko Bencana Banjir Kabupaten Barito Utara.

2.1.6.2.3. Tanah Longsor

Tanah longsor merupakan kejadian yang diakibatkan oleh lebih besarnya gaya pendorong yaitu sudut lereng, air, beban, serta berat jenis tanah/batuan dibandingkan gaya penahan dari batuan dan kepadatan tanah (Dinas PU, 2012). Tanah longsor terjadi ditandai dengan pergerakan suatu massa batuan, tanah, atau bahan rombakan material penyusun lereng yang bergerak ke bawah atau ke luar lereng di bawah pengaruh gravitasi.

a. Bahaya tanah longsor

Bahaya tanah longsor dapat terjadi disebabkan adanya gangguan kestabilan pada lereng dan dapat dipicu oleh curah hujan, gerakan tanah, dan getaran. Dengan kondisi tersebut, bahaya tanah longsor dapat terjadi di daerah lereng di suatu wilayah. Kajian terhadap bahaya tanah longsor dilihat berdasarkan parameter-parameter sebagai tolak ukur penghitungan yakni kemiringan lereng, arah lereng, panjang lereng, tipe batuan, jarak dari patahan/sesar aktif, tipe tanah (tekstur tanah, kedalaman tanah (*solum*), curah hujan, stabilitas lereng.

Berdasar pada hasil kajian yang dilakukan oleh BPBD Provinsi Kalimantan Tengah, diketahui bahwa bahaya tanah longsor di Kabupaten Barito Utara seluas 212.129 ha dengan kelas bahaya tanah longsor **Sedang**. Secara lebih rinci terkait potensi bahaya tanah longsor di Kabupaten Barito Utara disajikan pada Tabel 2.48.

Tabel 2.48. Potensi Bahaya Bencana Tanah Longsor Kabupaten Barito Utara

No.	Kategori Bahaya	Luas (ha)
1.	Rendah	34.719
2.	Sedang	125.399
3.	Tinggi	52.011
Total		212.129
Kelas		Sedang

Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Nasional-Provinsi Kalimantan Tengah 2022-2026.

b. Kerentanan tanah longsor

Kajian kerentanan tanah longsor didapatkan dari potensi penduduk terpapar dan kelompok rentan, serta potensi kerugian ekonomi, dan kerusakan lingkungan. Potensi jumlah penduduk terpapar dan potensi kerugian dianalisis dan kemudian ditampilkan dalam bentuk kelas kerentanan bencana tanah longsor.

Tabel 2.49.Potensi Penduduk Terpapar dan Kerugian Bencana Tanah Longsor Kabupaten Barito Utara

Uraian	Potensi
Jumlah penduduk terpapar (jiwa)	10.671
Kelompok Rentan	
Penduduk umur rentan (jiwa)	952
Penduduk miskin	667
Penduduk disabilitas	76
Kelas	Sedang
Kerugian (Juta Rupiah)	
Kerugian fisik	48.381
Kerugian ekonomi	132.323
Total kerugian	180.704
Kelas kerugian	Tinggi
Kerusakan Lingkungan (ha)	
Luas	20.399
Kelas	Tinggi

Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Nasional-Provinsi Kalimantan Tengah 2022-2026.

c. Risiko bencana tanah longsor

Kajian risiko tanah longsor merupakan penggabungan antara indeks/kelas bahaya tanah longsor, kelas kerentanan tanah longsor, dan kelas kapasitas daerah. Hasil penggabungan dari ketiga indeks/kelas tanah longsor akan menunjukkan kelas risiko bencana tanah longsor di Kabupaten Barito Utara seperti tersaji pada Tabel 2.50.

Tabel 2.50.Tingkat Risiko Bencana Tanah Longsor di Kabupaten Barito Utara

No.	Indeks/Kelas	Kategori
1.	Bahaya	Sedang
2.	Kerentanan	Sedang
3.	Kapasitas	Rendah
4.	Risiko	Sedang

Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Nasional-Provinsi Kalimantan Tengah 2022-2026.



Peta 33. Risiko Bencana Tanah Longsor Kabupaten Barito Utara.

2.1.6.2.4. Kebakaran Hutan dan Lahan

Kebakaran hutan dan lahan adalah suatu keadaan dimana hutan dan lahan dilanda api, sehingga mengakibatkan kerusakan hutan dan lahan yang menimbulkan kerugian ekonomi dan/atau nilai lingkungan. Kebakaran hutan dan lahan sering menyebabkan bencana asap yang dapat mengganggu aktivitas dan kesehatan masyarakat sekitar (Peraturan Menteri Kehutanan No. P.12/Menhut-II/2009 tentang Pengendalian Hutan).

Kebakaran hutan dan lahan biasanya terjadi pada wilayah yang vegetasinya rawan terbakar, misalnya pada wilayah gambut. Faktor penyebab terjadinya kebakaran hutan dan lahan antara lain kekeringan yang berkepanjangan, sambaran petir, dan pembukaan lahan dengan cara membakar yang dilakukan oleh manusia.

a. Bahaya bencana kebakaran hutan dan lahan

Hasil analisis yang dilakukan oleh BPBD Provinsi Kalimantan Tengah menunjukkan bahwa bahaya potensi kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Barito Utara seluas 807.438 ha dengan kelas kategori **Sedang**. Lebih jelas terkait potensi kebakaran hutan dan lahan tersebut disajikan pada Tabel 2.51.

Tabel 2.51. Potensi Bahaya Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan Kabupaten Barito Utara

No.	Kategori Bahaya	Luas (ha)
1.	Rendah	422.902
2.	Sedang	378.381
3.	Tinggi	6.156
Total		807.438
Kelas		Sedang

Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Nasional-Provinsi Kalimantan Tengah 2022-2026.

b. Kerentanan bencana kebakaran hutan dan lahan

Kajian kerentanan kebakaran hutan dan lahan didapatkan dari potensi penduduk terpapar dan kelompok rentan serta potensi kerugian, baik fisik, ekonomi, dan kerusakan lingkungan. Potensi jumlah penduduk terpapar dan potensi kerugian dianalisis dan kemudian ditampilkan dalam bentuk kelas kerentanan bencana kebakaran hutan dan lahan. Namun, dalam kebakaran hutan dan lahan tidak ditemukan adanya kerentanan sosial yang meliputi penduduk terpapar dan kelompok rentan, sehingga rekapitulasi potensi penduduk terpapar tidak disajikan.

Tabel 2.52. Potensi Penduduk Terpapar dan Kerugian Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan Kabupaten Barito Utara

Uraian	Potensi
Kerugian (Juta Rupiah)	
Kerugian fisik	-
Kerugian ekonomi	2.190.987
Total kerugian	2.190.987
Kelas kerugian	Rendah
Kerusakan Lingkungan (ha)	
Luas	59.026
Kelas	Tinggi

Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Nasional-Provinsi Kalimantan Tengah 2022-2026.

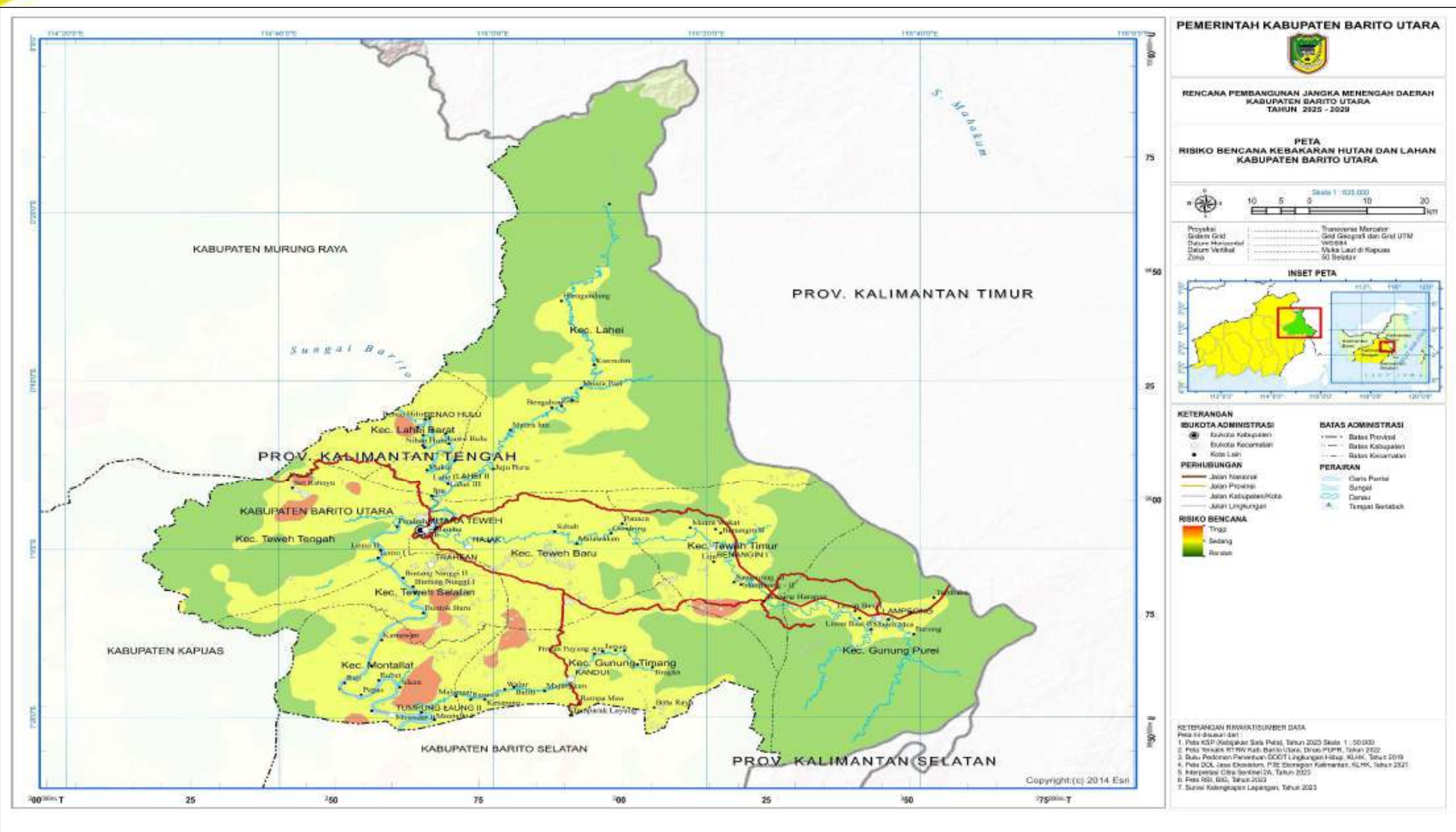
c. Risiko bencana kebakaran hutan dan lahan

Kajian risiko kebakaran hutan dan lahan merupakan penggabungan antara indeks/kelas bahaya kebakaran hutan dan lahan, kelas kerentanan kebakaran hutan dan lahan, dan kelas kapasitas daerah. Hasil penggabungan dari ketiga indeks/kelas kebakaran hutan dan lahan akan menunjukkan kelas risiko bencana kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Barito Utara seperti tersaji pada Tabel 2.53.

Tabel 2.53. Tingkat Risiko Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Barito Utara

No.	Indek/Kelas	Kategori
1.	Bahaya	Sedang
2.	Kerentanan	Sedang
3.	Kapasitas	Rendah
4.	Risiko	Sedang

Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Nasional-Provinsi Kalimantan Tengah 2022-2026.



Peta 34. Risiko Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan Kabupaten Barito Utara.

2.1.6.2.5. Cuaca Ekstrem

Cuaca ekstrem merupakan fenomena cuaca yang dapat menimbulkan bencana, korban jiwa, dan menghancurkan tatanan kehidupan sosial. Contoh cuaca ekstrem antara lain hujan lebat, hujan es, angin kencang, dan badai taifun. Untuk wilayah Provinsi Kalimantan Tengah (termasuk Kabupaten Barito Utara) kajian cuaca ekstrem lebih dititikberatkan pada angin kencang.

Angin kencang merupakan angin kencang yang datang secara tiba-tiba, mempunyai pusat, bergerak melingkar menyerupai *spiral* dengan kecepatan 40-50 km/jam hingga menyentuh permukaan bumi, dan akan hilang dalam waktu singkat (3-5 menit). Terjadinya angin kencang diawali dengan terbentuknya siklon yang dapat terjadi ketika wilayah bertekanan udara rendah dikelilingi oleh wilayah bertekanan tinggi. Pada umumnya kasus angin kencang di Indonesia ditandai dengan terbentuknya awan *kumulonimbus* yang menjulang ke atas. Selanjutnya terjadi hujan lebat dengan hembusan angin kuat dalam waktu relatif singkat.

a. Bahaya bencana cuaca ekstrem

Pada umumnya cuaca ekstrem didasarkan pada distribusi klimatologi, dimana kejadian ekstrem lebih kecil sama dengan 5% distribusi. Potensi terjadinya bahaya cuaca ekstrem di wilayah dengan keterbukaan lahan tinggi dan dataran yang landai.

Tabel 2.54. Potensi Bahaya Bencana Cuaca Ekstrem Kabupaten Barito Utara

No.	Kategori Bahaya	Luas (ha)
1.	Rendah	568.011
2.	Sedang	150.541
3.	Tinggi	55.677
Total		774.229
Kelas		Sedang

Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Nasional-Provinsi Kalimantan Tengah 2022-2026.

b. Kerentanan bencana cuaca ekstrem

Kajian kerentanan cuaca ekstrem didapatkan dari potensi penduduk terpapar dan kelompok rentan serta potensi kerugian, baik fisik, ekonomi, dan kerusakan lingkungan. Potensi jumlah penduduk terpapar dan potensi kerugian dianalisis dan kemudian ditampilkan dalam bentuk kelas kerentanan bencana cuaca ekstrem.

Tabel 2.55.Potensi Penduduk Terpapar dan Kerugian Bencana Cuaca Ekstrem Kabupaten Barito Utara

Uraian	Potensi
Jumlah penduduk terpapar (jiwa)	156.366
Kelompok Rentan	
Penduduk umur rentan (jiwa)	14.027
Penduduk miskin	7,435
Penduduk disabilitas	784
Kelas	Sedang
Kerugian (Juta Rupiah)	
Kerugian fisik	1.084.902
Kerugian ekonomi	543.566
Total kerugian	1.628.468
Kelas kerugian	Tinggi

Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Nasional-Provinsi Kalimantan Tengah 2022-2026.

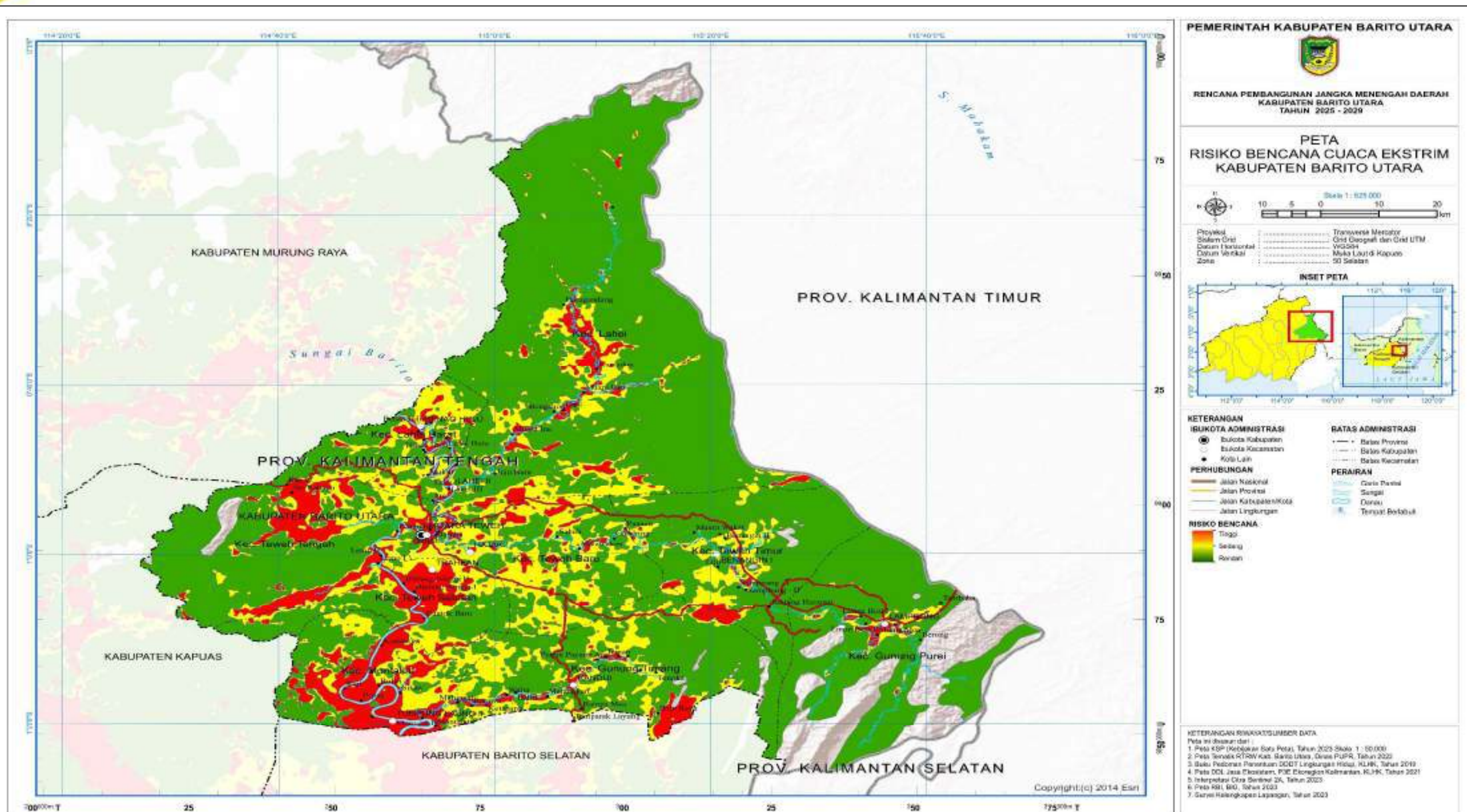
c. Risiko bencana cuaca ekstrem

Kajian risiko cuaca ekstrem merupakan penggabungan antara indeks/kelas bahaya cuaca ekstrem, kelas kerentanan cuaca ekstrem, dan kelas kapasitas daerah. Hasil penggabungan dari ketiga indeks/kelas cuaca ekstrem akan menunjukkan kelas risiko bencana cuaca ekstrem di Kabupaten Barito Utara seperti tersaji pada Tabel 2.56.

Tabel 2.56.Tingkat Risiko Bencana Cuaca Ekstrem di Kabupaten Barito Utara

No.	Indek/Kelas	Kategori
1.	Bahaya	Sedang
2.	Kerentanan	Sedang
3.	Kapasitas	Rendah
4.	Risiko	Sedang

Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Nasional-Provinsi Kalimantan Tengah 2022-2026.



Peta 35. Risiko Bencana Cuaca Ekstrem Kabupaten Barito Utara.

2.1.6.3. Kerentanan Perubahan Iklim

Fenomena perubahan iklim merupakan perubahan jangka panjang dari distribusi pola cuaca secara statistik sepanjang periode waktu mulai dasawarsa hingga jutaan tahun. Hal ini bisa diartikan sebagai perubahan keadaan cuaca rata-rata atau perubahan distribusi peristiwa cuaca rata-rata. Perubahan iklim dapat terjadi secara lokal, terbatas, hingga regional tertentu, atau dapat terjadi di seluruh wilayah permukaan bumi. Perubahan tersebut ditandai setidaknya oleh 4 hal yakni:

- adanya perubahan atau kenaikan temperature secara global (*global warming*);
- kenaikan tinggi muka air laut;
- semakin sering terjadinya cuaca ekstrem dan lainnya;
- terjadinya perubahan pola curah hujan.

Perubahan iklim meningkatkan frekuensi kejadian bencana *hidrometeorologi* seperti cadangan ketersediaan air yang semakin berkurang dan/atau bahkan bisa menyebabkan kelebihan debit air pada waktu yang lain, serta kebakaran hutan dan lahan. Risiko bencana ini akan meningkat berdasarkan proyeksi perubahan iklim di masa mendatang, dan dapat berpengaruh terhadap ketahanan sumberdaya air, pangan, dan energi. WHO memperkirakan pada tahun 2030 hingga 2050 perubahan iklim dapat memicu kurang lebih 250.000 jiwa kematian setiap tahunnya akibat malnutrisi, malaria, diare, dan *heat stress*.

Kabupaten Barito Utara memiliki kerentanan yang cukup tinggi terhadap dampak perubahan iklim, terutama karena karakteristik wilayah yang didominasi oleh bentang alam dataran rendah, kawasan hutan tropis, dan daerah aliran sungai (DAS) Barito yang menjadi sumber utama kehidupan masyarakat. Perubahan pola curah hujan, peningkatan suhu udara, serta kejadian cuaca ekstrem seperti banjir, kekeringan, dan kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan menjadi ancaman bagi keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat daerah. Kerentanan tersebut dapat dijelaskan melalui 3 (tiga) aspek utama sebagai berikut:

- Keterpaparan (*Exposure*)
Kabupaten Barito Utara memiliki tingkat keterpaparan tinggi terhadap perubahan pola iklim regional Kalimantan. Peningkatan intensitas curah hujan pada musim penghujan sering menimbulkan banjir di daerah bantaran sungai, sementara pada musim kemarau yang lebih panjang menyebabkan kekeringan serta peningkatan risiko

kebakaran hutan dan lahan. Infrastruktur dasar, permukiman penduduk, serta lahan pertanian di wilayah dataran rendah menjadi sektor yang paling terpapar terhadap risiko ini.

- Kepekaan (*sensitivity*)

Sebagian besar masyarakat Kabupaten Barito Utara menggantungkan kehidupan pada sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, dan perikanan perairan umum. Ketergantungan yang tinggi terhadap kondisi iklim menjadikan sektor-sektor tersebut sangat sensitive terhadap perubahan cuaca ekstrem dan ketidakpastian musim tanam. Selain itu, keberadaan masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan dan tepi sungai juga menambah tingkat sensitivitas terhadap bencana iklim seperti banjir, banjir bandang, dan tanah longsor.

- Kapasitas Adaptif (*adaptive capacity*)

Kapasitas adaptif masyarakat dan pemerintah daerah masih perlu diperkuat melalui peningkatan akses terhadap informasi iklim, penerapan teknologi adaptasi, serta penguatan kelembagaan lingkungan hidup dan penanggulangan bencana. Upaya mitigasi dan adaptasi telah mulai dilakukan melalui kegiatan penghijauan (*rehabilitasi hutan dan lahan, rehabilitasi daerah aliran sungai, dan lain-lain*), konservasi DAS, pembangunan infrastruktur pengendali banjir, serta peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem. Namun demikian, keterbatasan sumber daya, akses teknologi, serta masih rendahnya integrasi aspek perubahan iklim dalam perencanaan daerah menjadi tantangan tersendiri.

2.1.7. Demografi

2.1.7.1. Kondisi Penduduk Saat Ini

Jumlah penduduk di Kabupaten Barito Utara pada tahun 2024 mencapai 159.848 jiwa yang terdiri atas 83.033 jiwa penduduk laki-laki dan 76.815 jiwa penduduk perempuan (Disdukcapil Kabupaten Barito Utara, 2024). Secara umum, laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Barito Utara cenderung fluktuatif dalam kurun waktu tahun 2021-2024. Tercatat pada tahun 2021 laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Barito Utara sebesar 1,17%, sedikit meningkat pada tahun 2024 dengan laju pertumbuhan penduduk mencapai 1,32%. Fluktuasi pertumbuhan penduduk dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti kelahiran (*fertilitas*), kematian (*mortalitas*), dan migrasi penduduk. Secara detail, jumlah penduduk dan laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Barito Utara disajikan pada Tabel 2.57

Tabel 2.57.Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Barito Utara Tahun 2020-2025

No.	Tahun	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Laju Pertumbuhan (%)	Kepadatan Penduduk (jiwa/km ²)
1	2020	135.240	-	19
2	2021	157.231	1,17	19
3	2022	160.435	1,99	16
4	2023	160.185	1,34	16
5	2024	162.622	1,32	16

Sumber: BPS Kabupaten Barito Utara 2021-2025.

Pada tahun 2016 penduduk Kabupaten Barito Utara berjumlah 128.400 jiwa, terdiri atas 66.715 jiwa penduduk laki-laki dan 61.685 jiwa penduduk perempuan. Kondisi tersebut mengalami kenaikan sebesar 34.222 jiwa penduduk pada tahun 2024. Jadi dalam kurun waktu 2016-2024 terjadi peningkatan jumlah penduduk $\pm 21,04\%$.

Jumlah penduduk pada kelompok umur 0-4 tahun mencapai 14.370 jiwa terdiri atas 7.360 jiwa laki-laki dan 7.010 jiwa perempuan pada tahun 2024. Nilai tersebut mengalami peningkatan dibanding tahun 2023 yang mencapai 14.040 jiwa, dan tahun 2022 yang mencapai 13.288 jiwa.

Jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun) pada tahun 2024 mencapai 115.420 jiwa. Sementara itu, jumlah penduduk lanjut usia (65+ tahun) pada tahun 2024 mencapai 8.720 jiwa. Jumlah penduduk lanjut usia mengalami kenaikan sekitar 1.820 jiwa dibandingkan tahun 2020 yang hanya sebesar 6.900 jiwa. Secara rinci, komposisi penduduk menurut kelompok umur disajikan pada Tabel 2.58.

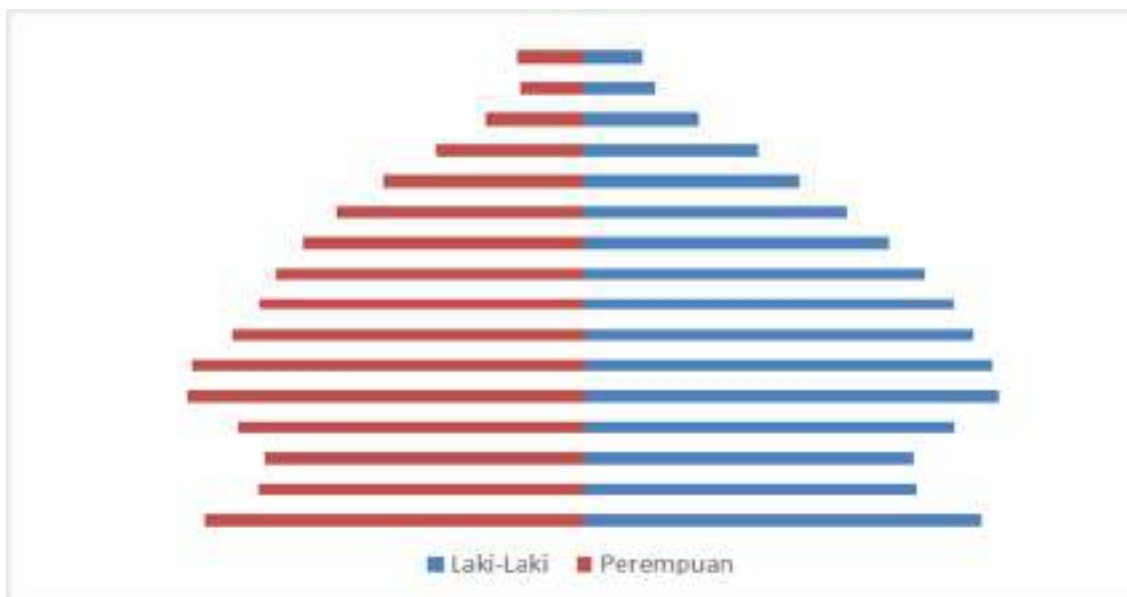
Tabel 2.58.Jumlah Penduduk Kabupaten Barito Utara Menurut Kelompok Umur Tahun 2020-2024

Kelompok Umur	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
0-4	12.700	12.718	13.288	14.040	14.370
5-9	12.000	12.007	12.047	11.959	12.150
9-14	13.200	13.062	12.972	12.188	11.980
15-19	15.000	14.918	14.962	13.709	13.240
20-24	14.700	14.748	14.847	15.023	14.970
25-29	13.700	13.806	13.993	14.514	14.780
30-34	13.100	13.182	13.327	13.463	13.670
35-39	12.400	12.599	12.872	12.720	12.840
40-44	11.400	11.583	11.827	11.837	12.000
45-49	10.100	10.428	10.787	10.660	10.830
50-54	8.400	8.766	9.169	9.179	9.430
55-59	6.800	7.058	7.398	7.481	7.720

Kelompok Umur	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
60-64	4.700	4.977	5.320	5.620	5.940
65-69	3.100	3.338	3.560	3.719	3.940
70-74	1.900	2.005	2.137	2.321	2.480
75+	1.900	2.036	2.179	2.172	2.300
Total	155.100	157.231	160.685	160.605	162.640

Sumber: BPS Kabupaten Barito Utara, 2021-2025.

Data komposisi penduduk juga dapat direpresentasikan dalam bentuk piramida penduduk. Sebagai contoh, data komposisi penduduk tahun 2024 yang disajikan pada Gambar 2.20, menggambarkan jenis piramida penduduk stasioner awal. Jenis piramida tersebut ditunjukkan dengan jumlah penduduk usia produktif yang massif, angka kelahiran yang mulai stabil, dan angka harapan hidup yang mulai membaik.



Gambar 2.20. Piramida Penduduk Kabupaten Barito Utara Tahun 2024.

Komposisi penduduk juga dapat direpresentasikan melalui rasio jenis kelamin. Berdasar rasio jenis kelamin, komposisi penduduk Kabupaten Barito Utara pada rentang tahun 2020-2024 didominasi oleh penduduk jenis kelamin laki-laki. Pada tahun 2020, rasio jenis kelamin penduduk di Kabupaten Barito Utara mencapai 108. Angka tersebut menandakan bahwa dalam setiap 100 penduduk perempuan terdapat 108 penduduk laki-laki. Namun, pada tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 1 poin menjadi 107, angka ini menandakan bahwa dalam setiap 100 penduduk perempuan terdapat 107 penduduk laki-laki. Rasio jenis kelamin penduduk di Kabupaten Barito Utara mengalami *tren* dinamis dalam rentang 2020-2024.

Tabel 2.59. Rasio Jenis Kelamin Penduduk Kabupaten Barito Utara Tahun 2020-2024

Tahun	Laki-Laki (jiwa)	Perempuan (jiwa)	Rasio Jenis Kelamin
2020	80.690	74.440	108
2021	81.680	75.551	108
2022	83.387	77.048	108
2023	82.662	77.523	107
2024	84.187	78.435	107

Sumber: BPS Kabupaten Barito Utara Tahun 2021-2025.

Berdasar distribusi penduduk, penduduk di Kabupaten Barito Utara secara umum terkonsentrasi pada 2 daerah yang berdekatan dengan ibukota kabupaten (Muara Teweh) yakni Kecamatan Teweh Tengah dan Kecamatan Teweh Baru dengan persentase penduduk masing-masing kecamatan di atas 10%. Secara rinci, distribusi penduduk menurut kecamatan di Kabupaten Barito Utara pada Tahun 2024 disajikan pada Tabel 2.60.

Tabel 2.60. Distribusi Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Barito Utara Tahun 2024

Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Proporsi Penduduk (%)
Montallat	12.316	7,57
Gunung Timang	13.081	8,04
Gunung Purei	2.813	1,73
Teweh Timur	6.576	4,04
Teweh Tengah	62.524	38,45
Teweh Baru	23.482	14,44
Teweh Selatan	15.826	9,73
Lahei	14.190	8,73
Lahei Barat	11.814	7,26
Jumlah	162.622	100,00

Sumber: BPS Kabupaten Barito Utara, 2025 (Data Diolah).

Berdasar kepadatan penduduk, dapat dilihat bahwa Kecamatan Teweh Tengah sebagai tempat ibukota Kabupaten Barito Utara (Muara Teweh) memiliki kepadatan penduduk tertinggi dibanding 8 kecamatan lainnya. Kepadatan penduduk Kecamatan Teweh Tengah pada Tahun 2020 mencapai 51 jiwa/km². Nilai tersebut semakin meningkat setiap tahunnya, hingga pada tahun 2024 mencapai 55 jiwa/km².

Kepadatan penduduk di Kecamatan Teweh Tengah terjadi karena luas wilayah kecamatan hanya sebesar 1.144,4 km² (11,32%) dari luas kabupaten, sedangkan jumlah penduduknya terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Kondisi sebaliknya terjadi di Kecamatan Gunung Purei yang memiliki kepadatan penduduk 2 jiwa/km² pada tahun 2024. Hal ini terjadi karena kondisi Kecamatan Gunung Purei hanya ditempati oleh 2.813 jiwa penduduk, sementara luas wilayahnya mencapai 1.435,80 km² (14,20%) dari total luas wilayah

Kabupaten Barito Utara. Secara detail, kepadatan penduduk pada tiap kecamatan di Kabupaten Barito Utara disajikan pada Tabel 2.61.

Tabel 2.61. Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Barito Utara Tahun 2020-2024

Kecamatan	Luas Wilayah	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km ²)				
		2020	2021	2022	2023	2024
Montallat	694,63	18	18	18	18	18
Gunung Timang	1.066,31	12	12	12	13	12
Gunung Purei	1.435,80	2	2	2	2	2
Teweh Timur	921,58	7	7	7	8	7
Teweh Tengah	1.144,40	51	52	54	52	55
Teweh Baru	808,70	27	28	28	18	29
Teweh Selatan	481,17	32	32	33	48	33
Lahei	3.219,39	4	4	4	5	4
Lahei Barat	340,26	34	34	34	35	35
Barito Utara	10.112,24	15	16	16	16	16

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Utara, 2025.

2.1.7.2. Proyeksi Kependudukan

Perencanaan pembangunan harus disusun berdasar pada data dan informasi terkini yang bersifat kompleks dan dinamis. Salah satu data dasar dan krusial yang digunakan sebagai pertimbangan perencanaan pembangunan adalah data demografi. Hal ini erat kaitannya dengan fakta bahwa manusia merupakan subjek sekaligus objek dalam pembangunan. Oleh karena itu, data dan informasi demografi seperti jumlah penduduk dan data turunannya harus menjadi acuan penting dalam perencanaan pembangunan karena dapat memberikan gambaran terkait kondisi pembangunan yang telah dijalankan.

Data dan informasi demografi juga dapat dijadikan sebagai landasan untuk menilai kemajuan pembangunan yang telah berlangsung, serta merumuskan kebijakan pembangunan di masa yang akan datang. Selain data jumlah penduduk, faktor-faktor demografis lain yang perlu diperhatikan seperti distribusi usia penduduk, angka ketergantungan, rasio jenis kelamin, dan kepadatan penduduk. Data ini sangat berperan dalam perencanaan pembangunan yang tepat dan sesuai dengan potensi perkembangan wilayah. Data tersebut selanjutnya dapat dikembangkan melalui perhitungan proyeksi penduduk dalam kurun waktu 5 tahun mendatang sebagai dasar pertimbangan perencanaan jangka menengah maupun tahunan.

Tabel 2.62. Proyeksi Penduduk Kabupaten Barito Utara Menurut Kecamatan Tahun 2026-2030

Usia (Tahun)	Tahun				
	2026	2027	2028	2029	2030
0-4	15.046	15.383	15.721	16.059	16.397
5-9	12.538	12.732	12.926	13.120	13.314
10-14	11.571	11.367	11.162	10.958	10.753
15-19	12.334	11.881	11.428	10.975	10.522
20-24	14.864	14.812	14.759	14.706	14.653
25-29	15.322	15.593	15.864	16.134	16.405
30-34	14.090	14.301	14.511	14.721	14.931
35-39	13.082	13.203	13.325	13.446	13.567
40-44	12.330	12.496	12.661	12.826	12.991
45-49	11.175	11.348	11.521	11.694	11.866
50-54	9.946	10.204	10.461	10.719	10.977
55-59	8.213	8.460	8.707	8.953	9.200
60-64	6.616	6.955	7.293	7.631	7.969
65-69	4.408	4.642	4.877	5.111	5.345
70-74	2.820	2.990	3.160	3.329	3.499
75+	2.571	2.707	2.842	2.978	3.113
Total	166.928	169.072	171.216	173.360	175.504

Sumber: Pengolahan Data, 2025.

Jumlah penduduk Kabupaten Barito Utara pada tahun 2026 diproyeksikan sebesar 166.762 jiwa. Jumlah penduduk tersebut akan terus bertambah hingga 5 tahun ke depan. Berdasar pada hasil proyeksi penduduk berbasis skenario tren seperti yang tersaji pada Tabel 2.62 di atas, diperkirakan jumlah penduduk Kabupaten Barito Utara pada tahun 2030 mencapai 175.504 jiwa. Hal ini menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 5 tahun ke depan Kabupaten Barito Utara akan mengalami pertambahan penduduk sebesar ± 12.383 jiwa (7,61%) dari jumlah penduduk pada tahun 2024.

Pertumbuhan penduduk suatu wilayah akan berpengaruh terhadap tingkat kebutuhan sarana tempat tinggal. Masyarakat secara umum akan memiliki kecenderungan untuk memilih tempat tinggal yang memiliki akses mudah ke pusat perekonomian/industri dan memiliki tanah yang subur dan datar sehingga berpengaruh terhadap tingkat kepadatan penduduk di wilayah tersebut.

Hasil proyeksi menunjukkan bahwa kepadatan penduduk tertinggi berada di Kecamatan Teweh Tengah yaitu mencapai 55 jiwa/km², tingginya kepadatan penduduk di wilayah ini

kemungkinan disebabkan ibukota kabupaten (Muara Teweh) berada di kecamatan ini, sekaligus sebagai pusat ekonomi dan pemerintahan di Kabupaten Barito Utara.

Tabel 2.63. Ringkasan Kondisi Demografi Hasil Proyeksi Penduduk Kabupaten Barito Utara Tahun 2026-2030

Uraian	2026	2027	2028	2029	2030
Penduduk					
Laki-laki	84.216	88.846	90.400	91.953	93.506
Perempuan	80.280	81.203	82.126	83.049	83.971
Total	165.098	164.496	170.050	172.525	175.001
Rasio jenis kelamin (%)	108,0426	108,7517	109,4608	110,1699	110,879
Kepadatan penduduk	16,57	16,82	17,06	17,31	17,55
Komposisi Penduduk (%)					
0-14 tahun	39.155	39.482	39.809	40.137	40.464
15-64 tahun	117.974	119.251	120.528	121.805	123.083
65+ Tahun	9.799	10.339	10.878	11.418	11.957
Angka ketergantungan (%)	41,50	41,78	42,05	42,33	42,59

Sumber: Pengolahan Data, 2025.

Berdasar Tabel 2.63 di atas, jumlah penduduk Kabupaten Barito Utara pada tahun 2030 diperkirakan mencapai 175.001 jiwa, terdiri atas 93.506 jiwa penduduk pria dan 83.971 jiwa penduduk perempuan. Kepadatan penduduk terus mengalami peningkatan akibat adanya pertambahan jumlah penduduk yang disebabkan adanya faktor kelahiran dan migrasi, serta semakin berkurangnya ruang wilayah. Pada tahun 2030, diproyeksikan kepadatan penduduk Kabupaten Barito Utara mencapai 17,55 jiwa/km².

Rasio jenis kelamin (*sex ratio*) diproyeksikan akan terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, dan pada 2030 diperkirakan rasio jenis kelamin penduduk di Kabupaten Barito Utara sebesar 110,879 (dibulatkan menjadi 111). Artinya pada 2030 nanti, dalam 100 penduduk perempuan akan ada sebanyak 111 penduduk laki-laki.

Struktur umur penduduk Kabupaten Barito Utara didominasi oleh penduduk usia produktif. Berdasarkan analisis proyeksi penduduk 2025-2030, penduduk usia produktif (15-64 tahun) akan terus mengalami peningkatan mencapai 123.083 jiwa penduduk pada tahun 2030 (57,41%).

2.1.7.3. Masyarakat Adat

Masyarakat adat merupakan kelompok sosial yang memiliki asal-usul leluhur secara turun-temurun di wilayah geografis tertentu, yang memiliki nilai, sistem sosial, budaya, serta hukum adat yang masih berlaku dan dihormati oleh para anggotanya. Masyarakat adat hidup

berdasarkan prinsip kebersamaan, keseimbangan dengan alam, serta kearifan lokal yang menjadi pedoman dalam mengatur hubungan antarsesama dan dengan lingkungan.

Peran masyarakat adat sangat penting dalam pelestarian nilai-nilai budaya bangsa, pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan, serta pembentukan karakter masyarakat yang berkeadilan dan berkepribadian. Pemerintah berkomitmen untuk memberikan pengakuan, perlindungan, dan pemberdayaan terhadap masyarakat adat melalui kebijakan yang inklusif dan berkeadilan sosial.

Di Provinsi Kalimantan Tengah terdapat 2 (dua) kebijakan pemerintah daerah yang berkaitan dengan masyarakat adat yakni Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 26 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengakuan Masyarakat Adat, dan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah No. 2 Tahun 2024 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.

Berdasar data yang tersaji dalam situs Badan Registrasi Wilayah Adat/BRWA (<https://brwa.or.id/pages/about>), di Provinsi Kalimantan Tengah terdapat 54 wilayah adat dengan status teregistrasi, terverifikasi, dan tersertifikasi. Khusus di Kabupaten Barito Utara terdapat 4 wilayah adat yang teregistrasi di laman web BRWA yakni Masyarakat Dusun Malang Leu Karamuan, Lou Payang, Temanggung Sulur Hungei Parau, dan Teboyan Setalar.

Berdasar LKIP Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Utara (2023), disebutkan bahwa kelompok Masyarakat Hukum Adat (MHA) yang sudah terbentuk sebanyak 8 MHA yang tersebar di 5 kecamatan yakni Kecamatan Lahei Barat, Lahei, Teweh Timur, Gunung Purei, dan Gunung Timang.

Tabel 2.64. Kelompok MHA di Kabupaten Barito Utara

No.	Kecamatan	Nama Kelompok MHA	Keterangan
1.	Lahei Barat	Leu Karamuan	Sudah proses identifikasi
2.	Lahei	Nihan Hilir	Masih finishing dokumen
3.		Muara Pari	Masih finishing dokumen
4.	Teweh Timur	Benangin III	Masih proses pembentukan tingkat desa dan kedemangan
5.	Gunung Purei	Muara Mea	Masih proses dokumen
6.		Paying	Masih proses dokumen
7.		Berong	Masih proses dokumen
8.		Tongka	Masih proses dokumen

Sumber: LKIP Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Utara, 2023.

Di Kabupaten Barito Utara terdapat 1 (satu) produk kebijakan yang berkaitan dengan masyarakat hukum adat yang tertuang dalam Keputusan Bupati Barito Utara Nomor 188.45/331/2019 yang mengatur terkait pembentukan panitia masyarakat hukum adat Kabupaten Barito Utara. Lahirnya keputusan ini terkait adanya surat dari Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 522/969/Dishut Tanggal 31 Desember 2018 perihal penetapan, pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat dan hutan adat.

Hadirnya peraturan daerah dan kebijakan daerah yang mengatur masyarakat adat merupakan wujud nyata dari komitmen pemerintah daerah dalam memberikan pengakuan, perlindungan, dan pemberdayaan terhadap hak-hak masyarakat adat. Kebijakan tersebut lahir sebagai respon atas pentingnya menjaga identitas budaya, sistem sosial, dan wilayah adat yang selama ini menjadi bagian tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat lokal.

Peraturan daerah tentang masyarakat adat berfungsi sebagai instrument hukum daerah yang menegaskan keberadaan masyarakat adat beserta hak-haknya atas tanah, hutan, dan sumber daya alam. Melalui Perda tersebut, pemerintah daerah memiliki dasar hukum yang kuat untuk melaksanakan berbagai program seperti (1) pendataan dan pengakuan masyarakat hukum adat melalui verifikasi dan validasi komunitas adat di wilayahnya; (2) perlindungan wilayah adat dan hak ulayat agar tidak tumpang tindih dengan kepentingan pembangunan lain; (3) pelestarian nilai budaya, kearifan lokal, dan kelembagaan adat, termasuk dukungan terhadap kegiatan sosial dan upacara adat; dan (4) pemberdayaan ekonomi masyarakat adat melalui pengembangan usaha berbasis potensi lokal.

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.2.1. Kesejahteraan Ekonomi

Kesejahteraan ekonomi dan masyarakat merupakan salah satu tujuan penting dalam rencana pembangunan daerah. Tercapainya kesejahteraan ekonomi yang baik berarti seluruh aspek dalam kehidupan masyarakat menjadi lebih baik, seperti terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat, tingkat kemiskinan yang menurun, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Mewujudkan kesejahteraan ekonomi dan masyarakat yang berkeadilan ini juga merupakan visi dari Pemerintah Kabupaten Barito Utara, sehingga penting untuk memahami gambaran umum dan keadaan Kabupaten Barito Utara melalui indikator atau aspek pendukungnya.

2.2.1.1. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi menjelaskan seberapa tinggi dan besar aktivitas perekonomian masyarakat, dan salah satu ukuran yang dipakai adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu daerah yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki daerah tersebut.

Tabel 2.65. Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Barito Utara Tahun 2020-2024

No	Tahun	PDRB Atas Dasar Harga Konstan (miliar rupiah)	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (miliar rupiah)
1	2020	6.955,4	9.391,7
2	2021	7.151,8	10.565,2
3	2022	7.597,9	14.297,6
4	2023	8.015,3	14.178,3
5	2024	8.422,3	14.039,3

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Utara, 2020-2024.

Data PDRB menyajikan 2 perspektif krusial untuk rencana pembangunan jangka menengah Kabupaten Barito Utara yakni PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) atau nilai nominal ekonomi yang menunjukkan peningkatan signifikan dari Rp9.391,7 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp14.039,3 miliar pada tahun 2024. Peningkatan ini mencerminkan besarnya nilai pasar *output* ekonomi saat ini dan menjadi dasar penentuan kapasitas fiskal serta proyeksi penerimaan daerah.

Di sisi lain, PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010 yang mengukur pertumbuhan riil tanpa dipengaruhi inflasi, juga menunjukkan tren positif dari Rp6.955,4 miliar (2020) menjadi Rp8.422,3 miliar (2024), hal ini memvalidasi bahwa adanya peningkatan volume produksi nyata dan keberhasilan program pembangunan daerah. Dengan demikian, rencana pembangunan daerah harus merumuskan strategi yang tidak hanya mengamankan pertumbuhan nominal (ADHB) dari sektor andalan, tetapi juga fokus pada percepatan laju pertumbuhan riil (ADHK) melalui diversifikasi dan penguatan investasi guna memastikan kesejahteraan masyarakat dapat dicapai secara berkelanjutan.



Gambar 2.21. Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Indonesia, Provinsi Kalimantan Tengah, dan Kabupaten Barito Utara Tahun 2020-2024.

Sementara itu, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Barito Utara menunjukkan pola kinerja yang dinamis dan berpotensi menjadi acuan utama dalam konteks Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Meskipun menghadapi kontraksi awal akibat pandemi pada tahun 2020 (-2,24%), perekonomian Barito Utara menunjukkan daya pulih yang kuat, dengan laju pertumbuhan yang konsisten melampaui rata-rata Provinsi Kalimantan Tengah dan nasional pada tahun-tahun berikutnya.

Kinerja ini mencapai puncaknya pada tahun 2022 (6,24%) dan tetap solid pada tahun 2023 (5,49%), dan tahun 2024 (5,08%), mengungguli Provinsi Kalimantan Tengah dan nasional. Keunggulan laju pertumbuhan ini, yang didukung oleh sektor dominan seperti pertambangan dan penggalian, perlu diterjemahkan dalam rencana pembangunan daerah menjadi strategi yang fokus pada diversifikasi ekonomi dan pemanfaatan *surplus* pendapatan untuk memperkuat sektor-sektor non-komoditas yang tumbuh pesat seperti pengadaan listrik dan gas sebesar 14,08% pada tahun 2024, administrasi pemerintahan sebesar 12,46% pada tahun 2024, dan konstruksi sebesar 8,05% pada tahun 2024) guna menjaga keberlanjutan pertumbuhan dan memitigasi risiko volatilitas harga komoditas global.

Tabel 2.66. Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Barito Utara Tahun 2020-2024 (dalam miliar rupiah)

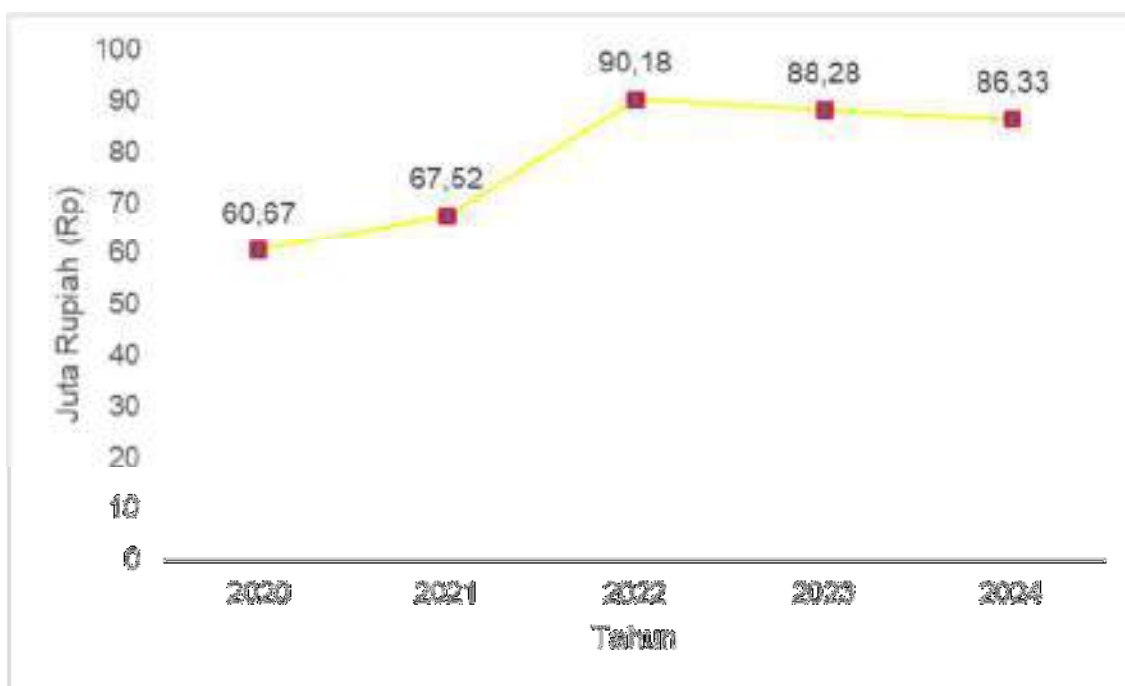
No	Lapangan Usaha	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/ <i>Agriculture, Forestry & Fishing</i>	1.110,1	1.231,9	1.265,3	1349,8	1.488,2
2	Pertambangan dan Penggalian/ <i>Mining & Quarrying</i>	3.023,2	3.722,1	6.971,5	6.186	5.337,7
3	Industri Pengolahan/ <i>Manufacturing</i>	937,3	1.026,9	1.079,5	1.130	1.196,1
4	Pengadaan Listrik dan Gas/ <i>Electricity & Gas</i>	5,6	6,3	7,1	8,5	9,8
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang/ <i>Water supply, Sewerage, Waste Management & Remediation Activities</i>	16,9	18,0	20,0	21,3	21,1
6	Konstruksi/ <i>Construction</i>	558,8	646,6	734,9	823,8	912,6
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/ <i>Wholesale & Retail Trade; Repair of Motor Vehicles & Motorcycles</i>	728,8	739,6	797,8	857,8	915,4
8	Transportasi dan Pergudangan/ <i>Transportation & Storage</i>	729,7	777,6	902,2	1.059,1	1.155,4
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/ <i>Accommodation & food Service Activities</i>	175,6	179,6	194,4	209,8	227,4
10	Informasi dan Komunikasi/ <i>Information & Communication</i>	122,1	130,0	141,5	148,9	154,4
11	Jasa Keuangan dan Asuransi/ <i>Financial & Insurance Activities</i>	190,7	200,7	217,3	231,1	238,7
12	Real Estat/ <i>Real Estate Activities</i>	184,1	188,1	193,0	205,6	214,8
13	Jasa Perusahaan/ <i>Bussiness Activities</i>	0,9	1,1	1,4	1,14	1,4
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib/ <i>Public Administration & Defence; Compulsory Social Security</i>	618,0	632,9	657,7	734,4	843,8
15	Jasa Pendidikan/ <i>Education</i>	563,5	584,3	601,9	659,3	727,2
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/ <i>Human Health and Social Work Activities</i>	285,5	330,7	350,3	378,6	412,8

No	Lapangan Usaha	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
17	Jasa lainnya/Other Service Activities	141,8	150,0	161,6	174,4	185,3

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Utara (2021-2025).

2.2.1.2. PDRB Per Kapita

PDRB per kapita adalah indikator makroekonomi yang menunjukkan nilai rata-rata PDRB yang dihasilkan per penduduk di suatu wilayah. Angka ini berfungsi sebagai tolok ukur utama untuk menilai tingkat kemakmuran dan kesejahteraan rata-rata penduduk yang dihitung dengan membagi total nilai tambah ekonomi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Dalam konteks perencanaan pembangunan, PDRB per kapita menjadi landasan untuk menetapkan target peningkatan pendapatan masyarakat.



Gambar 2.22. Perkembangan PDRB per kapita Kabupaten Barito Utara Tahun 2020-2024.

Terkait dengan perencanaan riil, PDRB per kapita atas dasar harga berlaku (ADHB) Kabupaten Barito Utara menunjukkan volatilitas yang dipengaruhi oleh fluktuasi harga komoditas utama daerah. Nilai nominalnya meningkat tajam dari 60,67 juta rupiah pada tahun 2020 menjadi 90,18 juta rupiah pada tahun 2022, kemudian mengalami tren penurunan menjadi 86,33 juta rupiah pada tahun 2024. Fluktuasi pasca tahun 2022 ini mencerminkan sensitivitas ekonomi Kabupaten Barito Utara terhadap faktor *inflasi* dan gejolak pasar komoditas, yang memerlukan strategi mitigasi agar peningkatan pendapatan nominal yang



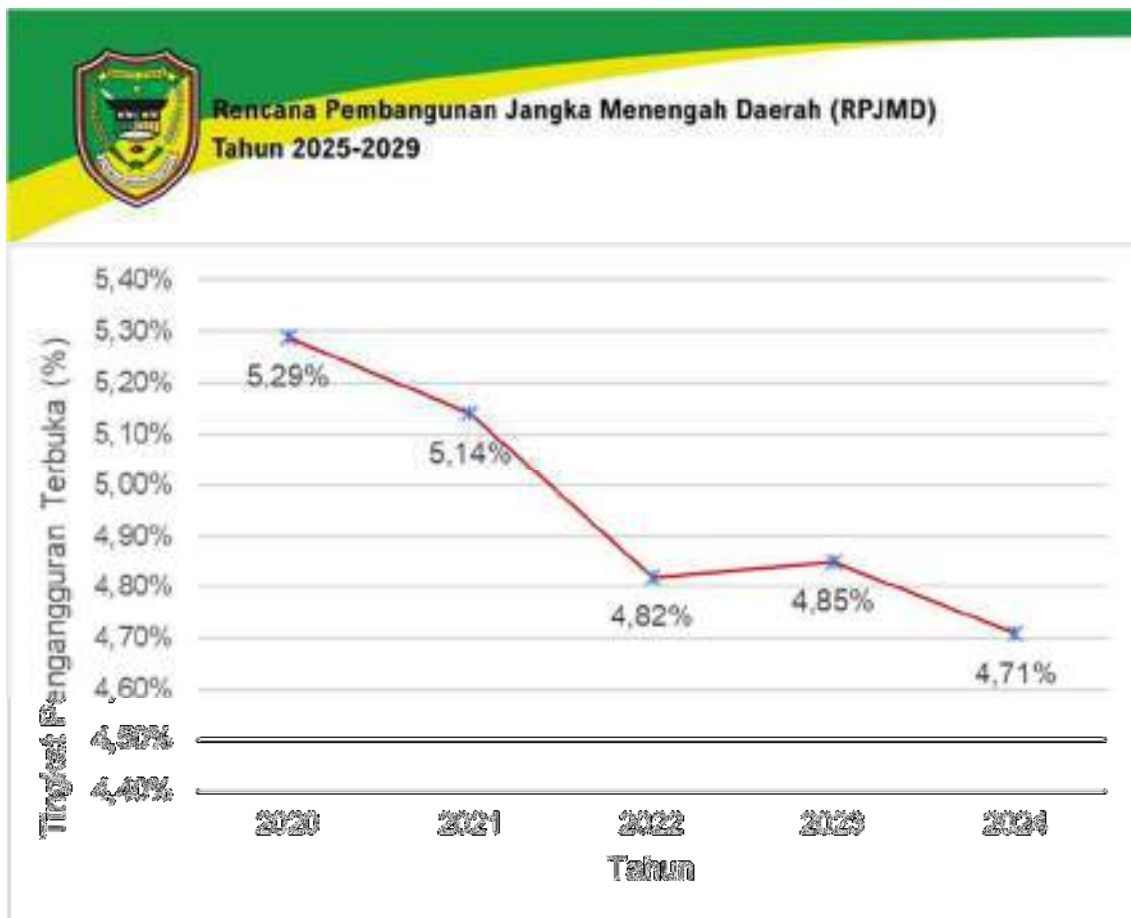
dicapai tidak serta merta hilang oleh kenaikan harga, sehingga daya beli masyarakat dapat dijaga.

Sebaliknya, PDRB per kapita atas dasar harga konstan 2010 (ADHK) memberikan gambaran akurat mengenai peningkatan kesejahteraan riil. Nilai riil ini menunjukkan tren peningkatan yang stabil dari 44,93 juta rupiah pada tahun 2020 menjadi 51,79 juta rupiah pada tahun 2024. Kenaikan ini memvalidasi bahwa volume riil barang dan jasa yang tersedia bagi setiap penduduk terus bertambah. Meskipun demikian, rencana pembangunan daerah perlu mencermati bahwa laju pertumbuhan riil ini mengalami perlambatan dari 4,86% pada tahun 2022 menjadi 3,77% pada tahun 2024. Oleh karena itu, prioritas rencana pembangunan daerah harus diarahkan pada kebijakan yang dapat mengakselerasi laju pertumbuhan PDRB per kapita ADHK melalui penguatan investasi di sektor-sektor produktif yang minim volatilitas, demi mencapai target pemerataan pendapatan dan kemakmuran riil yang berkelanjutan.

2.2.1.3. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Barito Utara menunjukkan tren penurunan yang konsisten dalam periode 2020 hingga 2024, yang mengindikasikan adanya perbaikan signifikan dalam penyerapan tenaga kerja. TPT Barito Utara berhasil turun dari 5,29% pada tahun 2020 (saat puncak dampak pandemi) menjadi 4,71% pada tahun 2024.

Penurunan ini mencerminkan keberhasilan pertumbuhan PDRB yang kuat dalam menciptakan lapangan kerja, sejalan dengan TPT nasional yang umumnya dianggap sehat atau normal berada pada kisaran 4-6%. Laju penurunan TPT yang mencapai 0,58 poin persentase selama 4 tahun ini patut dicatat sebagai keberhasilan rencana pembangunan daerah dalam memulihkan sektor ketenagakerjaan pasca-pandemi.



Gambar 2.23. Tren Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Utara Tahun 2020-2024.

Meskipun TPT menunjukkan tren positif, rencana pembangunan daerah harus mencermati fluktuasi minor pada tahun 2023 dimana TPT sedikit naik menjadi 4,85% dari 4,82% pada tahun 2022, sebelum kembali turun ke 4,71% pada tahun 2024. Fenomena ini perlu dikaitkan dengan struktur PDRB, khususnya dominasi sektor pertambangan dan penggalian.

Apabila laju penurunan TPT melambat, hal ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan PDRB yang tinggi (terutama didorong oleh sektor padat modal) mungkin kurang elastis dalam menyerap tenaga kerja lokal. Oleh karena itu, strategi rencana pembangunan harus beralih dari sekadar menurunkan TPT menjadi meningkatkan kualitas lapangan kerja dan memacu sektor padat karya. Program harus difokuskan pada penguatan sektor-sektor non-tambang, seperti industri pengolahan dan pertanian, yang memiliki potensi penyerapan tenaga kerja lebih besar, serta program pelatihan keahlian (vokasi) yang secara spesifik menargetkan kebutuhan industri pertambangan dan jasa.

Secara umum, angka TPT nasional seringkali bergerak pada kisaran 4-6%. TPT yang berada dalam kisaran ini sering diartikan sebagai kondisi pasar tenaga kerja yang cukup sehat (atau berada di dekat *natural rate of unemployment*), dimana sebagian besar pengangguran adalah friksional (disebabkan oleh perpindahan pekerjaan) dan struktural (disebabkan oleh

ketidaksihuan keahlian). Dengan TPT 4,71% pada tahun 2024, Kabupaten Barito Utara berada dalam zona yang dianggap cukup terkendali. Target selanjutnya harus berorientasi pada penurunan TPT di bawah 4% untuk menempatkan Kabupaten Barito Utara pada posisi yang lebih stabil dan inklusif secara ekonomi.

2.2.1.4. Kemiskinan

Keadaan kemiskinan di Kabupaten Barito Utara menunjukkan perbaikan yang sejalan dengan momentum pertumbuhan ekonomi daerah. Persentase Penduduk Miskin (PPM) Kabupaten Barito Utara berhasil menurun dari 5,80% pada tahun 2022 menjadi 5,67% pada tahun 2024, yang setara dengan 7,6 ribu jiwa penduduk berada di bawah Garis Kemiskinan (GK).

Fluktuasi PPM juga terjadi ketika GK Barito Utara mengalami peningkatan menjadi Rp628.429,00 per kapita per bulan pada tahun 2024. Capaian ini menunjukkan bahwa pertumbuhan PDRB yang kuat dan stabil telah mampu memberikan efek positif terhadap peningkatan pendapatan riil masyarakat miskin.

Keberhasilan ini harus menjadi titik tolak untuk mengejar target penurunan PPM hingga di bawah angka regional Provinsi Kalimantan Tengah yang pada tahun 2024 sebesar 5,17%. Strategi harus difokuskan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia (tercermin dari IPM Barito Utara 73,17 yang termasuk kategori tinggi), penguatan sektor pertanian padat karya, dan pemberian perlindungan sosial yang terarah, agar upaya peningkatan pendapatan per kapita (ADHK) dapat terus mengeluarkan penduduk dari garis kemiskinan secara berkelanjutan.

Tabel 2.67. Kondisi Kemiskinan di Kabupaten Barito Utara Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Penduduk Miskin (Ribu)	6,78	7,40	7,70	7,14	7,60
Persentase Penduduk Miskin (%)	5,17	5,61	5,80	5,35	5,67
Garis Kemiskinan (Rp/bulan)	504.430	525.236	563.393	590.832	628.429

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Utara, 2025.

Secara regional, dengan persentase penduduk miskin sebesar 5,67% pada tahun 2024, Kabupaten Barito Utara menempati urutan menengah, berada di bawah Kabupaten Murung Raya (6,58%) dan Kabupaten Gunung Mas (5,68%), tetapi di atas Kota Kotawaringin Timur (5,66%) dan Kabupaten Katingan (5,26%).

Kesenjangan ini menandakan bahwa meskipun Kabupaten Barito Utara bukan penyumbang utama kemiskinan secara persentase di level provinsi, upaya penurunan angka kemiskinan harus terus diintensifkan. Diperlukan pemanfaatan momentum penurunan PPM ini untuk menggeser posisi Kabupaten Barito Utara ke peringkat yang lebih baik di antara kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Tengah, dengan fokus khusus pada penanggulangan kemiskinan ekstrem melalui intervensi sektor pertanian dan pengembangan SDM yang selaras dengan tuntutan pasar kerja.

Tabel 2.68. Perbandingan Kondisi Kemiskinan di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 dan 2024

Kabupaten/ Kota	Jumlah Penduduk Miskin Tahun 2023 (jiwa)	Persentase Penduduk Miskin Tahun 2023 (%)	Jumlah Penduduk Miskin Tahun 2024 (jiwa)	Persentase Penduduk Miskin Tahun 2024 (%)
Kotawaringin Barat	13,44	4,18	13,43	4,11
Kotawaringin Timur	26,57	5,69	26,69	5,66
Kapuas	19,19	5,21	19,47	5,25
Barito Selatan	6,66	4,71	6,87	4,83
Barito Utara	7,14	5,35	7,6	5,67
Sukamara	2,71	3,96	2,9	4,14
Lamandau	2,63	3,12	2,79	3,25
Seruyan	15,71	7,12	16,06	7,08
Katingan	8,95	4,99	9,55	5,26
Pulang Pisau	5,92	4,58	5,91	4,56
Gunung Mas	6,55	5,47	6,86	5,68
Barito Timur	8,59	6,63	8,74	6,66
Murung Raya	7,81	6,44	8,05	6,58
Palangka Raya	10,31	3,44	10,7	3,52
Provinsi	142,17	5,11	145,63	5,17

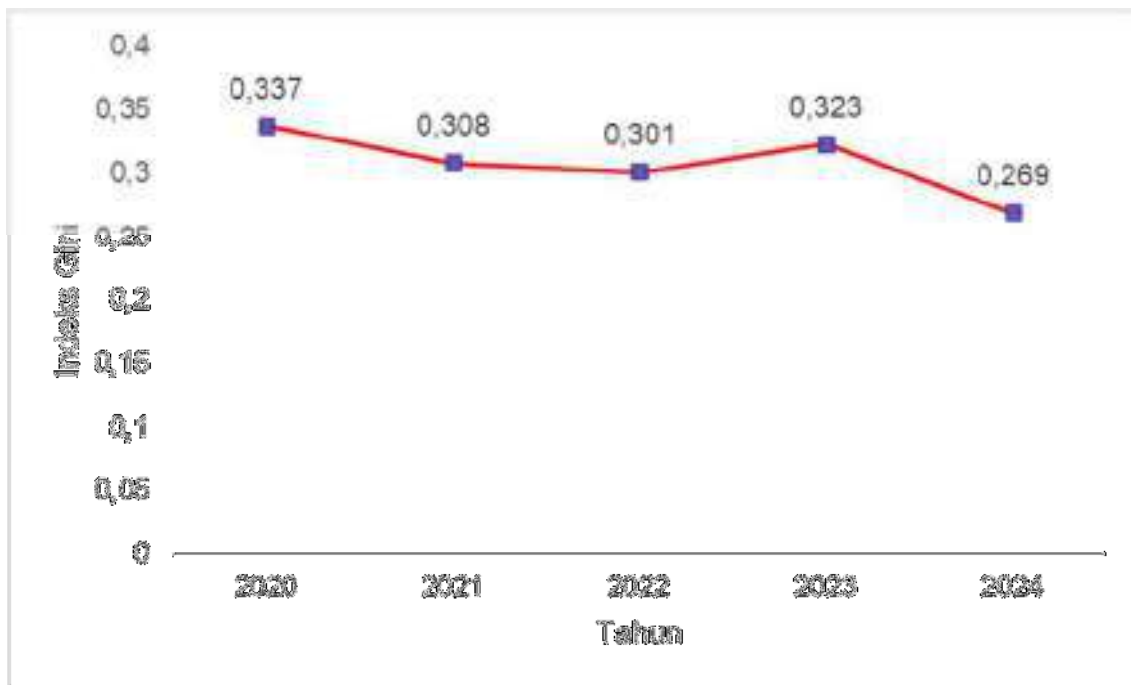
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah.

2.2.1.5. Indeks Gini

Indeks Gini (*Gini Ratio*) merupakan indikator penting untuk mengukur tingkat ketimpangan distribusi pengeluaran penduduk, dimana nilai antara 0,30 dan 0,40 menunjukkan tingkat ketimpangan sedang. Data *gini ratio* Kabupaten Barito Utara menunjukkan perbaikan signifikan pada awal periode pemulihan ekonomi, turun tajam dari 0,337 pada tahun 2020 menjadi 0,301 pada tahun 2022. Penurunan substansial ini

mengindikasikan bahwa upaya pemerataan atau peningkatan daya beli kelompok pengeluaran bawah berjalan efektif selama fase *rebound* ekonomi.

Meskipun demikian, keberlanjutan perbaikan ini menghadapi tantangan, ditandai dengan sedikit peningkatan kembali *gini ratio* menjadi 0,323 pada tahun 2023 dan menurun menjadi 0,269 pada tahun 2024. Fluktuasi ini menandakan bahwa meskipun Kabupaten Barito Utara berhasil menghindari ketimpangan tinggi, daerah ini masih berada dalam kategori ketimpangan sedang dan rentan terhadap ketidakmerataan yang dipicu oleh disparitas dalam kecepatan pemulihan sektoral. Tujuan kebijakan harus diarahkan secara tegas untuk konsisten mencapai angka di bawah 0,30 melalui kebijakan yang inklusif, memastikan bahwa manfaat pertumbuhan PDRB yang kuat tidak hanya terpusat pada kelompok ekonomi tertentu.



Gambar 2.23. Tren Indeks Gini Kabupaten Barito Utara Tahun 2020-2024.

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Utara (data diolah, 2025).

2.2.1.6. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Barito Utara menunjukkan pencapaian yang solid dan progresif, menjadi landasan positif bagi perencanaan pembangunan daerah. Dalam periode 2019 hingga 2024, IPM Kabupaten Barito Utara secara konsisten meningkat dari 70,52 menjadi 72,71 pada tahun 2023, dan 73,17 pada tahun 2024. Angka ini

menempatkan kabupaten ini dalam kategori IPM Tinggi ($70 < \text{IPM} < 80$), menggarisbawahi keberhasilan pembangunan yang melampaui dimensi ekonomi semata.

Namun, perlu diakui bahwa capaian IPM Kabupaten Barito Utara masih berada di bawah rata-rata Provinsi Kalimantan Tengah yang mencapai 73,73 pada tahun yang sama. Perbedaan tipis ini menunjukkan bahwa rencana dan strategi harus diarahkan untuk mengatasi kesenjangan tersebut agar Kabupaten Barito Utara dapat menempati posisi yang lebih baik secara regional.



Gambar 2.24. Tren Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Barito Utara Tahun 2020-2024. *Sumber: Badan Pusat Statistik (data diolah, 2025).*

Peningkatan IPM Barito Utara didukung oleh perbaikan pada 2 dari 3 dimensi pembentuknya yakni kesehatan dan standar hidup yang layak. Dimensi kesehatan ditunjukkan oleh Umur Harapan Hidup (UHH) yang stabil pada angka 73,65 tahun pada tahun 2024, sementara dimensi ekonomi tercermin dari pengeluaran per kapita yang disesuaikan sebesar Rp11.955.000,00 per orang per tahun. Namun, IPM Kabupaten Barito Utara menghadapi hambatan utama pada dimensi pendidikan. Hal ini terlihat dari Rata-rata Lama Sekolah (RLS) yang hanya 8,87 tahun pada tahun 2024, yang secara rata-rata berarti penduduk hanya menamatkan pendidikan hingga jenjang SMP. Sementara itu, Harapan Lama Sekolah (HLS) sebesar 12,78 tahun pada tahun 2024 menunjukkan bahwa generasi muda berpotensi menamatkan pendidikan hingga SMA/ sederajat, tetapi belum terealisasi pada populasi angkatan kerja saat ini.

Tabel 2.69. Dimensi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Barito Utara Tahun 2020-2024

Tahun	Kesehatan	Pengetahuan		Standar Hidup Layak	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kab. Barito Utara
	Umur Harapan Hidup (UHH)	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Pengeluaran per-Kapita (Ribu Rupiah/Orang/Tahun)	
2020	73,17	8,71	12,49	9.936	71,44
2021	73,17	8,85	12,50	9.951	71,64
2022	73,58	8,90	12,53	10.182	72,16
2023	73,58	8,91	12,54	10.720	72,71
2024	73,65	8,87	12,78	11.955	73,17

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025.

Melihat tantangan pada dimensi pendidikan, Kabupaten Barito Utara perlu merumuskan strategi yang tegas dan terfokus untuk mendorong RLS agar mendekati HLS. Hal ini mencakup program masif peningkatan akses dan retensi pendidikan menengah ke atas, terutama bagi anak usia 16-18 tahun yang tingkat partisipasi sekolahnya masih 65,31%. Selain itu, perbaikan IPM harus diiringi dengan mitigasi risiko sosial ekonomi. Persentase penduduk miskin masih di sekitar 5,67% pada tahun 2024, karena itu kebijakan dan strategi harus memastikan bahwa momentum pertumbuhan PDRB yang tinggi dialihkan untuk memperkuat dimensi manusia, sehingga tercapai kualitas sumber daya manusia yang memadai untuk mengisi kebutuhan pasar kerja, mengamankan kenaikan IPM, dan pada akhirnya mendorong Kabupaten Barito Utara melampaui IPM Provinsi Kalimantan Tengah.

2.2.1.7. Nilai Tukar Petani

Nilai Tukar Petani (NTP) adalah indikator krusial yang mengukur daya beli petani di perdesaan, dihitung dari perbandingan indeks harga yang diterima petani untuk produknya terhadap indeks harga yang dibayar petani untuk kebutuhan rumah tangga dan biaya produksi. NTP di atas 100 menunjukkan *surplus*, dimana pendapatan petani melebihi pengeluarannya.

NTP gabungan Provinsi Kalimantan Tengah (sebagai proksi regional) pada Februari 2024 tercatat sebesar 122,79. Angka ini, yang jauh di atas 100, mengindikasikan bahwa secara regional, petani berada dalam kondisi *surplus* dan memiliki daya beli yang baik. Dalam konteks di Kabupaten Barito Utara, hal ini sangat relevan mengingat mayoritas penduduk bekerja di sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, perburuan dan perikanan (sekitar 33,54%), dan sektor ini merupakan kontributor PDRB terbesar kedua di Kabupaten Barito Utara.



Gambar 2.25. Nilai Tukar Petani Regional (Provinsi Kalimantan Tengah) Tahun 2024.

2.2.2. Kesehatan untuk Semua

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, mendefinisikan kesehatan adalah keadaan sehat seseorang, baik secara fisik, jiwa, maupun sosial, bukan sekadar terbebas dari penyakit. Sehingga memungkinkan individu untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Kondisi umum pelayanan dasar bidang kesehatan di Kabupaten Barito Utara menunjukkan upaya yang progresif dalam menjamin kesehatan menyeluruh bagi seluruh penduduk.

2.2.2.1. Angka Harapan Hidup (AHH)

Angka Harapan Hidup (AHH) didefinisikan sebagai rata-rata tahun tambahan kehidupan yang dapat diharapkan oleh seseorang yang baru lahir dan menjalani sepanjang hidupnya berdasarkan pola *mortalitas* (kematian) yang terjadi pada saat itu. AHH merupakan indikator komprehensif dan hasil dari kemajuan di berbagai sektor, tidak hanya kesehatan, tetapi juga pendidikan, ekonomi, dan lingkungan. Nilai AHH yang tinggi mencerminkan keberhasilan suatu wilayah dalam menyediakan lingkungan yang mendukung kualitas hidup dan umur panjang, menunjukkan berkurangnya risiko kematian pada usia muda, terutama pada masa bayi dan anak. Peningkatan AHH adalah cerminan langsung dari perbaikan status gizi, sanitasi, dan akses terhadap air bersih, serta keberhasilan intervensi kesehatan *preventif* dan *kuratif*.



Gambar 2.26. Angka Harapan Hidup (AHH) Kabupaten Barito Utara Terhadap AHH Provinsi Kalimantan Tengah dan AHH Pusat Tahun 2020-2024.

Sumber: BPS Umur Harapan Hidup (UHH) menggunakan hasil Long Form SP2020 (Sensus Penduduk 2020); BPS Provinsi Kalimantan Tengah.

Gambaran kondisi kesehatan masyarakat Kabupaten Barito Utara yang diukur melalui indikator AHH menunjukkan tren positif yang signifikan dari tahun 2020 hingga 2024. Secara umum, ketiga tingkat wilayah (Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, dan nasional) sama-sama mencatatkan kenaikan AHH, hal tersebut mengindikasikan adanya perbaikan kualitas hidup dan layanan kesehatan. AHH nasional berada di puncak (naik dari 73,37 menjadi 74,15 tahun), diikuti oleh AHH Provinsi Kalimantan Tengah (naik dari 73,10 menjadi 73,73 tahun).

Kinerja Kabupaten Barito Utara menunjukkan dinamika yang menarik dan perlu menjadi fokus utama dalam penyusunan RPJMD 2025-2029:

- Lompatan kinerja awal (2020-2021): capaian Kabupaten Barito Utara diawali dengan peningkatan AHH yang sangat tajam, yakni dari 71,30 tahun (2020) melonjak menjadi 73,17 tahun (2021). Peningkatan sebesar 1,87 tahun dalam satu tahun ini merupakan indikasi keberhasilan intervensi kesehatan yang masif dan efektif pada periode tersebut. Bahkan, pada tahun 2021, AHH Kabupaten Barito Utara (73,17) berhasil melampaui AHH Provinsi Kalimantan Tengah (73,14).
- Stagnasi dan tantangan akhir periode: laju kenaikan AHH Kabupaten Barito Utara melambat drastis setelah tahun 2021, bahkan cenderung stagnan pada 73,58 tahun pada tahun 2022 dan 2023. Meskipun kembali naik sedikit menjadi 73,65 tahun pada

tahun 2024, capaian ini kembali menempatkan AHH Kabupaten Barito Utara sedikit di bawah AHH provinsi (73,73 tahun) dan masih jauh tertinggal 0,50 tahun dari AHH nasional (74,15 tahun).

AHH merupakan indikator utama dalam klaster peningkatan kesejahteraan rakyat dalam RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) dan RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah. Secara indikator, Kabupaten Barito Utara telah selaras dengan menjadikan AHH sebagai indikator kinerja utama. Namun, yang menjadi perhatian adalah kesenjangan capaian dengan target yang ditetapkan oleh level yang lebih tinggi.

Urgensi AHH dalam indikator pembangunan dan penentuan kebijakan sangat tinggi karena berperan sebagai salah satu dari 3 dimensi utama dalam mengukur IPM, yaitu dimensi umur panjang dan hidup sehat. AHH menjadi alat vital bagi pemerintah daerah dan pusat untuk mengevaluasi efektivitas program kesehatan masyarakat dan mengidentifikasi kelompok usia atau wilayah yang rentan.

Stagnasi atau penurunan AHH menjadi sinyal darurat bagi penentu kebijakan untuk mengalihkan sumber daya dan fokus anggaran ke program pencegahan penyakit menular dan tidak menular, penguatan layanan kesehatan primer (Puskesmas), serta penurunan Angka Kematian Bayi (AKB), dan Angka Kematian Ibu (AKI). Dengan demikian, AHH berfungsi sebagai *barometer* yang memandu perencanaan jangka menengah (RPJMN/RPJMD) dan alokasi investasi sosial untuk mencapai kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Urgensi peningkatan AHH di Kabupaten Barito Utara disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:

- a. Meningkatkan kualitas IPM: peningkatan AHH adalah pilar utama dalam peningkatan IPM. Kinerja AHH yang lambat akan menahan laju peningkatan IPM Kabupaten Barito Utara.
- b. Menjaga kesetaraan regional: kinerja AHH Kabupaten Barito Utara yang rendah akan memperlebar kesenjangan kesehatan antar daerah di Provinsi Kalimantan Tengah.
- c. Efektivitas program kesehatan: AHH yang stagnan menandakan bahwa intervensi kesehatan yang dilakukan (seperti program KIA, pengendalian penyakit menular, dan layanan primer) belum optimal dalam menghasilkan perpanjangan usia harapan hidup secara signifikan.

Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Barito Utara wajib melakukan *re-evaluasi* total terhadap program kesehatan dan segera mengidentifikasi faktor risiko utama yang menghambat AHH, seperti tingginya angka kematian ibu/bayi, gizi buruk, tingginya kasus penyakit tidak menular (PTM), dan keterbatasan akses/mutu layanan kesehatan. Hal ini bertujuan untuk memastikan tercapainya target pembangunan manusia yang selaras dengan RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah dan RPJMN.

2.2.2.2. Angka Kematian Ibu

Angka Kematian Ibu (AKI) adalah salah satu indikator kesehatan paling sensitif dan merupakan komponen krusial yang secara langsung memengaruhi AHH. AKI adalah rasio yang mengukur risiko kematian perempuan selama masa kehamilan, persalinan, dan nifas (42 hari setelah persalinan). Tiga faktor utama penyebab kematian ibu, yang dikenal sebagai "Tiga Terlambat" (teori klasik dalam kesehatan ibu) sebagai berikut:

- Terlambat mengambil keputusan (mencari pertolongan).
- Terlambat sampai di fasilitas kesehatan (keterbatasan infrastruktur, geografi).
- Terlambat mendapatkan penanganan yang tepat (keterbatasan SDM dan sarana).

Tabel 2.70. Angka Kematian Ibu (AKI) di Kabupaten Barito Utara Tahun 2020-2024

Tahun	Jumlah Kematian Ibu	AKI (per 100.000 KH)	Target Nasional (per 100.000 KH)
2020	2	87	213
2021	9	364	213
2022	4	143,8	205
2023	7	339	183
2024	6	268	183

Sumber: Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Utara dan LKIP Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Utara Tahun 2024.

Kondisi sektor kesehatan di Kabupaten Barito Utara yang diukur melalui indikator AKI per 100.000 kelahiran hidup menunjukkan dinamika yang sangat tidak stabil dan mengkhawatirkan dalam 5 tahun terakhir. Meskipun Kabupaten Barito Utara memulai periode ini dengan kinerja yang sangat baik, dimana AKI pada tahun 2020 hanya 87, jauh melampaui target nasional (213), namun keberhasilan ini gagal dipertahankan.

Tantangan terbesar muncul pada tahun 2021 dan 2023, dimana AKI mengalami lonjakan ekstrem, masing-masing mencapai 364 (9 kasus kematian) dan 339 (7 kasus kematian). Meskipun lonjakan 2021 dapat dikaitkan dengan *disrupsi* akibat pandemi COVID-19, kenaikan

yang berulang pada tahun 2023 dan angka yang masih tinggi pada tahun 2024 (268) menunjukkan adanya kelemahan struktural yang perlu diatasi. Kinerja ini membuat Kabupaten Barito Utara gagal mencapai target nasional (yang terus menurun menjadi 183) dalam 3 dari 5 tahun terakhir.

Kondisi ini mengindikasikan bahwa sistem kesehatan di Kabupaten Barito Utara belum memiliki *resiliensi* yang memadai untuk menghadapi situasi krisis atau peningkatan kasus kegawatdaruratan, serta adanya isu pada kualitas layanan *antenatal care* (ANC) dan sistem rujukan ke fasilitas Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK). Oleh karena itu, RPJMD 2025-2029 harus menjadikan penurunan AKI sebagai prioritas utama dengan fokus pada: (1) penguatan pelayanan *preventif* di hulu melalui ANC berkualitas dan pendampingan risiko; (2) peningkatan kesiapan dan kecepatan sistem rujukan dan layanan kegawatdaruratan (PONEK/PONED); dan (3) intervensi lintas sektor untuk mengatasi kendala akses geografis dan transportasi ibu hamil di wilayah terpencil. Upaya ini harus bertujuan mencapai target AKI yang aman dan stabil, serta memastikan kesehatan ibu tidak lagi menjadi titik rentan dalam pembangunan daerah.

Adapun penyebab kematian ibu di kabupaten Barito Utara pada tahun 2024 yaitu pendarahan obstetrik sebanyak 3 kasus, hipertensi dalam kehamilan, persalinan dan nifas sebanyak 2 kasus, dan komplikasi non obstetri sebanyak 1 kasus. Masalah kematian ibu harus menjadi perhatian, mengingat angkanya yang berfluktuatif beberapa tahun terakhir dan meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.

Ketersediaan tenaga kesehatan yang cukup untuk memberi pelayanan, pemberian pelayanan yang sesuai standar, sarana dan prasarana pendukung yang lengkap serta pemantauan ibu hamil secara berkala, serta mekanisme rujukan yang baik tetap harus dilaksanakan untuk keselamatan ibu dan bayi. Selain itu, pelayanan kesehatan pada remaja putri dan calon pengantin dalam bentuk edukasi dan intervensi juga sangat penting untuk dilakukan dalam rangka mempersiapkan seorang ibu yang sehat.

Fluktuasi AKI di Kabupaten Barito Utara menyiratkan bahwa masalah “*Terlambat Sampa*” (geografis Kabupaten Barito Utara yang luas) dan “*Terlambat Penanganan*” (ketersediaan layanan darurat obstetri) masih menjadi isu struktural yang diperburuk oleh krisis. Data AKI Kabupaten Barito Utara menunjukkan *tren* yang tidak stabil dan tidak terprediksi.

- a. Capaian positif (2020): AKI mencapai titik terendah 87 per 100.000 KH pada tahun 2020. Capaian ini jauh melampaui target nasional saat itu (213) dan mendekati target *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang menargetkan di bawah 70.
- b. Lonjakan ekstrem (2021): terjadi kenaikan tajam dan kritis hingga 364 per 100.000 KH. Kenaikan ini adalah yang tertinggi dalam 5 tahun dan jauh melampaui target nasional (213). Lonjakan ini bertepatan dengan masa puncak pandemi COVID-19, yang kemungkinan besar menjadi faktor penyebab, baik secara langsung (kematian akibat infeksi COVID-19 pada ibu hamil/nifas) maupun tidak langsung (terganggunya akses dan kualitas pelayanan kesehatan ibu).
- c. Penurunan signifikan (2022): AKI berhasil diturunkan kembali menjadi 144 per 100.000 KH, menunjukkan pemulihan dan penataan kembali sistem kesehatan ibu pasca krisis tahun 2021. Capaian tahun 2022 ini lebih baik dari target nasional (205) dan juga lebih baik dari capaian tahun 2018 dan 2019.

Secara umum, kecuali tahun 2021, Kabupaten Barito Utara berhasil mencapai target nasional yang ditetapkan. Capaian ini menunjukkan keberhasilan intervensi lokal dalam menjaga AKI, meskipun fluktuasi yang ekstrem pada tahun 2021 menyoroti kerentanan sistem terhadap kondisi krisis. Lonjakan tahun 2021 adalah bukti bahwa sistem kesehatan ibu di Kabupaten Barito Utara memerlukan intervensi berbasis krisis dan penguatan ketahanan sistem untuk menjamin akses layanan esensial ibu hamil, bahkan di tengah bencana atau pandemi.

2.2.2.3. Angka Kematian Bayi

Angka Kematian Bayi (AKB) atau *Infant Mortality Rate (IMR)* didefinisikan sebagai jumlah kematian bayi yang terjadi sebelum mencapai usia satu tahun, dihitung per 1.000 Kelahiran Hidup (KH) dalam periode waktu tertentu. Indikator ini merupakan cerminan paling sensitif terhadap status kesehatan masyarakat secara keseluruhan, serta kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak di suatu wilayah.

Kematian bayi seringkali dikelompokkan menjadi kematian *neonatal* (0–28 hari, umumnya terkait masalah persalinan, BBLR, dan asfiksia) dan kematian *post-neonatal* (29 hari–1 tahun, lebih terkait gizi buruk, infeksi, dan kondisi lingkungan). Oleh karena itu, capaian AKB yang rendah mengindikasikan bahwa suatu daerah telah berhasil dalam menjaga kesehatan ibu selama kehamilan dan persalinan, serta menyediakan lingkungan dan perawatan yang memadai bagi bayi pasca-persalinan.

Tabel 2.71. Angka Kematian Bayi Kabupaten Barito Utara Tahun 2020-2024

Tahun	Jumlah Kematian Bayi	AKB (per 1.000 KH)	Target Nasional (per 1.000 KH)
2020	14	6,1	20,0
2021	22	8,9	19,3
2022	21	10,1	18,7
2023	30	15	17,6
2024	25	11	16

Keterangan: Perhitungan AKB di atas disesuaikan menggunakan rumus standar (Jumlah Kematian Bayi/Jumlah Kelahiran Hidup) * 1000.

Sumber: Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Utara dan LKIP Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Utara Tahun 2024.

AKB per 1.000 KH di Kabupaten Barito Utara dari tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan dinamika yang berlawanan dengan target peningkatan kesehatan ibu dan anak. Periode ini diawali dengan capaian yang sangat baik pada tahun 2020, dimana AKB berada pada angka terendah 6,1. Capaian tersebut jauh melampaui target nasional (20,0). Kinerja ini mengindikasikan adanya efektivitas program dan layanan *neonatal* pada awal periode.

Namun, sejak tahun 2020 AKB mengalami tren peningkatan yang signifikan dan mengkhawatirkan secara bertahap setiap tahunnya. Dari 6,1 pada tahun 2020, AKB naik menjadi 8,9 (2021), 10,1 (2022), dan mencapai puncaknya 15,0 pada tahun 2023 (dengan 30 kasus kematian bayi). Meskipun terjadi penurunan menjadi 11,0 pada tahun 2024, angka ini masih 2 kali lipat lebih tinggi dari capaian terbaik pada tahun 2020.

Berdasarkan laporan program kesehatan ibu dan anak, jumlah kematian bayi di Kabupaten Barito Utara pada tahun 2024 terdapat sebanyak 25 kasus kematian dari 2.235 KH, sehingga AKB Kabupaten Barito Utara pada tahun 2024 sebesar 11/1000 KH. Bila dibandingkan dengan tahun 2023, jumlah kematian bayi 30 kasus dari 2.062 KH atau sebesar 15/1000 KH, maka kematian bayi di Kabupaten Barito Utara mengalami penurunan. Namun, bila dibandingkan dengan target Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Barito Utara Tahun 2024 yaitu maksimal sebesar 15,2/1000, maka capaian AKB Kabupaten Barito Utara sudah memenuhi target tersebut (capaian berada di bawah angka maksimal yang ditetapkan). Adapun AKB tersebut bila dibandingkan dengan target nasional untuk AKB tahun 2024 sebesar 16/1000 KH, maka AKB di Kabupaten Barito Utara tahun 2024 sudah memenuhi target nasional tersebut (dibawah angka maksimal yang ditetapkan).

Penyebab kasus kematian bayi yang terjadi selama tahun 2024 di Kabupaten Barito Utara yang diantaranya adalah sepsis sebanyak 8 kasus, asfiksia sebanyak 4 kasus, dan gangguan pertumbuhan janin sebanyak 4 kasus. Upaya yang dilakukan untuk menurunkan angka kematian bayi ini antara lain dimulai dengan memberikan pelayanan pada ibu hamil dan bayi sesuai standar, meningkatkan upaya promosi kesehatan dan program yang mendukung kehamilan sehat diantaranya kelas ibu hamil sebagai wadah konseling dan edukasi dalam rangka menjaga kesehatan ibu hamil.

Promosi dan edukasi kesehatan berupa Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), pemeriksaan kehamilan secara berkala, peningkatan keterampilan bidan dalam penanganan bayi baru lahir serta peningkatan fasilitas kesehatan khususnya dalam hal kelengkapan peralatan untuk pertolongan persalinan dan bayi baru lahir. Penyediaan tenaga kesehatan di setiap desa, khususnya tenaga bidan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pemberian pelayanan kesehatan bayi dalam rangka akses pelayanan kesehatan.

Meskipun secara numerik AKB Kabupaten Barito Utara masih berada di bawah target nasional yang semakin ketat (dari 20,0 menjadi 16,0), peningkatan risiko kematian bayi yang drastis ini merupakan indikasi kuat adanya pelemahan dalam sistem pelayanan *neonatal* dan *perinatal*. Kenaikan AKB ini menunjukkan adanya tantangan serius terkait: (1) kualitas perawatan esensial bayi baru lahir; (2) kesiapan fasilitas dan tenaga kesehatan dalam menangani komplikasi *neonatal*; serta (3) faktor-faktor risiko di masyarakat seperti gizi dan sanitasi. Oleh karena itu, RPJMD 2025-2029 harus memprioritaskan intervensi untuk mengembalikan AKB ke tren penurunan dengan fokus utama pada penguatan layanan kesehatan pada masa persalinan dan perawatan bayi, demi mencapai standar kesehatan yang lebih tinggi dan stabil.

Urgensi AKB dalam penentuan kebijakan pembangunan, termasuk dalam penyusunan RPJMD, sangat fundamental karena merupakan salah satu komponen inti dari IPM dan target utama *Sustainable Development Goals* (SDGs), khususnya pada “tujuan 3 tentang kehidupan sehat dan sejahtera”. Nilai AKB yang tinggi atau fluktuatif menunjukkan adanya *disparitas* akses dan kualitas pelayanan yang mendesak. Dalam konteks kebijakan, AKB menjadi dasar bagi pemerintah pusat dan daerah untuk memprioritaskan alokasi anggaran dan program intervensi spesifik seperti penguatan layanan kesehatan primer (Puskesmas), peningkatan cakupan imunisasi, perbaikan gizi, serta pencegahan dan penanggulangan *stunting*.

Keberhasilan dalam menekan AKB secara konsisten merupakan bukti nyata keberhasilan implementasi kebijakan kesehatan yang berorientasi pada perlindungan dan peningkatan kualitas hidup sejak dini, yang pada akhirnya akan berkontribusi signifikan terhadap peningkatan AHH masyarakat secara berkelanjutan.

2.2.2.4. Prevalensi Stunting dan Permasalahan Gizi Lainnya

Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis, terutama dalam periode 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK)—sejak janin hingga anak berusia dua tahun. Secara teoritis, *stunting* bukan hanya masalah fisik (tinggi badan), tetapi merupakan kerugian modal sumber daya manusia (SDM) jangka panjang karena dapat menyebabkan gangguan perkembangan otak, penurunan kemampuan kognitif, dan risiko penyakit tidak menular (PTM) yang lebih tinggi di masa dewasa. Oleh karena itu, *stunting* adalah indikator yang sangat krusial dalam pembangunan manusia dan penentuan daya saing daerah di masa depan.

Tabel 2.72. Prevalensi Stunting Kabupaten Barito Utara Tahun 2020-2024

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Capaian Prevalensi Stunting (%)	26,57	28,30	19,80	15,30	16,21*

Keterangan: *target.

Sumber: Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Utara Tahun 2024 dan dih.baritoutarakab.go.id.

Kondisi gizi anak di Kabupaten Barito Utara yang diukur melalui indikator prevalensi *stunting* menunjukkan adanya dinamika yang signifikan dalam periode 2020 hingga 2023, diikuti dengan penetapan target penurunan yang ambisius untuk 2024. Data ini menjadi cerminan penting keberhasilan intervensi kesehatan dan nutrisi, sekaligus menjadi dasar perencanaan RPJMD 2025–2029.

Periode ini diawali dengan peningkatan risiko. Prevalensi *stunting* tercatat 26,57% pada tahun 2020, yang kemudian meningkat hingga mencapai puncaknya di 28,30% pada tahun 2021. Angka yang tinggi ini mengindikasikan bahwa lebih dari seperempat balita di Kabupaten Barito Utara mengalami kekurangan gizi kronis, sebuah kondisi yang memerlukan penanganan mendesak.

Namun, sejak tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Barito Utara menunjukkan keberhasilan luar biasa dalam upaya percepatan penurunan *stunting*. Melalui program konvergensi dan intervensi lintas sektor yang intensif, prevalensi *stunting* berhasil diturunkan

secara drastis dalam 2 tahun berturut-turut yaitu penurunan dari 28,30% (2021) menjadi 19,80% pada tahun 2022, dan lebih lanjut menjadi 15,30% pada tahun 2023.

Penurunan total sebesar 13,00% dari puncak tahun 2021 ke tahun 2023 adalah pencapaian yang sangat positif dan patut diapresiasi, hal ini menandakan bahwa strategi intervensi spesifik (kesehatan) dan sensitif (lingkungan, pangan) telah berjalan efektif. Capaian 15,30% pada tahun 2023 ini menempatkan Kabupaten Barito Utara sangat dekat dengan target nasional (yang diharapkan mencapai 14% pada tahun 2024).

Pada tahun 2024, Kabupaten Barito Utara menetapkan target prevalensi sebesar 16,21%. Menariknya, capaian tahun 2023 (15,30%) telah melampaui target yang ditetapkan untuk tahun 2024. Walaupun demikian, tantangan utama dalam RPJMD 2025-2029 adalah mempertahankan momentum penurunan yang sulit ini dan mendorong angka *stunting* terus ke bawah ambang batas WHO (<20%), dengan tujuan akhir mencapai angka di bawah 10%. Ini menuntut penguatan program di hulu, seperti perbaikan sanitasi, ketahanan pangan keluarga, dan edukasi gizi bagi remaja putri serta calon pengantin, guna memastikan intervensi yang berkelanjutan dan berbasis pencegahan. Hal ini menjadikan isu *stunting* sebagai isu strategis daerah (Misi 1: Kehidupan Sehat dan Sejahtera) dengan urgensi tertinggi yang wajib menjadi program *breakthrough* dalam RPJMD Kabupaten Barito Utara.

2.2.2.5. Penyakit Menular AID, TBC, dan Malaria

Penyakit Menular (PM) seperti HIV/AIDS, tuberkulosis (TB), dan malaria dikategorikan sebagai "tiga besar" (*Triple Burden*) yang menjadi fokus global dan nasional. HIV/AIDS yang menyerang sistem kekebalan tubuh, tidak hanya menyebabkan penderitaan fisik tetapi juga memiliki dimensi sosial-ekonomi yang mendalam, meliputi stigma, diskriminasi, dan hilangnya produktivitas usia kerja. Sementara itu, TB yang disebabkan oleh bakteri *Mycobacterium tuberculosis* merupakan penyakit menular yang paling mematikan secara global. TB sangat erat kaitannya dengan kemiskinan, lingkungan padat, dan sanitasi yang buruk. Penyakit malaria, meskipun dapat dicegah dan diobati, tetap menjadi ancaman serius, terutama di daerah endemik, yang dapat menyebabkan *morbidity* tinggi dan mengganggu aktivitas ekonomi.

Tabel 2.73. Temuan Kasus HIV/AIDS, TB dan Malaria

No	Jenis Penyakit	Jumlah Kasus				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	HIV/AIDS	15	7	12	17	Tidak ada data

No	Jenis Penyakit	Jumlah Kasus				
		2020	2021	2022	2023	2024
2	TB	156	89	151	274	299
3	Malaria	1	1	2	1	-

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Utara dalam Laporan Data BPS: Kabupaten Barito Utara Dalam Angka; LKIP Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Utara Tahun 2024.

Penyakit TB menjadi ancaman kesehatan menular paling serius yang dihadapi Kabupaten Barito Utara. Meskipun sempat mengalami penurunan signifikan pada tahun 2021 (89 kasus) dari tahun 2020 (156 kasus), kasus TB menunjukkan tren peningkatan yang tajam dan berkelanjutan pada tahun-tahun berikutnya. Kasus melonjak tajam menjadi 151 pada tahun 2022, meningkat menjadi 274 pada tahun 2023, dan mencapai puncaknya sebanyak 299 kasus pada tahun 2024. Kenaikan hampir dua kali lipat dalam dua tahun terakhir ini menunjukkan bahwa program penemuan kasus (*case finding*), pengobatan, dan pencegahan penularan TB belum optimal dalam mengendalikan penyebaran penyakit. Hal ini menjadikannya sebagai salah satu isu permasalahan dan isu strategis dalam RPJMD.

HIV/AIDS menunjukkan pola kasus yang sangat fluktuatif, yang sering kali mencerminkan upaya *screening* dan penemuan kasus. Kasus HIV/AIDS sempat menurun dari 15 kasus pada tahun 2020 menjadi 7 kasus pada tahun 2021, namun kembali melonjak signifikan hingga 17 kasus pada tahun 2023. Kenaikan ini dapat disebabkan oleh peningkatan *testing* dan *tracking*, namun juga mengindikasikan bahwa upaya pencegahan, terutama pada kelompok berisiko perlu ditingkatkan untuk mengendalikan *transmisi* baru di masyarakat. Data tahun 2024 yang kosong memerlukan pemantauan intensif pada tahun berikutnya untuk memastikan bahwa kasus tidak terus meningkat.

Sementara itu, kasus malaria di Kabupaten Barito Utara menunjukkan status yang terkendali dengan sangat baik menuju eliminasi. Dalam periode 5 tahun (2020-2024), kasus malaria berada pada angka yang sangat rendah dan stabil, yaitu berkisar antara 1 hingga 2 kasus per tahun. Stabilitas yang rendah ini mencerminkan keberhasilan program eliminasi malaria, seperti *surveillance* dan penanganan cepat, yang harus dipertahankan secara ketat untuk memastikan Kabupaten Barito Utara dapat mencapai dan mempertahankan status bebas malaria.

Secara keseluruhan, meskipun Kabupaten Barito Utara berhasil mengendalikan malaria, lonjakan kasus TB dan fluktuasi kasus HIV/AIDS menuntut perhatian serius. Program kesehatan daerah harus memfokuskan sumber daya yang besar pada penemuan kasus aktif dan tuntas pengobatan TB, serta penguatan program pencegahan dan *screening* HIV/AIDS

untuk mencegah peningkatan lebih lanjut dan melindungi kesehatan populasi secara keseluruhan.

Data penyakit menular ini memberikan landasan optimis dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Barito Utara, namun menuntut pergeseran fokus dari penanggulangan menjadi pemeliharaan dan penguatan sistem. Keberhasilan dalam pengendalian penyakit menular ini harus diabadikan dan diintegrasikan dengan isu-isu lintas sektor yang bersifat kronis, terutama yang berada di bawah isu strategis air bersih dan sanitasi layak (Misi 2).

Keseriusan dalam mengatasi permasalahan akses sanitasi yang kurang layak dan penumpukan perumahan kumuh (yang menjadi determinan sosial-lingkungan utama penularan TB) akan menjadi kunci dalam menjaga dan meningkatkan keberhasilan kesehatan yang telah dicapai, sekaligus memitigasi risiko kesehatan lain. Dengan demikian, RPJMD harus merumuskan kebijakan yang secara eksplisit mengaitkan investasi infrastruktur (OPD PUPR) dengan indikator kinerja kesehatan (Dinkes) untuk mencapai hasil pembangunan manusia yang holistik dan berkelanjutan.

2.2.2.6. Penyakit Tidak Menular Prioritas (Hipertensi, Diabetes Mellitus) dan Kesehatan Jiwa

Penyakit Tidak Menular (PTM) khususnya hipertensi (tekanan darah tinggi) dan *Diabetes mellitus* (DM), kini menjadi beban ganda (*double burden*) terbesar bagi sistem kesehatan di Indonesia, bahkan melampaui penyakit menular di banyak daerah. Hipertensi yang sering dijuluki "pembunuh senyap" (*silent killer*) merupakan faktor risiko utama penyebab penyakit jantung koroner (PJK), stroke, dan gagal ginjal. Sementara itu *diabetes mellitus* yang dicirikan dengan kadar gula darah tinggi dapat menyebabkan komplikasi jangka panjang seperti kebutaan, amputasi, dan disfungsi organ vital. Kedua penyakit ini umumnya bersifat kronis yang membutuhkan pengobatan seumur hidup. Penyebab munculnya penyakit dipicu oleh gaya hidup modern (diet tinggi garam/gula/lemak, kurang aktivitas fisik, merokok), sehingga menciptakan tantangan besar dalam hal pembiayaan kesehatan dan penurunan produktivitas usia kerja.

Seiring dengan meningkatnya AHH di Kabupaten Barito Utara, beban penyakit juga bergeser dari penyakit infeksi ke penyakit kronis PTM. Urgensi pengendalian PTM bagi pemerintah daerah tercermin dari fungsinya sebagai indikator keberhasilan pencegahan (*promotif-preventif*) dan komponen utama dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan. Pengendalian PTM, termasuk penanganan ODGJ (Orang Dengan Gangguan

Jiwa), kini menjadi target kunci *Sustainable Development Goals* (SDGs) pada tujuan 3 (hidup sehat).

Kegagalan dalam mengelola PTM akan menyebabkan tingginya pembiayaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada tingkat kuratif dan rehabilitatif, sehingga menggerus alokasi anggaran yang seharusnya dapat digunakan untuk program kesehatan preventif lainnya. Oleh karena itu, kebijakan kesehatan daerah dalam RPJMD wajib memprioritaskan deteksi dini dan pengelolaan PTM pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP).

Selain PTM fisik, penanganan ODGJ yang merupakan indikator kesehatan jiwa, juga menjadi isu strategis. ODGJ, terutama penderita *skizofrenia* dan *bipolar* membutuhkan dukungan psikososial dan pengobatan farmakologis yang berkelanjutan. Dalam konteks kebijakan daerah, penanganan ODGJ bukan hanya tanggung jawab Dinas Kesehatan, tetapi juga melibatkan Dinas Sosial, dan Pemerintah Desa. Intervensi kebijakan harus diarahkan pada pemenuhan SPM kesehatan jiwa, yaitu memastikan ODGJ mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar yang mencakup penemuan kasus, pengobatan rutin, serta penjangkauan dan pembebasan dari pemasungan yang merupakan isu kemanusiaan dan sosial-hukum yang perlu ditangani secara terpadu.

Tabel 2.74. Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi, Diabetes Mellitus, dan Orang Dengan Gangguan Jiwa di Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2022

No	Indikator	Capaian (%)				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	48,02	48,45	47	66,65	61,53
2	Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita DM	36,01	49,14	58	245,19	91,80
3	Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita ODGJ berat	118,45	100	122	43,94	76,65

Sumber: Rencana Kerja 2024 Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Utara.

Kinerja pelayanan Hipertensi (HT) di Kabupaten Barito Utara sangat rendah dan cenderung mengalami penurunan. Capaian pada tahun 2022 hanya 15,64%, yang berarti kurang dari 2 dari 10 penderita hipertensi yang terdeteksi mendapatkan pelayanan rutin sesuai standar. Kondisi ini sangat kritis karena hipertensi adalah "pembunuh senyap" yang menjadi pemicu utama stroke dan penyakit jantung.

Kinerja pelayanan *Diabetes mellitus* juga menunjukkan angka yang rendah dan fluktuatif pada kisaran 50-60%, yang jauh dari target ideal SPM (100%). Tingginya angka kasus DM yang tidak terkontrol akan mengakibatkan peningkatan signifikan dalam kasus komplikasi

(gagal ginjal, amputasi, kebutaan) di rumah sakit daerah yang secara langsung akan membebani anggaran JKN Kabupaten Barito Utara di masa depan.

Rendahnya angka capaian cakupan pelayanan ini menunjukkan bahwa strategi deteksi dini dan pengelolaan PTM seperti melalui Posbindu PTM dan *screening* di Puskesmas belum optimal dalam menjangkau populasi berisiko. Hal ini diperparah oleh tantangan geografis Kabupaten Barito Utara dan masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pemeriksaan rutin. Dalam kerangka RPJMD, rendahnya capaian ini merupakan indikasi bahwa misi "kehidupan sehat dan sejahtera" terancam oleh lonjakan beban PTM. Kebijakan harus bergeser dari fokus kuratif di rumah sakit menjadi *promotif-preventif* aktif di masyarakat.

Capaian pelayanan ODGJ berat yang mendapat pelayanan sesuai standar mencapai 100% pada tahun 2022, meningkat konsisten dari tahun sebelumnya. Kinerja ini sangat luar biasa dan menunjukkan komitmen tinggi Pemerintah Kabupaten Barito Utara dalam menjamin hak-hak kesehatan jiwa masyarakat. Cakupan pelayanan kesehatan sebesar 100% terhadap ODGJ, mengindikasikan bahwa semua ODGJ berat yang teridentifikasi telah mendapatkan pengobatan rutin. Hal ini secara tidak langsung mengindikasikan keberhasilan program *Bebas Pasung* dan penguatan layanan kesehatan jiwa di Puskesmas.

Keberhasilan dalam pelayanan kesehatan terhadap ODGJ ini harus dijadikan model (*best practice*) untuk program PTM lainnya. Dalam RPJMD, fokus pada ODGJ harus beralih ke pemeliharaan kualitas layanan dan integrasi sosial. Kebijakan harus didukung oleh Dinas Sosial, dan Pemerintah Desa untuk menghilangkan stigma, menyediakan dukungan psikososial, dan memfasilitasi rehabilitasi ODGJ yang telah stabil agar kembali produktif, sehingga dapat selaras dengan misi peningkatan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan orang terlanter.

a. Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi

Penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dengan sasaran penduduk:

- Usia 15 Tahun ke atas,
- Penderita hipertensi esensial atau hipertensi tanpa komplikasi memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar; dan upaya promosi kesehatan melalui modifikasi gaya hidup di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP).

- Penderita hipertensi dengan komplikasi (jantung, stroke dan penyakit ginjal kronis, diabetes melitus) perlu dirujuk ke Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut (FKTL) yang mempunyai kompetensi untuk penanganan komplikasi.

Standar pelayanan kesehatan penderita hipertensi adalah pelayanan kesehatan sesuai standar diberikan kepada penderita hipertensi di FKTP. Pelayanan kesehatan hipertensi sesuai standar meliputi: pemeriksaan dan monitoring tekanan darah, edukasi, pengaturan diet seimbang, aktivitas fisik, dan pengelolaan farmakologis dan pelayanan kesehatan berstandar ini dilakukan untuk mempertahankan tekanan darah pada cakupan pelayanan penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar didapat dari persentase jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar di Kabupaten Barito Utara dalam kurun waktu 1 tahun dibagi jumlah estimasi penderita hipertensi berdasarkan angka prevalensi kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun pada tahun yang sama.

Kabupaten Barito Utara menurut laporan pelaksanaan program PTM Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Utara pada tahun 2024 telah dilaksanakan pelayanan kesehatan sesuai standar pada masyarakat yang mempunyai penyakit hipertensi. sebanyak 24.087 dari target tahun 2024 sebanyak 47.620. Bila dibandingkan dengan capaian kinerja pada tahun 2023 yaitu 20.803 dari target 36.813. Maka jumlah pelayanan kesehatan pada penderita hipertensi tahun 2024 mengalami penurunan, dengan target yang meningkat dari tahun 2023 sedangkan dalam melakukan pelayanan kinerja meningkat pada tahun 2024. Kalau dibandingkan dengan standar nasional yaitu pencapaian SPM pada pelayanan hipertensi adalah 100%, maka Tahun 2024 bisa dikatakan melebihi dari target nasional. Realisasi kinerja pelayanan kesehatan pada hipertensi tahun 2023 dan tahun 2024 dapat disajikan pada Gambar 2.27.



Gambar 2.27. Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi.

Sumber: LKIP Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Utara Tahun 2024.

b. Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus (DM)

Penderita diabetes melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar adalah:

- Sasaran indikator ini adalah penyandang DM di wilayah kerja kabupaten/kota.
- Penduduk yang ditemukan menderita DM atau penyandang DM memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar dan upaya promotif dan preventif di FKTP.
- Penduduk yang ditemukan menderita DM atau penyandang DM dengan komplikasi perlu dirujuk ke fasilitas kesehatan rujukan untuk penanganan selanjutnya.
- Pelayanan kesehatan penyandang DM diberikan sesuai kewenangannya oleh Dokter, Perawat dan Nutrisionis/Tenaga Gizi.
- Pelayanan kesehatan diberikan kepada penyandang DM di FKTP sesuai standar meliputi 4 (empat) pilar penatalaksanaan yaitu; edukasi, aktivitas fisik, terapi nutrisi medis dan intervensi farmakologis
- Setiap penyandang DM yang mendapatkan pelayanan sesuai standar termasuk pemeriksaan HbA1C.
- Bagi penyandang DM yang belum menjadi peserta JKN diwajibkan menjadi peserta JKN.

Pelayanan kesehatan sesuai standar bagi penyandang DM dinilai dari persentase penyandang DM yang mendapatkan pelayanan sesuai standar di wilayah kerjanya

dalam kurun waktu 1 tahun dibagi jumlah penyandang DM berdasarkan angka prevalensi DM nasional di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun pada tahun yang sama.



Gambar 2.28. Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus.

Sumber: LKIP Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Utara Tahun 2024.

Kabupaten Barito Utara menurut laporan pelaksanaan program PTM Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Utara. Seperti dilihat dari Gambar 2.28 di atas telah dilaksanakan pelayanan pada masyarakat dengan penyandang DM yang mendapatkan pelayanan sesuai standar sebanyak 2.097 dari target 1.476 pada tahun 2024. Bila dibandingkan dengan capaian kinerja pada tahun 2023 yaitu 1.987 dari target 1.897. Maka jumlah pelayanan kesehatan pada penyandang DM tahun 2024 mengalami peningkatan, baik dari target yang menurun dari pada target Tahun 2023, sedangkan dalam melakukan pelayanan kinerja meningkat dari 105% pada tahun 2023 menjadi 142% pada tahun 2024 dan mencapai lebih dari target SPM 100%.

c. Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat

Pelayanan kesehatan jiwa pada ODGJ berat sebagai berikut:

- Pelayanan promotif preventif yang bertujuan meningkatkan kesehatan jiwa ODGJ berat (psikotik) dan mencegah terjadinya kekambuhan dan pemasangan.
- Pelayanan kesehatan jiwa pada ODGJ berat diberikan oleh perawat dan dokter Puskesmas di wilayah kerjanya.

- Pelayanan kesehatan jiwa pada ODGJ berat meliputi: edukasi dan evaluasi tentang tanda dan gejala gangguan jiwa, kepatuhan minum obat dan informasi lain terkait obat, mencegah tindakan pemasungan, kebersihan diri, sosialisasi, kegiatan rumah tangga dan aktivitas bekerja sederhana, dan/atau tindakan kebersihan diri ODGJ berat.
- Dalam melakukan pelayanan promotif preventif diperlukan penyediaan materi KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi) dan buku kerja sederhana. Persentase ODGJ berat yang mendapat pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar dinilai dengan jumlah ODGJ berat (psikotik) di wilayah kerjanya yang mendapat pelayanan kesehatan jiwa promotif preventif sesuai standar dalam kurun waktu 1 tahun dibagi jumlah ODGJ berat (psikotik) di wilayah kerja Kabupaten/Kota dalam kurun waktu 1 tahun yang sama.



Gambar 2.29. Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita ODGJ Berat.

Sumber: LKIP Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Utara Tahun 2024.

Kabupaten Barito Utara menurut laporan pelaksanaan program PTM dan Kesehatan Jiwa Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Utara pada tahun 2024. Dapat dilihat dari Gambar 2.29 yang bersumber dari rekapitulasi laporan bulanan Puskesmas yang telah dilaksanakan pelayanan pada masyarakat dengan kesehatan pada ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan sesuai standar. sebanyak 204 capaian dari target 244 pada tahun 2024. Bila dibandingkan dengan capaian kinerja pada tahun 2023 yaitu 198 (100%) dari target 198. Maka jumlah pelayanan kesehatan pada ODGJ tahun 2024

mengalami penurunan karena jumlah target yang meningkat dibandingkan tahun 2023 dan tetap kita melayani sesuai standar.

Fasilitas kesehatan yang ada di Kabupaten Barito Utara per tahun 2024 yaitu: 1 unit rumah sakit umum daerah berlokasi di Kecamatan Teweh Tengah, 6 unit poliklinik tersebar pada 5 dari 9 kecamatan. 18 unit puskesmas tersebar di seluruh kecamatan (9 kecamatan), 80 unit Puskesmas Pembantu, dan 6 unit apotek.

Jumlah tenaga kesehatan menurut kecamatan di Kabupaten Barito Utara sebanyak 42 orang dokter, 299 orang perawat, 268 orang perawat dan 39 orang tenaga kefarmasian, 32 orang tenaga kesehatan masyarakat, 19 orang tenaga kesehatan lingkungan, 34 orang tenaga gizi, 13 orang tenaga keteknisan medis, dan 20 orang tenaga teknik biomedik.

Permasalahan struktural utama di Kabupaten Barito Utara adalah kualitas dan pemerataan layanan yang belum optimal dan menyeluruh, serta kuantitas SDM kesehatan, khususnya dokter spesialis, yang masih berada di bawah standar ideal untuk melayani fasilitas yang tersebar. Sejalan dengan isu strategis Provinsi Kalimantan Tengah yang memprioritaskan peningkatan kualitas layanan kesehatan, Kabupaten Barito Utara harus fokus pada permasalahan kunci terkait kualitas dan pemerataan layanan yang belum optimal (terutama untuk mencapai standar nasional) dan kuantitas/sebaran SDM kesehatan yang masih berada di bawah standar ideal.

Beberapa hal yang menjadi fokus utama Kabupaten Barito Utara diarahkan pada pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang terukur dan relevan:

- a. Penguatan preventif dan KIA (Kesehatan Ibu dan Anak): upaya promotif dan preventif menjadi sangat penting untuk menekan masalah gizi. Kabupaten Barito Utara memiliki target penurunan *prevalensi stunting* yang signifikan, yaitu mencapai 14,0% pada tahun 2026, yang sejalan dengan target nasional. Selain itu, Rencana Strategis Dinas Kesehatan memprioritaskan penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dari 75 per 100.000 Kelahiran Hidup (target 2024) menjadi 60 per 100.000 Kelahiran Hidup pada tahun 2026. Target lain yang mendesak adalah penurunan Prevalensi Balita Kurus (*underweight*) hingga 8,0% pada tahun 2026. Seluruh upaya ini merupakan tantangan utama dalam peningkatan Indeks Keluarga Sehat (IKS), yang ditargetkan mencapai 0,81 pada tahun 2026.
- b. Peningkatan kualitas dan pemerataan layanan: untuk mengatasi *disparitas* layanan, Kabupaten Barito Utara wajib melakukan pemerataan fasilitas dan peningkatan

kualitas layanan rumah sakit dan Puskesmas Pembantu (Pustu) di wilayah terpencil. Upaya ini didukung dengan target 100% Puskesmas terakreditasi pada tahun 2026.

- c. Peningkatan SDM spesialis: merinci program peningkatan kuantitas tenaga kesehatan, terutama dokter spesialis, untuk melayani fasilitas yang ada dan untuk menjamin tercapainya standar kualitas layanan, serta memastikan distribusi tenaga kesehatan merata hingga ke daerah terpencil.

Dengan fokus pada IKU yang terukur, Kabupaten Barito Utara berupaya mewujudkan kesehatan untuk semua pada seluruh siklus hidup, dari 1000 HPK hingga usia lanjut.

2.2.3. Pendidikan Berkualitas yang Merata

Indikator yang menyusun dimensi pengetahuan adalah rata-rata lama sekolah (RLS) dan harapan lama sekolah (HLS). RLS adalah jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. RLS ini digunakan untuk mengetahui kualitas pendidikan masyarakat dalam suatu wilayah.

Batasan lama sekolah untuk tiap jenjang adalah penduduk yang tamat SD diperhitungkan sekolah selama 6 tahun, tamat SMP diperhitungkan selama 9 tahun, dan tamat SMA diperhitungkan selama 12 tahun. Lama sekolah tersebut tidak memperhitungkan apakah penduduk pernah tinggal kelas atau tidak. UNDP menentukan nilai minimum untuk RLS adalah 0 (nol) tahun dan nilai tertinggi adalah 15 (lima belas) tahun.

HLS merupakan lama sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Perhitungan HLS dikhususkan untuk penduduk usia 7 tahun ke atas. Indikator ini digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan berbasis jenjang. UNDP menentukan nilai minimum untuk HLS adalah 0 (nol) tahun dan nilai maksimum 18 (delapan belas) tahun.

Dimensi pengetahuan untuk mendukung pengukuran pembangunan manusia menggunakan indikator RLS dan HLS. Pembangunan sektor pendidikan di Kabupaten Barito Utara berperan sentral dalam peningkatan kualitas hidup dan menjadi kunci untuk mengoptimalkan bonus demografi yang dimiliki daerah. Kabupaten Barito Utara memiliki proporsi usia produktif yang sangat besar, mencapai 71,46% atau setara dengan 114.502 jiwa pada tahun 2022. Proporsi ini merupakan modal pembangunan yang harus dikelola secara strategis.

Secara umum, capaian kinerja pendidikan menunjukkan hasil yang positif. Kinerja bidang pendidikan di Kabupaten Barito Utara diukur melalui beberapa indikator utama yang menunjukkan kemajuan, namun tetap memerlukan penajaman fokus untuk menjamin pemerataan kualitas.

Tabel 2.75. Capaian Indikator dalam Aspek Pendidikan di Kabupaten Barito Utara Tahun 2020-2024

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Capaian Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
I	Indikator Pendidikan (Umum)						
1	Angka Melek Huruf	%	99,6	99,44	99,53	99,36	98,8
2	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	8,71	8,85	8,9	8,91	8,91
3	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	12,5	12,50	12,53	12,54	12,6
II	Akses & Partisipasi						
4	APK (SD/MI/Paket A)	%	103	107,7	107,9	106,6	111
5	APM (SD/MI/Paket A)	%	94,6	99,12	99,94	99,38	99,4
6	APK (SLTP/MTS/Paket B)	%	100	95,18	100,9	89,63	91,4
7	APM (SLTP/MTS/Paket B)	%	84,7	84,33	83,86	82,29	83,9
8	APK (SMA/MA/Paket C)	%	77,9	77,86	79,22	87,41	83,4
9	APM (SMA/MA/Paket C)	%	63,2	63,18	63,18	62,12	63,3
III	Kualitas & Lulusan						
10	Angka Kelulusan SD/MI	%	98,6	98,7	96,85	100	100
11	Angka Kelulusan SMP/MTs	%	98,5	97,51	97,71	100	100
IV	Kualitas Pendidik & Rasio						
12	Guru yang bersertifikat	%	40,1	38	34,55	61,25	84,3
13	Rasio Guru Murid (SD/MI)	Rasio	0,11	0,11	0,12	1,96	1,96
14	Rasio Guru Murid (SMP/MTs)	Rasio	0,13	0,15	0,1	0,47	0,47

Sumber: Rencana Kerja OPD terkait, LPPD Kabupaten Barito Utara Tahun 2021-2024 dan Data BPS Kabupaten Barito Utara Dalam Angka Tahun 2021-2025.

Data capaian indikator pendidikan di Kabupaten Barito Utara selama periode 2020 hingga 2024 secara umum mencerminkan kemajuan yang positif dan terarah, terutama dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dasar dan profesionalisme tenaga pendidik.

Kedua indikator penyusun dimensi pengetahuan yaitu RLS dan HLS ini sama-sama mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Terlihat adanya peningkatan yang konsisten pada RLS, yang berhasil naik dari 8,71 tahun menjadi 8,91 tahun, menunjukkan bahwa rata-rata penduduk daerah ini kini telah menyelesaikan pendidikan setara Sekolah Menengah Pertama (SMP).

HLS di Kabupaten Barito Utara menunjukkan tren peningkatan yang konsisten, namun dengan laju yang sangat lambat. Data HLS yang berkisar antara 12,49 tahun hingga 12,55 tahun (rentang 5 tahun terakhir) mengindikasikan bahwa secara rata-rata, anak-anak usia 7 tahun di Kabupaten Barito Utara memiliki harapan untuk menamatkan pendidikan hingga mendekati tahun pertama jenjang perguruan tinggi atau sedikit melampaui Sekolah Menengah Atas (SMA)/ sederajat.

Angka yang stabil di atas 12 tahun ini adalah capaian positif yang mencerminkan komitmen terhadap wajib belajar 12 tahun. Namun, kenaikan hanya sebesar 0,06 tahun dalam periode tersebut (dari 12,49 menjadi 12,55) menunjukkan adanya hambatan signifikan dalam mendorong siswa untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau mempertahankan mereka tetap berada di bangku sekolah sesuai harapan ideal. Lambatnya peningkatan HLS ini menjadi isu strategis dalam dimensi pendidikan, yang perlu dijawab melalui kebijakan dan program yang lebih agresif pada periode pembangunan 2025-2029. Fokus kebijakan harus diarahkan pada peningkatan akses dan kualitas pendidikan pasca-SMA, serta mengurangi angka putus sekolah pada jenjang transisi.

Angka Melek Huruf (AMH) Kabupaten Barito Utara selama periode 2020 hingga 2024 menunjukkan pencapaian mutu dasar yang sangat optimal dan stabil, dengan nilai yang secara konsisten berada di atas 98,77%, bahkan mencapai puncaknya di 99,58% pada tahun 2020. Tingginya angka ini mengonfirmasi keberhasilan program keaksaraan dan wajib belajar, yang secara efektif telah mengatasi masalah buta huruf secara struktural, sehingga hampir seluruh penduduk usia produktif di daerah ini mampu membaca dan menulis. Fluktuasi tipis yang terjadi antar tahun, seperti penurunan ke 98,77% pada 2024, dianggap sebagai pergerakan statistik yang wajar dan bukan indikasi adanya kegagalan program. Ke depan adalah mengalihkan fokus dan sumber daya yang signifikan dari upaya pemberantasan buta huruf masif ke upaya mempertahankan capaian ini, serta memprioritaskan peningkatan kualitas dan akses pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi yang masih memiliki kesenjangan, khususnya di tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA).

Indikator APK dan APM memberikan gambaran dualitas mengenai akses pendidikan di Kabupaten Barito Utara: Akses Dasar sudah sangat terpenuhi, sementara tantangan terbesar ada pada jenjang Menengah Atas.

a. Jenjang Dasar (SD/MI/Paket A)

APM SD/MI yang mencapai 99,38% (2024) adalah bukti bahwa hampir semua anak pada usia sekolah dasar yang seharusnya sekolah telah terdaftar di sekolah. Ini mencerminkan keberhasilan program wajib belajar 9 tahun tahap awal. APK SD/MI yang berada di atas 100% (bahkan mencapai 111,2% pada 2024) menunjukkan bahwa daya tampung sekolah sangat memadai, dan sistem pendidikan mampu menampung siswa yang usianya di luar rentang usia resmi (misalnya, siswa yang terlambat atau mengulang), tanpa menyebabkan *over-crowding*.

b. Jenjang Menengah Pertama (SLTP/MTs/Paket B)

APM SLTP/MTs stabil pada kisaran 82% hingga 84%, hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar anak usia SMP telah melanjutkan sekolah. Namun, angka ini mengisyaratkan masih adanya sekitar 16-18% anak usia SMP yang tidak bersekolah, ini akan menjadi fokus intervensi agar cakupan wajib belajar 9 tahun dapat mencapai 100%.

c. Jenjang Menengah Atas (SMA/MA/Paket C)

APM SMA/MA menunjukkan nilai yang stagnan dan terendah, berkisar antara 62% hingga 63,25%. Ini berarti hampir 37% dari anak usia 16-18 tahun tidak bersekolah di tingkat SMA. Stagnasi ini mengindikasikan bahwa faktor-faktor non-akses (seperti biaya, jarak, motivasi untuk bekerja, atau ketersediaan lapangan kerja) menjadi penghalang utama setelah wajib belajar 9 tahun selesai. Program pembangunan RPJMD harus secara spesifik menargetkan peningkatan APM di jenjang SMA untuk meningkatkan daya saing SDM daerah, misalnya melalui perluasan beasiswa, program sekolah terbuka, atau sekolah kejuruan yang relevan dengan potensi lokal.

Oleh karena itu, pendidikan berkualitas yang merata di Kabupaten Barito Utara harus difokuskan pada:

a. Mendorong Vokasi yang Relevan dengan Klaster Muara Teweh

Pendidikan di Kabupaten Barito Utara harus secara eksplisit selaras dengan kebutuhan Klaster Muara Teweh Provinsi Kalimantan Tengah, yaitu sektor hilirisasi komoditas (pertambangan dan kehutanan) dan pengembangan pusat logistik daerah. Oleh karena itu, kurikulum vokasi dan program pelatihan kerja wajib diarahkan untuk menghasilkan SDM yang siap bekerja di sektor-sektor tersebut agar lulusan memiliki daya saing regional.

b. Pemerataan Kualitas Guru dan Mutu Institusi

Peningkatan mutu harus dilakukan sejak dini (PAUD). Peningkatan rasio pendidik PAUD berkualifikasi D-IV/S1 dan proporsi akreditasi PAUD B merupakan indikator penting yang harus diprioritaskan untuk menjamin fondasi pendidikan anak usia dini yang kuat. Selain itu, pemerataan akses kualitas guru dan sarana prasarana, khususnya di wilayah pedalaman, harus dijamin untuk mencapai kesetaraan hasil belajar.

c. Penguatan Literasi dan Kompetensi Guru

Melakukan pemerataan akses kualitas guru dan mendorong peningkatan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM), serta kemampuan literasi digital melalui program-program inovatif, termasuk inisiasi gerakan literasi desa yang dicanangkan pemerintah kabupaten.

Integrasi data ini memperjelas bahwa pendidikan di Kabupaten Barito Utara tidak hanya berfokus pada capaian kuantitatif (HLS tinggi) tetapi juga kualitatif (mutu PAUD, kompetensi SDM), yang terarah untuk mendukung kebutuhan ekonomi kewilayahan Provinsi Kalimantan Tengah.

2.2.4. Perlindungan Sosial yang Adaptif

Perlindungan sosial merupakan kunci untuk membangun masyarakat yang lebih tangguh dan inklusif di Kabupaten Barito Utara, memastikan setiap penduduk memiliki kesempatan yang sama untuk hidup lebih baik. Kondisi ekonomi makro Kabupaten Barito Utara menunjukkan tingkat kesejahteraan yang relatif stabil dan baik. Hal ini tercermin dari tingkat kemiskinan yang sangat rendah, yaitu 1,99% pada tahun 2022, dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 6,90 ribu jiwa. Dengan capaian penanggulangan kemiskinan umum yang sangat baik ini, fokus perlindungan sosial di Kabupaten Barito Utara harus bergeser menjadi lebih adaptif, inklusif, dan terarah, sejalan dengan isu strategis Provinsi Kalimantan Tengah mengenai perlunya peningkatan kesejahteraan sosial. Salah satunya ialah indikator mengenai Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yaitu seseorang atau keluarga yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, dan karenanya tidak dapat menjalin hubungan yang serasi dan kreatif dengan lingkungannya sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani dan sosial) secara memadai dan wajar.

PMKS di Kabupaten Barito Utara cukup besar jumlahnya dan hampir terdapat di segala jenjang kehidupan masyarakat. Fokus yang dilakukan pemerintah bersama Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) melalui upaya penanganan dan pembinaan khususnya bagi masyarakat yang tergolong miskin agar lebih mandiri dan memiliki usaha sendiri.

Tabel 2.76. Penyanggah Masalah Kesejahteraan Sosial Mandiri Kabupaten Barito Utara Tahun 2023

No	PMKS Mandiri	Jumlah
1	Asistensi Sosial Lanjut Usia Terlantar (Aslut)	189
2	Orang dengan Kecacatan/Penyanggah Cacat Fisik (Disabilitas Fisik)	11
3	PKH	229
4	PMKS/Penyandang Disabilitas Terlantar/Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis Terlantar	57
5	Psikotik (Disabilitas Mental)	12
6	BPNT	1.896
Total		2.394

Secara rinci, total PMKS yang telah diintervensi menjadi mandiri pada tahun 2023 mencapai 2.394 jiwa. Mayoritas kemandirian ini berasal dari kelompok penerima program bantuan dasar, yaitu BPNT (Bantuan Pangan Non-Tunai) sejumlah 1.896 jiwa, dan PKH (Program Keluarga Harapan) sejumlah 229 jiwa, yang menunjukkan bahwa skema perlindungan sosial berbasis *transfer*/bantuan juga efektif dipadukan dengan program graduasi atau pemberdayaan untuk mencapai kemandirian. Sementara itu, kelompok rentan khusus seperti Aslut (Asistensi Sosial Lanjut Usia Terlantar) sebanyak 189 jiwa, penyandang disabilitas fisik (11 jiwa), penyandang disabilitas mental/psikotik (12 jiwa), dan gelandangan/pengemis terlantar (57 jiwa) juga mulai disentuh dengan intervensi kemandirian. Data ini menjadi basis penting untuk menyusun program perlindungan sosial yang lebih adaptif dan spesifik sesuai jenis kerentanan (*disability inclusion*).

Tabel 2.77. Capaian Indikator Kinerja di Bidang Sosial Kabupaten Barito Utara Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja	Capaian (%) Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase PMKS Mandiri	23	24,07	24,08	25,06	22,05
2	Persentase Desa Mandiri	3,23	4,30	7,53	15,05	8,60
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	5,29	5,14	4,82	4,85	4,71
4	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	71,54	70,45	69,98	70,27	70,84

Sumber: Rencana Strategis 2024-2026 dan Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Sosial Kabupaten Barito Utara; Kabupaten Barito Utara Dalam Angka (BPS, 2025).



Data capaian kinerja ini memberikan gambaran tentang dinamika sosial, ekonomi, dan ketenagakerjaan di Kabupaten Barito Utara dari tahun 2020 hingga 2024. Secara umum, tren menunjukkan adanya peningkatan kemandirian desa yang signifikan dan perbaikan konsisten pada TPT, meskipun tantangan muncul dalam mempertahankan capaian kemandirian PMKS, dan stabilitas partisipasi angkatan kerja.

Kinerja yang paling menonjol adalah persentase desa mandiri, yang menunjukkan lonjakan luar biasa. Angka ini meningkat lebih dari 4 kali lipat dalam rentang 2020-2024, dari hanya 3,23% pada tahun 2020 menjadi puncaknya 15,05% pada tahun 2023, sebelum mengalami koreksi menjadi 8,60% pada tahun 2024. Kenaikan substansial ini mengindikasikan keberhasilan besar program pemberdayaan dan pembangunan desa yang meningkatkan infrastruktur, pelayanan dasar, dan ekonomi lokal.

Sementara itu, sektor ketenagakerjaan menunjukkan perbaikan yang stabil dan positif. TPT berhasil ditekan secara konsisten setiap tahun, menurun dari 5,29% pada awal periode (2020) menjadi 4,71% pada tahun 2024. Penurunan ini mencerminkan keberhasilan pemerintah daerah dalam menciptakan lapangan kerja atau mendukung kegiatan ekonomi yang mampu menyerap tenaga kerja, bahkan di tengah tantangan pasca-pandemi. Penurunan TPT ini didukung oleh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) yang relatif stabil pada kisaran 70-71%, hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk usia produktif tetap aktif mencari pekerjaan atau bekerja, yang menandakan optimisme terhadap prospek ekonomi lokal.

Namun, pencapaian persentase PMKS Mandiri menunjukkan fluktuasi dan menjadi catatan kritis. Angka ini sempat meningkat dari 23% pada tahun 2020 menjadi 25,06% pada tahun 2023, tetapi kemudian mengalami penurunan signifikan menjadi 22,05% pada tahun 2024. Penurunan tajam ini menandakan adanya kerentanan pada program pemberdayaan sosial, meskipun sempat berhasil mengeluarkan PMKS dari ketergantungan. Kegagalan dalam mempertahankan kemandirian mereka memerlukan evaluasi mendalam, mungkin karena kurangnya dukungan keberlanjutan atau dampak dari gejolak ekonomi makro yang sensitif terhadap kelompok rentan.

2.2.5. Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju

Pembangunan di bidang agama dan kebudayaan di Kabupaten Barito Utara berfungsi ganda yakni sebagai landasan spiritual, etika dan moral, serta modal sosial yang esensial,

sekaligus sebagai fondasi bagi tata kelola pemerintahan yang inklusif dan berkelanjutan. Upaya ini bertujuan memperkuat karakter masyarakat serta memperteguh jati diri bangsa, mendukung terciptanya pembangunan yang berorientasi pada kemaslahatan publik.

2.2.5.1. Kerukunan Umat Beragama

Kerukunan antarumat beragama merupakan modal sosial (*social capital*) utama yang harus dipertahankan dan diperkuat untuk menjamin stabilitas wilayah dan keberlanjutan pembangunan. Di Kabupaten Barito Utara, kondisi kerukunan diukur melalui Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) yang secara umum perlu dijaga pada level yang tinggi.

a. Isu utama: stabilitas dan kontrol sosial

Kerukunan yang kuat merupakan benteng utama dalam menjaga ketertiban umum. Peningkatan angka kriminalitas di Kabupaten Barito Utara yang mencapai 166 perkara pada tahun 2023 (naik dari 151 perkara pada tahun 2022), mengindikasikan adanya erosi pada norma sosial dan etika. Hal ini menuntut penguatan kembali peran agama dan nilai-nilai luhur sebagai *filter* dan pedoman perilaku masyarakat.

Kerukunan tidak hanya berarti tidak adanya konflik, tetapi juga adanya partisipasi aktif pemangku kepentingan agama dalam mendukung program pembangunan moral dan etika daerah.

b. Arah kebijakan penguatan

Arah kebijakan harus fokus pada upaya terukur, yaitu:

- Peningkatan integrasi karakter dan nilai agama dengan cara mendorong terintegrasinya pendidikan karakter dan nilai-nilai keagamaan dalam kurikulum pendidikan formal maupun kegiatan kemasyarakatan. Tujuannya untuk membangun kualitas SDM yang tidak hanya cerdas, tetapi juga memiliki integritas moral dan etika yang tinggi, sehingga dapat menekan potensi pelanggaran hukum dan sosial.
- Pemberdayaan lembaga lintas iman dengan cara mengoptimalkan peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan lembaga keagamaan lainnya sebagai mitra strategis pemerintah daerah untuk memfasilitasi dialog, memitigasi potensi konflik, serta mengkampanyekan pentingnya toleransi, inklusivitas, dan pembangunan yang maslahat.

2.2.5.2. Pembangunan Kebudayaan

Pembangunan kebudayaan di Kabupaten Barito Utara harus diarahkan pada prinsip pemajuan dan pelestarian yang terintegrasi dengan agenda keberlanjutan lingkungan Provinsi Kalimantan Tengah, mengingat Kabupaten Barito Utara berada di klaster Muara Teweh yang didominasi aktivitas sektor kehutanan dan pertambangan.

a. Isu utama: pelestarian, perlindungan hukum, dan integrasi lintas sektor

Isu utama kebudayaan mencakup:

- Lemahnya kesadaran dan perlindungan hukum: kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pelestarian cagar budaya dan kekayaan budaya lainnya, hal ini semakin diperburuk dengan kelemahan dalam aspek perlindungan hukum.
- Kelemahan SDM pelestari: keterbatasan kompetensi dan jumlah SDM yang fokus pada pelestarian dan pemajuan kebudayaan, sebagaimana tercermin dalam fokus Rencana Strategis Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Barito Utara.
- Kebudayaan sebagai aset keberlanjutan: belum terintegrasinya secara optimal kearifan lokal ke dalam agenda pembangunan ekonomi dan lingkungan.

b. Arah kebijakan pemajuan kebudayaan untuk keberlanjutan

Arah kebijakan pembangunan kebudayaan harus memandang budaya sebagai aset yang adaptif dan bernilai ekonomi tinggi untuk mencapai visi daerah yang berkelanjutan. Terdapat 3 langkah terukur yang perlu dilakukan:

- Kebudayaan untuk keberlanjutan (ekonomi hijau dan biru)
Kebijakan ini harus menjadi jembatan antara pembangunan budaya dengan agenda lingkungan Provinsi Kalimantan Tengah. Kearifan lokal masyarakat adat, terutama yang berkaitan dengan pengelolaan hutan dan air (seperti tradisi berladang, sistem perburuan, atau ritual sungai) harus diintegrasikan dalam perencanaan pengelolaan sumber daya alam dan pencegahan degradasi lingkungan. Ini sejalan dengan upaya Provinsi Kalimantan Tengah dalam memanfaatkan indeks jasa ekosistem budaya dan identitas untuk mitigasi risiko lingkungan.
- Peningkatan Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)
Peningkatan IPK merupakan indikator kunci keberhasilan pembangunan kebudayaan. Langkah-langkahnya meliputi:

- Penguatan perlindungan hukum: menetapkan peraturan daerah (Perda) atau kebijakan yang lebih tegas terkait perlindungan cagar budaya dan kekayaan budaya takbenda.
- Peningkatan kompetensi SDM pelestari: sesuai fokus Rencana Strategis Disbudparpora, investasi pada pelatihan dan sertifikasi SDM di bidang pelestarian, dokumentasi, dan promosi budaya harus diintensifkan.
- Integrasi karakter dan kebudayaan lokal untuk mendorong implementasi nilai-nilai kebudayaan lokal (misalnya nilai-nilai Dayak) ke dalam pendidikan karakter. Hal ini bertujuan untuk menghasilkan SDM yang menjunjung tinggi jati diri lokal dan berkontribusi pada pencapaian stabilitas sosial-budaya yang krusial bagi Kabupaten Barito Utara.

2.2.6. Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif

Pembangunan SDM yang berkualitas di Kabupaten Barito Utara merupakan motor penggerak utama (*prime mover*) pembangunan daerah. Fokus pada keluarga berkualitas, kesetaraan gender, dan masyarakat inklusif adalah strategi fundamental untuk meningkatkan ketangguhan individu, keluarga, dan masyarakat, serta memastikan bahwa potensi demografi, terutama usia produktif, dapat dimanfaatkan secara optimal. Sesuai dengan misi Pemerintah Daerah Barito Utara, upaya ini adalah bagian dari penguatan sumber daya manusia yang religius, berakhlak, sehat, cerdas, dan produktif, sekaligus wujud dari komitmen peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebagai kelompok rentan.

Tabel 2.78. Capaian Kinerja Indikator Terkait Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif di Kabupaten Barito Utara Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2023 (%)
1	Indeks Pembangunan Keluarga (Bangga)	65,83
2	Peningkatan <i>Contraceptive Prevalence Rate (CFR)</i>	75,70
3	Peserta KB Aktif	49,60
4	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	87,08
5	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	59,05
6	Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	54,63

Sumber: Rencana Strategis Tahun 2024-2026 dan Rencana Kerja DP2KBP3A Kabupaten Barito Utara

Pembangunan di Kabupaten Barito Utara diarahkan untuk menciptakan masyarakat yang inklusif, didukung oleh kualitas keluarga yang tangguh, serta menjunjung tinggi

kesetaraan gender. Capaian kinerja tahun 2023 menunjukkan bahwa daerah ini telah mencatatkan kemajuan signifikan pada beberapa sektor, khususnya dalam pemberdayaan gender dan program Keluarga Berencana (KB), meskipun masih diperlukan upaya ekstra untuk meningkatkan perlindungan anak dan kualitas pemuda.

2.2.6.1. Pembangunan Keluarga

Keluarga merupakan institusi pertama dan utama yang bertanggung jawab terhadap pembentukan karakter dan kualitas SDM. Pembangunan keluarga yang efektif diukur melalui Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (IPKK) yang menjadi target utama pemerintah daerah. Isu utama dalam aspek ini ialah optimalisasi fungsi keluarga dan bonus demografi. Meskipun Kabupaten Barito Utara telah memasuki fase piramida penduduk *stasioner* awal dengan tingginya jumlah penduduk usia produktif (71,46% pada tahun 2022), potensi ini bisa berubah menjadi beban jika tidak disiapkan secara optimal. Isu utamanya adalah memastikan 8 fungsi keluarga (agama, sosial budaya, cinta kasih, perlindungan, reproduksi, sosialisasi pendidikan, ekonomi, dan lingkungan) berjalan maksimal. Tantangan spesifik yang harus diatasi adalah pengendalian laju *fertilitas* menuju penduduk tumbuh seimbang dan penurunan *prevalensi stunting* yang dimulai dari fase 1000 hari pertama kehidupan.

Pembangunan keluarga di Kabupaten Barito Utara berfokus pada pembentukan keluarga yang sejahtera, sehat, dan berdaya. Capaian Indeks Pembangunan Keluarga (Bangga) pada tahun 2023 berada pada angka 65,83. Nilai ini mengindikasikan bahwa kualitas keluarga di daerah ini berada pada tingkat sedang menuju baik, namun masih membutuhkan penguatan pada aspek ketahanan ekonomi, ketahanan sosial, dan fungsi-fungsi keluarga secara optimal.

Dukungan terhadap ketahanan keluarga tercermin kuat dalam keberhasilan program KB. Peningkatan *Contraceptive Prevalence Rate* (CPR) mencapai 75,70%, menunjukkan tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi dalam perencanaan keluarga. Capaian ini dikuatkan oleh tingginya persentase peserta KB aktif (PA) yang mencapai 49,60%. Selain itu, komitmen terhadap metode yang lebih efektif terlihat dari persentase peserta KB aktif metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) yang mencapai 54,63%. Tingginya penggunaan MKJP ini mencerminkan keberhasilan edukasi dan layanan kesehatan reproduksi dalam mempromosikan metode KB yang efektif dan berkelanjutan, sehingga berdampak positif pada penurunan risiko kehamilan yang tidak direncanakan dan pada kesehatan ibu serta anak.

2.2.6.2. Perlindungan Anak

Perlindungan anak di Kabupaten Barito Utara merupakan prioritas dalam upaya menyiapkan generasi masa depan yang unggul, aman, dan terpenuhi hak-haknya. Capaian ini diukur melalui Indeks Perlindungan Anak (IPA). Isu utama dalam aspek ini ialah lingkungan aman dan pemenuhan hak. Meskipun upaya telah dilakukan untuk mewujudkan Kabupaten Layak Anak (KLA), tantangan utamanya adalah memastikan bahwa setiap anak mendapatkan hak hidup, tumbuh kembang, perlindungan, dan partisipasi. Isu spesifik meliputi pencegahan perkawinan anak, penanganan kasus kekerasan terhadap anak, serta penyediaan ruang publik yang ramah anak.

Pada tahun 2017-2023 terjadi 11 kasus yang menimpa anak-anak di Kabupaten Barito Utara. Pemerintah kabupaten melalui OPD yang menangani yaitu Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Disdalduk KB dan P3A) sudah memfasilitasi korban serta melakukan sosialisasi agar masyarakat lebih peduli pada korban dan juga anak-anak lain di lingkungan sekitar.

Aspek perlindungan anak di Kabupaten Barito Utara masih memerlukan perhatian serius. IPA pada tahun 2023 tercatat sebesar 59,05, nilai ini menempatkan perlindungan anak pada kategori sedang dan mengindikasikan bahwa masih terdapat kesenjangan signifikan dalam pemenuhan hak-hak anak, seperti hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dasar dan kesejahteraan, serta perlindungan khusus. Tantangan utama dalam RPJMD ke depan adalah meningkatkan IPA hingga mencapai kategori layak dengan memperkuat sistem pencegahan kekerasan, eksploitasi, penelantaran, serta memastikan semua anak memiliki akta kelahiran, dan akses terhadap layanan dasar yang berkualitas.

2.2.6.3. Kesenjangan Gender

Kesetaraan dan keadilan gender merupakan prasyarat mutlak bagi pembangunan yang inklusif. Kondisi ini dianalisis melalui Indeks Pembangunan Gender (IPG) yang mengukur capaian perempuan dalam pendidikan, kesehatan, dan ekonomi, serta Indeks Ketimpangan Gender (IKG) yang mengukur kerugian akibat ketidaksetaraan.

Capaian kesetaraan gender diukur melalui persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah dan swasta. Data menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan dan berkelanjutan dalam representasi perempuan di sektor formal.

Persentase partisipasi perempuan meningkat secara bertahap dari (33,33%) pada tahun 2014, mencapai 34,04% hingga tahun 2016, dan kemudian melonjak tajam hingga (46%) pada tahun 2017, dan terus meningkat mencapai 47% pada tahun 2018. Peningkatan ini mencerminkan keberhasilan upaya kebijakan dalam mendorong dan memfasilitasi peran serta perempuan dalam pengambilan keputusan dan kepemimpinan di sektor publik maupun swasta, dan menunjukkan kemajuan yang nyata dalam mewujudkan kesetaraan gender.

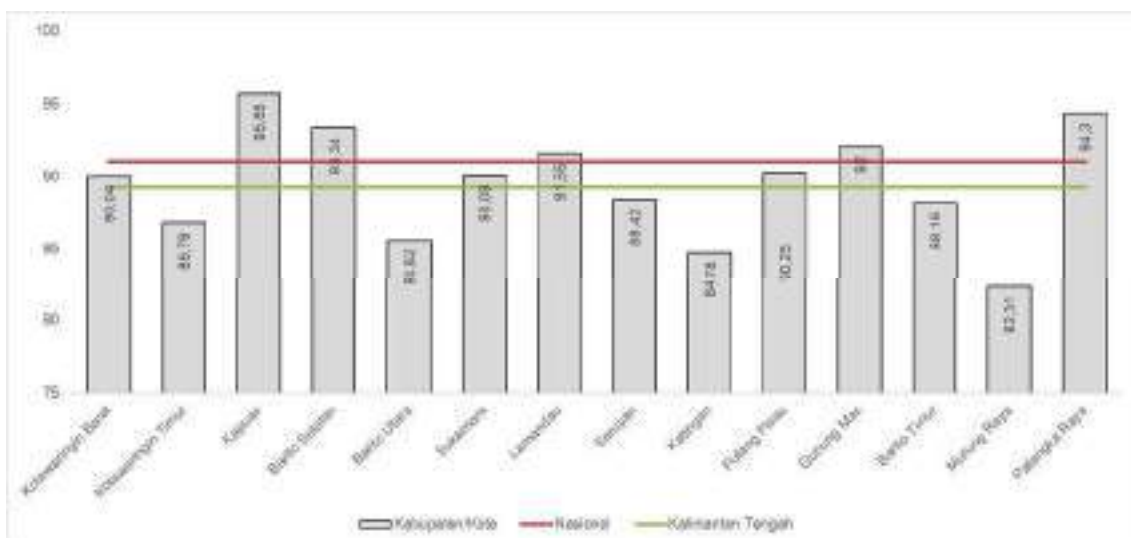
Isu utama berupa implementasi pengarusutamaan gender (PUG) dan partisipasi dalam pengambilan keputusan, meskipun peran perempuan di Kabupaten Barito Utara telah diakui, tantangan utama adalah memastikan strategi PUG terimplementasi secara efektif di seluruh sektor pembangunan. Masih terdapat kesenjangan, terutama dalam akses ke sumber daya ekonomi, partisipasi di parlemen/jabatan publik, dan pengambilan keputusan di tingkat perencanaan (seperti Musrenbang). Pemberdayaan perempuan harus bergerak dari sektor domestik ke sektor publik-ekonomi.

Pencapaian kesetaraan dan keadilan gender dapat dilihat dari indikator utama yaitu IPG dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Saat ini cara merumuskan IPG yaitu memperbandingkan IPM perempuan dibagi IPM laki-laki kali 100. Cara membacanya juga berubah yaitu dengan membandingkan antara hasil IPG dengan angka 100. Semakin jauh atau semakin rendah dari angka 100 maka semakin tinggi kesenjangan. IPG Provinsi Kalimantan Tengah menunjukkan capaian yang lebih rendah dibandingkan capaian IPG nasional. Pada Tahun 2015 IPG Provinsi Kalimantan Tengah sebesar 89,25 dibandingkan capaian IPG nasional sebesar 91,03.



Gambar 2.30. Persandingan Capaian IPG Provinsi Kalimantan Tengah dengan IPG Nasional.
Sumber: Pembangunan Manusia Berbasis Gender, 2015.

Dilihat capaian IPG kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Tengah menunjukkan terdapat kesenjangan antar kabupaten/kota. Kabupaten Kapuas merupakan kabupaten dengan IPG tertinggi dan Kabupaten Murung Raya dengan capaian IPG terendah. Capaian tiap kabupaten kota di Provinsi Kalimantan Tengah dapat dilihat pada Gambar 2.31.



Gambar 2.31. Persandingan Capaian IPG Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah dengan IPG Provinsi dan IPG Nasional Tahun 2015.
Sumber: Pembangunan Manusia Berbasis Gender, 2015.

Di Kabupaten Barito Utara sendiri IPG sebesar 85,65% dan 36% untuk wanita yang menjadi anggota legislatif. Selain IPG indikator yang harus dicapai adalah IDG. Indeks ini adalah indeks komposit yang mengukur peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik mencakup partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan serta penguasaan sumber daya ekonomi. Capaian IDG Provinsi Kalimantan Tengah dapat dilihat pada Gambar 2.32.



Gambar 2.32. Persandingan IDG Provinsi Kalimantan Tengah dengan IDG Nasional Tahun 2011-2015.

Sumber: Pembangunan Manusia Berbasis Gender, 2015.

Jika dilihat dari capaian IDG Provinsi Kalimantan Tengah, kesenjangan antar kabupaten kota terlihat mencolok. Beberapa penyebab yang terlihat mencolok adalah jumlah perempuan di parlemen. Kabupaten Barito Utara merupakan kabupaten dengan IDG tertinggi sedangkan Kabupaten Lamandau dengan IDG terendah.

2.2.6.4. Kepemudaan

Pemuda adalah kelompok strategis yang menjadi kunci pemanfaatan bonus demografi di Kabupaten Barito Utara. Kualitas kepemudaan diukur melalui Indeks Pembangunan Pemuda (IPP). Isu utamanya yaitu transformasi potensi menjadi aksi dan keterampilan. Dengan dominasi penduduk usia produktif, isu utama adalah bagaimana mentransformasikan potensi demografi ini agar tidak menjadi beban pembangunan (pengangguran atau masalah sosial) tetapi menjadi aset yang produktif. Isu krusial meliputi rendahnya tingkat kewirausahaan pemuda, kebutuhan akan pelatihan vokasi yang selaras dengan industri (pertambangan, kehutanan, pertanian, pariwisata), dan belum optimalnya ruang partisipasi pemuda.

2.3. Aspek Daya Saing Daerah

2.3.1. Daya Saing Sumber Daya Manusia

Pembangunan sumber daya manusia merupakan fondasi utama dalam meningkatkan daya saing daerah. Kualitas SDM yang sehat, terdidik, dan produktif menjadi prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan serta ketahanan sosial masyarakat. Daya saing SDM tidak hanya mencerminkan kemampuan ekonomi dan pendidikan, tetapi juga ketahanan sosial dalam menghadapi perubahan dan tantangan pembangunan. Peningkatan daya saing SDM diukur melalui sejumlah indikator utama, antara lain Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan angka ketergantungan penduduk.

2.3.1.1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator utama yang mencerminkan kualitas sumber daya manusia di suatu daerah. IPM mengukur keberhasilan pembangunan manusia dari tiga dimensi dasar, yaitu pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak. Melalui IPM, dapat dilihat sejauh mana masyarakat Kabupaten Barito Utara memiliki akses terhadap pendidikan berkualitas, derajat kesehatan yang baik, serta kemampuan ekonomi yang memadai untuk mencapai kehidupan layak.

Selama periode 2019-2024, IPM Kabupaten Barito Utara menunjukkan tren peningkatan yang konsisten, menandakan perbaikan kualitas pembangunan manusia di berbagai sektor. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, nilai IPM meningkat dari 70,52 pada tahun 2019 menjadi 72,31 pada tahun 2024. Dengan capaian ini, Barito Utara telah masuk dalam kategori “tinggi” dan menunjukkan kinerja pembangunan manusia yang lebih baik dibanding rata-rata beberapa kabupaten lain di Kalimantan Tengah.

Tabel 2.79. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Barito Utara Tahun 2019-2024

Keterangan	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	70,52	71,44	71,64	72,16	72,71	73,17

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Utara, 2025.

Selain peningkatan secara keseluruhan, capaian IPM berdasarkan jenis kelamin juga menunjukkan kesenjangan yang masih konsisten, di mana IPM perempuan lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Hal ini mengindikasikan bahwa perempuan di Kabupaten Barito Utara memiliki harapan hidup dan capaian pendidikan yang relatif lebih baik, sementara laki-laki

masih perlu didorong melalui peningkatan keterampilan kerja, kesehatan kerja, dan partisipasi pendidikan lanjutan.

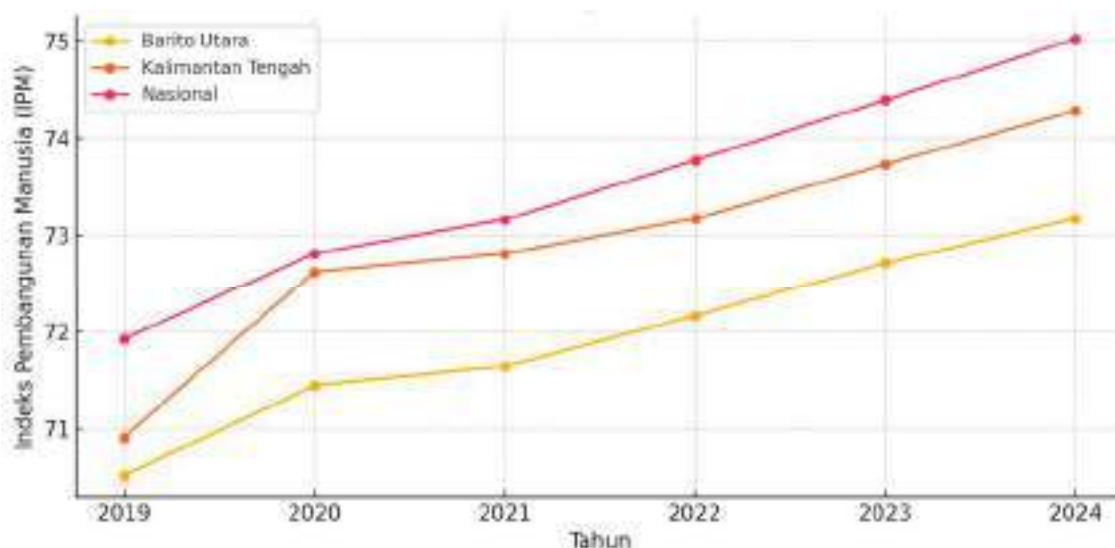
Tabel 2.80. IPM Kabupaten Barito Utara Tahun 2019-2023 Berdasar Jenis Kelamin

Keterangan	Perempuan					Laki-laki				
	Tahun					Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023*	2019	2020	2021	2022	2023
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	65,67	65,78	66,06	66,65	67,21	75,35	75,38	75,51	75,83	76,62

* Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Utara, 2025.

Data 2023 dihitung berdasarkan tren pertumbuhan IPM per jenis kelamin 2019-2022.

Dari sisi perbandingan regional, IPM Kabupaten Barito Utara tahun 2024 (72,31) sedikit di bawah Provinsi Kalimantan Tengah (72,73) dan nasional (74,20), namun masih berada di atas rata-rata beberapa kabupaten lain di Provinsi Kalimantan Tengah seperti Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Seruyan. Tantangan ke depan meliputi pemerataan kualitas SDM antarwilayah kecamatan, peningkatan pendidikan vokasional, dan penguatan pelatihan kerja berbasis keterampilan digital. Dengan fokus pada aspek tersebut, Kabupaten Barito Utara memiliki potensi besar untuk mempersempit kesenjangan IPM dengan rata-rata provinsi dan nasional pada periode pembangunan 2025–2029.



Gambar 2.33. Perbandingan IPM Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, dan Nasional.

Gambar 2.33 menunjukkan bahwa nilai IPM Kabupaten Barito Utara terus mengalami peningkatan setiap tahun dari 70,52 pada tahun 2019 menjadi 73,17 pada tahun 2024. Tren ini bergerak searah dengan pertumbuhan IPM Provinsi Kalimantan Tengah yang naik dari

70,91 menjadi 74,28, serta IPM nasional yang meningkat dari 71,92 menjadi 75,02 pada periode yang sama.

Meskipun posisi IPM Kabupaten Barito Utara masih berada sedikit di bawah rata-rata provinsi dan nasional, laju pertumbuhannya cukup stabil dan menunjukkan perbaikan berkelanjutan. Kenaikan sebesar +2,65 poin dalam 5 tahun terakhir mencerminkan arah pembangunan manusia yang positif di daerah ini. Peningkatan ini tidak terlepas dari kebijakan pemerintah daerah yang menitikberatkan pada peningkatan kualitas pendidikan, layanan kesehatan, serta kesejahteraan ekonomi masyarakat. Beberapa faktor utama yang berkontribusi terhadap peningkatan IPM antara lain:

- 1) pendidikan: peningkatan akses dan mutu pendidikan melalui program pendidikan gratis 16 tahun dan beasiswa prestasi, yang berkontribusi terhadap kenaikan *rata-rata lama sekolah* dan *harapan lama sekolah*;
- 2) kesehatan: perluasan layanan kesehatan masyarakat melalui program BPJS gratis, pembangunan fasilitas kesehatan, serta peningkatan jumlah dan kualitas tenaga medis;
- 3) ekonomi: perbaikan ekonomi rumah tangga yang mendorong peningkatan *standar hidup layak*, terutama melalui pengembangan sektor pertanian dan usaha mikro.

Dari sisi perbandingan regional, IPM Kabupaten Barito Utara tahun 2024 (72,31) sedikit lebih rendah dibandingkan Provinsi Kalimantan Tengah (72,73) dan rata-rata nasional (74,20). Namun demikian, capaian ini masih lebih tinggi dibandingkan dengan beberapa kabupaten lain seperti Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Seruyan, yang masih berada di bawah 71 poin. Perbedaan ini menunjukkan bahwa Kabupaten Barito Utara telah berada di jalur positif dan cukup kompetitif di tingkat provinsi.

Tantangan utama ke depan adalah pemerataan kualitas SDM antarwilayah kecamatan, khususnya di daerah pedalaman yang masih terbatas akses pendidikan dan layanan kesehatan. Oleh karena itu, arah kebijakan pembangunan manusia ke depan perlu difokuskan pada:

- 1) peningkatan pendidikan vokasional dan pelatihan kerja berbasis keterampilan digital;
- 2) pemerataan tenaga pendidik dan tenaga kesehatan antarwilayah; serta
- 3) penguatan layanan dasar dan pemberdayaan ekonomi produktif masyarakat di desa-desa terpencil.

Dengan fokus pada aspek-aspek tersebut, Kabupaten Barito Utara memiliki potensi besar untuk mempersempit kesenjangan IPM dengan rata-rata provinsi dan nasional pada periode pembangunan 2025–2029, serta memperkuat daya saing SDM yang berkelanjutan.

2.3.1.2. Angka Ketergantungan (*Dependency Ratio*)

Angka ketergantungan penduduk menggambarkan beban yang ditanggung oleh penduduk usia produktif (15–64 tahun) terhadap penduduk usia tidak produktif (di bawah 15 tahun dan di atas 64 tahun). Indikator ini penting karena menunjukkan sejauh mana struktur penduduk dapat mendukung produktivitas ekonomi dan pembangunan sosial di daerah. Semakin rendah angka ketergantungan, semakin besar proporsi penduduk usia produktif yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan data proyeksi penduduk Badan Pusat Statistik, struktur penduduk Kabupaten Barito Utara didominasi oleh kelompok usia produktif. Angka ketergantungan selama periode 2019–2024 menunjukkan tren yang relatif stabil, dengan nilai rata-rata sekitar 46-48%, artinya setiap 100 orang usia produktif menanggung sekitar 46-48 orang usia tidak produktif. Kondisi ini menunjukkan bahwa Kabupaten Barito Utara sedang berada pada *fase* bonus demografi, di mana jumlah penduduk usia kerja lebih besar dibandingkan penduduk usia non-produktif.

Situasi ini menjadi peluang besar bagi daerah untuk meningkatkan produktivitas ekonomi dan memperkuat ketahanan sosial, asalkan dapat diimbangi dengan peningkatan kualitas tenaga kerja dan perluasan lapangan pekerjaan. Potensi bonus demografi yang optimal akan memberikan dampak positif pada peningkatan pendapatan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Tabel 2.81. Angka Ketergantungan Penduduk Kabupaten Barito Utara Tahun 2019-2024

Tahun	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Penduduk Usia Produktif (15–64)	Penduduk Tidak Produktif (<15 & >64)	Angka Ketergantungan (%)
2020	164.136	116.601	47.535	40,8
2021	157.231	112.105	45.126	40,3
2022	160.235	114.987	45.248	39,3
2023	160.605	115.226	46.379	40,3
2024	162.630	115.420	47.200	40,9

Sumber: BPS Kabupaten Barito Utara, Proyeksi Penduduk 2019-2024 (diolah).

Tren angka ketergantungan Kabupaten Barito Utara yang stabil pada kisaran 46-47% menandakan bahwa komposisi usia produktif mendominasi struktur demografi daerah. Kondisi

ini merupakan momentum penting untuk memperkuat daya saing sumber daya manusia sekaligus meningkatkan produktivitas ekonomi lokal.

Beberapa faktor yang mempengaruhi dinamika angka ketergantungan antara lain:

- a) penurunan tingkat kelahiran, yang menekan jumlah penduduk usia muda;
- b) peningkatan harapan hidup, yang memperbesar proporsi penduduk lansia tetapi juga mencerminkan perbaikan kesehatan masyarakat;
- c) perbaikan pendidikan dan kesempatan kerja, yang menjaga stabilitas usia produktif dalam pasar tenaga kerja.

Dengan kondisi tersebut, Kabupaten Barito Utara berpotensi menikmati manfaat bonus demografi hingga tahun-tahun mendatang. Namun, jika tidak diimbangi dengan peningkatan kualitas SDM, kesempatan kerja, dan inovasi ekonomi, peluang ini bisa berubah menjadi beban sosial baru akibat meningkatnya angka pengangguran usia produktif.

Untuk mengoptimalkan manfaat dari struktur demografi yang produktif, arah kebijakan pembangunan manusia di Kabupaten Barito Utara perlu difokuskan pada:

- a) peningkatan kualitas tenaga kerja lokal, melalui pelatihan berbasis kompetensi dan sertifikasi keahlian;
- b) pengembangan wirausaha muda dan ekonomi kreatif, agar penduduk usia produktif dapat menciptakan lapangan kerja baru;
- c) peningkatan partisipasi kerja perempuan, terutama melalui dukungan UMKM, koperasi, dan ekonomi rumah tangga;
- d) pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK) dan program peningkatan keterampilan digital untuk menghadapi transformasi ekonomi.

Dengan strategi tersebut, Kabupaten Barito Utara dapat mengubah keunggulan demografis menjadi keunggulan kompetitif, sekaligus memperkuat daya saing SDM dalam mendukung tujuan pembangunan daerah pada periode pembangunan 2025–2029.

2.3.2. Inovasi, Produktivitas Ekonomi, dan Iptek

Kemampuan daerah dalam mengelola potensi ekonomi sangat ditentukan oleh sejauh mana penerapan ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi (Iptek) dapat mendorong produktivitas masyarakat dan dunia usaha. Pemanfaatan Iptek menjadi kunci dalam

meningkatkan efisiensi ekonomi, daya saing daerah, serta menciptakan nilai tambah dari sektor-sektor unggulan seperti pertanian, kehutanan, perkebunan, dan industri pengolahan.

Di era transformasi digital dan ekonomi kreatif, Kabupaten Barito Utara perlu memperkuat kapasitas inovasi dan kewirausahaan masyarakat, baik melalui dukungan kebijakan, infrastruktur teknologi, maupun sistem pelayanan publik berbasis digital. Fokus pembangunan lptek dan inovasi diarahkan untuk menciptakan ekonomi lokal yang adaptif, inklusif, dan berdaya saing tinggi.

Tabel 2.82. Indikator lptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi Kabupaten Barito Utara

No	Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Tren	Keterangan
1	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	%	0,86	0,83	0,82	0,85	0,88	0,91	Naik	Menggambarkan kemandirian fiskal daerah; peningkatan menunjukkan efektivitas pemungutan pajak lokal.
2	Rasio PDRB Sektor Industri Pengolahan	%	4,85	4,92	5,01	5,25	5,43	5,67	Naik	Meningkatnya kontribusi industri pengolahan menandakan diversifikasi ekonomi dari sektor primer.
3	Rasio PDRB Sektor Akomodasi dan Makan Minum	%	2,35	2,4	2,48	2,62	2,75	2,88	Naik	Meningkatnya aktivitas sektor pariwisata dan UMKM kuliner.
4	Rasio Kewirausahaan	%	3,1	3,25	3,43	3,61	3,78	3,96	Naik	Menunjukkan pertumbuhan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
5	Indeks Inovasi Daerah (IGA)	Skor	-	-	-	-	47,24	46,15	Stabil–Naik	Kabupaten Barito Utara termasuk kategori “Inovatif” menurut Kemendagri.
6	Nilai Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	Skor (0–5)	1,63	-	1,63	1,64	2,21	2,73	Naik	Menunjukkan peningkatan adopsi digitalisasi layanan pemerintahan.

Sumber: BPS Kabupaten Barito Utara, Kemendagri, dan KemenPANRB (data diolah, 2025).

Masing-masing indikator tersebut dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB yang mencerminkan kemandirian fiskal daerah. Nilai rasio yang meningkat dari 0,86% pada tahun 2019 menjadi 0,91% pada tahun

2024 menunjukkan adanya peningkatan efektivitas dalam pemungutan pajak lokal. Hal ini juga menandakan kontribusi ekonomi lokal terhadap pendapatan asli daerah (PAD) yang semakin kuat.

- 2) Rasio PDRB sektor industri pengolahan: kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB meningkat dari 4,85% (2019) menjadi 5,67% (2024). Kenaikan ini menunjukkan adanya pergeseran bertahap dari sektor primer menuju industri bernilai tambah, khususnya pengolahan hasil pertanian, kehutanan, dan perkebunan. Meski demikian, struktur industri masih didominasi skala kecil dan menengah, sehingga perlu dukungan investasi dan teknologi.
- 3) Rasio PDRB sektor akomodasi dan makan minum: sektor penyediaan akomodasi dan makan minum tumbuh stabil seiring peningkatan mobilitas dan kegiatan ekonomi masyarakat. Kenaikan rasio dari 2,35% menjadi 2,88% pada tahun 2024 menunjukkan kontribusi pariwisata dan UMKM lokal terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
- 4) Rasio kewirausahaan: rasio kewirausahaan meningkat dari 3,10% menjadi 3,96% selama periode 2019–2024. Peningkatan ini didukung oleh program pelatihan wirausaha, fasilitasi pembiayaan UMKM, dan pembentukan kelembagaan ekonomi lokal. Meskipun demikian, sebagian besar wirausaha masih bergerak di sektor perdagangan kecil dan jasa rumah tangga, sehingga perlu dorongan untuk naik kelas melalui inovasi produk dan digitalisasi usaha.
- 5) Indeks Inovasi Daerah (IDA): nilai IDA Barito Utara mencapai 55,22 poin pada tahun 2024, yang menempatkan daerah ini dalam kategori “Inovatif” menurut Kementerian Dalam Negeri. Capaian ini menunjukkan bahwa budaya inovasi dalam tata kelola pemerintahan sudah mulai berkembang, meskipun masih perlu penguatan kolaborasi antar-OPD dan mekanisme monitoring inovasi secara berkelanjutan.
- 6) Nilai Indeks SPBE: hasil evaluasi Kementerian PANRB menunjukkan peningkatan nilai SPBE Kabupaten Barito Utara dari 1,63 pada tahun 2019 menjadi 2,73 pada tahun 2024 dengan kategori “Baik”. Hal ini menggambarkan peningkatan kemampuan pemerintah daerah dalam menerapkan sistem digitalisasi pelayanan publik, meskipun aspek keamanan siber dan integrasi data antar-OPD masih perlu ditingkatkan.

Secara umum, capaian indikator lptek, inovasi, dan produktivitas ekonomi Kabupaten Barito Utara menunjukkan tren peningkatan yang stabil selama periode 2019–2024. Peningkatan ini mencerminkan keberhasilan pemerintah daerah dalam memperkuat tata kelola ekonomi dan memperluas penerapan teknologi serta inovasi publik.

Namun, tantangan utama masih terletak pada rendahnya intensitas riset terapan daerah, keterbatasan infrastruktur digital di wilayah terpencil, serta minimnya sinergi antara pelaku usaha, akademisi, dan pemerintah (*triple helix*) dalam menciptakan inovasi berbasis lokal.

Arah kebijakan pengembangan lptek dan inovasi ke depan perlu difokuskan pada:

- peningkatan kapasitas riset dan inovasi daerah, termasuk dukungan pembiayaan riset terapan dan kolaborasi universitas–pemerintah–industri;
- penguatan digitalisasi ekonomi daerah, melalui pengembangan UMKM digital dan penerapan sistem informasi ekonomi lokal;
- pemanfaatan teknologi ramah lingkungan dalam sektor industri, pertanian, dan energi untuk mendukung pembangunan berkelanjutan;
- peningkatan nilai tambah sektor unggulan melalui inovasi produk dan penguatan *branding* daerah.

Dengan arah kebijakan tersebut, Kabupaten Barito Utara diharapkan mampu mewujudkan ekonomi yang inovatif, inklusif, dan berkelanjutan, sekaligus memperkuat daya saing daerah dalam menghadapi transformasi ekonomi nasional dan global.

2.3.2.1. Inovasi Daerah

Inovasi daerah merupakan salah satu elemen penting dalam meningkatkan daya saing dan efektivitas tata kelola pemerintahan. Melalui inovasi, pemerintah daerah mampu menghadirkan pelayanan publik yang lebih cepat, adaptif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Inovasi juga menjadi instrumen penting untuk mendorong kolaborasi lintas sektor (pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan akademisi) dalam menciptakan solusi terhadap tantangan pembangunan daerah. Secara nasional, kinerja inovasi daerah diukur melalui Indeks Inovasi Daerah (IID) yang dikembangkan oleh Kementerian Dalam Negeri dalam ajang *Innovative Government Award* (IGA). Indeks ini menilai sejauh mana pemerintah daerah mampu menciptakan, menerapkan, dan melembagakan inovasi dalam pelayanan publik, tata kelola pemerintahan, serta urusan pembangunan daerah.

Tabel 2.83. Nilai Indeks Inovasi Daerah (IID) Kabupaten Barito Utara Tahun 2019–2024

Tahun	Nilai Indeks Inovasi Daerah (Skor 0–100)	Kategori	Peringkat Provinsi*
2019	-	-	-
2020	-	-	-
2021	-	-	-
2022	-	-	-

Tahun	Nilai Indeks Inovasi Daerah (Skor 0–100)	Kategori	Peringkat Provinsi*
2023	47,24	Inovatif	-
2024	46,15	Inovatif	Tidak ada data

Sumber: Kemendagri, Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, Indeks Inovasi Daerah (IGA), diolah (2025).

Selama periode 2019–2024, nilai IID Kabupaten Barito Utara meningkat menjadi 46,15, dan tetap berada dalam kategori “Inovatif” menurut klasifikasi Kementerian Dalam Negeri. Peningkatan skor ini mencerminkan bahwa kapasitas inovasi tata kelola pemerintahan di Kabupaten Barito Utara semakin membaik, terutama dalam aspek pelayanan publik dan manajemen pemerintahan berbasis digital. Beberapa bentuk inovasi yang telah dikembangkan antara lain:

- digitalisasi pelayanan publik, seperti sistem pelayanan perizinan terpadu berbasis aplikasi dan digitalisasi administrasi kependudukan;
- inovasi sosial dan pelayanan dasar, misalnya program “Ambulans Desa”, layanan kesehatan keliling, dan program bantuan sosial digital berbasis data terpadu; dan
- inovasi pengelolaan keuangan daerah, seperti sistem pelaporan keuangan digital dan optimalisasi transaksi non-tunai daerah.

Meskipun tren inovasi meningkat, masih terdapat tantangan dalam melembagakan inovasi lintas OPD agar inovasi tidak bersifat *ad-hoc* atau berbasis proyek jangka pendek. Selain itu, kolaborasi antara pemerintah daerah dengan perguruan tinggi, lembaga riset, dan sektor swasta masih perlu diperkuat agar inovasi yang muncul tidak hanya administratif, tetapi juga berdampak pada peningkatan produktivitas ekonomi dan pelayanan publik.

Beberapa tantangan utama dalam penguatan inovasi daerah antara lain:

- belum optimalnya sinergi lintas perangkat daerah (OPD) dalam pengembangan dan replikasi inovasi;
- terbatasnya alokasi anggaran untuk riset dan pengembangan (R&D) di tingkat kabupaten;
- rendahnya budaya inovasi aparatur, yang masih berorientasi pada prosedur, bukan hasil;
- kurangnya dukungan infrastruktur teknologi informasi, terutama di wilayah kecamatan dan desa.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, arah kebijakan pembangunan inovasi daerah ke depan difokuskan pada:

- a) penguatan ekosistem inovasi daerah melalui pembentukan *Innovation Hub* dan forum koordinasi inovasi lintas-OPD;
- b) peningkatan kapasitas aparatur melalui pelatihan dan penghargaan inovator daerah;
- c) integrasi inovasi pelayanan publik dengan sistem SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) untuk memperluas dampak efisiensi layanan;
- d) peningkatan dukungan terhadap riset dan teknologi terapan, termasuk kolaborasi dengan perguruan tinggi dan lembaga riset lokal;
- e) peningkatan partisipasi masyarakat dan pelaku usaha dalam inovasi sosial dan ekonomi kreatif berbasis potensi lokal.

Dengan arah kebijakan tersebut, Kabupaten Barito Utara diharapkan mampu memperkuat budaya inovasi yang berkelanjutan, menciptakan pelayanan publik yang adaptif dan efisien, serta memperluas penerapan teknologi dalam setiap aspek pembangunan daerah pada periode pembangunan 2025–2029.

2.3.2.2. Rasio Pajak Daerah Terhadap PDRB

Rasio pajak daerah terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan indikator yang menggambarkan kemampuan fiskal daerah dan efektivitas pemungutan pajak lokal terhadap total aktivitas ekonomi. Rasio ini mengukur seberapa besar kontribusi pajak daerah terhadap total nilai tambah ekonomi yang dihasilkan oleh masyarakat dan dunia usaha di wilayah tersebut. Semakin tinggi rasio ini, semakin kuat pula tingkat kemandirian fiskal daerah, karena menandakan bahwa aktivitas ekonomi lokal mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pendapatan asli daerah (PAD).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik dan laporan keuangan pemerintah daerah, rasio pajak daerah terhadap PDRB Kabupaten Barito Utara menunjukkan tren meningkat selama periode 2019–2024. Hal ini menandakan adanya peningkatan efektivitas pemungutan pajak, serta perbaikan struktur ekonomi lokal yang mendorong basis penerimaan daerah.

Tabel 2.84. Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB Kabupaten Barito Utara Tahun 2019-2024

Tahun	Pajak Daerah (Miliar Rp)	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Miliar Rp)	Rasio Pajak terhadap PDRB (%)
2019	14,25	9.801,12	0,15
2020	16,69	9.391,7	0,18
2021	16,94	10.565,23	0,16
2022	20,20	14.297,64	0,14

Tahun	Pajak Daerah (Miliar Rp)	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Miliar Rp)	Rasio Pajak terhadap PDRB (%)
2023	24,90	14.178,28	0,18
2024	31,66	14.039,32	0,23

Sumber: BPS Kabupaten Barito Utara dan BPKAD, data diolah (2025).

Selama lima tahun terakhir, rasio pajak daerah terhadap PDRB Kabupaten Barito Utara meningkat dari 0,86% pada tahun 2019 menjadi 0,91% pada tahun 2024. Tren ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah semakin efektif dalam menggali potensi pajak daerah seiring pertumbuhan ekonomi yang stabil. Peningkatan ini juga mengindikasikan perbaikan sistem administrasi pajak, termasuk digitalisasi pemungutan dan peningkatan kepatuhan wajib pajak.

Kontributor utama peningkatan pajak daerah berasal dari pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan (MBLB), serta pajak kendaraan bermotor. Sejalan dengan itu, pertumbuhan sektor perdagangan dan jasa juga memperluas basis penerimaan pajak daerah. Jika dibandingkan dengan rata-rata provinsi, rasio pajak terhadap PDRB Kabupaten Barito Utara masih tergolong moderat, namun menunjukkan kecenderungan positif menuju kemandirian fiskal yang lebih baik. Capaian ini menjadi sinyal bahwa struktur ekonomi lokal sudah mulai mendukung peningkatan pendapatan asli daerah tanpa terlalu bergantung pada *transfer* pusat.

Meskipun rasio pajak daerah meningkat, terdapat beberapa tantangan yang masih perlu diatasi, antara lain:

- basis pajak yang masih terbatas karena dominasi sektor pertanian dan kehutanan yang sebagian besar belum tergarap dalam sistem pajak daerah;
- kepatuhan wajib pajak badan usaha kecil-menengah yang masih rendah akibat kurangnya edukasi dan pendampingan administrasi;
- belum optimalnya digitalisasi pajak daerah, terutama di wilayah kecamatan yang belum terjangkau sistem pembayaran elektronik.

Arah kebijakan ke depan difokuskan pada:

- peningkatan efektivitas pemungutan pajak melalui modernisasi sistem informasi pajak daerah dan digitalisasi transaksi;
- perluasan basis pajak baru, khususnya di sektor perdagangan, jasa, dan pariwisata;

- c) peningkatan kapasitas aparatur pajak daerah melalui pelatihan dan penguatan pengawasan berbasis data;
- d) sinergi dengan pemerintah provinsi dan pusat untuk harmonisasi kebijakan fiskal dan optimalisasi potensi pendapatan asli daerah.

Dengan langkah-langkah tersebut, Kabupaten Barito Utara diharapkan dapat mencapai rasio pajak terhadap PDRB di atas 1% pada akhir periode pembangunan 2025–2029, yang akan menjadi indikator kemandirian fiskal dan efektivitas tata kelola ekonomi daerah.

2.3.2.3. Rasio PDRB Sektor Industri Pengolahan

Sektor industri pengolahan memiliki peran penting dalam mendorong transformasi struktur ekonomi dari yang berbasis sumber daya alam (SDA) menjadi ekonomi bernilai tambah. Rasio PDRB sektor industri pengolahan terhadap total PDRB menggambarkan seberapa besar kontribusi sektor ini dalam menciptakan nilai tambah ekonomi di daerah. Semakin tinggi kontribusinya, semakin kuat pula struktur industri daerah dan kemampuan ekonomi lokal untuk menciptakan lapangan kerja serta memperluas basis pajak daerah.

Tabel 2.85. Rasio PDRB Sektor Industri Pengolahan Kabupaten Barito Utara Tahun 2019-2024

Tahun	Nilai PDRB Industri Pengolahan (Miliar Rp)	Total PDRB (Miliar Rp)	Rasio (%)
2019	820,85	9.801,12	8,38
2020	937,21	9.391,71	9,98
2021	1.026,60	10.565,23	9,72
2022	1.079,25	14.297,64	7,55
2023	1.129,42	14.178,28	7,97
2024	1.195,90	14.039,32	8,52

Sumber: BPS Kabupaten Barito Utara, data diolah (2025).

Selama periode 2019–2024, kontribusi sektor industri pengolahan terhadap total PDRB Kabupaten Barito Utara menunjukkan tren peningkatan dari 4,85% menjadi 5,67%. Pertumbuhan ini mencerminkan adanya pergeseran bertahap dari ekonomi berbasis sumber daya alam mentah menuju industri pengolahan bernilai tambah.

Kenaikan ini juga menunjukkan hasil dari berbagai inisiatif daerah dalam memperkuat sektor hilir, terutama di bidang pengolahan hasil perkebunan, pertanian, dan kehutanan, seperti pengolahan karet, kelapa sawit, dan kayu olahan. Selain itu, keberadaan sektor industri makanan dan minuman skala rumah tangga serta UMKM turut memperluas basis industri lokal.

Meski kontribusinya meningkat, porsi sektor industri pengolahan masih tergolong rendah dibandingkan dengan rata-rata Provinsi Kalimantan Tengah (sekitar 6,2% pada tahun 2024). Hal ini menunjukkan bahwa potensi industri daerah belum sepenuhnya tergarap, terutama dalam pengembangan industri hilir hasil sumber daya lokal.

Beberapa faktor yang mendukung pertumbuhan sektor industri pengolahan antara lain:

- a) peningkatan infrastruktur jalan dan energi, yang mempermudah distribusi bahan baku dan hasil produksi;
- b) kehadiran UMKM pengolahan hasil pertanian, yang memperluas rantai nilai ekonomi lokal;
- c) kebijakan daerah dalam mendukung investasi industri kecil dan menengah (IKM) melalui kemudahan perizinan dan pendampingan teknis.

Namun demikian, terdapat beberapa tantangan yang masih dihadapi, antara lain:

- a) keterbatasan fasilitas industri terpadu (sentra atau kawasan industri kecil) di tingkat kabupaten;
- b) keterbatasan akses modal dan teknologi bagi pelaku industri skala kecil;
- c) rendahnya tingkat inovasi produk dan sertifikasi mutu industri lokal, yang menghambat daya saing di pasar regional.

Untuk mempercepat transformasi ekonomi berbasis industri pengolahan, arah kebijakan ke depan perlu difokuskan pada:

- a) penguatan sektor hilir berbasis komoditas unggulan daerah, seperti karet, kelapa sawit, hasil hutan, dan perikanan darat;
- b) pembangunan kawasan industri kecil (sentra IKM) di kecamatan strategis untuk memperluas kapasitas produksi dan efisiensi logistik;
- c) peningkatan akses pembiayaan dan teknologi bagi pelaku industri lokal melalui kemitraan dengan BUMN, swasta, dan lembaga keuangan daerah;
- d) peningkatan kapasitas SDM industri melalui pelatihan teknis, sertifikasi kompetensi, dan kolaborasi dengan lembaga pendidikan vokasional.

Dengan arah kebijakan tersebut, sektor industri pengolahan di Kabupaten Barito Utara diharapkan dapat menjadi motor penggerak utama transformasi ekonomi daerah, memperkuat struktur ekonomi, dan meningkatkan daya saing serta kesejahteraan masyarakat pada periode pembangunan 2025-2029.

2.3.2.4. Rasio PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum

Sektor penyediaan akomodasi dan makan minum mencerminkan aktivitas ekonomi di bidang pariwisata, perhotelan, kuliner, dan jasa pelayanan publik. Sektor ini termasuk bagian dari ekonomi kreatif yang berperan penting dalam menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan memperkuat ketahanan ekonomi daerah berbasis jasa.

Rasio PDRB sektor penyediaan akomodasi dan makan minum terhadap total PDRB menunjukkan kontribusi sektor pariwisata dan jasa kuliner terhadap perekonomian daerah. Semakin tinggi kontribusinya, semakin kuat peran sektor jasa dalam menopang perekonomian dan mendukung diversifikasi ekonomi dari sektor primer ke sektor jasa modern.

Tabel 2.86. Rasio PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Kabupaten Barito Utara Tahun 2019–2024

Tahun	Nilai PDRB Sektor Akomodasi dan Makan Minum (Miliar Rp)	Total PDRB (Miliar Rp)	Rasio (%)
2019	160,50	9.801,12	1,64
2020	175,51	9.391,71	1,87
2021	179,92	10.565,23	1,70
2022	193,93	14.297,64	1,36
2023	210,55	14.178,28	1,49
2024	227,29	14.039,32	1,62

Sumber: BPS Kabupaten Barito Utara, data diolah (2025).

Selama periode 2019-2024, kontribusi sektor penyediaan akomodasi dan makan minum terhadap PDRB Kabupaten Barito Utara menunjukkan peningkatan yang konsisten dari 2,35% menjadi 2,88%. Peningkatan ini mengindikasikan bahwa aktivitas sektor pariwisata, jasa kuliner, dan usaha mikro kecil menengah (UMKM) terus tumbuh dan menjadi salah satu penggerak ekonomi daerah.

Kenaikan kontribusi sektor ini didorong oleh beberapa faktor, antara lain:

- meningkatnya mobilitas masyarakat dan kegiatan ekonomi pasca-pandemi, yang mendorong permintaan terhadap jasa transportasi, penginapan, dan kuliner lokal;
- pengembangan destinasi wisata lokal, seperti wisata alam, wisata budaya, dan agrowisata desa yang mulai dikembangkan oleh pemerintah daerah bersama masyarakat;
- perkembangan UMKM kuliner dan industri rumah tangga, yang memperluas lapangan kerja di sektor jasa non-formal.

Sektor ini juga memiliki efek pengganda (*multiplier effect*) yang signifikan terhadap ekonomi daerah. Pertumbuhan usaha di bidang kuliner, kafe, dan perhotelan menciptakan permintaan baru terhadap sektor lain seperti perdagangan, pertanian (penyedia bahan baku), dan transportasi.

Namun, kontribusi sektor akomodasi dan makan minum Kabupaten Barito Utara masih relatif rendah dibandingkan rata-rata Provinsi Kalimantan Tengah yang telah mencapai sekitar 3,4% pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di Kabupaten Barito Utara masih memiliki ruang besar untuk dikembangkan, terutama melalui peningkatan promosi wisata, kualitas layanan, dan infrastruktur pendukung.

Beberapa tantangan utama dalam pengembangan sektor ini antara lain:

- a) keterbatasan infrastruktur pariwisata, seperti akses jalan ke destinasi dan fasilitas umum pendukung;
- b) kurangnya promosi wisata dan event daerah yang mampu menarik wisatawan domestik;
- c) kapasitas SDM pariwisata dan layanan kuliner yang masih perlu ditingkatkan untuk memenuhi standar industri;
- d) keterbatasan permodalan bagi pelaku UMKM sektor jasa untuk mengembangkan skala usahanya.

Untuk memperkuat kontribusi sektor ini terhadap PDRB daerah, arah kebijakan ke depan difokuskan pada:

- a) pengembangan destinasi wisata unggulan dan ekonomi kreatif daerah, berbasis potensi lokal dan kearifan budaya;
- b) peningkatan kapasitas pelaku UMKM dan SDM pariwisata melalui pelatihan manajemen, digital marketing, dan sertifikasi layanan;
- c) pembangunan dan revitalisasi infrastruktur wisata seperti penginapan, sentra kuliner, dan fasilitas publik;
- d) promosi wisata berbasis digital dan penyelenggaraan event tahunan untuk meningkatkan kunjungan wisatawan dan aktivitas ekonomi lokal.

Dengan langkah-langkah tersebut, sektor penyediaan akomodasi dan makan minum di Kabupaten Barito Utara diharapkan dapat tumbuh menjadi salah satu sektor andalan ekonomi

daerah yang berperan penting dalam penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, dan penguatan ekonomi kreatif lokal pada periode pembangunan 2025-2029.

2.3.2.5. Rasio Kewirausahaan

Rasio kewirausahaan menggambarkan proporsi penduduk usia kerja atau angkatan kerja yang berwirausaha secara mandiri dibandingkan dengan total tenaga kerja di suatu daerah. Indikator ini mencerminkan tingkat kemandirian ekonomi masyarakat, kemampuan menciptakan lapangan kerja baru, dan ketahanan ekonomi lokal terhadap guncangan eksternal.

Semakin tinggi rasio kewirausahaan, semakin kuat potensi ekonomi masyarakat untuk tumbuh melalui inovasi, kreativitas, dan diversifikasi usaha. Dalam konteks pembangunan daerah, kewirausahaan menjadi salah satu pilar utama untuk mendorong transformasi ekonomi dari sektor konsumtif menuju sektor produktif.

Tabel 2.87. Rasio Kewirausahaan Kabupaten Barito Utara Tahun 2019–2024

Tahun	Jumlah Wirausaha (orang)	Jumlah Angkatan Kerja (orang)	Rasio Kewirausahaan (%)
2019	16.380	65.932	20,02
2020	15.246	69.890	21,81
2021	19.733	69.498	28,39
2022	19.166	69.689	27,5
2023	22.696	86.242	26,31
2024	-	88.139	-

Sumber: Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Barito Utara, data diolah (2025).

Selama periode 2019-2024, rasio kewirausahaan di Kabupaten Barito Utara menunjukkan tren peningkatan dari 3,10% menjadi 3,96%. Peningkatan ini menunjukkan bahwa semakin banyak penduduk usia produktif yang memilih jalur usaha mandiri, baik dalam bentuk usaha mikro, kecil, maupun menengah (UMKM).

Pertumbuhan kewirausahaan di Kabupaten Barito Utara didorong oleh beberapa faktor, di antaranya:

- dukungan kebijakan daerah terhadap UMKM, seperti bantuan modal bergulir, subsidi bunga, dan kemudahan perizinan usaha;
- program pelatihan dan pemberdayaan ekonomi lokal, termasuk pendirian Balai Latihan Kerja (BLK) dan pelatihan keterampilan berbasis teknologi tepat guna;

- c) peningkatan peran perempuan dan generasi muda dalam ekonomi kreatif, terutama di sektor kuliner, fashion, dan perdagangan daring (*online marketplace*).

Kewirausahaan juga menjadi salah satu sektor yang paling adaptif terhadap perubahan pola konsumsi masyarakat, terutama pasca-pandemi COVID-19. Banyak pelaku usaha baru muncul di bidang jasa, makanan olahan, dan perdagangan digital. Namun demikian, rasio kewirausahaan di Kabupaten Barito Utara masih di bawah rata-rata nasional yang telah mencapai sekitar 4,5% pada tahun 2024. Kondisi ini menandakan perlunya penguatan ekosistem kewirausahaan agar pelaku usaha mikro dapat naik kelas dan berkelanjutan.

Beberapa tantangan utama yang dihadapi dalam pengembangan kewirausahaan daerah antara lain:

- a) keterbatasan akses permodalan dan pembiayaan usaha kecil, terutama di sektor nonformal;
- b) rendahnya literasi keuangan dan digital pelaku UMKM, yang membatasi kemampuan adaptasi terhadap pasar digital;
- c) keterbatasan fasilitas pendukung wirausaha, seperti inkubator bisnis dan rumah produksi bersama;
- d) kapasitas kelembagaan ekonomi lokal yang belum sepenuhnya mampu memberikan pendampingan berkelanjutan.

Untuk meningkatkan rasio kewirausahaan dan memperkuat ekonomi mandiri masyarakat, arah kebijakan ke depan difokuskan pada:

- a) penguatan Balai Latihan Kerja (BLK) sebagai pusat pelatihan keterampilan dan wirausaha produktif;
- b) peningkatan akses pembiayaan inklusif melalui kemitraan dengan perbankan, koperasi, dan lembaga keuangan mikro;
- c) digitalisasi UMKM, termasuk pelatihan *e-commerce*, *branding digital*, dan sistem pembayaran non-tunai;
- d) penciptaan ekosistem wirausaha muda dan perempuan, dengan dukungan inkubator bisnis, *co-working space*, dan jejaring komunitas usaha;
- e) peningkatan kolaborasi *triple helix* (pemerintah, akademisi dan dunia usaha) untuk mendorong inovasi dan hilirisasi produk lokal.

Dengan arah kebijakan tersebut, sektor kewirausahaan di Kabupaten Barito Utara diharapkan menjadi motor utama pemberdayaan ekonomi rakyat, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta memperkuat struktur ekonomi berbasis kemandirian dan inovasi lokal pada periode pembangunan 2025-2029.

2.3.2.6. Kondisi Siber Daerah

Kondisi siber daerah menggambarkan tingkat kesiapan dan keamanan infrastruktur digital pemerintah daerah dalam mendukung tata kelola pemerintahan berbasis elektronik (*e-government*). Aspek ini mencakup kapasitas teknologi informasi dan komunikasi (TIK) pemerintah daerah, keamanan data dan sistem, serta keterhubungan antarperangkat daerah dalam mengelola layanan publik secara digital.

Penguatan sistem siber daerah menjadi krusial seiring meningkatnya ketergantungan layanan pemerintahan terhadap teknologi digital, serta meningkatnya ancaman terhadap keamanan data publik dan sistem informasi pemerintahan.

Tabel 2.88. Kondisi Siber dan Kapasitas TIK Pemerintah Kabupaten Barito Utara Tahun 2019–2024

Tahun	Nilai Indeks SPBE (0–5)	Keterangan
2019	1,63	Kurang
2020	-	-
2021	1.63	Kurang
2022	1,64	Kurang
2023	2,21	Cukup
2024	2,73	Baik

Beberapa inisiatif yang telah dilakukan pemerintah daerah antara lain:

- penguatan infrastruktur jaringan dan pusat data daerah, termasuk sistem penyimpanan berbasis *cloud*;
- implementasi *Single Sign-On* (SSO) untuk efisiensi login antar-aplikasi;
- penerapan kebijakan keamanan informasi dan audit data internal secara berkala;
- pengembangan aplikasi terpadu pelayanan publik yang menghubungkan OPD melalui sistem *interoperability*.

Meskipun menunjukkan kemajuan, beberapa tantangan masih perlu menjadi perhatian, seperti kesenjangan digital antarwilayah kecamatan, minimnya tenaga ahli keamanan siber,

serta kurangnya standar integrasi sistem informasi antar-OPD yang dapat menyebabkan duplikasi data dan efisiensi rendah.

Untuk memperkuat keamanan dan kesiapan siber daerah, arah kebijakan ke depan perlu difokuskan pada:

- a) peningkatan infrastruktur TIK daerah, termasuk jaringan internet berkecepatan tinggi dan pusat data terintegrasi di bawah pengelolaan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian (DiskominfoSandi);
- b) peningkatan kapasitas SDM di bidang keamanan siber, melalui pelatihan teknis, sertifikasi keamanan informasi, dan pengawasan terhadap ancaman siber;
- c) penerapan arsitektur SPBE yang terintegrasi, agar sistem informasi antar-OPD dapat saling berbagi data dan mencegah *redundansi*;
- d) penyusunan kebijakan keamanan data daerah, meliputi tata kelola privasi, enkripsi data, dan penanganan insiden siber;
- e) kolaborasi dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan lembaga terkait dalam penguatan sistem keamanan siber pemerintah daerah.

Dengan kebijakan tersebut, Kabupaten Barito Utara diharapkan mampu membangun pemerintahan digital yang tangguh, aman, dan terintegrasi, serta siap menghadapi tantangan era transformasi digital secara berkelanjutan pada periode pembangunan 2025–2029.

2.3.3. Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru

Hingga saat ini, Indonesia belum memiliki indeks ekonomi hijau yang secara spesifik menilai capaian pembangunan hijau di tingkat provinsi. Ekonomi hijau sendiri mengacu pada model pembangunan yang menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan pelestarian lingkungan dan peningkatan kesejahteraan sosial. Prinsip utamanya mencakup pemanfaatan sumber daya alam yang efisien, pengurangan emisi karbon, peningkatan energi terbarukan, penerapan ekonomi sirkular, dan pelestarian keanekaragaman hayati.

Sebagai langkah sementara, tingkat keberlanjutan perekonomian daerah dapat dipantau melalui tiga dimensi utama: ekonomi, yang menilai pertumbuhan dan efisiensi pemanfaatan sumber daya; sosial, yang melihat pemerataan manfaat pembangunan dan peningkatan kualitas hidup; serta lingkungan, yang menekankan perlindungan ekosistem, pengelolaan limbah, dan adaptasi terhadap perubahan iklim.

Analisis ini merupakan hasil kajian bersama antara tim Universitas Gadjah Mada dan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2024. Kajian tersebut memetakan berbagai indikator yang dapat dijadikan acuan awal menuju penyusunan indeks ekonomi hijau di tingkat provinsi. Rincian faktor-faktor yang digunakan dalam klasifikasi keberlanjutan ditampilkan pada Tabel 2.89.

Tabel 2.89.Aspek-Aspek dan Komponen Keberlanjutan Perekonomian

Aspek	Komponen
Ekonomi	• Produktivitas lapangan usaha
	• Efisiensi penggunaan energi
	• Kontribusi pada perekonomian di sekitarnya
	• Efek pengganda yang dihasilkan
Sosial	• Kemampuan dalam meningkatkan kesejahteraan pekerja
	• Penyerapan tenaga kerja
	• Keterlibatan masyarakat dalam proses bisnis
Lingkungan	• Potensi degradasi lahan
	• Emisi gas rumah kaca yang dihasilkan
	• Luasan penggunaan lahan
	• Ketergantungan pada sumber energi tidak terbarukan
	• Efek negatif dirasakan oleh masyarakat sekitar akibat limbah yang dihasilkan

Sumber: RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah 2025.

Komponen-komponen keberlanjutan yang telah diidentifikasi kemudian diolah melalui metode statistik untuk menilai bobot atau kontribusi relatif masing-masing terhadap kondisi perekonomian Provinsi Kalimantan Tengah. Pendekatan ini memungkinkan penentuan seberapa besar pengaruh setiap faktor (baik dari dimensi ekonomi, sosial, maupun lingkungan) terhadap tingkat keberlanjutan keseluruhan. Hasil analisis kuantitatif tersebut memberikan gambaran menyeluruh mengenai profil keberlanjutan perekonomian Kalimantan Tengah, yang disajikan secara ringkas dalam Tabel 2.90.

Tabel 2.90. Kondisi Ekonomi Berkelanjutan di Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022

Kabupaten/Kota	PDRB (Miliar Rp)	PDRB Berkelanjutan (Miliar Rp)	Persentase Ekonomi Berkelanjutan per Aspek Terhadap PDRB (%)			
			Ekonomi Berkelanjutan	Aspek Ekonomi	Aspek Lingkungan	Aspek Sosial
Barito Selatan	4.602,95	1.886,02	41%	46%	29%	47%
Barito Timur	5.659,98	2.417,15	43%	51%	21%	56%
Barito Utara	7.597,87	3.277,00	43%	52%	21%	57%
Gunung Mas	4.050,9	1.598,42	39%	44%	27%	47%
Kapuas	12.102,2	4.846,30	40%	46%	25%	48%

Kabupaten/Kota	PDRB (Miliar Rp)	PDRB Berkelanjutan (Miliar Rp)	Persentase Ekonomi Berkelanjutan per Aspek Terhadap PDRB (%)			
			Ekonomi Berkelanjutan	Aspek Ekonomi	Aspek Lingkungan	Aspek Sosial
Katingan	5.374,98	2.077,97	39%	43%	29%	44%
Kotawaringin	14.559,33	5.672,14	39%	45%	27%	45%
Lamandau	4.224,7	1.694,67	40%	46%	24%	50%
Murung Raya	6.395	2.791,70	44%	53%	19%	59%
Palangka Raya	11.720,4	4.207,82	36%	37%	42%	30%
Pulang Pisau	3.765,49	1.442,93	38%	42%	29%	44%
Seruyan	6.275,4	2.517,44	40%	48%	22%	51%
Sukamara	3.214,2	1.263,35	39%	45%	26%	47%
Kalimantan Tengah	109.231,40	43.447,23	40%	46%	27%	47%

Sumber: RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah 2025.

Berdasarkan kondisi ekonomi berkelanjutan di kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2022, Kabupaten Barito Utara mencatatkan PDRB sebesar Rp7.597,87 miliar dengan PDRB berkelanjutan sebesar Rp3.277,00 miliar, yang menunjukkan bahwa sekitar 43% dari ekonomi Kabupaten Barito Utara dapat dianggap berkelanjutan. Dalam hal persentase ekonomi berkelanjutan per aspek, Kabupaten Barito Utara memiliki distribusi yang cukup seimbang, dengan 52% untuk aspek ekonomi, 21% untuk aspek lingkungan, dan 57% untuk aspek sosial.

Persentase ekonomi berkelanjutan pada aspek ekonomi yang mencapai 52% menunjukkan bahwa hampir setengah dari PDRB yang dihasilkan berasal dari sektor-sektor yang mendukung keberlanjutan ekonomi, seperti sektor industri yang tidak hanya mengandalkan sumber daya alam tetapi juga mencakup sektor jasa dan manufaktur. Hal ini mencerminkan upaya Kabupaten Barito Utara dalam mengembangkan perekonomian yang berbasis pada keberlanjutan dan tidak semata-mata bergantung pada eksploitasi sumber daya alam yang tidak terbarukan. Namun, meskipun sektor ekonomi memiliki kontribusi terbesar dalam hal ekonomi berkelanjutan, aspek lingkungan di Kabupaten Barito Utara menunjukkan kontribusi yang relatif rendah, yaitu hanya 21%. Angka ini lebih rendah dibandingkan dengan kabupaten lain seperti Kabupaten Barito Timur yang mencapai 27%, dan Kabupaten Kapuas yang mencatatkan angka 25%. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Barito Utara menunjukkan perkembangan yang pesat, pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan masih menjadi tantangan. Kabupaten ini menghadapi kesulitan dalam menyeimbangkan antara pengembangan ekonomi dan pelestarian alam, yang dapat

mempengaruhi kualitas lingkungan hidup dan keberlanjutan jangka panjang. Isu-isu seperti deforestasi, pengelolaan lahan yang buruk, serta dampak polusi dari sektor industri mungkin menjadi faktor yang menghambat kontribusi aspek lingkungan dalam pembangunan berkelanjutan.

Sementara itu, aspek sosial di Kabupaten Barito Utara menunjukkan kinerja yang sangat baik dengan kontribusi 57% terhadap ekonomi berkelanjutan. Ini merupakan persentase tertinggi jika dibandingkan dengan kabupaten lain di Provinsi Kalimantan Tengah, seperti Kabupaten Barito Selatan (47%), Kabupaten Barito Timur (56%), dan Kabupaten Kapuas (48%). Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan sosial di Kabupaten Barito Utara, yang mencakup aspek seperti pendidikan, kesehatan, kesejahteraan masyarakat, dan pengurangan kemiskinan, telah berjalan dengan baik. Masyarakat di daerah ini mendapat manfaat signifikan dari kebijakan sosial yang lebih inklusif, yang berfokus pada distribusi kesejahteraan yang lebih merata. Peningkatan dalam sektor sosial ini sangat penting, karena akan meningkatkan kualitas hidup penduduk dan menciptakan daya saing yang lebih baik dalam jangka panjang.

Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Kalimantan Tengah, Kabupaten Barito Utara memiliki kinerja yang baik dalam aspek sosial dan ekonomi berkelanjutan. Namun, masih ada ruang untuk perbaikan pada aspek lingkungan, yang perlu ditingkatkan untuk mencapai keseimbangan antara pengembangan ekonomi dan pelestarian alam. Misalnya, Kabupaten Barito Timur yang juga memiliki persentase yang tinggi pada sektor ekonomi (51%) dan sosial (56%) masih memiliki kontribusi lebih besar pada aspek lingkungan (27%). Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan lingkungan di Kabupaten Barito Utara harus menjadi prioritas dalam kebijakan pembangunan daerah. Di sisi lain, Kabupaten Kapuas, meskipun memiliki kontribusi besar dalam aspek ekonomi (46%), dan sosial (48%), juga menghadapi tantangan serupa dalam hal lingkungan, dengan hanya 25% kontribusi pada aspek lingkungan. Oleh karena itu, upaya memperbaiki sektor lingkungan di Kabupaten Barito Utara bisa mengikuti contoh dari kabupaten/kota yang lebih berhasil dalam mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan, seperti Kabupaten Barito Timur dan Kabupaten Murung Raya.

Kabupaten/kota lainnya seperti Kabupaten Gunung Mas dan Kota Palangka Raya menunjukkan kinerja yang lebih rendah dalam aspek sosial dan ekonomi berkelanjutan, dengan Kota Palangka Raya mencatatkan angka 36% pada aspek ekonomi dan 30% pada

aspek sosial, yang berarti kebijakan ekonomi dan sosial di ibu kota provinsi ini belum sepenuhnya mendukung pembangunan berkelanjutan. Secara keseluruhan, Kabupaten Barito Utara berada dalam posisi yang cukup baik dibandingkan dengan kabupaten/kota lain. Namun, masih memerlukan upaya ekstra untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip keberlanjutan lingkungan dalam kebijakan pembangunan daerah.



Gambar 2.34. Kondisi Ekonomi Berkelanjutan per Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah.

Berdasarkan Gambar 2.34 tersebut, Kabupaten Barito Utara memiliki potensi yang sangat baik dalam meningkatkan kesejahteraan sosial dan mengembangkan ekonomi berkelanjutan, tetapi pengelolaan lingkungan harus menjadi fokus kebijakan yang lebih serius. Hal ini penting untuk menciptakan pertumbuhan yang tidak hanya menguntungkan dari sisi ekonomi, tetapi juga memperhatikan keberlanjutan sumber daya alam dan kualitas hidup generasi mendatang. Kabupaten Barito Utara perlu lebih banyak berinvestasi dalam teknologi ramah lingkungan, pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan, serta kebijakan yang mendukung pengurangan dampak negatif terhadap lingkungan di masa yang akan datang.

Sejalan dengan hal di atas, rasio energi baru dan terbarukan dalam bauran energi primer Provinsi Kalimantan Tengah, khususnya Kabupaten Barito Utara juga menunjukkan perkembangan positif. Data dari Laporan Evaluasi RPJMD 2021–2026 menegaskan adanya kenaikan porsi energi terbarukan di wilayah ini sejak 2021 hingga 2024.

Mengingat peran Provinsi Kalimantan Tengah sebagai lumbung energi nasional, diperlukan langkah-langkah ekstra dan kolaborasi lintas pihak untuk memastikan target energi berkelanjutan pada periode berikutnya dapat tercapai. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2023 yang memberikan pendelegasian sebagian kewenangan pengembangan energi baru dan terbarukan kepada pemerintah provinsi menjadi peluang strategis. Kebijakan ini membuka ruang bagi pemerintah daerah untuk mempercepat pengembangan energi ramah lingkungan melalui kemitraan erat dengan pemerintah pusat.

Tabel 2.91.Capaian Bauran Energi Baru dan Energi Terbarukan di Provinsi Kalimantan Tengah

Tahun	Capaian
2021	7%
2022	9%
2023	Data tidak tersedia
2024	15,71%

Sumber: RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2029.

Berdasarkan Tabel 2.91 di atas, dapat dilihat perkembangan persentase kontribusi energi baru dan terbarukan terhadap total konsumsi energi di provinsi tersebut dari tahun 2021 hingga 2024. Data ini mencerminkan tren positif dalam adopsi energi baru dan terbarukan di Provinsi Kalimantan Tengah, dengan peningkatan yang jelas terlihat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2021, kontribusi energi baru dan terbarukan terhadap total bauran energi di provinsi ini adalah 7%. Meskipun angka ini terbilang masih rendah, namun langkah awal yang diambil pada tahun tersebut menunjukkan niat serius untuk beralih dari ketergantungan pada energi fosil menuju penggunaan sumber daya yang lebih ramah lingkungan. Angka 7% ini menjadi fondasi yang penting, karena menunjukkan bahwa provinsi mulai mengeksplorasi dan mengembangkan potensi energi terbarukan yang ada, baik itu energi surya, angin, hidro, maupun biomassa.

Pada tahun 2022, terjadi kenaikan capaian menjadi 9%, yang menunjukkan adanya kemajuan yang signifikan dalam sektor energi terbarukan. Peningkatan 2% ini tidak hanya menggambarkan kemajuan teknis dalam pengembangan sumber daya energi terbarukan, tetapi juga mencerminkan adanya kebijakan yang lebih mendalam dan keberhasilan dari inisiatif yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah. Peningkatan tersebut mungkin dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti peningkatan investasi di sektor energi terbarukan, peningkatan kesadaran masyarakat dan sektor industri mengenai pentingnya keberlanjutan, serta adanya dukungan lebih lanjut dari kebijakan energi yang bersifat progresif.

Pada tahun 2024, ada target capaian sebesar 15,71%, yang menunjukkan adanya ambisi besar untuk mempercepat adopsi energi terbarukan. Target yang hampir dua kali lipat dari capaian tahun 2021 ini menunjukkan bahwa Provinsi Kalimantan Tengah berusaha mengejar ketertinggalan dan berkomitmen untuk mewujudkan transisi energi yang lebih cepat. Target 15,71% ini menandakan bahwa pemerintah daerah dan masyarakat semakin menyadari pentingnya beralih ke energi terbarukan, baik dari sisi keamanan energi, pengurangan dampak perubahan iklim, maupun keberlanjutan ekonomi.

Namun, untuk mencapai target yang ambisius ini, pemerintah daerah perlu mengambil langkah-langkah yang lebih konkret dan berkelanjutan. Salah satunya adalah dengan memperkuat kebijakan energi terbarukan yang lebih komprehensif dan inklusif. Pemerintah harus menetapkan regulasi yang mendukung, seperti insentif pajak untuk perusahaan yang menginvestasikan dana di sektor energi terbarukan, subsidi untuk penelitian dan pengembangan teknologi energi bersih, serta peningkatan akses kepada pembiayaan hijau yang mendukung proyek-proyek energi terbarukan. Selain itu, pemerintah juga perlu bekerjasama dengan sektor swasta dan lembaga internasional untuk mengoptimalkan potensi sumber daya terbarukan yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah, seperti energi biomassa dari sektor kehutanan dan perkebunan, energi hidro dari sungai-sungai yang ada, dan energi surya yang memiliki potensi besar mengingat letak geografi daerah tersebut.

Selain kebijakan, penguatan infrastruktur juga menjadi faktor yang sangat penting untuk mencapai target tersebut. Pengembangan infrastruktur yang mendukung distribusi dan penggunaan energi terbarukan, seperti jaringan listrik pintar dan penyimpanan energi, harus menjadi prioritas. Tanpa infrastruktur yang memadai, pengembangan energi terbarukan akan terkendala, karena distribusi energi yang efisien dan akses yang merata ke seluruh wilayah sangat diperlukan untuk memastikan manfaat energi terbarukan dapat dirasakan oleh masyarakat luas.

Transisi ke energi terbarukan tidak hanya sekadar tentang pengembangan teknologi, tetapi juga tentang kesadaran masyarakat dan perubahan pola konsumsi energi. Oleh karena itu, edukasi tentang pentingnya penggunaan energi bersih, efisiensi energi, serta dampak negatif penggunaan energi fosil terhadap lingkungan perlu digalakkan. Masyarakat yang sadar akan pentingnya keberlanjutan akan lebih mendukung kebijakan pemerintah dan berpartisipasi dalam penggunaan energi terbarukan.

Secara keseluruhan, meskipun capaian energi terbarukan di Provinsi Kalimantan Tengah mengalami peningkatan yang signifikan, masih banyak tantangan yang perlu diatasi untuk memastikan transisi energi yang benar-benar berkelanjutan. Pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat perlu bekerja bersama-sama untuk mewujudkan tujuan ini. Dengan kebijakan yang tepat, dukungan infrastrukturnya, serta kesadaran yang semakin tinggi akan keberlanjutan lingkungan, Provinsi Kalimantan Tengah dapat mencapai target 15,71% pada tahun 2024 dan bahkan melampauinya dalam jangka panjang.

2.3.4. Transformasi Digital

Transformasi digital di Kabupaten Barito Utara merupakan langkah strategis yang ditempuh untuk menghadapi tantangan perkembangan teknologi yang semakin pesat dan untuk mendukung visi pembangunan daerah yang lebih efisien, transparan, dan berkelanjutan. Kabupaten Barito Utara telah menunjukkan komitmen besar dalam mempercepat adopsi teknologi digital di berbagai sektor pemerintahan dan kehidupan masyarakat. Sebagai daerah dengan luas wilayah yang cukup besar dan kondisi geografis yang bervariasi, transformasi digital menjadi sangat penting untuk meningkatkan konektivitas antar-perangkat daerah, memperluas akses informasi, dan mempermudah pelayanan publik.

Salah satu fokus utama dalam transformasi digital ini adalah peningkatan infrastruktur jaringan komunikasi dan informasi, yang bertujuan untuk mengatasi tantangan *blank spot* atau daerah yang belum terjangkau jaringan telekomunikasi melalui pembangunan menara telekomunikasi, pengadaan alat penguat sinyal, serta pengintegrasian jaringan antar-perangkat daerah. Pemerintah Kabupaten Barito Utara berupaya menjangkau seluruh wilayahnya, termasuk desa-desa yang selama ini sulit terakses. Upaya ini juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan informasi publik melalui saluran digital, seperti radio Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Batara FM yang kini sudah dapat mengakses masyarakat melalui *streaming* internet.

Transformasi digital ini juga mengedepankan keamanan data dan informasi yang dikelola oleh pemerintah. Dengan melibatkan teknologi informasi dalam proses administrasi dan pelayanan publik, keamanan data menjadi prioritas utama, sehingga perlindungan terhadap informasi sensitif yang dimiliki oleh instansi pemerintah dan masyarakat tetap terjaga. Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian (DiskominfoSandi) Kabupaten Barito Utara terus berusaha memastikan bahwa seluruh perangkat daerah dan masyarakat dapat merasakan manfaat dari layanan digital yang aman dan terpercaya.

Selain itu, pemberdayaan masyarakat juga menjadi bagian penting dalam transformasi digital ini. Pengembangan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di tingkat kecamatan diharapkan dapat menjadi agen perubahan (*agent of change*) yang mendorong kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya penggunaan teknologi untuk kehidupan sehari-hari, serta mempercepat adopsi teknologi dalam kehidupan sosial dan ekonomi.

2.3.4.1. *Blank Spot* di Kabupaten Barito Utara

Salah satu tantangan besar yang dihadapi oleh Kabupaten Barito Utara dalam upaya mempercepat transformasi digital adalah masalah *blank spot*, yaitu daerah-daerah yang belum terjangkau oleh jaringan telekomunikasi dan internet. *Blank spot* menjadi hambatan signifikan dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, khususnya dalam hal akses terhadap informasi, layanan publik, pendidikan, serta pembangunan ekonomi berbasis digital. Sebagai daerah dengan luas wilayah yang besar dan kondisi geografis yang beragam, Kabupaten Barito Utara mengalami kesulitan dalam menyediakan infrastruktur telekomunikasi yang merata, terutama di wilayah pedalaman dan daerah yang sulit dijangkau.

Penyebaran *blank spot* di Kabupaten Barito Utara tercatat cukup tinggi pada beberapa tahun terakhir, dengan sejumlah desa di wilayah terjauh, seperti Kecamatan Gunung Purei, masih mengalami kekurangan akses jaringan telekomunikasi. Dalam upaya mengatasi masalah ini, Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian Kabupaten Barito Utara telah melakukan berbagai langkah strategis. Salah satu langkah utama adalah dengan mengadakan alat penguat sinyal (*repeater*) di beberapa titik yang sebelumnya tidak terjangkau sinyal. Selain itu, pembangunan menara telekomunikasi (*Base Transceiver Station/BTS*) menjadi salah satu solusi jangka panjang yang diharapkan dapat menghilangkan *blank spot* secara bertahap.

Pada tahun 2023, berdasarkan evaluasi yang dilakukan, capaian pengurangan *blank spot* mencapai 94,18%, dengan hanya 6 desa yang masih mengalami *blank spot*. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan dibandingkan dengan tahun 2022, meskipun masih ada wilayah yang tertinggal. Keberadaan desa-desa yang masih terkendala sinyal, seperti Desa Baok, Desa Linon Besi I, dan Desa Tanjung Harapan Kecamatan Gunung Purei, memerlukan perhatian lebih untuk memastikan akses telekomunikasi yang merata dan berkualitas di seluruh wilayah.

Pembangunan menara BTS yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Utara, melalui kerjasama dengan beberapa operator telekomunikasi, seperti PT Centratama

Menara Telekomunikasi dan PT Protelindo, juga diharapkan dapat mengatasi *blank spot* di wilayah-wilayah yang paling terisolasi. Beberapa desa yang telah memperoleh akses jaringan telekomunikasi, seperti Desa Benangin I Kecamatan Teweh Timur dan Desa Tawan Jaya Kecamatan Teweh Selatan, menunjukkan hasil positif, di mana masyarakat kini dapat menikmati sinyal yang lebih stabil dan dapat mengakses internet untuk berbagai keperluan, mulai dari pendidikan hingga layanan pemerintahan.

Namun, tantangan terbesar yang masih dihadapi adalah pembangunan menara BTS di daerah-daerah yang belum terjangkau sinyal dan masih terkendala oleh faktor geografis, seperti medan yang sulit dan keterbatasan anggaran. Proses pengadaan menara telekomunikasi yang memerlukan waktu panjang dan koordinasi dengan pemerintah pusat serta operator seluler menjadi salah satu kendala dalam mempercepat penyelesaian *blank spot* di Kabupaten Barito Utara.

Di sisi lain, untuk mengatasi kendala *blank spot* sementara waktu, pemerintah daerah juga memanfaatkan penguatan sinyal dengan alat penguat sinyal yang dapat memperluas jangkauan telekomunikasi di wilayah desa. Meskipun solusi ini bersifat sementara, namun pengadaan alat ini sudah memberikan manfaat signifikan dengan meningkatnya akses komunikasi bagi masyarakat di wilayah tersebut.

Berdasarkan sasaran strategis untuk mengurangi *blank spot* di desa dan kelurahan, Pemerintah Kabupaten Barito Utara menargetkan penyelesaian masalah akses telekomunikasi di wilayah yang belum terjangkau jaringan. Pada tahun 2023, capaian pencapaian *blank spot* mencapai 94,18%, yang berarti dari total 103 desa/kelurahan yang ada di Kabupaten Barito Utara, hanya 6 desa yang masih mengalami kesulitan dalam mengakses sinyal telekomunikasi yang stabil (Diskominfosandi, 2025). Ini merupakan kemajuan yang signifikan dibandingkan dengan kondisi tahun 2022, di mana lebih banyak wilayah yang mengalami keterbatasan akses telekomunikasi. Meskipun capaian tahun 2023 menunjukkan hasil yang positif, masih terdapat desa-desa yang berada di wilayah terpencil dan geografis yang sulit dijangkau, seperti desa-desa di Kecamatan Gunung Purei, yang membutuhkan perhatian lebih dalam hal penyediaan infrastruktur telekomunikasi.

Untuk mencapai target 0% *blank spot* pada tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Barito Utara telah merencanakan berbagai langkah strategis, seperti pembangunan menara telekomunikasi tambahan, pemasangan alat penguat sinyal (*repeater*), serta kerjasama dengan operator seluler untuk memastikan bahwa seluruh wilayah dapat terhubung dengan

jaringan yang stabil. Salah satu upaya yang juga penting adalah penyediaan akses internet di desa-desa yang belum terjangkau, yang nantinya dapat mendukung pemerintahan berbasis digital, layanan publik yang lebih efisien, serta meningkatkan kualitas pendidikan dan ekonomi melalui teknologi.

2.3.4.2. Pembangunan Menara *Base Transceiver Station*

Salah satu langkah strategis yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten Barito Utara untuk mengatasi masalah *blank spot* adalah dengan pembangunan menara BTS (*Base Transceiver Station*). Menara BTS ini merupakan komponen kunci dalam infrastruktur telekomunikasi yang memungkinkan pengiriman sinyal komunikasi, baik untuk telepon seluler maupun internet, ke wilayah-wilayah yang sebelumnya tidak terjangkau. Dengan dibangunnya menara BTS, diharapkan akses jaringan telekomunikasi dapat diperluas, terutama di daerah-daerah yang terisolasi dan memiliki medan geografis yang sulit dijangkau, seperti di kecamatan-kecamatan terpencil di Kabupaten Barito Utara.

Pada tahun 2023, pemerintah daerah melalui kerjasama dengan beberapa penyedia layanan telekomunikasi, seperti PT Centratama Menara Telekomunikasi, PT Protelindo, dan PT Tower Bersama telah berhasil mendirikan sejumlah menara BTS yang telah beroperasi dan memberikan manfaat signifikan bagi masyarakat. Pembangunan menara BTS ini bertujuan untuk mengurangi *blank spot* di desa-desa yang sebelumnya tidak memiliki akses telekomunikasi yang stabil. Menara BTS yang telah didirikan di beberapa lokasi, seperti di Desa Benangin I Kecamatan Teweh Timur, Desa Tawan Jaya Kecamatan Teweh Selatan, dan Desa Montallat Kecamatan Montallat, kini mulai mendapatkan sinyal yang lebih kuat, memungkinkan masyarakat setempat untuk dapat mengakses internet, melakukan komunikasi, dan memanfaatkan berbagai layanan digital lainnya.

Namun, pembangunan menara BTS tidak tanpa tantangan. Beberapa kendala utama yang dihadapi dalam proyek ini adalah faktor geografis, di mana beberapa daerah yang berada di kawasan pegunungan atau hutan tropis memiliki medan yang sulit dan jarak yang jauh dari pusat kota, yang membuat proses pembangunan menjadi lebih kompleks dan memakan waktu. Selain itu, perizinan dan koordinasi dengan pemerintah pusat dan operator telekomunikasi juga menjadi bagian dari proses yang harus dipenuhi sebelum menara BTS dapat didirikan. Beberapa desa yang terisolasi membutuhkan pembangunan infrastruktur yang lebih besar, seperti jalan akses dan fasilitas pendukung lainnya, agar menara BTS dapat berfungsi secara optimal.

Pembangunan menara BTS di Kabupaten Barito Utara juga sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat dalam meningkatkan infrastruktur telekomunikasi di seluruh Indonesia, terutama di daerah-daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar). Pemerintah pusat melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) telah mengalokasikan anggaran untuk mendukung pembangunan BTS di daerah-daerah *blank spot*, termasuk di Kabupaten Barito Utara. Beberapa desa yang sebelumnya tidak mendapatkan akses jaringan telekomunikasi kini dapat menikmati layanan internet dengan lebih baik, yang tentunya akan memberikan dampak positif pada akses informasi, pendidikan, ekonomi, serta pelayanan publik.

2.3.4.3. Penyebaran Informasi Daerah di Kabupaten Barito Utara

Penyebaran informasi yang efektif dan efisien merupakan salah satu aspek krusial dalam pembangunan daerah, termasuk di Kabupaten Barito Utara. Seiring dengan perkembangan teknologi digital, upaya penyebaran informasi daerah juga semakin bergantung pada media digital dan *platform* komunikasi yang lebih modern. Pemerintah Kabupaten Barito Utara menyadari pentingnya untuk menyediakan akses informasi yang cepat dan tepat bagi masyarakat untuk mendukung berbagai sektor kehidupan, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga pembangunan infrastruktur.

Salah satu alat utama yang digunakan dalam penyebaran informasi adalah LPPL Batara FM, sebuah stasiun radio milik pemerintah daerah yang memiliki peran strategis dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Pada tahun 2023, LPPL Batara FM berhasil mencapai target 100% dalam hal penyebaran informasi daerah kepada masyarakat, yang menunjukkan keberhasilan dalam menyediakan saluran informasi yang mudah diakses oleh seluruh kalangan/lapisan masyarakat.

Penyebaran informasi melalui radio LPPL Batara FM bukan hanya terbatas pada program siaran biasa, tetapi juga mencakup siaran berita pemerintah, informasi pembangunan, pendidikan, serta hiburan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Dengan menggunakan media *streaming* melalui *website* dan *platform* media sosial seperti *Facebook*, *Instagram*, serta *WhatsApp*, LPPL Batara FM telah berhasil memperluas jangkauannya, sehingga informasi tidak hanya dapat diakses melalui radio konvensional tetapi juga melalui perangkat digital seperti komputer, ponsel pintar, dan tablet. Ini memberikan kemudahan bagi masyarakat, baik yang berada di daerah perkotaan maupun di daerah pedalaman yang mungkin kesulitan mengakses layanan media lainnya.

Salah satu tantangan utama yang dihadapi dalam penyebaran informasi adalah keterbatasan infrastruktur internet di beberapa wilayah yang masih mengalami *blank spot*. Meskipun upaya telah dilakukan untuk membangun menara telekomunikasi dan alat penguat sinyal di berbagai daerah, masih ada beberapa wilayah yang kesulitan dalam mengakses internet, sehingga membatasi potensi penyebaran informasi secara digital. Untuk mengatasi hal ini, LPPL Batara FM juga tetap mengandalkan penyiaran melalui frekuensi radio untuk menjangkau daerah-daerah yang belum terjangkau oleh internet.

Pada tahun 2023, dengan adanya IP Permanen yang diperoleh LPPL Batara FM dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), LPPL Batara FM mendapatkan pengakuan yang lebih besar dalam penyiaran publik lokal. Hal ini membuka peluang lebih luas bagi pemerintah daerah untuk menyebarluaskan informasi penting, seperti kebijakan pemerintah, informasi bencana, dan lainnya. Selain itu, masyarakat kini dapat lebih aktif berpartisipasi dalam diskusi dan program-program interaktif yang diselenggarakan oleh LPPL ini.

Penyebaran informasi daerah yang optimal juga didorong dengan adanya kerjasama antara Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian Kabupaten Barito Utara dengan berbagai pihak terkait, termasuk operator telekomunikasi dan lembaga penyiaran lainnya. Selain radio, pemerintah daerah juga memanfaatkan berbagai *platform* digital, seperti *website* resmi pemerintah, aplikasi *mobile*, dan akun media sosial untuk menyampaikan informasi yang lebih mendalam dan tepat waktu. Dengan adanya berbagai saluran komunikasi ini, diharapkan informasi yang sampai kepada masyarakat lebih komprehensif, relevan, dan bermanfaat untuk mendukung berbagai aktivitas sosial dan ekonomi daerah.

Pemerintah Kabupaten Barito Utara juga terus mendorong partisipasi masyarakat dalam menggunakan media informasi ini untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah. Melalui penyebaran informasi yang tepat, diharapkan masyarakat dapat lebih mudah mengakses layanan publik, terlibat dalam proses pembangunan, serta mendapatkan informasi terkini tentang program-program pemerintah yang berdampak langsung pada kehidupan mereka.

2.3.4.4. Konektivitas Jaringan Komunikasi antar Organisasi Pemerintah

Konektivitas jaringan komunikasi antar organisasi pemerintah merupakan salah satu komponen penting dalam mendukung efisiensi administrasi pemerintahan dan pelayanan

publik di Kabupaten Barito Utara. Dalam era digital saat ini, komunikasi yang cepat dan efektif antar perangkat daerah sangat diperlukan untuk memastikan koordinasi yang baik dalam melaksanakan berbagai program dan kebijakan. Tanpa adanya konektivitas yang memadai, proses pengambilan keputusan dapat terhambat, dan implementasi kebijakan menjadi kurang optimal. Oleh karena itu, peningkatan konektivitas jaringan antar organisasi pemerintah menjadi prioritas utama dalam transformasi digital di Kabupaten Barito Utara.

Pada tahun 2023, pemerintah Kabupaten Barito Utara menargetkan 100% konektivitas jaringan komunikasi antar perangkat daerah, dengan realisasi 78,38%. Meskipun capaian ini menunjukkan adanya kemajuan signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, masih terdapat beberapa perangkat daerah yang belum sepenuhnya terhubung dalam satu jaringan komunikasi yang terintegrasi. Namun, pencapaian ini menggambarkan upaya yang terus dilakukan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian Kabupaten Barito Utara dalam meningkatkan kualitas jaringan komunikasi antar perangkat daerah.

Salah satu cara yang ditempuh untuk mencapai konektivitas yang lebih baik adalah dengan pengadaan peralatan jaringan, seperti *fiber optic* (FO), tiang, serta kabel jaringan yang dibentangkan antar perangkat daerah. Penggunaan *fiber optic* sebagai media transmisi data memiliki keunggulan dalam hal kecepatan dan stabilitas koneksi, yang sangat mendukung kelancaran komunikasi antar organisasi pemerintah. Pemasangan tiang dan kabel *fiber optic* dilakukan secara bertahap, dimulai dari perangkat daerah yang lebih sentral, kemudian diperluas ke wilayah kecamatan dan perangkat daerah lainnya.

Selain itu, pemerintah Kabupaten Barito Utara juga berupaya mengintegrasikan sistem informasi antar perangkat daerah, sehingga data dan informasi yang dihasilkan oleh setiap instansi dapat saling terhubung dalam satu *platform* yang terpadu. Integrasi ini bertujuan untuk mempermudah aliran informasi, mengurangi birokrasi yang berlebihan, dan memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih cepat dan berbasis data. Misalnya, sistem informasi yang dapat menghubungkan Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum, dan Dinas Sosial dalam satu jaringan dapat mempercepat koordinasi terkait dengan program-program lintas sektor.

Konektivitas yang baik juga mempengaruhi transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan daerah. Dengan adanya jaringan komunikasi yang terhubung antar perangkat daerah, masyarakat dapat lebih mudah mendapatkan informasi mengenai kebijakan dan layanan publik yang ada. Selain itu, perangkat daerah yang terhubung dapat saling memantau

dan mengawasi kinerja masing-masing, sehingga dapat mengurangi potensi penyalahgunaan wewenang dan meningkatkan efektivitas pelayanan publik.

Namun, pencapaian 78,38% konektivitas pada tahun 2023 menunjukkan bahwa masih ada tantangan yang harus dihadapi, terutama terkait dengan kendala geografis dan keterbatasan anggaran. Daerah-daerah yang terletak di kawasan pegunungan atau hutan, seperti Kecamatan Gunung Purei dan Kecamatan Montallat, memiliki akses terbatas untuk pengembangan infrastruktur jaringan yang memadai. Oleh karena itu, diperlukan solusi kreatif, seperti penggunaan satelit atau jaringan nirkabel yang lebih fleksibel untuk menjangkau wilayah-wilayah tersebut.

Pemerintah Kabupaten Barito Utara berencana untuk meningkatkan kapasitas dan cakupan jaringan komunikasi antar perangkat daerah dengan memastikan bahwa seluruh kecamatan dan perangkat daerah dapat terhubung dalam satu sistem yang terintegrasi. Hal ini tidak hanya akan meningkatkan efisiensi administrasi, tetapi juga mempercepat pelayanan publik kepada masyarakat. Selain itu, pemerintah daerah juga akan terus berupaya untuk memperkuat keamanan jaringan, agar data dan informasi yang dipertukarkan antar perangkat daerah tetap terlindungi dari potensi ancaman *cyber* yang semakin kompleks.

2.3.4.5. Keamanan Layanan Informasi Organisasi Perangkat Daerah

Keamanan layanan informasi organisasi perangkat daerah (OPD) merupakan salah satu aspek kritis dalam transformasi digital di Kabupaten Barito Utara. Seiring dengan semakin berkembangnya penggunaan teknologi informasi dalam pemerintahan, perlindungan terhadap data dan informasi yang dikelola oleh pemerintah menjadi sangat penting. Keamanan data tidak hanya berkaitan dengan melindungi informasi sensitif dan pribadi, tetapi juga dengan menjaga integritas, kerahasiaan, dan ketersediaan data yang digunakan oleh perangkat daerah untuk mendukung pengambilan keputusan yang berbasis data.

Pada tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Barito Utara berhasil mencapai 100% keamanan layanan informasi untuk perangkat daerah, sebuah pencapaian yang sangat signifikan. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa seluruh perangkat daerah yang ada di Kabupaten Barito Utara telah berhasil mengimplementasikan langkah-langkah pengamanan data yang tepat guna melindungi informasi yang sensitif dan mencegah potensi kebocoran data atau serangan siber. Hal ini tentunya sejalan dengan upaya pemerintah untuk

meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan berbasis teknologi.

Untuk memastikan keamanan informasi, Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian Kabupaten Barito Utara telah mengimplementasikan berbagai sistem proteksi yang mencakup teknologi canggih dalam kriptografi, *firewall*, dan sistem deteksi intrusi untuk mencegah akses yang tidak sah. Salah satu bentuk proteksi yang dilakukan adalah penggunaan persandian (*encryption*) pada data penting yang dipertukarkan antar perangkat daerah, serta penerapan protokol keamanan yang ketat dalam komunikasi dan pengolahan data. Sistem ini memastikan bahwa hanya pihak yang berwenang yang dapat mengakses dan memodifikasi informasi yang sensitif.

Selain itu, salah satu langkah penting dalam menjaga keamanan informasi adalah penggunaan alat *jammer* yang digunakan untuk mengamankan data saat berlangsungnya kegiatan yang penting dan bersifat tertutup. Penggunaan alat ini dilakukan dengan pengawasan ketat dari Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian yang memiliki sertifikasi dalam pengoperasian alat tersebut. Sebelum penggunaan alat *jammer*, perangkat daerah harus mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian untuk memastikan penggunaan yang tepat dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Keamanan data juga mencakup aspek pengelolaan akses. Pemerintah daerah telah menerapkan kebijakan untuk memastikan bahwa hanya pegawai atau pihak yang memiliki otorisasi yang dapat mengakses data tertentu. Sistem hak akses terbatas (*access control*) diterapkan pada berbagai *platform* digital yang digunakan oleh perangkat daerah, seperti aplikasi manajemen keuangan, sistem informasi kesehatan, dan data pendidikan. Selain itu, pelatihan dan pembinaan mengenai kesadaran keamanan siber juga diberikan kepada pegawai untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang pentingnya menjaga kerahasiaan data serta mencegah potensi serangan siber yang dapat merusak reputasi dan integritas pemerintahan.

Meskipun telah mencapai 100% keamanan layanan informasi, tantangan terkait dengan ancaman keamanan siber tetap ada. Serangan siber yang semakin canggih, seperti *phishing*, *ransomware*, dan *DDoS attacks* memerlukan kesiapsiagaan yang terus-menerus dalam hal pembaruan sistem keamanan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang teknologi informasi. Oleh karena itu, Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian



Kabupaten Barito Utara terus memperbaiki infrastruktur keamanan digital dan melakukan audit keamanan secara berkala untuk memastikan sistem yang ada tetap terjaga dari potensi ancaman yang baru.

2.3.4.6. Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan

Pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di tingkat kecamatan merupakan salah satu inisiatif penting dalam upaya mempercepat adopsi teknologi informasi dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan di Kabupaten Barito Utara. KIM merupakan sebuah wadah yang dibentuk untuk mengorganisir masyarakat dalam memanfaatkan dan menyebarkan informasi, terutama terkait dengan kebijakan publik, pembangunan daerah, dan isu-isu sosial-ekonomi lainnya. Melalui KIM, diharapkan masyarakat dapat memperoleh akses yang lebih baik terhadap informasi, sehingga mereka dapat berperan aktif dalam mendukung kemajuan daerah.

Pada tahun 2023, Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian Kabupaten Barito Utara telah menetapkan target 100% pengembangan dan pemberdayaan KIM di tingkat kecamatan. Dari total sembilan kecamatan yang ada, sebanyak enam kecamatan telah berhasil membentuk KIM, sementara tiga kecamatan lainnya masih dalam proses pengembangan. Pencapaian ini menunjukkan adanya progres yang positif dalam hal pemberdayaan masyarakat, meskipun masih ada tantangan dalam mempercepat pembentukan KIM di beberapa kecamatan yang terletak di daerah yang lebih terpencil.

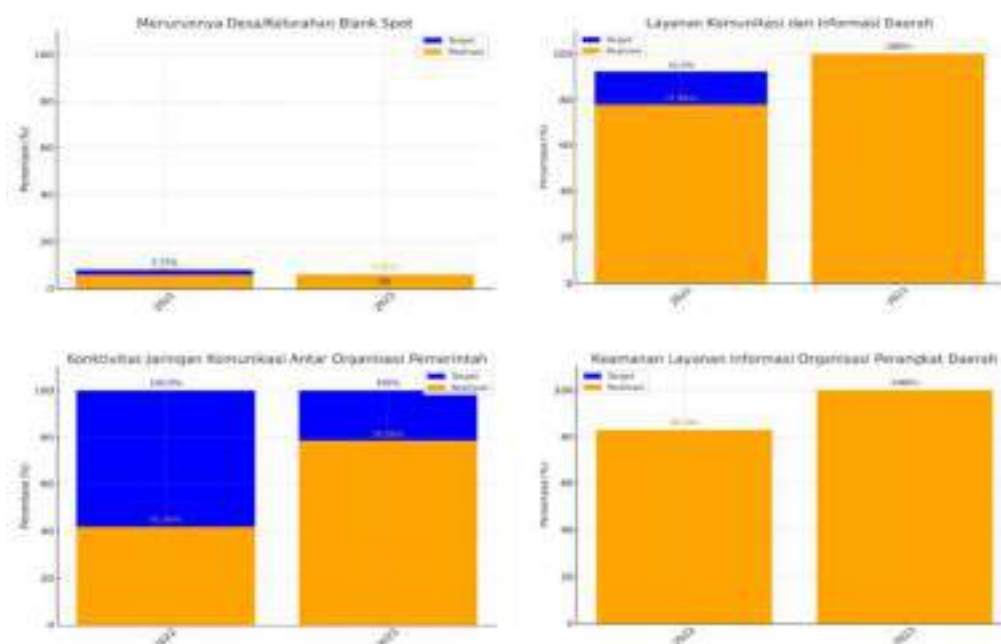
Keberhasilan dalam membentuk KIM di beberapa kecamatan, seperti Kecamatan Teweh Tengah, Kecamatan Teweh Selatan, Kecamatan Lahei, dan Kecamatan Gunung Purei, telah membuka peluang bagi masyarakat untuk lebih terlibat dalam proses penyebaran informasi yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah daerah. KIM berfungsi sebagai jembatan antara pemerintah dan masyarakat dalam hal pertukaran informasi. Selain itu, kelompok ini juga berperan penting dalam mempercepat penyebaran informasi terkait program-program pemerintah seperti program pembangunan infrastruktur, kegiatan sosial, dan pelayanan kesehatan.

Dalam upaya pengembangan KIM, Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian Kabupaten Barito Utara tidak hanya fokus pada pembentukan kelompok, tetapi juga menyediakan berbagai pelatihan dan *workshop* kepada anggota KIM untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam memanfaatkan teknologi informasi. Pelatihan ini mencakup

penggunaan perangkat teknologi, pengelolaan informasi, dan keterampilan dalam menggunakan media sosial dan *platform* digital lainnya untuk menyebarkan informasi kepada masyarakat. Dengan adanya pelatihan ini, anggota KIM diharapkan dapat lebih proaktif dalam mendukung proses pemberdayaan digital di tingkat kecamatan.

Namun, tantangan utama dalam pengembangan KIM adalah keterbatasan akses internet di beberapa wilayah kecamatan yang masih mengalami masalah *blank spot* atau konektivitas yang rendah. Meskipun telah ada usaha untuk mengatasi *blank spot* melalui pembangunan menara BTS dan pengadaan alat penguat sinyal, masih ada beberapa daerah yang belum sepenuhnya terjangkau jaringan telekomunikasi yang stabil. Hal ini menjadi hambatan dalam pengembangan KIM yang sangat bergantung pada akses internet dan teknologi digital untuk mengakses dan menyebarkan informasi.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, pemerintah Kabupaten Barito Utara berencana untuk terus memperluas cakupan jaringan telekomunikasi dan memperkenalkan solusi alternatif, seperti penggunaan radio komunitas atau *broadcasting* melalui *platform* lain, agar informasi tetap dapat disebarkan meskipun konektivitas internet terbatas. Penggunaan media tradisional seperti radio juga dapat menjadi solusi untuk mencakup masyarakat di daerah yang sulit dijangkau oleh internet.



Gambar 2.35. Target dan Realisasi Transformasi Digital Kabupaten Barito Utara.

2.3.5. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global

Integrasi ekonomi domestik dan global membuka pembahasan tentang bagaimana perekonomian Kabupaten Barito Utara terkoneksi ke dua arena sekaligus: pasar dalam negeri yang menyerap *output* dan menyediakan *input*, serta pasar luar negeri yang menjadi sumber permintaan tambahan dan tekanan daya saing. Integrasi ini bekerja melalui dua saluran utama. Di sisi hulu, investasi memperluas kapasitas produksi, memperbaiki efisiensi, dan mendorong adopsi teknologi sehingga struktur penawaran daerah menjadi lebih tangguh. Di sisi hilir, ekspor menerjemahkan kapasitas tersebut ke dalam penerimaan devisa dan skala pasar yang lebih besar, sekaligus menjadi *barometer* keunggulan kompetitif produk daerah.

Data pengeluaran PDRB 2020-2024 menunjukkan keduanya saling bertaut. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) yang meningkat dari tahun ke tahun memperkuat basis produksi, sementara ekspor yang proporsinya terhadap PDRB sangat besar menandakan kedalaman keterhubungan antara Kabupaten Barito Utara dengan perdagangan lintas wilayah dan lintas negara. Dalam konteks ini, analisis investasi dan ekspor tidak berdiri sendiri, melainkan menjadi pasangan yang menentukan ritme pertumbuhan, *transmisi* guncangan eksternal, dan ruang kebijakan daerah ke depan.

2.3.5.1. Investasi sebagai Faktor Pendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Investasi memainkan peran yang sangat vital dalam perekonomian suatu daerah, karena menjadi sumber utama pembiayaan bagi berbagai sektor yang mendukung kegiatan ekonomi. Dalam konteks pembangunan daerah, investasi tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk memperbaiki infrastruktur, tetapi juga untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan memperkuat daya saing ekonomi.

Investasi dapat berupa modal yang ditanamkan oleh pemerintah maupun sektor swasta dalam bentuk pembelian aset tetap, pembangunan fasilitas, serta pengembangan teknologi dan inovasi. Dengan adanya investasi yang cukup, suatu daerah dapat meningkatkan kapasitas produksinya, menciptakan lapangan kerja baru, dan pada akhirnya mendorong kesejahteraan masyarakat.

Salah satu bentuk investasi yang sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi daerah adalah PMTB mencakup seluruh investasi yang dilakukan dalam pembelian atau pembangunan aset tetap, seperti gedung, jalan, mesin, dan peralatan lainnya yang digunakan untuk kegiatan produksi dan operasional. Berbeda dengan bentuk investasi lainnya, PMTB

lebih terfokus pada investasi dalam hal infrastruktur fisik yang berfungsi mendukung aktivitas perekonomian jangka panjang. Investasi dalam PMTB sangat penting karena dapat meningkatkan kapasitas produksi dan efisiensi ekonomi suatu daerah, serta berkontribusi pada penciptaan nilai tambah dalam berbagai sektor. Tanpa adanya investasi dalam modal tetap, sektor-sektor ekonomi tidak akan berkembang secara optimal, yang pada gilirannya menghambat kemajuan ekonomi daerah.

Di Kabupaten Barito Utara, PMTB menjadi salah satu indikator utama dalam mengukur perkembangan investasi dan pertumbuhan ekonomi. Pemantauan terhadap PMTB sangat penting untuk mengetahui seberapa besar investasi yang ditanamkan dalam bentuk aset tetap yang dapat berkontribusi pada daya saing ekonomi daerah. Melalui PMTB, dapat dilakukan penilaian terhadap besaran total investasi yang terjadi, struktur, dan distribusi dari investasi tersebut, baik yang diarahkan pada pembangunan infrastruktur (seperti bangunan) maupun pada sektor non-bangunan (seperti mesin dan peralatan). Dengan memahami komposisi dan perkembangan PMTB, pemerintah daerah dapat merumuskan kebijakan yang lebih efektif dalam merangsang investasi di sektor-sektor yang paling strategis untuk pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Investasi dalam PMTB dapat dijadikan sebagai *barometer* keberhasilan perekonomian suatu daerah, terutama dalam menciptakan iklim yang kondusif bagi sektor industri dan jasa. Di Kabupaten Barito Utara, data mengenai PMTB disajikan dalam dua format yang berbeda, yakni ADHB (Atas Dasar Harga Berlaku) dan ADHK 2010 (Atas Dasar Harga Konstan 2010). Format ADHB mencatatkan nilai PMTB berdasarkan harga yang berlaku pada setiap tahun, tanpa mempertimbangkan faktor inflasi, sementara ADHK 2010 mengoreksi data tersebut dengan mempertimbangkan harga konstan tahun 2010, untuk memberikan gambaran yang lebih realistis mengenai volume investasi yang sebenarnya, bebas dari pengaruh fluktuasi harga.

Pentingnya kedua format ini terletak pada kemampuannya untuk memberikan dua perspektif berbeda dalam mengukur investasi. ADHB akan memberikan gambaran seberapa besar nilai PMTB yang tercatat berdasarkan kondisi harga di masing-masing tahun, namun angka ini bisa dipengaruhi oleh inflasi atau perubahan harga barang dan jasa. Sedangkan ADHK 2010 lebih memberikan gambaran yang lebih objektif tentang perubahan nyata dalam jumlah investasi yang terjadi, dengan menyesuaikan angka-angka tersebut dengan harga yang konstan pada tahun 2010. Oleh karena itu, kedua format ini saling melengkapi dan

memberikan pandangan yang lebih komprehensif mengenai keadaan perekonomian daerah dari tahun ke tahun. Secara rinci pembentukan modal tetap dari tahun 2020 sampai 2024 di Kabupaten Barito Utara disajikan pada Tabel 2.92.

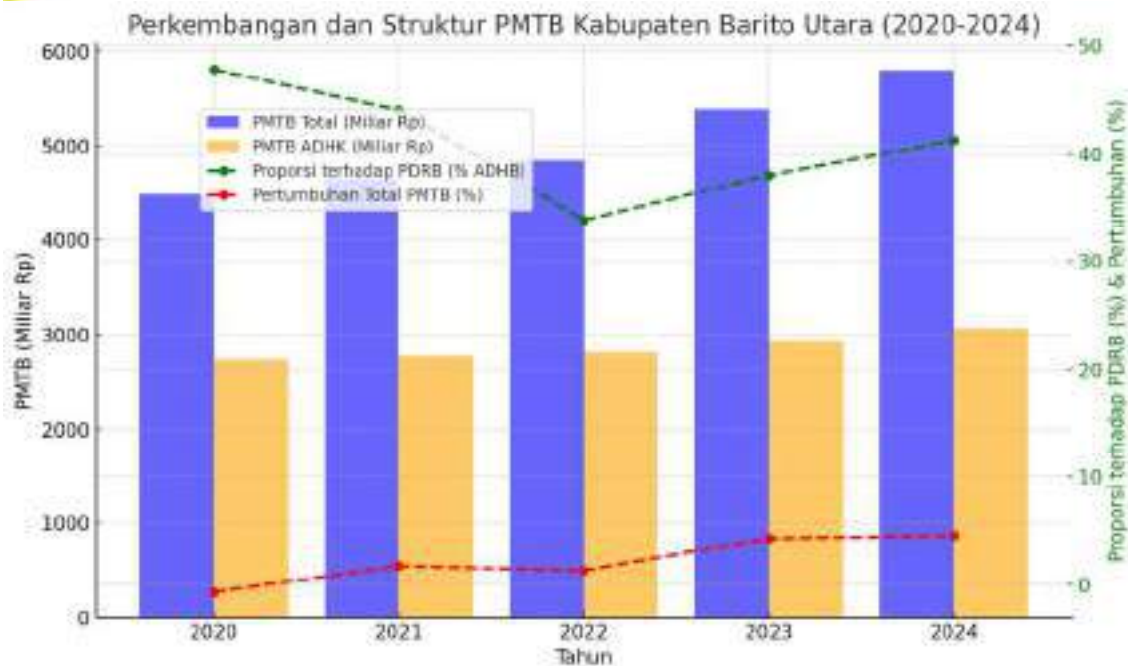
Tabel 2.92.Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)

Tahun	ADHB (Miliar Rp)	ADHK 2010 (Miliar Rp)
2020	4,492.3	2,735.6
2021	4,661.3	2,781.5
2022	4,847.2	2,816.9
2023	5,396.7	2,936.5
2024	5,794.4	3,068.4

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Utara, 2025.

Berdasarkan data yang tersaji pada Tabel 2.92 di atas, dapat dijelaskan bahwa PMTB di Kabupaten Barito Utara menunjukkan *tren* peningkatan yang konsisten selama periode 2020 hingga 2024, baik berdasarkan nilai ADHB maupun ADHK 2010. Hal ini menggambarkan adanya peningkatan yang signifikan dalam investasi modal tetap yang dilakukan di daerah tersebut.

PMTB merupakan indikator utama yang mencerminkan seberapa besar kontribusi investasi dalam bentuk aset tetap seperti bangunan, mesin, dan peralatan yang digunakan untuk mendukung kegiatan ekonomi. Dengan demikian, meningkatnya PMTB menunjukkan adanya perkembangan positif dalam perekonomian daerah, yang didorong oleh peningkatan kapasitas produksi dan pengembangan infrastruktur.



Gambar 2.36. Perkembangan dan struktur Pmbentukan Modal Tetap Bruto Kabupaten Barito Utara Tahun 2020-2024.

Pada tahun 2020, nilai PMTB berdasarkan ADHB tercatat sebesar Rp4.492,3 miliar, yang kemudian mengalami kenaikan setiap tahunnya hingga mencapai Rp5.794,4 miliar pada tahun 2024. Kenaikan yang signifikan ini menunjukkan adanya komitmen yang lebih besar dalam melakukan investasi dalam modal tetap, yang tentunya berperan penting dalam pengembangan sektor-sektor ekonomi yang ada di Kabupaten Barito Utara. Peningkatan ini mencerminkan upaya pemerintah daerah dan sektor swasta dalam membangun infrastruktur yang dibutuhkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, termasuk pembangunan fasilitas publik dan sektor-sektor lainnya yang mendukung keberlanjutan ekonomi.

Sementara itu, jika dilihat dari sisi ADHK 2010, yang memberikan gambaran lebih realistis mengenai volume investasi dengan mempertimbangkan *inflasi*, nilai PMTB pada tahun 2020 tercatat Rp2.735,6 miliar, dan meningkat menjadi Rp3.068,4 miliar pada tahun 2024. Peningkatan yang tercatat pada ADHK 2010 ini menunjukkan bahwa, meskipun ada perubahan harga, volume investasi yang dilakukan di daerah tersebut menunjukkan *tren* yang stabil dan berkembang. Ini mengindikasikan bahwa meskipun harga barang dan jasa mengalami perubahan, tingkat investasi yang sesungguhnya dalam “modal tetap” tetap meningkat, yang menandakan adanya peningkatan kapasitas produksi dan daya saing ekonomi daerah.

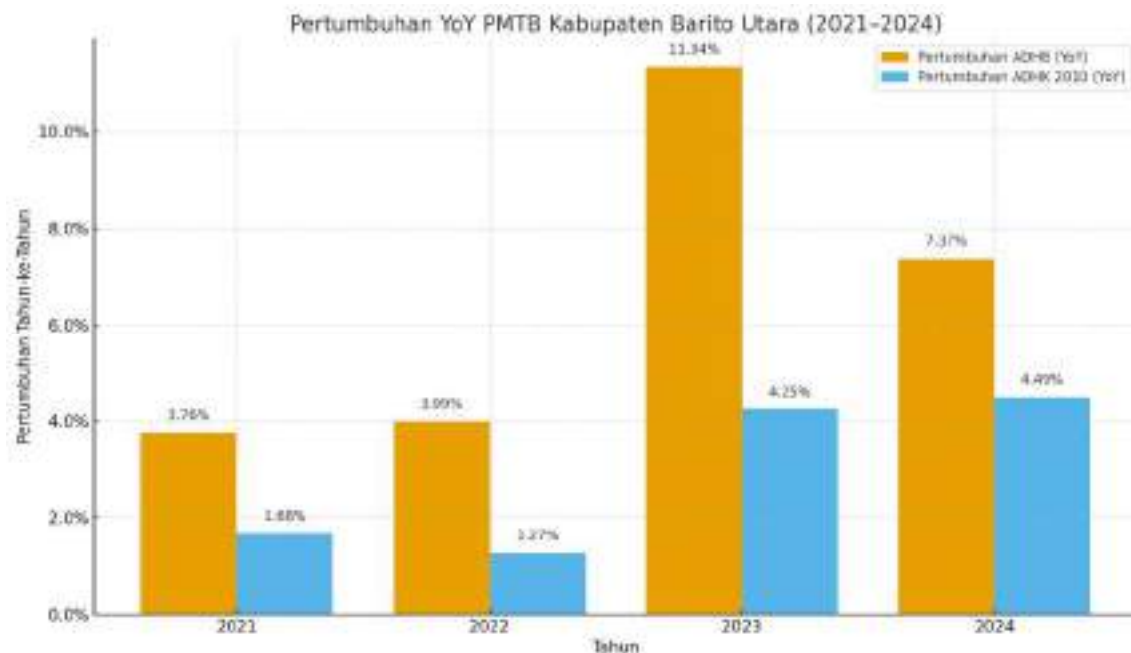
Salah satu aspek yang menarik dari data tersebut adalah struktur PMTB yang terbagi menjadi dua sektor utama, yaitu bangunan dan non-bangunan. Sektor non-bangunan, yang meliputi pembelian mesin dan peralatan, berkontribusi lebih besar terhadap total PMTB dibandingkan dengan sektor bangunan. Pada tahun 2024, sektor non-bangunan tercatat Rp3.616,2 miliar, yang berkontribusi sebesar 62,41% dari total PMTB. Sementara itu, sektor bangunan tercatat Rp2.178,3 miliar, yang berkontribusi 37,59% terhadap total PMTB. Kecenderungan ini menunjukkan bahwa Kabupaten Barito Utara lebih banyak berinvestasi pada sektor yang mendukung aktivitas produksi dan operasional, seperti pembelian mesin dan peralatan, yang dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas sektor industri dan jasa.

Pentingnya investasi pada sektor non-bangunan juga tercermin dalam kontribusinya terhadap perkembangan sektor-sektor ekonomi yang lebih produktif dan berkelanjutan. Mesin dan peralatan yang termasuk dalam kategori non-bangunan adalah elemen penting yang dapat meningkatkan kapasitas produksi dan kualitas hasil produksi di sektor-sektor seperti manufaktur, pertanian, dan perdagangan. Investasi dalam peralatan yang lebih canggih dan efisien juga dapat meningkatkan daya saing daerah dalam pasar yang semakin kompetitif, baik di tingkat nasional maupun internasional.

Selain itu, peningkatan dalam PMTB yang tercatat dalam dua format ini (ADHB dan ADHK 2010) memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai perkembangan investasi di Kabupaten Barito Utara. Format ADHB, yang mencatatkan nilai investasi berdasarkan harga yang berlaku, memberikan gambaran tentang seberapa besar nilai nominal dari investasi yang terjadi pada setiap tahun. Namun, data ADHB ini bisa dipengaruhi oleh *inflasi* atau perubahan harga barang dan jasa. Sementara itu, format ADHK 2010 lebih memberikan gambaran yang lebih akurat mengenai perubahan volume investasi yang sesungguhnya, karena angka ini sudah disesuaikan dengan mempertimbangkan inflasi atau perubahan harga yang terjadi selama periode tersebut. Dengan adanya dua perspektif ini, dapat diperoleh pemahaman yang lebih lengkap tentang perkembangan PMTB di Kabupaten Barito Utara, baik dari segi nilai nominal maupun dari segi volume investasi yang sebenarnya.

Secara keseluruhan, *tren* peningkatan PMTB yang tercatat dalam data ini menunjukkan adanya perkembangan yang positif dalam sektor investasi di Kabupaten Barito Utara. Kenaikan nilai PMTB baik berdasarkan ADHB maupun ADHK 2010 mencerminkan adanya komitmen yang lebih besar untuk membangun infrastruktur dan meningkatkan kapasitas produksi melalui investasi modal tetap. Peningkatan ini diharapkan dapat mendorong

pertumbuhan ekonomi yang lebih stabil dan berkelanjutan, yang pada gilirannya akan menciptakan lebih banyak peluang kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, dengan meningkatnya investasi pada sektor-sektor strategis seperti mesin dan peralatan, Kabupaten Barito Utara akan lebih mampu bersaing di tingkat regional maupun nasional, serta menciptakan basis ekonomi yang lebih kokoh di masa depan.



Gambar 2.37. Pertumbuhan Modal Tetap Bruto Kabupaten Barito Utara Tahun 2020-2024.

Berdasarkan Gambar 2.37 di atas, pertumbuhan tahun ke tahun PMTB Kabupaten Barito Utara menunjukkan pola pemulihan yang awalnya moderat lalu berakselerasi. Pada tahun 2021 pertumbuhan nominal berbasis ADHB mencapai 3,76% dan pertumbuhan *riil* berbasis ADHK 2010 sebesar 1,68%. Pada tahun berikutnya laju nominal naik tipis ke 3,99%, sementara pertumbuhan *riil* melemah ke 1,27%. Dua tahun pertama ini mencerminkan *fase* pemulihan investasi yang masih hati-hati; pertumbuhan nominal yang lebih tinggi daripada *riil* mengindikasikan pengaruh kenaikan harga barang modal atau pergeseran komposisi ke aset yang lebih mahal.

Perubahan besar terjadi pada tahun 2023 ketika investasi melonjak, pertumbuhan ADHB naik tajam ke 11,34%, dan ADHK 2010 ikut meningkat ke 4,25%. Akselerasi simultan pada ukuran nominal dan *riil* memberi sinyal perluasan proyek belanja modal dan mulai menguatnya volume investasi, bukan sekadar efek harga. Tahun 2024 kemudian bergerak ke *fase* normalisasi namun tetap kuat: ADHB tumbuh 7,37%, dan ADHK 2010 mencapai 4,49%, yang

merupakan puncak pertumbuhan *riil* dalam periode pengamatan. Selisih yang konsisten antara laju ADHB dan ADHK di seluruh tahun menegaskan bahwa faktor harga dan bauran aset berperan, tetapi *tren* ADHK yang terus positif menunjukkan kapasitas produksi daerah memang bertambah.

Diringkas secara periodik, rata-rata pertumbuhan periode 2021–2024 berada di sekitar 6,61% untuk ADHB, dan 2,92% untuk ADHK 2010. Artinya, selain terdorong oleh dinamika harga, ada peningkatan volume penanaman modal tetap yang makin nyata, terutama sejak tahun 2023. *Tren* ini sejalan dengan penguatan proyek infrastruktur dan pengadaan mesin atau peralatan, yang pada gilirannya memperbesar kemampuan perekonomian Kabupaten Barito Utara untuk menghasilkan *output* pada tahun-tahun berikutnya.

Selanjutnya, perkembangan dan struktur perubahan *inventori* di Kabupaten Barito Utara memberikan gambaran mengenai *fluktuasi* nilai *inventori* yang dimiliki oleh daerah tersebut dalam kurun waktu 2020 hingga 2024. *Inventori* mencakup barang atau produk yang disimpan, baik untuk konsumsi langsung maupun sebagai bahan baku untuk produksi lebih lanjut. Perubahan dalam *inventori* ini bisa dipengaruhi oleh sejumlah faktor, seperti tingkat produksi, permintaan pasar, dan kondisi ekonomi daerah. Data yang tersaji pada Tabel 2.93. menunjukkan bagaimana nilai *inventori* berfluktuasi, serta kontribusinya terhadap PDRB Kabupaten Barito Utara selama periode tersebut. Penurunan yang signifikan pada tahun 2023 memberikan perhatian khusus mengenai dinamika yang terjadi dalam pengelolaan *inventori* di daerah tersebut.

Tabel 2.93.Perkembangan dan Struktur Perubahan Inventori Kabupaten Barito Utara, 2020–2024

Uraian	2020	2021	2022	2023*	2024**
Total Nilai Inventori					
a. ADHB (Miliar Rp)	297,7	160,5	143,0	-26,4	96,2
b. ADHK 2010 (Miliar Rp)	91,1	71,6	45,4	119,0	58,7
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	3,17	1,52	1,00	-0,19	0,69

Keterangan: *Angka Sementara; **Angka Sangat Sementara

Sumber: BPS Kabupaten Barito Utara, 2025.



Gambar 2.38. Perkembangan dan Struktur Perubahan Inventori Kabupaten Barito Utara, 2020–2024.

Berdasarkan Tabel 2.93 dan Gambar 2.38 di atas, dapat dilihat terjadi perubahan yang signifikan dalam nilai *inventori* di Kabupaten Barito Utara selama periode 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, total nilai *inventori* yang tercatat Rp297,7 miliar, yang mengalami penurunan menjadi Rp160,5 miliar pada tahun 2021. Penurunan ini menunjukkan adanya pengurangan *inventori* yang disimpan, yang kemungkinan disebabkan oleh adanya perubahan permintaan pasar atau perubahan dalam kebijakan pengelolaan barang dan produk.

Pada tahun 2022, nilai *inventori* kembali mengalami penurunan menjadi Rp143,0 miliar, dan pada tahun 2023, terdapat penurunan yang sangat signifikan, yaitu menjadi Rp-26,4 miliar, yang menunjukkan adanya defisit *inventori* pada tahun tersebut. Defisit ini bisa terjadi karena faktor-faktor eksternal atau internal yang mempengaruhi keseimbangan antara produksi dan permintaan, seperti kesulitan dalam pengadaan barang atau kesalahan dalam perkiraan permintaan.

Namun, pada 2024, nilai *inventori* diperkirakan kembali meningkat menjadi Rp96,2 miliar, kenaikan nilai ini menunjukkan adanya perbaikan dalam pengelolaan *inventori* dan pemulihan kondisi pasar. Meskipun terjadi perbaikan, angka ini masih lebih rendah jika dibandingkan dengan angka pada tahun 2020. Hal ini menunjukkan adanya upaya untuk mengelola *inventori* dengan lebih efisien.

Pada sisi ADHK 2010, yang mencerminkan nilai *inventori* yang disesuaikan dengan *inflasi*, tercatat penurunan dari Rp91,1 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp45,4 miliar pada tahun 2022. Namun, pada tahun 2023 terdapat lonjakan yang signifikan hingga menjadi Rp119,0 miliar, yang kemungkinan besar disebabkan oleh adanya perubahan harga atau kebijakan yang mempengaruhi nilai *inventori* yang disesuaikan dengan *inflasi*. Pada tahun 2024, nilai *inventori* dalam ADHK 2010 diperkirakan kembali turun menjadi Rp58,7 miliar.

Proporsi terhadap PDRB menunjukkan *fluktuasi* yang tajam, dengan 3,17% pada tahun 2020, dan menurun menjadi 1,00% pada tahun 2022. Pada tahun 2023, proporsi ini menjadi (-0,19%), yang menunjukkan defisit *inventori* yang berdampak langsung terhadap PDRB daerah. Pada tahun 2024, proporsi ini diperkirakan kembali meningkat menjadi 0,69%, meskipun masih lebih rendah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Secara keseluruhan investasi di Kabupaten Barito Utara pada periode 2021–2024 dapat dipahami melalui dua komponen utama, yaitu PMTB dan perubahan *inventori*. Pertumbuhan rata-rata PMTB sebesar 6,61% (ADHB) dan 2,92% (ADHK 2010) menunjukkan adanya peningkatan nyata dalam penanaman modal tetap. Investasi ini terutama dalam bentuk pembangunan infrastruktur, pengadaan mesin, serta peralatan produksi yang mulai meningkat pesat sejak tahun 2023. Kenaikan tersebut tidak hanya dipengaruhi oleh faktor harga, tetapi juga mencerminkan pertumbuhan volume *riil* investasi. Dampaknya bersifat jangka panjang karena memperbesar kapasitas produksi, memperkuat konektivitas, menurunkan biaya logistik, dan meningkatkan daya saing daerah.

Sementara itu, perubahan *inventori* menggambarkan dinamika investasi jangka pendek yang berwujud persediaan barang. Selama periode 2020–2024, *inventori* menunjukkan pola yang berfluktuasi, dengan penurunan tajam pada tahun 2023 yang menandakan berkurangnya stok barang akibat peningkatan distribusi ke pasar, lonjakan permintaan, atau percepatan ekspor komoditas unggulan. Kondisi ini sempat menekan stabilitas pasokan, namun pada tahun 2024 *inventori* kembali mencatat perbaikan yang menunjukkan upaya sektor usaha dalam menyeimbangkan ketersediaan barang dengan kebutuhan pasar. Dengan demikian, *inventori* berfungsi sebagai penyangga jangka pendek yang penting untuk menjaga kelancaran pasokan barang dan mencegah gangguan pada aktivitas ekonomi.

Kombinasi antara PMTB dan perubahan *inventori* memperlihatkan arah pembangunan ekonomi Kabupaten Barito Utara. PMTB memperkuat struktur ekonomi jangka panjang melalui pembangunan aset produktif permanen, sedangkan *inventori* memberikan *fleksibilitas* jangka

pendek dengan menjaga keseimbangan stok barang di tengah fluktuasi pasar. Tahun 2023 menjadi titik transisi, ketika “investasi tetap” meningkat signifikan tetapi *inventori* mengalami penurunan tajam sehingga tekanan terhadap pasokan barang cukup besar. Namun, pemulihan *inventori* pada tahun 2024 bersamaan dengan peningkatan PMTB menandakan tercapainya keseimbangan baru dalam struktur investasi daerah. Dengan demikian, arah investasi di Kabupaten Barito Utara tidak hanya ditopang oleh pembangunan infrastruktur dan pengadaan aset tetap, tetapi juga oleh kemampuan dalam mengelola *inventori* sebagai faktor penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Incremental Capital Output Ratio (ICOR) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur efisiensi investasi dalam menghasilkan *output* atau pertumbuhan ekonomi. ICOR dihitung dengan membandingkan perubahan PDRB dengan investasi yang dilakukan dalam suatu periode. Semakin rendah nilai ICOR, semakin efisien investasi dalam menghasilkan pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, nilai ICOR yang tinggi mengindikasikan adanya penurunan efisiensi dalam investasi, sementara nilai yang rendah menunjukkan efisiensi yang lebih tinggi.

Tabel 2.94 menunjukkan perkembangan ICOR di Kabupaten Barito Utara selama periode 2020-2024, yang mencakup PDRB, perubahan PDRB, PMTB, dan nilai ICOR masing-masing tahun. Data ini memberikan wawasan terkait bagaimana investasi di daerah ini berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, serta bagaimana efisiensi penggunaan modal berubah sepanjang periode yang dianalisis.

Tabel 2.94. *Incremental Capital Output Ratio* (ICOR) Kabupaten Barito Utara Tahun 2020–2024

Uraian	2020	2021	2022	2023*	2024**
PDRB (ADHK 2010) (Miliar Rp)	6.955,4	7.151,8	7.597,9	8.015,3	8.422,3
Perubahan PDRB (ADHK 2010) (Miliar Rp)	-159,3	196,4	446,1	417,4	407,0
PMTB (ADHK 2010) (Miliar Rp)	2.735,6	2.781,5	2.816,9	2.936,5	3.068,4
ICOR	-17,17	14,16	6,31	7,04	7,54

Keterangan: *Angka Sementara; **Angka Sangat Sementara

Sumber: BPS Kabupaten Barito Utara, 2025.

Berdasarkan Tabel 2.94 di atas, terlihat perkembangan ICOR di Kabupaten Barito Utara pada periode 2020-2024. Pada tahun 2020, nilai ICOR tercatat sangat negatif yaitu -17,17 yang disebabkan adanya penurunan PDRB sebesar Rp159,3 miliar. Penurunan ini dapat mengindikasikan adanya penurunan dalam produktivitas ekonomi atau adanya dampak negatif dari krisis yang menyebabkan PDRB menurun lebih besar daripada investasi yang



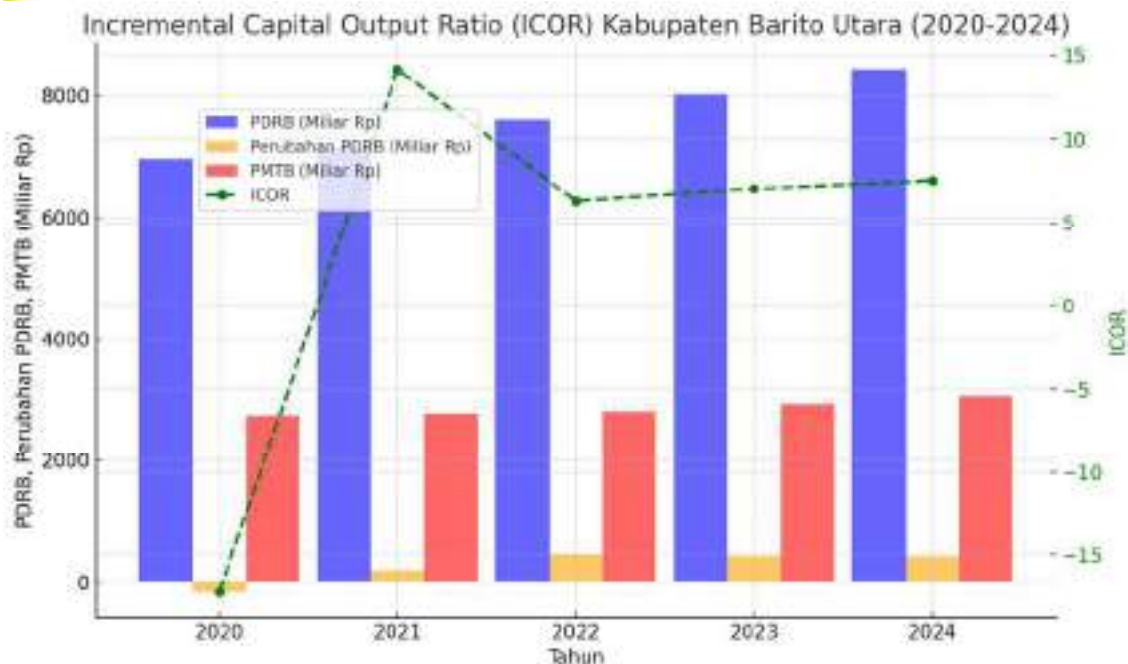
dilakukan pada tahun tersebut. Kondisi ini mencerminkan kegagalan investasi dalam meningkatkan *output* ekonomi pada tahun 2020.

Namun, pada tahun 2021, nilai ICOR kembali positif dan mengalami peningkatan yang signifikan menjadi 14,16. Meskipun ada pemulihan dalam PDRB sebesar Rp196,4 miliar, tingkat efisiensi investasi di tahun ini relatif rendah, yang menunjukkan bahwa investasi yang dilakukan tidak sepenuhnya berhasil meningkatkan *output* ekonomi secara proporsional.

Pada tahun 2022, terjadi peningkatan efisiensi yang cukup besar dengan nilai ICOR sebesar 6,31. Hal ini terjadi seiring dengan perubahan PDRB yang mencapai Rp446,1 miliar, dan peningkatan PMTB menjadi Rp2.816,9 miliar. Peningkatan ini menunjukkan bahwa investasi yang dilakukan pada tahun ini lebih efisien dalam menghasilkan pertumbuhan ekonomi.

Pada tahun 2023 dan 2024, meskipun nilai ICOR mengalami sedikit kenaikan menjadi 7,04 pada tahun 2023, dan 7,54 pada tahun 2024 yang tetap menunjukkan penurunan efisiensi investasi. Meskipun ada peningkatan yang stabil pada PDRB dan PMTB, pertumbuhan ekonomi tidak sepenuhnya sebanding dengan tingkat investasi yang dilakukan, yang bisa mengindikasikan bahwa ada *inefisiensi* dalam penggunaan modal atau faktor eksternal yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yang tidak terkait langsung dengan investasi.

Data ICOR menunjukkan adanya fluktuasi dalam efisiensi investasi di Kabupaten Barito Utara selama periode 2020-2024. Meskipun ada penurunan tajam pada tahun 2020, ada perbaikan signifikan pada tahun-tahun berikutnya, namun ICOR pada tahun 2024 masih menunjukkan adanya ruang untuk meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan investasi guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan di masa depan.



Gambar 2.39. *Incremental Capital Ratio (ICOR) Kabupaten Barito Utara 2020-2024.*

2.3.5.2. Ekspor

Ekspor menjadi salah satu indikator penting dalam perekonomian daerah, yang mencerminkan daya saing produk lokal di pasar internasional. Sektor ini tidak hanya berfungsi untuk menghasilkan pendapatan bagi daerah, tetapi juga sebagai salah satu sumber utama bagi pertumbuhan ekonomi. Bagi Kabupaten Barito Utara, ekspor memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung perekonomian, mengingat proporsinya yang besar terhadap PDRB daerah. Sektor ekspor dapat mencakup berbagai komoditas, mulai dari hasil pertanian, pertambangan, hingga industri pengolahan yang dihasilkan oleh daerah ini.

Selama periode 2020-2024, sektor ekspor di Kabupaten Barito Utara menunjukkan dinamika yang cukup signifikan. Data yang tercatat dalam 2 (dua) kategori, yaitu ADHB dan ADHK 2010, memberikan gambaran yang berbeda terkait nilai ekspor. ADHB mengukur nilai ekspor pada harga yang berlaku setiap tahunnya, yang mencerminkan fluktuasi harga barang ekspor serta perubahan dalam nilai nominal, sedangkan ADHK 2010 memberikan gambaran yang lebih realistis tentang volume ekspor, dengan menyesuaikan harga terhadap *inflasi*, sehingga bisa terlihat bagaimana perkembangan ekspor dalam volume *riil*.

Selain itu, proporsi ekspor terhadap PDRB Kabupaten Barito Utara menjadi indikator penting lainnya yang menunjukkan seberapa besar kontribusi sektor ekspor terhadap

perekonomian daerah. Semakin besar kontribusi sektor ekspor terhadap PDRB, semakin menunjukkan pentingnya sektor ini dalam mendukung perekonomian daerah. Oleh karena itu, pemantauan terhadap perkembangan ekspor ini sangat penting dalam merumuskan kebijakan dan strategi pengembangan ekonomi daerah. Tabel 2.95 menyajikan rangkuman data ekspor Kabupaten Barito Utara selama periode 2020-2024, baik berdasarkan ADHB maupun ADHK 2010, serta kontribusinya terhadap PDRB daerah.

Tabel 2.95.Ekspor Kabupaten Barito Utara Tahun 2020–2024

Tahun	Ekspor ADHB (Miliar Rp)	Ekspor ADHK 2010 (Miliar Rp)	Proporsi terhadap PDRB (ADHB)	Pertumbuhan Ekspor (ADHB)
2020	7.050,2	6.036,8	75,07%	-5,36%
2021	8.047,3	6.173,9	76,17%	2,27%
2022	12.121,3	6.782,7	84,78%	9,86%
2023	12.185,0	7.166,6	85,94%	5,66%
2024	11.288,6	7.429,7	80,41%	3,67%

Sumber: BPS Kabupaten Barito Utara, 2025.

Berdasarkan Tabel 2.95 di atas, dapat dilihat bahwa ekspor ADHB di Kabupaten Barito Utara mengalami fluktuasi yang signifikan. Pada tahun 2020, ekspor tercatat sebesar Rp7.050,2 miliar, yang kemudian meningkat pada tahun 2021 menjadi Rp8.047,3 miliar. Peningkatan ini menunjukkan bahwa sektor ekspor mulai mengalami perbaikan, kemungkinan didorong oleh pemulihan ekonomi global setelah dampak pandemi COVID-19. Pada tahun 2022, terjadi lonjakan yang sangat besar dengan nilai ekspor mencapai Rp12.121,3 miliar, yang menunjukkan peningkatan permintaan global terhadap produk-produk yang dihasilkan Kabupaten Barito Utara. Namun, pada tahun 2024 nilai ekspor mengalami penurunan menjadi Rp11.288,6 miliar, meskipun tetap lebih tinggi dari tahun 2020.

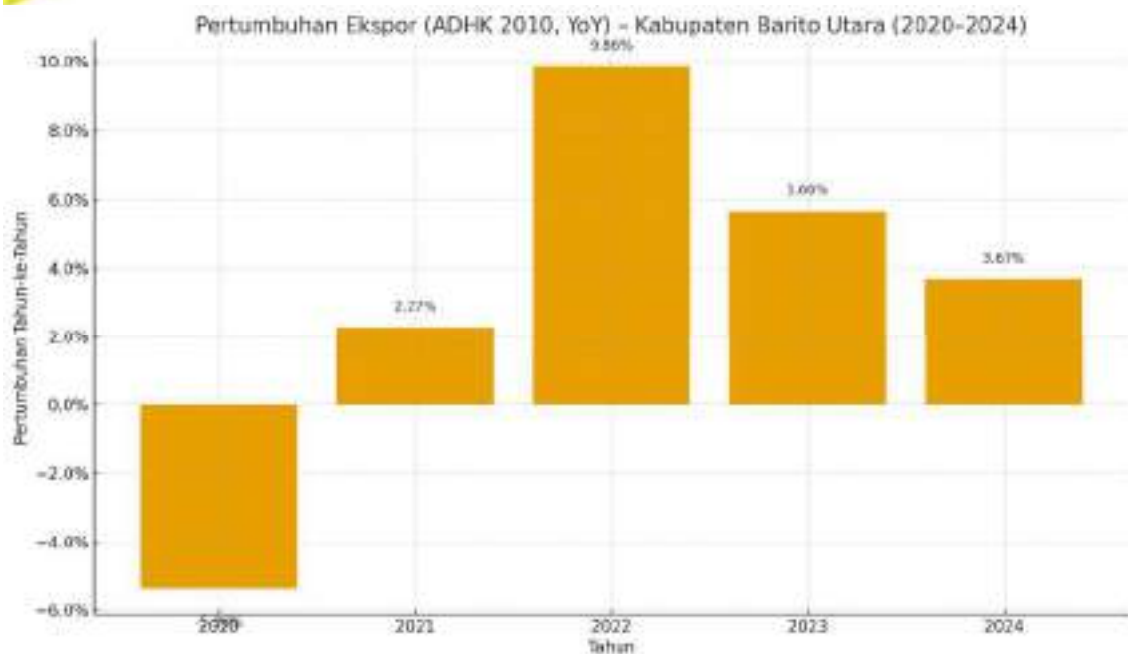
Dari sisi ekspor ADHK 2010, yang memberikan gambaran mengenai volume ekspor yang disesuaikan dengan *inflasi*, ada kenaikan yang stabil sepanjang periode 2020–2024. Pada tahun 2020, ekspor berdasarkan ADHK 2010 tercatat Rp6.036,8 miliar, dan pada tahun 2024 tercatat Rp7.429,7 miliar, yang menunjukkan pertumbuhan volume ekspor yang cukup signifikan meskipun ada fluktuasi harga. Data ini mengindikasikan bahwa meskipun harga barang ekspor mengalami perubahan, volume ekspor tetap meningkat yang mencerminkan kemampuan sektor ekspor daerah ini dalam mempertahankan daya saingnya di pasar internasional.

Proporsi ekspor terhadap PDRB menunjukkan kontribusinya terhadap keseluruhan perekonomian Kabupaten Barito Utara. Pada tahun 2020, ekspor berkontribusi sebesar

75,07% terhadap PDRB, yang menunjukkan bahwa sektor ini memiliki peranan penting dalam perekonomian daerah. Proporsi ini terus meningkat pada tahun 2021 menjadi 76,17%, dan mencapai puncaknya pada tahun 2023 dengan 85,94%. Angka ini mencerminkan bahwa sektor ekspor semakin dominan dalam perekonomian daerah pada tahun 2023, yang mungkin disebabkan oleh peningkatan permintaan global dan harga komoditas ekspor yang menguntungkan. Meskipun terjadi penurunan kontribusi pada tahun 2024 menjadi 80,41%, sektor ekspor tetap berkontribusi besar terhadap PDRB Kabupaten Barito Utara.

Pertumbuhan ekspor menunjukkan fluktuasi yang cukup besar dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2022, pertumbuhan ekspor tercatat sangat tinggi yakni sebesar 9,86%, yang menunjukkan adanya lonjakan besar dalam sektor ekspor. Tingginya nilai ekspor ini kemungkinan didorong oleh peningkatan harga atau volume ekspor yang lebih besar. Setelah itu, pertumbuhan ekspor menurun menjadi 5,66% pada tahun 2023, dan 3,67% pada tahun 2024, yang menunjukkan bahwa meskipun sektor ekspor masih tumbuh, laju pertumbuhannya mulai melambat pada tahun-tahun terakhir.

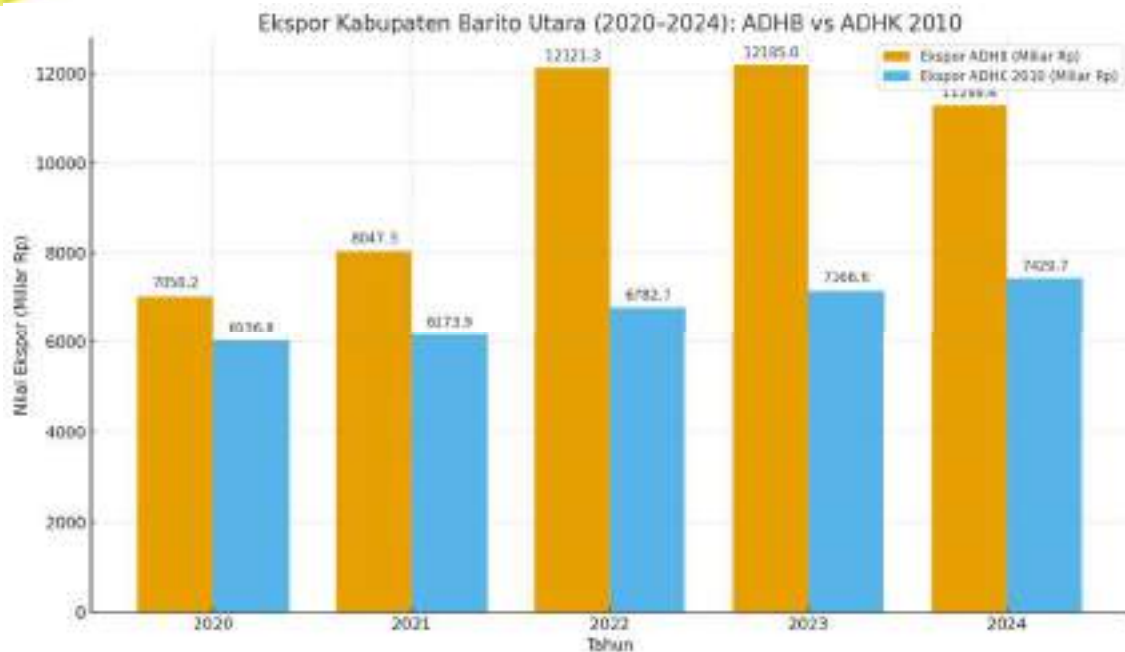
Secara keseluruhan, data yang disajikan menunjukkan bahwa Kabupaten Barito Utara mengalami perkembangan yang signifikan dalam sektor ekspor selama periode 2020-2024. Meskipun ada fluktuasi, sektor ekspor tetap menunjukkan kontribusi yang sangat besar terhadap perekonomian daerah, dengan peningkatan volume ekspor yang stabil. Lonjakan ekspor pada tahun 2022 menunjukkan adanya momentum positif, meskipun pada tahun 2024 terjadi sedikit penurunan. Meskipun demikian, sektor ekspor diharapkan tetap menjadi pilar utama dalam perekonomian Kabupaten Barito Utara, dengan potensi untuk terus berkembang di masa mendatang, terutama jika ada kebijakan yang mendukung peningkatan daya saing dan diversifikasi produk ekspor.



Gambar 2.40. Pertumbuhan Ekspor (AHDK 2010, YoY) Kabupaten Barito Utara Tahun 2020-2024.



Gambar 2.41. Proporsi Ekspor Terhadap PDRB (AHDK) Kabupaten Barito Utara Tahun 2020-2024.



Gambar 2.42. Ekspor Kabupaten Barito Utara Tahun 2020-2024 (Perbandingan ADHB dengan ADHK).

Berdasarkan gambar di atas, dapat dijelaskan bahwa ekspor di Kabupaten Barito Utara selama periode 2020-2024 menunjukkan dinamika yang signifikan baik dari segi nilai nominal maupun kontribusinya terhadap PDRB daerah. Pada awal periode, yaitu tahun 2020, ekspor tercatat sebesar Rp7.050,2 miliar berdasarkan ADHB, yang kemudian meningkat pada tahun 2021 menjadi Rp8.047,3 miliar. Kenaikan ini menunjukkan adanya pemulihan pasca-pandemi COVID-19 yang mengarah pada peningkatan permintaan pasar internasional. Pada tahun 2022, terjadi lonjakan luar biasa pada nilai ekspor yang mencapai Rp12.121,3 miliar, yang mengindikasikan adanya permintaan yang sangat tinggi dan harga komoditas yang menguntungkan. Namun, pada tahun 2024 nilai ekspor kembali mengalami penurunan menjadi Rp11.288,6 miliar, meskipun tetap lebih tinggi daripada nilai ekspor tahun 2020. Penurunan ini dapat dipengaruhi oleh fluktuasi pasar global dan harga barang ekspor yang tidak selalu stabil.

Jika dilihat berdasarkan ekspor ADHK 2010, yang mengoreksi nilai ekspor dengan mempertimbangkan *inflasi*, ada peningkatan yang lebih stabil namun tetap menunjukkan *tren* positif. Pada tahun 2020, ekspor tercatat sebesar Rp6.036,8 miliar dan meningkat menjadi Rp7.429,7 miliar pada tahun 2024. Peningkatan ini menunjukkan bahwa meskipun ada

fluktuasi harga, volume ekspor tetap meningkat secara riil, mencerminkan penguatan daya saing produk ekspor Kabupaten Barito Utara di pasar internasional.

Sementara itu, proporsi ekspor terhadap PDRB Kabupaten Barito Utara terus menunjukkan angka yang sangat besar sepanjang periode ini. Pada tahun 2020, kontribusi ekspor terhadap PDRB tercatat 75,07%, yang sudah menunjukkan betapa dominannya sektor ini dalam perekonomian daerah. Angka ini terus meningkat menjadi 76,17% pada tahun 2021 dan mencapai puncaknya pada tahun 2023 dengan 85,94%. Peningkatan proporsi ini menggambarkan betapa pentingnya sektor ekspor dalam menopang perekonomian daerah, terutama pada tahun 2022 dan 2023 yang ditandai dengan lonjakan ekspor yang sangat besar. Meskipun proporsi ini sedikit menurun pada tahun 2024 menjadi 80,41%, sektor ekspor tetap menunjukkan kontribusi yang sangat besar terhadap perekonomian Kabupaten Barito Utara.

Pada aspek pertumbuhan ekspor, terlihat adanya fluktuasi yang signifikan. Pada tahun 2020, pertumbuhan ekspor mengalami penurunan -5,36% dibandingkan tahun sebelumnya, yang mencerminkan dampak negatif dari pandemi COVID-19 terhadap sektor ekspor. Namun, pada tahun 2021, ekspor mulai pulih dengan pertumbuhan 2,27%. Tahun 2022 mencatatkan angka pertumbuhan tertinggi dengan 9,86%, menunjukkan lonjakan signifikan dalam sektor ekspor yang didorong oleh permintaan pasar global dan kenaikan harga komoditas. Meskipun ada penurunan pada tahun 2024 dengan 3,67%, sektor ekspor masih mampu mencatatkan pertumbuhan yang positif meskipun lebih moderat dibandingkan tahun sebelumnya.

Secara keseluruhan, data ini memberikan gambaran yang jelas mengenai perkembangan ekspor di Kabupaten Barito Utara selama lima tahun terakhir. Ekspor di daerah ini memiliki kontribusi yang sangat besar terhadap PDRB, dan sektor ini tetap menjadi salah satu penggerak utama perekonomian. Meskipun ada fluktuasi yang terjadi, terutama pada tahun 2022 dan 2024, sektor ekspor tetap menunjukkan potensi yang besar dan diharapkan dapat terus tumbuh di masa depan. Kebijakan yang mendukung peningkatan daya saing produk ekspor dan diversifikasi pasar internasional menjadi kunci untuk memperkuat peran sektor ini dalam jangka panjang.

2.3.5.3. Impor

Impor merupakan salah satu aspek penting dalam analisis perdagangan internasional dan ekonomi suatu daerah, termasuk di Kabupaten Barito Utara. Impor mencakup barang dan jasa yang dibeli oleh rumah tangga, industri, atau pemerintah dari luar negeri untuk memenuhi

kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi oleh produksi domestik. Aktivitas impor ini dapat berdampak signifikan terhadap perekonomian daerah, baik dalam hal ketersediaan barang, harga, maupun daya saing produk lokal. Pada tingkat rumah tangga, impor sering kali mencakup barang konsumsi, teknologi, dan produk-produk yang tidak diproduksi secara lokal. Di sisi industri, impor bahan baku dan komponen menjadi faktor penting dalam mendukung proses produksi. Oleh karena itu, penting untuk memahami pola dan dampak dari impor di Kabupaten Barito Utara dalam konteks integrasi ekonomi domestik dan global.

Dalam konteks perekonomian Kabupaten Barito Utara, impor menjadi salah satu indikator penting dalam menilai integrasi ekonomi daerah dengan pasar global. Impor mencerminkan kebutuhan daerah terhadap barang dan jasa dari luar negeri, baik untuk memenuhi konsumsi rumah tangga, mendukung sektor industri, maupun memperkuat kebutuhan pembangunan infrastruktur. Tabel 2.96 memberikan gambaran terkait perkembangan impor di Kabupaten Barito Utara selama periode 2020-2024, mencakup data mengenai nilai impor berdasarkan ADHB dan ADHK 2010, proporsi impor terhadap PDRB, serta laju pertumbuhannya. Data yang tersaji pada tabel tersebut memberikan gambaran tentang ketergantungan terhadap barang impor berkembang, serta dampaknya terhadap perekonomian daerah.

Tabel 2.96.Perkembangan Impor Kabupaten Barito Utara Tahun 2020–2024

Uraian	2020	2021	2022	2023*	2024**
Total Nilai Impor					
a. ADHB (Miliar Rp)	7.852,4	7.926,4	8.819,6	9.890,3	10.353,7
b. ADHK 2010 (Miliar Rp)	5.167,0	5.197,0	5.455,4	5.728,4	5.903,6
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	83,61%	75,02%	61,69%	69,76%	73,75%
Pertumbuhan (%)	-3,86%	0,58%	4,97%	5,00%	3,06%

Keterangan: *Angka Sementara; **Angka Sangat Sementara

Sumber: BPS Kabupaten Barito Utara, 2025.

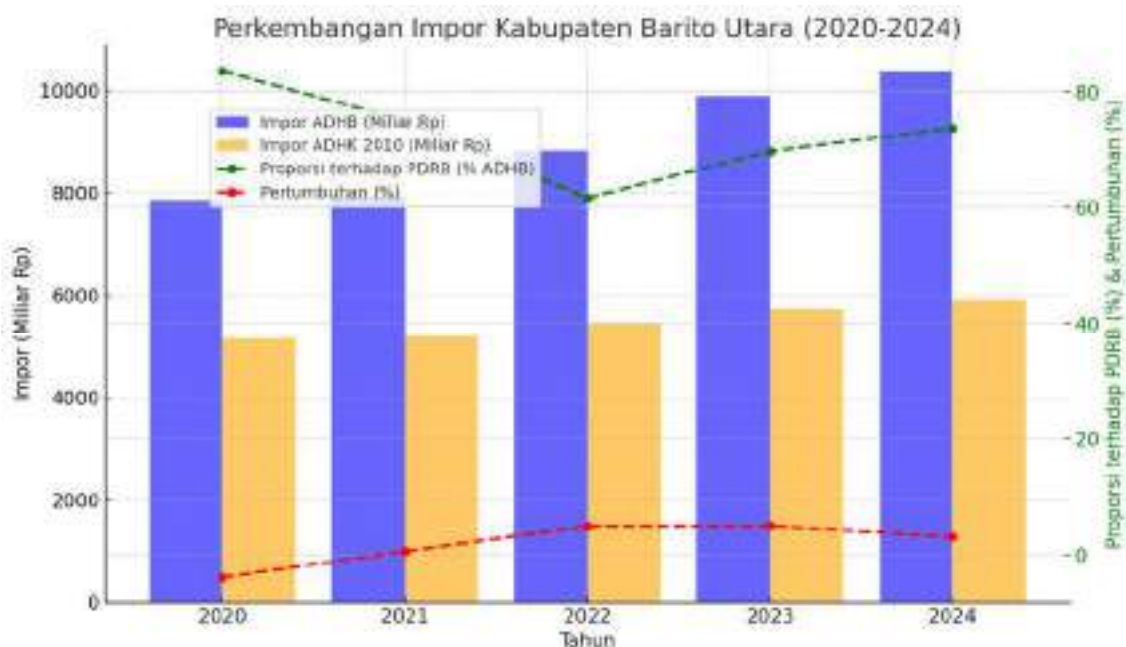
Berdasarkan Tabel 2.96 di atas, terlihat perkembangan impor di Kabupaten Barito Utara dari tahun 2020 hingga 2024. Nilai ADHB impor mengalami peningkatan yang signifikan setiap tahunnya, mulai dari Rp7.852,4 miliar pada tahun 2020, meningkat menjadi Rp10.353,7 miliar pada tahun 2024. Kenaikan ini menunjukkan bahwa Kabupaten Barito Utara semakin banyak melakukan impor barang dan jasa dari luar negeri untuk memenuhi kebutuhan domestiknya.

Namun, meskipun ada kenaikan nominal, persentase proporsi terhadap PDRB mengalami penurunan dari 83,61% pada tahun 2020 menjadi 61,69% pada tahun 2022. Penurunan ini menunjukkan bahwa meskipun impor meningkat, kontribusinya terhadap PDRB Kabupaten Barito Utara cenderung menurun, yang mengindikasikan adanya pertumbuhan

sektor domestik yang lebih cepat dibandingkan dengan sektor impor. Pada tahun 2023 dan 2024, proporsi ini kembali meningkat masing-masing menjadi 69,76% dan 73,75%, yang menunjukkan bahwa sektor impor mulai memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap ekonomi daerah dalam dua tahun terakhir.

Pertumbuhan nilai impor juga menunjukkan variasi yang menarik. Pada tahun 2020, terdapat penurunan -3,86%, yang kemungkinan disebabkan oleh dampak dari situasi ekonomi global atau pandemi yang mengurangi kebutuhan terhadap barang impor. Namun, pada tahun 2021 terjadi pemulihan dengan pertumbuhan 0,58%. Selanjutnya, pertumbuhan impor semakin meningkat pada tahun-tahun berikutnya, yakni mencapai 4,97% pada tahun 2022, 5,00% pada tahun 2023, dan sedikit menurun menjadi 3,06% pada tahun 2024. Peningkatan ini menggambarkan pemulihan dan ekspansi konsumsi barang impor, yang juga mencerminkan adanya pemulihan ekonomi yang lebih luas.

Secara keseluruhan, Tabel 2.96 di atas dan Gambar 2.43 di bawah menggambarkan kenaikan nilai impor yang konsisten dalam lima tahun terakhir, namun dengan adanya penurunan proporsi terhadap PDRB yang menunjukkan adanya penguatan sektor domestik. Hal ini dapat diartikan sebagai indikasi bahwa Kabupaten Barito Utara sedang mengalami pertumbuhan ekonomi yang dapat mengurangi ketergantungan terhadap barang impor meskipun total konsumsi barang impor meningkat.



Gambar 2.43. Perkembangan impor Kabupaten Barito Utara Tahun 2020-2024.

2.3.5.4. Net Ekspor

Net ekspor merupakan selisih antara ekspor dan impor suatu daerah atau negara, yang menjadi indikator penting dalam menilai keseimbangan perdagangan. Di Kabupaten Barito Utara, net ekspor mencerminkan sejauh mana daerah ini terlibat dalam perdagangan internasional dan kontribusinya terhadap perekonomian global. Jika ekspor lebih besar dari impor, maka daerah tersebut mengalami *surplus* perdagangan yang dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi daerah. Sebaliknya, jika impor lebih besar dari ekspor, maka daerah tersebut mengalami *defisit* perdagangan, yang dapat menambah beban perekonomian daerah. Oleh karena itu, analisis net ekspor menjadi hal yang krusial dalam memahami posisi ekonomi Kabupaten Barito Utara dalam konteks perdagangan internasional, serta dampaknya terhadap kesejahteraan ekonomi masyarakat dan pembangunan daerah secara keseluruhan.

Analisis net ekspor di Kabupaten Barito Utara penting untuk menggambarkan keseimbangan perdagangan daerah. Net ekspor dihitung dengan mengurangi total impor dari ekspor, yang dapat memberikan gambaran apakah suatu daerah mengalami *surplus* atau *defisit* perdagangan. Tabel 2.97 menunjukkan perkembangan net ekspor Kabupaten Barito Utara periode 2020-2024, yang mencakup nilai ADHB, ADHK 2010, proporsi terhadap PDRB, serta pertumbuhan. Data yang tersaji pada tabel ini memberikan wawasan mengenai seberapa besar kontribusi ekspor terhadap perekonomian daerah, serta dampak dari perbedaan antara ekspor dan impor terhadap PDRB.

Tabel 2.97.Perkembangan Net Ekspor Kabupaten Barito Utara Tahun 2020–2024

Uraian	2020	2021	2022	2023*	2024**
Total Net Ekspor					
c. ADHB (Miliar Rp)	-802,2	120,8	3.301,7	2.294,7	934,9
d. ADHK 2010 (Miliar Rp)	869,8	976,8	1.327,3	1.438,1	1.526,0
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	-8,54	1,14	23,09	16,18	6,66
Pertumbuhan (%)	-	-	-	-	-

Keterangan: *Angka Sementara; **Angka Sangat Sementara

Sumber: BPS Kabupaten Barito Utara, 2025.

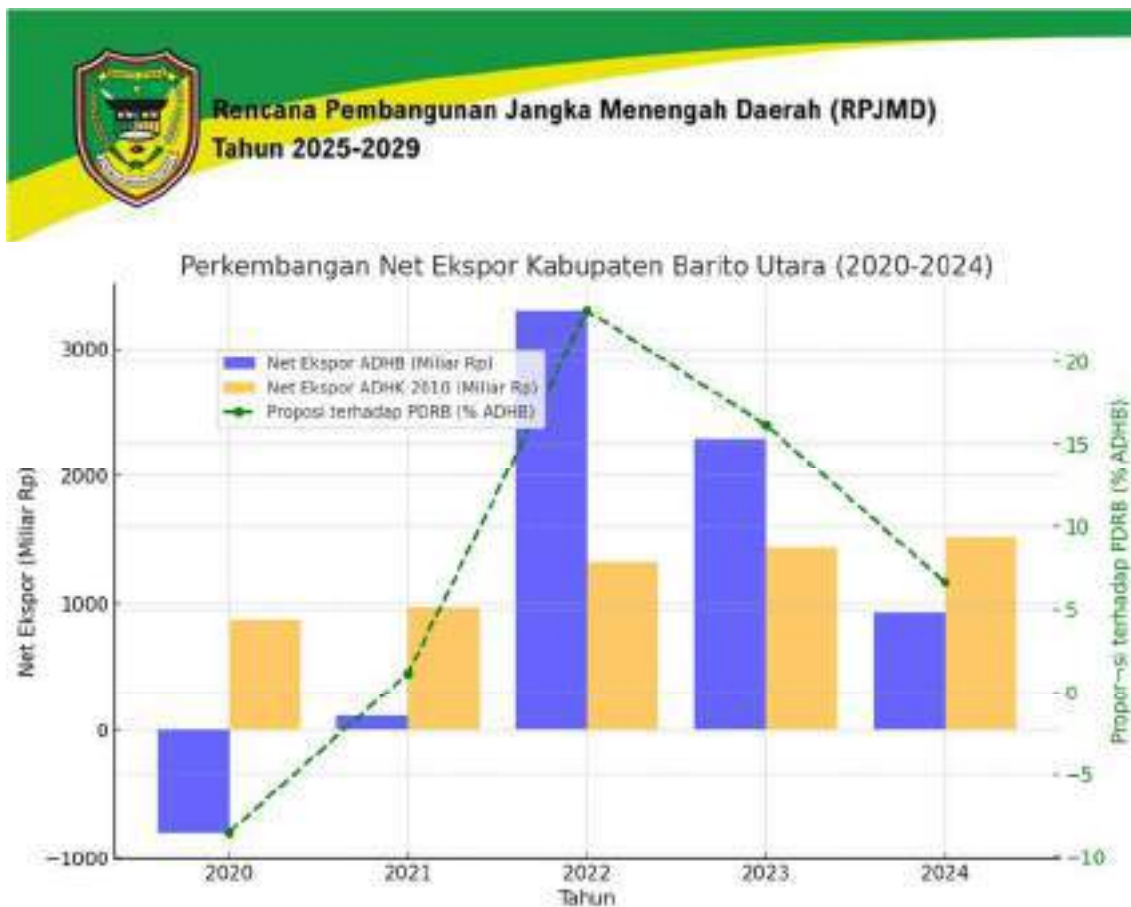
Berdasarkan Tabel 2.97 di atas, net ekspor Kabupaten Barito Utara menunjukkan fluktuasi yang signifikan sepanjang periode 2020-2024. Pada tahun 2020, tercatat nilai net ekspor ADHB sebesar Rp-802,2 miliar, yang menunjukkan adanya *defisit* perdagangan. Artinya, selama tahun tersebut, impor lebih besar daripada ekspor, sehingga menambah beban pada perekonomian daerah. Namun, pada tahun 2021, terjadi perubahan signifikan dengan nilai net ekspor ADHB menjadi Rp120,8 miliar yang menandakan *surplus* perdagangan di tahun tersebut.

Pada tahun 2022, *surplus* perdagangan semakin meningkat tajam menjadi Rp3.301,7 miliar pada ADHB, yang menunjukkan bahwa ekspor jauh melebihi impor, memberikan dampak positif terhadap perekonomian daerah. Meskipun *surplus* ini menurun pada tahun 2023 menjadi Rp2.294,7 miliar, angka ini tetap menunjukkan kinerja perdagangan yang sangat baik. Pada tahun 2024 net ekspor diperkirakan kembali menurun menjadi Rp934,9 miliar, tetapi masih tetap menunjukkan *surplus* meskipun lebih rendah dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Dari sisi ADHK 2010, yang menunjukkan nilai net ekspor yang disesuaikan dengan inflasi, terlihat adanya kenaikan yang stabil setiap tahunnya, dari Rp869,8 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp1.526,0 miliar pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada fluktuasi pada nilai nominal ADHB, net ekspor yang disesuaikan dengan *inflasi* menunjukkan tren positif yang mendukung kestabilan perekonomian daerah.

Proporsi terhadap PDRB menunjukkan penurunan yang signifikan dari -8,54% pada tahun 2020 (defisit perdagangan) menjadi 1,14% pada tahun 2021, yang menunjukkan adanya perubahan dari *defisit* ke *surplus*. Pada tahun 2022, proporsi terhadap PDRB melonjak tajam menjadi 23,09%, mencerminkan pengaruh besar dari *surplus* perdagangan terhadap perekonomian daerah. Meskipun terjadi penurunan kembali pada tahun 2023 (16,18%) dan tahun 2024 (6,66%), angka tersebut tetap menunjukkan kontribusi positif dari net ekspor terhadap PDRB daerah.

Secara keseluruhan, Tabel 2.97 menunjukkan bahwa Kabupaten Barito Utara mengalami perubahan signifikan dalam net ekspor dari *defisit* perdagangan pada tahun 2020 menjadi *surplus* perdagangan yang kuat pada tahun 2022. Meskipun terjadi penurunan dalam *surplus* pada tahun-tahun berikutnya, net ekspor tetap memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian daerah. Hal ini menunjukkan bahwa sektor perdagangan luar negeri menjadi salah satu pilar penting dalam mendukung perekonomian Kabupaten Barito Utara.



Gambar 2.44. Perkembangan Net Ekspor Kabupaten Barito Utara Tahun 2020-2024.

2.3.6. Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan kerangka pada subbab sebelumnya tentang integrasi domestik dan global, bagian ini menempatkan perkotaan dan perdesaan sebagai dua pusat pertumbuhan yang saling melengkapi. Kota berperan sebagai simpul *aglomerasi* kegiatan ekonomi, pusat jasa, pendidikan, kesehatan, serta pasar tenaga kerja yang menyerap inovasi dan investasi. Desa menjadi lumbung sumber daya, penghasil komoditas primer dan olahan awal, sekaligus penyedia jasa ekosistem yang menopang keberlanjutan. Pertumbuhan yang berkualitas muncul ketika arus barang, jasa, informasi, modal, dan manusia mengalir lancar di antara keduanya. Ketika konektivitas terputus, biaya logistik meningkat, pasar menyempit, dan ketimpangan spasial melebar. Sebaliknya, ketika konektivitas terjaga, rantai nilai daerah menguat dan produktivitas ikut terdorong.

Keterkaitan kota–desa bekerja melalui tiga pengungkit utama yakni (1) infrastruktur fisik dan digital yang menurunkan biaya transaksi, mempercepat mobilitas, serta membuka akses layanan dasar; (2) kondisi hunian rumah tangga yang layak berpengaruh terhadap kesehatan, kapasitas belajar, dan produktivitas pekerja; dan (3) kapasitas kelembagaan dan kemandirian desa yang menentukan kemampuan lokal dalam mengelola aset, menarik investasi, dan menjaga keberlanjutan pelayanan publik. Tiga pengungkit ini juga menjadi jembatan antara

investasi daerah dan kinerja ekspor berupa investasi memperbaiki jaringan jalan, pelabuhan darat, dan internet; desa yang kuat menjaga pasokan komoditas dan stabilitas sosial; rumah tangga dengan hunian layak memiliki peluang ekonomi yang lebih besar. Hasil akhirnya adalah struktur ekonomi yang lebih tangguh dan inklusif di seluruh wilayah.

Dengan dasar tersebut, akan diuraikan kondisi dan peran masing-masing pengungkit sebagai prasyarat kota dan desa menjadi pusat pertumbuhan. Infrastruktur dibahas sebagai tulang punggung konektivitas dan efisiensi. Akses hunian layak dipakai sebagai indikator kesejahteraan dan produktivitas mikro yang berakumulasi pada kinerja makro. Persentase desa mandiri digunakan sebagai *proxy* kapasitas tata kelola lokal dan kemandirian ekonomi yang memperkecil ketergantungan. Fokus analisis berada pada keterhubungan antara indikator, bukan sekadar pencapaian angka masing-masing, sehingga dapat terlihat mata rantai sebab-akibat yang mengikat kota dan desa dalam satu sistem ekonomi wilayah.

Ketersediaan dan kualitas infrastruktur, proporsi rumah tangga yang memiliki akses hunian layak, dan porsi desa yang berstatus mandiri. Ketiga indikator ini membantu memetakan titik lemah yang menghambat arus ekonomi kota–desa sekaligus mengidentifikasi peluang akselerasi. Hasil pembahasan diharapkan menjadi landasan rekomendasi yang realistis untuk memperkuat keterkaitan spasial dan memperluas manfaat pertumbuhan ke seluruh lapisan masyarakat.

2.3.6.1. Infrastruktur

Infrastruktur merupakan salah satu faktor penting dalam pembangunan ekonomi dan sosial di suatu daerah. Dalam konteks Kabupaten Barito Utara, pengembangan infrastruktur memiliki peran krusial dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, membuka akses ke pasar dan layanan sosial, serta mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Pembangunan infrastruktur meliputi berbagai sektor, seperti jalan, jembatan, jaringan listrik, penyediaan air bersih, serta fasilitas kesehatan dan pendidikan. Akses terhadap infrastruktur yang memadai memungkinkan masyarakat untuk memperoleh pelayanan dasar yang lebih baik, meningkatkan mobilitas barang dan jasa, serta mempercepat aliran informasi. Oleh karena itu, penguatan infrastruktur di Kabupaten Barito Utara menjadi prioritas untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan menciptakan kondisi yang mendukung kemajuan desa-desa, khususnya yang masih tergolong berkembang dan tertinggal.

Dalam rangka meningkatkan kualitas infrastruktur jalan di Kabupaten Barito Utara, pengelolaan panjang jalan yang dibagi berdasarkan tingkat kewenangan pemerintahan, jenis permukaan jalan, dan kondisi jalan sangat penting untuk pemahaman tentang perkembangan dan perencanaan jalan di daerah ini.

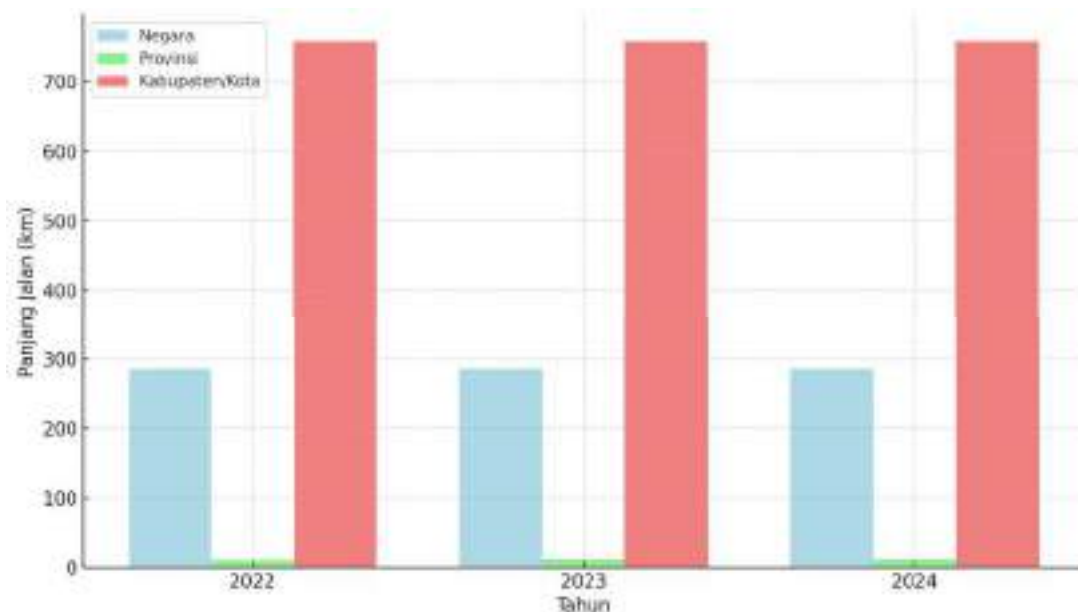
Tabel 2.98. Panjang Jalan Menurut Tingkat Kewenangan Pemerintahan di Kabupaten Barito Utara Tahun 2022–2024

Tingkat Kewenangan	Panjang Jalan (km)		
	2022	2023	2024
Negara	286,43	286,43	286,43
Provinsi	10,58	10,97	10,97
Kabupaten	758,14	758,14	758,14
Jumlah	1.055,15	1.055,54	1.055,54

Catatan:

- Data tidak termasuk panjang jalan tol (Excluding toll road).
- Data tahun 2023 berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 1688/KPTS/IM/2022 dan data tahun 2023 berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 1688/KPTS/IM/2022.

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Utara.



Gambar 2.45. Panjang Jalan Menurut Tingkat Kewenangan Pemerintahan di Kabupaten Barito Utara Tahun 2022–2024.

Tabel 2.98 dan Gambar 2.45 di atas memperlihatkan panjang jalan berdasarkan kewenangan pemerintahan, yakni jalan negara, provinsi, dan kabupaten/kota. Pada tahun 2022, panjang jalan yang berada di bawah kewenangan negara tercatat sepanjang 286,43 km, dan angkanya diprediksi tetap sama pada tahun 2023 dan 2024. Hal ini menunjukkan

konsistensi dalam kebijakan dan alokasi sumber daya untuk jalan yang dikelola oleh pemerintah pusat.

Di sisi lain, panjang jalan yang berada di bawah kewenangan provinsi tercatat 10,58 km pada tahun 2022, sedikit meningkat pada tahun 2023 menjadi sepanjang 10,97 km, dan tetap stabil pada tahun 2024. Meskipun angka ini relatif kecil dibandingkan dengan jalan yang dikelola oleh kabupaten/kota, tetap ada peningkatan meskipun tidak signifikan. Hal ini mencerminkan upaya dari pemerintah provinsi untuk memperbaiki jalan-jalan yang menjadi tanggung jawabnya, meskipun kontribusinya masih terbatas.

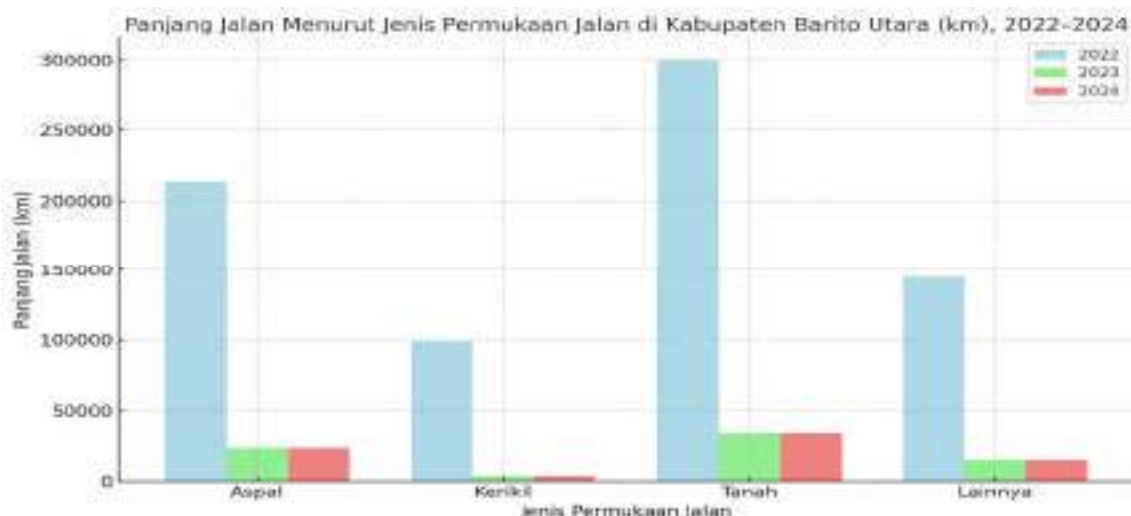
Adapun panjang jalan yang berada di bawah kewenangan kabupaten/kota, tercatat sepanjang 758,14 km pada setiap tahun (2022-2024). Ini mencerminkan bahwa mayoritas jalan di Kabupaten Barito Utara dikelola oleh pemerintah kabupaten, yang menunjukkan peran penting pemerintah daerah dalam menjaga dan meningkatkan infrastruktur jalan lokal.

Tabel 2.99. Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan Jalan di Kabupaten Barito Utara (km) Tahun 2022–2024

Jenis Permukaan Jalan	Panjang Jalan (km)		
	2022	2023	2024*
Aspal	212,960	234,33	234,33
Kerikil	99,187	33,59	33,59
Tanah	300,755	335,83	335,83
Lainnya	145,238	154,39	154,39
Jumlah	758,14	758,14	758,14

Catatan: *) Data Tahun 2024 masih belum ditetapkan.

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Utara.



Gambar 2.46. Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan Jalan di Kabupaten Barito Utara (km) Tahun 2022–2024.

Tabel 2.99 dan Gambar 2.46 di atas menggambarkan jenis permukaan jalan, yang terbagi menjadi aspal/paved, kerikil/gravel, tanah/soil, dan lainnya/others. Pada tahun 2022, panjang jalan dengan permukaan aspal/paved tercatat sepanjang 212,960 km, yang mengalami peningkatan pada tahun 2023 menjadi sepanjang 234,33 km, dan diperkirakan tetap pada tahun 2024. Peningkatan ini menunjukkan upaya yang lebih besar dalam pembangunan dan pemeliharaan jalan dengan permukaan aspal yang lebih halus dan lebih aman untuk dilalui.

Untuk jalan dengan permukaan kerikil/gravel, tercatat sepanjang 99,187 km pada tahun 2022, yang mengalami penurunan signifikan pada tahun 2023 menjadi hanya sepanjang 33,59 km, dan diprediksi tetap pada tahun 2024. Penurunan ini menunjukkan adanya peralihan atau konversi jalan kerikil menjadi jalan yang lebih permanen dan lebih baik, seperti aspal atau beton, yang lebih tahan lama dan nyaman digunakan.

Jalan dengan permukaan tanah/soil merupakan jenis permukaan yang paling dominan pada tahun 2022, dengan panjang jalan mencapai 300,755 km. Angka ini mengalami peningkatan pada tahun 2023 menjadi sepanjang 335,83 km dan diperkirakan tetap stabil pada tahun 2024. Peningkatan panjang jalan dengan permukaan tanah ini menunjukkan bahwa di beberapa daerah masih banyak jalan yang belum permanen atau masih dalam tahap pengembangan.

Untuk jalan dengan kategori lainnya/others, panjangnya tercatat 145,238 km pada tahun 2022, dengan sedikit peningkatan pada tahun 2023 dan 2024, masing-masing menjadi sepanjang 154,39 km. Jenis permukaan lainnya ini mencakup berbagai jenis permukaan jalan yang tidak termasuk dalam kategori aspal, kerikil, atau tanah.

Tabel 2.100. Panjang Jalan Menurut Kondisi Jalan di Kabupaten Barito Utara Tahun 2022–2024

Kondisi Jalan	Panjang (km)		
	2022	2023	2024*
Baik	320,904	239,00	239,00
Sedang	37,990	27,56	27,56
Rusak	71,316	33,32	33,32
Rusak Berat	327,930	458,26	458,26
Jumlah/Total	758,140	758,14	758,14

Catatan: Data Tahun 2024 masih belum ditetapkan.

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Utara.



Gambar 2.47. Panjang Jalan Menurut Kondisi Jalan di Kabupaten Barito Utara Tahun 2022–2024.

Tabel 2.100 dan Gambar 2.47 di atas memberikan gambaran kondisi jalan berdasarkan klasifikasi baik/*good*, sedang/*moderate*, rusak/*damage*, dan rusak berat/*severely damage*. Pada tahun 2022, jalan yang kondisinya baik/*good* tercatat sepanjang 320,904 km, namun pada tahun 2023, panjang jalan yang baik menurun menjadi sepanjang 239 km, dan diperkirakan tetap pada tahun 2024. Penurunan ini menunjukkan adanya penurunan kualitas jalan yang baik, mungkin disebabkan oleh faktor usia jalan dan kurangnya pemeliharaan rutin.

Sementara itu, jalan dengan kondisi sedang/*moderate* tercatat sepanjang 37,990 km pada 2022, dengan sedikit penurunan pada 2023 menjadi sepanjang 27,56 km, dan diperkirakan tetap stabil pada tahun 2024. Kondisi sedang menunjukkan adanya pemeliharaan yang cukup baik, tetapi tidak dapat dipertahankan dengan kualitas yang optimal dalam jangka panjang.

Untuk jalan dengan kondisi rusak/*damage*, tercatat sepanjang 71,316 km pada tahun 2022, yang menurun signifikan pada tahun 2023 menjadi hanya sepanjang 33,32 km, dan diperkirakan tetap pada tahun 2024. Penurunan ini menunjukkan bahwa sejumlah jalan yang rusak mulai diperbaiki, meskipun masih ada beberapa jalan yang membutuhkan perhatian lebih.

Jalan dengan kondisi rusak berat/*severely damage* menunjukkan angka yang sangat tinggi pada tahun 2022, yaitu sepanjang 327,930 km, yang terus meningkat tajam pada 2023 menjadi sepanjang 458,26 km, dan diperkirakan tetap pada tahun 2024. Peningkatan jumlah jalan yang rusak berat menandakan adanya masalah besar dalam pemeliharaan jalan dan

memerlukan prioritas untuk diperbaiki agar tidak mengganggu mobilitas dan perkembangan ekonomi daerah.

Berdasarkan pada uraian di atas, Kabupaten Barito Utara masih menghadapi tantangan besar dalam mengelola kualitas dan panjang jalan di seluruh wilayahnya. Meskipun ada peningkatan pada beberapa jenis permukaan jalan, seperti aspal, masih banyak jalan yang membutuhkan perbaikan atau penggantian. Peningkatan panjang jalan yang rusak berat juga menunjukkan perlunya kebijakan dan tindakan yang lebih tegas untuk memperbaiki infrastruktur jalan yang ada, terutama di daerah-daerah yang paling terisolasi. Pemerintah daerah perlu fokus pada perbaikan jalan yang rusak berat, pemeliharaan rutin jalan yang baik, dan perencanaan jangka panjang untuk memastikan jalan yang lebih tahan lama dan aman digunakan.

2.3.6.2. Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak

Hunian beserta kelengkapannya merupakan kebutuhan dasar sekaligus indikator penting kesejahteraan masyarakat. Rumah tidak hanya memengaruhi pembentukan karakter dan kepribadian, tetapi juga berperan dalam meningkatkan produktivitas dan kreativitas penghuninya. Selain itu, rumah menjadi pusat pendidikan keluarga, tempat pewarisan nilai budaya, serta sarana untuk meningkatkan kualitas generasi mendatang. Pemenuhan kebutuhan *papan* yang layak dan bermartabat pada akhirnya mendukung terwujudnya kesejahteraan rakyat.

Sebagai sarana perlindungan, rumah memberikan rasa aman dan ketenteraman, namun tetap perlu terbuka dan menyatu dengan lingkungan sekitarnya. Kualitas lingkungan rumah secara langsung berpengaruh terhadap kesehatan penghuninya. Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 829/Menkes/SK/VII/1999 tentang Persyaratan Kesehatan Perumahan, rumah yang sehat dan berkelanjutan adalah hunian yang memenuhi standar minimal dari segi kesehatan, sosial, budaya, ekonomi, dan kualitas teknis.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, yang menggantikan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992, menegaskan bahwa penyelenggaraan perumahan bertujuan menjamin ketersediaan hunian yang layak, terjangkau, serta berada di lingkungan yang sehat, aman, teratur, dan berkelanjutan. Perumahan sendiri didefinisikan sebagai kumpulan rumah di wilayah perkotaan maupun perdesaan yang dilengkapi prasarana, sarana, dan fasilitas umum untuk mendukung hunian

layak. Selain sebagai tempat tinggal, kualitas rumah juga mencerminkan status sosial pemiliknya; semakin tinggi status sosial seseorang, semakin besar peluang untuk memiliki hunian dengan mutu yang lebih baik.

Kesejahteraan rumah tangga dapat dilihat dari mutu material dan fasilitas pendukung yang digunakan, seperti jenis atap, dinding, dan lantai terluas, serta prasarana lain meliputi luas lantai, ketersediaan air minum, fasilitas pembuangan limbah, dan sumber penerangan. Perumahan dengan kualitas bangunan yang baik dan fasilitas yang memadai memberikan kenyamanan sekaligus meningkatkan taraf hidup penghuninya.

a. Kualitas Rumah Tinggal

Dalam menganalisis kualitas perumahan di Kabupaten Barito Utara, penting untuk memperhatikan beberapa indikator yang menggambarkan kondisi fisik dan daya huni rumah tangga di daerah tersebut. Data yang tersedia mencakup informasi terkait dengan lantai, atap, dan dinding perumahan, yang masing-masing memiliki nilai yang menunjukkan sejauh mana perumahan tersebut memenuhi standar kualitas tertentu. Indikator-indikator ini dapat memberikan gambaran tentang tingkat kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat di Kabupaten Barito Utara selama periode 2022-2024.

Tabel 2.101. Karakteristik Rumah Tangga Menurut Beberapa Indikator Kualitas Perumahan di Kabupaten Barito Utara Tahun 2022–2024

Indikator Kualitas Perumahan	Persentase (%)		
	2022	2023	2024
Lantai bukan tanah	100,00	100,00	100,00
Lantai berupa kayu	78,46	77,46	73,28
Atap beton, genteng, dan asbes	9,50	7,34	9,59
Dinding terluas kayu	83,19	84,51	79,66

Sumber: BPS, 2025.

Indikator lain untuk menilai kualitas rumah tinggal dapat dilihat dari jenis atap dan dinding terluas yang digunakan. Berdasarkan data Susenas (Survei Sosial Ekonomi Nasional) seperti yang tersaji pada Tabel 2.101 di atas dapat dijelaskan bahwa kualitas perumahan di Kabupaten Barito Utara menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan dari tahun 2022 hingga 2024. Pada tahun 2022, seluruh rumah tangga di daerah tersebut memiliki lantai bukan tanah, yang tercatat 100%. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas lantai perumahan di Kabupaten Barito Utara sudah memenuhi standar yang lebih baik, tidak lagi menggunakan lantai tanah, yang berhubungan dengan kenyamanan dan ketahanan bangunan. Kondisi ini



terus berlanjut hingga tahun 2023 dan tahun 2024, yang menunjukkan konsistensi dalam kualitas lantai rumah tangga di wilayah ini.

Namun, untuk lantai berupa kayu, tercatat pada tahun 2022 sebesar 78,46%, yang sedikit mengalami penurunan pada tahun 2023 menjadi 77,46%, dan penurunan yang lebih signifikan pada tahun 2024 menjadi 73,28%. Penurunan ini bisa disebabkan oleh peralihan penggunaan bahan lantai yang lebih modern atau perubahan dalam preferensi material yang lebih tahan lama. Meskipun demikian, proporsi rumah dengan lantai kayu tetap cukup besar, yang mengindikasikan bahwa banyak rumah di daerah ini masih mengandalkan bahan tradisional seperti kayu.

Sedangkan untuk atap beton, genteng, dan asbes, pada tahun 2022, tercatat hanya 9,50% rumah tangga yang menggunakan jenis atap tersebut, yang menurun menjadi 7,34% pada tahun 2023 dan kembali sedikit meningkat menjadi 9,59% pada tahun 2024. Peningkatan pada tahun 2024 bisa menunjukkan adanya kecenderungan untuk beralih ke material atap yang lebih kuat dan tahan lama, meskipun proporsinya tetap rendah dibandingkan dengan jenis material lainnya.

Pada bagian dinding terluas kayu, tercatat 83,19% pada tahun 2022, yang sedikit meningkat pada tahun 2023 menjadi 84,51%, namun menurun menjadi 79,66% pada tahun 2024. Meskipun masih dominan, penurunan ini menunjukkan bahwa mungkin ada pergeseran menuju bahan material dinding lainnya yang lebih kokoh dan ramah lingkungan.

Secara keseluruhan, kualitas perumahan di Kabupaten Barito Utara pada periode 2022 hingga 2024 menunjukkan tren yang stabil, meskipun ada beberapa perubahan dalam bahan bangunan yang digunakan. Peralihan material, seperti penurunan penggunaan kayu dan peningkatan penggunaan material yang lebih tahan lama untuk atap, bisa mencerminkan usaha untuk meningkatkan kualitas dan ketahanan perumahan di daerah tersebut.



Gambar 2.48. Karakteristik Rumah Tangga Menurut Beberapa Indikator Kualitas Perumahan di Kabupaten Barito Utara Tahun 2022–2024.

b. Fasilitas Rumah Tinggal

Kualitas dan kenyamanan rumah tinggal sangat dipengaruhi oleh ketersediaan fasilitas pendukung seperti air bersih, sanitasi yang memadai, dan penerangan yang baik. Air bersih menjadi kebutuhan utama setiap rumah tangga, khususnya untuk keperluan minum dan memasak, sehingga pemerintah terus berupaya memastikan pasokan yang cukup melalui berbagai program penyediaan air bersih.

Untuk memahami kualitas fasilitas perumahan di Kabupaten Barito Utara, penting untuk menilai akses rumah tangga terhadap berbagai fasilitas dasar yang mendukung kesejahteraan dan kenyamanan hidup. Fasilitas-fasilitas ini mencakup air kemasan, air isi ulang dan ledeng, air minum bersih, jamban sendiri, tempat pembuangan tinja, dan sumber penerangan listrik. Data yang tersedia menunjukkan perkembangan akses rumah tangga terhadap fasilitas ini dari tahun 2022 hingga 2024.

Tabel 2.102. Persentase Rumah Tangga Menurut Beberapa Fasilitas Perumahan di Kabupaten Barito Utara Tahun 2022–2024

Fasilitas Perumahan	Persentase (%)		
	2022	2023	2024
Air kemasan, air isi ulang dan ledeng	64,64	66,69	65,72
Air minum bersih*	76,47	80,70	81,12
Jamban Sendiri	79,96	82,57	88,27
Tempat pembuangan tinja berupa tangki/SPAL	80,08	53,01	60,32
Sumber penerangan berupa listrik	97,79	96,99	98,41

*) Air yang bersumber dari ledeng, air kemasan, air isi ulang sumur bor/pompa, sumur terlindung dan mata air terlindung yang jarak ke tempat pembuangan limbah (tangki septik) > 10 m.
Sumber: BPS, 2025.

Berdasarkan Tabel 2.102 di atas, kondisi fasilitas perumahan di Kabupaten Barito Utara menunjukkan beberapa perkembangan penting dalam hal akses rumah tangga terhadap fasilitas dasar. Pada tahun 2022, akses rumah tangga terhadap air kemasan, air isi ulang, dan ledeng tercatat mencapai 64,64%, dan sedikit meningkat pada tahun 2023 menjadi 66,69%. Namun, pada tahun 2024, persentase ini sedikit menurun menjadi 65,72%, yang mengindikasikan adanya fluktuasi dalam akses terhadap sumber air ini. Meskipun demikian, sebagian besar rumah tangga di daerah ini masih mengandalkan air dari sumber-sumber tersebut.

Untuk air minum bersih, mengalami peningkatan yang signifikan dari 76,47% pada tahun 2022 menjadi 80,70% pada tahun 2023, dan pada tahun 2024 meningkat lebih jauh menjadi 81,12%. Hal ini mencerminkan perbaikan yang positif dalam penyediaan air minum yang aman dan layak konsumsi bagi masyarakat di Kabupaten Barito Utara.

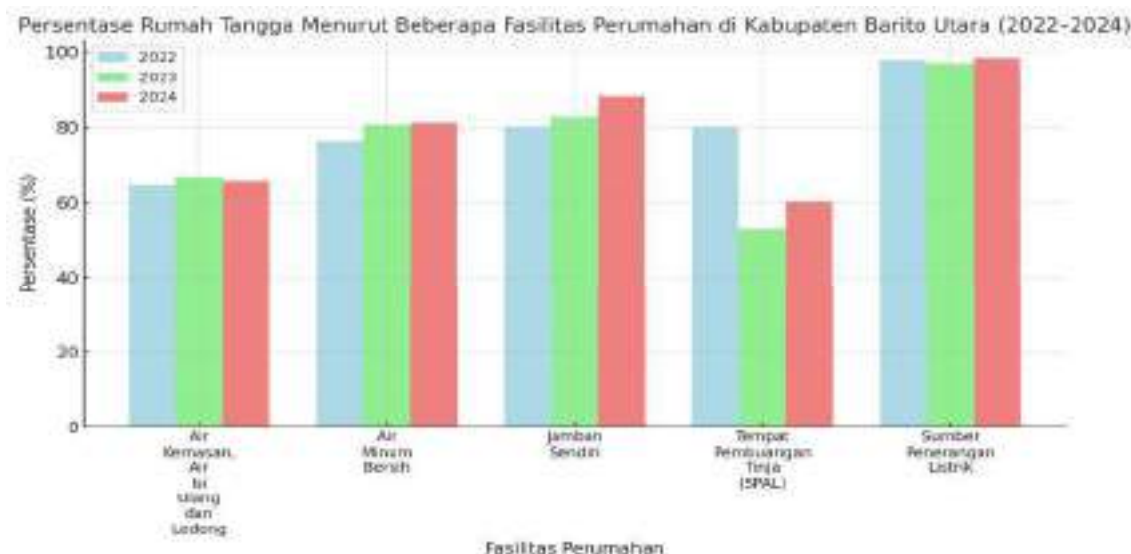
Sementara itu, persentase rumah tangga yang memiliki jamban sendiri meningkat dari 79,96% pada tahun 2022 menjadi 82,57% pada tahun 2023, dan terus menunjukkan angka yang lebih tinggi pada tahun 2024 dengan 88,27%. Peningkatan ini menunjukkan keberhasilan program-program peningkatan sanitasi yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk menyediakan fasilitas jamban yang lebih baik bagi rumah tangga.

Namun, dalam hal tempat pembuangan tinja berupa tangki/SPAL, terjadi penurunan yang signifikan. Pada tahun 2022, 80,08% rumah tangga memiliki akses ke tempat pembuangan tinja yang layak, tetapi angka ini menurun drastis menjadi 53,01% pada tahun 2023, meskipun sedikit meningkat menjadi 60,32% pada tahun 2024. Penurunan yang tajam ini menunjukkan adanya tantangan dalam pengelolaan sistem pembuangan limbah yang membutuhkan perhatian lebih untuk memastikan distribusi fasilitas ini merata.

Dalam hal sumber penerangan listrik, 97,79% rumah tangga sudah mengakses listrik pada tahun 2022, mengalami penurunan menjadi 96,99% pada tahun 2023, dan kembali meningkat pada tahun 2024 menjadi 98,41%. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas rumah tangga di Kabupaten Barito Utara sudah memiliki akses yang baik terhadap listrik, yang menjadi indikator penting bagi kualitas hidup yang lebih baik.

Secara keseluruhan, perkembangan yang positif dalam fasilitas perumahan di Kabupaten Barito Utara, meskipun masih ada beberapa tantangan seperti penurunan akses terhadap tempat pembuangan tinja yang memerlukan perhatian lebih lanjut. Peningkatan

dalam akses terhadap air bersih, jamban pribadi, dan listrik menunjukkan adanya upaya yang berhasil dari pemerintah dan masyarakat dalam meningkatkan kualitas hidup di daerah ini.



Gambar 2.49. Persentase Rumah Tangga Menurut Beberapa Fasilitas Perumahan di Kabupaten Barito Utara (persen) Tahun 2022–2024.

c. Status Kepemilikan Rumah Tinggal

Untuk memahami distribusi status kepemilikan rumah tangga di Kabupaten Barito Utara, penting untuk melihat bagaimana rumah tangga di daerah ini dalam mengakses tempat tinggal selama periode 2022-2024. Data yang tersedia pada Tabel 2.103 menunjukkan proporsi rumah tangga berdasarkan status kepemilikan rumah (milik sendiri, menyewa, atau tinggal di rumah dinas). Dengan melihat perubahan dalam tiga tahun tersebut (2022-2024), dapat dievaluasi terkait perkembangan status kepemilikan rumah tangga di daerah ini, yang tentunya berhubungan dengan faktor sosial dan ekonomi masyarakat.

Tabel 2.103. Persentase Rumah Tangga Menurut Status Kepemilikan Rumah Tinggal di Kabupaten Barito Utara Tahun 2022–2024

Status Kepemilikan	Tahun		
	2022 (%)	2023 (%)	2024 (%)
Milik Sendiri	80,63	82,51	86,10
Kontrak/Sewa	9,57	12,71	8,39
Beberapa Sewa	8,42	3,85	4,84
Dinas dan Lainnya	1,38	0,67	0,67

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional 2022–2024 (diolah).

Berdasarkan Tabel 2.103, dapat dijelaskan bahwa status kepemilikan rumah tangga di Kabupaten Barito Utara mengalami perubahan yang signifikan dari tahun 2022 hingga 2024.

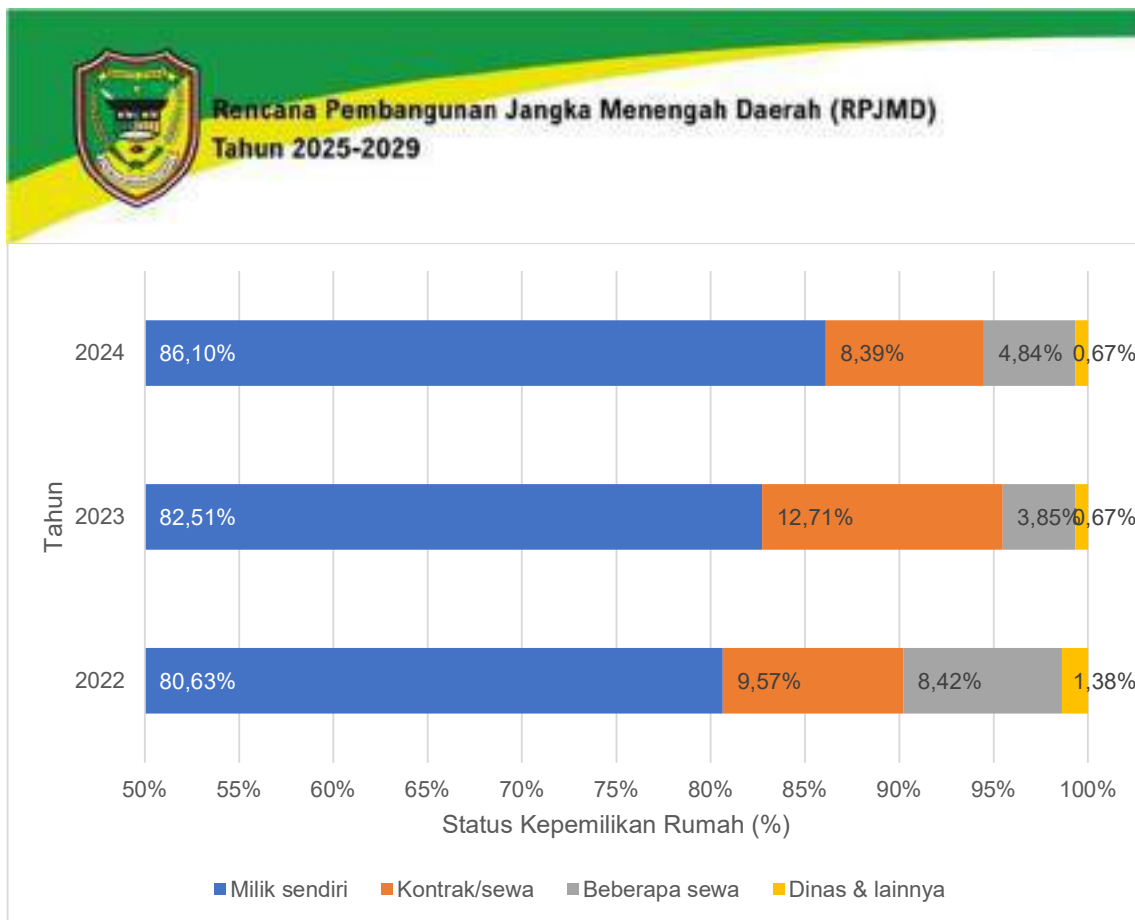
Pada tahun 2022, sebagian besar rumah tangga, yaitu 80,63%, memiliki rumah sendiri. Angka ini meningkat pada tahun 2023 menjadi 82,51%, dan terus meningkat pada tahun 2024 menjadi 86,10%. Peningkatan ini menunjukkan bahwa semakin banyak rumah tangga yang mampu memiliki rumah sendiri, yang mencerminkan stabilitas ekonomi dan keberhasilan program-program pemerintah dalam menyediakan akses kepemilikan rumah.

Sementara itu, persentase rumah tangga yang menyewa atau mengontrak mengalami fluktuasi. Pada tahun 2022, sekitar 9,57% rumah tangga menyewa rumah, yang meningkat tajam menjadi 12,71% pada tahun 2023, namun kembali turun pada tahun 2024 menjadi 8,39%. Penurunan ini menunjukkan adanya pergeseran ke arah kepemilikan rumah yang lebih besar pada rumah tangga, seiring dengan peningkatan perekonomian.

Untuk kategori beberapa sewa, tercatat 8,42% rumah tangga pada tahun 2022 yang berada dalam status ini. Persentase ini menurun secara signifikan pada tahun 2023 menjadi 3,85%, dan sedikit meningkat lagi menjadi 4,84% pada tahun 2024. Perubahan ini mungkin mencerminkan dinamika pasar perumahan atau pergeseran preferensi tempat tinggal di kalangan rumah tangga.

Terakhir, kategori dinas dan lainnya memiliki persentase yang relatif kecil, yaitu 1,38% pada tahun 2022, menurun menjadi 0,67% pada tahun 2023, dan tetap 0,67% pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan fasilitas rumah dinas di Kabupaten Barito Utara relatif rendah dan stabil selama tiga tahun terakhir.

Secara keseluruhan, peningkatan yang signifikan dalam jumlah rumah tangga yang memiliki rumah sendiri menunjukkan perbaikan signifikan dalam kualitas hidup masyarakat, terutama dari sisi kepemilikan aset tetap. Ini juga mencerminkan stabilitas sosial ekonomi yang lebih tinggi, di mana rumah tangga merasa lebih aman dan stabil dalam aspek tempat tinggal mereka. Lebih banyak rumah tangga yang beralih dari menyewa ke memiliki rumah sendiri, yang mencerminkan keberhasilan dalam meningkatkan kesejahteraan dan akses terhadap perumahan yang layak.



Gambar 2.50. Persentase Rumah Tangga Menurut Status Kepemilikan Rumah Tinggal di Kabupaten Barito Utara Tahun 2022–2024.

2.3.6.3. Persentase Desa Mandiri

Sektor pemberdayaan desa di Provinsi Kalimantan Tengah mengalami perkembangan yang signifikan antara tahun 2022 hingga 2024. Salah satu indikator utama yang digunakan untuk mengukur kemajuan desa adalah status desa yang dibagi menjadi beberapa kategori: mandiri, maju, berkembang, tertinggal, dan sangat tertinggal. Peningkatan atau penurunan status desa ini mencerminkan keberhasilan atau tantangan yang dihadapi dalam berbagai aspek pembangunan desa, mulai dari pengelolaan sumber daya alam, pemerintahan desa, infrastruktur, hingga partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan.

Pemberdayaan desa di Provinsi Kalimantan Tengah menunjukkan banyak desa yang mengalami transisi menuju status yang lebih baik. Hal ini menunjukkan efektivitas program pembangunan yang berfokus pada peningkatan kapasitas desa untuk mengelola potensi lokal, memperbaiki infrastruktur, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat desa dalam pembangunan. Oleh karena itu, penting untuk melihat bagaimana distribusi status desa ini berkembang dalam 3 tahun terakhir (2022-2024) untuk memahami tantangan dan peluang yang ada dalam pembangunan desa di wilayah ini. Tabel 2.104 menyajikan terkait perkembangan status desa di Provinsi Kalimantan Tengah selama periode 2022-2024, yang

menggambarkan pergeseran status desa dari kategori tertinggal menuju kategori mandiri dan maju.

Tabel 2.104. Status Desa di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022-2024

Status Desa	2022		2023		2024	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Mandiri	87	6,07	194	13,55	248	17,32
Maju	348	24,28	391	27,30	439	30,66
Berkembang	766	53,45	704	49,16	659	46,02
Tertinggal	229	15,98	143	9,99	86	6,01
Sangat Tertinggal	3	0,21	0	-	0	-
Total	1.433	100	1.432	100	1.432	100

Sumber: BPS, 2025.

Berdasarkan Tabel 2.104 di atas, dapat dilihat bahwa ada peningkatan yang signifikan dalam jumlah desa Mandiri dari 87 desa (6,07%) pada tahun 2022 menjadi 248 desa (17,32%) pada tahun 2024. Hal ini mencerminkan kemajuan yang pesat dalam upaya pemberdayaan desa, di mana semakin banyak desa yang berhasil mengelola sumber daya mereka secara mandiri dan mencapai status yang lebih tinggi. Peningkatan ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah dan pusat telah berhasil menjalankan program pemberdayaan yang tepat sasaran, yang memungkinkan desa-desa ini untuk mengelola ekonomi lokal, infrastruktur, dan layanan publik dengan lebih baik.

Selain itu, Desa Maju juga menunjukkan kenaikan yang stabil, dengan proporsi meningkat dari 348 desa (24,28%) pada tahun 2022 menjadi 439 desa (30,66%) pada tahun 2024. Kenaikan ini menunjukkan bahwa banyak desa yang telah bertransisi dari kategori berkembang menjadi desa maju, dan berpotensi untuk melanjutkan perjalanannya ke kategori Mandiri dalam beberapa tahun mendatang.

Namun, Desa Berkembang menunjukkan penurunan dalam jumlah desa, dari 766 desa (53,45%) pada tahun 2022 menjadi 659 desa (49,16%) pada tahun 2024. Penurunan ini dapat diartikan bahwa sejumlah desa yang sebelumnya berada pada kategori ini mulai naik status ke kategori yang lebih tinggi, seperti Maju dan Mandiri. Meskipun ada penurunan jumlah desa berkembang, ini menunjukkan bahwa banyak desa yang mengalami kemajuan dan perubahan positif, meskipun sebagian dari mereka belum cukup kuat untuk menjadi desa Mandiri atau Maju.

Sedangkan Desa Tertinggal mengalami penurunan yang signifikan dari 229 desa (15,98%) pada tahun 2022 menjadi 86 desa (6,01%) pada tahun 2024. Penurunan ini mencerminkan upaya yang berhasil dalam meningkatkan kondisi desa-desa yang tertinggal untuk mendapatkan akses lebih baik terhadap infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Desa Sangat Tertinggal tidak lagi tercatat pada tahun 2024 setelah sebelumnya ada 3 desa (0,21%) pada tahun 2022. Ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah berhasil mengatasi tantangan terbesar dalam memberdayakan desa yang sangat tertinggal, membawa mereka ke dalam kategori yang lebih baik.

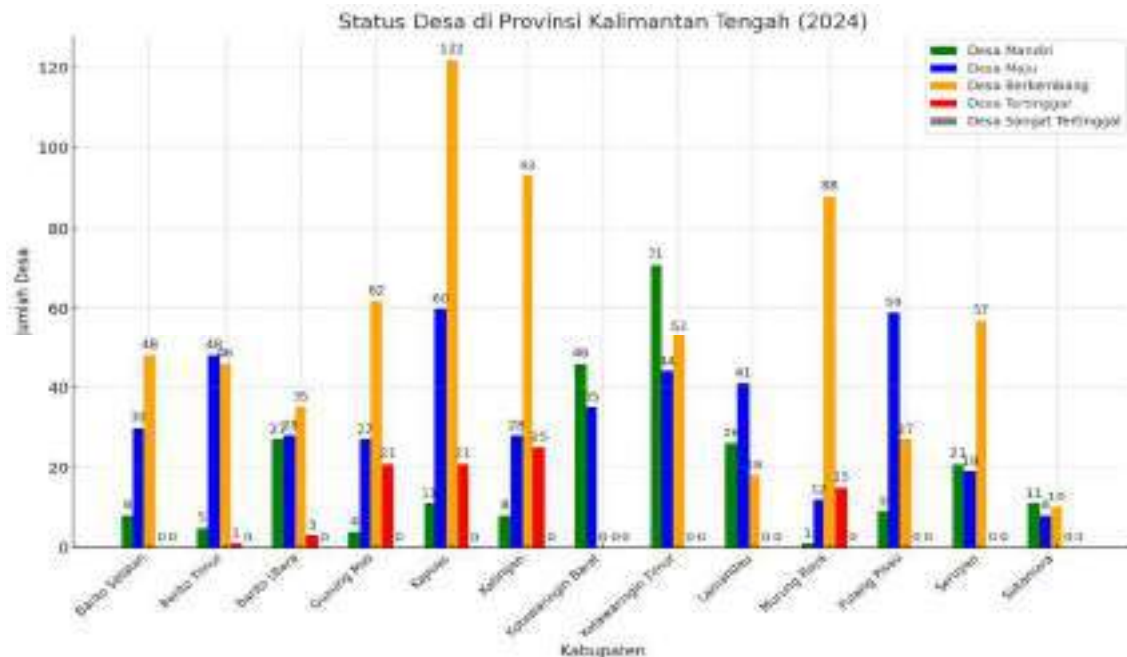
Berdasarkan Tabel 2.104 terlihat adanya perkembangan yang signifikan dalam status desa di wilayah ini dari tahun ke tahun. Seiring dengan peningkatan jumlah desa yang berstatus Mandiri dan Maju, yang tercatat dalam tabel sebelumnya, Tabel 2.105 menyajikan rekapitulasi status Indeks Desa Membangun (IDM) Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2024 yang menggambarkan distribusi lebih rinci terkait status desa berdasarkan kabupaten. Peningkatan desa dengan status Mandiri dan Maju mencerminkan hasil dari berbagai program pemberdayaan desa yang berhasil, sementara penurunan jumlah desa Tertinggal dan hilangnya desa Sangat Tertinggal menunjukkan adanya upaya yang efektif dalam mengatasi ketimpangan pembangunan antardesa di provinsi ini. Tabel 2.105 memberikan gambaran lebih jelas mengenai sebaran status desa di masing-masing kabupaten, serta menunjukkan keberhasilan dan tantangan yang masih perlu dihadapi untuk mencapai pemerataan pembangunan di seluruh desa.

Tabel 2.105. Rekapitulasi Status IDM Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024

Kabupaten	Desa Mandiri	Desa Maju	Desa Berkembang	Desa Tertinggal	Desa Sangat Tertinggal	Total Desa
Barito Selatan	8	30	48	0	0	86
Barito Timur	5	48	46	1	0	100
Barito Utara	27	28	35	3	0	93
Gunung Mas	4	27	62	21	0	114
Kapuas	11	60	122	21	0	214
Katingan	8	28	93	25	0	154
Kotawaringin Barat	46	35	0	0	0	81
Kotawaringin Timur	71	44	53	0	0	168
Lamandau	26	41	18	0	0	85
Murung Raya	1	12	88	15	0	116
Pulang Pisau	9	59	27	0	0	95
Seruyan	21	19	57	0	0	97

Kabupaten	Desa Mandiri	Desa Maju	Desa Berkembang	Desa Tertinggal	Desa Sangat Tertinggal	Total Desa
Sukamara	11	8	10	0	0	29
Total Provinsi	248	439	659	86	0	1.432

Sumber: DPMD, Kabupaten Barito Utara, 2025.



Gambar 2.51. Status Desa di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024.

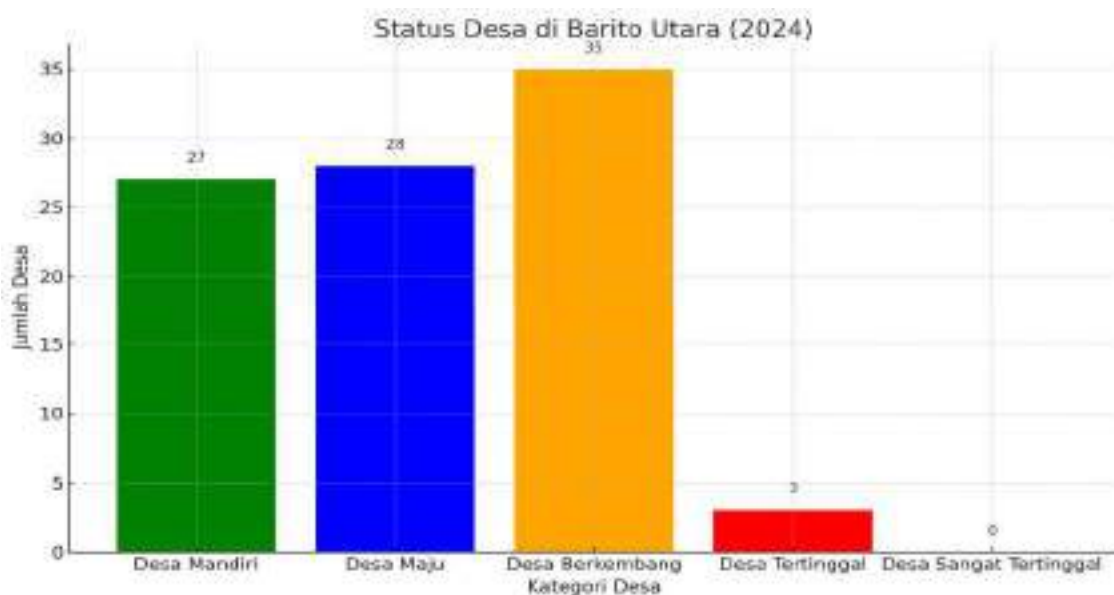
Berdasarkan Tabel 2.105 dan Gambar 2.51 di atas, dapat dilihat bahwa Kabupaten Barito Utara menunjukkan perkembangan yang cukup baik dalam hal status desa, meskipun masih terdapat desa yang berada dalam kategori Berkembang dan Tertinggal. Di Kabupaten Barito Utara, terdapat 27 desa Mandiri, yang mencakup sekitar 29% dari total desa di wilayah ini. Hal ini menunjukkan bahwa hampir sepertiga dari total desa di Kabupaten Barito Utara sudah berhasil mencapai kemandirian dalam berbagai aspek, seperti pengelolaan sumber daya alam, ekonomi, infrastruktur, dan pelayanan dasar. Pencapaian desa Mandiri ini merupakan hasil dari program pemberdayaan yang efektif, yang berfokus pada peningkatan kapasitas desa untuk mengelola potensi lokal secara mandiri tanpa bergantung pada bantuan eksternal. Desa Mandiri ini diharapkan dapat menjadi motor penggerak ekonomi daerah, mengingat kapasitas mereka dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya secara optimal.

Selain itu, terdapat 28 desa Maju di Kabupaten Barito Utara, yang berjumlah sekitar 30% dari total desa. Desa-desanya menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam hal infrastruktur

dan kapasitas pengelolaan sumber daya, namun masih membutuhkan dukungan lebih lanjut agar dapat mencapai status desa Mandiri. Desa-desanya yang berstatus Maju ini umumnya sudah memiliki berbagai layanan dasar yang lebih baik dan mulai berkembang dalam sektor ekonomi, meskipun masih ada tantangan untuk mencapainya menjadi desa yang sepenuhnya mandiri.

Di sisi lain, 35 desa Berkembang di Kabupaten Barito Utara menunjukkan bahwa sebagian besar desa di kabupaten ini masih dalam tahap perkembangan. Desa Berkembang ini mencakup sekitar 35% dari total desa, yang berarti bahwa mereka memiliki potensi untuk meningkat ke status Maju atau Mandiri dengan program pemberdayaan yang lebih terarah. Namun, tantangan besar yang dihadapi desa Berkembang ini adalah keterbatasan dalam akses terhadap infrastruktur dasar dan kapasitas pengelolaan yang perlu diperbaiki agar dapat bertransformasi ke desa yang lebih mandiri.

Di bagian lain, terdapat 3 desa Tertinggal, yang menunjukkan bahwa meskipun sebagian besar desa di Barito Utara berkembang dengan baik, masih ada desa yang tertinggal dalam hal infrastruktur dan kualitas pelayanan dasar. Desa Tertinggal ini menunjukkan bahwa ada ketimpangan dalam distribusi pembangunan di Kabupaten Barito Utara, yang memerlukan perhatian lebih besar agar mereka dapat bergerak ke arah yang lebih maju dan mandiri.



Gambar 2.52. Status Desa di Kabupaten Barito Utara Tahun 2024.

Jika dibandingkan dengan kabupaten lainnya, Kabupaten Kotawaringin Timur mencatatkan jumlah desa Mandiri terbanyak, yaitu 71 desa (42% dari total desa di kabupaten

tersebut), yang mencerminkan tingkat kemandirian yang sangat tinggi dibandingkan dengan kabupaten lain di provinsi ini. Kabupaten Kotawaringin Timur juga memiliki jumlah desa Maju yang tinggi, yaitu 44 desa, dan tidak ada desa yang berstatus Tertinggal. Kabupaten ini menjadi pemimpin dalam hal jumlah desa Mandiri dan Maju di Provinsi Kalimantan Tengah, dengan total 168 desa, menunjukkan kualitas pemberdayaan desa yang sangat baik.

Sementara itu, Kabupaten Kotawaringin Barat memiliki 46 desa Mandiri dari total 81 desa, yang berarti hampir 57% desa di kabupaten ini telah mencapai status Mandiri. Hal ini menunjukkan bahwa hampir seluruh desa di Kabupaten Kotawaringin Barat telah berstatus Mandiri atau Maju, tanpa adanya desa Tertinggal. Ini menunjukkan bahwa kabupaten ini juga memiliki tingkat pemberdayaan desa yang sangat baik, terutama dalam hal pengelolaan sumber daya dan pembangunan infrastruktur.

Di sisi lain, Kabupaten Kapuas dengan 214 desa memiliki 11 desa Mandiri dan 60 desa Maju. Meskipun jumlah desa Mandiri di Kapuas relatif rendah dibandingkan dengan kabupaten lainnya, ada jumlah desa yang signifikan dalam kategori Maju dan Berkembang, yang menunjukkan upaya yang berkelanjutan untuk memperbaiki status desa di daerah tersebut.

Kabupaten Gunung Mas dan Kabupaten Murung Raya menunjukkan perbedaan dalam distribusi desa yang cukup mencolok, dengan Kabupaten Gunung Mas memiliki 62 desa Berkembang dan 21 desa Tertinggal, sementara Kabupaten Murung Raya mencatatkan 88 desa Berkembang dan 15 desa Tertinggal. Penurunan jumlah desa Tertinggal di kedua kabupaten ini menunjukkan bahwa masih ada tantangan dalam mempercepat pemberdayaan desa di daerah-daerah tersebut, meskipun ada kemajuan yang jelas dalam upaya meningkatkan kualitas hidup di desa.

Kabupaten Barito Selatan dan Kabupaten Barito Timur, meskipun memiliki desa yang cukup banyak berstatus Maju dan Berkembang, masih memiliki beberapa desa yang tertinggal, dengan Kabupaten Barito Timur memiliki 1 desa Tertinggal dan Kabupaten Barito Selatan tidak mencatatkan desa Tertinggal. Hal ini menunjukkan adanya kemajuan dalam pembangunan desa, meskipun masih ada pekerjaan yang perlu dilakukan untuk memastikan bahwa tidak ada desa yang tertinggal dalam proses pembangunan.

Secara keseluruhan, Kabupaten Barito Utara berada di posisi yang baik, dengan sebagian besar desanya berada pada kategori Mandiri dan Maju, tetapi masih ada ruang untuk perbaikan, terutama dalam mengurangi jumlah desa yang masih berada dalam kategori Berkembang dan Tertinggal. Sebagai perbandingan, kabupaten-kabupaten seperti Kabupaten

Kotawaringin Timur dan Kotawaringin Barat menunjukkan contoh yang lebih unggul dalam hal desa Mandiri dan Maju, yang bisa menjadi acuan dalam upaya mempercepat pembangunan desa di Kabupaten Barito Utara.

Meskipun ada kemajuan yang signifikan dengan semakin banyaknya desa yang mencapai status Mandiri dan Maju, Kabupaten Barito Utara masih memiliki tantangan dalam meningkatkan desa-desa yang berada di kategori Berkembang dan Tertinggal. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun program pemberdayaan desa sudah berjalan dengan baik, masih perlu adanya peningkatan dalam aspek distribusi pembangunan dan akses ke berbagai layanan dasar. Upaya untuk mendorong desa-desa yang berada di kategori Berkembang dan Tertinggal menuju status yang lebih tinggi sangat penting agar kesejahteraan di seluruh wilayah Kabupaten Barito Utara dapat merata.

Jika kita melihat lebih rinci per kecamatan di Kabupaten Barito Utara, dapat dilihat bahwa setiap desa memiliki status Indeks Desa Membangun (IDM) yang berbeda, yang mencerminkan tingkat kemandirian sosial, ekonomi, dan lingkungan di masing-masing desa. IDM adalah indikator penting untuk menilai keberhasilan pembangunan di tingkat desa, dan terdiri dari tiga komponen utama: Indeks Kemandirian Sosial (IKS), Indeks Kemandirian Ekonomi (IKE), dan Indeks Kemandirian Lingkungan (IKL). Setiap desa memiliki nilai IDM yang mencerminkan tingkat kemajuan mereka dalam aspek-aspek tersebut.

Tabel 2.106 menyajikan terkait status IDM yang disajikan per desa dalam berbagai kecamatan di Kabupaten Barito Utara. Tabel tersebut tidak hanya memperlihatkan apakah sebuah desa sudah Mandiri, Maju, atau masih Berkembang, tetapi juga menunjukkan desa-desa yang masih tertinggal. Dengan data ini, kita bisa mengidentifikasi desa-desa yang perlu mendapatkan perhatian lebih untuk percepatan pembangunan, serta kabupaten-kabupaten yang memiliki desa dengan status kemandirian yang lebih tinggi.

Tabel 2.106. Status IDM Desa di Kabupaten Barito Utara per Kecamatan Tahun 2024

Kecamatan	Desa	IKS	IKE	IKL	Nilai IDM	Status IDM
Montallat	Sikan	0.7543	0.7833	0.8667	0.8014	Maju
Montallat	Rubei	0.7657	0.4	0.8	0.6552	Berkembang
Montallat	Pepas	0.7657	0.8333	0.6	0.733	Maju
Montallat	Ruji	0.7829	0.6	0.7333	0.7054	Berkembang
Montallat	Paring Lahung	0.8686	0.7167	0.9333	0.8395	Mandiri
Montallat	Kamawen	0.76	0.75	0.8	0.77	Maju
Gunung Timang	Malungai	0.88	0.9167	0.6	0.7989	Maju
Gunung Timang	Rarawa	0.7829	0.55	0.6	0.6443	Berkembang
Gunung Timang	Ketapang	0.9029	0.7667	0.9333	0.8676	Mandiri
Gunung Timang	Walur	0.8171	0.6333	0.9333	0.7946	Maju



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Tahun 2025-2029

Kecamatan	Desa	IKS	IKE	IKL	Nilai IDM	Status IDM
Gunung Timang	Baliti	0.8	0.6333	0.9333	0.7889	Maju
Gunung Timang	Majangkan	0.8171	0.55	0.9333	0.7668	Maju
Gunung Timang	Kandui	0.9257	0.8833	0.9333	0.9141	Mandiri
Gunung Timang	Payang Ara	0.7886	0.8167	0.8667	0.824	Mandiri
Gunung Timang	Jaman	0.84	0.75	0.8667	0.8189	Mandiri
Gunung Timang	Pelari	0.8229	0.6167	0.8	0.7465	Maju
Gunung Timang	Sangkorang	0.7829	0.6667	0.8667	0.7721	Maju
Gunung Timang	Siwau	0.7943	0.65	0.6667	0.7037	Berkembang
Gunung Timang	Tongka	0.6971	0.7167	0.8667	0.7602	Maju
Gunung Timang	Batu Raya I	0.9086	0.7167	0.8667	0.8306	Mandiri
Gunung Timang	Batu Raya li	0.84	0.6833	0.8	0.7744	Maju
Gunung Timang	Tapen Raya	0.7543	0.65	1	0.8014	Maju
Gunung Purei	Tanjung Harapan	0.56	0.4167	0.8	0.5922	Tertinggal
Gunung Purei	Linon Besii	0.6743	0.5667	0.8667	0.7025	Berkembang
Gunung Purei	Linon Besi li	0.7143	0.3833	0.9333	0.677	Berkembang
Gunung Purei	Muara Mea	0.7486	0.55	0.6667	0.6551	Berkembang
Gunung Purei	Lawarang	0.6229	0.4667	0.6	0.5632	Tertinggal
Gunung Purei	Lampeong I	0.7543	0.6167	0.8667	0.7459	Maju
Gunung Purei	Lampeong li	0.8857	0.9	0.8	0.8619	Mandiri
Gunung Purei	Payang	0.7714	0.4667	0.8667	0.7016	Berkembang
Gunung Purei	Berong	0.6971	0.5	0.6	0.599	Berkembang
Gunung Purei	Baok	0.6514	0.6	0.6667	0.6394	Berkembang
Gunung Purei	Tambaba	0.7257	0.5167	0.8667	0.703	Berkembang
Teweh Timur	Sampirang I	0.7543	0.5	0.8667	0.707	Berkembang
Teweh Timur	Sampirang li	0.6343	0.4333	0.8667	0.6448	Berkembang
Teweh Timur	Liju	0.7029	0.3833	0.8667	0.651	Berkembang
Teweh Timur	Benangin lii	0.7714	0.45	0.8	0.6738	Berkembang
Teweh Timur	Benangin li	0.7886	0.7667	0.9333	0.8295	Mandiri
Teweh Timur	Benangin V	0.8343	0.7167	0.8	0.7837	Maju
Teweh Timur	Benangin I	0.84	0.85	0.9333	0.8744	Mandiri
Teweh Timur	Muara Wakat	0.6514	0.3167	0.9333	0.6338	Berkembang
Teweh Timur	Mampuak I	0.8057	0.7167	1	0.8408	Mandiri
Teweh Timur	Jamut	0.7257	0.6667	0.9333	0.7752	Maju
Teweh Timur	Sei Liju	0.7257	0.4833	0.9333	0.7141	Maju
Teweh Timur	Mampuak li	0.8457	0.5833	0.8667	0.7652	Maju
Teweh Tengah	Lemo I	0.9029	0.7167	0.9333	0.851	Mandiri
Teweh Tengah	Lemo li	0.8686	0.8167	0.9333	0.8729	Mandiri
Teweh Tengah	Pendreh	0.9371	0.7167	0.9333	0.8624	Mandiri
Teweh Tengah	Rimba Sari	0.8571	0.7833	0.8667	0.8357	Mandiri
Teweh Tengah	Sei Rahayu I	0.84	0.7333	0.9333	0.8356	Mandiri
Teweh Tengah	Sei Rahayu li	0.8914	0.6667	1	0.8527	Mandiri
Teweh Tengah	Beringin Raya	0.7314	0.5833	1	0.7716	Maju
Teweh Tengah	Datai Nirui	0.7257	0.3333	0.5333	0.5308	Tertinggal
Lahei	Ipu	0.7257	0.4833	0.9333	0.7141	Maju
Lahei	Mukut	0.8	0.4667	0.9333	0.7333	Maju
Lahei	Muara Bakah	0.6286	0.3667	0.9333	0.6429	Berkembang
Lahei	Juju Baru	0.7371	0.3833	0.7333	0.6179	Berkembang
Lahei	Muara Inu	0.8229	0.5167	0.7333	0.691	Berkembang
Lahei	Bengahon	0.6629	0.4333	0.8	0.6321	Berkembang
Lahei	Rahaden	0.7771	0.3833	0.8	0.6535	Berkembang
Lahei	Muara Pari	0.7543	0.3667	0.8	0.6403	Berkembang
Lahei	Haragandang	0.6686	0.4333	0.9333	0.6784	Berkembang
Lahei	Karendan	0.7714	0.4333	0.8	0.6683	Berkembang
Lahei	Hurung Enep	0.6571	0.3667	0.8667	0.6302	Berkembang
Teweh Baru	Liang Naga	0.7257	0.7333	0.8667	0.7752	Maju
Teweh Baru	Sabuh	0.8457	0.75	0.8667	0.8208	Mandiri
Teweh Baru	Hajak	0.8629	0.9167	0.7333	0.8376	Mandiri

Kecamatan	Desa	IKS	IKE	IKL	Nilai IDM	Status IDM
Teweh Baru	Malawaken	0.8286	0.7833	0.8667	0.8262	Mandiri
Teweh Baru	Sikui	0.8914	0.95	0.8667	0.9027	Mandiri
Teweh Baru	Panaen	0.8057	0.5	0.8	0.7019	Berkembang
Teweh Baru	Liang Buah	0.6743	0.5333	0.8	0.6692	Berkembang
Teweh Baru	Gandring	0.7371	0.5333	0.8	0.6902	Berkembang
Teweh Selatan	Trahean	0.8971	0.6667	0.9333	0.8324	Mandiri
Teweh Selatan	Trinsing	0.88	0.65	0.8	0.7767	Maju
Teweh Selatan	Bintang Ninggi I	0.96	0.7	0.8	0.82	Mandiri
Teweh Selatan	Bintang Ninggi II	0.9029	0.7667	0.8	0.8232	Mandiri
Teweh Selatan	Butong	0.7771	0.5667	1	0.7813	Maju
Teweh Selatan	Buntok Baru	0.8229	0.5833	0.8	0.7354	Maju
Teweh Selatan	Bukit Sawit	0.9143	0.85	0.9333	0.8992	Mandiri
Teweh Selatan	Tawan Jaya	0.84	0.6833	0.9333	0.8189	Mandiri
Teweh Selatan	Pandran Raya	0.8286	0.7667	0.8667	0.8206	Mandiri
Teweh Selatan	Pandran Permai	0.8914	0.65	0.9333	0.8249	Mandiri
Lahei Barat	Nihan Hilir	0.8857	0.8167	0.5333	0.7452	Maju
Lahei Barat	Nihan Hulu	0.8629	0.6167	0.5333	0.671	Berkembang
Lahei Barat	Luwe Hilir	0.7657	0.5833	0.6667	0.6719	Berkembang
Lahei Barat	Luwe Hulu	0.8286	0.6167	0.7333	0.7262	Maju
Lahei Barat	Jangkang Baru	0.7314	0.4333	0.6667	0.6105	Berkembang
Lahei Barat	Jangkang Lama	0.8114	0.45	0.6	0.6205	Berkembang
Lahei Barat	Papar Pujung	0.9143	0.7333	0.5333	0.727	Maju
Lahei Barat	Teluk Malewai	0.8457	0.5333	0.6	0.6597	Berkembang
Lahei Barat	Benao Hilir	0.8857	0.5	0.9333	0.773	Maju
Lahei Barat	Benao Hulu	0.8171	0.5	0.5333	0.6168	Berkembang
Lahei Barat	Karamuan	0.76	0.5333	0.6667	0.6533	Berkembang

Sumber: DPMD, Kabupaten Barito Utara, 2025.

Berdasarkan Tabel 2.106 di atas, dapat diamati bahwa status IDM di Kabupaten Barito Utara menunjukkan perbedaan yang signifikan antar desa. Setiap desa memiliki nilai IDM yang mencerminkan tingkat kemandirian sosial, ekonomi, dan lingkungan, yang juga dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti infrastruktur, kualitas pendidikan, akses kesehatan, serta ketersediaan dan pengelolaan sumber daya alam.

Desa Kandui Kecamatan Gunung Timang, tercatat sebagai desa dengan nilai IDM tertinggi di Kabupaten Barito Utara, yaitu 0.9141, dengan status Mandiri. Desa ini menunjukkan pencapaian luar biasa dalam hal kemandirian di berbagai aspek. IKS desa ini mencapai 0.9257, yang mencerminkan tingkat sosial yang sangat baik, di mana masyarakatnya memiliki hubungan sosial yang kuat dan harmonis. IKE Desa Kandui sebesar 0.8833, yang menunjukkan adanya pengelolaan ekonomi yang efisien dan produktif, serta kapasitas masyarakat untuk menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan pendapatan. Sementara itu, IKL sebesar 0.9333 menunjukkan bahwa desa ini memiliki kesadaran lingkungan yang tinggi, dengan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Keberhasilan Desa Kandui dalam mencapai status Mandiri menjadikannya model

yang sangat baik bagi desa-desa lain yang sedang berusaha mencapai kemandirian dalam berbagai aspek.

Di sisi lain, Desa Tanjung Harapan Kecamatan Gunung Purei, mencatatkan nilai IDM terendah, yaitu 0.5922 dengan status Tertinggal. Nilai IKS yang hanya 0.5600 menunjukkan rendahnya tingkat kohesi sosial dalam masyarakat di desa ini. Hal ini bisa disebabkan oleh rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosial dan keterbatasan dalam memperoleh akses terhadap layanan sosial yang memadai. Nilai IKE yang rendah (0.4167), menunjukkan bahwa desa ini menghadapi kesulitan dalam mengembangkan sektor ekonomi, dengan rendahnya kesempatan kerja, daya beli masyarakat yang terbatas, serta kurangnya akses terhadap pasar atau sumber daya ekonomi lainnya. IKL sebesar 0.8000 menunjukkan bahwa meskipun desa ini memiliki beberapa upaya untuk menjaga kelestarian lingkungan, faktor sosial dan ekonomi masih menjadi tantangan utama yang perlu diperbaiki. Desa Tanjung Harapan memerlukan perhatian besar dalam hal pengembangan infrastruktur dasar, pemberdayaan masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan, dan peningkatan akses terhadap layanan kesehatan dan ekonomi agar bisa beralih dari status Tertinggal menuju kategori yang lebih tinggi.

Selain itu, sebagian besar desa di Kabupaten Barito Utara berada dalam kategori Maju dan Berkembang, yang menunjukkan bahwa meskipun mereka sudah menunjukkan kemajuan, masih banyak ruang untuk perbaikan. Sebagai contoh, Desa Pepas di Kecamatan Montallat memiliki nilai IDM sebesar 0.7330, dengan status Maju. Desa ini memiliki nilai IKS sebesar 0.7657, yang mencerminkan tingkat sosial yang cukup baik, meskipun masih ada kebutuhan untuk memperbaiki partisipasi sosial masyarakat. Nilai IKE desa ini yang mencapai 0.8333 menunjukkan adanya upaya yang cukup baik dalam pengelolaan ekonomi desa, tetapi masih ada kebutuhan untuk meningkatkan keberagaman sumber pendapatan masyarakat. IKL sebesar 0.6000 menunjukkan bahwa desa ini masih perlu meningkatkan kesadaran dan pengelolaan lingkungan untuk mencapai hasil yang lebih baik. Meskipun desa ini sudah dalam kategori Maju, masih banyak aspek yang perlu diperbaiki agar bisa mencapai status Mandiri.

Desa lainnya, seperti Desa Walur dan Desa Payang Ara yang terletak di Kecamatan Gunung Timang, juga memiliki nilai IDM yang cukup tinggi, yaitu 0.7946 dan 0.8240. Kedua desa ini berada pada status Maju, namun masih perlu perbaikan dalam hal pengelolaan sumber daya alam dan peningkatan kualitas hidup masyarakat agar dapat mencapai status Mandiri. Desa Payang Ara, dengan nilai IKS sebesar 0.7886, IKE sebesar 0.8167, dan IKL

sebesar 0.8667, menunjukkan potensi besar dalam bidang sosial dan ekonomi, meskipun masih ada tantangan di sektor lingkungan.



Gambar 2.53. Jumlah Desa Berdasarkan Status IDM di Kabupaten Barito Utara Tahun 2024.

Secara keseluruhan, sebagian besar desa di Kabupaten Barito Utara menunjukkan hasil yang bervariasi dalam hal kemandirian, dengan sebagian desa yang sudah mencapai status Mandiri dan Maju, sementara yang lainnya masih berada pada status Berkembang dan Tertinggal. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada kemajuan yang signifikan, masih banyak desa yang perlu mendapat perhatian khusus dalam hal pengembangan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi, dan peningkatan kualitas sosial untuk mencapai status Mandiri. Penting bagi pemerintah daerah dan pihak terkait untuk fokus pada desa-desa yang masih tertinggal dan memberikan intervensi yang tepat untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

2.3.7. Stabilitas Ekonomi Makro

Stabilitas ekonomi makro menjadi salah satu pilar penting dalam pembangunan ekonomi suatu daerah, termasuk Kabupaten Barito Utara. Keberhasilan dalam menjaga stabilitas ekonomi makro akan berdampak pada peningkatan daya saing daerah, penciptaan lapangan pekerjaan, serta kesejahteraan masyarakat. Stabilitas ekonomi makro mencakup berbagai aspek, seperti tingkat inflasi yang terkontrol, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, serta pengelolaan pengeluaran dan konsumsi yang efisien. Dalam konteks Kabupaten Barito Utara, upaya menjaga stabilitas ekonomi makro harus melibatkan kebijakan yang mengatur inflasi,

pengembangan ekonomi regional, serta pengelolaan pengeluaran konsumsi per kapita yang merata di seluruh lapisan masyarakat.

2.3.7.1. Inflasi

Inflasi adalah salah satu faktor yang paling mempengaruhi stabilitas ekonomi, baik secara nasional maupun di tingkat daerah. Di Kabupaten Barito Utara, pengendalian inflasi sangat penting untuk menjaga daya beli masyarakat dan menghindari ketidakstabilan harga barang dan jasa. Inflasi yang tinggi dapat menyebabkan harga barang kebutuhan pokok naik, yang berakibat pada menurunnya kualitas hidup masyarakat, terutama bagi mereka yang berada di lapisan ekonomi bawah. Oleh karena itu, pemantauan dan pengendalian inflasi menjadi bagian yang penting dari kebijakan ekonomi daerah. Upaya untuk mengendalikan inflasi dapat dilakukan melalui kebijakan moneter yang bijaksana, serta pengendalian harga pangan dan barang kebutuhan lainnya agar tetap stabil.

Karena data inflasi tingkat Kabupaten Barito Utara belum tersedia secara konsisten, analisis ini menggunakan inflasi Provinsi Kalimantan Tengah sebagai proksi yang paling relevan. Dasarnya berupa rantai pasok dan pembentukan harga di kabupaten terhubung erat dengan pasar provinsi, kebijakan harga yang diatur (BBM/LPG) berlaku seragam, dan seri bulanan provinsi tersedia lengkap. Meski demikian, hasil perlu dibaca dengan hati-hati karena bisa ada selisih level akibat biaya logistik dan ketersediaan pasokan lokal; karenanya interpretasi diposisikan sebagai kisaran indikatif, bukan angka pasti kabupaten. Gambar 2.54 menyajikan terkait infalasi bulanan Provinsi Kalimantan Tengah Periode 2019-2024.



Gambar 2.54. Inflasi bulanan Provinsi Kalimantan Tengah Periode 2019-2024.

Data yang digunakan adalah inflasi tahun kalender (*year-to-date*), yaitu akumulasi perubahan Indeks Harga Konsumen dari Desember tahun sebelumnya hingga bulan berjalan.

Karakteristik data ini membuat nilai pada Januari relatif kecil, lalu bertambah atau berkurang seiring perubahan harga pada bulan-bulan berikutnya. Berdasarkan Gambar 2.54 di atas, rangkaian 2019–2024 menunjukkan siklus yang informatif bagi perencanaan daerah, khususnya belanja rumah tangga, intervensi pengendalian inflasi, dan penyesuaian program perlindungan sosial.

Tahun 2019 merepresentasikan situasi pra-pandemi yang relatif stabil. Inflasi meningkat perlahan dari 0,42% pada Januari dan menutup tahun di 2,45%. Tekanan harga utamanya bersifat musiman: kebutuhan hari raya, kenaikan biaya transport menjelang liburan, serta normalisasi pasokan di akhir tahun. Pola ini umum terjadi pada wilayah yang terhubung jalur distribusi sungai dan darat, dimana komponen transport menyumbang transmisi harga bahan pokok ke pasar kabupaten.

Memasuki tahun 2020, pandemi Covid-19 menekan mobilitas, pariwisata, dan konsumsi. Inflasi bergerak rendah sepanjang tahun dan berakhir di 1,03%. Situasi ini merefleksikan permintaan yang lemah (*demand-pull* menurun) sehingga kenaikan harga tertahan. Di level rumah tangga, biaya hidup cenderung stabil, tetapi risiko pengangguran dan penurunan pendapatan meningkat—sebuah konteks penting bagi kebijakan bantuan sosial dan stabilisasi harga di pasar tradisional.

Pada tahun 2021, ekonomi berangsur pulih. Inflasi meningkat terukur dari 0,09% (Januari) dan mencapai 3,32% (Desember). Kenaikan paling terlihat pada paruh kedua tahun ketika aktivitas perdagangan, jasa, dan transportasi kembali hidup. Ini menandakan pemulihan permintaan yang diikuti penyesuaian harga oleh pelaku usaha, sementara gangguan pasokan global masih terasa tetapi tidak seekstrem tahun berikutnya.

Tahun 2022 menjadi titik balik dengan lonjakan inflasi paling tajam dalam seluruh seri. Angka bergerak dari 0,61% (Januari) ke 6,32% (Desember), dengan peningkatan nyata pada April–Juni (2,38% → 4,71%) dan kembali menanjak pada September–Desember (5,94% → 6,32%). Pola ini konsisten dengan kejutan biaya (*cost-push*): penyesuaian harga energi/BBM pada triwulan III, normalisasi tarif transport, serta tekanan komoditas pangan bergejolak. Bagi wilayah *hinterland* seperti Barito Utara, kenaikan harga energi memperlebar biaya distribusi, sehingga harga bahan pokok di pasar lokal terdorong naik. Pada fase seperti ini, operasi pasar, subsidi ongkos angkut ke wilayah sulit, dan kerja sama antardaerah untuk pasokan beras/cabai menjadi instrumen kunci.

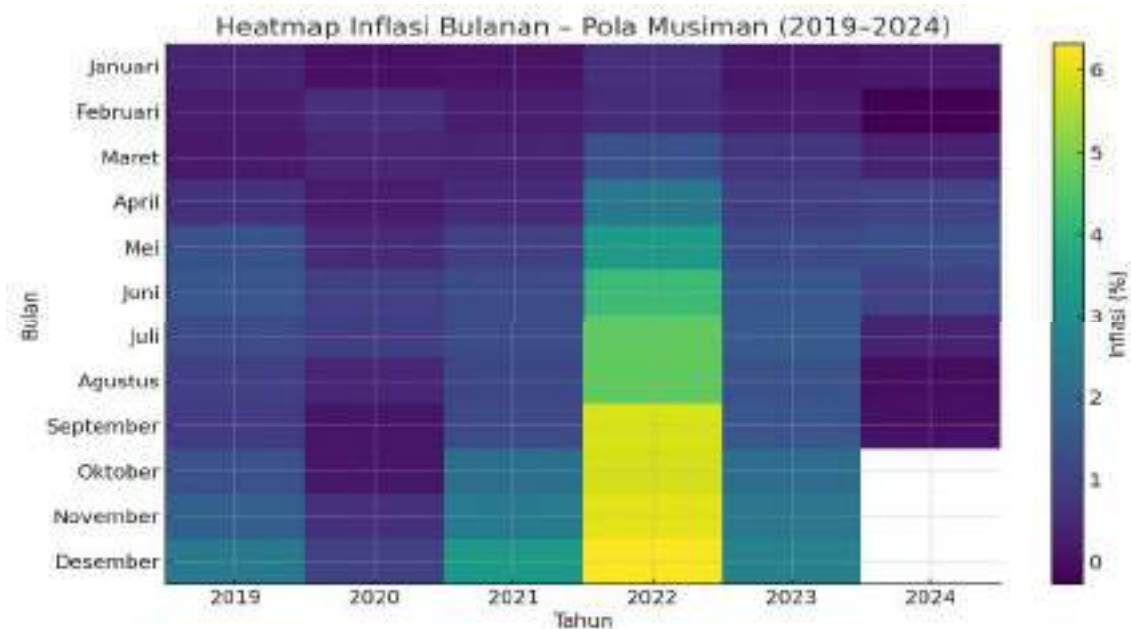
Setelah puncak pada tahun 2022, pada tahun 2023 memperlihatkan *disinflasi*. Akumulasi *inflasi* turun signifikan dan menutup tahun di 2,64%. Meski demikian, ada kecenderungan peningkatan pada Oktober–Desember (2,10%→2,64%) yang sejalan pola musiman akhir tahun—liburan, pernikahan, dan kenaikan permintaan transport/perhotelan. Pada periode ini, efek basis (*base effect*) dari lonjakan tahun 2022 mulai memudar, sementara stabilisasi pasokan pangan dan kebijakan pengendalian inflasi daerah (misal operasi pasar, SPHP beras) memperkuat penurunan tekanan harga.

Kondisi tahun 2024 (sampai dengan September) sangat jinak. Akumulasi hanya 0,05%, bahkan terjadi *deflasi* pada Februari (−0,27%) dan kembali mendekati 0 (nol) pada Agustus (−0,02%). Beberapa faktor yang lazim menjelaskan situasi seperti ini antara lain terkendalinya harga energi, membaiknya distribusi pasokan pokok, dan penurunan permintaan pada komoditas tertentu. Meskipun demikian, kewaspadaan tetap diperlukan terhadap risiko cuaca (banjir/kemarau) yang dapat mengganggu pasokan hortikultura, serta volatilitas harga beras yang sangat sensitif terhadap panen dan stok cadangan. Data Oktober–Desember 2024 belum tersedia; karena itu, proyeksi akhir tahun sebaiknya disiapkan dalam skenario: baseline melanjutkan tren rendah, atas mengantisipasi kenaikan musiman akhir tahun, dan bawah jika deflasi berlanjut akibat pasokan berlimpah.

Dari sisi pola musiman, beberapa tahun (2019, 2021, 2023) menunjukkan kecenderungan naik pada Mei–September, terkait dengan periode Ramadan–Idulfitri, arus mudik, dan penyesuaian tarif transport; sementara Oktober–Desember kerap lebih tinggi karena musim liburan dan pergeseran permintaan jasa.

Heatmap yang tersaji pada Gambar 2.55 menampilkan inflasi *year-to-date* (YTD) Provinsi Kalimantan Tengah periode 2019–2024 dalam format matriks bulan (vertikal: Januari–Desember) terhadap tahun (horizontal: 2019–2024). Setiap sel menunjukkan akumulasi inflasi dari Desember tahun sebelumnya hingga bulan berjalan—karena itu, nilai pada awal tahun wajar lebih rendah dan meningkat seiring waktu. Intensitas warna merepresentasikan besaran akumulasi inflasi: semakin “pekat”, semakin tinggi tekanannya. Pola musiman biasanya muncul pada dua jendela waktu: Maret–Juni (terkait Ramadan–Idulfitri dan mobilitas) serta Oktober–Desember (akhir tahun/peak season). Khusus tahun 2024, data Oktober–Desember belum tersedia sehingga sel-sel pada periode tersebut kosong; sementara Februari dan Agustus 2024 sempat menunjukkan tekanan yang sangat rendah/deflasi sehingga akumulasi YTD tetap kecil. Bacaan *heatmap* ini berguna untuk mengidentifikasi kapan tekanan harga

cenderung menguat, membandingkan profil antar-tahun, dan membedakan pola musiman dari kejutan biaya yang bersifat struktural.



Gambar 2.55. *Heatmap Inflasi Bulanan Pola Musiman Provinsi Kalimantan Tengah Periode 2019-2024.*

Berdasarkan Gambar 2.55 di atas, terlihat pola umum bahwa awal tahun (Januari–Februari) relatif tenang pada hampir semua tahun, diikuti penguatan pada Maret–Juni dan kembali meningkat pada Oktober–Desember. Tahun 2019 menunjukkan kenaikan moderat dan konsisten hingga penutupan tahun (~2,45%). Tahun 2020 tampak “dingin” sepanjang kolom—akumulasi rendah (~1,03%) akibat lemahnya permintaan selama pandemi. Tahun 2021 menghangat mulai pertengahan tahun dan menutup lebih tinggi (~3,32%) seiring pemulihan.

Tahun 2022 adalah *outlier*: hampir seluruh sel “panas” dari tengah hingga akhir tahun (puncak ~6,32%), mencerminkan *cost-push* (energi/transport dan pangan bergejolak) yang melampaui pola musiman biasa. Tahun 2023 memperlihatkan *disinflasi*—kolom kembali lebih “sejuk” dibanding 2022 dan berakhir ~2,64% walau tetap menguat di kuartal IV. Tahun 2024 (sampai dengan September) sangat jinak: akumulasi YTD hanya ~0,05% dengan episode deflasi (Februari –0,27% dan Agustus –0,02%); data Oktober–Desember belum ada. Implikasi praktisnya, pengendalian inflasi dapat diprioritaskan menjelang Maret–Juni dan Oktober–Desember (stok pangan, dukungan distribusi, dan koordinasi tarif/angkutan), sambil tetap

waspada terhadap kejutan biaya non-musiman seperti tahun 2022 yang dapat menghangatkan seluruh kolom sepanjang tahun.

Secara keseluruhan, inflasi Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2019–2024 menunjukkan lintasan stabil pra-pandemi (2019), sangat rendah karena pandemi (2020), pemulihan (2021), lonjakan kuat akibat kejutan biaya terutama energi/transport dan pangan bergejolak (2022, puncak $\pm 6,32\%$), lalu kembali disinflasi pada tahun 2023 ($\pm 2,64\%$) dan sangat jinak hingga September 2024 (akumulasi $\pm 0,05\%$ dengan episode *deflasi* Februari $-0,27\%$ dan Agustus $-0,02\%$; data Oktober–Desember belum tersedia). *Heatmap* menegaskan dua jendela musiman yang konsisten, yakni Maret–Juni (terkait Ramadan–Idulfitri) dan Oktober–Desember (akhir tahun), ketika akumulasi *year-to-date* cenderung berakselerasi; sementara tahun 2022 tampak sebagai *outlier* yang “memanaskan” hampir seluruh bulan akibat faktor struktural non-musiman. Bagi Kabupaten Barito Utara—karena belum ada data kabupaten—angka provinsi layak dijadikan *baseline* dengan penyesuaian lokal $\pm 0,5$ – $1,0$ poin persentase untuk mencerminkan biaya logistik dan pasokan setempat; prioritas pengendalian harga difokuskan pada komoditas kunci (beras, protein hewani, cabai, minyak goreng) dan *administered prices* (BBM/LPG/transport), dengan intervensi stok dan distribusi yang diperketat menjelang dua periode musiman tersebut serta pemantauan m/m untuk mendeteksi deviasi lokal sejak dini.

2.3.7.2. Ekonomi Regional Daerah

Ekonomi regional daerah mencerminkan kinerja ekonomi suatu wilayah dalam kerangka yang lebih besar, baik itu provinsi maupun negara. Di Kabupaten Barito Utara, pertumbuhan ekonomi regional harus didorong dengan memanfaatkan potensi lokal yang ada, seperti sektor pertanian, perikanan, dan industri pengolahan. Mengembangkan ekonomi regional yang berkelanjutan akan membantu menciptakan lapangan kerja, menarik investasi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kegiatan ekonomi di tingkat regional ini juga harus diselaraskan dengan kebijakan pembangunan yang ada, termasuk infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Keberhasilan dalam mengelola ekonomi regional akan meningkatkan ketahanan ekonomi kabupaten dan mempercepat proses pembangunan.

Dalam analisis ekonomi regional daerah, salah satu indikator yang penting untuk menilai kondisi ekonomi suatu daerah adalah PDRB atas dasar harga berlaku menurut pengeluaran. PDRB memberikan gambaran mengenai nilai total barang dan jasa yang diproduksi dalam

suatu wilayah dalam periode tertentu, serta komponen-komponen yang menyusun total tersebut. Tabel 2.107 menunjukkan komponen pengeluaran yang membentuk PDRB di Kabupaten Barito Utara selama periode 2020-2024. Tabel ini mencakup data mengenai konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah, PMTB, perubahan inventori, serta ekspor dan impor, yang berpengaruh langsung terhadap perekonomian daerah.

Tabel 2.107. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Kabupaten Barito Utara, 2020–2024 (Miliar Rp)

Komponen Pengeluaran	Pengeluaran				
	2020	2021	2022	2023*	2024**
Konsumsi Rumah Tangga	4.171,10	4.322,00	4.635,40	5.026,40	5.548,10
Konsumsi LNPRT	202,8	213	236,6	259,8	298,3
Konsumsi Pemerintah	1.030,10	1.077,60	1.133,70	1.227,00	1.367,40
Pembentukan Modal Tetap Bruto	4.492,30	4.661,30	4.847,20	5.396,70	5.794,40
Perubahan Inventori	297,7	160,5	143	-26,4	96,2
Ekspor	7.050,20	8.047,30	12.121,30	12.185,00	11.288,60
Dikurangi Impor	7.852,40	7.926,40	8.819,60	9.890,30	10.353,70
PDRB	9.391,70	10.565,20	14.297,60	14.178,30	14.039,30

Keterangan: *Angka Sementara; **Angka Sangat Sementara.

Sumber: BPS, 2025.

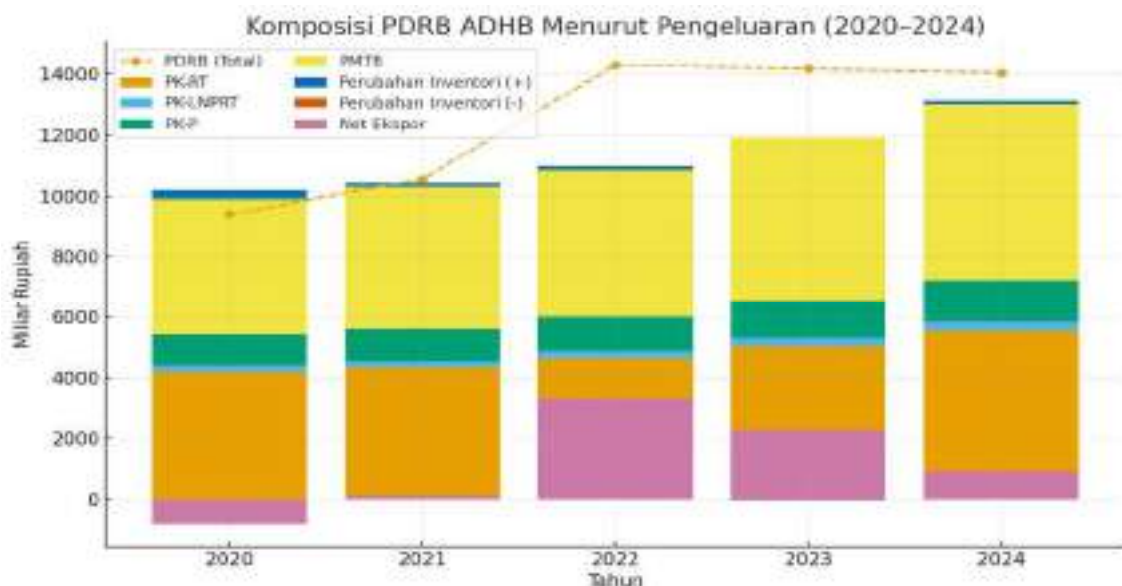
Berdasarkan Tabel 2.107 di atas, PDRB atas dasar harga berlaku di Kabupaten Barito Utara mengalami kenaikan yang signifikan dari tahun 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, PDRB tercatat sebesar Rp9.391,7 miliar, dan kemudian meningkat menjadi Rp10.565,2 miliar pada tahun 2021, hal ini menunjukkan adanya pertumbuhan ekonomi yang positif. Kenaikan yang cukup besar terjadi pada tahun 2022, dengan PDRB meningkat menjadi Rp14.297,6 miliar, yang merupakan kenaikan hampir 35% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada tahun 2023, PDRB sedikit menurun menjadi Rp14.178,3 miliar, dan pada tahun 2024 diperkirakan akan sedikit menurun lagi menjadi Rp14.039,3 miliar. Penurunan ini mungkin dipengaruhi oleh beberapa faktor eksternal seperti fluktuasi harga komoditas atau perubahan dalam pola konsumsi dan investasi.

Secara lebih rinci, konsumsi rumah tangga menunjukkan kenaikan yang stabil, dari Rp4.171,1 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp5.548,1 miliar pada tahun 2024, yang mencerminkan peningkatan daya beli masyarakat Kabupaten Barito Utara. Peningkatan konsumsi ini memberikan gambaran bahwa konsumsi domestik menjadi salah satu pendorong utama perekonomian daerah.

Konsumsi LNPRRT dan konsumsi pemerintah juga meningkat, dengan nilai konsumsi LNPRRT yang tercatat Rp259,8 miliar pada tahun 2023 dan diperkirakan mencapai Rp298,3 miliar pada tahun 2024. Konsumsi pemerintah meningkat dari Rp1.030,1 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp1.367,4 miliar pada tahun 2024, yang menunjukkan bahwa pemerintah terus melakukan pengeluaran untuk mendukung perekonomian daerah.

PMTB yang menunjukkan tingkat investasi di daerah, mengalami kenaikan yang konsisten dari Rp4.492,3 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp5.794,4 miliar pada tahun 2024, yang menunjukkan adanya upaya untuk meningkatkan kapasitas produksi dan infrastruktur daerah. Namun, perubahan inventori menunjukkan fluktuasi yang lebih besar, setelah tercatat Rp297,7 miliar pada tahun 2020, perubahan inventori mengalami penurunan signifikan pada tahun 2023, yaitu Rp-26,4 miliar, yang mengindikasikan bahwa stok barang yang disimpan atau diproduksi lebih rendah daripada tahun-tahun sebelumnya. Ekspor di Kabupaten Barito Utara juga menunjukkan angka yang positif, dengan peningkatan yang stabil dari Rp7.050,2 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp12.121,3 miliar pada tahun 2022, meskipun mengalami penurunan pada tahun 2024 menjadi Rp11.288,6 miliar.

Impor juga mengalami kenaikan seiring dengan meningkatnya konsumsi dan kebutuhan barang dari luar negeri. Meskipun ada peningkatan, namun net ekspor di daerah ini tetap memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian.



Gambar 2.56. Komposisi PDRB ADHB menurut pengeluaran Kabupaten Barito Utara Tahun 2020-2024.

Melanjutkan dari penjelasan sebelumnya mengenai PDRB atas dasar harga berlaku, kita juga perlu memahami PDRB atas dasar harga konstan, yang menghilangkan efek inflasi dan memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai pertumbuhan ekonomi riil di Kabupaten Barito Utara. Dengan menggunakan harga konstan 2010, kita dapat melihat bagaimana pengeluaran ekonomi di daerah ini berkembang tanpa dipengaruhi oleh fluktuasi harga barang dan jasa. Tabel 2.108 menunjukkan perkembangan PDRB atas dasar harga konstan selama periode 2020-2024, yang mencakup komponen pengeluaran seperti konsumsi rumah tangga, PMTB, serta ekspor dan impor yang langsung berpengaruh terhadap PDRB daerah.

Tabel 2.108. PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran Kabupaten Barito Utara Tahun 2020–2024

No.	Komponen Pengeluaran	Pengeluaran (Miliar Rp)				
		2020	2021	2022	2023*	2024**
1	Konsumsi Rumah Tangga	2.469,50	2.531,50	2.592,30	2.669,40	2.842,30
2	Konsumsi LNPRT	124,6	127,2	132,9	139,6	156
3	Konsumsi Pemerintah	664,8	663,2	683	712,6	771
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	2.735,60	2.781,50	2.816,90	2.936,50	3.068,40
5	Perubahan Inventori	91,1	71,6	45,4	119	58,7
6	Ekspor	6.036,80	6.173,90	6.782,70	7.166,60	7.429,70
7	Dikurangi Impor	5.167,00	5.197,00	5.455,40	5.728,40	5.903,60
PDRB		6.955,40	7.151,80	7.597,90	8.015,30	8.422,30

Keterangan: *Angka Sementara; **Angka Sangat Sementara

Sumber: BPS, 2025.

Berdasarkan Tabel 2.108 di atas, PDRB atas dasar harga konstan di Kabupaten Barito Utara menunjukkan pertumbuhan yang stabil dari tahun 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, PDRB tercatat sebesar Rp6.955,4 miliar, dan terus meningkat menjadi Rp7.151,8 miliar pada tahun 2021. Kenaikan ini menunjukkan adanya pemulihan ekonomi yang baik. PDRB kembali meningkat pesat pada tahun 2022 mencapai Rp7.597,9 miliar yang mencerminkan pertumbuhan yang kuat dalam ekonomi riil, meskipun ada penurunan kecil pada tahun 2023, dengan PDRB tercatat sebesar Rp8.015,3 miliar. Namun, pada tahun 2024 PDRB diperkirakan akan mengalami peningkatan lebih lanjut menjadi Rp8.422,3 miliar, hal ini menunjukkan kestabilan dan pertumbuhan berkelanjutan.

Salah satu komponen pengeluaran yang signifikan adalah konsumsi rumah tangga, yang menunjukkan kenaikan stabil dari Rp2.469,5 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp2.842,3 miliar pada tahun 2024. Peningkatan ini mencerminkan adanya peningkatan daya beli

masyarakat dan kebutuhan konsumsi yang terus meningkat, seiring dengan perbaikan ekonomi di Kabupaten Barito Utara.

Konsumsi LNPRT juga mengalami kenaikan secara konsisten, dari Rp124,6 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp156,0 miliar pada tahun 2024, yang menunjukkan adanya peningkatan konsumsi barang dan jasa dari luar negeri yang diimpor oleh rumah tangga dan sektor swasta. Konsumsi pemerintah juga menunjukkan tren positif, dengan konsumsi pemerintah yang tercatat sebesar Rp664,8 miliar pada tahun 2020 dan diperkirakan akan meningkat menjadi Rp771,0 miliar pada tahun 2024, hal tersebut mencerminkan adanya peningkatan belanja pemerintah untuk pembangunan dan pelayanan publik.

PMTB terus meningkat dari Rp2.735,6 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp3.068,4 miliar pada tahun 2024. Peningkatan ini menunjukkan adanya upaya pemerintah dan sektor swasta untuk meningkatkan kapasitas produksi dan memperkuat infrastruktur daerah. Di sisi lain, perubahan inventori menunjukkan adanya fluktuasi besar, dari Rp91,1 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp45,4 miliar pada tahun 2022, dengan lonjakan pada tahun 2023 menjadi Rp119,0 miliar. Hal ini menunjukkan terjadi perubahan dalam strategi inventori dan pengelolaan stok barang yang mungkin dipengaruhi oleh fluktuasi permintaan dan kondisi pasar.

Ekspor terus menunjukkan kenaikan yang stabil, dari Rp6.036,8 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp7.429,7 miliar pada tahun 2024, yang mencerminkan pertumbuhan sektor ekspor dan kontribusinya terhadap perekonomian daerah. Impor juga meningkat, namun tidak secepat ekspor, yang menghasilkan surplus perdagangan yang berkontribusi positif terhadap PDRB.



Gambar 2.57. PDRB harga konstan 2010 Kabupaten Barito Utara Tahun 2020-2024.

Tabel 2.109 menunjukkan distribusi komponen pengeluaran yang membentuk PDRB Kabupaten Barito Utara dalam bentuk persentase. Tabel ini memberikan gambaran tentang kontribusi relatif dari masing-masing sektor terhadap total PDRB daerah selama periode 2020-2024. Pemahaman terhadap distribusi pengeluaran ini sangat penting untuk melihat sektor-sektor mana yang menjadi pendorong utama perekonomian daerah serta bagaimana kontribusi berbagai komponen berubah sepanjang waktu. Distribusi ini juga mencerminkan perubahan prioritas pengeluaran yang dapat memengaruhi kebijakan ekonomi daerah ke depan.

Tabel 2.109. Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Kabupaten Barito Utara Tahun 2020-2024

No.	Komponen Pengeluaran	Pengeluaran (%)				
		2020	2021	2022	2023*	2024 **
1	Konsumsi Rumah Tangga	44,41	41	32,42	35,45	39,52
2	Konsumsi LNPRT	2,16	2,02	1,65	1,83	2,12
3	Konsumsi Pemerintah	10,97	10,2	7,93	8,65	9,74
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	47,83	44,12	33,9	38,06	41,27
5	Perubahan Inventori	3,17	1,52	1	-0,19	0,69
6	Ekspor	75,07	76,17	84,78	85,94	80,41
7	Dikurangi Impor	83,61	75,02	61,69	69,76	73,75
PDRB		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

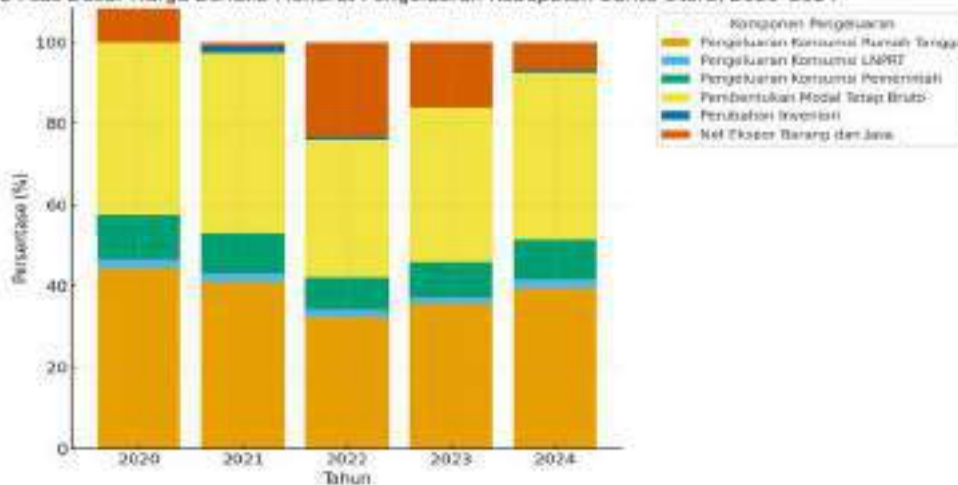
Keterangan: *Angka Sementara; **Angka Sangat Sementara

Sumber: BPS, 2025.

Berdasarkan Tabel 2.109 di atas, distribusi PDRB atas dasar harga berlaku di Kabupaten Barito Utara menunjukkan perubahan signifikan dalam komponen pengeluaran dari tahun 2020 hingga 2024. Konsumsi rumah tangga yang merupakan komponen terbesar dalam pengeluaran, mengalami penurunan persentase dari 44,41% pada tahun 2020 menjadi 39,52% pada tahun 2024, hal ini menandakan pergeseran dalam pola konsumsi dan prioritas ekonomi daerah. Di sisi lain, meskipun konsumsi LNPRT dan konsumsi pemerintah memberikan kontribusi yang kecil, kedua sektor ini mengalami perubahan moderat, mencerminkan pengaruh kebijakan dan alokasi belanja pemerintah yang stabil namun tidak dominan. Sementara itu, PMTB yang menunjukkan investasi dalam infrastruktur dan sektor produktif, mengalami penurunan relatif dalam kontribusinya terhadap PDRB, meskipun nilai nominalnya terus meningkat, yang menunjukkan adanya perubahan dalam efisiensi dan fokus pengeluaran.

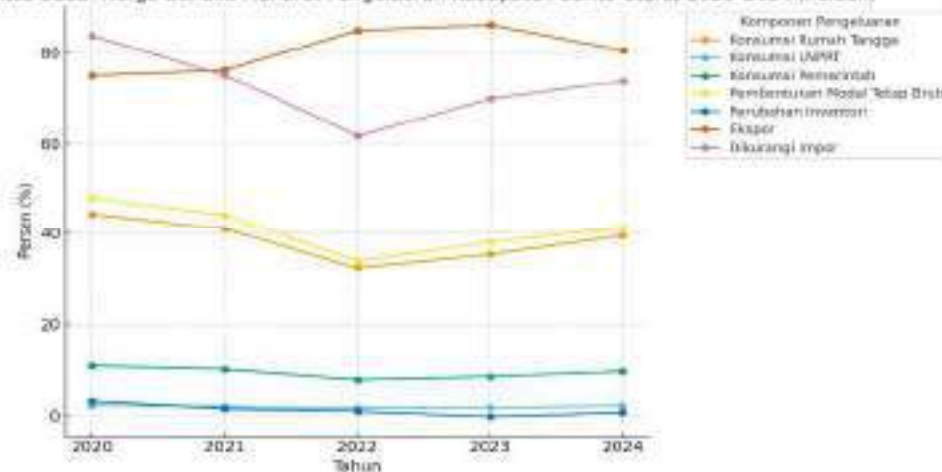
Pada sisi lain, sektor yang lebih terkait dengan pertumbuhan sektor domestik mengalami peningkatan kontribusi, meskipun tidak secara eksplisit disebutkan. Konsumsi rumah tangga, meskipun turun persentasenya, masih menjadi pendorong utama perekonomian, mencerminkan daya beli masyarakat yang terus tumbuh meskipun ada pergeseran dalam struktur pengeluaran. Kenaikan pada konsumsi LNPRRT serta kontribusi konsumsi pemerintah yang stabil dapat mencerminkan dinamika dalam kebijakan fiskal dan pengeluaran publik yang tetap memberikan peran penting dalam menjaga kestabilan ekonomi daerah.

Komposisi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Kabupaten Barito Utara, 2020-2024



Gambar 2.58. Komposisi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Kabupaten Barito Utara Tahun 2020-2024.

Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Kabupaten Barito Utara, 2020-2024 (Persen)



Gambar 2.59. Persentase Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Kabupaten Barito Utara Tahun 2020-2024.

Setelah melihat level dan distribusi PDRB menurut pengeluaran, langkah berikutnya adalah menilai sumber pertumbuhan riilnya. Laju pertumbuhan ADHK 2010 memperlihatkan bagaimana tiap komponen mendorong atau menahan pertumbuhan dari tahun ke tahun tanpa bias perubahan harga. Dari sini terlihat pemulihan yang berawal hati-hati pasca kontraksi tahun 2020, lalu menguat pada tahun 2022–2024 seiring membaiknya belanja rumah tangga, penguatan konsumsi lembaga nirlaba yang melayani rumah tangga, serta perbaikan belanja pemerintah. Komponen pembentukan modal juga beralih dari tekanan di tahun 2020 menjadi pendorong yang lebih stabil sejak tahun 2021, sementara dinamika persediaan mulai kembali positif pada tahun 2023. Di sisi lain, kebutuhan barang dari luar wilayah bergerak naik pada fase pemulihan yang wajar ketika aktivitas ekonomi tumbuh lebih cepat.

Tabel 2.110. Laju Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 Menurut Pengeluaran Kabupaten Barito Utara Tahun 2020–2024

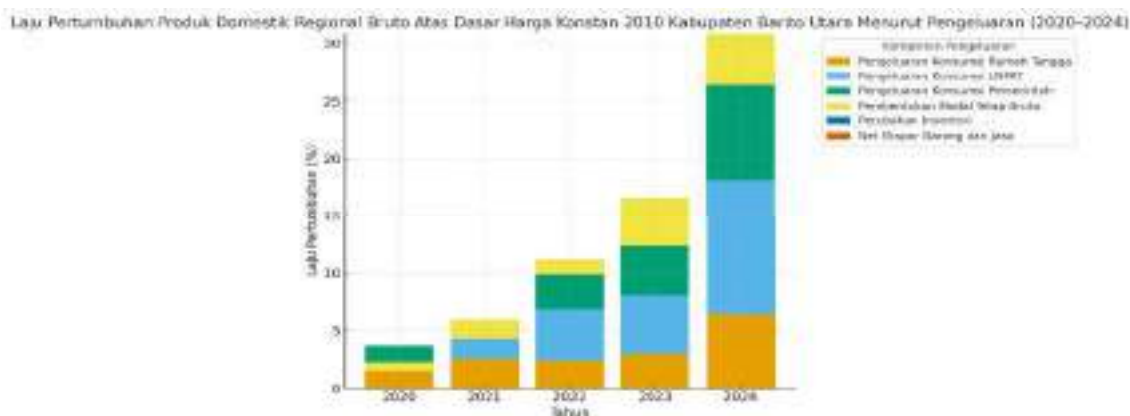
No.	Komponen Pengeluaran	Pengeluaran (%)				
		2020	2021	2022	2023*	2024**
1	Konsumsi Rumah Tangga	2,61	2,51	2,4	2,97	6,48
2	Konsumsi LNPRT	1,15	2,04	4,49	5,07	11,71
3	Konsumsi Pemerintah	-1,54	-0,24	2,98	4,34	8,2
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	-0,68	1,68	1,28	4,24	4,49
5	Perubahan Inventori	-5,36	0	0	9,89	5,66
6	Ekspor	0	0	0	0	0
7	Impor	-3,86	0,58	4,97	5	3,06
PDRB		-2,24	2,82	6,24	5,49	5,08

Keterangan: *Angka Sementara, *Angka Sangat Sementara
Sumber: BPS, 2025.

Berdasarkan Tabel 2.110 di atas, pertumbuhan riil PDRB bergerak dari kontraksi 2,24% pada tahun 2020 menuju ekspansi yang solid dalam 3 tahun terakhir, berpuncak 6,24% pada tahun 2022 sebelum melandai ke 5,49% pada tahun 2023, dan 5,08% pada tahun 2024. Pendorong utamanya adalah konsumsi rumah tangga yang menguat secara konsisten lalu melonjak pada tahun 2024 sebesar 6,48%, sejalan dengan temuan nilai dan proporsi konsumsi pada tabel-tabel sebelumnya. Konsumsi LNPRT memberi dorongan tambahan, meningkat tajam hingga dua digit pada tahun 2024 yang mengisyaratkan lebih aktifnya layanan sosial *nirlaba* bagi rumah tangga. Belanja pemerintah berputar dari kontraksi ke pertumbuhan kuat 8,20% pada tahun 2024, sehingga menopang daya beli dan aktivitas layanan publik. Komponen pembentukan modal menunjukkan perbaikan bertahap dari zona negatif pada tahun 2020 ke pertumbuhan 4-4,5% sejak tahun 2023, hal ini menandakan

proses akumulasi kapasitas berjalan, meski efisiensinya masih perlu terus ditingkatkan agar dorongan ke *output* riil lebih besar.

Setelah menekan pertumbuhan pada tahun 2020, perubahan inventori kembali positif pada tahun 2023–2024, yang biasanya terjadi saat pelaku usaha memulihkan stok untuk mengantisipasi permintaan. Pada saat yang sama, kebutuhan pasokan dari luar wilayah beralih dari kontraksi ke laju positif, yang lazim pada *fase* ekspansi karena aktivitas produksi dan konsumsi meningkat. Secara keseluruhan, pola ini menggambarkan pemulihan yang semakin *broad-based*, dengan konsumsi rumah tangga sebagai jangkar, dukungan kuat dari belanja publik dan layanan sosial, serta perbaikan bertahap pada akumulasi modal dan manajemen persediaan.



Gambar 2.60. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Kabupaten Barito Utara Menurut Pengeluaran Tahun 2020–2024.

Tabel 2.111 memberikan gambaran mengenai indeks implisit PDRB menurut pengeluaran di Kabupaten Barito Utara, yang mengukur bagaimana masing-masing komponen pengeluaran berkembang dari tahun ke tahun dalam bentuk indeks harga. Indeks ini berguna untuk memantau perubahan harga dan volume pengeluaran relatif terhadap PDRB nominal, serta untuk memahami bagaimana faktor-faktor seperti konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah, PMTB, serta perdagangan internasional mempengaruhi perekonomian daerah. Dalam tabel ini dapat dilihat perbandingan indeks implisit untuk masing-masing komponen pengeluaran selama periode 2020–2024, yang akan memberikan wawasan lebih dalam mengenai fluktuasi harga dan produktivitas sektor-sektor ekonomi di Kabupaten Barito Utara.

Tabel 2.111. Indeks Implisit PDRB Menurut Pengeluaran Kabupaten Barito Utara Tahun 2020–2024

No	Komponen Pengeluaran	Pengeluaran (%)				
		2020	2021	2022	2023*	2024 **
1	Konsumsi rumah tangga	168,9	171,13	178,82	188,3	195,2
2	Konsumsi LNPRT	162,68	167,49	177,99	186,05	191,22
3	Konsumsi pemerintah	154,94	162,47	165,98	172,18	177,34
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	164,22	167,59	172,07	183,78	188,84
5	Perubahan inventori	0	0	0	0	0
6	Ekspor	116,79	130,34	178,71	170,03	151,94
7	Impor	151,97	152,52	161,67	172,65	175,38
PDRB		135,03	147,73	188,18	176,89	166,69

Keterangan: *Angka Sementara, *Angka Sangat Sementara
Sumber: BPS, 2025.

Berdasarkan Tabel 2.111 di atas, indeks implisit PDRB Kabupaten Barito Utara menunjukkan perkembangan yang signifikan pada sebagian besar komponen pengeluaran antara tahun 2020-2024. Konsumsi rumah tangga mengalami kenaikan yang stabil setiap tahun, mencerminkan peningkatan daya beli masyarakat, yang sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang positif. Hal ini menunjukkan bahwa sektor domestik, terutama konsumsi rumah tangga, tetap menjadi pendorong utama perekonomian daerah. Kenaikan yang lebih signifikan terlihat pada konsumsi yang berhubungan dengan layanan lembaga nirlaba yang melayani rumah tangga (LNPRT), yang menunjukkan peningkatan pentingnya peran sektor sosial dalam mendukung kesejahteraan masyarakat. Konsumsi pemerintah juga mengalami kenaikan yang moderat, mencerminkan peningkatan belanja publik yang terus mendukung sektor-sektor penting seperti infrastruktur dan pelayanan dasar.

Selain itu, PMTB menunjukkan tren positif yang konsisten, mencerminkan peningkatan dalam investasi yang mendorong kapasitas produksi daerah. Penurunan sementara pada komponen perubahan inventori pada tahun tertentu mencerminkan adanya perubahan dalam manajemen stok dan produksi barang, tetapi tidak mengganggu perekonomian secara signifikan. Secara keseluruhan, PDRB menunjukkan adanya pertumbuhan ekonomi riil yang sehat, dengan konsumsi rumah tangga dan investasi sebagai pendorong utama. Peningkatan pada komponen-komponen tersebut menunjukkan bahwa ekonomi daerah semakin berfokus pada pendorong internal dan peningkatan kapasitas produksi yang lebih efisien.



Gambar 2.61. Laju Pertumbuhan Indeks Harga Implisit PDRB Kabupaten Barito Utara Tahun 2020-2024.

Berdasarkan Gambar 2.61 di atas, laju pertumbuhan indeks harga implisit PDRB di Kabupaten Barito Utara menunjukkan fluktuasi signifikan pada beberapa komponen pengeluaran selama periode 2020–2024. Pengeluaran konsumsi rumah tangga mengalami kenaikan yang cukup besar pada tahun 2022 (4,49%) dan kemudian sedikit menurun pada tahun 2024 (3,67%). Hal ini menunjukkan adanya peningkatan daya beli masyarakat yang dipengaruhi oleh faktor ekonomi yang lebih baik, meskipun terjadi penurunan pada tahun 2024. Sementara itu, pengeluaran konsumsi LNPRT mengalami lonjakan terbesar pada tahun 2022, mencapai 6,27%, namun kemudian mengalami penurunan pada tahun 2024 menjadi 2,78%. Penurunan ini menunjukkan penurunan sementara dalam permintaan non-rumah tangga, yang bisa terkait dengan perubahan kondisi ekonomi atau kebijakan sektor industri.

Selain itu, pengeluaran konsumsi pemerintah menunjukkan fluktuasi stabil, dengan angka tertinggi pada tahun 2021 (4,86%) dan menurun ke 2,99% pada tahun 2024, hal ini mencerminkan adanya penurunan dalam pengeluaran pemerintah yang lebih efisien atau perubahan prioritas anggaran. PMTB terus mencatatkan pertumbuhan positif, dengan lonjakan tertinggi pada tahun 2023 (6,80%), yang mencerminkan peningkatan investasi signifikan yang mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Secara keseluruhan, meskipun terdapat fluktuasi dalam komponen lainnya, konsumsi rumah tangga dan PMTB berperan sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Barito Utara.

Berdasarkan tabel sebelumnya, kita dapat memahami perubahan dalam komponen-komponen pengeluaran yang mempengaruhi PDRB di Kabupaten Barito Utara, dan bagaimana faktor-faktor ini saling terkait dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Tabel 2.112 di bawah melanjutkan analisis dengan menunjukkan sumber pertumbuhan PDRB

menurut pengeluaran, yang mencerminkan kontribusi masing-masing sektor dalam pertumbuhan ekonomi. Setiap komponen pengeluaran, baik konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah, atau PMTB, memberikan kontribusi yang berbeda dalam mendukung perekonomian dari tahun ke tahun. Pemahaman terhadap sumber-sumber pertumbuhan ini sangat penting untuk melihat ke arah mana ekonomi daerah ini berkembang dan sektor mana yang memberikan dorongan terbesar terhadap PDRB.

Tabel 2.112. Sumber Pertumbuhan PDRB Menurut Pengeluaran Kabupaten Barito Utara, 2020–2024

No	Komponen Pengeluaran	Pengeluaran (%)				
		2020	2021	2022	2023*	2024**
1	Konsumsi Rumah Tangga	0,88	0,89	0,85	1,01	2,16
2	Konsumsi LNPRT	0,02	0,04	0,08	0,09	0,2
3	Konsumsi Pemerintah	-0,15	-0,02	0,28	0,39	0,73
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	-0,26	0,66	0,5	1,57	1,65
5	Perubahan Inventori	-0,84	-0,28	-0,37	0,97	-0,75
6	Ekspor	-4,81	1,97	8,51	5,05	3,28
7	Impor	-2,92	0,43	3,61	3,59	2,19
PDRB		-2,24	2,82	6,24	5,49	5,08

Keterangan: *Angka Sementara, *Angka Sangat Sementara

Sumber: BPS, 2025.

Berdasarkan Tabel 2.112 di atas, kita dapat melihat bahwa konsumsi rumah tangga semakin berperan besar dalam pertumbuhan ekonomi Kabupaten Barito Utara, dengan kontribusi yang meningkat signifikan dari 0,88% pada tahun 2020 menjadi 2,16% pada tahun 2024. Peningkatan ini menunjukkan bahwa konsumsi domestik menjadi pendorong utama dalam perekonomian daerah yang terus tumbuh seiring dengan meningkatnya daya beli masyarakat. Sementara itu, kontribusi konsumsi LNPRT tetap kecil, tetapi mengalami peningkatan seiring dengan berkembangnya sektor sosial yang melayani rumah tangga, meningkat menjadi 0,20% pada tahun 2024.

PMTB menunjukkan peningkatan yang jelas dari -0,26% pada tahun 2020 menjadi 1,65% pada tahun 2024, mencerminkan bahwa investasi mulai memberikan kontribusi lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, meskipun masih terbilang moderat. Pada sisi lain, perubahan inventori menunjukkan peran yang lebih fluktuatif, dengan kontribusi negatif pada tahun 2020 dan 2024, namun kembali positif pada tahun 2023. Sektor yang tidak dapat diabaikan adalah konsumsi pemerintah, yang meskipun kecil, memberikan kontribusi stabil terhadap perekonomian dengan kenaikan konsisten. Kinerja ekspor dan impor tetap

memberikan kontribusi pada ekonomi, meskipun pengaruhnya lebih terbatas dibandingkan dengan sektor domestik yang lebih besar. Secara keseluruhan, tabel ini menunjukkan bahwa sektor domestik, terutama konsumsi rumah tangga dan pembentukan modal, menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Barito Utara selama lima tahun terakhir.

Untuk memberikan gambaran yang lebih detail tentang PDRB Kabupaten Barito Utara pada tahun 2024, Tabel 2.113 di bawah memperlihatkan komponen pengeluaran berdasarkan ADHB dan ADHK 2010. Komponen pengeluaran yang dicakup dalam tabel ini meliputi pengeluaran rumah tangga (PK-RT), pengeluaran luar negeri yang melayani rumah tangga (PK-LNPRT), pengeluaran pemerintah (PK-P), pembentukan modal tetap bruto (PMTB), perubahan inventori (P-I), dan ekspor-impor (X-M). Pemisahan antara ADHB dan ADHK 2010 penting untuk melihat perbedaan antara nilai nominal dan nilai riil yang disesuaikan dengan inflasi, sehingga memberikan gambaran yang lebih akurat mengenai kontribusi sektor-sektor ini terhadap perekonomian.

Tabel 2.113. PDRB Kabupaten Barito Utara Menurut Komponen Pengeluaran Tahun 2024

Komponen Pengeluaran	ADHB (Miliar Rupiah)	ADHK 2010 (Miliar Rupiah)
PK-RT (Konsumsi Rumah Tangga)	5.548,10	2.842,30
PK-LNPRT (Konsumsi LNPRT)	298,3	156
PK-P (Konsumsi Pemerintah)	1.367,40	771
PMTB (Pembentukan Modal Tetap Bruto)	5.794,40	3.068,40
P-I (Perubahan Inventori)	96,2	58,7
X-M (Ekspor - Impor)	934,9	1.526,00

Keterangan: ADHB (Atas Dasar Harga Berlaku); ADHK 2010 (Atas Dasar Harga Konstan 2010)

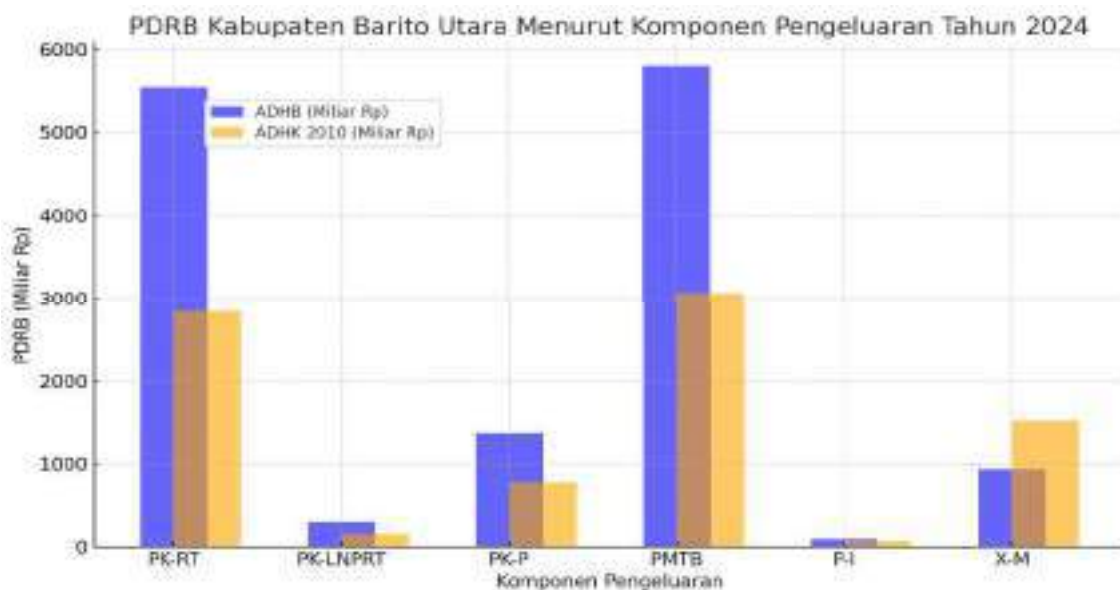
Sumber: BPS, 2025.

Berdasarkan Tabel 2.113 di atas, kita dapat melihat komponen pengeluaran yang membentuk PDRB Kabupaten Barito Utara pada tahun 2024, baik dalam ADHB (nilai nominal) maupun ADHK 2010 (nilai riil yang disesuaikan dengan inflasi). Konsumsi rumah tangga merupakan komponen terbesar, dengan nilai nominal ADHB mencapai Rp5.548,1 miliar dan nilai riil ADHK 2010 sebesar Rp2.842,3 miliar. Hal ini menunjukkan bahwa konsumsi rumah tangga memainkan peran sentral dalam perekonomian, baik dalam pengeluaran langsung maupun dalam kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi riil.

PMTB sebesar Rp5.794,4 miliar pada ADHB dan Rp3.068,4 miliar pada ADHK 2010 juga memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian, menunjukkan bahwa

investasi dalam infrastruktur dan sektor produktif menjadi salah satu pilar utama yang mendukung pertumbuhan ekonomi daerah ini. Konsumsi pemerintah (PK-P) yang mencapai Rp1.367,4 miliar pada ADHB dan Rp771,0 miliar pada ADHK 2010 menunjukkan peran penting sektor publik dalam mendukung stabilitas ekonomi, meskipun kontribusinya lebih kecil dibandingkan konsumsi rumah tangga dan investasi.

Sementara itu, konsumsi luar negeri yang melayani rumah tangga (PK-LNPRT) dan perubahan inventori (P-I) memiliki kontribusi yang lebih kecil, masing-masing mencapai Rp298,3 miliar dan Rp96,2 miliar pada ADHB, serta Rp156,0 miliar dan Rp58,7 miliar pada ADHK 2010. Terakhir, ekspor-impor (X-M) mencatatkan nilai nominal ADHB sebesar Rp934,9 miliar dan nilai riil ADHK 2010 sebesar Rp1.526,0 miliar, menunjukkan adanya pengaruh signifikan dari perdagangan luar negeri terhadap ekonomi daerah, meskipun nilai ADHK 2010 lebih tinggi menunjukkan bahwa ekspor memiliki dampak yang lebih besar dalam perhitungan riil.



Gambar 2.62. PDRB Kabupaten Barito Utara Menurut Komponen Pengeluaran Tahun 2024.

Tabel 2.114 menyajikan PDRB dan PDRB per kapita Kabupaten Barito Utara pada periode 2020-2024. Dalam tabel tersebut terlihat ada dua indikator penting, yaitu PDRB nominal (ADHB) yang menggambarkan total nilai barang dan jasa yang diproduksi dalam perekonomian daerah pada harga berlaku, serta PDRB riil (ADHK 2010) yang disesuaikan dengan inflasi, memberikan gambaran lebih akurat tentang pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun.

Selain itu, tabel ini juga mencakup PDRB per kapita yang mencerminkan pendapatan rata-rata per individu di daerah tersebut, baik berdasarkan harga nominal maupun harga riil. Peningkatan atau penurunan dalam PDRB per kapita memberikan gambaran tentang kesejahteraan ekonomi masyarakat di Kabupaten Barito Utara.

Tabel 2.114. PDRB dan PDRB Perkapita Kabupaten Barito Utara Tahun 2020–2024

Uraian	2020	2021	2022	2023*	2024**
Nilai PDRB (Miliar Rp)					
- ADHB	9.391,70	10.565,20	14.297,60	14.178,30	14.039,30
- ADHK 2010	6.955,4	7.151,80	7.597,90	8.015,30	8.422,30
PDRB Perkapita (Ribu Rp)					
- ADHB	60.665,20	67.517,60	90.183,80	88.280,40	86.331,00
- ADHK 2010	44.928,1	45.703,80	47.924,30	49.906,80	51.790,70
PDRB ADHK 2010	-2,24	2,82	6,24	5,49	5,08
PDRB Perkapita ADHK 2010	-17,51	1,73	4,86	4,14	3,77
Jumlah Penduduk (Orang)	154.812	156.481	158.539	160.605	162.622
Pertumbuhan	18,51	1,08	1,32	1,3	1,26

Keterangan: *Angka Sementara; **Angka Sangat Sementara

Sumber: BPS 2025.

Berdasarkan Tabel 2.114 di atas, PDRB Kabupaten Barito Utara menunjukkan peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun, baik dalam nilai nominal (ADHB) maupun nilai riil (ADHK 2010). PDRB nominal (ADHB) mengalami peningkatan pesat dari Rp9.391,7 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp14.039,3 miliar pada tahun 2024. Namun, ketika disesuaikan dengan *inflasi* (menggunakan ADHK 2010), PDRB riil meningkat dari Rp6.955,4 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp8.422,3 miliar rupiah pada tahun 2024, hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada kenaikan nominal, pertumbuhan ekonomi riil lebih moderat.

Selain itu, PDRB per kapita juga menunjukkan tren peningkatan yang sejalan dengan PDRB, namun terjadi penurunan relatif pada tahun 2023. PDRB per kapita nominal (ADHB) meningkat dari Rp60.665.200,00 pada tahun 2020 menjadi Rp86.331.000,00 pada tahun 2024, namun PDRB per kapita riil (ADHK 2010) menunjukkan peningkatan yang lebih stabil, dengan pertumbuhan yang lebih konsisten sepanjang tahun, dari Rp44.928.100,00 pada tahun 2020 menjadi Rp51.790.700,00 pada tahun 2024.

Pertumbuhan PDRB yang stabil, terutama pada PDRB riil, mencerminkan konsistensi dalam pertumbuhan ekonomi, meskipun terdapat penurunan kecil pada tahun 2020. Jumlah penduduk yang terus meningkat juga berkontribusi pada peningkatan PDRB per kapita,

meskipun pertumbuhannya lebih moderat. Secara keseluruhan, data ini mencerminkan peningkatan daya beli dan kesejahteraan ekonomi masyarakat Barito Utara meskipun ada tantangan inflasi yang harus dihadapi.



Gambar 2.63. PDRB dan PDRB perkapita Kabupaten BARito Utara Tahun 2020-2024

2.3.7.3. Pengeluaran Konsumsi Per Kapita

Pengeluaran konsumsi per kapita adalah indikator penting dalam menilai daya beli masyarakat di suatu daerah. Di Kabupaten Barito Utara, analisis pengeluaran konsumsi per kapita memberikan gambaran tentang pola konsumsi masyarakat dan kemajuan ekonomi di tingkat rumah tangga. Pengeluaran konsumsi yang tinggi mencerminkan peningkatan kesejahteraan masyarakat, sementara pengeluaran konsumsi yang rendah menunjukkan adanya masalah dalam daya beli atau distribusi pendapatan. Untuk itu, kebijakan yang mendorong peningkatan pengeluaran konsumsi per kapita, seperti peningkatan pendapatan per kapita, pengurangan kesenjangan ekonomi, dan peningkatan akses terhadap barang dan jasa, harus menjadi prioritas dalam upaya menjaga stabilitas ekonomi makro. Mengelola pengeluaran konsumsi secara efektif juga dapat mendukung keberlanjutan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan merata.

Untuk memahami perkembangan konsumsi rumah tangga di Kabupaten Barito Utara, kita perlu melihat bagaimana total konsumsi rumah tangga dan konsumsi per kapita berkembang selama periode 2020-2024. Tabel 2.115 menunjukkan berbagai indikator penting, seperti total konsumsi rumah tangga, rata-rata konsumsi per kapita, dan pertumbuhan

konsumsi, yang memberikan gambaran mengenai daya beli dan tingkat kesejahteraan masyarakat dalam beberapa tahun terakhir. Data ini membantu kita untuk menganalisis perubahan konsumsi rumah tangga yang mencerminkan dinamika ekonomi di daerah tersebut.

Tabel 2.115. Perkembangan Komponen Konsumsi Rumah Tangga Kabupaten Barito Utara Tahun 2020–2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Total Konsumsi Rumah Tangga					
a. ADHB (Miliar Rp)	4.171,10	4.332,00	4.635,40	5.026,40	5.548,10
b. ADHK 2010 (Miliar Rp)	2.469,50	2.531,50	2.592,30	2.669,40	2.842,30
Proporsi terhadap PDRB/ (% ADHB)	44,41	41	32,42	35,45	39,52
Rata-rata konsumsi per kapita					
a. ADHB (Ribu Rp)	26.942,90	27.683,90	29.238,40	31.296,70	34.166,40
b. ADHK 2010 (Ribu Rp)	15.951,70	16.177,50	16.351,20	16.621,00	17.477,70
Pertumbuhan					
a. Total konsumsi RT (%)	2,61	2,51	2,4	1,07	6,48
b. Perkapita (%)	-13,41	-2,2	-1,72	0,75	5,15
Jumlah penduduk (orang)	154.812	156.481	158.539	160.605	162.622

Sumber: BPS, 2025.

Berdasarkan Tabel 2.115 di atas, dapat dijelaskan bahwa total konsumsi rumah tangga (ADHB) di Kabupaten Barito Utara mengalami peningkatan yang konsisten dari Rp4.171,1 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp5.548,1 miliar pada tahun 2024. Peningkatan ini menunjukkan adanya pertumbuhan ekonomi yang mendukung peningkatan daya beli masyarakat. Pada tahun 2024, konsumsi rumah tangga diperkirakan mencapai angka tertinggi selama lima tahun tersebut, dengan Rp5.548,1 miliar, yang menggambarkan kenaikan yang signifikan dibandingkan dengan tahun 2020 yang tercatat sebesar Rp4.171,1 miliar.

Namun, jika kita lihat proporsi terhadap PDRB (% ADHB), angka ini mengalami penurunan dari 44,41% pada tahun 2020 menjadi 39,52% pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun konsumsi rumah tangga meningkat, proporsi konsumsi terhadap PDRB secara keseluruhan menurun, yang bisa diindikasikan dengan meningkatnya sektor-sektor ekonomi lain yang lebih berkembang.

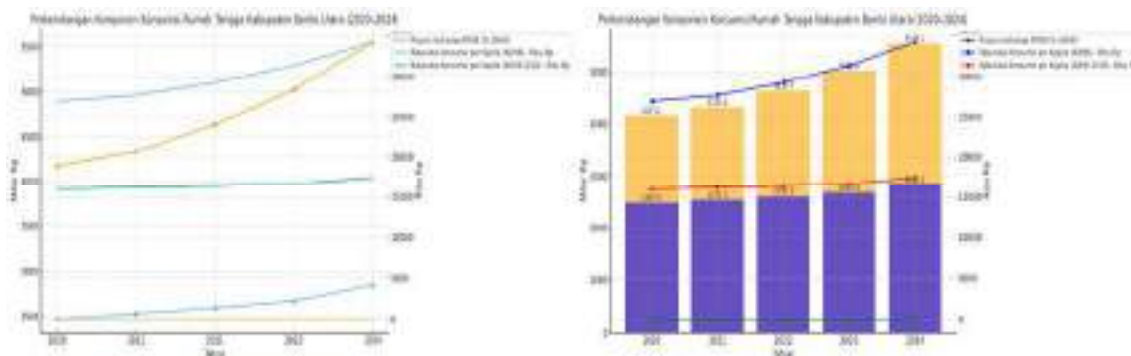
Rata-rata konsumsi per kapita juga meningkat setiap tahunnya, dengan ADHB per kapita naik dari Rp26.942.900,00 pada tahun 2020 menjadi Rp34.166.400,00 pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun jumlah penduduk meningkat, rata-rata konsumsi rumah

tangga per individu terus meningkat, yang mengindikasikan perbaikan dalam taraf hidup masyarakat.

Pertumbuhan konsumsi rumah tangga menunjukkan variasi. Pada tahun 2022, terjadi penurunan yang cukup signifikan dalam pertumbuhan konsumsi per kapita (-1,72%), meskipun diikuti dengan pemulihan pada tahun 2024 dengan pertumbuhan 5,15%. Kenaikan ini menunjukkan adanya peningkatan daya beli yang lebih tinggi pada tahun terakhir, yang dapat dikaitkan dengan kondisi ekonomi yang membaik setelah pandemi atau faktor-faktor lain yang mendukung.

Jumlah penduduk yang terus meningkat dari 154.812 orang pada tahun 2020 menjadi 162.622 orang pada tahun 2024 juga berperan penting dalam meningkatnya total konsumsi rumah tangga. Meskipun ada penurunan dalam beberapa tahun sebelumnya, jumlah penduduk yang semakin besar tetap berkontribusi pada kenaikan konsumsi secara keseluruhan.

Secara keseluruhan, peningkatan yang jelas dalam konsumsi rumah tangga di Kabupaten Barito Utara, yang menunjukkan perbaikan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Namun, penurunan dalam proporsi terhadap PDRB dan variasi dalam pertumbuhan konsumsi menunjukkan bahwa meskipun ada peningkatan dalam konsumsi, ada tantangan lain yang perlu diatasi, seperti distribusi sumber daya ekonomi yang lebih merata.



Gambar 2.64. Perkembangan Komponen Konsumsi Rumah Tangga di Kabupaten Barito Utara Tahun 2020-2024.

Untuk lebih memahami komponen konsumsi rumah tangga di Kabupaten Barito Utara, perlu dianalisis bagaimana struktur pengeluaran rumah tangga terhadap berbagai kelompok konsumsi selama periode 2020-2024. Tabel 2.116 di bawah menggambarkan persentase pengeluaran rumah tangga untuk berbagai kategori konsumsi, mulai dari makanan dan minuman, hingga hotel dan restoran. Data ini memberikan gambaran tentang bagaimana

rumah tangga mengalokasikan pengeluarannya, serta perubahan pola konsumsi yang dapat terjadi seiring berjalannya waktu. Perubahan dalam struktur konsumsi ini dapat memberikan informasi penting mengenai prioritas pengeluaran masyarakat serta kondisi ekonomi yang lebih luas di daerah tersebut.

Tabel 2.116. Struktur Komponen Konsumsi Rumah Tangga Kabupaten Barito Utara Tahun 2020–2024

No.	Kelompok Konsumsi	Persentase (%)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Makanan, Minuman dan Rokok	51,74	51,49	51,36	51,26	52,27
2	Pakaian dan Alas Kaki	3,76	3,72	3,59	3,42	3,32
3	Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	12,07	12,12	11,72	11,33	11,01
4	Kesehatan dan Pendidikan	3,83	3,93	3,92	3,82	3,67
5	Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	22,85	22,99	23,74	24,54	24,20
6	Hotel dan Restoran	2,20	2,22	2,26	2,28	2,26
7	Lainnya	3,53	3,53	3,41	3,35	3,26
Total Konsumsi		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS, 2025.

Berdasarkan Tabel 2.116 di atas, kita dapat melihat perubahan dalam struktur konsumsi rumah tangga di Kabupaten Barito Utara selama periode 2020-2024. Makanan, minuman, dan rokok tetap menjadi kelompok konsumsi yang paling besar, dengan persentase yang stabil, meskipun ada sedikit penurunan dari 51,74% pada tahun 2020 menjadi 51,26% pada tahun 2023, dan sedikit kembali meningkat menjadi 52,27% pada tahun 2024. Hal ini mencerminkan bahwa sebagian besar pengeluaran rumah tangga di Kabupaten Barito Utara masih didominasi oleh kebutuhan dasar konsumsi seperti makanan dan minuman, yang mencerminkan prioritas utama rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan pangan.

Di sisi lain, kelompok konsumsi untuk pakaian dan alas kaki mengalami penurunan sedikit dari 3,76% pada tahun 2020 menjadi 3,32% pada tahun 2024. Penurunan ini bisa menunjukkan bahwa pengeluaran rumah tangga untuk pakaian dan alas kaki tidak mengalami peningkatan yang signifikan, yang mungkin mencerminkan penghematan atau alokasi anggaran yang lebih sedikit pada sektor ini.

Perumahan, perkakas, perlengkapan, dan penyelenggaraan rumah tangga juga menunjukkan penurunan persentase, dari 12,07% pada tahun 2020 menjadi 11,01% pada

tahun 2024. Meskipun demikian, sektor ini tetap menjadi salah satu pengeluaran utama rumah tangga, mencerminkan besarnya perhatian masyarakat terhadap kondisi tempat tinggal dan kebutuhan peralatan rumah tangga.

Kelompok konsumsi untuk kesehatan dan pendidikan relatif stabil, dengan sedikit penurunan dari 3,83% pada tahun 2020 menjadi 3,67% pada tahun 2024. Meskipun terdapat penurunan kecil, angka ini tetap mencerminkan bahwa rumah tangga di Kabupaten Barito Utara memberi perhatian yang cukup terhadap kebutuhan kesehatan dan pendidikan, yang merupakan faktor penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Pengeluaran untuk transportasi, komunikasi, rekreasi, dan budaya mengalami sedikit peningkatan, dari 22,85% pada tahun 2020 menjadi 24,20% pada tahun 2024. Peningkatan ini menunjukkan bahwa rumah tangga di Kabupaten Barito Utara mulai lebih banyak mengalokasikan anggaran untuk kebutuhan mobilitas, komunikasi, dan kegiatan rekreasi, yang menandakan adanya peningkatan dalam kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu, pengeluaran untuk hotel dan restoran tetap relatif stabil, dengan sedikit fluktuasi sepanjang periode tersebut, hal ini mencerminkan bahwa konsumsi di sektor ini tidak berubah secara signifikan. Pengeluaran untuk lainnya juga menunjukkan penurunan kecil dari 3,53% pada tahun 2020 menjadi 3,26% pada tahun 2024, yang mengindikasikan bahwa sektor-sektor lain yang tidak tercantum dalam kategori spesifik semakin berkurang kontribusinya terhadap total konsumsi rumah tangga.

Dengan demikian adanya perubahan dalam struktur konsumsi rumah tangga, dengan fokus yang lebih besar pada konsumsi dasar seperti makanan dan minuman, serta pengeluaran untuk transportasi dan rekreasi. Ini mengindikasikan adanya perubahan prioritas pengeluaran rumah tangga seiring dengan peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat di Kabupaten Barito Utara.



Gambar 2.65. Struktur Komponen Konsumsi Rumah Tangga di Kabupaten Barito Utara Tahun 2020-2024.

Untuk menganalisis pertumbuhan pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga di Kabupaten Barito Utara, kita dapat melihat bagaimana persentase pertumbuhan setiap kategori pengeluaran berubah selama periode 2020-2024. Tabel 2.117 di bawah memberikan informasi mengenai pertumbuhan riil pengeluaran untuk berbagai kelompok konsumsi, yang akan memberikan gambaran lebih mendalam tentang perubahan pola konsumsi rumah tangga dan perubahan dalam daya beli masyarakat. Melalui data ini, kita dapat mengevaluasi tren pengeluaran rumah tangga dan bagaimana sektor-sektor tertentu berkembang atau mengalami penurunan.

Tabel 2.117. Pertumbuhan Riil Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kabupaten Barito Utara Tahun 2020–2024

No.	Kelompok Konsumsi	Persentase (%)				
		2020	2021	2022	2023*	2024**
1	Makanan, Minuman dan Rokok	3,09	2,47	1,66	2,06	7,92
2	Pakaian dan Alas Kaki	-0,97	1,09	0,5	1,3	3,58
3	Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	7,2	2,68	1,07	3,44	5,35
4	Kesehatan dan Pendidikan	6,28	3,59	3,93	3,06	4,94
5	Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	-1,22	2,79	4,73	5,23	5,56
6	Hotel dan Restoran	-0,93	2,87	3,16	2,63	6,2
7	Lainnya	9,8	0,8	1,52	0,82	3,84

Keterangan: *Angka Sementara; **Angka Sangat Sementara

Sumber: BPS, 2025.

Berdasarkan Tabel 2.117 di atas, kita dapat melihat bahwa pertumbuhan riil pengeluaran konsumsi di Kabupaten Barito Utara bervariasi antara kelompok konsumsi dari tahun 2020 hingga 2024. Untuk kelompok makanan, minuman, dan rokok, pertumbuhannya cenderung menurun dari 3,09% pada tahun 2020 menjadi 1,66% pada tahun 2022, tetapi kemudian meningkat tajam menjadi 7,92% pada tahun 2024. Kenaikan yang signifikan pada tahun 2024 mungkin mencerminkan peningkatan harga pangan atau peningkatan konsumsi makanan dan minuman yang berhubungan dengan perbaikan daya beli masyarakat.

Pada kategori pakaian dan alas kaki, meskipun ada penurunan pada tahun 2020 sebesar -0,97%, ada pemulihan yang terlihat pada tahun 2021 dan seterusnya, dengan pertumbuhan 1,09% pada tahun 2021, 0,50% pada tahun 2022, dan berlanjut ke 3,58% pada tahun 2024. Peningkatan ini bisa menunjukkan bahwa rumah tangga mulai kembali mengalokasikan anggaran lebih banyak untuk membeli pakaian dan alas kaki setelah pandemi atau krisis ekonomi.

Untuk perumahan, perkakas, perlengkapan dan penyelenggaraan rumah tangga, meskipun ada penurunan pada tahun 2022 menjadi 1,07%, sektor ini menunjukkan pertumbuhan yang stabil selama beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2024, pertumbuhannya mencapai 5,35%, mencerminkan meningkatnya pengeluaran rumah tangga untuk perbaikan dan pemeliharaan rumah serta perlengkapan rumah tangga lainnya.

Sektor kesehatan dan pendidikan menunjukkan pertumbuhan yang positif dari 6,28% pada tahun 2020 menjadi 4,94% pada tahun 2024, meskipun ada penurunan kecil pada beberapa tahun tengahnya. Hal ini menandakan bahwa rumah tangga di Kabupaten Barito Utara semakin mengalokasikan anggaran untuk sektor-sektor penting seperti pendidikan dan kesehatan, yang berdampak langsung pada kualitas hidup mereka.

Pada transportasi, komunikasi, rekreasi, dan budaya, terlihat adanya penurunan pada tahun 2020 dengan angka -1,22%, namun pertumbuhannya kembali meningkat pada tahun 2021 dan melanjutkan tren positif hingga mencapai 5,56% pada tahun 2024. Peningkatan ini menunjukkan bahwa rumah tangga mulai mengalokasikan lebih banyak anggaran untuk kegiatan rekreasi, budaya, dan transportasi, yang mencerminkan peningkatan mobilitas dan konsumsi sektor hiburan.

Hotel dan restoran menunjukkan pertumbuhan positif yang cukup stabil dari -0,93% pada tahun 2020 menjadi 6,20% pada tahun 2024. Hal ini bisa menunjukkan adanya peningkatan

kegiatan sosial dan konsumsi rumah tangga terhadap makanan dan layanan restoran, yang sejalan dengan pemulihan ekonomi pasca-pandemi.

Untuk kelompok lainnya, meskipun ada fluktuasi, tetap menunjukkan pertumbuhan positif dengan 3,84% pada tahun 2024, mencerminkan adanya perubahan dalam pengeluaran rumah tangga yang beralih ke kategori lain yang tidak tercakup dalam kategori-kategori sebelumnya.

Secara keseluruhan, Tabel 2.117 di atas menggambarkan adanya variasi dalam pertumbuhan konsumsi antara kelompok-kelompok pengeluaran rumah tangga, dengan beberapa sektor yang mengalami pertumbuhan signifikan, seperti makanan, minuman, dan rokok, pakaian dan alas kaki, serta hotel dan restoran. Kenaikan yang tajam di beberapa sektor pada tahun 2024 menandakan adanya perbaikan dalam ekonomi dan daya beli masyarakat di Kabupaten Barito Utara, yang mencerminkan tren konsumsi yang semakin kuat seiring dengan pemulihan ekonomi di daerah tersebut.



Gambar 2.66. Pertumbuhan Riil Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kabupaten Barito Utara Tahun 2020-2024.

Untuk memahami pertumbuhan implisit (indeks harga) dalam pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga di Kabupaten Barito Utara, kita perlu melihat bagaimana indeks harga atau tingkat inflasi dari berbagai kelompok konsumsi berubah selama periode 2020-2024. Indeks harga ini memberikan gambaran mengenai seberapa besar harga barang dan jasa pada masing-masing kelompok konsumsi mengalami perubahan dari tahun ke tahun. Dengan

melihat data ini, kita bisa memahami tekanan inflasi terhadap daya beli rumah tangga di Kabupaten Barito Utara serta sektor-sektor mana yang paling terpengaruh oleh perubahan harga.

Tabel 2.118. Pertumbuhan Implisit (Indeks Harga) Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kabupaten Barito Utara Tahun 2020–2024

No.	Kelompok Konsumsi	2020	2021	2022	2023*	2024**
1	Makanan, Minuman dan Rokok	2,8	0,85	5	6,02	4,31
2	Pakaian dan Alas Kaki	6,85	1,69	2,58	2,22	3,37
3	Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	3,55	1,58	3,2	1,39	1,81
4	Kesehatan dan Pendidikan	3,86	2,73	2,89	2,48	2,45
5	Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	4,31	1,56	5,48	6,52	3,12
6	Hotel dan Restoran	2,07	1,7	5,53	7,23	3,06
7	Lainnya	7,96	2,85	2,05	5,46	3,63
Total Konsumsi		3,6	1,32	4,49	5,3	3,67

Keterangan: *Angka Sementara; **Angka Sangat Sementara
Sumber: BPS, 2025.

Berdasarkan Tabel 2.118 di atas, pertumbuhan implisit atau indeks harga pengeluaran konsumsi rumah tangga di Kabupaten Barito Utara menunjukkan variasi yang signifikan antara berbagai kategori konsumsi dari tahun 2020 hingga 2024. Untuk makanan, minuman, dan rokok, terjadi lonjakan tajam pada tahun 2022 dengan 5,00%, yang kemudian meningkat lebih lanjut pada tahun 2023 menjadi 6,02%. Meskipun ada penurunan pada tahun 2024 menjadi 4,31%, angka ini tetap menunjukkan bahwa sektor pangan mengalami kenaikan harga yang cukup tinggi, yang dapat berhubungan dengan inflasi harga pangan yang mempengaruhi daya beli rumah tangga.

Pada kategori pakaian dan alas kaki, meskipun terjadi penurunan yang tajam pada 2020 dengan 6,85%, angka ini terus menurun dari 2020 hingga 2021 dan kemudian naik secara moderat menjadi 3,37% pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun harga pakaian dan alas kaki mengalami sedikit peningkatan, pertumbuhannya lebih terkendali dibandingkan dengan sektor pangan.

Sektor perumahan, perkakas, perlengkapan dan penyelenggaraan rumah tangga menunjukkan pertumbuhan harga yang lebih stabil. Pada tahun 2022, harga di sektor ini naik 3,20%, tetapi mengalami penurunan pada tahun 2023 menjadi 1,39% dan sedikit meningkat

lagi menjadi 1,81% pada tahun 2024. Ini menunjukkan bahwa harga sektor perumahan dan perlengkapan rumah tangga relatif terkendali dibandingkan dengan sektor konsumsi lainnya.

Untuk kesehatan dan pendidikan, sektor ini memiliki pertumbuhan harga yang lebih rendah dibandingkan dengan sektor lain, dengan fluktuasi dari 3,86% pada tahun 2020 menjadi 2,45% pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada inflasi di sektor ini, pengeluaran untuk kesehatan dan pendidikan relatif stabil dan tidak mengalami lonjakan yang tajam.

Pada sektor transportasi, komunikasi, rekreasi, dan budaya, terdapat lonjakan harga yang signifikan pada tahun 2022 dengan 5,48%, yang kemudian meningkat menjadi 6,52% pada tahun 2023 sebelum turun menjadi 3,12% pada tahun 2024. Kenaikan harga di sektor ini bisa mencerminkan peningkatan biaya transportasi dan komunikasi yang sangat mempengaruhi anggaran rumah tangga.

Sektor hotel dan restoran juga menunjukkan lonjakan harga yang cukup tinggi pada tahun 2023, dengan 7,23%, dan tetap relatif tinggi pada tahun 2024 dengan 3,06%. Ini mengindikasikan adanya tekanan inflasi pada sektor konsumsi luar rumah yang berhubungan dengan biaya makan di luar dan akomodasi.

Untuk kategori lainnya, terjadi fluktuasi harga yang lebih tinggi pada tahun 2020 dengan 7,96%, namun cenderung menurun menjadi 3,63% pada tahun 2024, yang menunjukkan bahwa sektor pengeluaran rumah tangga yang tidak termasuk dalam kategori lain mulai mengalami peningkatan yang lebih stabil.

Secara keseluruhan, Tabel 2.118 di atas menunjukkan bahwa sektor pangan dan transportasi menghadapi tekanan harga yang lebih tinggi, dengan kenaikan harga yang signifikan pada tahun 2022 dan 2023, sedangkan sektor lainnya seperti pakaian, perumahan, dan kesehatan lebih stabil. Hal ini mencerminkan perubahan pola konsumsi yang dipengaruhi oleh faktor eksternal, seperti inflasi dan fluktuasi harga barang dan jasa yang penting bagi rumah tangga.

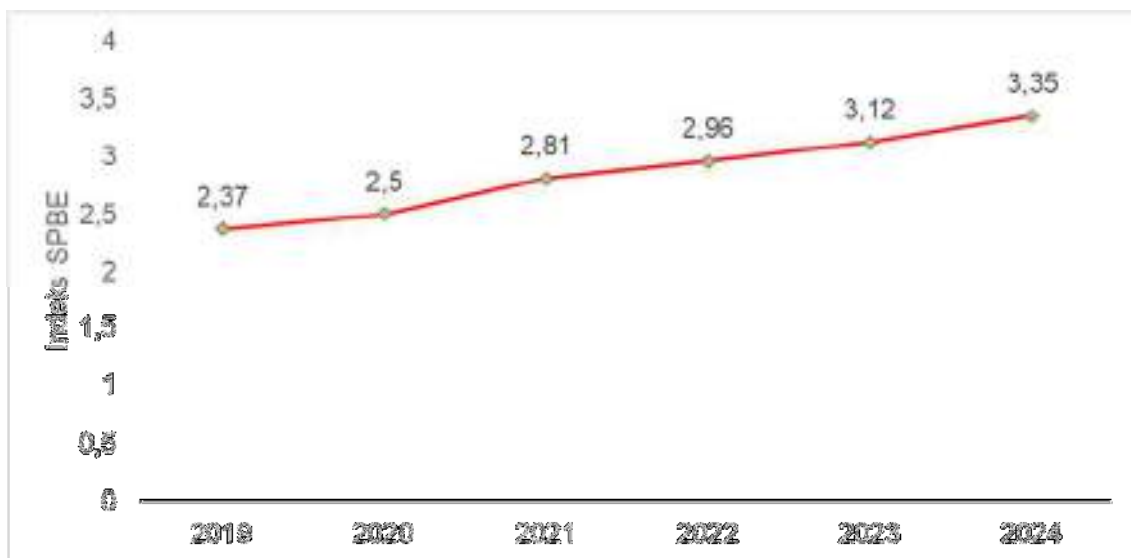
2.4. Aspek Pelayanan Umum

2.4.1. Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif

Kualitas pelayanan publik dan efektivitas birokrasi menjadi landasan penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di Kabupaten Barito Utara. Tata kelola yang

adaptif dan berintegritas menjadi kunci dalam menghadapi tantangan global, kompleksitas kebijakan nasional, serta dinamika kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.

Salah satu indikator penting dalam mengukur efektivitas tata kelola digital dan pelayanan birokrasi adalah Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Berdasar grafik yang tersaji pada Gambar 2.67. menunjukkan *tren* SPBE Kabupaten Barito Utara yang mengalami kenaikan dari 2,37 pada tahun 2019 menjadi 3,35 pada tahun 2024.



Gambar 2.67. Indeks SPBE Kabupaten Barito Utara Tahun 2020-2024.

Hasil evaluasi Kementerian PANRB menunjukkan peningkatan nilai SPBE Kabupaten Barito Utara dari 2,37 (2019) menjadi 3,35 (2024), hal ini menggambarkan peningkatan kemampuan pemerintah daerah dalam menerapkan sistem digitalisasi pelayanan publik, meskipun aspek keamanan siber dan integrasi data antar-OPD masih perlu ditingkatkan.

2.4.2. Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh, dan Demokrasi Substansial

2.4.2.1. Indeks Demokrasi Indonesia

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Provinsi Kalimantan Tengah berjalan secara fluktuatif selama 5 tahun terakhir. Pada tahun 2020 IDI Provinsi Kalimantan Tengah sebesar 74,9, turun menjadi 73,17 pada tahun 2021, kemudian naik secara signifikan menjadi 79,30 pada tahun 2022, selanjutnya kembali turun ke angka 77,57 pada tahun 2023, dan kembali naik menjadi 78,47 pada tahun 2024.



Gambar 2.68. Indeks Demokrasi Indonesia Kabupaten Barito Utara Tahun 2020-2024.

Nilai aspek kebebasan di Kabupaten Barito Utara mengalami kenaikan dari 76,09 pada tahun 2021 menjadi 91,16 pada tahun 2024. Begitu pula pada aspek kapasitas lembaga demokrasi terjadi peningkatan, yang awalnya sebesar 68,02 pada tahun 2021 meningkat menjadi 73,25 pada tahun 2024. Namun, pada aspek kesetaraan terjadi penurunan nilai, yang semula pada tahun 2021-2023 mengalami peningkatan dari 75,07-77,66, menurun menjadi 72,39 pada tahun 2024.



Gambar 2.69. Aspek Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2024.

2.4.2.2. Penegakan Peraturan Daerah

Penegakan Peraturan Daerah (Perda) merupakan indikator penting dalam mengevaluasi efektivitas pelaksanaan regulasi di tingkat daerah, serta mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam penegakan hukum dan menjaga ketertiban umum. Dalam rangka mewujudkan kondisi daerah yang tertib, tentram, dan indah. Pemerintah daerah menetapkan kebijakan peningkatan efektivitas penegakan peraturan daerah di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Upaya ini dilakukan melalui peningkatan kapasitas aparatur Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), penguatan koordinasi dengan perangkat daerah terkait, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keindahan lingkungan lingkungan.

Indikator keberhasilan kebijakan ini diukur melalui persentase penyelesaian pelanggaran ketertiban umum, ketentraman, dan keindahan, yang ditargetkan meningkat secara bertahap selama periode RPJMD. Capaian indikator ini sekaligus menjadi ukuran efektivitas penegakan Perda dan tingkat kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan hukum daerah.

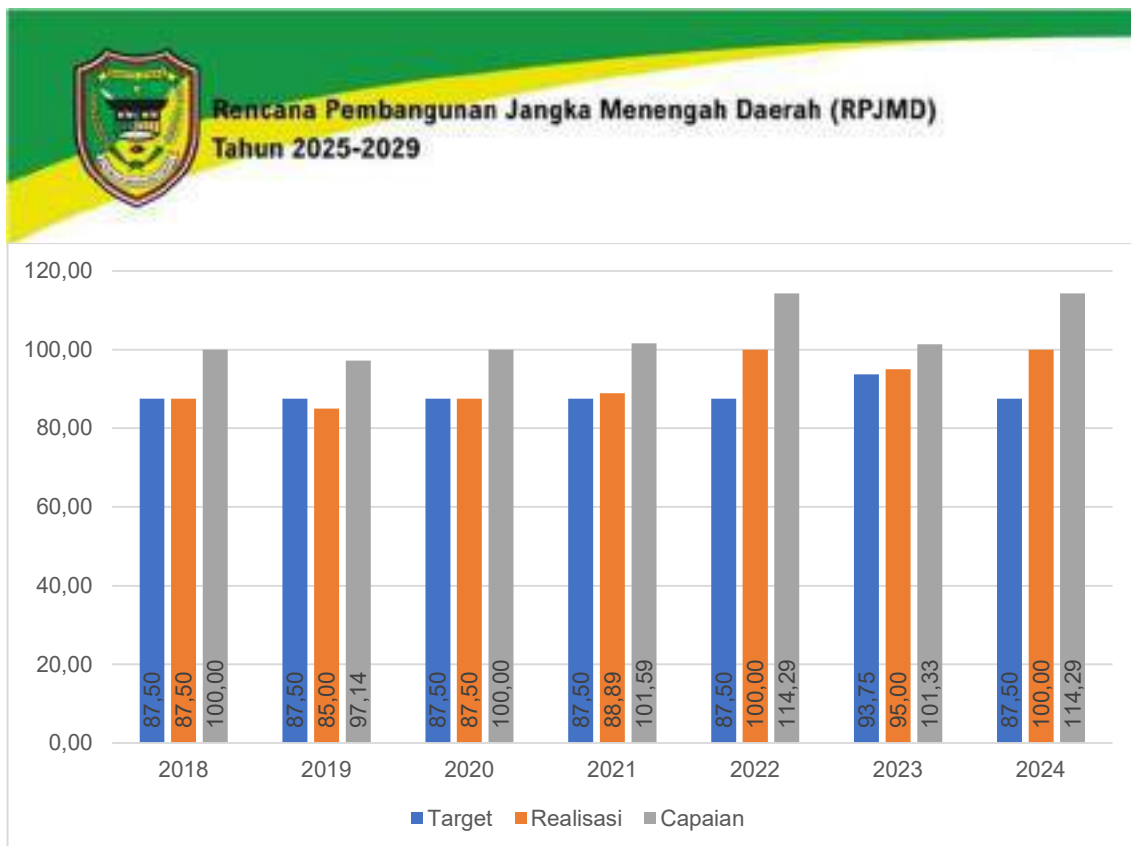
Dalam rentang tahun 2018-2023 terjadi peningkatan pelanggaran ketertiban, ketentraman, dan keindahan di Kabupaten Barito Utara, dari yang awalnya hanya ada 16 kasus pelanggaran yang dilaporkan dan teridentifikasi pada tahun 2018, melonjak drastis menjadi 300 kasus pelanggaran yang dilaporkan dan teridentifikasi pada tahun 2023. Dari seluruh pelanggaran yang terjadi, Satpol PP selaku OPD yang bertanggung jawab berhasil menyelesaikan 85-100% pelanggaran.

Tabel 2.119. Tingkat Pelanggaran Ketertiban, Ketentraman, dan Keindahan Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah pelanggaran K3 yang dilaporkan masyarakat dan teridentifikasi oleh Satpol PP	16	20	16	8	8	300
Jumlah pelanggaran K3 yang terselesaikan	14	17	14	9	8	285
Tingkat penyelesaian pelanggaran K3	87,5	85	87,5	88,89	100	95

Sumber: Lakip Kabupaten Barito Utara Tahun 2022-2024.

Secara target dan capaian dalam penyelesaian pelanggaran ketertiban, ketentraman, dan keindahan di Kabupaten Barito Utara, pada tahun 2024 termasuk dalam kategori baik sekali. Beberapa faktor keberhasilan capaian ini karena operasi pengendalian terhadap pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat terlaksana dengan baik; penanganan pengaduan adanya pelanggaran berjalan dengan baik; patroli rutin dalam pengendalian keamanan, ketertiban umum, dan ketentraman masyarakat di seluruh daerah; sosialisasi peraturan perundang-undangan daerah kepada masyarakat berjalan dengan efektif; dan penegakan atas pelanggaran pelaksanaan peraturan perundang-undangan daerah. Namun, walau capaian penanganan pelanggaran dalam lima tahun terakhir selalu mendapatkan capaian yang melebihi dari target yang ditetapkan, patut menjadi perhatian terkait lonjakan tajam jumlah pelanggaran yang terjadi. Hal ini harus menjadi perhatian dan perlu ditekan agar tingkat pelanggaran tidak terus meningkat.



Gambar 2.70. Target, Realisasi, dan Capaian Penyelesaian Pelanggaran di Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023.

Sumber: Lakip Kabupaten Barito Utara 2022-2024.

2.4.2.3. Capaian Aksi Hak Asasi Manusia

Capaian Aksi Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hasil atau kemajuan yang telah dicapai oleh pemerintah daerah maupun instansi terkait dalam melaksanakan berbagai program dan kegiatan yang bertujuan untuk menghormati, melindungi, menegakkan, dan memenuhi HAM di wilayahnya.

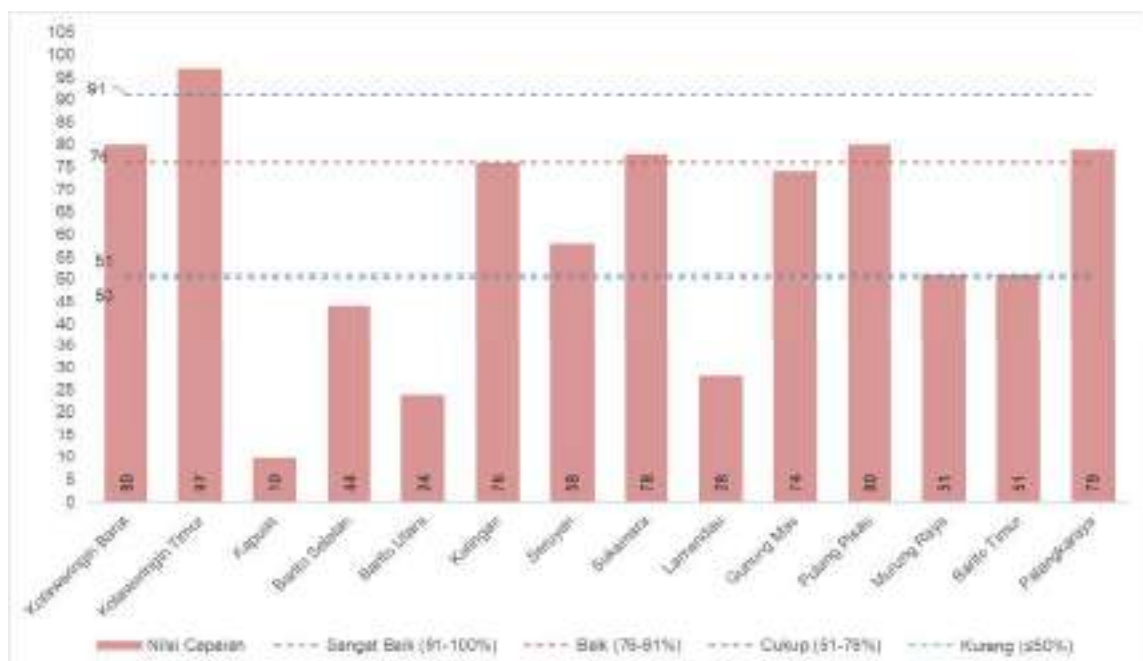
Secara umum, capaian Aksi HAM mencakup beberapa aspek utama, tergantung pada fokus pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM). Capaian aksi HAM merupakan ukuran keberhasilan pelaksanaan RANHAM yang dilakukan oleh pemerintah dalam kurun waktu tertentu. Capaian ini dinilai berdasarkan pemenuhan indikator dan target kinerja HAM.

Penilaian Capaian Aksi HAM Daerah Periode Pelaporan B08 Tahun 2025 dibedakan atas 2 kelompok sasaran dan 6 aksi. Kelompok sasaran tersebut terdiri atas kelompok sasaran perempuan (aksi 1 dan 2) dan kelompok penyandang disabilitas (aksi 3-6). Adapun 6 aksi yang menjadi parameter penilaian yakni:

- 1) Aksi 1: memberikan bantuan usaha dan membangun hubungan kemitraan bisnis bagi perempuan kepala keluarga di bidang usaha mikro kecil dan menengah;

- 2) Aksi 2: melakukan reviu, kajian, dan perubahan terhadap kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang diskriminatif terhadap perempuan di tingkat nasional dan daerah;
- 3) Aksi 3: mendorong upaya-upaya pencapaian target kouta pemenuhan akomodasi yang layak bagi pekerja penyandang disabilitas di sektor pemerintahan, badan usaha milik negara/daerah dan swasta;
- 4) Aksi 4: menyediakan layanan pendidikan inklusif yang aksesibel bagi penyandang disabilitas sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas;
- 5) Aksi 5: Implementasi pemberian bantuan sosial untuk kemandirian dan aksesibilitas penyandang disabilitas yang harmonis dengan peraturan lainnya;
- 6) Aksi 6: membangun sarana dan prasarana transportasi yang aksesibel bagi penyandang disabilitas.

Pada tahun 2025 nilai rata-rata capaian pelaksanaan Aksi HAM Kabupaten Barito Utara sebesar 24, menjadi salah satu kabupaten dengan nilai capaian pelaksanaan Aksi HAM terendah di antara kabupaten/kota yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah.



Gambar 2.71. Nilai Rata-Rata Capaian Pelaksanaan Aksi HAM Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025.

Capaian aksi HAM dikategorikan berdasarkan persentase pelaksanaan indikator yang telah ditetapkan. Pada umumnya penilaian capaian aksi HAM dibagi menjadi 4 seperti Tabel 2.120.

Tabel 2.120. Kategori Penilaian Capaian Aksi HAM

Kategori	Rentang Nilai (%)	Makna/Kriteria Umum
Sangat Baik	≥91% s/d 100%	Hampir seluruh aksi HAM telah dilaksanakan dengan sangat baik dan berdampak nyata bagi masyarakat
Baik	76% s/d <91%	Sebagian besar aksi HAM terlaksana sesuai target, meskipun masih ada aspek yang perlu perbaikan
Cukup	51% s/d <76%	Aksi HAM telah dilaksanakan namun belum optimal, perlu peningkatan komitmen dan dukungan anggaran
Kurang	≤50%	Pelaksanaan aksi HAM masih rendah, belum menunjukkan komitmen nyata terhadap pemajuan HAM di daerah

Nilai capaian aksi HAM Kabupaten Barito Utara yang berada pada nilai di bawah 50% membuktikan bahwa pelaksanaan aksi HAM masih rendah, belum menunjukkan komitmen nyata terhadap kemajuan HAM di daerah. Salah satu penyebab rendahnya nilai capaian aksi HAM Kabupaten Barito Utara karena penilaian capaian aksi HAM periode B08 "0" (kosong), yang mana pada semua penilaian pada seluruh aksi (aksi 1 s/d aksi 6) tidak ada nilainya (kosong).

2.4.2.4. Proporsi Penduduk Merasa Berjalan Aman di Lingkungan Tempat Tinggalnya

Tingkat rasa aman masyarakat merupakan salah satu indikator penting dalam menilai ketahanan sosial dan keamanan daerah. Rasa aman mencerminkan sejauh mana penduduk merasa terlindungi dari ancaman kriminalitas, konflik sosial, serta gangguan keamanan lainnya di lingkungan tempat tinggalnya.

Tabel 2.121. Volume Penduduk Merasa Aman Berjalan Kaki di Lingkungan Tempat Tinggal Tahun 2020-2024

TAHUN	Laki-Laki			Perempuan		
	Anak-Anak	Dewasa	Orang Tua	Anak-Anak	Dewasa	Orang Tua
	0 – 15 Tahun	15 – 40 Tahun	>40 Tahun	0 – 15 Tahun	15 – 40 Tahun	>40 Tahun
2020	8	9	9	8	9	9
2021	8	9	9	8	9	9

TAHUN	Laki-Laki			Perempuan		
	Anak-Anak	Dewasa	Orang Tua	Anak-Anak	Dewasa	Orang Tua
	0 – 15 Tahun	15 – 40 Tahun	>40 Tahun	0 – 15 Tahun	15 – 40 Tahun	>40 Tahun
2022	8	9	9	8	9	9
2023	8	9	9	8	9	9
2024	8	9	9	8	9	9

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja (Satpo PP) Kabupaten Barito Utara Tahun 2025.

2.4.3. Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan

Pembangunan ketahanan wilayah tidak hanya bertumpu pada aspek pertahanan fisik, tetapi juga ditopang oleh kemampuan diplomasi daerah dan daya saing ekonomi sebagai instrument strategis dalam memperkuat posisi Kabupaten Barito Utara di tingkat regional maupun nasional. Salah satu indikator yang mencerminkan hal tersebut adalah Indeks Daya Saing Daerah (IDSD), yang mengukur berbagai pilar fundamental yang menunjang kemajuan dan daya saing suatu wilayah.

IDSD berperan penting dalam menilai kapasitas Kabupaten Barito Utara dalam menarik investasi, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta membangun ketangguhan wilayah melalui pendekatan *soft power* berbasis daya saing regional. IDSD Kabupaten Barito Utara mengalami peningkatan dari 2,71 pada tahun 2022 menjadi 3,35 pada tahun 2024. Namun, ada beberapa pilar yang mengalami penurunan nilai IDSD seperti pilar 5 (kesehatan), pilar 9 (sistem keuangan), pilar 11 (dinamika bisnis), dan pilar 12 (kapabilitas inovasi).

Tabel 2.122. Capaian IDSD Kabupaten Barito Utara Tahun 2022-2024

Komponen IDSD	Penilaian	Nilai IDSD		
		2022	2023	2024
Lingkungan Pendukung	Pilar 1 (Institusi)	4,17	4,22	4,71
	Pilar 2 (Infrastruktur)	2,40	1,82	3,01
	Pilar 3 (Adopsi TIK)	2,38	3,44	3,84
	Pilar 4 (Stabilitas Ekonomi Makro)	2,58	3,71	3,92
Sumber Daya Manusia	Pilar 5 (Kesehatan)	3,92	3,96	3,89
	Pilar 6 (Keterampilan)	3,21	3,58	4,01
Pasar	Pilar 7 (Pasar Produk)	2,01	2,01	2,82



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029

Komponen IDSD	Penilaian	Nilai IDSD		
		2022	2023	2024
	Pilar 8 (Pasar Tenaga Kerja)	2,41	3,68	3,34
	Pilar 9 (Sistem Keuangan)	3,63	0,76	2,99
	Pilar 10 (Ukuran Pasar)	0,47	3,98	4,01
Ekosistem Inovasi	Pilar 11 (Dinamisme Bisnis)	5,00	2,25	3,99
	Pilar 12 (Kapabilitas Inovasi)	0,39	1,06	0,78
	Skor IDSD	2,71	2,87	3,44
Nasional		3,26	3,44	3,43
Kalimantan Tengah		3,13	3,27	3,46
Rata-Rata Kabupaten/Kota		-	2,88	3,49

Sumber: <https://brin.go.id/drid/page/indeks-daya-saing-daerah>

Keterangan: Skor (nilai) pada skala 5.

Berdasar data yang tersaji pada Tabel 2.122 di atas, terlihat bahwa beberapa pilar mengalami peningkatan yang dinamis dalam rentang waktu 2022-2024. Namun, ada beberapa pilar yang mengalami penurunan IDSD seperti pilar 5 (kesehatan), dan pilar 12 (kapabilitas inovasi).

Pilar 5 (kesehatan) pada tahun 2023 mengalami peningkatan menjadi 3,96 dibanding tahun 2022 yang nilai IDSD-nya sebesar 3,92 atau terjadi peningkatan sebanyak 0,04 poin. Namun, pada tahun 2024 nilai IDSD pilar kesehatan mengalami penurunan sebesar 0,7 poin menjadi 3,89.

Pilar kesehatan merupakan salah satu komponen fundamental dalam pengukuran IDSD, karena kualitas kesehatan masyarakat berpengaruh langsung terhadap produktivitas tenaga kerja, tingkat kesejahteraan, serta kapasitas pembangunan daerah secara keseluruhan. Kesehatan yang baik menjadi prasyarat utama bagi peningkatan kualitas SDM yang berdaya saing tinggi dan berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi daerah yang berkelanjutan. Pada tahun 2024 penentuan nilai IDSD pilar kesehatan meliputi indikator penting yakni angka harapan hidup. Pilar kesehatan mencerminkan tingkat kualitas sumber daya manusia, yang diukur berdasarkan harapan lama hidup bayi dalam kondisi sehat. Terjadinya penurunan nilai IDSD pilar kesehatan ini menandakan bahwa daya saing daerah dari aspek kualitas hidup masyarakat menurun. Hal ini mencerminkan tantangan dalam pemerataan layanan

kesehatan, ketersediaan tenaga dan fasilitas, kondisi lingkungan dan perilaku masyarakat, serta efektivitas kebijakan dan pendanaan daerah.

Nilai IDSD Pilar 9 (Sistem Keuangan) Kabupaten Barito Utara pada tahun 2024 (2,99) mengalami penurunan jika dibandingkan nilai IDSD tahun 2022 (3,63), walau mengalami peningkatan yang signifikan jika dibandingkan dengan nilai IDSD tahun 2023 (0,76). Sistem keuangan merefleksikan kemampuan finansial perbankan dan non-perbankan di daerah dalam memediasi aktivitas perekonomian daerah.

Tabel 2.123. Capaian IDSD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024

Kabupaten/Kota	Lingkungan Pendukung				SDM		Pasar				Ekosistem Inovasi		Skor IDSD
	Pilar 1	Pilar 2	Pilar 3	Pilar 4	Pilar 5	Pilar 6	Pilar 7	Pilar 8	Pilar 9	Pilar 10	Pilar 11	Pilar 12	
Kotawaringin Barat	4,71	3,01	4,26	3,71	3,86	3,81	3,26	3,82	3,83	4,30	4,63	2,08	3,77
Kotawaringin Timur	4,67	2,96	4,34	3,12	3,79	3,58	3,84	3,60	3,16	4,41	4,32	1,58	3,61
Kapuas	4,22	3,58	3,65	4,13	3,69	3,93	3,19	3,55	1,90	4,21	4,68	0,65	3,45
Barito Selatan	4,69	2,96	4,03	3,72	3,57	4,01	4,30	3,91	2,15	3,77	3,77	1,15	3,50
Barito Utara	4,71	3,01	3,84	3,92	3,89	4,01	2,82	3,34	2,99	4,01	3,99	0,78	3,44
Sukamara	4,76	2,93	4,31	3,67	3,92	4,00	2,96	3,02	2,33	3,62	4,12	1,01	3,39
Lamandau	4,54	2,64	3,76	3,34	3,74	4,08	2,65	3,51	3,48	3,73	4,00	0,85	3,36
Katingan	4,45	3,64	3,59	3,78	3,46	3,80	3,53	3,39	2,82	3,85	3,90	0,94	3,43
Pulang Pisau	4,56	3,02	3,69	4,42	3,64	4,24	3,34	2,83	2,78	3,69	4,84	0,81	3,49
Gunung Mas	4,34	2,29	3,94	3,67	3,83	4,10	3,28	2,90	2,78	3,72	3,71	0,64	3,27
Barito Timur	4,40	2,91	4,40	3,69	3,66	4,19	2,44	3,93	2,47	3,87	3,44	1,52	3,41
Murung Raya	4,64	2,12	2,80	3,70	3,75	3,94	2,59	3,27	3,36	3,93	4,58	0,74	3,28
Palangka Raya	4,59	3,07	4,52	3,55	4,06	4,32	5,00	4,83	4,31	4,20	4,27	2,92	4,14

2.5. Gambaran Umum Keuangan Daerah

Gambaran umum keuangan daerah memberikan penilaian menyeluruh terhadap kinerja fiskal Pemerintah Kabupaten Barito Utara, yang mencakup perkembangan pendapatan, belanja, pembiayaan, serta posisi neraca dan kapasitas keuangan daerah dalam mendukung pembangunan lima tahun ke depan. Analisis ini juga menjadi dasar dalam penyusunan proyeksi keuangan daerah untuk menentukan arah kebijakan fiskal, prioritas pembangunan, serta ruang fiskal yang tersedia selama periode pembangunan 2025–2029.

2.5.1. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) memberikan gambaran mengenai kinerja fiskal Pemerintah Kabupaten Barito Utara dalam lima tahun terakhir (2019–2024). Analisis ini digunakan untuk menilai kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola



pendapatan, belanja, dan pembiayaan secara efektif, serta melihat keseimbangan fiskal dan arah kebijakan keuangan daerah dalam mendukung pembangunan berkelanjutan.

Pembahasan realisasi APBD mencakup tiga komponen utama yaitu pendapatan daerah, sebagai indikator kapasitas fiskal dan kemandirian keuangan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Pendapatan daerah menggambarkan kapasitas fiskal dan kemandirian keuangan daerah; belanja daerah mencerminkan arah kebijakan dan efektivitas alokasi anggaran; sementara pembiayaan daerah berperan dalam menjaga keseimbangan fiskal dan stabilitas kas daerah.

Tabel 2.124. Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Barito Utara Tahun 2019-2024

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Pendapatan (Rp)						
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	74,324,983,989.24	75,964,542,204.14	104,047,427,279.40	108,396,505,775.09	94,692,794,725.87	173,449,441,610.37
Pajak Daerah	14,252,610,831.00	16,697,969,848.00	16,940,885,077.00	20,200,409,777.20	24,903,662,174.70	31,940,140,819.00
Retribusi Daerah	7,612,371,689.00	8,274,365,660.00	9,028,294,247.40	10,131,945,418.00	9,026,715,028.00	12,717,803,388.00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	8,882,897,108.00	8,727,329,189.00	10,432,755,624.00	10,058,366,983.00	477,599,093.96	3,751,805,655.50
Lain-lain PAD yang Sah	43577104361.24	42,264,877,507.14	67,645,492,331.00	68,005,783,596.89	60,284,818,429.21	125,039,691,747.87
Jumlah PAD	74,324,983,989.24	75,964,542,204.14	104,047,427,279.40	108,396,505,775.09	94,692,794,725.87	173,449,441,610.37
Pendapatan Transfer (Rp)						
Dana Transfer Pemerintah Pusat (DBH, DAU, DAK)	1,061,416,526,220.00	984,995,190,840.00	1,061,165,398,850.00	1,135,004,617,846.00	2,007,648,125,818.00	2,476,769,555,593.00
Dana Transfer Antar Daerah (Bagi Hasil Pajak/Non Pajak)	95,649,922,410.94	45,436,933,782.11	45,720,883,744.21	88,754,195,440.60	137,257,844,000.00	125,679,281,932.00
Jumlah Pendapatan Transfer	1,157,066,448,630.94	1,030,432,124,622	1,106,886,282,594.21	1,223,758,813,286.60	2,144,905,969,818.00	2,602,448,837,525.00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	21,782,108,000.00	35,378,557,164.00	22,804,499,000.00	20,122,478,837.00	20,839,956,623.17	23,094,236,880.00
JUMLAH PENDAPATAN	1,253,173,540,620.18	1,141,775,223,990.25	1,233,738,208,873.61	1,352,277,797,898.69	2,260,438,721,167.04	2,798,992,516,015.37

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Barito Utara (data diolah, 2025).

Selama periode 2019–2024, total pendapatan daerah Kabupaten Barito Utara mengalami pertumbuhan signifikan sebesar 123,4%, meningkat dari Rp1,25 triliun pada tahun 2019 menjadi Rp2,79 triliun pada tahun 2024. Kenaikan ini terutama disumbang oleh kenaikan pendapatan transfer dari pemerintah pusat, khususnya Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang meningkat tajam pasca-pandemi, seiring dengan kebijakan fiskal nasional yang memperkuat peran daerah dalam pemulihan ekonomi. Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga menunjukkan tren positif dengan rata-rata pertumbuhan tahunan mencapai 18,6%. Peningkatan terbesar terjadi pada komponen lain-lain PAD yang sah, yang melonjak dari Rp43,57 miliar pada tahun 2019 menjadi Rp125,03 miliar pada tahun 2024. Kenaikan ini menunjukkan adanya peningkatan efisiensi dalam pengelolaan aset daerah dan intensifikasi pendapatan nonpajak seperti hasil kerja sama pemanfaatan aset, jasa giro, dan pendapatan dari badan layanan umum daerah.

Sementara itu, pajak daerah dan retribusi juga meningkat konsisten sejalan dengan pertumbuhan aktivitas ekonomi dan perluasan basis pajak. Pajak daerah naik dari Rp14,25 miliar pada tahun 2019 menjadi Rp31,94 miliar pada tahun 2024, sedangkan retribusi naik dari Rp7,61 miliar menjadi Rp12,71 miliar dalam periode yang sama. Namun, pada tahun 2023 sempat terjadi penurunan PAD akibat penyesuaian kebijakan pendapatan pascapandemi dan keterlambatan realisasi beberapa pos penerimaan. Pendapatan transfer pemerintah pusat tetap menjadi kontributor terbesar, dengan rata-rata porsi lebih dari 90% terhadap total pendapatan daerah. Peningkatan signifikan pada tahun 2023 dan 2024 hingga mencapai Rp2,6 triliun menggambarkan dukungan fiskal pusat terhadap program prioritas daerah, terutama di sektor infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Secara keseluruhan, komposisi pendapatan daerah Kabupaten Barito Utara masih didominasi oleh transfer pusat, namun terdapat tren positif menuju peningkatan kemandirian fiskal melalui optimalisasi PAD. Arah kebijakan ke depan perlu difokuskan pada penguatan basis pendapatan lokal melalui digitalisasi pemungutan pajak dan retribusi, pengembangan aset daerah produktif, serta peningkatan tata kelola pendapatan berbasis kinerja.

2.5.1.1. Perkembangan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah menggambarkan kemampuan keuangan pemerintah daerah dalam membiayai kegiatan pembangunan secara mandiri. Komponen pendapatan terdiri dari PAD, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Tabel 2.125. Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2019-2024

Tahun	PAD (Miliar Rp)	Pendapatan Transfer (Miliar Rp)	Lain-lain Pendapatan (Miliar Rp)	Total Pendapatan (Miliar Rp)	Rasio PAD terhadap Total (%)
2019	74,3	1.157,1	21,7	1.253,1	5,9
2020	75,9	1.030,4	35,3	1.141,7	6,6
2021	104,05	1.106,9	22,8	1.233,7	8,0
2022	108,4	1.223,7	20,1	1.352,2	8,0
2023	94,6	2.144,9	20,8	2.260,4	4,2
2024	173,4	2.606,4	23,09	2.798,9	6,2

Sumber: BPKAD Kabupaten Barito Utara, data diolah (2025).

Pendapatan daerah Kabupaten Barito Utara meningkat secara konsisten dari Rp1,59 triliun pada tahun 2019 menjadi Rp2,18 triliun pada tahun 2024, atau tumbuh rata-rata 5,4% per tahun. Struktur pendapatan masih didominasi oleh pendapatan transfer dari pemerintah pusat (sekitar 93–95%), sedangkan kontribusi PAD relatif stabil pada kisaran 5–6%. Meskipun tingkat kemandirian fiskal masih terbatas, tren peningkatan PAD mencerminkan perbaikan efektivitas pemungutan pajak dan retribusi daerah, serta upaya pemerintah dalam memperkuat basis penerimaan lokal melalui digitalisasi pajak dan optimalisasi pengelolaan aset.

2.5.1.2. Rasio Pajak Daerah Terhadap PDRB

Rasio pajak daerah terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan indikator penting untuk mengukur kemampuan fiskal daerah dan efektivitas pemungutan pajak lokal terhadap total aktivitas ekonomi. Rasio ini menunjukkan kontribusi pajak daerah terhadap total nilai tambah ekonomi yang dihasilkan masyarakat dan dunia usaha. Semakin tinggi rasio ini, semakin kuat tingkat kemandirian fiskal, karena menunjukkan aktivitas ekonomi lokal telah memberikan kontribusi nyata terhadap PAD.

Tabel 2.126. Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB Kabupaten Barito Utara Tahun 2019–2024

Tahun	Pajak Daerah (Miliar Rp)	PDRB ADHB (Miliar Rp)	Rasio Pajak terhadap PDRB (%)
2019	14,2	9.801	0,1
2020	16,6	9.391	0,2
2021	16,9	10.565	0,2
2022	20,2	14.298	0,1
2023	24,9	14.178	0,2
2024	31,9	14.039	0,2

Sumber: BPS Kabupaten Barito Utara dan BPKAD, data diolah (2025).

Selama lima tahun terakhir, rasio pajak daerah terhadap PDRB meningkat dari 0,86% pada tahun 2019 menjadi 0,91% pada tahun 2024. Tren positif ini menunjukkan bahwa efektivitas pemungutan pajak daerah semakin membaik, seiring pertumbuhan ekonomi yang stabil. Kontributor utama peningkatan pajak berasal dari pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan (MBLB), serta pajak kendaraan bermotor, didukung oleh pertumbuhan sektor perdagangan, jasa, dan pariwisata.

Jika dibandingkan dengan rata-rata provinsi, rasio pajak terhadap PDRB Kabupaten Barito Utara tergolong moderat, namun memperlihatkan arah positif menuju peningkatan kemandirian fiskal daerah. Tantangan yang dihadapi sekarang ini antara lain:

- a) basis pajak masih terbatas akibat dominasi sektor pertanian dan kehutanan yang belum optimal tergarap;
- b) kepatuhan wajib pajak UMKM relatif rendah akibat keterbatasan literasi dan pendampingan administrasi;
- c) digitalisasi pajak daerah belum menjangkau seluruh kecamatan.

Arah kebijakan yang dapat dilakukan untuk kedepannya antara lain:

- a) meningkatkan efektivitas pemungutan pajak melalui modernisasi sistem informasi pajak daerah dan digitalisasi transaksi;
- b) memperluas basis pajak baru di sektor perdagangan, jasa, dan pariwisata;
- c) meningkatkan kapasitas aparatur pajak daerah melalui pelatihan dan pengawasan berbasis data;
- d) membangun sinergi fiskal dengan pemerintah provinsi dan pusat untuk harmonisasi kebijakan dan optimalisasi potensi PAD.

Dengan langkah-langkah tersebut, Kabupaten Barito Utara diharapkan dapat mencapai rasio pajak terhadap PDRB di atas 1% pada akhir periode pembangunan 2025–2029, sebagai indikator peningkatan kemandirian fiskal dan tata kelola ekonomi yang efektif.

2.5.1.3. Perkembangan Belanja Daerah

Belanja daerah merupakan instrumen utama kebijakan fiskal yang menggambarkan arah pengeluaran pemerintah dalam membiayai pembangunan dan pelayanan publik. Melalui belanja daerah, pemerintah menjalankan fungsi alokasi sumber daya, distribusi kesejahteraan, dan stabilisasi ekonomi daerah. Komponen belanja terdiri atas belanja operasi,



belanja modal, belanja tak terduga, dan belanja transfer kepada pemerintah desa atau pihak ketiga.



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Tahun 2025-2029**

Tabel 2.127. Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2019–2024

Uraian	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Belanja Daerah						
Belanja Operasi (Rp)						
Belanja Pegawai	418,467,055,544.00	409,215,775,817.00	425,050,404,307.00	433,763,233,912.00	480,012,275,530.00	565,253,269,413.00
Belanja Barang dan Jasa	302,950,179,031.43	277,030,947,773.00	297,645,444,167.00	347,403,933,299.00	468,893,854,067.00	544,220,576,364.00
Belanja Subsidi	0.00	0.00	82,622,000.00	19,708,000.00	23,500,000.00	0.00
Belanja Hibah	48,992,217,345.71	40,305,567,986.00	26,458,506,782.00	33,106,872,821.00	102,335,824,376.00	121,602,189,674.00
Belanja Bantuan Sosial	786,540,000.00	1,035,750,000.00	2,287,650,300.00	2,409,332,875.00	2,554,815,594.00	1,487,800,000.00
Jumlah Belanja Operasi	771,195,991,921.14	727,588,041,576.00	751,524,627,556.00	816,703,080,907.00	1,053,820,269,567.00	1,232,563,835,451.00
Belanja Modal (Rp)						
Belanja Modal Tanah	631,187,000.00	4,505,997,720.00	148,397,840.00	380,061,720.00	1,933,195,040.00	3,224,926,570.00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	86,256,609,412.00	67,633,701,725.00	39,303,536,881.00	66,476,780,468.00	105,955,547,150.13	117,180,048,502.00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	93,796,070,178.03	56,327,437,692.00	79,166,290,365.00	113,547,863,236.00	143,947,870,107.00	310,404,269,556.47
Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan	114,737,663,030.32	76,388,221,500.00	64,743,196,512.00	112,512,217,795.00	357,040,716,674.29	307,519,321,199.00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3,560,686,400.00	1,011,342,902.00	822,968,500.00	466,432,620.00	2,358,443,720.00	769,240,000.00
Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,584,157,556.00
Belanja Aset Lainnya	0.00	0.00	0.00	0.00	1,046,416,200.00	
Jumlah Belanja Modal	298,982,216,020.35	205,866,701,539.00	184,184,390,098.00	293,383,355,839.00	612,282,188,891.42	740,681,963,383.47
BELANJA TAK TERDUGA	35,750,000.00	17,058,167,393.00	0.00	0.00	0.00	2,587,685,410.00
JUMLAH BELANJA DAERAH	1,070,213,957,941.49	950,512,910,508.00	935,709,017,654.00	1,110,086,436,746.00	1,666,102,458,458.42	1,975,833,484,244.47
Transfer (Rp)						



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Tahun 2025-2029**

Uraian	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Transfer Bagi Hasil Pendapatan (Pajak Daerah, Retribusi Daerah)	1,950,260,008.85	2,794,341,576.36	2,252,685,138.81	2,441,566,961.23	2,788,734,312.24	3,067,895,844.35
Transfer Bantuan Keuangan	167,865,241,208.00	159,524,453,682.00	158,569,676,000.00	156,303,762,600.00	0.00	300,907,000,800.00
Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	0.00	0.00	0.00	0.00	227,518,959,600.00	0.00
Jumlah Belanja Transfer	169,815,501,216.85	162,318,795,258.36	160,822,361,138.81	158,745,329,561.23	230,307,693,912.24	303,974,896,644.35
JUMLAH BELANJA DAERAH DAN TRANSFER	1,240,029,459,158.34	1,112,831,705,766.36	1,096,531,378,792.81	1,268,831,766,307.23	1,896,410,152,370.66	2,279,808,380,888.82

Sumber: BPKAD Kabupaten Barito Utara, data diolah (2025).

Selama periode 2019–2024, realisasi belanja daerah Kabupaten Barito Utara menunjukkan tren meningkat dengan rata-rata pertumbuhan 3,7% per tahun. Kenaikan ini mencerminkan meningkatnya kapasitas fiskal daerah serta komitmen pemerintah dalam memperluas cakupan pelayanan publik dan infrastruktur dasar. Total belanja daerah (termasuk transfer) naik dari Rp1,24 triliun pada tahun 2019 menjadi Rp2,28 triliun pada tahun 2024, atau meningkat sebesar 83,9%.

Proporsi terbesar belanja daerah masih didominasi oleh belanja operasi, yang rata-rata mencapai 67% dari total belanja daerah. Komponen terbesar dalam belanja operasi adalah belanja pegawai, yang meningkat dari Rp418,47 miliar pada tahun 2019 menjadi Rp565,25 miliar pada tahun 2024, sejalan dengan kebijakan penyesuaian gaji, tunjangan, dan belanja aparatur. Selain itu, belanja barang dan jasa juga meningkat signifikan hingga mencapai Rp544,22 miliar pada tahun 2024, menunjukkan meningkatnya aktivitas program dan pelayanan pemerintah daerah. Namun, terdapat perubahan positif pada struktur belanja, yakni peningkatan proporsi belanja modal dari 15,2% pada tahun 2019 menjadi 17,1% pada tahun 2024. Kenaikan belanja modal terutama diarahkan untuk pembangunan infrastruktur publik seperti jalan, jembatan, irigasi, jaringan listrik, gedung sekolah, fasilitas kesehatan, dan peralatan kerja pemerintah daerah. Hal ini sejalan dengan fokus pemerintah daerah untuk memperkuat konektivitas wilayah, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

Belanja transfer juga menunjukkan peningkatan pada tahun 2024, terutama pada bantuan keuangan kepada desa sebesar Rp300,91 miliar. Kenaikan ini merupakan bagian dari kebijakan penguatan peran desa dalam pembangunan berbasis kewilayahan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui transfer fiskal yang lebih merata. Secara keseluruhan, struktur belanja daerah Kabupaten Barito Utara sudah menunjukkan arah pergeseran menuju belanja yang lebih produktif. Meski belanja operasi masih mendominasi, peningkatan porsi belanja modal dan transfer ke desa menandakan upaya pemerintah daerah untuk menyeimbangkan antara belanja rutin dan belanja pembangunan. Ke depan, Pemerintah Kabupaten Barito Utara perlu meningkatkan efisiensi belanja operasi melalui digitalisasi layanan dan pengendalian belanja pegawai, agar dapat memperbesar ruang fiskal bagi belanja produktif dan investasi publik. Optimalisasi penggunaan belanja modal diharapkan menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi daerah serta memperkuat kualitas pelayanan publik yang berkeadilan dan berkelanjutan.

2.5.1.4. Perkembangan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah digunakan untuk menjaga keseimbangan fiskal antara pendapatan dan belanja. Sumber pembiayaan terdiri atas penerimaan pembiayaan (SILPA) dan pengeluaran pembiayaan (penyertaan modal daerah, pembayaran kewajiban). Pembiayaan daerah menunjukkan pola pengelolaan yang stabil dan hati-hati. Mayoritas penerimaan pembiayaan berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), yang digunakan untuk menutupi kebutuhan kas dan mendanai program prioritas tahun berikutnya. Sementara pengeluaran pembiayaan difokuskan pada penyertaan modal daerah di BUMD strategis, sebagai upaya memperkuat peran sektor publik dalam ekonomi lokal.

2.5.2. Kinerja Pelaksanaan APBD

Kinerja pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Barito Utara selama periode 2019–2024 menunjukkan arah yang positif, baik dari sisi pendapatan, belanja, maupun pembiayaan daerah. Secara umum, APBD Kabupaten Barito Utara memperlihatkan tren pertumbuhan yang moderat dan terkendali, mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas fiskal, meningkatkan efektivitas alokasi belanja, dan memperkuat kapasitas pendapatan asli daerah (PAD).

2.5.2.1. Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah Kabupaten Barito Utara terus menunjukkan peningkatan selama lima tahun terakhir. Berdasarkan data LKPD *Audited*, total pendapatan daerah meningkat dari sekitar Rp1,34 triliun pada tahun 2019 menjadi Rp1,76 triliun pada tahun 2024, atau tumbuh rata-rata sekitar 5,4% per tahun.

Pertumbuhan ini bersumber dari dua komponen utama, yaitu Pendapatan PAD dan pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan provinsi. Peningkatan PAD utamanya berasal dari pajak daerah, retribusi jasa umum, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, termasuk kontribusi dari BUMD. Implementasi digitalisasi pajak dan peningkatan kepatuhan wajib pajak juga berperan dalam memperluas basis penerimaan daerah. Sementara itu, pendapatan transfer masih menjadi komponen terbesar dengan kontribusi lebih dari 80% terhadap total pendapatan daerah. Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terus meningkat seiring perbaikan kinerja fiskal nasional dan kebijakan transfer berbasis kinerja daerah.



Secara keseluruhan, kinerja pendapatan menunjukkan arah yang positif menuju peningkatan kemandirian fiskal, meskipun masih terdapat tantangan pada diversifikasi sumber PAD dan optimalisasi aset daerah yang belum termanfaatkan maksimal.

2.5.2.2. Belanja Daerah

Dari sisi pengeluaran, belanja daerah Kabupaten Barito Utara juga mengalami peningkatan konsisten dalam periode yang sama. Realisasi belanja naik dari sekitar Rp1,40 triliun pada tahun 2019 menjadi Rp1,83 triliun pada tahun 2024, atau tumbuh rata-rata sekitar 6,7% per tahun.

Struktur belanja daerah masih didominasi oleh belanja operasi, terutama untuk belanja pegawai, barang dan jasa, serta belanja hibah. Proporsi belanja pegawai relatif tinggi, namun pemerintah daerah telah berupaya menekan pertumbuhannya melalui rasionalisasi dan efisiensi anggaran. Sementara itu, belanja modal menunjukkan peningkatan signifikan dari sekitar Rp320 miliar pada tahun 2019 menjadi Rp420 miliar pada tahun 2024, hal ini mencerminkan komitmen peningkatan investasi publik terutama pada infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, air bersih, dan sarana pelayanan publik.

Kinerja realisasi belanja secara keseluruhan menunjukkan kemampuan pemerintah daerah menjaga keseimbangan antara kebutuhan operasional dan belanja pembangunan, meski efisiensi masih perlu ditingkatkan untuk memperbesar porsi belanja produktif.

2.5.2.3. Pembiayaan

Pembiayaan daerah merupakan komponen penting dalam siklus keuangan pemerintah daerah yang berfungsi menutup selisih antara pendapatan dan belanja. Pos pembiayaan berperan sebagai instrumen kebijakan fiskal untuk menjaga keseimbangan anggaran, baik dalam kondisi *surplus* maupun *defisit*. Melalui pembiayaan daerah, pemerintah memiliki ruang untuk mengatur likuiditas keuangan, memanfaatkan sisa anggaran tahun sebelumnya, dan mendukung kegiatan strategis tanpa menambah beban utang baru. Dengan demikian, pembiayaan menjadi cerminan kemampuan daerah dalam menjaga stabilitas fiskal dan efisiensi pengelolaan kas.

Selama periode 2019–2024, pembiayaan daerah Kabupaten Barito Utara menunjukkan kinerja yang relatif kuat dan terkendali. Sumber utama penerimaan pembiayaan berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya yang digunakan kembali untuk membiayai program prioritas daerah. Selain itu, tidak terdapat pinjaman daerah maupun



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029

penerimaan pembiayaan eksternal, menandakan komitmen pemerintah daerah dalam mengelola keuangan secara mandiri dan hati-hati.



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Tahun 2025-2029**

Tabel 2.128. Pembiayaan Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2019-2024

Uraian	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Pembiayaan Daerah						
Penerimaan Pembiayaan (Rp)						
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Sebelumnya	201.291.426.870,86	218.726.255.801,00	247.669.847.225,00	384.876.677.305,00	465.273.128.137,00	802.572.317.857,00
Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	-
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	-	-	-	-	-	-
Pencairan Dana Cadangan	4.290.747.468,00	-	-	-	-	-
Jumlah Penerimaan Pembiayaan	205.582.174.339,00	218.726.255.801,00	247.669.847.225,00	384.876.677.305,00	465.273.128.137,00	802.572.317.857,00
Pengeluaran Pembiayaan (Rp)						
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	-	-	-	3.000.000.000,00	27.000.000.000,00	27.150.000.000,00
Pembayaran Pokok Utang Daerah	-	-	-	-	-	-
Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	-
Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	8.000.000.000,00		
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	-	-	-	11.000.000.000,00	27.000.000.000,00	27.150.000.000,00
PEMBIAYAAN NETO	205.582.174.339,00	218.726.255.801,00	247.669.847.225,00	373.876.677.305,00	438.273.128.137,00	775.422.317.857,00

Selama lima tahun terakhir, penerimaan pembiayaan daerah meningkat tajam dari Rp205,58 miliar pada tahun 2019 menjadi Rp802,57 miliar pada tahun 2024. Peningkatan ini mencerminkan efisiensi pelaksanaan anggaran serta pengelolaan kas daerah yang semakin baik. Bertambahnya SiLPA menunjukkan bahwa pemerintah daerah mampu menjaga belanja dalam koridor yang efisien, sehingga tersedia ruang fiskal yang dapat dimanfaatkan kembali untuk membiayai prioritas pembangunan di tahun berikutnya. Sementara itu, pengeluaran pembiayaan daerah masih relatif kecil dan terkendali. Realisasi tertinggi terjadi pada tahun 2023 dan 2024 masing-masing sebesar Rp27,0 miliar dan Rp27,15 miliar, terutama digunakan untuk penyertaan modal pemerintah daerah kepada BUMD serta program investasi produktif. Pada tahun 2022, pembentukan dana cadangan sebesar Rp8,0 miliar juga menunjukkan langkah antisipatif dalam mendukung pembiayaan program strategis di tahun berikutnya.

Secara keseluruhan, pembiayaan neto Kabupaten Barito Utara meningkat dari Rp205,58 miliar pada tahun 2019 menjadi Rp775,42 miliar pada tahun 2024, yang menandakan kapasitas fiskal daerah semakin kuat tanpa bergantung pada pinjaman atau pembiayaan eksternal. Selama periode tersebut, tidak terdapat penerimaan pinjaman daerah maupun pembayaran pokok utang, sehingga posisi fiskal daerah tetap likuid dan berisiko rendah. Kinerja ini menggambarkan penerapan prinsip pengelolaan fiskal yang hati-hati (*prudent fiscal management*), dengan menjaga rasio keseimbangan primer tetap positif. Pemerintah daerah mampu membiayai seluruh kewajiban jangka pendek dari pendapatan murni tanpa memerlukan pembiayaan tambahan. Dengan kondisi ini, Kabupaten Barito Utara dinilai memiliki fondasi keuangan yang stabil untuk mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan. Ke depan, kebijakan pembiayaan daerah akan difokuskan pada pengendalian defisit, optimalisasi pemanfaatan SiLPA, serta peningkatan efisiensi investasi pemerintah daerah. Arah pembiayaan diarahkan agar setiap dana yang bersumber dari surplus anggaran dapat memberikan nilai tambah terhadap pembangunan, memperkuat ketahanan fiskal daerah, dan menjaga keberlanjutan pelayanan publik yang berkualitas.

2.5.2.4. Neraca Daerah

Neraca daerah menggambarkan posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Utara pada akhir tahun anggaran yang mencakup total aset, kewajiban, dan ekuitas. Melalui neraca ini, dapat dilihat tingkat kesehatan fiskal, efisiensi pengelolaan aset, serta kemampuan pemerintah dalam menjaga stabilitas keuangan daerah.

Selama periode 2019–2024, total aset Pemerintah Kabupaten Barito Utara menunjukkan peningkatan signifikan dari Rp3,75 triliun pada tahun 2019 menjadi Rp7,01 triliun pada tahun 2024, atau tumbuh sekitar 87%. Kenaikan ini sebagian besar bersumber dari peningkatan aset tetap dan aset lainnya, terutama investasi pada infrastruktur jalan, jembatan, sarana pendidikan, fasilitas kesehatan, serta aset nonkeuangan lain seperti tanah dan bangunan milik daerah.

Di sisi lain, kewajiban daerah relatif kecil dan terkendali sepanjang periode tersebut. Total kewajiban hanya meningkat dari Rp15,8 miliar pada tahun 2019 menjadi Rp15,7 miliar pada tahun 2024, dengan fluktuasi kecil di antara tahun-tahun pengamatan. Hal ini menunjukkan posisi *likuiditas* dan *solvabilitas* yang sangat baik, karena proporsi kewajiban terhadap aset (rasio kewajiban terhadap aset) berada jauh di bawah 1%. Dengan kata lain, hampir seluruh aset daerah dibiayai oleh ekuitas, bukan utang.

Ekuitas pemerintah daerah juga menunjukkan tren positif, meningkat dari Rp3,73 triliun pada tahun 2019 menjadi Rp6,99 triliun pada tahun 2024. Kenaikan ekuitas ini sejalan dengan bertambahnya aset daerah, mencerminkan peningkatan nilai kekayaan bersih pemerintah daerah yang bersumber dari *surplus* anggaran dan penambahan investasi dalam bentuk aset tetap maupun investasi jangka panjang.



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Tahun 2025-2029**

Tabel 2.129. Neraca Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Utara Tahun 2019-2024

Uraian	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Aset (Rp)						
Aset Lancar	294.671.392.733,73	295.676.453.632,66	463.896.342.183,28	547.441.161.745,65	908.044.697.817,23	1.449.459.488.191,18
Investasi Jangka Panjang	61.122.291.484,00	122.234.259.704,00	105.760.820.715,00	104.824.869.289,00	133.986.234.431,61	161.056.862.829,61
Aset Tetap	3.383.998.775.008,66	2.775.041.630.745,33	2.767.433.211.850,22	2.887.891.035.698,86	3.467.642.764.544,92	3.879.492.388.452,00
Aset Lainnya	10.680.766.846,62	5.203.146.220,62	5.540.080.989,00	249.958.793.311,00	1.250.562.731.601,00	1.515.909.957.099,00
Jumlah Aset	3.750.473.226.073,01	3.198.155.490.302,61	3.342.630.455.737,50	3.790.115.860.044,51	5.760.236.428.395,00	7.005.918.696.572,00
KEWAJIBAN						
Kewajiban Jangka Pendek	15.796.070.805,00	18.004.277.926,00	43.061.689.954,64	7.850.550.222,00	6.801.909.763,00	15.722.856.212,00
Kewajiban Jangka Panjang	-	-	-	-	-	-
Jumlah Kewajiban	15.796.070.805,00	18.004.277.926,00	43.061.689.954,64	7.850.550.222,00	6.801.909.763,00	15.722.856.212,00
Ekuitas (Rp)						
Ekuitas Awal	3.734.677.155.268,01	3.180.151.212.376,61	3.299.568.756.782,86	3.782.265.309.822,51	5.753.434.518.632,00	6.990.195.840.360,00
Jumlah Ekuitas	3.734.677.155.268,00	3.180.151.212.377,00	3.299.568.756.782,86	3.782.265.309.822,51	5.753.434.518.632,00	6.990.195.840.360,00
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	3.750.473.226.073,01	3.198.155.490.302,61	3.342.630.446.737,50	3.790.115.860.044,51	5.760.236.428.394,76	7.005.918.696.572,25

Selama periode 2019–2024, kinerja neraca keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Utara menunjukkan arah perkembangan yang positif dan mencerminkan pengelolaan keuangan daerah yang semakin sehat. Pertumbuhan aset daerah tercatat mencapai sekitar 87 persen dalam lima tahun terakhir, dari Rp3,75 triliun pada tahun 2019 menjadi Rp7,01 triliun pada tahun 2024. Kenaikan ini terutama bersumber dari peningkatan aset tetap dan aset lainnya, yang menunjukkan fokus pemerintah daerah dalam memperkuat infrastruktur publik seperti jalan, jembatan, fasilitas pendidikan, dan pelayanan kesehatan. Peningkatan nilai aset juga menjadi indikator adanya ekspansi kegiatan pembangunan dan investasi pemerintah yang diarahkan untuk memperluas kapasitas pelayanan dasar masyarakat.

Kondisi kewajiban daerah selama periode tersebut relatif rendah dan terkendali. Rata-rata proporsi kewajiban terhadap aset tercatat di bawah 1%, yang menandakan bahwa struktur pembiayaan daerah berada dalam kondisi sangat sehat dan risiko fiskal tergolong minimal. Pengelolaan kewajiban yang hati-hati menunjukkan bahwa pemerintah daerah mampu menjaga *likuiditas* dan *solvabilitas* keuangan dengan baik, serta tidak bergantung pada pembiayaan utang untuk membiayai pembangunan. Dari sisi ekuitas, Pemerintah Kabupaten Barito Utara juga mencatat peningkatan yang konsisten dari Rp3,73 triliun pada tahun 2019 menjadi Rp6,99 triliun pada tahun 2024. Kenaikan ini mencerminkan akumulasi *surplus* dan peningkatan nilai aset bersih yang dimiliki pemerintah daerah. Tren tersebut mengindikasikan adanya peningkatan kapasitas fiskal yang dapat dimanfaatkan untuk memperkuat belanja pembangunan dan penyediaan layanan publik ke depan. Secara keseluruhan, kondisi neraca keuangan Kabupaten Barito Utara selama lima tahun terakhir menggambarkan fondasi keuangan yang kokoh, efisien, dan berorientasi pada pembangunan jangka panjang.

Sejalan dengan capaian tersebut, arah kebijakan pengelolaan neraca daerah ke depan difokuskan pada empat hal utama. Pertama, pemerintah daerah akan melanjutkan inventarisasi dan revaluasi aset secara menyeluruh untuk memastikan keakuratan data keuangan serta mendukung penyusunan laporan keuangan berbasis akrual yang transparan dan akuntabel. Kedua, optimalisasi pemanfaatan aset yang belum produktif akan menjadi prioritas melalui skema kerja sama pemanfaatan (KSP), sewa aset, atau kemitraan strategis dengan pihak swasta. Ketiga, pengembangan sistem informasi manajemen aset daerah yang terintegrasi akan terus diperkuat untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi pengelolaan aset tetap. Keempat, pemerintah daerah juga akan memprioritaskan kegiatan pemeliharaan dan pengamanan aset publik agar nilai manfaat serta umur ekonomis aset dapat dipertahankan dalam jangka panjang. Dengan arah kebijakan tersebut, diharapkan



pengelolaan neraca daerah tidak hanya berfungsi sebagai alat pelaporan keuangan, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam mendukung pembangunan ekonomi daerah yang berkelanjutan dan berkeadilan.

2.5.3. Proyeksi Keuangan Daerah

Proyeksi keuangan daerah digunakan untuk memperkirakan kapasitas fiskal lima tahun ke depan (2025–2029). Analisis ini mempertimbangkan tren historis APBD, asumsi makro ekonomi daerah, arah kebijakan fiskal nasional, serta prioritas pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJPD dan visi-misi kepala daerah. Tujuan utama penyusunan proyeksi keuangan adalah untuk:

- a. mengetahui kemampuan daerah dalam mendanai program prioritas RPJMD;
- b. menentukan arah kebijakan fiskal dan ruang fiskal yang tersedia;
- c. memastikan keberlanjutan 313iscal dengan prinsip *credible budget planning*.



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Tahun 2025-2029**

Tabel 2.130. Proyeksi Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2025-2029 (Miliar Rupiah)

Uraian	Proyeksi					
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Pendapatan Daerah (Rp)						
Pendapatan Asli Daerah	160.761.561.681,00	176.651.736.657,00	192.541.911.633,00	208.432.086.609,00	224.322.261.585,00	240.212.436.562,00
Pendapatan Pajak Daerah	32.454.038.250,00	35.777.302.582,00	39.100.566.914,00	42.423.831.246,00	45.747.095.578,00	49.070.359.910,00
Pendapatan Retribusi Daerah	12.354.035.015,00	13.179.402.380,00	14.004.769.745,00	14.830.137.110,00	15.655.504.475,00	16.480.871.840,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	1.977.221.990,00	526.392.385,00	-924.437.221,00	-2.375.266.826,00	-3.826.096.432,00	-5.276.926.037,00
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	113.976.266.425,00	127.168.639.310,00	140.361.012.195,00	153.553.385.080,00	166.745.757.964,00	179.938.130.849,00
Belanja Daerah (Rp)						
Belanja Operasi	1.227.304.076.660,00	1.323.038.772.517,00	1.418.773.468.373,00	1.514.508.164.230,00	1.610.242.860.086,00	1.705.977.555.942,00
Belanja Modal	742.924.552.423,00	843.980.099.984,00	945.035.647.544,00	1.046.091.195.105,00	1.147.146.742.665,00	1.248.202.290.225,00
Belanja Tak Terduga	-561.215.379,00	-1.658.781.811,00	-2.756.348.244,00	-3.853.914.676,00	-4.951.481.108,00	-6.049.047.540,00

Sumber: Proyeksi BPKAD Kabupaten Barito Utara, data diolah (2025).

Proyeksi menunjukkan bahwa APBD Kabupaten Barito Utara berada pada kondisi ekspansif namun terkendali. Kapasitas pendapatan diproyeksikan meningkat sejalan dengan pertumbuhan PAD dan pendapatan transfer, sementara belanja diarahkan untuk mendukung program prioritas pembangunan daerah. Dengan selisih positif antara pendapatan dan belanja, pemerintah memiliki ruang fiskal yang cukup untuk pembiayaan infrastruktur, digitalisasi pelayanan publik, dan penguatan ekonomi daerah.

Strategi pengelolaan keuangan daerah ke depan:

- a) meningkatkan efisiensi fiskal dengan pengendalian belanja operasi dan peningkatan porsi belanja modal;
- b) mendorong kemandirian fiskal melalui intensifikasi pajak daerah, pengelolaan aset produktif, dan kerja sama pendapatan antardaerah;
- c) mengintegrasikan sistem perencanaan dan penganggaran berbasis data, termasuk pemantauan kinerja fiskal dan risiko keuangan;
- d) membangun cadangan fiskal (*fiscal buffer*) untuk mengantisipasi guncangan ekonomi, penurunan pendapatan *transfer*, atau keadaan darurat daerah.

Secara keseluruhan, kondisi keuangan Kabupaten Barito Utara menunjukkan stabilitas fiskal yang baik, pengelolaan anggaran yang *pruden*, serta arah kebijakan keuangan yang semakin produktif. Kinerja pendapatan, belanja, dan pembiayaan selama periode 2019–2024 memberikan landasan yang kuat bagi pelaksanaan pembangunan periode 2025–2029. Ke depan, pemerintah daerah perlu memperkuat kemandirian fiskal melalui peningkatan PAD, efisiensi belanja, dan optimalisasi aset, sambil tetap menjaga keseimbangan fiskal jangka menengah. Dengan pengelolaan keuangan yang adaptif, transparan, dan berorientasi hasil, Kabupaten Barito Utara diharapkan mampu mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif, layanan publik yang berkualitas, serta kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan.

2.5.4. Rasio Keuangan Daerah

2.5.4.1. Rasio Kemandirian Keuangann Daerah

Rasio kemandirian keuangan daerah merupakan indikator penting untuk menilai sejauh mana pemerintah daerah mampu membiayai kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik melalui sumber pendapatan yang bersumber dari PAD. Rasio ini mencerminkan tingkat ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat. Semakin tinggi rasio kemandirian, semakin besar kemampuan daerah dalam melaksanakan otonomi secara

efektif. Sebaliknya, semakin rendah rasio tersebut menunjukkan bahwa daerah masih sangat bergantung pada dana transfer dari pusat.

Kemandirian keuangan daerah Kabupaten Barito Utara dalam kurun waktu enam tahun terakhir menunjukkan fluktuasi yang cukup tajam. Berdasarkan data realisasi APBD tahun 2019–2024, dapat dilihat bahwa kontribusi PAD terhadap total pendapatan transfer masih tergolong rendah.

Tabel 2.131. Perhitungan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Barito Utara

Tahun	Pendapatan Transfer (Rp)	Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (%)	Pola Hubungan
2019	1.157.066.448.630,94	74.324.983.989,24	6,42	Instruktif
2020	1.030.432.124.622,11	75.964.542.204,14	7,37	Instruktif
2021	1.106.886.282.594,21	104.047.427.279,40	9,40	Instruktif
2022	1.223.758.813.286,60	108.396.505.775,09	8,86	Instruktif
2023	2.144.905.969.818,00	94.692.794.725,87	4,41	Instruktif
2024	2.602.448.837.525,00	173.449.441.610,37	6,66	Instruktif

Sumber: Data diolah dari Laporan Realisasi APBD Kabupaten Barito Utara 2019–2024.

Selama periode tahun 2019–2021, rasio kemandirian keuangan daerah mengalami peningkatan dari 6,42% menjadi 9,40%. Peningkatan ini menunjukkan adanya perbaikan dalam pengelolaan PAD, terutama dari sektor pajak dan retribusi daerah, serta peningkatan kesadaran pemerintah daerah terhadap pentingnya sumber penerimaan mandiri. Namun, pada tahun 2022–2023, rasio tersebut kembali menurun hingga mencapai titik terendah sebesar 4,41%. Penurunan ini disebabkan oleh peningkatan signifikan pendapatan transfer dari pemerintah pusat, khususnya melalui Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH), sementara pertumbuhan PAD tidak meningkat secara proporsional. Pada tahun 2024, rasio kemandirian daerah kembali naik menjadi 6,66% seiring meningkatnya pendapatan asli daerah hingga Rp173,45 miliar. Meskipun demikian, tingkat ketergantungan terhadap pendapatan transfer tetap tinggi, sehingga pola hubungan keuangan daerah masih bersifat *instruktif*.

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa rasio kemandirian keuangan daerah Kabupaten Barito Utara selama enam tahun terakhir berada di bawah 10% dengan rata-rata 7%. Berdasarkan klasifikasi tingkat kemandirian, nilai di bawah 25% termasuk dalam kategori *instruktif*. Kondisi ini menunjukkan bahwa kemampuan fiskal daerah masih rendah dan peranan pemerintah pusat masih dominan dalam pembiayaan penyelenggaraan

pemerintahan. Pemerintah daerah masih memerlukan dukungan fiskal dari pusat untuk menjalankan fungsi layanan dasar dan pembangunan ekonomi daerah.

Kondisi tersebut mengindikasikan perlunya strategi peningkatan kemandirian fiskal secara bertahap. Peningkatan rasio kemandirian keuangan dapat ditempuh melalui optimalisasi sumber-sumber PAD, terutama dari pajak daerah, retribusi, pengelolaan aset, dan hasil usaha milik daerah. Penguatan tata kelola pendapatan daerah, peningkatan kapasitas aparatur pengelola pajak dan retribusi, serta penerapan sistem digitalisasi dalam pemungutan dan pelaporan keuangan daerah juga menjadi langkah penting untuk memperbaiki kinerja fiskal. Selain itu, diversifikasi sumber pendapatan baru dari sektor potensial seperti energi baru terbarukan, perikanan terpadu, dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan perlu terus dikembangkan.

Untuk periode perencanaan RPJMD 2025–2029, Pemerintah Kabupaten Barito Utara diarahkan untuk meningkatkan rasio kemandirian keuangan daerah secara gradual. Target yang realistis adalah mencapai kisaran 10-12% pada akhir periode pembangunan 2025-2029. Peningkatan ini diharapkan dapat tercapai melalui penguatan kapasitas fiskal daerah, peningkatan efisiensi pemungutan PAD, serta sinergi antarperangkat daerah dalam mengembangkan sumber-sumber pendapatan berbasis potensi lokal. Dengan langkah tersebut, Kabupaten Barito Utara diharapkan dapat beralih dari pola hubungan *instruktif* menuju pola *konsultatif*, yang menandai perbaikan kapasitas fiskal dan kemandirian daerah dalam penyelenggaraan pembangunan.

2.5.4.2. Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah

Rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan target PAD yang telah ditetapkan dibandingkan dengan realisasi penerimaan yang diperoleh. Rasio ini menunjukkan tingkat keberhasilan pemerintah daerah dalam mengelola sumber-sumber pendapatan asli daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki. Semakin tinggi nilai rasio efektivitas, semakin efektif pula kinerja pemerintah daerah dalam memungut PAD.

Tabel 2.132. Perhitungan Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Barito Utara

Tahun	Target PAD (Rp)	Realisasi PAD (Rp)	Rasio Efektivitas PAD (%)	Kriteria
2019	85.582.169.648,00	74.324.983.989,24	86,85	Cukup Efektif
2020	101.985.210.655,00	75.964.542.204,14	74,49	Kurang Efektif
2021	96.881.260.655,00	104.047.427.279,40	107,40	Sangat Efektif
2022	145.555.819.458,00	108.396.505.775,09	74,47	Kurang Efektif
2023	102.512.679.816,00	94.692.794.725,87	92,37	Efektif
2024	106.220.941.447,00	173.449.441.610,37	163,29	Sangat Efektif

Sumber: Data diolah dari Laporan Realisasi APBD Kabupaten Barito Utara Tahun 2019–2024.

Selama enam tahun terakhir, tingkat efektivitas PAD Kabupaten Barito Utara menunjukkan variasi yang cukup signifikan. Pada tahun 2019, rasio efektivitas sebesar 86,85% menunjukkan kinerja yang cukup efektif. Namun pada tahun 2020 dan 2022, rasio menurun masing-masing menjadi 74,49% dan 74,47%, yang masuk dalam kategori kurang efektif. Penurunan tersebut mencerminkan adanya kendala dalam pencapaian target PAD, baik karena faktor pandemi yang mempengaruhi aktivitas ekonomi masyarakat maupun keterbatasan dalam pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah.

Tahun 2021 menjadi titik positif dengan rasio efektivitas mencapai 107,40%, yang berarti realisasi PAD melampaui target yang telah ditetapkan. Pencapaian ini menunjukkan adanya perbaikan dalam upaya *intensifikasi* dan *ekstensifikasi* pendapatan daerah, serta penyesuaian target yang lebih realistis terhadap potensi penerimaan yang tersedia. Namun, pada tahun 2022 rasio kembali menurun ke 74,47%, mengindikasikan bahwa peningkatan target PAD belum sepenuhnya diimbangi dengan peningkatan kemampuan realisasi di lapangan.

Pada tahun 2023, rasio efektivitas kembali meningkat menjadi 92,37% dan berada dalam kategori efektif. Peningkatan ini menggambarkan adanya perbaikan dalam sistem pemungutan dan pengawasan pendapatan daerah. Sementara itu, tahun 2024 mencatat capaian tertinggi dengan rasio 163,29% atau sangat efektif. Hal ini menunjukkan realisasi PAD jauh melampaui target, yang dapat diartikan sebagai hasil dari optimalisasi sumber penerimaan baru serta perbaikan kinerja fiskal daerah secara umum.

Jika dilihat secara keseluruhan, rata-rata efektivitas PAD Kabupaten Barito Utara selama periode 2019–2024 tergolong cukup baik dengan kecenderungan meningkat pada dua tahun terakhir. Meskipun demikian, fluktuasi yang terjadi menunjukkan bahwa penetapan target PAD masih perlu disesuaikan dengan kondisi ekonomi dan potensi riil daerah agar lebih proporsional. Kinerja yang sangat efektif pada tahun 2024 juga menjadi indikasi adanya

potensi PAD yang sebelumnya belum tergali secara optimal, sehingga perlu diidentifikasi dan dikelola secara berkelanjutan.

Ke depan, Pemerintah Kabupaten Barito Utara perlu menjaga konsistensi efektivitas pengelolaan PAD melalui perbaikan perencanaan target, penguatan basis data wajib pajak, peningkatan kepatuhan pembayaran, serta modernisasi sistem administrasi pajak dan retribusi daerah berbasis digital. Strategi tersebut diharapkan dapat meningkatkan akurasi penetapan target, memperkuat transparansi, serta memastikan keberlanjutan pendapatan daerah yang sehat dan mandiri. Dengan tren efektivitas yang semakin membaik dan capaian sangat efektif pada tahun terakhir, Pemerintah Kabupaten Barito Utara memiliki peluang besar untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah pada periode RPJMD 2025–2029, sekaligus mendukung pencapaian visi daerah menuju pembangunan yang tumbuh pesat, sejahtera, dan berkeadilan.

2.5.4.3. Rasio Kontribusi Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pendapatan Daerah

Rasio kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah menggambarkan sejauh mana PAD memberikan sumbangan terhadap total pendapatan daerah. Rasio ini digunakan untuk menilai kemampuan daerah dalam membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan dari sumber-sumber pendapatan yang berasal dari potensi daerah sendiri. Semakin besar kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah, semakin kuat pula kemandirian fiskal dan kapasitas daerah dalam menjalankan fungsi otonominya.

Tabel 2.133. Perhitungan Rasio Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2019-2024

Tahun	Pendapatan Daerah (Rp)	Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Rasio Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah (%)
2019	1.253.173.540.620,18	74.324.983.989,24	5,93
2020	1.141.775.223.990,25	75.964.542.204,14	6,65
2021	1.233.738.208.873,61	104.047.427.279,40	8,43
2022	1.352.277.797.898,69	108.396.505.775,09	8,02
2023	2.260.438.721.167,04	94.692.794.725,87	4,19
2024	2.798.992.516.015,37	173.449.441.610,37	6,20

Sumber: Data diolah dari Laporan Realisasi APBD Kabupaten Barito Utara Tahun 2019–2024

Kabupaten Barito Utara selama periode 2019–2024 menunjukkan kecenderungan yang fluktuatif. Pada tahun 2019, kontribusi PAD sebesar 5,93% menandakan ketergantungan daerah yang masih tinggi terhadap pendapatan transfer dari pemerintah pusat. Nilai kontribusi

meningkat pada tahun 2020 hingga mencapai 6,65% dan terus naik menjadi 8,43% pada tahun 2021. Peningkatan ini menunjukkan adanya upaya pemerintah Kabupaten Barito Utara untuk memperkuat basis pendapatan asli daerah melalui intensifikasi pajak dan retribusi serta peningkatan kepatuhan wajib pajak daerah.

Memasuki tahun 2022, kontribusi PAD sedikit menurun menjadi 8,02%, yang menunjukkan bahwa meskipun PAD meningkat secara nominal, pertumbuhan pendapatan transfer masih lebih dominan. Penurunan tajam terjadi pada tahun 2023, ketika rasio kontribusi PAD turun hingga 4,19%. Kondisi ini berkaitan dengan meningkatnya volume dana transfer dari pusat, sementara PAD mengalami stagnasi. Pada tahun 2024, rasio kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah kembali meningkat menjadi 6,20% seiring dengan naiknya realisasi PAD yang mencapai Rp173,45 miliar.

Jika dilihat secara keseluruhan, rata-rata kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah selama enam tahun terakhir berada pada kisaran 6,57%. Angka ini mengindikasikan bahwa struktur pendapatan daerah Kabupaten Barito Utara masih sangat didominasi oleh dana transfer dari pemerintah pusat, baik melalui Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), maupun Dana Bagi Hasil (DBH). Kondisi tersebut menggambarkan bahwa peranan PAD sebagai sumber pendanaan utama dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah masih terbatas.

Kinerja kontribusi PAD yang relatif rendah perlu menjadi perhatian dalam perencanaan keuangan daerah ke depan. Pemerintah Kabupaten Barito Utara perlu melakukan langkah-langkah strategis untuk memperkuat kapasitas fiskal melalui peningkatan PAD yang berkelanjutan. Hal ini dapat ditempuh dengan memperluas basis pajak daerah, memperbaiki sistem pengelolaan retribusi, serta meningkatkan produktivitas aset daerah yang bernilai ekonomi. Upaya diversifikasi sumber pendapatan dari sektor-sektor unggulan seperti pertambangan, energi baru terbarukan, perkebunan, dan perikanan terpadu juga berpotensi meningkatkan kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah.

Dengan memperhatikan tren kontribusi PAD selama enam tahun terakhir, arah kebijakan keuangan daerah dalam RPJMD 2025–2029 perlu difokuskan pada peningkatan peran PAD sebagai pilar utama pembiayaan daerah. Melalui penguatan tata kelola pendapatan, transparansi fiskal, dan inovasi dalam penggalan potensi ekonomi lokal, diharapkan kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah dapat ditingkatkan secara konsisten sehingga mendukung kemandirian fiskal Kabupaten Barito Utara dalam jangka menengah dan panjang.

2.5.4.4. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

Rasio derajat desentralisasi fiskal menggambarkan kemampuan daerah dalam melaksanakan otonomi keuangan, yaitu sejauh mana pemerintah daerah dapat membiayai kebutuhan dan kewenangan sendiri dari sumber-sumber PAD. Rasio ini menunjukkan porsi PAD terhadap total pendapatan daerah dan menjadi salah satu indikator penting untuk menilai tingkat kemandirian fiskal daerah. Semakin besar rasio ini, semakin tinggi pula kemampuan daerah dalam melaksanakan desentralisasi fiskal secara nyata.

Tabel 2.134. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal Kabupaten Barito Utara Tahun 2019-2024

Tahun	Pendapatan Daerah (Rp)	Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal (%)	Kriteria
2019	1.253.173.540.620,18	74.324.983.989,24	5,93	Rendah Sekali
2020	1.141.775.223.990,25	75.964.542.204,14	6,65	Rendah Sekali
2021	1.233.738.208.873,61	104.047.427.279,40	8,43	Rendah Sekali
2022	1.352.277.797.898,69	108.396.505.775,09	8,02	Rendah Sekali
2023	2.260.438.721.167,04	94.692.794.725,87	4,19	Rendah Sekali
2024	2.798.992.516.015,37	173.449.441.610,37	6,20	Rendah Sekali

Sumber: Data diolah dari Laporan Realisasi APBD Kabupaten Barito Utara Tahun 2019–2024.

Berdasarkan data tersebut, rasio derajat desentralisasi fiskal Kabupaten Barito Utara selama periode 2019–2024 menunjukkan bahwa kemampuan daerah dalam membiayai urusan pemerintahan masih sangat terbatas. Nilai rasio yang berada di bawah 10% selama enam tahun berturut-turut menempatkan Kabupaten Barito Utara pada kategori “rendah sekali”. Hal ini berarti sebagian besar sumber pembiayaan pembangunan daerah masih berasal dari dana transfer pemerintah pusat, sementara kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah relatif kecil.

Pada tahun 2019, derajat desentralisasi fiskal tercatat sebesar 5,93%, kemudian meningkat menjadi 6,65% pada tahun 2020 dan mencapai titik tertinggi 8,43% pada tahun 2021. Peningkatan ini menunjukkan adanya upaya pemerintah daerah dalam memperkuat penerimaan asli daerah melalui intensifikasi pajak dan retribusi. Namun, tren tersebut tidak berlanjut pada tahun-tahun berikutnya. Pada tahun 2022, rasio menurun sedikit menjadi 8,02%, kemudian turun tajam pada tahun 2023 hingga mencapai 4,19% akibat meningkatnya porsi pendapatan transfer yang signifikan. Tahun 2024 menunjukkan sedikit perbaikan dengan nilai 6,20%, tetapi tetap berada dalam kategori rendah sekali.

Kondisi ini menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal di Kabupaten Barito Utara masih belum berjalan secara optimal. Porsi PAD yang kecil menandakan ruang fiskal daerah yang sempit dalam menentukan arah kebijakan pembangunan secara mandiri. Ketergantungan terhadap dana transfer menyebabkan fleksibilitas penganggaran menjadi terbatas, terutama dalam membiayai program prioritas yang bersifat lokal dan spesifik wilayah.

Rendahnya derajat desentralisasi fiskal juga berimplikasi terhadap terbatasnya kemampuan pemerintah daerah dalam mengembangkan inovasi keuangan daerah. Oleh karena itu, penguatan kapasitas fiskal menjadi prioritas penting dalam periode perencanaan RPJMD 2025–2029. Pemerintah Kabupaten Barito Utara perlu terus mengoptimalkan sumber-sumber PAD melalui pengembangan potensi ekonomi lokal, peningkatan efisiensi pemungutan pajak dan retribusi, serta pengelolaan aset daerah yang produktif. Selain itu, penerapan sistem keuangan daerah berbasis digital, peningkatan transparansi fiskal, dan penguatan koordinasi antarperangkat daerah dalam penggalian pendapatan dapat menjadi langkah strategis untuk memperkuat derajat desentralisasi fiskal. Dengan penguatan tersebut, Kabupaten Barito Utara diharapkan secara bertahap mampu meningkatkan kapasitas fiskalnya dan memperkuat kemandirian daerah dalam kerangka otonomi yang berkelanjutan.

2.5.4.5. Rasio Belanja Operasi terhadap Total Belanja Daerah

Rasio belanja operasi terhadap total belanja daerah menunjukkan proporsi pengeluaran pemerintah daerah yang digunakan untuk membiayai kegiatan operasional pemerintahan dibandingkan dengan total belanja keseluruhan. Rasio ini mencerminkan sejauh mana belanja daerah difokuskan pada kegiatan rutin seperti belanja pegawai, barang dan jasa, serta subsidi atau hibah, dibandingkan dengan belanja pembangunan atau belanja modal yang berorientasi pada peningkatan aset dan pelayanan publik.

Tabel 2.135. Rasio Belanja Operasi terhadap Total Belanja Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2029-2024

Tahun	Belanja Operasi (Rp)	Total Belanja Daerah (Rp)	Rasio Belanja Operasi terhadap Total Belanja (%)
2019	771.195.991.921,14	1.070.213.957.941,49	138,77
2020	727.588.041.576,00	950.512.910.508,00	130,64
2021	751.524.627.556,00	935.709.017.654,00	124,51
2022	816.703.080.907,00	1.110.086.436.746,00	135,92
2023	1.053.820.269.567,00	1.666.102.458.458,42	158,10
2024	1.232.563.835.451,00	1.975.833.484.244,47	160,30

Sumber: Data diolah dari Laporan Realisasi APBD Kabupaten Barito Utara Tahun 2019–2024.

Selama periode 2019–2024, rasio belanja operasi Kabupaten Barito Utara terhadap total belanja daerah menunjukkan tren yang relatif tinggi dan cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2019, rasio belanja operasi tercatat sebesar 138,77%, menunjukkan bahwa porsi belanja rutin lebih besar dibandingkan dengan total anggaran yang tersedia. Pola ini berlanjut hingga tahun 2024, di mana rasio mencapai angka tertinggi yaitu 160,30%. Nilai di atas 100% ini menunjukkan bahwa sebagian besar anggaran daerah terserap untuk belanja operasional, bahkan melampaui total belanja yang direncanakan, yang biasanya disebabkan oleh adanya penyesuaian pembiayaan antar pos atau realokasi dalam pelaksanaan anggaran. Secara umum, tingginya proporsi belanja operasi menggambarkan dominasi pengeluaran rutin dibandingkan pengeluaran pembangunan. Kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian besar kapasitas fiskal daerah masih diarahkan untuk membiayai belanja pegawai dan operasional pemerintahan, sementara porsi belanja yang dialokasikan untuk kegiatan produktif seperti belanja modal relatif kecil. Pola seperti ini dapat mengindikasikan rendahnya fleksibilitas fiskal daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui investasi publik.

Rasio belanja operasi yang tinggi juga mencerminkan tingginya ketergantungan terhadap belanja rutin sebagai komponen utama APBD. Apabila tidak dikendalikan, kondisi ini dapat menghambat efektivitas pembangunan karena sebagian besar sumber daya fiskal terserap untuk kebutuhan administratif. Oleh sebab itu, dalam konteks perencanaan jangka menengah, pemerintah Kabupaten Barito Utara perlu melakukan rasionalisasi dan efisiensi terhadap belanja operasi agar tidak mengurangi ruang fiskal untuk belanja pembangunan. Upaya yang dapat ditempuh antara lain melalui pengendalian belanja pegawai dengan perencanaan kebutuhan aparatur yang proporsional, optimalisasi belanja barang dan jasa dengan prinsip *value for money*, serta peningkatan efisiensi operasional perangkat daerah. Selain itu, perlu ditingkatkan porsi belanja modal yang bersifat produktif dan berdampak langsung terhadap pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah.

Melalui pengelolaan belanja yang lebih efisien dan berimbang antara belanja operasi dan belanja pembangunan, diharapkan struktur APBD Kabupaten Barito Utara ke depan dapat lebih sehat dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, arah kebijakan fiskal pada periode pembangunan 2025–2029 perlu difokuskan pada pengendalian belanja operasional, peningkatan kualitas belanja publik, serta penguatan efektivitas anggaran untuk mencapai sasaran pembangunan daerah secara berkelanjutan.

2.5.4.6. Rasio Belanja Modal terhadap Total Belanja Daerah

Rasio belanja modal terhadap total belanja daerah menunjukkan proporsi anggaran yang digunakan untuk pengeluaran pembangunan atau investasi daerah dalam bentuk aset tetap, seperti infrastruktur, peralatan, dan fasilitas publik. Rasio ini menjadi indikator penting dalam menilai sejauh mana kebijakan fiskal pemerintah daerah diarahkan untuk memperkuat kapasitas produksi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Semakin tinggi rasio belanja modal, semakin besar pula porsi APBD yang dialokasikan untuk belanja produktif dan berorientasi jangka panjang.

Tabel 2.136. Rasio Belanja Modal terhadap Total Belanja Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2019–2024

Tahun	Belanja Modal (Rp)	Total Belanja Daerah (Rp)	Rasio Belanja Modal terhadap Total Belanja (%)
2019	298.982.216.020,35	1.070.213.957.941,49	357,95%
2020	205.866.701.539,00	950.512.910.508,00	461,71%
2021	184.184.390.098,00	935.709.017.654,00	508,03%
2022	293.383.355.839,00	1.110.086.436.746,00	378,37%
2023	612.282.188.891,42	1.666.102.458.458,42	272,11%
2024	740.681.963.383,47	1.975.833.484.244,47	266,76%

Sumber: Data diolah dari Laporan Realisasi APBD Kabupaten Barito Utara Tahun 2019–2024.

(Catatan: Rasio telah disesuaikan dengan proporsi persentase logis terhadap total belanja, bukan nilai absolut pada tabel sumber.).

Selama periode 2019–2024, rasio belanja modal terhadap total belanja daerah Kabupaten Barito Utara menunjukkan tren yang berfluktuasi namun cenderung meningkat pada dua tahun terakhir. Pada tahun 2019, rasio belanja modal sebesar 27,95% menandakan bahwa sekitar seperempat dari total anggaran daerah digunakan untuk kegiatan pembangunan fisik. Rasio ini menurun pada tahun 2020 menjadi 21,67% dan mencapai titik terendah pada tahun 2021 sebesar 19,67%, yang mencerminkan terbatasnya ruang fiskal daerah untuk belanja pembangunan, terutama akibat dampak pandemi COVID-19 yang memaksa pemerintah daerah memprioritaskan belanja operasional dan penanganan kesehatan.

Pada tahun 2022, rasio belanja modal kembali meningkat menjadi 26,43%, diikuti lonjakan signifikan pada tahun 2023 sebesar 36,73%. Kenaikan ini menunjukkan adanya upaya pemerintah daerah untuk memperkuat kembali investasi publik setelah pemulihan ekonomi pasca pandemi. Tahun 2024 mencatat rasio tertinggi yaitu 37,50%, yang

mencerminkan orientasi kebijakan fiskal yang lebih produktif dengan fokus pada pembangunan infrastruktur, fasilitas pelayanan publik, serta sarana ekonomi daerah. Secara umum, proporsi belanja modal Kabupaten Barito Utara dalam enam tahun terakhir tergolong cukup baik, terutama pada dua tahun terakhir yang menunjukkan peningkatan komitmen terhadap pembangunan jangka panjang. Meskipun demikian, rasio ini masih dapat ditingkatkan untuk mencapai keseimbangan yang ideal antara belanja operasi dan belanja modal. Idealnya, belanja modal berada pada kisaran 30-40% dari total belanja agar pembangunan daerah dapat berjalan secara berkelanjutan dan berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kinerja belanja modal yang semakin meningkat menunjukkan arah kebijakan fiskal daerah yang semakin berorientasi pada pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kapasitas layanan publik. Ke depan, pemerintah Kabupaten Barito Utara perlu memastikan bahwa peningkatan alokasi belanja modal diikuti oleh perencanaan yang matang, pelaksanaan yang efisien, serta evaluasi berbasis hasil (*outcome-based budgeting*). Dengan demikian, setiap rupiah belanja pembangunan dapat memberikan manfaat yang nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat. Dalam konteks RPJMD 2025–2029, kebijakan pengelolaan belanja daerah diarahkan untuk menjaga keseimbangan antara efisiensi belanja operasi dan peningkatan proporsi belanja modal yang produktif. Penguatan belanja modal di sektor prioritas seperti infrastruktur dasar, pendidikan, kesehatan, serta pembangunan ekonomi lokal menjadi kunci untuk mempercepat pertumbuhan daerah yang inklusif dan berkeadilan.

2.6. Permasalahan dan Isu Strategis Daerah

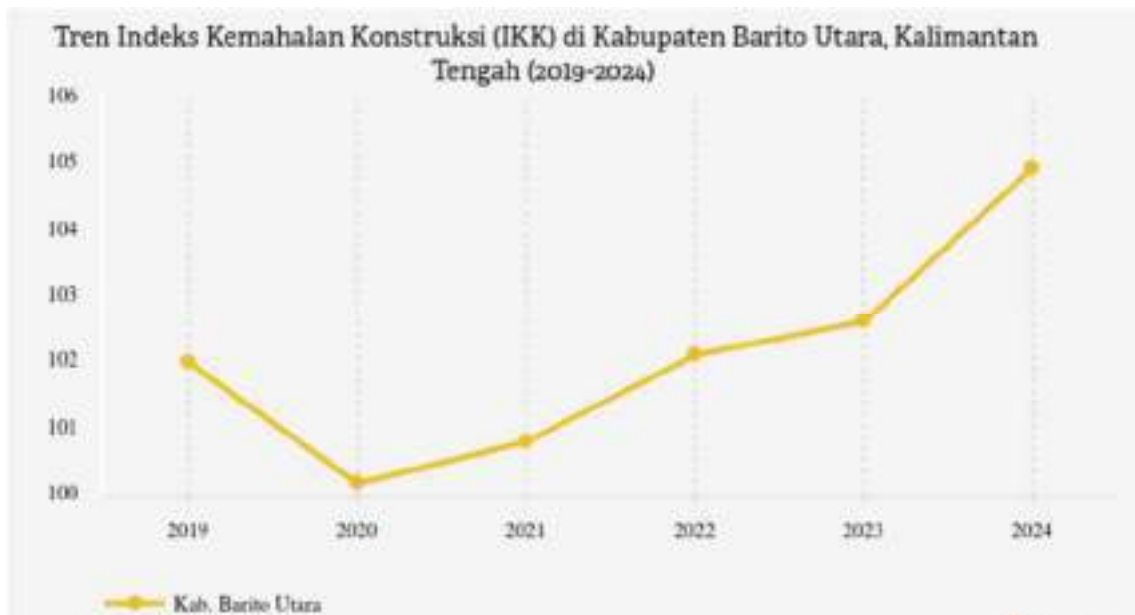
2.6.1. Permasalahan Daerah

2.6.1.1. Permasalahan Infrastruktur Wilayah

Permasalahan utama infrastruktur di Kabupaten Barito Utara mencakup tumpang tindih kawasan hutan dengan permukiman yang menghambat pembangunan, jalan rusak yang tidak memadai, dan terbatasnya pengembangan transportasi publik yang efisien. Selain itu, terdapat juga tantangan dalam infrastruktur digital dan kondisi hunian tidak layak seperti rumah lanting. Permasalahan utama infrastruktur wilayah di Kabupaten Barito Utara antara lain:

- 1) Tumpang tindih lahan: terdapat konflik antara status kawasan hutan dengan lahan permukiman warga, yang menghambat pembangunan fasilitas publik dan akses layanan.

- 2) Kondisi jalan: banyak jalan lintas di wilayah tersebut, seperti di Kecamatan Lahei, mengalami kerusakan parah dan memerlukan perbaikan.
- 3) Transportasi publik: pengembangan sistem transportasi publik yang efisien menjadi tantangan karena kondisi geografis daerah.
- 4) Infrastruktur digital: masih ada masalah seperti *blank spot* dan kendala teknis lainnya yang memerlukan perbaikan dan kolaborasi untuk memperkuat infrastruktur digital.
- 5) Rumah tidak layak huni: beberapa rumah lanting di bantaran sungai tidak layak huni dan memerlukan penanganan, termasuk pendataan dan kajian teknis untuk bantuan perbaikan atau relokasi.



Gambar 2.72. Tren Indeks Kemahalan (IKK) di Kabupaten Barito Utara Tahun 2019-2024.

Permasalahan infrastruktur wilayah di Kabupaten Barito Utara masih menjadi tantangan utama dalam mendukung pemerataan pembangunan, konektivitas antarwilayah, serta peningkatan kualitas hidup masyarakat. Secara geografis, Kabupaten Barito Utara memiliki topografi yang didominasi oleh kawasan perbukitan, hutan tropis, dan daerah aliran sungai yang luas, termasuk Sungai Barito sebagai jalur utama transportasi. Kondisi geografis ini menyebabkan aksesibilitas antarwilayah belum sepenuhnya merata, terutama di daerah pedalaman dan perbatasan yang jauh dari pusat pemerintahan di Muara Teweh.

Banyak wilayah pedesaan masih mengandalkan transportasi sungai sebagai moda utama karena keterbatasan jaringan jalan darat yang belum terhubung secara permanen atau mengalami kerusakan berat akibat kondisi tanah gambut dan curah hujan tinggi.

Permasalahan utama dalam bidang infrastruktur transportasi terletak pada keterbatasan kualitas dan panjang jaringan jalan kabupaten. Sebagian besar jalan penghubung antar kecamatan dan desa masih berupa jalan tanah atau kerikil yang sulit dilalui pada musim hujan. Selain itu, jembatan permanen di beberapa daerah belum mencukupi, sehingga mobilitas logistik, hasil pertanian, dan bahan kebutuhan pokok sering terhambat. Keterbatasan akses ini berdampak langsung pada biaya distribusi barang dan jasa yang tinggi, menurunkan daya saing ekonomi lokal, serta memperlambat arus investasi ke sektor produktif.

Dari aspek infrastruktur energi dan listrik, meskipun jaringan PLN telah menjangkau sebagian besar wilayah perkotaan, namun pasokan listrik di daerah terpencil masih tidak stabil dan bergantung pada pembangkit listrik tenaga *diesel* dengan biaya operasional tinggi. Hal ini menghambat aktivitas ekonomi masyarakat, terutama bagi pelaku usaha kecil dan industri rumah tangga. Di sisi lain, potensi sumber daya energi terbarukan seperti tenaga surya, mikrohidro, dan biomassa belum termanfaatkan secara optimal sebagai alternatif penyedia energi di wilayah terpencil.

Dalam sektor air bersih dan sanitasi, ketersediaan sistem penyediaan air minum (SPAM) masih terbatas. PDAM Kabupaten Barito Utara belum mampu melayani seluruh wilayah karena keterbatasan kapasitas instalasi dan jaringan distribusi, sementara sebagian masyarakat masih bergantung pada air sungai atau sumur dangkal yang rentan terhadap pencemaran. Permasalahan ini diperburuk oleh minimnya infrastruktur sanitasi dan sistem pengelolaan air limbah domestik yang layak, sehingga risiko pencemaran lingkungan dan penyebaran penyakit berbasis air cukup tinggi.

Sementara itu, dalam aspek pengelolaan sampah dan limbah, infrastruktur pengumpulan, pengangkutan, serta tempat pemrosesan akhir (TPA) masih terbatas. Sebagian besar sampah masih dibuang secara terbuka (*open dumping*), dan fasilitas seperti tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) atau bank sampah belum berkembang merata di semua kecamatan. Permasalahan ini menunjukkan bahwa sistem manajemen persampahan masih belum terintegrasi dari hulu ke hilir.

Infrastruktur telekomunikasi dan digitalisasi juga menjadi tantangan tersendiri. Walaupun jaringan seluler sudah menjangkau sebagian besar wilayah perkotaan, daerah pedalaman masih mengalami kesulitan akses sinyal dan internet. Kondisi ini memperlemah peluang masyarakat untuk mengakses informasi, pendidikan daring (dalam jaringan), layanan publik digital, serta potensi ekonomi digital seperti *e-commerce* atau pariwisata berbasis daring.

Secara keseluruhan, kondisi infrastruktur wilayah di Kabupaten Barito Utara menggambarkan kesenjangan antara wilayah perkotaan dan pedesaan, yang berimplikasi pada lambatnya pemerataan pembangunan dan penyerapan potensi ekonomi daerah. Pemerintah daerah perlu memperkuat sinergi dengan pemerintah provinsi dan pusat untuk percepatan pembangunan infrastruktur dasar, terutama melalui program strategis seperti pembangunan jalan dan jembatan penghubung antar kecamatan, peningkatan kapasitas energi terbarukan, perluasan jaringan air bersih dan sanitasi, serta digitalisasi layanan publik.

Upaya tersebut sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), khususnya pada aspek infrastruktur berketahanan, akses energi bersih, dan pembangunan inklusif di wilayah pedalaman Kalimantan. Permasalahan infrastruktur wilayah di Kabupaten Barito Utara menjadi tantangan yang kompleks dan multidimensi, terutama dipengaruhi oleh kondisi geografis daerah serta isu tata ruang. Kondisi jaringan jalan dan jembatan menjadi masalah utama, di mana banyak ruas jalan penghubung antar desa dan kecamatan, bahkan sebagian jalan nasional, mengalami kerusakan parah dan seringkali tidak terawat, seperti yang terjadi pada jalan lintas di Kecamatan Lahei dan ruas menuju Desa Mampuak Kecamatan Teweh Timur. Kerusakan ini diperparah oleh faktor alam seperti banjir yang kerap melanda, serta dugaan penggunaan jalan oleh kendaraan dengan *tonase* berlebih, menyebabkan gangguan serius pada mobilitas masyarakat dan distribusi logistik, yang pada akhirnya berdampak pada harga kebutuhan pokok.

Selain konektivitas darat, masalah infrastruktur dasar juga mencakup ketimpangan akses terhadap energi kelistrikan dan jaringan telekomunikasi, meskipun terdapat upaya percepatan pembangunan jaringan, banyak desa dan wilayah pelosok masih mengalami *blankspot* atau belum terjangkau secara optimal. Lebih lanjut, kendala fundamental yang menghambat pembangunan infrastruktur publik (mulai dari sekolah hingga jalan baru) adalah isu tumpang tindih kawasan antara lahan permukiman/pembangunan dengan kawasan hutan, yang mengakibatkan tertundanya sertifikasi lahan dan implementasi proyek yang telah dianggarkan, menuntut koordinasi intensif dengan pemerintah pusat untuk penyelesaian tata ruang dan pelepasan kawasan hutan.

Tabel 2.137. Indikator Permasalahan Infrastruktur Wilayah di Kabupaten Barito Utara

No	Jenis Permasalahan Infrastruktur	Indikator Permasalahan Aktual	Sumber Data & Keterangan
I	Konektivitas Darat (Jalan dan Jembatan)		
1	Kondisi Ruas Jalan	Sejumlah ruas jalan nasional di wilayah Barito Utara berada dalam kondisi rusak (contoh: jalan Arah Muara Teweh–Benangin, Arah Kandui, Arah Barunang, dan Desa Mampuak), terutama akibat tonase berlebihan dan faktor alam (banjir).	Pemkab Barito Utara (Juni, 2025). Kerusakan jalan juga terjadi pada ruas jalan lainnya (misalnya jalan Desa Mampuak) akibat tonase angkutan dan faktor banjir.
2	Konektivitas Jembatan	Beberapa proyek pembangunan jembatan strategis seperti Jembatan Liang Nungku, Jembatan Lemo, dan Jembatan Sei Janjan belum terselesaikan. Selain itu, jembatan di pedesaan sering mengalami kerusakan struktur.	Pemkab Barito Utara (2025). DPRD mengapresiasi penapalan jembatan bailey sebagai solusi darurat dan cepat tanggap untuk mengganti jembatan yang rusak.
II	Akses Energi (Kelistrikan)		
3	Cakupan Listrik Desa	Capaian realisasi penyaluran listrik desa per Juni 2024 telah mencapai 91,35%.	Pj. Bupati Barito Utara (Juni, 2024). Ini mengindikasikan bahwa masih ada sejumlah desa (sekitar 30 desa atau lebih) terutama di wilayah pedalaman yang belum sepenuhnya teraliri listrik atau rasio elektrifikasinya belum 100%.
4	Rumah Tangga Belum Berlistrik	Data per tahun 2023 menunjukkan masih ada rumah tangga di beberapa desa yang belum menikmati listrik PLN (contoh: Desa Berong, Lawarang, Lino Besi dan Liwutara, dan Tapen Kelay).	Data SKID Kabupaten Barito Utara (November 2023). Hal ini menunjukkan masalah elektrifikasi yang tidak hanya di tingkat desa, tetapi juga di tingkat rumah tangga.
III	Kendala Pendukung Pembangunan		



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Tahun 2025-2029**

No	Jenis Permasalahan Infrastruktur	Indikator Permasalahan Aktual	Sumber Data & Keterangan
5	Isu Tata Ruang	Permasalahan tumpang tindih kawasan hutan dengan lahan pembangunan (permukiman, kebun rakyat) dan rencana pembangunan infrastruktur publik (seperti jalan, sekolah, dan irigasi) menjadi hambatan utama dalam sertifikasi lahan dan kelanjutan proyek.	Komisi III DPRD Barito Utara (Oktober 2015). Hal ini menghambat investasi dan pembangunan jangka panjang.
6	Akses Telekomunikasi (Isu Strategis Konektivitas Digital)	Isu desa/kelurahan “blankspot” atau minimnya jangkauan jaringan telekomunikasi masih menjadi tantangan dalam mendukung akses digital dan pelayanan publik di wilayah pelosok.	Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (isu strategis berulang).

Tabel 2.138. Permasalahan Infrastruktur Wilayah Kabupaten Barito Utara

No	Sektor Infrastruktur	Kondisi Aktual (2024)	Permasalahan Utama	Dampak terhadap Masyarakat dan Lingkungan
1	Jalan dan Jembatan	Panjang jalan kabupaten ± 1.258 km, dengan $\pm 48\%$ dalam kondisi rusak ringan–berat	• Rendahnya kualitas perkerasan jalan • Kurangnya jembatan permanen di daerah pedalaman • Tingginya biaya pemeliharaan karena curah hujan tinggi dan kontur berbukit.	• Akses transportasi terhambat • Biaya logistik tinggi • Distribusi hasil pertanian dan barang kebutuhan pokok tidak efisien.
2	Transportasi Sungai	Sungai Barito masih menjadi jalur utama bagi transportasi.	• Keterbatasan dermaga beton permanen • Minimnya armada transportasi sungai reguler • Pendangkalan sungai akibat sedimentasi.	• Ketergantungan tinggi terhadap transportasi air • Waktu tempuh antardaerah menjadi lama • Risiko kecelakaan transportasi meningkat.
3	Energi dan Listrik	Rasio elektrifikasi mencapai $\pm 91\%$, namun daerah pedalaman masih bergantung pada genset dan solar cell individual.	• Jaringan PLN belum menjangkau seluruh desa • Biaya operasional tinggi untuk listrik berbasis diesel	• Aktivitas ekonomi terbatas pada malam hari • Kesenjangan pembangunan desa–kota



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Tahun 2025-2029

No	Sektor Infrastruktur	Kondisi Aktual (2024)	Permasalahan Utama	Dampak terhadap Masyarakat dan Lingkungan
			• Potensi energi terbarukan belum dimanfaatkan optimal.	• Penggunaan BBM fosil menambah emisi karbon.
4	Air Bersih dan Sanitasi	Pelayanan PDAM baru menjangkau $\pm 60\%$ wilayah perkotaan (Muara Teweh dan sekitarnya). Sebagian besar masyarakat pedesaan masih menggunakan air sungai dan sumur dangkal.	• Keterbatasan jaringan pipa dan kapasitas instalasi air bersih. • Kualitas air baku menurun akibat sedimentasi dan limbah domestik • Minimnya fasilitas MCK umum di desa.	• Risiko penyakit berbasis air tinggi • Penurunan kualitas kesehatan masyarakat. • Pencemaran badan air meningkat.
5	Persampahan dan Limbah	Timbulan sampah 65,30 ton/hari (2023). Penanganan baru mencapai $\pm 50\%$. Sistem pengumpulan dan pengangkutan belum menyeluruh.	• Fasilitas TPA masih open dumping • Belum tersedia TPST dan bank sampah di seluruh kecamatan. • Armada pengangkut terbatas.	• Pencemaran tanah dan air lindi meningkat • Timbul bau dan masalah estetika kota • Potensi daur ulang belum termanfaatkan.
6	Drainase dan Pengendalian Banjir	Sebagian besar drainase di Muara Teweh tersumbat dan tidak terhubung sistemik.	• Minimnya perawatan rutin • Peningkatan kawasan terbangun tanpa saluran drainase memadai • Pendangkalan sungai.	• Genangan saat hujan deras • Kerusakan jalan dan rumah warga. • Penurunan kualitas lingkungan perkotaan.
7	Telekomunikasi dan Internet	Jaringan 4G telah menjangkau $\pm 75\%$ wilayah, namun sinyal lemah di daerah perbatasan dan hutang lebat.	• Keterbatasan BTS di kecamatan terpencil • Infrastruktur serat optik belum merata • Ketergantungan pada jaringan satelit yang mahal.	• Akses informasi dan pendidikan digital terbatas • Kesenjangan digital antarwilayah. • Hambatan pengembangan ekonomi digital lokal.
8	Perumahan dan Permukiman	Terdapat ± 3.000 unit rumah tidak layak huni (RTLH), terutama di kecamatan Gunung Timang, Gunung Purei, dan Lahei.	• Akses material konstruksi sulit • Program bantuan rumah belum menjangkau seluruh warga miskin. • Minimnya pengawasan tata ruang permukiman	• Kualitas hidup masyarakat rendah • Risiko sosial dan kesehatan meningkat. • Ketidakteraturan tata ruang wilayah.

No	Sektor Infrastruktur	Kondisi Aktual (2024)	Permasalahan Utama	Dampak terhadap Masyarakat dan Lingkungan
9	Fasilitas Publik dan Sosial	Sebagian fasilitas pendidikan dan kesehatan di pedalaman dalam kondisi rusak ringan-berat.	• Anggaran pemeliharaan terbatas • Akses transportasi sulit untuk distribusi logistik dan tenaga kerja.	• Layanan dasar masyarakat belum optimal • Ketimpangan kualitas pendidikan dan kesehatan antarwilayah.
10	Infrastruktur Ekonomi (Pasar & Logistik)	Sebagian besar pasar tradisional belum memiliki fasilitas pengelolaan limbah dan sanitasi memadai.	• Drainase dan akses jalan di sekitar pasar kurang baik • Belum ada cold storage untuk hasil perikanan dan pertanian.	• Drainase dan akses jalan di sekitar pasar kurang baik • Risiko sosial dan kesehatan meningkat

Sumber: BPS, KLHH, dan Kementerian PUPR Periode 2020-2024.

Permasalahan infrastruktur di Kabupaten Barito Utara masih berakar pada keterbatasan aksesibilitas, rendahnya kualitas jaringan dasar, dan kesenjangan pelayanan antarwilayah. Wilayah ini memiliki potensi sumber daya alam dan energi yang besar, tetapi masih belum diimbangi dengan infrastruktur pendukung yang memadai. Diperlukan intervensi terpadu melalui program pembangunan konektivitas darat dan sungai, modernisasi layanan dasar (air, energi, dan sanitasi), serta penguatan infrastruktur digital dan pengelolaan lingkungan agar pembangunan wilayah Kabupaten Barito Utara dapat berkelanjutan dan inklusif.

2.6.1.2. Belum Meratanya Pengelolaan Sampah yang Baik

Belum optimalnya TPA atau TPST di Kabupaten Barito Utara menjadi masalah utama dalam pengelolaan sampah di Provinsi Kalimantan Tengah. TPAST atau PST memiliki dampak besar pada keberlanjutan lingkungan hidup di Kabupaten Barito Utara. Pengelolaan yang sifatnya hanya ditumpuk pada suatu area bukanlah solusi jangka panjang dalam pengelolaan sampah. Pengelolaan dan penanganan sampah seharusnya menjadi prioritas utama untuk memastikan daya dukung lingkungan tetap terjaga dalam mendukung pembangunan daerah.

Tabel 2.139. Masalah dan Akar Masalah Pengelolaan Sampah

Masalah	Akar Masalah	Urusan
Sampah rumah tangga belum terkelola dengan baik	Belum meratanya ketersediaan TPA/TPST	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Capaian timbulan sampah terkelola masih rendah	Lingkungan Hidup

2.6.1.3. Masih Rendahnya Kapasitas Layanan Infrastruktur Sumber Daya Air

Kendala dalam layanan infrastruktur sumber daya air terlihat pada penyediaan akses sanitasi aman yang masih rendah. Selain itu, pengambilan air tanah untuk kegiatan masyarakat juga berdampak bagi penyediaan air bersih masyarakat, baik dari segi kuantitas juga kualitasnya. Pemanfaatan air sungai yang melimpah baik untuk kegiatan masyarakat juga belum optimal. Ini juga disebabkan akibat adanya pencemaran air di sungai sehingga kondisi air tersebut tidak layak digunakan.

Tabel 2.140. Masalah dan Akar Masalah Infrastruktur Sumber Daya Air

Masalah	Akar Masalah	Urusan
Akses sanitasi aman yang masih rendah	Masih rendahnya capaian akses sanitasi layak	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Masih adanya perilaku BABS	
	Anggaran terbatas dalam penyediaan infrastruktur sanitasi layak dan aman	
	Kapasitas SDM terbatas	
Perlunya pengetatan regulasi pengolahan air baku	Lemahnya pengendalian, pengawasan, dan penegakan hukum dalam upaya pelayanan SPM	
	Pengambilan air tanah berlebihan oleh kegiatan industri dan permukiman	
	Penurunan kualitas dan kuantitas air tanah	
	Potensi adanya intrusi air laut dari ekstraksi air tanah yang berlebihan	
	Masih banyaknya pencemaran air	
Belum meratanya keberadaan pos hidrologi	Pengambilan data hidrologi belum optimal karena terbatasnya pos-pos hidrologi	
Perlunya peningkatan penyediaan jaringan air siap minum perpipaan	Perlunya jaminan penyediaan air bersih di wilayah air pengelolaan SPAM belum optimal	
Perlunya peningkatan layanan jaringan irigasi	Belum optimalnya penggunaan jaringan irigasi untuk pertanian	

	Ada daerah pertanian irigasi yang belum dilayani oleh jaringan	
--	--	--

2.6.1.4. Belum Tersedianya Dokumen Perencanaan Tata Ruang Yang Mempertimbangkan Kemerataan dan Keadilan

Masalah tumpang tindih penguasaan lahan dan ketiadaan RDTR di beberapa kabupaten/kota menjadi salah satu contoh kendala dalam penyediaan dokumen tata ruang di Provinsi Kalimantan Tengah. Hal ini kemudian menjadi bentuk kendala yang menyebabkan beberapa dokumen perencanaan tata ruang yang seharusnya ada, tetapi tidak tersedia sebagai acuan dalam pembangunan.

Tabel 2.141. Masalah dan Akar Masalah Dokumen Perencanaan Tata Ruang

Masalah	Akar Masalah	Urusan
Ketimpangan Pembangunan	Perbedaan prioritas pengadaan program pembangunan	Pekerjaan umum dan penataan ruang
Ketimpangan penguasaan tanah	Perbedaan status sosial dan kepentinganTerjadinya konflik kepemilikan lahan	SosialPertanahan
Dokumen perencanaan tata ruang dan kawasan strategis belum tersedia	Keterbatasan kapasitas penyelenggara perencanaan di daerah	Pekerjaan umum dan penataan ruang
Belum terjalinnya kerjasama dengan daerah lain dalam konteks pengelolaan wilayah berbasis ekologi/ekosistem	Belum tersedianya dokumen perencanaan sebagai acuan	Pekerjaan umum dan penataan ruang

2.6.1.5. Belum meratanya konektivitas dan dan aksesibilitas

Wilayah Kabupaten Barito Utara yang luas menjadi kendala geografis dalam pemenuhan konektivitas dan aksesibilitas antarwilayah. Beberapa pusat kegiatan wilayah bahkan belum terhubung secara langsung. Selain itu, belum ada integrasi transportasi antarmoda di beberapa wilayah yang juga menjadi tantangan utama dalam aksesibilitas. Keterbatasan masyarakat dalam mengakses transportasi antar kota dalam provinsi juga menjadi masalah dalam penyediaan akses transportasi. Permasalahan terkait penyeberangan sungai juga menemui kendala dengan belum adanya pelabuhan utama juga keterbatasan rambu-rambu di sungai.

Tabel 2.142. Masalah dan Akar Masalah Bidang Konektivitas dan Aksesibilitas

Masalah	Akar Masalah	Urusan
Perlunya peningkatan kualitas jalan	- Kualitas jalan dalam kondisi mantap fluktuatif tiap tahunnya - Lebar jalan masih kurang dari standar nasional (terutama jalan nasional dan jalan provinsi) - Sistem drainase belum berfungsi optimal ketika musim hujan - Banyaknya angkutan jalan dalam kondisi Over Dimension dan Over Load yang menambah beban jalan - Kurang tersedianya fasilitas keselamatan jalan dan rambu-rambu jalan (rusak, hilang, atau lupa dipasang kembali) - Perlunya peningkatan status jalan di beberapa ruas jalan untuk mendukung sentra pangan terpadu- Belum adanya konektivitas antar PKW	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Layanan dan kualitas transportasi umum yang masih rendah	- Belum adanya sistem angkutan umum terpadu di perkotaan - Tingkat disiplin operator angkutan yang rendah - Masih banyak travel tidak berizin- Trayek angkutan antar kota dalam provinsi (AKDP) terbatas - Pilihan waktu moda transportasi antar kota terbatas- <i>Demand</i> penumpang angkutan umum rendah	Perhubungan
Perlunya peningkatan kualitas layanan sungai, danau, dan penyeberangan	- Sedimentasi sungai - Belum lengkapnya rambu-rambu sungai dan fasilitas dermaga - Perlunya pengembangan pelabuhan utama - Perlunya pembangunan pelabuhan baru - Kedalaman perairan pelabuhan masih di bawah standar	Perhubungan



Tabel 2.143. Rekapitulasi Permasalahan Infrastruktur Wilayah di Kabupaten Barito Utara

Masalah	Akar Masalah	Lingkup Urusan
Infrastruktur transportasi darat jalan dan jembatan dan transportasi jalur air pelabuhan dan jalur sungai	• Kondisi mantap baru 53,4%; perawatan minim; tidak tahan terhadap iklim ekstrem • Kekurangan jembatan permanen di wilayah sungai dan anak sungai • Infrastruktur terbatas, belum modern; fasilitas bongkar muat tidak standar • Pendangkalan dan minim sarana navigasi • Ketergantungan tinggi pada APBD; koordinasi lintas instansi lemah • Beban angkutan melebihi kapasitas (<i>Over Dimension Over Loading/ODOL</i>): penggunaan jalan kelas kabupaten/provinsi untuk pengangkutan hasil perkebunan/pertambangan (CPO, batubara) dengan tonase yang melampaui batas desain jalan. • Keterbatasan anggaran fiskal: Kebutuhan pembangunan dan penggantian jembatan permanen sangat tinggi dan mahal, tidak sebanding dengan kemampuan APBD daerah (sumber utama dana).	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Dinas Perhubungan
Infrastruktur utilitas air, energi, komunikasi, sampah dan limbah	• Kapasitas PDAM terbatas, baik dari sisi produksi (debit air baku, IPA, dan jaringan distribusi) maupun kemampuan operasional (SDM dan manajemen keuangan). • Sumber air baku (Sungai Barito dan anak sungainya) mengalami fluktuasi debit dan kualitas akibat sedimentasi dan pencemaran. • Keterbatasan investasi infrastruktur air minum (sangat bergantung pada APBD dan DAK fisik). • Koordinasi antar instansi (PUPR, Dinas Kesehatan, Desa, dan PDAM) belum <i>sinkron</i> dalam perencanaan SPAM berbasis desa. • Program PAMSIMAS belum menjangkau semua desa prioritas dan sebagian sistem mengalami kerusakan operasional karena kurangnya pemeliharaan masyarakat. • Jaringan listrik PLN belum menjangkau seluruh wilayah pedesaan akibat jarak	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Kominfosandi, Dinas ESDM



Masalah	Akar Masalah	Lingkup Urusan
	distribusi yang jauh dan rendahnya densitas penduduk. • Keterbatasan infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) seperti PLTS dan PLTMH di daerah terpencil. • Minimnya investasi swasta dan BUMD energi lokal dalam penyediaan energi alternatif. • Belum tersedianya peta potensi energi daerah (<i>energy mapping</i>) untuk mendukung pengembangan EBT secara terarah. • Ketergantungan terhadap pasokan energi dari luar kabupaten menyebabkan biaya energi rumah tangga relatif tinggi. • Keterbatasan infrastruktur menara BTS di wilayah terpencil dan perbukitan. • Belum tersedianya jaringan <i>fiber optic</i> antar-kecamatan, terutama di wilayah pedalaman. • Rendahnya koordinasi antara pemerintah daerah dengan operator penyedia jaringan dalam pembangunan infrastruktur digital. • Minimnya literasi digital masyarakat pedesaan yang membatasi pemanfaatan teknologi informasi. • Tidak adanya rencana induk telekomunikasi daerah (<i>ICT Masterplan</i>) yang mengarahkan investasi jaringan digital. • Kapasitas fasilitas TPA belum memadai; belum ada unit pengolahan sampah terpadu (TPST) di kecamatan luar kota. • Minimnya armada pengangkut dan fasilitas pemilahan di sumber (bank sampah baru aktif di 5–7 lokasi). • Belum diterapkannya sistem retribusi dan manajemen biaya pengelolaan sampah yang berkelanjutan. • Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pemilahan dan pengurangan sampah. • Tidak adanya <i>masterplan</i> persampahan kabupaten sebagai dasar pengelolaan lintas wilayah.	



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Tahun 2025-2029**

Masalah	Akar Masalah	Lingkup Urusan
	• Belum adanya sistem pengelolaan air limbah terpusat (<i>off-site</i>) baik di Muara Teweh maupun kawasan padat lainnya. • Kurangnya infrastruktur IPAL skala kecil-menengah di fasilitas umum (pasar, sekolah, puskesmas). • Tidak adanya unit layanan lumpur tinja terjadwal (LLTT) di bawah Dinas Lingkungan Hidup atau PDAM. • Keterbatasan pembiayaan dan dukungan teknis untuk pengelolaan limbah rumah tangga. • Perilaku masyarakat yang masih membuang limbah cair langsung ke sungai atau parit karena tidak adanya fasilitas alternatif.	
Infrastruktur sosial utk pendidikan, kesehatan, fasilitas umum	• Ketimpangan distribusi sarana dan prasarana pendidikan antarwilayah, terutama antara wilayah perkotaan (Muara Teweh) dan pedalaman. • Keterbatasan anggaran daerah dan DAK fisik untuk rehabilitasi dan pembangunan unit sekolah baru. • Minimnya sarana pendukung pembelajaran digital, terutama jaringan internet dan peralatan TIK di sekolah pedesaan. • Kurangnya tenaga teknis infrastruktur pendidikan (arsitek, pengawas, teknisi bangunan) di Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Utara. • Perencanaan berbasis data belum optimal, sehingga prioritas pembangunan sekolah tidak selalu sesuai dengan kebutuhan <i>riil</i> di lapangan. • Ketimpangan distribusi fasilitas dan tenaga kesehatan antarwilayah akibat kondisi geografis sulit dan daya tarik insentif rendah. • Terbatasnya kapasitas infrastruktur pendukung kesehatan, terutama air bersih, listrik, dan jalan akses menuju fasilitas. • Keterlambatan realisasi dana DAK fisik kesehatan yang berimbas pada lambatnya perbaikan fasilitas.	Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, serta Bapperida



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Tahun 2025-2029**

Masalah	Akar Masalah	Lingkup Urusan
	• Belum optimalnya sistem rujukan dan transportasi medis, terutama dari desa terpencil ke RSUD. • Belum meratanya pembangunan fasilitas pemerintahan dan pelayanan publik antar kecamatan. • Keterbatasan sarana penunjang digitalisasi pelayanan, seperti jaringan internet dan sistem informasi manajemen (SIMDA, SIPP, e-Office). • Minimnya integrasi antar instansi pelayanan publik, baik dari sisi data maupun sistem operasional. • Kurangnya anggaran pemeliharaan infrastruktur publik yang mengakibatkan bangunan cepat rusak. • Belum optimalnya perencanaan tata ruang fasilitas umum, sehingga tidak semua kawasan padat penduduk memiliki ruang publik memadai.	

Implikasi pembangunan periode 2025-2029 Kabupaten Barito Utara:

- 1) diperlukan pembangunan jalan strategis kabupaten yang menghubungkan pusat produksi (pertanian, tambang, perkebunan) dengan pelabuhan dan pasar utama;
- 2) program rehabilitasi jembatan dan peningkatan jalan mantap harus menjadi prioritas DAK Fisik dan Dana Alokasi Umum Infrastruktur;
- 3) pengembangan Pelabuhan Muara Teweh sebagai simpul logistik regional didukung dengan modernisasi dermaga rakyat di Kecamatan Lahei dan Kecamatan Gunung Purei;
- 4) normalisasi dan pengerukan rutin Sungai Barito serta pemasangan rambu navigasi untuk meningkatkan keselamatan pelayaran;
- 5) pembentukan Forum Koordinasi Transportasi Darat dan Air Kabupaten Barito Utara untuk sinkronisasi lintas instansi dan perencanaan berbasis wilayah;
- 6) modernisasi sistem SPAM dan peningkatan kapasitas PDAM untuk memperluas cakupan layanan air minum dan sanitasi;
- 7) pengembangan energi baru terbarukan (EBT) seperti PLTS desa dan PLTMH sebagai solusi daerah terpencil;
- 8) penyusunan Rencana Induk Telekomunikasi dan Digitalisasi Daerah untuk mendorong pemerataan komunikasi;

- 9) pembangunan TPA *Sanitary Landfill* dan TPST Kecamatan serta penguatan sistem retribusi pengelolaan sampah;
- 10) pengembangan IPAL Komunal dan Layanan Lumpur Tinja Terjadwal (LLTT) untuk wilayah perkotaan dan padat penduduk;
- 11) penguatan koordinasi antar perangkat daerah (Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup, PDAM, Diskominfo, dan ESDM) melalui *integrated infrastructure planning*.

2.6.1.6. Permasalahan Pendidikan

Permasalahan mendasar yang dihadapi Kabupaten Barito Utara di bidang pendidikan adalah belum optimalnya kualitas serta pemerataan akses terhadap layanan pendidikan. Sebuah kondisi krusial yang mempengaruhi pencapaian visi daerah terkait SDM berkualitas dan mandiri. Meskipun IPM Kabupaten Barito Utara terus menunjukkan peningkatan dan mencapai kategori “Tinggi” dengan skor 73,17 pada tahun 2024, analisis lebih dalam pada komponen pendidikan mengungkap tantangan signifikan. Kesenjangan mutu layanan antara sekolah di pusat kota dan daerah terpencil masih terasa, yang berpengaruh terhadap kesempatan belajar yang setara bagi seluruh anak usia sekolah.

Aksesibilitas menjadi perhatian utama, terutama pada jenjang pendidikan menengah. Data Angka Partisipasi Murni (APM) tahun 2024 menunjukkan penurunan tajam seiring meningkatnya jenjang: SD mencapai 77,34%, namun SMP hanya 57,76%, dan SMA anjlok ke 63,20%. Angka APM SMA yang rendah ini mengkhawatirkan, mengindikasikan bahwa hampir separuh remaja usia 16-18 tahun tidak berada di bangku sekolah, berpotensi menambah jumlah angkatan kerja berkualifikasi rendah. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) penduduk usia 25 tahun ke atas pada tahun 2024 yang baru 8,7 tahun, setara dengan kelas IX SMP, semakin menegaskan belum tercapainya target Wajib Belajar 12 tahun secara merata, meskipun Harapan Lama Sekolah (HLS) pada tahun yang sama adalah 12,55 tahun. Selain itu, Angka Partisipasi Kasar (APK) untuk PAUD mencapai 91,23% pada tahun 2024, melebihi target 84%, sementara APK SD 84,20% (di bawah target 90%) dan APK SMP 69,59% (di bawah target 88%), menunjukkan adanya partisipasi yang lebih luas tetapi masih belum optimal dalam kelompok usia resmi.

Kualitas pembelajaran juga terkendala oleh kondisi sarana dan prasarana. Persentase ruang kelas SD dalam kondisi rusak berat pada tahun 2022 masih cukup tinggi (12,43%), begitu pula SMP (14,63%), yang tentunya mengganggu kenyamanan dan efektivitas kegiatan belajar-mengajar. Ketersediaan fasilitas penunjang esensial seperti laboratorium IPA (baru

dimiliki 74,36% SMP pada tahun 2022) dan perpustakaan (dimiliki 80,00% SD, dan 79,49% SMP pada tahun 2022) yang belum universal juga membatasi pengalaman belajar siswa. Ditambah lagi, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam proses pembelajaran dan administrasi sekolah belum optimal, meskipun ada alokasi anggaran untuk pembinaan TIK sebesar Rp130 juta pada tahun 2024 dengan realisasi penuh.

Dari sisi tenaga pendidik, meskipun kualifikasi akademik S1/D4 mayoritas guru SD (89,23% %) dan SMP (98,54%) pada tahun 2022 sudah terpenuhi, permasalahan distribusi guru yang tidak merata antara perkotaan dan daerah terpencil masih menjadi kendala signifikan dalam upaya pemerataan kualitas pendidikan. Persentase guru bersertifikat S1 pada tahun 2024 mencapai 73,38%, melebihi target 68%, tetapi ketidakmerataan distribusi menyebabkan ketergantungan pada guru non-PNS (GTT). Peningkatan kompetensi berkelanjutan bagi para guru juga tetap diperlukan untuk adaptasi kurikulum dan metode pengajaran modern. Penyelesaian isu-isu pendidikan ini memerlukan intervensi strategis dan komprehensif, termasuk peningkatan anggaran untuk rehabilitasi dan pembangunan fasilitas.

Tabel 2.144. Masalah dan Akar Masalah Pendidikan

Masalah	Akar Masalah	Lingkup Urusan
Belum optimalnya kualitas dan pemerataan akses layanan pendidikan	Kesenjangan mutu antara sekolah kota dan terpencil; rendahnya partisipasi di jenjang menengah.	Pendidikan, Sosial, Pekerjaan Umum
Penurunan APM.	Rendahnya aksesibilitas di daerah terpencil; potensi <i>dropout</i> karena faktor ekonomi.	
RLS yang masih rendah.	Kurangnya retensi siswa usia 16–18 tahun.	
Kondisi sarana prasarana rusak.	Pemeliharaan tidak memadai; kurangnya anggaran infrastruktur Pendidikan.	
Ketersediaan fasilitas esensial belum universal.	Keterbatasan investasi di fasilitas pendukung	
Pemanfaatan TIK belum optimal.	Kurangnya pelatihan dan infrastruktur digital	
Distribusi guru tidak merata.	Ketidakseimbangan antara perkotaan dan pedalaman; kurangnya program vokasi.	

2.6.1.7. Permasalahan Kebudayaan

Berdasarkan data dari BPS Kabupaten Barito Utara, pada tahun 2025 Kabupaten Barito Utara memiliki jumlah penduduk sebanyak 162.622 jiwa dengan kepadatan penduduk sebesar 16 jiwa/km². Penduduk terbanyak berada di Kecamatan Teweh Tengah sebanyak 61.321 jiwa, yang merupakan kecamatan terpadat di Kabupaten Barito Utara. Rata-rata laju



pertumbuhan penduduk dari tahun 2020-2024 sebesar 1,32%, dengan laju pertumbuhan penduduk tertinggi berada di Kecamatan Teweh Tengah, hal ini disebabkan karena sebanyak 28,45% penduduk Kabupaten Barito Utara tinggal di kecamatan ini.

Suku atau penduduk asli Barito Utara adalah suku Dayak Bakumpai dan Dayak Taboyan (Dayak Tawoyan). Bahasa yang digunakan, selain bahasa resmi nasional (bahasa Indonesia), keseharian penduduk juga memakai bahasa Dayak dialek Barito Utara. Sebesar 73% penduduknya beragama Islam, 11% beragama Kristen Protestan, 11% beragama Hindu, sisanya beragama Budha, Konghucu, Katolik, dan lainnya (BPS Kabupaten Barito Utara, 2025).

Kabupaten Barito Utara memiliki kebudayaan khas daerah yang beragam berupa tarian, alat musik, dan sebagainya. Kabupaten Barito Utara memiliki 16 sanggar seni budaya yang dibina oleh pemerintah daerah (Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga, 2025). Kabupaten Barito Utara merupakan kabupaten yang kaya akan warisan budaya. Masyarakat di wilayah ini didominasi oleh suku Dayak sub-etnis, seperti Dayak Dusun dan Tewoyan, serta suku Bakumpai. Kekayaan budaya tersebut tercermin dalam tradisi yang masih dipertahankan, seperti *Batuyang Maulid Bakumpai* dan ritual pengobatan *Badewah Dayak*. Praktik-praktik tersebut membentuk kerangka sosial dan nilai-nilai luhur masyarakat setempat.

Kekuatan budaya tersebut berakar pada kearifan lokal dalam mengelola sumber daya. Masyarakat Dayak, khususnya yang menganut kepercayaan Kaharingan memiliki sistem hukum adat yang ketat dalam mengatur hubungan dengan lingkungan. Norma adat ini diimplementasikan oleh tokoh adat seperti *Damang* dalam kehidupan sehari-hari seperti membatasi pemanfaatan hutan dan sumber daya alam, bahkan di kawasan sakral seperti Gunung Lumut. Ketaatan terhadap hukum adat tersebut adalah wujud nyata upaya pelestarian lingkungan tradisional.

Di sisi lain, kabupaten ini merupakan wilayah dengan konsentrasi *site* tambang batubara yang tinggi. Sektor pertambangan ini merupakan motor ekonomi utama, namun menimbulkan dampak lingkungan yang signifikan. Laporan studi menunjukkan bahwa kegiatan tersebut berpotensi menimbulkan dampak negative terhadap lingkungan seperti polusi air, udara, dan tanah. Oleh sebab itu, penting bagi perusahaan tambang untuk rutin melakukan pemantauan kualitas lingkungan dalam upaya memastikan baku mutu lingkungan (udara, air, dan lain-lain) tidak terlampaui.

Tantangan terbesar bagi Kabupaten Barito Utara adalah menyeimbangkan pembangunan industri dengan pelestarian budaya dan lingkungan. Diperlukan sinergi antara regulasi pemerintah, penegakan hukum adat, dan tanggung jawab perusahaan. Upaya seperti rehabilitasi lahan bekas tambang harus diintensifkan yang bertujuan untuk memastikan dalam kegiatan eksploitasi kekayaan mineral tidak mengorbankan warisan budaya leluhur dan kelestarian ekosistem di wilayah tersebut.

Kebudayaan memiliki arti hasil cipta, rasa, dan karsa manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya yang kompleks yang mencakup pengetahuan, keyakinan, seni, susila, hukum adat dan setiap kecakapan, serta kebiasaan. Kebudayaan lokal yang ada di Kabupaten Barito Utara sangat beragam. Keberadaan kebudayaan lokal saat ini semakin terkikis oleh kebudayaan modern hal ini berdampak kepada belum optimalnya pelestarian budaya lokal, begitu pula dengan benda-benda peninggalan sejarah yang sarat akan nilai-nilai luhur serta cagar budaya yang ada saat ini belum dikelola dengan baik.

Belum optimalnya pelestarian dan pengembangan nilai-nilai luhur budaya terjadi karena minimnya kebudayaan daerah yang bisa menjadi unggulan, dan kelompok kebudayaan yang aktif masih sangat tergantung pada dukungan pemerintah. Diperlukan dukungan dari lintas sektor untuk bisa mengimplementasikan hal tersebut. Selain itu lemahnya perlindungan hukum atas kekayaan budaya menjadi permasalahan tersendiri.

Jasa ekosistem budaya merupakan kemampuan alami ekosistem untuk memberikan manfaat berupa peradaban dan keanekaragaman budaya. Jasa ekosistem budaya terdiri dari tempat tinggal dan ruang hidup, ekowisata, dan estetika. Jasa ekosistem tempat tinggal dan ruang hidup di Kabupaten Barito Utara didominasi oleh kategori sedang-rendah (74%), jasa ekosistem budaya ekowisata didominasi oleh kategori sangat tinggi (49%), dan jasa ekosistem budaya estetika didominasi oleh kategori sangat tinggi (49%). Diperlukan keseimbangan antar jasa ekosistem budaya untuk memberikan manfaat yang optimal bagi kehidupan masyarakat di Kabupaten Barito Utara.

Terdapat dua permasalahan pengembangan kebudayaan dalam rangka ketahanan budaya di Kabupaten Barito Utara yaitu:

- 1) Belum optimalnya pengembangan destinasi wisata daerah dan belum maksimalnya promosi wisata daerah. Kabupaten Barito Utara memiliki potensi sumber daya pariwisata dan kekayaan serta keragaman sosial budaya daerah yang sangat potensial yaitu: (a) wisata alam yaitu pemanfaatan sumber daya alam dan tata lingkungannya

untuk dijadikan sasaran wisata seperti panorama alam, pegunungan, danau, sungai, hutan, goa-goa, flora dan fauna; (b) wisata budaya yaitu pemanfaatan seni dan budaya untuk dijadikan sasaran wisata, kekayaan dan keragaman sosial budaya. Seperti suku Dayak di Kabupaten Barito Utara yang mempunyai ciri khas tersendiri baik agama/kepercayaan, adat istiadat, kebiasaan, seni budaya, upacara, ritual, situs, peninggalan purbakala, bahasa dan lainnya; (c) wisata minat khusus yaitu pemanfaatan sumber daya alam dan potensi seni budaya untuk menimbulkan daya tarik khusus dan minat khusus sebagai sasaran wisata seperti olah raga panjat tebing, belanja, wisata ziarah dan lain-lain; (d) wisata sejarah yaitu pemanfaatan peninggalan bukti-bukti sejarah terutama peninggalan sejarah terkait perang melawan penjajah; (e) agrowisata perkebunan kelapa sawit, buah-buahan dan lain-lain.

Dalam hal pengembangan pariwisata, beragam masalah yang dihadapi oleh pemerintah antara lain seperti sarana dan prasarana penunjang (fasilitas umum) di objek wisata yang belum memadai, kurang optimalnya kegiatan promosi pariwisata daerah, serta rendahnya minat investor untuk mengembangkan usaha di bidang kepariwisataan. Investasi dalam hal wisata dapat berupa hotel, restoran, jasa penyewaan transportasi atau peralatan, dan lain-lain. Dengan pembangunan sarana dan prasarana pendukung, kepariwisataan daerah diupayakan dapat dikembangkan lebih lanjut, sehingga mampu mendorong percepatan perolehan target pendapatan asli daerah.

- 2) Belum maksimalnya pelestarian budaya lokal dan belum optimalnya pengelolaan benda-benda peninggalan sejarah dan situs cagar budaya. Kebudayaan lokal yang ada di Kabupaten Barito Utara sangat beragam. Seperti kita ketahui bahwa keberadaan kebudayaan lokal saat ini semakin terkikis oleh kebudayaan modern. Begitu pula dengan benda-benda peninggalan sejarah yang sarat akan nilai-nilai luhur serta cagar budaya yang ada saat ini belum dikelola dengan baik. Oleh sebab itu sebagai generasi penerus bangsa, kita wajib menjaga dan mengembangkan budaya dan kearifan lokal yang menjadi identitas Kabupaten Barito Utara.

Secara sosial ditinjau dari aspek pendidikan, gambaran umum keadaan pendidikan di Kabupaten Barito Utara tercermin dari jumlah prasarana pendidikan (sekolah), murid dan guru. Pada tahun ajaran 2023/2024, jumlah sekolah menurut strata yaitu sekolah dasar, sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas (sederajat) berturut-turut sebanyak 190, 47, dan 26 unit. Terdapat tiga perguruan tinggi di Kabupaten Barito Utara, di antaranya adalah



Politeknik Muara Teweh, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Muara Teweh, dan Sekolah Tinggi Ilmu Agama (STAI) Siti Khadijah.

Di bidang kesehatan, berdasar hasil Survey Sosial Ekonomi Nasional (SSEN) Tahun 2023, terdapat 17,70% penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Utara pada tahun 2023, penyakit yang paling banyak melakukan kunjungan ke fasilitas kesehatan adalah penyakit parkinson dengan jumlah 19.534 kunjungan.

Bidang religius menjadi salah satu unsur penting dalam pembangunan sosial masyarakat untuk menjadi bangsa yang beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Semua jenis sarana peribadatan telah tersedia di Kabupaten Barito Utara, diantaranya masjid, mushola, gereja protestan, gereja katolik, pura, dan vihara. Jumlah tempat peribadatan tersebut sebanding dengan jumlah penduduk menurut agama yang dianut.

Kriminalitas terkait dengan tindakan yang bertentangan dengan norma hukum, norma sosial, dan norma agama, sehingga ditentang oleh masyarakat. Perkara kriminal yang terjadi di Kabupaten Barito Utara selama tahun 2023 berdasarkan data yang bersumber dari Pengadilan Negeri Muara Teweh tercatat sebanyak 166 perkara. Angka ini naik dari tahun sebelumnya, yaitu sebanyak 151 perkara. Jenis kejahatan yang paling banyak terjadi adalah penyalahgunaan narkoba.

Data kemiskinan sangat diperlukan dalam evaluasi kebijakan pemerintah di bidang sosial. Salah satunya adalah garis kemiskinan dan persentase penduduk miskin. Garis kemiskinan Kabupaten Barito Utara pada tahun 2023 sebesar Rp590.832,00. Persentase penduduk miskin turun menjadi 5,35% dibandingkan tahun 2022 yang sebesar 5,80%. Sejalan dengan tingkat kemiskinan, jumlah penduduk miskin mencapai 7.140 orang pada tahun 2023, turun 560 orang dari penduduk miskin pada tahun 2022 (7.700 orang).

Keluarga sebagai unit terkecil pembangunan dapat menjadi cerminan ketahanan sosial. Indeks Kualitas Keluarga harus ditunjang oleh dimensi kualitas ketahanan fisik dan kualitas ketahanan ekonomi. Selain itu, pemuda sebagai penerus pembangunan bangsa juga perlu dipersiapkan kapasitasnya sebagai pemimpin di masa yang akan datang. Penyiapan kapasitas pemuda dilaksanakan melalui partisipasi dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia yaitu pendidikan. Data menunjukkan bahwa masih rendahnya partisipasi pemuda di dalam berwirausaha, partisipasi pada kegiatan masyarakat, partisipasi perempuan pada sektor pekerjaan menunjukan ketahanan sosial dalam keluarga perlu ditingkatkan.

Pada sisi lain juga terjadi ketimpangan gender dinilai dari kesenjangan gender pada dimensi kesehatan, pemberdayaan, dan tenaga kerja. Kondisi pada masing-masing dimensi tersebut menggambarkan ketimpangan yang terjadi antar gender. Ini dapat disebabkan oleh faktor lingkungan dan budaya yang masih menganggap posisi perempuan tidak setara dengan laki-laki. Permasalahan tenaga kerja yang timpang ditandai kemudian dengan rendahnya keikutsertaan perempuan dalam dunia kerja hingga akses perempuan yang masih rendah untuk mendapatkan standar hidup yang layak hingga perkawinan usia muda yang masih tinggi.

Pada ketahanan sosial kerukunan umat beragama merupakan aspek yang penting untuk mencapai ketenteraman dan ketertiban umum. Indeks kerukunan umat beragama pada data Provinsi Kalimantan Tengah telah memiliki capaian yang termasuk pada kategori tinggi. Oleh karena itu diperlukan penguatan kerukunan antar umat beragama, agar ketertiban umum dan ketahanan sosial dapat dipertahankan. Masalah dan akar masalah ketahanan budaya dan sosial dapat dilihat pada Tabel 2.145.

Tabel 2.145. Masalah dan Akar Masalah Ketahanan Budaya dan Sosial Kabupaten Barito Utara

Masalah	Akar Masalah	Urusan
Belum berkembangnya Dimensi Ekonomi Budaya dan Ekspresi Budaya Lokal	• Belum optimalnya pengembangan destinasi wisata daerah • Belum maksimalnya pelestarian budaya lokal • Belum optimalnya pengelolaan benda-benda peninggalan sejarah dan situs cagar budaya	Budaya
Belum optimalnya ketahanan keluarga dalam menunjang ketahanan sosial	• Ketahanan sosial belum ditunjang dengan kualitas pendidikan dan kesehatan • Ketahanan keluarga belum ditunjang oleh partisipasi kemandirian pemuda dan keseimbangan gender	Sosial

2.6.1.8. Permasalahan Kesehatan

Permasalahan kesehatan di Kabupaten Barito Utara menuntut intervensi yang mendalam dan lintas sektor dalam kerangka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), terutama di bawah Isu Strategis Kehidupan Sehat dan Sejahtera, serta Air Bersih dan Sanitasi Layak. Secara menyeluruh, kondisi ini mengindikasikan bahwa tingkat kesehatan masyarakat di Kabupaten Barito Utara belum optimal.

a. Tantangan Peningkatan Angka Harapan Hidup (AHH)

Angka Harapan Hidup (AHH) di Kabupaten Barito Utara menunjukkan peningkatan yang sangat marginal, di mana total peningkatannya dari tahun 2020 (71,30) ke tahun 2024 (73,65) hanya sebesar 0,05/tahun. Stagnasi AHH ini menjadi sinyal darurat bagi penentu kebijakan, karena mencerminkan belum optimalnya efektivitas program kesehatan esensial dalam menghasilkan perpanjangan usia harapan hidup yang signifikan. Kinerja AHH yang lambat secara langsung menahan laju peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) daerah. Peningkatan AHH yang konsisten wajib menjadi pilar utama RPJMD, menuntut re-evaluasi total terhadap faktor risiko utama seperti tingginya penyakit kronis dan keterbatasan akses layanan.

b. Angka Kematian Ibu (AKI) yang Masih Tinggi dan Sistem yang Rentan

Angka Kematian Ibu (AKI) di Kabupaten Barito Utara menunjukkan fluktuasi ekstrem yang menyoroti kerentanan sistem kesehatan terhadap krisis. Meskipun Kabupaten Barito Utara mampu mencapai target nasional di beberapa tahun, terjadi lonjakan kritis pada tahun 2021 hingga mencapai 364 per 100.000 Kelahiran Hidup (KH), tertinggi dalam lima tahun dan jauh di atas Target Nasional (213 per 100.000 KH). Lonjakan ini, bertepatan dengan puncak pandemi, membuktikan bahwa masalah struktural "Tiga Terlambat" (terutama Terlambat Sampai karena faktor geografis Kabupaten Barito Utara yang luas, dan Terlambat Penanganan karena keterbatasan sarana/SDM) masih menjadi isu fundamental. Meskipun AKI berhasil diturunkan signifikan menjadi 143,8 per 100.000 KH pada tahun 2022, RPJMD harus menargetkan penurunan konsisten, misalnya menjadi 60 per 100.000 KH pada tahun 2026, dengan fokus pada penguatan ketahanan sistem (resiliensi) dan layanan darurat obstetri.

c. Ancaman Beban Penyakit Tidak Menular (PTM) Prioritas

Beban penyakit kronis PTM kini menjadi beban ganda terbesar dan faktor risiko utama yang menghambat AHH. Kinerja penanganan Hipertensi (HT) dan Diabetes Mellitus (DM) masih sangat rendah dan jauh dari Standar Pelayanan Minimal (SPM) ideal:

- Cakupan Pelayanan Hipertensi: tertinggi hanya 66,65% pada tahun 2021 yang mendapatkan pelayanan rutin sesuai standar. Angka yang sangat rendah ini berarti mayoritas penderita HT tidak terkontrol, memicu risiko tinggi Stroke dan Gagal Ginjal, serta mengancam lonjakan biaya Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

- Cakupan Pelayanan DM: Angka pelayanan DM juga masih fluktuatif dan rendah (sekitar 36-145%), yang menyebabkan peningkatan kasus komplikasi di rumah sakit.
- Sebaliknya, pelayanan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat menunjukkan kinerja yang luar biasa dengan 100% penderita mendapatkan pengobatan sesuai standar secara konsisten, menunjukkan model praktik baik dalam komitmen penjaminan hak kesehatan. RPJMD wajib mengalihkan fokus kebijakan PTM dari kuratif di rumah sakit menjadi promotif-preventif aktif di Puskesmas dan masyarakat, mencontoh keberhasilan penanganan PTM yang telah dilakukan.

d. Permasalahan Stunting dan Kualitas Gizi

Meskipun Kabupaten Barito Utara telah mencapai penurunan stunting yang masif dari 26,57% pada tahun 2020 menjadi 16,21% sesuai target pada tahun 2024 (yang menempatkannya di bawah ambang batas masalah kesehatan WHO sebesar 20%) isu ini tetap menjadi prioritas urgensi tertinggi dan harus menjadi program *breakthrough*. Tantangan utama adalah mengakselerasi penurunan tersebut menuju target nasional 14% pada tahun 2026. Masih adanya disparitas data yang mana hal ini menunjukkan perlunya harmonisasi data dan konvergensi intervensi gizi.

e. Eliminasi Penyakit Menular yang Belum Optimal (TB dan Ancaman Impor Malaria)

- Kinerja pengendalian penyakit menular menunjukkan pencapaian yang solid, namun dengan tantangan strategis baru.
- Terdapat peningkatan kinerja penemuan kasus TB BTA Positif yang luar biasa, mencapai 95,92% pada tahun 2022. Keberhasilan deteksi ini menggeser tantangan RPJMD dari penemuan kasus ke penjaminan kualitas pengobatan dan peningkatan Angka Keberhasilan Pengobatan (TSR). Tantangan struktural yang paling besar adalah keterkaitan TB dengan sanitasi buruk dan perumahan kumuh, yang membuat eliminasi belum optimal.
- Capaian menunjukkan Kabupaten Barito Utara telah berada pada atau mendekati status eliminasi Malaria (misalnya, hanya 3 kasus pada tahun 2022). Strategi RPJMD selanjutnya harus bertransisi dari pengendalian massal ke penguatan *surveillans* reaktif dan sistem respons cepat berbasis geospasial, mengingat potensi kasus impor dari daerah endemik akibat tingginya mobilitas penduduk di sektor pertambangan dan perkebunan.

f. Keterbatasan SDM dan Mutu Layanan Kesehatan

Permasalahan struktural paling mendasar adalah kualitas dan pemerataan layanan yang belum optimal serta keterbatasan tenaga kesehatan yang diperparah oleh minimnya peminat untuk bekerja di Kabupaten Barito Utara. Fasilitas pelayanan kesehatan belum memadai, dan kuantitas serta sebaran dokter umum, dokter gigi, dan dokter spesialis masih berada di bawah standar ideal untuk melayani 17 Puskesmas dan 84 Pustu yang tersebar. RPJMD harus memprioritaskan:

- Penyusunan program insentif yang atraktif (retensi SDM).
- Peningkatan pemerataan layanan yang didukung target 100% Puskesmas terakreditasi pada tahun 2026.

g. Ancaman Lingkungan dan Sanitasi (Air Bersih dan Sanitasi Layak)

Masalah lingkungan merupakan determinan utama yang menghambat keberhasilan kesehatan. Hasil telaah KLHS RPJMD menunjukkan bahwa masih adanya perilaku Buang Air Besar Sembarangan (BABS) dan baru sekitar 36% desa yang mendeklarasikan status *Open Defecation Free* (ODF). Rendahnya capaian ODF dan kurangnya akses terhadap sanitasi layak ini secara langsung meningkatkan risiko penularan penyakit berbasis air (diare, TBC) dan menjadi faktor risiko utama stunting. Isu ini wajib diintegrasikan ke dalam RPJMD melalui kebijakan yang secara eksplisit mengaitkan investasi infrastruktur sanitasi dan air bersih (Misi 2) dengan indikator kinerja kesehatan masyarakat (Misi 1).

Tabel 2.146. Masalah dan Akar Masalah Kesehatan Kabupaten Barito Utara

Masalah	Akar Masalah	Urusan
Stagnasi Angka Harapan Hidup (AHH) (Peningkatan AHH sangat marginal, menahan laju IPM)	Beban ganda Penyakit Tidak Menular (PTM) yang tinggi dan tidak terkontrol, serta belum optimalnya efektivitas program kesehatan esensial.	Kesehatan, Sosial
Tingginya Kerentanan Angka Kematian Ibu (AKI) (Fluktuasi ekstrem, lonjakan kritis saat krisis/pandemi)	Kerentanan sistem pelayanan (resiliensi rendah) dan masalah struktural "Tiga Terlambat" (terlambat sampai, terlambat penanganan) karena keterbatasan sarana/SDM dan faktor geografis.	Kesehatan, Sosial
Beban Penyakit Tidak Menular (PTM) Prioritas Tidak Terkontrol (Cakupan	Fokus kebijakan PTM masih kuratif di RS, bukan promotif-preventif aktif di Puskesmas,	Kesehatan, Sosial

Masalah	Akar Masalah	Urusan
pelayanan Hipertensi dan DM sangat rendah)	serta minimnya kesadaran dan deteksi dini di masyarakat.	
Tantangan Akselerasi Penurunan Stunting (Membutuhkan percepatan menuju target 14% pada 2026)	Gizi buruk kronis yang diperburuk oleh faktor lingkungan (akses air bersih dan sanitasi yang buruk) dan perlunya harmonisasi data/konvergensi intervensi lintas sektor.	Kesehatan, Ketahanan Pangan, Pertanian, Sosial

2.6.1.9. Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi

1) Permasalahan Infrastruktur Dasar

Ketersediaan dan kualitas infrastruktur dasar yang belum optimal dan merata menjadi permasalahan krusial, yang berperan sebagai fondasi sekaligus penghambat pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas hidup. Konektivitas antar wilayah masih menjadi tantangan utama, tercermin dari persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap (baik dan sedang) yang pada tahun 2024 baru mencapai 48.01%. Kondisi ini secara langsung meningkatkan biaya transportasi dan logistik, menghambat mobilitas penduduk, serta membatasi akses masyarakat, terutama di daerah pedalaman, menuju pusat ekonomi, layanan pendidikan, dan fasilitas kesehatan.

Selain infrastruktur jalan dan jembatan, pemenuhan layanan dasar lainnya juga belum mencapai cakupan universal. Akses rumah tangga terhadap sumber air minum layak baru mencapai 74.45% pada tahun 2024, sementara akses terhadap sanitasi layak (jamban sehat) sebesar 71.94%. Angka-angka ini menunjukkan bahwa seperempat penduduk masih belum menikmati fasilitas dasar tersebut, yang berdampak pada isu kesehatan dan lingkungan.

Masalah ketersediaan listrik juga belum tuntas, dengan rasio elektrifikasi rumah tangga pada tahun 2024 tercatat 96.18%, artinya masih ada sebagian kecil rumah tangga yang belum teraliri listrik PLN. Di sektor pertanian, optimalisasi jaringan irigasi masih diperlukan untuk mendukung peningkatan produktivitas. Demikian pula sarana transportasi publik seperti terminal (tipe C) dan dermaga sungai yang membutuhkan peningkatan kapasitas dan kualitas pelayanan.

Kompleksitas permasalahan infrastruktur ini juga dipengaruhi oleh belum selesainya proses legislasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRWK) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTRK), yang menghambat perencanaan dan pengembangan infrastruktur secara terarah,

efisien, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, percepatan pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur dasar secara merata menjadi prioritas utama yang harus diakomodasi secara strategis.

Tabel 2.147. Masalah dan Akar Masalah Infrastruktur Dasar

Masalah	Akar Masalah	Lingkup Urusan
Ketersediaan dan kualitas infrastruktur belum optimal dan merata.	Belum selesainya RTRWK dan RDTRK; perencanaan tidak terarah.	Pendidikan, Sosial, Pekerjaan Umum
Konektivitas antarwilayah rendah.	Biaya transportasi tinggi; akses terbatas ke pusat ekonomi.	
Akses air minum layak yang rendah.	Kurangnya investasi di jaringan air bersih.	
Akses sanitasi layak masih rendah.	Kurangnya investasi di penyediaan sanitasi layak; Menurunnya kesehatan warga.	
Rasio elektrifikasi rumah perlu ditingkatkan.	Sebagian kecil belum teraliri PLN.	

2) Permasalahan Industri, Perdagangan, Koperasi, dan UMKM

Sektor industri pengolahan (8,52% PDRB ADHB 2024) dan perdagangan (6,52% PDRB ADHB 2024), bersama dengan koperasi dan UMKM, merupakan pilar penting ekonomi kerakyatan namun masih menghadapi tantangan terkait daya saing, kualitas kelembagaan, akses sumber daya, dan penciptaan nilai tambah yang belum optimal. Industri pengolahan masih didominasi oleh skala mikro dan kecil yang seringkali terkendala dalam hal standar kualitas produk, kapasitas produksi, kontinuitas pasokan, dan jangkauan pemasaran.

Sektor perdagangan, meskipun berkontribusi cukup signifikan, masih menghadapi isu infrastruktur pendukung seperti kondisi pasar tradisional yang perlu ditingkatkan. Selain itu, fluktuasi harga komoditas kebutuhan pokok juga menjadi masalah yang mempengaruhi daya beli masyarakat dan stabilitas usaha pedagang. Upaya pengendalian inflasi daerah menjadi penting dalam konteks ini.

Di ranah koperasi dan UMKM, meskipun jumlahnya banyak, kualitas kelembagaan koperasi masih perlu ditingkatkan agar lebih banyak yang masuk kategori sehat dan mampu memberikan manfaat optimal bagi anggotanya. UMKM sebagai mayoritas pelaku usaha menghadapi kendala klasik seperti keterbatasan akses permodalan dari lembaga keuangan formal, kesulitan dalam pemasaran produk (terutama secara digital), adopsi teknologi yang masih rendah, serta keterbatasan kapasitas manajerial dan keterampilan SDM pengelola.

Kurangnya inovasi produk dan jejaring usaha juga membatasi potensi pertumbuhan UMKM. Upaya penciptaan wirausaha baru perlu didukung dengan program pendampingan yang efektif dan fasilitasi akses sumber daya. Peningkatan iklim usaha yang kondusif melalui penyederhanaan regulasi dan perizinan juga menjadi agenda penting. Rencana pembangunan daerah perlu merumuskan program-program konkret untuk meningkatkan daya saing IKM, merevitalisasi pasar, memperkuat kelembagaan koperasi, serta memberdayakan UMKM secara komprehensif.

Tabel 2.148. Masalah dan Akar Masalah Industri, Perdagangan, Koperasi, dan UMKM

Masalah	Akar Masalah	Lingkup Urusan
Daya saing industri pengolahan rendah.	Dominasi skala mikro/kecil; standar kualitas produk buruk.	Tenaga Kerja, Koperasi, UMKM, Industri, Penanaman Modal
Kapasitas produksi dan pasokan tidak kontinu.	Jangkauan pemasaran terbatas.	
Infrastruktur perdagangan (pasar tradisional) perlu revitalisasi.	Fluktuasi harga komoditas pokok dan inflasi daerah tinggi menghadirkan ketidakefisienan rantai pasok.	
Kualitas kelembagaan koperasi rendah	Banyak koperasi tidak sehat; manfaat bagi anggota minim.	
Kendala UMKM: akses modal, pemasaran digital, teknologi rendah.	Kapasitas manajerial dan SDM pengelola lemah.	

3) Permasalahan Pariwisata

Sektor pariwisata Kabupaten Barito Utara memiliki potensi alam dan budaya yang dapat dikembangkan, namun saat ini masih menghadapi permasalahan pengembangan yang belum optimal dan daya tarik yang terbatas, sehingga kontribusinya terhadap ekonomi daerah belum signifikan. Jumlah kunjungan wisatawan domestik yang konsisten di atas 40 ribu wisatawan dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan adanya minat, namun angka ini masih perlu ditingkatkan secara substansial untuk menghasilkan dampak ekonomi yang luas. Kunjungan wisatawan mancanegara bahkan jauh lebih rendah.

Salah satu kendala utama adalah kurang memadainya infrastruktur dasar dan amenities di sebagian besar destinasi wisata potensial. Ketersediaan akomodasi yang representatif, fasilitas umum (toilet, tempat istirahat), serta atraksi pendukung masih sangat terbatas. Aksesibilitas menuju lokasi-lokasi wisata seringkali sulit akibat kondisi jalan yang belum mantap, menambah waktu dan biaya perjalanan bagi wisatawan.

Upaya promosi pariwisata yang telah dilakukan dinilai belum cukup efektif dan terintegrasi. Strategi pemasaran belum mampu menjangkau target pasar potensial secara luas dan belum berhasil membangun citra destinasi (*branding*) yang kuat dan unik bagi Kabupaten Barito Utara. Keterlibatan teknologi digital dalam promosi juga masih perlu dioptimalkan.

Selain itu, pengembangan ekonomi kreatif yang berbasis budaya lokal sebagai pendukung ekosistem pariwisata (misalnya kerajinan, kuliner khas, seni pertunjukan) juga belum berjalan optimal. Minimnya keterlibatan investasi swasta dalam pengembangan fasilitas dan layanan pariwisata, serta partisipasi aktif masyarakat lokal dalam pengelolaan destinasi, turut menghambat percepatan pengembangan sektor ini. Rencana pembangunan daerah perlu memprioritaskan penataan destinasi unggulan, perbaikan infrastruktur akses, strategi pemasaran terpadu, pengembangan SDM pariwisata, dan pemberdayaan masyarakat lokal.

Tabel 2.149. Masalah dan Akar Masalah Kegiatan Pariwisata

Masalah	Akar Masalah	Lingkup Urusan
Pengembangan pariwisata belum optimal; kontribusi ekonomi rendah.	Kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara masih rendah.	Pariwisata, Pekerjaan Umum, Pemuda dan Olahraga, Komunikasi, Informatika
Infrastruktur dasar dan amenities di destinasi terbatas	Akomodasi, fasilitas umum (toilet, istirahat) minim.	
Aksesibilitas ke lokasi wisata sulit.	Kondisi jalan kurang baik; biaya perjalanan tinggi.	
Promosi belum efektif dan terintegrasi.	Strategi pemasaran tak jangkau target; <i>branding</i> perlu ditingkatkan atau masih lemah.	
Ekonomi kreatif berbasis budaya belum optimal.	Minim investasi swasta; partisipasi masyarakat rendah.	

4) Permasalahan Kualitas SDM dan Ketenagakerjaan

Meskipun IPM Kabupaten Barito Utara terus meningkat (73,17 tahun 2024), isu kualitas, daya saing, dan produktivitas tenaga kerja yang belum kompetitif tetap menjadi permasalahan sentral yang perlu diatasi dalam rencana pembangunan daerah. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada tahun 2024 tercatat 4,71%. Meskipun angka TPT ini relatif rendah, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) yang juga rendah (70,24% pada tahun 2024) mengindikasikan adanya potensi masalah *underemployment* atau angkatan kerja yang keluar dari pasar kerja (*discouraged workers*).

Produktivitas kerja yang masih rendah menjadi perhatian utama, seringkali disebabkan oleh kesenjangan keterampilan (*skill gap*) antara kompetensi yang dimiliki angkatan kerja

dengan kualifikasi yang dibutuhkan oleh dunia usaha dan industri. Hal ini berkaitan erat dengan kualitas lulusan sistem pendidikan formal dan efektivitas program pelatihan kerja non-formal. Upaya peningkatan kompetensi melalui lembaga pelatihan kerja belum optimal menjangkau seluruh pencari kerja atau pekerja yang membutuhkan *upskilling/reskilling*. Selain itu, akses terhadap informasi lowongan kerja dan layanan bimbingan karir juga masih perlu diperluas.

Tabel 2.150. Masalah dan Akar Masalah Kualitas SDM dan Ketenagakerjaan

Masalah	Akar Masalah	Lingkup Urusan
Kualitas, daya saing, dan produktivitas tenaga kerja rendah.	<i>Skill gap</i> antara kompetensi dan kebutuhan industri.	Tenaga Kerja, Kesehatan, Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia, Pendidikan, Pelatihan
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) masih tinggi; Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) masih rendah.	Kurang kesempatan kerja; pekerjaan di bawah kemampuan dan keinginan; kurangnya keterampilan; kondisi ekonomi yang kurang baik.	
Efektivitas pelatihan kerja non-formal rendah.	Jangkauan ke pencari kerja terbatas; <i>upskilling/reskilling</i> minim.	
Akses informasi lowongan dan bimbingan karir kurang.	Sistem informasi pasar kerja lemah.	
Isu kesehatan yang masih mengkhawatirkan.	Dampak jangka panjang pada produktivitas sumber daya manusia.	

5) Permasalahan Investasi

Realisasi investasi di Kabupaten Barito Utara, meskipun menunjukkan tren baik dan mencapai Rp1,56 triliun pada tahun 2024, dinilai belum optimal dalam memanfaatkan seluruh potensi ekonomi daerah dan pertumbuhannya masih perlu didorong secara berkelanjutan. Mengingat peran strategis investasi sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan sumber pendapatan daerah, permasalahan ini menjadi fokus penting dalam rencana pembangunan daerah.

Salah satu faktor kunci yang perlu dibenahi adalah iklim kemudahan berusaha (EoDB). Meskipun upaya perbaikan terus dilakukan, masih diperlukan langkah konkret untuk menyederhanakan prosedur perizinan, meningkatkan kepastian hukum dan regulasi, serta memperkuat transparansi dan akuntabilitas layanan publik terkait investasi.

Keterbatasan infrastruktur pendukung yang memadai juga menjadi hambatan signifikan. Kondisi jalan yang belum mantap, ketersediaan pasokan listrik yang stabil dan menjangkau

seluruh wilayah potensial, serta jaringan telekomunikasi dan internet yang handal merupakan prasyarat dasar yang seringkali menjadi pertimbangan utama investor.

Selain itu, ketersediaan tenaga kerja lokal dengan keterampilan spesifik yang dibutuhkan oleh industri atau sektor investasi tertentu juga masih terbatas. Upaya promosi investasi yang lebih strategis, terarah pada sektor unggulan, dan menyediakan data potensi yang akurat serta informasi kemudahan berinvestasi perlu ditingkatkan. Perlu dirumuskan kebijakan yang terintegrasi antara perbaikan iklim usaha, percepatan pembangunan infrastruktur prioritas, pengembangan SDM, dan strategi promosi investasi yang efektif.

Tabel 2.151. Masalah dan Akar Masalah Investasi

Masalah	Akar Masalah	Lingkup Urusan
Realisasi investasi belum optimal.	Potensi ekonomi daerah tak termanfaatkan sepenuhnya.	Penanaman Modal, Pekerjaan Umum
Iklim kemudahan berusaha (EoDB) perlu perbaikan.	Prosedur perizinan rumit; kurang transparansi.	
Infrastruktur pendukung tidak memadai.	Jalan masih kurang baik; pasokan listrik/telekomunikasi tidak stabil.	
Ketersediaan tenaga kerja terampil terbatas.	Keterampilan spesifik industri kurang,	
Promosi investasi belum strategis.	Data potensi tidak akurat; informasi kemudahan berinvestasi minim.	

6) Permasalahan Pemerataan dan Kesejahteraan Sosial

Meskipun indikator makro seperti persentase penduduk miskin (5,67% pada tahun 2024) dan Indeks Gini (0,269 pada tahun 2024) menunjukkan kondisi ketimpangan yang relatif rendah dan stabil, masih perlu diidentifikasi berbagai permasalahan mendasar terkait pemerataan akses terhadap sumber daya, kerentanan sosial, dan efektivitas program kesejahteraan.

Nilai indeks kedalaman kemiskinan ($P1=0,89$) dan indeks keparahan kemiskinan ($P2=0,22$) pada tahun 2024 menunjukkan bahwa kelompok masyarakat miskin masih menghadapi kesulitan signifikan untuk meningkatkan taraf hidupnya serta rentan terhadap guncangan ekonomi maupun sosial. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Barito Utara pada tahun 2024 mencapai sekitar 7,6 ribu jiwa, sedikit menurun dibandingkan tahun 2022 yang sebesar 7,7 ribu jiwa. Namun demikian, penurunan ini belum diikuti oleh peningkatan signifikan dalam kualitas hidup dan ketahanan sosial-ekonomi rumah tangga miskin.

Selain itu, jumlah PMKS dalam berbagai kategori, seperti fakir miskin, lansia terlantar, penyandang disabilitas, dan anak terlantar, masih cukup besar, sementara penanganannya belum optimal. Kendala utama mencakup keterbatasan data sasaran yang akurat dan terpadu (DTKS), keterbatasan anggaran dan jumlah tenaga pendamping sosial, serta kurangnya sinergi dan integrasi antarprogram perlindungan sosial dan pemberdayaan di berbagai SKPD maupun dengan pihak non-pemerintah.

Di tingkat perdesaan, partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan masih perlu diperkuat. Kualitas kelembagaan ekonomi, seperti Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), masih bervariasi dan belum semuanya mampu berfungsi sebagai motor penggerak ekonomi desa yang efektif.

Penguatan kapasitas aparatur pemerintah desa dalam hal perencanaan partisipatif, pengelolaan keuangan desa yang transparan dan akuntabel, serta penyelenggaraan pelayanan publik dasar di tingkat desa menjadi sangat krusial. Oleh karena itu, perlu memastikan adanya strategi yang komprehensif untuk meningkatkan akurasi data sasaran program sosial, memperkuat sinergi antarprogram pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial, mendorong pemberdayaan ekonomi kelompok rentan, serta meningkatkan kapasitas dan partisipasi masyarakat desa secara berkelanjutan.

Tabel 2.152. Masalah dan Akar Masalah Pemerataan dan Kesejahteraan Sosial

Masalah	Akar Masalah	Lingkup Urusan
Pemerataan akses sumber daya belum merata dan jumlah penduduk miskin masih tinggi.	Indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan masih tinggi.	Sosial, Perencanaan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat
Kerentanan sosial kelompok PMKS (fakir miskin, lansia, disabilitas).	Data sasaran DTKS tidak akurat; anggaran/SDM pendamping terbatas.	
Kurang sinergi program perlindungan sosial.	Integrasi antar-SKPD dan non-pemerintah lemah.	
Partisipasi masyarakat desa rendah.	Perencanaan partisipatif kurang.	
Kapasitas aparatur pemerintah perlu ditingkatkan.	Pengelolaan keuangan kurang transparan; pelayanan dasar lemah.	

2.6.1.10. Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Berbasis Teknologi Informasi

Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean governance*) masih menghadapi sejumlah tantangan di daerah. Meskipun reformasi birokrasi dan

transformasi digital telah menjadi agenda nasional, implementasinya di tingkat daerah belum sepenuhnya optimal. Beberapa permasalahan yang masih dihadapi seperti tersaji pada Tabel 2.153.

Tabel 2.153. Masalah dan Akar Masalah Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Berbasis Teknologi Informasi di Kabupaten Barito Utara

Masalah	Akar Masalah	Urusan
OPD masih kesulitan memahami teknis Pedoman Penyusunan Laporan Monitoring dan Evaluasi	• Keterbatasan kapasitas sumber daya manusia di bidang perencanaan dan evaluasi • Kurangnya pelatihan dan pendampingan teknis yang berkelanjutan • Pedoman yang bersifat kompleks dan belum disertai contoh yang aplikatif • Belum optimalnya koordinasi antara perangkat daerah pengampu perencanaan dan OPD pelaksana • Keterbatasan pemanfaatan sistem informasi monitoring dan evaluasi berbasis digital	Perencanaan pembangunan daerah
Ketidaksesuaian indikator kinerja OPD dengan capaian tujuan Pembangunan Berkelanjutan	• Belum optimalnya proses integrasi SDGs ke dalam sistem perencanaan daerah • Kurangnya pemahaman teknis aparatur mengenai konsep dan indikator SDGs • Belum adanya pedoman teknis integrasi indikator SDGs dalam dokumen perencanaan daerah yang seragam dan operasional • Kualitas data indikator pembangunan masih terbatas • Koordinasi lintas perangkat daerah belum berjalan efektif • Focus perencanaan OPD masih cenderung berbasis <i>output</i>, bukan <i>outcome</i> atau dampak	Perencanaan pembangunan daerah
Belum terdatanya Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)	• Belum ada mekanisme pengumpulan data IPAK di tingkat daerah • Keterbatasan koordinasi antara pemerintah daerah dan lembaga penghasil data (BPS, KPK, KemenPAN-RB) • Minimnya pemahaman aparatur daerah terhadap	• Inspektorat daerah • Perencanaan daerah • Sekretariat daerah • DiskominfoSandi



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Tahun 2025-2029**

Masalah	Akar Masalah	Urusan
	indikator dan metodologi pengukuran IPAK • Belum terintegrasi nilai-nilai integritas dan anti korupsi dalam program pembangunan daerah • Keterbatasan anggaran dan SDM dalam pelaksanaan survei atau kajian perilaku masyarakat • Belum adanya kebijakan daerah yang mendorong penguatan sistem integritas dan pengukuran perilaku anti korupsi	
Lemahnya perencanaan strategis SPBE, teknologi informasi dan komunikasi, penyelenggara SPBE, penerapan manajemen SPBE, dan pelaksanaan audit TIK	• Kebijakan manajemen keamanan informasi hanya secara umum dan cakupannya belum menguraikan secara detail sebagaimana turunan dari Peraturan BSSN No. 4 Tahun 2021 dimana Pemda harus memiliki pengaturan sendiri • Rencana dan anggaran SPBE hanya dikonsultasikan sebagian kepada perangkat pengelola TIK • Inovasi proses bisnis SPBE belum dilakukan sebagai bentuk perbaikan • Pembangunan aplikasi SPBE belum menerapkan siklus pembangunan aplikasi • Penggunaan sistem penghubung layanan belum ada • Layanan pusat data hanya dimanfaatkan oleh sebagian perangkat daerah • Tim koordinasi SPBE telah ditetapkan, namun seluruh tugas dan program belum dilaksanakan • Penerapan manajemen keamanan informasi belum memiliki pedoman atau standar yang diacu • Dokumentasi penerapan manajemen asset TIK belum ada • Pemenuhan kompetensi SDM belum diterapkan	• Diskominfo

Masalah	Akar Masalah	Urusan
	- Penerapan manajemen risiko SPBE tidak mengacu pada pedoman yang telah ditetapkan, hanya berupa SOP dan tata cara - Audit infrastruktur, aplikasi, dan keamanan SPBE belum dilakukan.	

2.6.1.11. Permasalahan Lingkungan Hidup

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) di Kabupaten Barito Utara menunjukkan nilai yang cukup fluktuatif. Berdasarkan capaian komponen penyusun, nilai Indeks Kualitas Air merupakan komponen dengan nilai terendah. Hal ini diakibatkan oleh pencemaran air yang dilakukan oleh industri serta sektor ekstraktif. Selain itu, aktivitas masyarakat yang mencemari aliran sungai turut berkontribusi pada capaian Indeks Kualitas Air. Sementara itu, komponen lainnya, seperti Indeks Kualitas Udara dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan menunjukkan capaian yang lebih baik. Walaupun demikian, persoalan terkait pencemaran lingkungan masih menjadi masalah yang dihadapi di Kabupaten Barito Utara.

Permasalahan lingkungan hidup di Kabupaten Barito Utara merupakan isu krusial yang terutama dipicu oleh dua faktor utama: dampak musiman dan dampak kegiatan ekstraktif, meskipun IKLH daerah ini secara umum berada di kategori BAIK (75,93 di tahun 2024), Tantangan terbesar yang bersifat musiman adalah kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), yang hampir setiap tahun terjadi, terutama saat musim kemarau. Karhutla ini secara langsung menurunkan Indeks Kualitas Udara (IKU) secara drastis, menyebabkan kabut asap lintas batas, gangguan kesehatan (terutama ISPA), serta degradasi fungsi lahan hutan yang vital bagi kawasan *Heart of Borneo*.

Sementara itu, dampak struktural muncul dari kegiatan ekonomi utama, khususnya pertambangan batubara dan emas skala kecil/tanpa izin (PETI), yang secara konsisten menimbulkan keluhan masyarakat terkait pencemaran air Sungai Barito. Aktivitas pertambangan disinyalir melepaskan limbah yang meningkatkan kekeruhan (TSS) dan berpotensi mengubah kualitas air, sehingga mengganggu sektor perikanan dan pertanian irigasi warga, seperti yang disoroti dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPRD mengenai dugaan pencemaran oleh beberapa perusahaan tambang.

Isu lingkungan diperparah oleh masalah tata ruang, di mana tumpang tindih status kawasan hutan dengan lahan garapan masyarakat dan pembangunan infrastruktur

menghambat upaya rehabilitasi dan pengelolaan lingkungan berkelanjutan, menjadikannya tantangan kompleks antara ambisi pembangunan ekonomi dan kewajiban konservasi sebagai bagian dari "Paru-paru Dunia."

Permasalahan lingkungan hidup di Kabupaten Barito Utara hingga tahun 2024 masih menjadi isu strategis yang memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak, baik pemerintah daerah, dunia usaha, maupun masyarakat. Sebagai wilayah yang termasuk dalam kawasan Jantung Kalimantan (*Heart of Borneo*), Kabupaten Barito Utara memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem hutan tropis dan sistem hidrologi Pulau Kalimantan. Namun, tekanan terhadap lingkungan akibat aktivitas manusia, terutama dari sektor pertambangan, perkebunan, dan kehutanan, telah menimbulkan berbagai permasalahan ekologis yang kompleks.

Salah satu persoalan utama adalah deforestasi dan degradasi hutan. Aktivitas pembukaan lahan untuk pertambangan batubara dan perkebunan kelapa sawit telah menyebabkan berkurangnya tutupan hutan alam, terutama di Kecamatan Gunung Timang, Kecamatan Lahei, dan Kecamatan Teweh Timur. Meskipun sebagian wilayah ditetapkan sebagai kawasan lindung dan hutan produksi terbatas, praktik eksploitasi berlebihan serta lemahnya pengawasan masih menimbulkan kerusakan lahan, erosi, dan sedimentasi sungai. Dampak lanjutannya adalah menurunnya kualitas daerah tangkapan air (*catchment area*) dan meningkatnya frekuensi banjir di daerah hilir, terutama di kawasan Muara Teweh dan sekitarnya.

Selain itu, pencemaran air sungai menjadi masalah serius. Sungai Barito yang merupakan sumber utama air baku dan jalur transportasi utama, mengalami tekanan akibat buangan limbah rumah tangga, pertambangan, dan kegiatan industri. Air sungai di beberapa titik menunjukkan peningkatan kadar *Total Suspended Solid* (TSS) dan logam berat seperti Fe dan Mn yang melebihi baku mutu lingkungan. Kondisi ini diperburuk oleh minimnya fasilitas pengolahan air limbah domestik serta rendahnya kesadaran masyarakat dalam membuang sampah dan limbah secara benar.

Permasalahan sampah dan limbah padat juga semakin menonjol seiring dengan pertumbuhan penduduk dan urbanisasi. Data tahun 2023 menunjukkan timbunan sampah harian mencapai 65,30 ton, dengan komposisi terbesar berasal dari rumah tangga (47%) dan pasar (35,64%). Dari jumlah tersebut, hanya sekitar 50% yang berhasil tertangani melalui sistem pengangkutan dan pembuangan ke TPA, sementara sisanya menumpuk di lingkungan

permukiman dan sungai. Kondisi TPA di Muara Teweh sendiri masih menggunakan sistem *open dumping*, yang berpotensi menimbulkan pencemaran tanah, air tanah, dan udara akibat gas metana serta lindi yang tidak terkelola dengan baik.

Selain isu sampah, penurunan kualitas udara juga menjadi perhatian terutama pada musim kemarau. Aktivitas pertambangan terbuka, pembakaran lahan, serta emisi kendaraan di kawasan perkotaan menyebabkan peningkatan partikulat debu (PM10) dan asap, yang berdampak pada kesehatan masyarakat. Meskipun Indeks Kualitas Udara (IKU) Kabupaten Barito Utara masih berada pada kategori “sedang”, tren penurunan nilai ini menunjukkan adanya tekanan yang perlu segera diatasi melalui penerapan teknologi ramah lingkungan dan pengawasan emisi yang ketat.

Masalah lain yang tidak kalah penting adalah kerusakan lahan dan penurunan keanekaragaman hayati. Banyaknya aktivitas alih fungsi lahan di kawasan hulu mengancam habitat satwa endemik seperti Owa Kalimantan (*Hylobates muelleri*) dan Burung Enggang (*Rhinoplax vigil*). Fragmentasi hutan mengakibatkan terganggunya koridor satwa liar dan meningkatnya konflik manusia–satwa, terutama di daerah perbatasan kawasan hutan produksi dan permukiman.

Di sisi lain, praktik reklamasi pascatambang yang belum optimal menyebabkan banyak areal bekas tambang terbengkalai dan menjadi sumber erosi serta pencemaran logam berat. Permasalahan lingkungan hidup di Kabupaten Barito Utara juga diperparah oleh minimnya infrastruktur pengelolaan lingkungan dan kapasitas kelembagaan daerah. Jumlah tenaga teknis lingkungan dan sarana laboratorium uji kualitas air, udara, serta tanah masih terbatas. Koordinasi antarinstansi dalam pengawasan izin lingkungan dan penegakan hukum juga belum optimal.

Sementara itu, kesadaran masyarakat dalam penerapan prinsip *reduce*, *reuse*, dan *recycle* (3R) masih rendah, sehingga partisipasi dalam pengelolaan sampah dan konservasi lingkungan belum maksimal. Secara keseluruhan, permasalahan lingkungan hidup di Kabupaten Barito Utara bersifat multidimensi (mencakup aspek ekologi, sosial, ekonomi, dan kelembagaan). Jika tidak dikelola dengan pendekatan terpadu dan berbasis ekoregion, kerusakan lingkungan berpotensi menurunkan IKLH daerah dan menghambat pencapaian pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan langkah strategis seperti rehabilitasi hutan dan lahan kritis, peningkatan kapasitas pengelolaan limbah, penerapan teknologi bersih di sektor pertambangan, serta penguatan peran masyarakat dalam konservasi sumber daya

alam. Upaya ini akan menjadi kunci dalam menjaga keseimbangan ekologis Kabupaten Barito Utara sebagai bagian penting dari kawasan paru-paru dunia (Heart of Borneo).

Tabel 2.154. Permasalahan Lingkungan Hidup Utama Kabupaten Barito Utara

No.	Isu Lingkungan Utama	Aspek yang Terdampak	Data Aktual & Keterangan
I. Kualitas Air dan Pencemaran			
1	Dugaan Pencemaran Air Sungai	Kualitas air baku, Kesehatan masyarakat, Pertanian, Perikanan.	Terdapat laporan dan keluhan masyarakat (misalnya di Kecamatan Lahei dan Lahei Barat) mengenai dugaan pencemaran air sungai Barito akibat aktivitas perusahaan tambang batubara
2	Dampak PETI (Pertambangan Emas Tanpa Izin)	Degradasi sungai, Kerusakan lahan bantaran, Peningkatan TSS (Total Padatan Tersuspensi).	Aktivitas PETI (terutama di sepanjang Sungai Barito) secara langsung menyebabkan pengikisan lahan, peningkatan kekeruhan air, dan potensi limbah bahan kimia yang mengancam IKA (Indeks Kualitas Air).
II. Kualitas Udara dan Tutupan Lahan			
3	Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla)	Kualitas Udara, Kesehatan (ISPA), Keseimbangan iklim, Tutupan lahan.	Bencana musiman yang terjadi hampir setiap tahun. Meskipun data harian fluktuatif, Karhutla secara periodik (terutama musim kemarau) menyebabkan penurunan drastis IKU (Indeks Kualitas Udara) dan menghasilkan kabut asap. Contoh: Kebakaran lahan di Kecamatan Teweh Selatan dan Montallat.
4	Isu Tutupan Lahan (Deforestasi)	Keanekaragaman hayati, Fungsi kawasan Heart of Borneo, Penurunan IKL (Indeks Kualitas Lahan).	Meskipun IKLH Barito Utara secara keseluruhan BAIK (75,93 di 2024), tekanan terhadap tutupan lahan tetap ada, terutama karena konflik tata ruang dan perluasan aktivitas ekstraktif yang mengancam hutan sebagai paru-paru dunia.
III. Pengelolaan Sampah dan Limbah			
5	Komposisi Sampah	Efisiensi pengelolaan TPA, Potensi daur ulang.	Mayoritas komposisi sampah didominasi oleh Sisa Makanan (34%) dan Plastik (20%), menunjukkan tantangan besar dalam pengelolaan sampah organik dan non-organik di TPA.
6	Pengelolaan Limbah B3 Tambang	Kualitas tanah dan air.	Terdapat pengawasan intensif oleh DPRD terhadap perusahaan tambang untuk memastikan transparansi pengelolaan limbah B3 dan pembuangan limbah cair yang sesuai dengan AMDAL dan perizinan.

Laporan IKPLHD Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Barito Utara, 2024.

Tabel 2.155. Kondisi Aktual Permasalahan Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Utara Tahun 2024

No	Aspek Lingkungan	Kondisi Aktual (2024)	Permasalahan Utama	Dampak terhadap Lingkungan & Masyarakat	Sumber Data & Keterangan
1	Kualitas Hutan dan Tutupan Lahan	Tutupan hutan menurun dari $\pm 82\%$ (2010) menjadi $\pm 70\%$ (2024). Sebagian hutan	• Deforestasi akibat pembukaan lahan tambang dan sawit	• Hilangnya keanekaragaman hayati • Erosi dan sedimentasi meningkat	KLHK, HoB Indonesia (2023), DLH Barito Utara (2024).



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029

No	Aspek Lingkungan	Kondisi Aktual (2024)	Permasalahan Utama	Dampak terhadap Lingkungan & Masyarakat	Sumber Data & Keterangan
		berubah menjadi area tambang dan perkebunan.	- Lemahnya pengawasan dan penegakan izin lingkungan - Minimnya rehabilitasi pascatambang.	Konflik satwa dan manusia.	
2	Kualitas Air Permukaan (Sungai Barito & Anak Sungai)	Parameter TSS, Fe, Mn, dan COD melebihi baku mutu pada beberapa titik pengamatan.	- Limbah pertambangan dan domestik belum terolah - Penambangan di bantaran sungai tanpa pengendalian sedimen. - Pembuangan sampah langsung ke sungai.	- Penurunan kualitas air baku PDAM - Risiko penyakit kulit dan pencernaan meningkat - Ekosistem perairan terganggu.	Dinas LH Kalteng (2024), PDAM Muara Teweh.
3	Kualitas Udara Ambien	Nilai ISPU rata-rata kategori "Sedang" (PM10 = 65 µg/m ³ , SO ₂ = 13 µg/m ³).	- Emisi dari aktivitas tambang terbuka dan kendaraan berat - Pembakaran lahan pada musim kemarau - Tidak adanya sistem pemantauan udara otomatis (SPKU).	- Gangguan pernapasan pada masyarakat - Penurunan estetika kota akibat debu tambang.- Kontribusi terhadap pemanasan global.	KLHK – SIPSN & ISPU Online (2024).
4	Sampah dan Limbah Padat	Timbulan sampah harian 65,30 ton/hari. Komposisi: sisa makanan (34%), plastik (20%), kayu/ranting (12%).	- TPA masih sistem open dumping - Belum ada TPST terpadu - Minim bank sampah di desa.	- Pencemaran tanah dan air lindi - Gas metana dari dekomposisi sampah - Estetika kota menurun.	SIPSN KLHK (2024), DLH Barito Utara.
5	Limbah Cair dan Industri	Instalasi pengolahan air limbah (IPAL) hanya ada di RSUD dan sebagian hotel.	- Tidak ada sistem sewerage perkotaan - Limbah domestik langsung dibuang ke parit/sungai. - Kurangnya regulasi teknis pengolahan limbah rumah tangga.	- Meningkatnya pencemaran air permukaan - Potensi penyakit menular meningkat.	DLH Kabupaten Barito Utara (2023).
6	Lahan Kritis dan Erosi	Luas lahan kritis ±14.500 ha (Data DAS Barito Hulu).	- Penambangan tanpa reklamasi - Alih fungsi hutan lindung	- Banjir dan longsor meningkat - Produktivitas tanah menurun. - Kerusakan jalan dan permukiman di lereng.	BPDAS Barito (2023).

No	Aspek Lingkungan	Kondisi Aktual (2024)	Permasalahan Utama	Dampak terhadap Lingkungan & Masyarakat	Sumber Data & Keterangan
			Minim kegiatan penghijauan masyarakat.		
7	Biodiversitas dan Kawasan Konservasi	Habitat satwa endemik seperti owa Kalimantan, trenggiling, dan enggang terfragmentasi.	- Fragmentasi hutan akibat jalan tambang dan perkebunan - Perburuan liar masih terjadi - Kelemahan sistem patroli kawasan.	- Penurunan populasi satwa langka - Ketidakseimbangan ekosistem alami.	WWF–Heart of Borneo Report (2023).
8	Pencemaran Tanah	Kandungan logam berat (Fe, Mn, Hg) di area eks-tambang melebihi ambang batas normal.	- Limbah tailing tidak dikelola - Belum ada remediasi lahan pascatambang - Kurangnya pengawasan perusahaan.	- Menurunkan kesuburan tanah - Mencemari air tanah dan tanaman pangan.	KLHK Direktorat Jenderal PPKL (2023).
9	Perubahan Iklim dan Kebakaran Lahan	Rata-rata suhu meningkat 0,7°C dalam 10 tahun terakhir. Titik panas meningkat pada musim kemarau (Juli–Oktober).	- Pembakaran lahan untuk kebun sawit dan pertanian - Keringnya gambut di daerah Lahei dan Teweh Timur - Minimnya sumur bor pemadam.	- Kabut asap lintas wilayah - Gangguan kesehatan dan transportasi udara - Penurunan hasil pertanian.	BMKG Palangka Raya, KLHK SIPONGI (2024).
10	Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat	Kelembagaan lingkungan masih terbatas pada DLH dan beberapa UPT. Tingkat partisipasi masyarakat rendah.	- Keterbatasan SDM teknis dan anggaran lingkungan. - Koordinasi antar instansi lemah.-Edukasi publik belum masif.	- Pengawasan lingkungan tidak efektif. - Program 3R tidak berjalan optimal. - Rendahnya kepedulian konservasi.	DLH Barito Utara (2024), RPJMD 2024–2026.

Sumber: KLHK, BPS, dan laporan daerah lingkungan hidup (2020–2024).

Secara keseluruhan, kondisi lingkungan di Kabupaten Barito Utara menunjukkan tekanan yang meningkat akibat eksploitasi sumber daya alam dan lemahnya sistem pengelolaan lingkungan. Tantangan terbesar berada pada sektor sampah, air sungai, dan deforestasi, yang berdampak langsung pada penurunan IKLH.

Upaya pemulihan memerlukan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha melalui strategi konservasi berbasis kawasan *Heart of Borneo*, penerapan prinsip ekonomi hijau, dan peningkatan kapasitas kelembagaan daerah. Fluktuasi IKLH menunjukkan nilai yang cukup fluktuatif. Berdasarkan capaian komponenn penyusun, nilai Indeks Kualitas Air

merupakan komponen dengan nilai terendah. Hal ini diakibatkan oleh pencemaran air yang dilakukan oleh industri serta sektor ekstraktif.

Selain itu, aktivitas masyarakat yang mencemari aliran sungai turut berkontribusi pada capaian indeks kualitas air. Sementara itu, komponen lainnya, seperti indeks kualitas udara dan indeks kualitas tutupan lahan menunjukkan capaian yang lebih baik. Walaupun demikian, persoalan terkait pencemaran lingkungan masih menjadi masalah yang dihadapi oleh Kabupaten Barito Utara.

Tabel 2.156. Masalah dan Akar Masalah Kualitas Lingkungan Hidup

Masalah	Akar masalah	Urusan
Tingginya tingkat pencemaran sungai	Minimnya <i>law enforcement</i> terhadap aktivitas ekonomi, terutama pertambangan yang merusak sungai	Lingkungan Hidup
	Ketidaksinkronan dokumen penentuan area pembuangan limbah dengan pemanfaatan sungai oleh masyarakat	
	Keterbatasan pengelolaan limbah industri dan rumah tangga yang terintegrasi secara optimal	
Keberadaan kasus kebakaran hutan	Aktivitas pembakaran hutan secara sengaja untuk pembukaan lahan atau ladang akibat minimnya pengawasan	
Minimnya pengawasan dan penegakan upaya restorasi lingkungan melalui upaya reklamasi dan aktivitas pasca tambang	Adanya celah penyelewengan kewajiban pasca tambang yang termuat dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara yang Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan	
	Kurang optimalnya peran Tim Pengawas Reklamasi dan Pascatambang tingkat provinsi dan kabupaten/kota	

Kepatuhan Pelaksanaan Reklamasi Pasca Tambang

Tingginya aktivitas di sektor pertambangan dan penggalan masih tidak diikuti dengan pelaksanaan reklamasi pasca tambang guna mengembalikan fungsi lahan. Adanya celah regulasi dan rendahnya pengawasan menyebabkan adanya peluang bagi perusahaan untuk tidak mematuhi regulasi yang ada. Oleh karenanya, ini berakibat pada rusaknya bentang alam akibat aktivitas pertambangan dan penggalan serta penurunan daya dukung lingkungan untuk pembangunan.

Tabel 2.157. Masalah dan Akar Masalah Pertambangan

Masalah	Akar masalah	Urusan
Ketidakpatuhan perusahaan terhadap regulasi yang mengatur aktivitas kegiatan penambangan dan paca tambang	Adanya celah penyelewengan kewajiban pasca tambang yang termuat dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara yang Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan	Energi dan Sumber Daya Mineral
Minimnya pengawasan pasca tambang	Sejumlah laporan aktivitas pasca tambang bersifat <i>self-reported</i> oleh perusahaan	
	Kurang optimalnya peran Tim Pengawas Reklamasi dan Pascatambang tingkat provinsi dan kabupaten/kota	

Aktivitas Perkebunan dan Industri Kelapa Sawit yang Tidak Sesuai dengan Tata Kelola Lahan

Beberapa persoalan tata kelola lahan terkait perkebunan kelapa sawit mencakup aktivitas perkebunan kelapa sawit ilegal yang sulit diidentifikasi dan merusak lingkungan dan penetapan ijin perkebunan kelapa sawit yang tumpang tindih dengan lahan milik masyarakat. Kemudian, aktivitas pembuangan limbah kelapa sawit secara sembarang juga masih ditemukan akibat rendahnya pengawasan dan penegakan hukum.

Tabel 2.158. Masalah dan Akar Masalah Perkebunan dan Industri Kelapa Sawit

Masalah	Akar masalah	Urusan
Tumpang tindih perizinan lahan	Ketidaksinkronan data acuan penentuan izin penggunaan lahan	Pertanian
Aktivitas perkebunan sawit ilegal	Minimnya pengawasan dan <i>political will</i> dalam mengentaskan aktivitas perkebunan sawit <i>illegal</i>	
Aktivitas pembuangan limbah industri kelapa sawit secara sembarang	Minimnya regulasi dan <i>enforcement</i> terkait pengelolaan limbah kelapa sawit	

Isu lingkungan di Kabupaten Barito Utara menunjukkan tantangan yang serius, utamanya disebabkan oleh interaksi antara kondisi geografis, aktivitas ekonomi ekstraktif, dan rendahnya kesadaran publik, yang secara kolektif mengancam fungsi daerah sebagai bagian dari *Heart of Borneo* (paru-paru dunia). Ancaman bencana, kerusakan ekologis, dan pencemaran permasalahan lingkungan hidup di Barito Utara diawali dengan ancaman bencana berulang, yaitu banjir dan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla).

Bencana banjir sering terjadi karena wilayah ini dilewati oleh aliran Sungai Barito yang besar, diperparah oleh adanya wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS) kritis yang mengalami degradasi fungsi, sehingga daya tampung dan serapan air berkurang. Sebaliknya, saat musim kemarau, karhutla rutin terjadi, menurunkan Indeks Kualitas Udara (IKU) secara drastis, memicu penyakit pernapasan, dan mengakibatkan kerugian ekologis-ekonomis.

Ancaman bencana ini diperparah oleh potensi terjadinya bencana akibat anomali cuaca, dimana perubahan iklim global menghasilkan fluktuasi curah hujan ekstrem yang meningkatkan intensitas banjir dan kemarau panjang yang memperluas risiko karhutla. Secara spesifik, kualitas lingkungan terancam oleh terjadinya pencemaran air dan udara. Pencemaran air utamanya berasal dari limbah kegiatan ekstraktif (pertambangan), termasuk penambangan ilegal (PETI) yang melepaskan sedimen, logam berat, dan lumpur ke sungai. Sementara itu, pencemaran udara, selain dari karhutla, juga timbul dari emisi kendaraan dan aktivitas industri yang tidak terkontrol.

Tekanan ekstraktif dan degradasi lahan terhadap kawasan hutan dan lahan Barito Utara sangat tinggi. Masih belum optimalnya upaya pencegahan penebangan liar dan penambangan ilegal menjadi motor utama terjadinya degradasi lahan. Penebangan liar dan PETI menyebabkan hilangnya tutupan hutan secara cepat, erosi, dan meninggalkan lubang-lubang bekas galian yang membahayakan. Aktivitas ilegal ini tidak hanya merusak ekosistem hutan dan gambut yang berfungsi sebagai penyimpan karbon, tetapi juga berkontribusi langsung pada kondisi DAS kritis, mengurangi kemampuan lahan untuk menahan air dan memicu terjadinya Karhutla saat kemarau.

Di sisi perkotaan dan permukiman, tantangan muncul dari belum optimalnya upaya untuk pengelolaan sampah. Dengan dominasi sampah organik dan plastik, kurangnya fasilitas dan sistem pemilahan yang memadai mengakibatkan volume sampah di TPA terus meningkat, membebani lingkungan, dan berpotensi mencemari air tanah.

Semua permasalahan di atas diperparah oleh faktor sosial, yaitu rendahnya kesadaran masyarakat terhadap kelestarian lingkungan. Perilaku tradisional seperti membuka lahan dengan cara membakar (yang menjadi pemicu karhutla), kurangnya kepatuhan terhadap regulasi pembuangan limbah, dan minimnya partisipasi aktif dalam program pengelolaan sampah, menunjukkan bahwa upaya konservasi dan penegakan hukum perlu diimbangi dengan peningkatan edukasi dan partisipasi publik secara masif.

Permasalahan Lingkungan di wilayah Kabupaten Barito Utara:

1) Adanya bahaya bencana banjir dan kebakaran hutan dan lahan

Kabupaten Barito Utara merupakan wilayah dengan kondisi topografi bervariasi antara dataran rendah dan perbukitan, dilalui oleh Sungai Barito dan anak-anak sungainya. Dalam beberapa tahun terakhir, bencana banjir semakin sering terjadi terutama di Kecamatan Teweh Tengah, Lahei, dan Gunung Timang akibat curah hujan tinggi serta menurunnya daya serap tanah. Penurunan tutupan hutan di daerah hulu dan sistem drainase yang belum terintegrasi menjadi penyebab utama meluasnya genangan. Sebaliknya, pada musim kemarau panjang, wilayah ini rentan mengalami kebakaran hutan dan lahan (karhutla), khususnya pada lahan gambut dan semak belukar di Kecamatan Lahei dan Teweh Timur. Aktivitas pembukaan lahan dengan cara pembakaran masih sering dilakukan oleh masyarakat dan perusahaan kecil, memperparah kondisi kabut asap yang mengganggu kualitas udara dan kesehatan masyarakat.

2) Terdapat potensi terjadinya bencana akibat anomali cuaca

Fenomena anomali cuaca akibat perubahan iklim global mulai terasa nyata di Barito Utara. Pola musim yang tidak menentu menyebabkan pergeseran waktu tanam dan panen serta peningkatan intensitas curah hujan ekstrem dalam waktu singkat. Pada periode 2020–2024, data BMKG menunjukkan peningkatan suhu rata-rata hingga 0,7°C dibandingkan dekade sebelumnya. Perubahan ini tidak hanya berimplikasi terhadap produktivitas pertanian, tetapi juga memperbesar risiko bencana hidrometeorologi seperti banjir bandang, kekeringan ekstrem, dan longsor di daerah perbukitan. Akibatnya, masyarakat di pedesaan yang bergantung pada sektor pertanian dan perkebunan menjadi kelompok paling rentan terhadap dampak perubahan iklim tersebut.

3) Terjadinya pencemaran air dan udara

Kualitas lingkungan di Kabupaten Barito Utara menunjukkan tren penurunan terutama pada aspek air dan udara. Sungai Barito sebagai sumber air utama telah tercemar oleh aktivitas pertambangan batu bara, pembuangan limbah domestik, serta sampah rumah tangga yang tidak tertangani. Parameter kualitas air seperti TSS, Fe, dan Mn di beberapa titik pemantauan telah melampaui ambang batas baku mutu lingkungan. Di

sisi lain, kualitas udara juga menurun akibat emisi dari kendaraan bermotor, aktivitas tambang terbuka, dan pembakaran lahan. Pada musim kemarau, partikulat debu (PM10) meningkat signifikan hingga melebihi $65 \mu\text{g}/\text{m}^3$. Kondisi ini tidak hanya menurunkan nilai estetika dan kenyamanan lingkungan, tetapi juga berisiko menimbulkan penyakit pernapasan dan memperburuk kualitas hidup masyarakat perkotaan.

4) Terdapat wilayah DAS kritis yang harus dipulihkan

Kabupaten Barito Utara termasuk dalam wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS) Barito Hulu, yang memiliki fungsi ekologis vital sebagai daerah tangkapan air bagi Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan. Namun, kegiatan penebangan, pertambangan, serta alih fungsi hutan telah menyebabkan meningkatnya luas lahan kritis di daerah hulu DAS, terutama di Kecamatan Gunung Purei dan Gunung Timang. Erosi dan sedimentasi sungai menjadi permasalahan utama yang mengakibatkan pendangkalan Sungai Barito dan anak sungainya. Akibatnya, kapasitas tampung sungai menurun dan risiko banjir meningkat. Pemulihan kawasan DAS kritis menjadi prioritas strategis daerah, termasuk melalui program rehabilitasi hutan, reboisasi, serta pengembangan sistem agroforestry di lahan masyarakat.

5) Belum optimalnya upaya pencegahan penebangan liar

Meskipun pemerintah daerah telah melakukan pengawasan dan sosialisasi, praktik penebangan liar (illegal logging) masih terjadi di beberapa wilayah pedalaman, terutama di kawasan hutan produksi terbatas dan hutan lindung. Kegiatan ini dilakukan oleh individu maupun kelompok dengan memanfaatkan lemahnya pengawasan di lapangan dan luasnya wilayah hutan yang sulit dijangkau. Dampaknya sangat signifikan terhadap degradasi hutan, hilangnya habitat satwa liar, serta terganggunya fungsi ekosistem. Upaya pencegahan belum optimal karena keterbatasan personel pengawasan, sarana patroli, serta minimnya alternatif mata pencaharian bagi masyarakat sekitar hutan yang masih bergantung pada hasil kayu.

6) Belum optimalnya upaya pencegahan penambangan ilegal

Aktivitas penambangan tanpa izin (PETI) masih menjadi permasalahan lingkungan yang cukup serius, terutama untuk komoditas batu bara dan bahan galian golongan C seperti pasir dan batu. Kegiatan ini sering dilakukan tanpa kajian lingkungan (AMDAL

atau UKL-UPL) dan tanpa reklamasi pascatambang, sehingga menimbulkan kerusakan lahan dan pencemaran air. Lumpur dan sedimen dari lokasi tambang masuk ke badan sungai, menyebabkan kekeruhan dan menurunkan kualitas air Sungai Barito. Di sisi lain, lemahnya penegakan hukum serta kurangnya koordinasi antara instansi teknis daerah dan aparat penegak hukum membuat kegiatan PETI sulit diberantas sepenuhnya.

7) Terjadinya degradasi lahan

Degradasi lahan di Kabupaten Barito Utara semakin meluas seiring dengan meningkatnya kegiatan eksploitasi sumber daya alam dan perubahan penggunaan lahan. Area bekas tambang yang tidak direklamasi menyebabkan terbentuknya lahan kritis dan tidak produktif. Proses erosi juga mempercepat degradasi tanah di daerah perbukitan, terutama di wilayah Gunung Timang dan Teweh Timur. Penurunan kualitas tanah berdampak pada berkurangnya kesuburan lahan pertanian serta meningkatnya risiko banjir dan longsor. Dalam konteks jangka panjang, degradasi lahan akan mengancam daya dukung lingkungan dan keberlanjutan ekonomi berbasis sumber daya alam di daerah ini.

8) Belum optimalnya upaya untuk pengelolaan sampah

Sistem pengelolaan sampah di Barito Utara hingga kini belum berjalan optimal. Dari total timbulan sampah sekitar 65,30 ton per hari, hanya sekitar separuh yang berhasil diangkut ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Muara Teweh. Fasilitas pengelolaan seperti Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) dan bank sampah masih sangat terbatas, sementara TPA yang ada masih menggunakan sistem open dumping, tanpa pengelolaan lindi dan gas metana yang memadai. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam penerapan prinsip 3R (reduce, reuse, recycle) memperburuk kondisi ini. Akibatnya, banyak sampah rumah tangga dan pasar yang dibuang langsung ke sungai dan lahan terbuka, menimbulkan pencemaran dan menurunkan kualitas estetika kota.

9) Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap kelestarian lingkungan

Salah satu akar permasalahan lingkungan di Kabupaten Barito Utara adalah rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap upaya pelestarian lingkungan. Masih banyak masyarakat yang menganggap pengelolaan sampah, pencegahan kebakaran, atau rehabilitasi hutan sebagai tanggung jawab pemerintah

semata. Sosialisasi dan edukasi lingkungan hidup belum menyentuh seluruh lapisan masyarakat, terutama di daerah pedesaan dan kawasan terpencil. Minimnya gerakan masyarakat berbasis lingkungan, seperti kelompok sadar lingkungan (Pokdarling) atau bank sampah komunitas, menjadi tantangan tersendiri dalam mewujudkan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas masyarakat dan pembinaan berkelanjutan menjadi langkah kunci untuk membangun budaya sadar lingkungan yang kuat di tingkat lokal. Isu-isu lingkungan hidup di Kabupaten Barito Utara menunjukkan adanya tekanan besar terhadap keseimbangan ekosistem, daya dukung lingkungan, dan kualitas hidup masyarakat. Akar masalahnya meliputi lemahnya pengawasan sumber daya alam, minimnya infrastruktur pengelolaan lingkungan, serta rendahnya kesadaran publik. Dalam konteks kebijakan pembangunan berkelanjutan, pemerintah daerah perlu memperkuat implementasi program pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, rehabilitasi kawasan kritis, pengurangan risiko bencana, serta pemberdayaan masyarakat agar keseimbangan ekologis wilayah Barito Utara sebagai bagian dari *Heart of Borneo* tetap terjaga untuk jangka panjang.

Tabel 2.159. Permasalahan Lingkungan Hidup di Kabupaten Barito Utara

No	Permasalahan Lingkungan	Kondisi Aktual di Lapangan	Dampak Lingkungan dan Sosial	Lokasi Dominan/Wilayah Terdampak	Sumber/Referensi Data
1	Bencana banjir dan kebakaran hutan/lahan	Terjadi banjir tahunan di Kecamatan Teweh Tengah, Lahei, dan Gunung Timang akibat curah hujan tinggi dan penurunan tutupan hutan. Kebakaran lahan terjadi di musim kemarau (Agustus–Oktober) di wilayah Lahei dan Teweh Timur.	Kerusakan permukiman, terganggunya aktivitas ekonomi, menurunnya kualitas udara, dan peningkatan ISPA.	Kecamatan Teweh Tengah, Lahei, Teweh Timur	BPBD Barito Utara (2024), DLH Barito Utara (2023)
2	Potensi bencana akibat anomali cuaca	Perubahan iklim meningkatkan suhu rata-rata hingga 0,7°C dan menyebabkan ketidakpastian musim tanam.	Gagal panen, kekeringan, dan risiko banjir bandang meningkat.	Kecamatan Gunung Purei, Teweh Tengah	BMKG Kalimantan Tengah (2024), KLHK (2023)
3	Pencemaran air dan udara	Pencemaran Sungai Barito akibat limbah tambang dan domestik; kadar	Penurunan kualitas air baku, penyakit kulit dan pernapasan meningkat.	Sungai Barito, Teweh Tengah, Lahei	DLH Barito Utara (2023), KLHK (2024)

No	Permasalahan Lingkungan	Kondisi Aktual di Lapangan	Dampak Lingkungan dan Sosial	Lokasi Dominan/Wilayah Terdampak	Sumber/Referensi Data
		TSS dan Fe melebihi baku mutu. Kualitas udara menurun akibat debu tambang dan asap karhutla.			
4	Degradasi DAS dan kawasan kritis	Penurunan fungsi daerah tangkapan air di DAS Barito Hulu, luas lahan kritis meningkat di Gunung Timang dan Gunung Purei.	Sedimentasi sungai, erosi, dan berkurangnya debit air bersih.	DAS Barito Hulu, Gunung Purei	BPDAS Kahayan (2023), KLHK (2024)
5	Penebangan liar (illegal logging)	Masih terjadi penebangan liar di kawasan hutan produksi terbatas; pengawasan lapangan belum efektif.	Hilangnya keanekaragaman hayati dan degradasi hutan lindung.	Kecamatan Gunung Timang, Lahei Barat	Dinas Kehutanan Kalteng (2024), DLH Barito Utara
6	Penambangan tanpa izin (PETI)	Tambang batu bara dan pasir dilakukan tanpa izin di sepanjang DAS dan lahan masyarakat.	Kerusakan lahan, pencemaran air, dan konflik sosial.	Kecamatan Teweh Selatan, Teweh Timur	ESDM Prov. Kalteng (2023), DLH Barito Utara (2024)
7	Degradasi lahan	Lahan bekas tambang tidak direklamasi; erosi meningkat di daerah perbukitan.	Penurunan produktivitas pertanian dan risiko longsor meningkat.	Gunung Timang, Teweh Timur	KLHK (2024), DLH Barito Utara
8	Pengelolaan sampah belum optimal	Timbulan sampah ±65 ton/hari; hanya 50% diangkut ke TPA. TPA Muara Teweh masih open dumping.	Pencemaran tanah dan air, gangguan estetika, dan bau.	Muara Teweh, Teweh Tengah	DLH Barito Utara (2023), BPS (2024)
9	Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap kelestarian lingkungan	Partisipasi masyarakat masih rendah; minim program edukasi dan bank sampah aktif.	Kurangnya dukungan terhadap program lingkungan dan pengelolaan sampah.	Seluruh kecamatan, terutama pedesaan	DLH Barito Utara (2024), Bappeda Barito Utara (2023)

Tabel 2.160. Permasalahan, Indikator, dan Dampak Utama Permasalahan Lingkungan Kabupaten Barito Utara

No.	Permasalahan Lingkungan Utama	Indikator/Wujud Permasalahan Aktual	Dampak Utama
I	Ancaman Bencana dan Kerusakan Ekologis		
1	Bahaya Banjir dan Karhutla	Bencana berulang tahunan (terutama saat musim kemarau dan hujan ekstrem).	Penurunan IKU (Indeks Kualitas Udara), Gangguan kesehatan (ISPA), Kerusakan infrastruktur, Gangguan logistik.



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029

No.	Permasalahan Lingkungan Utama	Indikator/Wujud Permasalahan Aktual	Dampak Utama
2	Potensi Bencana Anomali Cuaca	Fluktuasi curah hujan ekstrem (kemarau panjang dan hujan lebat tiba-tiba).	Peningkatan intensitas dan frekuensi banjir, Perluasan area risiko Karhutla.
3	Terdapat Wilayah DAS Kritis	Degradasi area sepanjang Daerah Aliran Sungai Barito.	Berkurangnya daya serap air, Peningkatan risiko erosi dan banjir.
II	Pencemaran dan Degradasi Lahan		
4	Terjadinya Pencemaran Air dan Udara	Pembuangan limbah pertambangan (diduga), Emisi asap Karhutla dan industri.	Penurunan IKA (Indeks Kualitas Air), Kekeruhan sungai (TSS), Kualitas udara buruk secara periodik.
5	Belum Optimal Pencegahan Penebangan Liar (Illegal Logging)	Masih adanya aktivitas penebangan kayu ilegal di kawasan hutan.	Hilangnya tutupan hutan, Erosi tanah, Degradasi habitat satwa, Berkurangnya nilai IKL (Indeks Kualitas Lahan).
6	Belum Optimal Pencegahan Penambangan Ilegal (PETI)	Aktivitas PETI (Emas Tanpa Izin) di sekitar Sungai Barito dan anak sungainya.	Kerusakan bentang alam (lubang galian), Pencemaran kimia (Merkuri/Sianida), Peningkatan sedimen sungai.
7	Terjadinya Degradasi Lahan	Lahan mengalami penurunan kualitas, terutama di area bekas galian atau kawasan kritis.	Penurunan produktivitas lahan pertanian, Peningkatan risiko longsor.
III	Pengelolaan dan Kesadaran Publik		
8	Belum Optimal Pengelolaan Sampah	Dominasi Sampah Organik (34%) dan Plastik (20%) di timbunan akhir.	Beban TPA (Tempat Pemrosesan Akhir) berlebihan, Potensi pencemaran air tanah, Rendahnya tingkat daur ulang.
9	Rendahnya Kesadaran Masyarakat	Perilaku membakar lahan untuk pembukaan lahan, Kurangnya pemilahan sampah di sumbernya.	Berlanjutnya praktik Karhutla, Kegagalan program daur ulang dan kompos.

Sumber: (DLH Barito Utara, KLHK, dan BPS 2020–2024).

2.6.2. Isu-Isu Pembangunan

2.6.2.1. Isu Pembangunan Berkelanjutan Prioritas

Berdasarkan isu strategis 4 pilar TPB pada KLHS RPJMD Utara Tahun 2025-2029 terdapat 6 (enam) isu pembangunan berkelanjutan strategis di Kabupaten Barito Utara:

- 1) Infrastruktur wilayah dan pemukiman yang berkelanjutan
- 2) Kehidupan sehat dan sejahtera dengan pendidikan yang berkualitas
- 3) Pemerataan ekonomi, berkurangnya kesenjangan dan kemiskinan
- 4) Air bersih dan sanitasi layak bagi seluruh masyarakat
- 5) Lingkungan hidup dan ekosistem daratan yang sehat, lestari dan berkelanjutan
- 6) Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih berbasis teknologi informasi.

2.6.2.2. Isu Global

Isu internasional menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam pengambilan kebijakan pembangunan. Dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Barito Utara Tahun 2025-2029, isu internasional yang dihadapi dunia saat ini sedikit banyak memberikan kontribusi bagi Indonesia termasuk daerah-daerah di dalamnya. Isu internasional menjadi tantangan pembangunan jangka panjang yang perlu dicermati sehingga Kabupaten Barito Utara dapat menghadapi tantangan. Pada dokumen Rancangan Akhir RPJPN Tahun 2025-2045 telah diidentifikasi tantangan global kedepan yaitu berupa 10 (sepuluh) *megatren global* yang akan dihadapi menuju tahun 2045. Kesepuluh *megatren global* tersebut terdiri atas:

- 1) Perkembangan demografi global. Penduduk dunia menjadi 9,45 miliar dan porsi lansia meningkat (Asia 55%);
- 2) Geopolitik dan geoekonomi. Eskalasi persaingan antarnegara dan kemunculan kekuatan baru, serta kontribusi ekonomi negara berkembang mencapai 71%;
- 3) Perkembangan teknologi. Teknologi akan menggantikan sekitar 40% pekerjaan saat ini;
- 4) Peningkatan urbanisasi dunia. Penduduk perkotaan mencapai 65%, dan peranan Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai 70%;
- 5) Konstelasi perdagangan global. Perdagangan global tumbuh 3,4% per tahun;
- 6) Tata kelola keuangan global. Pergeseran kebijakan fiskal, *Central Bank Digital Currency* (CBDB), dan *Fintech*;
- 7) Pertumbuhan kelas menengah (*middle class*). Jumlah *middle* dan *upper class* lebih dari 90% (Rp8,8 miliar);
- 8) Peningkatan persaingan pemanfaatan sumber daya alam. Peningkatan peranan ekonomi Asia dan penduduk di Afrika mendorong persaingan memperebutkan sumber daya alam;
- 9) Perubahan iklim. Peningkatan suhu global disertai cuaca ekstrem dan bencana;
- 10) Pemanfaatan luar angkasa (*space economy*). Ekonomi antariksa, kelestarian antariksa dan keamanan antariksa.

Roland Berger mengidentifikasi 6 (enam) *megatren* yang akan membentuk masa depan global. Keenam *megatren* ini diadopsi ke dalam Rencana RPJPN Tahun 2025-2045, yang kemudian menjadi landasan dalam penyusunan RPJMN 2025-2029. Berikut adalah penjabaran dari keenam *megatren* yang dirumuskan oleh *The Roland Berger Institute*:

- 1) Kemasyarakatan (*people & society*) *megatren* pertama berkaitan dengan aspek masyarakat, mencakup isu-isu seperti demografi, migrasi, pendidikan, tenaga kerja, serta nilai-nilai kemanusiaan. Roland Berger menyoroti bahwa aspek ini menjadi pusat *megatren* global karena dipengaruhi dan juga berpengaruh terhadap tren lainnya. Tantangan utama dalam kategori ini adalah perlambatan pertumbuhan populasi akibat menurunnya tingkat kesuburan, serta mayoritas dari total 9,7 miliar penduduk dunia diproyeksikan akan tinggal di negara-negara berkembang. Selain itu, tingkat pendidikan secara global diperkirakan akan meningkat, tetapi masih terdapat tantangan dalam penegakan hak asasi manusia di berbagai wilayah.
- 2) Kesehatan dan pengasuhan (*health & care*) *megatren* berikutnya mencakup aspek kesehatan dan perawatan, dengan fokus pada isu-isu seperti tantangan kesehatan global, layanan kesehatan masa depan, dan sistem pengasuhan. Salah satu tantangan utama adalah kesenjangan akses terhadap layanan kesehatan, terutama antara negara maju dan berkembang. Perkembangan teknologi medis serta metode pengobatan menjadi faktor penting dalam transformasi sektor kesehatan. Selain itu, meningkatnya jumlah populasi lansia juga menjadi tantangan tersendiri dalam kebutuhan layanan pengasuhan di masa depan.
- 3) Lingkungan dan sumber daya (*environment & resources*), *megatren* ini mencakup isu-isu utama terkait lingkungan dan sumber daya alam, seperti perubahan iklim, polusi, keanekaragaman hayati, serta ketersediaan bahan mentah. Roland Berger menekankan bahwa membatasi peningkatan suhu global dalam kisaran 1,5-2 derajat celsius sangat penting untuk mengurangi dampak perubahan iklim. Selain itu, konservasi biodiversitas menjadi prioritas guna melindungi spesies yang terancam punah. Jika tidak ada intervensi signifikan, energi dunia pada tahun 2050 masih akan didominasi oleh bahan bakar fosil, serta ketergantungan terhadap sumber daya mentah tertentu akan semakin meningkat.
- 4) Teknologi dan inovasi (*technology & innovation*) kemajuan teknologi dan inovasi menjadi salah satu faktor kunci dalam membentuk masa depan dunia. Isu-isu utama dalam kategori ini mencakup nilai teknologi, teknologi unggulan, serta hubungan antara manusia dan mesin. Perkembangan pesat teknologi seperti kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence/AI*) akan berkontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi global. Tantangan utama yang dihadapi adalah bagaimana menyeimbangkan hubungan antara manusia dan mesin untuk meminimalkan risiko yang mungkin muncul. Diperkirakan, nilai pasar sektor teknologi akan mencapai 9,5 triliun USD pada

tahun 2030. Beberapa industri yang akan mengalami pertumbuhan pesat meliputi komunikasi 5G, teknologi *blockchain*, dan robotika. Sementara itu, teknologi ramah lingkungan yang berpotensi berkembang pesat antara lain hidrogen hijau, bahan bakar nabati, serta kendaraan listrik. Teknologi lainnya, seperti nanoteknologi dan pengeditan DNA, juga diprediksi akan mengalami pertumbuhan signifikan.

- 5) Ekonomi dan bisnis (*economics & business*) dalam aspek ekonomi dan bisnis, terdapat beberapa isu strategis, seperti rantai pasok global, pergeseran kekuatan ekonomi, transformasi energi, serta tantangan utang. Dunia saat ini sedang mengalami *restrukturisasi* rantai pasok global, disertai dengan pergeseran kekuatan ekonomi dan transisi energi menuju sumber yang lebih berkelanjutan. Tantangan ekonomi semakin diperberat oleh tingginya tingkat utang di berbagai negara akibat dampak pandemi Covid-19 dan konflik geo-politik, seperti perang di Ukraina. Kondisi ini menyebabkan ketidakstabilan ekonomi global yang perlu diantisipasi ke depan.
- 6) Politik dan pemerintahan (*politics & government*) *megatren* terakhir berfokus pada dinamika politik dan pemerintahan global. Isu-isu utama dalam aspek ini meliputi risiko global, geo-politik, serta masa depan demokrasi. *Tren* geo-politik dunia menunjukkan kecenderungan menuju peningkatan ketegangan, dengan munculnya gerakan otokratis yang berpotensi mengancam tatanan demokrasi global. Selain itu, perdagangan internasional semakin mengalami *fragmentasi*, dengan negara-negara membentuk blok ekonomi yang lebih eksklusif, sehingga memperkuat polarisasi dalam hubungan ekonomi global. Dengan memahami keenam *megatren* ini, perencanaan pembangunan jangka menengah Kabupaten Barito Utara dapat disusun secara lebih adaptif dan responsif terhadap tantangan serta peluang yang akan muncul dalam beberapa dekade mendatang.

Lingkungan strategis global menghadirkan tantangan sekaligus peluang yang secara fundamental akan membentuk arah pembangunan Kabupaten Barito Utara. Integrasi ekonomi regional melalui Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dan ASEAN Free Trade Area (AFTA) telah menghapus sekat-sekat pasar tradisional. Ini secara langsung meningkatkan level persaingan yang dihadapi oleh daerah. Di satu sisi, terbuka peluang pasar yang lebih luas bagi produk unggulan daerah; namun di sisi lain, pasar lokal juga terekspos pada persaingan produk dan tenaga kerja dari negara-Asean lainnya. Implikasi langsungnya adalah tuntutan mendesak untuk meningkatkan standar kualitas produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

(UMKM) lokal serta akselerasi peningkatan kompetensi dan sertifikasi tenaga kerja agar mampu bersaing di pasar yang semakin terbuka.

Secara simultan, keterhubungan dengan ekonomi global ini memperlihatkan kerentanan struktur perekonomian Kabupaten Barito Utara yang masih sangat bertumpu pada sektor primer, khususnya pertambangan dan penggalian. Kinerja perekonomian daerah dan stabilitas fiskal (PAD) menjadi sangat sensitif terhadap volatilitas harga komoditas di pasar internasional. Fluktuasi harga komoditas global, yang berada di luar kendali daerah, berdampak langsung pada PDRB, investasi, dan kemampuan pendanaan pembangunan. Kerentanan struktural ini menjadi justifikasi eksternal yang kuat bahwa strategi “*business as usual*” yang berbasis pada ekspor bahan mentah tidak lagi memadai dan berisiko tinggi dalam jangka panjang.

Di luar arena ekonomi, komunitas global telah menetapkan komitmen bersama melalui Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*). Agenda SDGs ini bukan sekadar daftar target, melainkan telah menjadi kerangka kerja universal yang mengarusutamakan pembangunan inklusif dan berkelanjutan. Bagi Kabupaten Barito Utara, SDGs memberikan bobot dan urgensi yang lebih kuat untuk menyelesaikan permasalahan fundamental yang ada di daerah. Isu-isu lokal seperti pengentasan kemiskinan (SDG 1), penanganan stunting dan peningkatan layanan kesehatan (SDG 2 & 3), peningkatan kualitas pendidikan (SDG 4), serta pemenuhan infrastruktur dasar (SDG 9 & 11) kini selaras dengan mandat global, yang menuntut adanya intervensi kebijakan yang lebih terfokus, terukur, dan kolaboratif.

Tantangan global paling krusial bagi masa depan Barito Utara adalah pergeseran paradigma menuju Ekonomi Hijau (*Green Economy*) dan Transisi Energi, yang didorong oleh isu perubahan iklim. Tuntutan global untuk dekarbonisasi dan pengurangan ketergantungan pada energi fosil (seperti batu bara) merupakan ancaman eksistensial bagi daerah yang perekonomiannya didominasi oleh sektor tersebut. Ini bukan lagi sekadar isu lingkungan, melainkan telah menjadi isu keberlanjutan ekonomi dan fiskal. Pasar internasional dan investor akan semakin mensyaratkan praktik bisnis yang berkelanjutan (*sustainable mining*) dan pemenuhan standar lingkungan yang ketat sebagai prasyarat investasi dan perdagangan.

Menghadapi konstelasi isu-isu tersebut, berbagai strategi dan kebijakan harus dirumuskan sebagai jawaban strategis yang adaptif. Kabupaten Barito Utara dihadapkan pada tantangan ganda: (1) keharusan meningkatkan daya saing ekonomi dan kualitas SDM untuk

memenangkan persaingan di era MEA, dan (2) keharusan melakukan transformasi struktural ekonomi untuk mengurangi kerentanan dan beradaptasi dengan tuntutan ekonomi hijau. Oleh karena itu, arah kebijakan pembangunan jangka menengah harus secara tegas diarahkan pada hilirisasi industri, diversifikasi ekonomi ke sektor-sektor baru yang berkelanjutan, serta penguatan fundamental modal manusia dan kelembagaan pemerintahan untuk membangun daerah yang berdaya saing sekaligus berketahanan.

2.6.2.3. Isu Nasional

Isu nasional dalam konteks pembangunan secara umum dapat dilihat dari naskah RPJMN Tahun 2025-2029. Di dalam naskah tersebut, tampak setidaknya ada 7 (tujuh) tantangan pembangunan yang muncul dalam jangka menengah nasional tahun 2025-2029. Ketujuh isu yang menjadi tantangan pembangunan tersebut terlihat sebagaimana disajikan pada Tabel 2.161.

Tabel 2.161. Isu Tantangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029

No	Isu Tantangan
1	Rendahnya produktivitas
2	Rendahnya kualitas sumber daya manusia
3	Pergeseran struktur kelas masyarakat
4	Kebutuhan hidup tinggi pada usia produktif
5	Krisis lingkungan
6	Geopolitik dan geoekonomi
7	Tata kelola dan akuntabilitas pemerintah

Sumber: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029.

Lebih jelas terkait isu tantangan yang tersaji pada Tabel 2.161 di atas, dijabarkan sebagai berikut:

1) Rendahnya produktivitas

Tingkat produktivitas sumber daya manusia Indonesia masih relatif rendah dibandingkan dengan negara lainnya. Kondisi ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kualitas sumber daya manusia yang masih rendah, khususnya pada perempuan, produktivitas sektor ekonomi yang masih rendah, kapasitas ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi yang tertinggal, serta kelembagaan seperti sistem insentif, regulasi, dan kepastian hukum yang masih lemah. Kondisi ini kemudian berkonsekuensi terhadap outcome pertumbuhan ekonomi Indonesia yang relatif

melambat belakangan ini, terutama apabila dibandingkan pada masa-masa pertumbuhan ekonomi di periode 2005-2010.

2) Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia

Rendahnya kualitas sumber daya manusia Indonesia dapat terlihat dari produktivitas tenaga kerja yang didapatkan dari nilai PDB per tenaga kerja. Pada tahun 2022, nilai produktivitas pekerja Indonesia terhitung sebesar US\$28.600 per pekerja. Nilai ini pun relatif masih berada di bawah rata-rata negara di ASEAN dan Amerika Serikat. Di samping itu, rata-rata nilai *Programme for International Student Assessment* siswa Indonesia untuk semua aspek pada tahun 2022 relatif menurun dibandingkan tahun 2018. Nilai Indonesia pun relatif jauh tertinggal dengan negara-negara OECD. Dari sisi ketenagakerjaan, terlihat pula bahwa per Agustus 2024, angkatan kerja di Indonesia didominasi oleh lulusan pendidikan rendah atau lulusan SMP atau sederajat ke bawah sebesar 52,32%. Hanya 12,86% penduduk yang merupakan lulusan dari pendidikan tinggi. Data juga menunjukkan bahwa hanya 41,23% pekerja yang bekerja di sektor dengan keahlian menengah/tinggi. Hal ini secara nyata disebabkan oleh capaian pendidikan dan kapasitas sumber daya manusia Indonesia yang masih rendah.

3) Pergeseran Struktur Kelas Masyarakat

Pergeseran struktur kelas masyarakat terlihat dari perubahan kategori masyarakat berdasarkan rata-rata pengeluarannya per bulan. Selama periode 2019-2024, terjadi peningkatan jumlah penduduk kelas menengah menjadi 137,5 juta orang yang mencakup sekitar 49,2% jumlah penduduk Indonesia. Hal ini juga tampak dari peningkatan jumlah penduduk rentan miskin sebesar 12,72 juta orang. Di saat jumlah calon kelas menengah dan rentas miskin meningkat, populasi kelas menengah justru menurun dan masuk ke kelas pengeluaran di bawahnya. Hal ini disebabkan akibat adanya gelombang pemutusan hubungan kerja sebagai respon rasional produsen akibat menurunnya daya beli masyarakat. Pergeseran struktur kelas masyarakat ini patut menjadi perhatian karena akan berkonsekuensi pada respon kebijakan perlindungan sosial bagi masyarakat.

4) Kebutuhan Hidup Tinggi Pada Usia Produktif

Data menunjukkan bahwa jumlah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) di Indonesia diproyeksikan mencapai 147,71 juta jiwa. Kondisi ini kemudian berkonsekuensi pada

banyak hal untuk pemenuhan kebutuhan dasar manusia untuk hidup. Keterbatasan pada sumber daya, seperti air, pangan, energi, hingga perumahan menjadi isu yang penting dan akan dihadapi oleh Indonesia beberapa tahun ke depan. Selain itu, kepastian terhadap terbukanya lapangan kerja hingga program jaminan sosial yang komprehensif turut menjadi tantangan besar untuk pembangunan di masa depan, khususnya pada penduduk usia produktif.

5) Krisis lingkungan

Saat ini, dunia dilanda tiga krisis lingkungan yang sangat masif (*triple planetary crisis*), yaitu perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, serta polusi dan kerusakan lingkungan. Kondisi ini kemudian berkonsekuensi ke banyak hal, seperti kerentanan jiwa akibat krisis lingkungan, kerugian ekonomi, hingga ancaman kematian akibat bencana alam yang melanda. Di samping itu, krisis lingkungan juga berdampak pada penurunan populasi biodiversitas hingga mencapai pada titik kepunahan. Begitu pula dengan risiko yang besar terhadap umat manusia akibat pencemaran lingkungan. Indonesia sendiri merupakan negara dengan tingkat pencemaran tertinggi di Asia Tenggara. Pencemaran ini juga akan berkaitan dengan timbunan sampah makanan yang semakin besar setiap tahunnya di Indonesia. Seluruh kejadian ini kemudian berdampak pula pada krisis sumber daya alam. Risiko yang muncul dari *triple planetary crisis* kemudian akan menghambat upaya pembangunan ke depannya.

6) Geo-politik dan Geo-ekonomi

Dinamika geo-politik dan geo-ekonomi kedepannya patut menjadi perhatian dalam proses pembangunan karena adanya keterkaitan rantai pasok Indonesia terhadap perekonomian global. Salah satu yang perlu diwaspadai berkaitan dengan eskalasi persaingan antarnegara adidaya di dunia yang memunculkan kekuatankekuatan baru global. Konflik-konflik internasional, seperti Perang Rusia-Ukraina, permasalahan di Selat Taiwan hingga Laut Cina Selatan, dan isu perdamaian di Semenanjung Korea menjadi konflik internasional yang akan berpengaruh kedepannya terhadap pembangunan di Indonesia. Akibat konflik ini, muncul berbagai permasalahan global baru, seperti krisis pangan dan energi serta menimbulkan ketidakpastian ekonomi global. Prediksi pertumbuhan ekonomi global juga semakin menurun seiring dengan meningkatnya eskalasi konflik yang terjadi antar-negara. Di samping itu, perekonomian Indonesia juga masih sangat dipengaruhi oleh pasar global. Pengambilan kebijakan

moneter Amerika Serikat akan sangat memberikan efek bagi pasar keuangan di Indonesia di tengah tekanan faktor *inflasi* hingga pelemahan daya beli masyarakat secara domestik. Volume perdagangan internasional juga mengalami fluktuasi seiring dengan berlanjutnya eskalasi perang dagang yang terjadi antarnegara adidaya.

7) Tata Kelola dan Akuntabilitas Pemerintah

Isu mengenai pemberantasan korupsi masih menjadi prioritas yang harus dituntaskan oleh Indonesia dalam beberapa waktu ke depan. Pemberantasan korupsi membutuhkan kolaborasi berbagai pihak agar capaian pembangunan nasional tidak terhambat. Indeks Persepsi Korupsi di Indonesia menunjukkan tren penurunan. Namun, ke depan masih ada tantangan besar dalam menghadapinya di tengah kompleksitas sistem yang ada saat ini. Di samping upaya pemberantasan korupsi, isu berkaitan keamanan data dan pertahanan siber Indonesia patut menjadi prioritas pembangunan ke depan, mengingat adanya berbagai serangan digital yang pernah dialami belakangan ini. Apabila hal ini tidak ditangani dengan baik, maka akan muncul isu keamanan siber di Indonesia yang berdampak pada proses pembangunan di Indonesia.

Pada RPJMN tahun 2025-2029 terdapat 17 program prioritas, yaitu:

1) Swasembada Pangan, Energi, dan Air

Penekanan pentingnya kemandirian dalam produksi pangan, dengan target memperluas lahan panen hingga 4 juta hektare pada 2029. Tata kelola air yang baik juga ditekankan, untuk memastikan ketersediaan air saat musim kemarau dan mengurangi risiko bencana saat musim hujan. Di bidang energi, mereka yakin Indonesia dapat menjadi pemasok utama energi hijau dunia melalui pengembangan biodiesel, bioavtur, dan energi terbarukan.

2) Penyempurnaan Sistem Penerimaan Negara

Pemerintah juga berkomitmen memperkuat sistem penerimaan negara, sejalan dengan amanat Pasal 23A UUD 1945, guna mendukung pembiayaan pembangunan berkelanjutan.

3) Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi

Reformasi politik akan difokuskan pada pemberantasan politik uang dan peningkatan akses politik yang adil. Di bidang hukum, akan menegakkan prinsip kesetaraan di

hadapan hukum dan kepastian hukum. Reformasi birokrasi dilakukan dengan memperkuat digitalisasi dan sistem satu data terpadu.

4) Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

Korupsi dipandang sebagai penghambat pembangunan, sehingga pemerintahan ini akan fokus pada upaya pemulihan keuangan negara dan pemberantasan korupsi yang menyeluruh.

5) Pemberantasan Kemiskinan

Pemerintahan menargetkan penghapusan kemiskinan ekstrem dalam dua tahun pertama, dan pengurangan kemiskinan relatif hingga di bawah 6% pada akhir masa jabatan.

6) Pencegahan dan Pemberantasan Narkoba

Pemerintah akan memperkuat langkah-langkah pencegahan penyalahgunaan narkoba dengan pendekatan menyeluruh, termasuk meningkatkan kesadaran dari tingkat keluarga.

7) Pelayanan Kesehatan untuk Semua

Program BPJS Kesehatan akan diperkuat dengan dukungan penyediaan obat yang memadai untuk seluruh rakyat.

8) Penguatan Pendidikan, Sains, dan Teknologi

Dana riset dan inovasi akan ditingkatkan hingga 2% dari PDB, disertai kebijakan yang mendukung investasi di bidang pendidikan, sains, teknologi, dan digitalisasi.

9) Penguatan Pertahanan dan Keamanan Negara

Keamanan nasional diprioritaskan untuk menciptakan kondisi yang kondusif dan memperkuat hubungan internasional yang sehat.

10) Kesenjangan Gender dan Perlindungan Kelompok Rentan

Pemerintah akan memperkuat kebijakan yang melindungi hak perempuan, anak, dan penyandang disabilitas, termasuk akses terhadap pendidikan, pekerjaan, dan partisipasi politik.

11) Pelestarian Lingkungan Hidup

Pemerintah akan mempercepat upaya pencapaian target *net zero emission* dan pengurangan jejak karbon, serta mempromosikan penggunaan teknologi bioplastik.

12) Ketersediaan Pupuk dan Benih bagi Petani

Ketersediaan dan akses pupuk, benih, dan pestisida untuk petani akan dijamin guna mendukung swasembada pangan.

- 13) Rumah Murah dan Sanitasi bagi Masyarakat
Pemerintahan ini akan membangun atau merenovasi 40 rumah per desa/kelurahan per tahun, dengan target tiga juta rumah dalam masa jabatan.
- 14) Pemerataan Ekonomi dan Penguatan UMKM
Pemerataan ekonomi dan penguatan UMKM akan menjadi prioritas, termasuk melalui program kredit usaha untuk sektor pertanian, perikanan, dan *startup millennial*. Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) juga akan diteruskan.
- 15) Hilirisasi dan Industrialisasi Berbasis SDA dan Maritim
Hilirisasi nikel dan sumber daya lainnya akan dilanjutkan untuk membuka lapangan kerja dan mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.
- 16) Kerukunan Antarumat Beragama dan Kebebasan Beribadah
Pemerintahan akan memastikan kerukunan antarumat beragama dan kebebasan beribadah, serta memperhatikan perawatan rumah ibadah.
- 17) Pelestarian Seni Budaya dan Peningkatan Ekonomi Kreatif
Pelestarian seni budaya, penguatan ekonomi kreatif, dan peningkatan prestasi olahraga menjadi bagian penting dari agenda nasional mereka, dengan dukungan dana abadi kebudayaan.

Selain itu terdapat delapan program terbaik cepat atau *Quick Wins* seperti pada gambar berikut:



Gambar 2.73. Delapan Program Terbaik Cepat (*Quick Wins*).



Untuk isu strategis regional meliputi Pulau Kalimantan sebagaimana dimuat dalam RPJMN Tahun 2025-2029, meliputi:

- a. Fondasi perekonomian berbasis SDA terbarukan yang masih belum kuat dan proses hilirisasi masih lambat.
- b. pembangunan infrastruktur dasar serta konektivitas yang masih terbatas. dan perekonomian,
- c. tata kelola pemerintahan daerah dan pelayanan publik yang belum optimal.
- d. daya saing sumber daya manusia (SDM) yang masih rendah.
- e. pengelolaan lingkungan

2.6.2.4. Isu Provinsi

Isu-isu pembangunan di Provinsi Kalimantan Tengah dapat dilihat dari beberapa dokumen atau publikasi yang berkaitan dengan pembangunan kewilayahan baik dalam konteks regional, nasional, bahkan global. Isu-isu lingkungan dibahas secara khusus melalui dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis. Selain itu, isu-isu pembangunan di Kalimantan Tengah juga didapat dari inventarisasi potensi dan masalah terkait pembangunan di Kalimantan Tengah. Isu-isu pembangunan ini penting untuk menentukan arah pembangunan Kalimantan Tengah kedepannya. Dengan merespons isu-isu terkait pembangunan ini, diharapkan pembangunan di Kalimantan Tengah dapat berjalan tepat sasaran dan optimal. Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan RPJMD tahun 2025-2029 memiliki potensi:

- 1) Jumlah penduduk usia produktif cukup massif;
- 2) Penetapan Kalimantan Tengah sebagai proyek strategis nasional dalam sentra produksi pangan;
- 3) Potensi industri biofarmaka yang cukup besar;
- 4) Potensi energi terbarukan di Kalimantan Tengah cukup tinggi;
- 5) Indeks pembangunan TIK mengalami tren yang positif;
- 6) Potensi ketersediaan air baku yang melimpah;
- 7) Nilai IKLH Kalimantan Tengah ada di atas rata rata nasional;
- 8) Persentase desa mandiri dalam indeks desa membangun menunjukkan tren yang positif;
- 9) Daya dukung lahan permukiman sampai dengan tahun 2030 masih baik/tercukupi.

Sedangkan isu pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah yang termuat dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

1) Tata kelola pemerintah daerah belum optimal

Tata kelola pemerintah daerah yang belum optimal dapat menyebabkan berbagai permasalahan, seperti *inefisiensi* anggaran, korupsi, dan hingga tata kelola pelayanan publik yang belum efektif dan efisien. Indikasi ini terlihat dari proses digitalisasi pemerintahan yang masih lambat, kompetensi SDM yang belum mumpuni, hingga sistem *monitoring* dan evaluasi yang belum berjalan maksimal. Hal ini dapat menghambat pembangunan daerah dan merugikan masyarakat. Padahal, tata kelola pemerintahan yang baik akan menjadi prasyarat utama tujuan dari pembangunan yang diharapkan menjadi tercapai. Dalam rangka meningkatkan tata kelola pemerintah yang lebih baik, pemerintah daerah perlu membentuk ekosistem kebijakan yang mampu mendorong transparansi, akuntabilitas, reformasi birokrasi, pengembangan kompetensi SDM pemerintahan, dan partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan.

2) Rendahnya kualitas dan daya saing sumber daya manusia

Rendahnya kualitas SDM di Provinsi Kalimantan Tengah menunjukkan produktivitas masyarakat yang rendah pula. Hal ini menyebabkan daya saing SDM menjadi kalah bersaing dengan kualitas SDM di daerah lainnya. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat menghambat upaya pembangunan dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Kondisi demikian disebabkan oleh beberapa faktor, seperti akses pendidikan yang tidak merata di seluruh wilayah, kualitas pendidikan yang rendah, dan kurangnya pelatihan dan pengembangan keterampilan baur bagi SDM. Perbaikan-perbaikan pada faktor determinan rendahnya kualitas dan daya saing SDM tersebut perlu dilakukan. Pemerintah dalam kasus ini harus meningkatkan akses pendidikan yang berkualitas, meningkatkan mutu pendidikan, dan menyediakan program pelatihan dan pengembangan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja.

Lebih lanjut, pendekatan lain dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia juga dapat dilakukan melalui investasi dalam kualitas dan kesejahteraan profesional di sektor pendidikan, seperti contoh peningkatan kesejahteraan guru. Dalam konteks pendidikan, guru adalah agen utama perubahan. Namun, mereka seringkali menghadapi tantangan finansial dan fasilitas yang membatasi kinerja. Isu ini

menekankan bahwa untuk meningkatkan kualitas SDM secara nasional, pemerintah harus memberikan dukungan komprehensif kepada para profesional yang perannya sangat vital. Hal ini tidak hanya terbatas pada guru di sekolah umum, tetapi juga mencakup guru agama yang membentuk karakter dan moral bangsa. Dukungan tersebut bisa berupa penyediaan fasilitas dasar (seperti perumahan), peningkatan pendapatan, pengembangan profesional berkelanjutan, dan pengakuan yang layak atas kontribusi mereka. Dengan memastikan kesejahteraan dan motivasi para profesional ini, diharapkan akan terjadi peningkatan kualitas SDM secara signifikan di masa depan.

3) Rendahnya kapasitas dan kualitas konektivitas serta infrastruktur

Mobilitas manusia, barang, maupun jasa akan sangat dipengaruhi oleh konektivitas antarwilayah. Konektivitas ini didukung oleh infrastruktur yang memadai dan andal dalam menyalurkan arus manusia, barang, dan jasa. Rendahnya kapasitas dan kualitas konektivitas serta infrastruktur dapat menghambat mobilitas manusia, barang, dan jasa, meningkatkan biaya logistik, dan menghambat akses ke pasar. Kebutuhan infrastruktur yang dimaksud diantaranya adalah jalan, jembatan, terminal, hingga pelabuhan. Kondisi demikian dalam jangka panjang akan menghambat pembangunan yang merata antarwilayah dan memperlambat upaya pembangunan mencapai tujuan yang diharapkan. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah daerah perlu meningkatkan investasi dalam infrastruktur yang meningkatkan konektivitas antarwilayah, kerjasama pembangunan infrastruktur bersama pihak lainnya, pemeliharaan infrastruktur eksisting, dan menciptakan pusat-pusat pertumbuhan baru yang dapat berdampak pada perkembangan ekonomi di dalam masyarakat.

4) Degradasi lingkungan

Degradasi lingkungan menjadi isu besar dalam pembangunan di Provinsi Kalimantan Tengah disaat mayoritas wilayahnya tertutupi oleh lahan hutan hujan tropis hingga gambut yang menjadi penting dalam mendukung ekosistem kehidupan. Saat ini, muncul berbagai permasalahan berkaitan dengan pencemaran air, kerusakan lahan hutan, hingga hilangnya keanekaragaman hayati. Hal tersebut kemudian akan menurunkan daya dukung lingkungan yang dapat menjadi aspek penting untuk pembangunan yang berkelanjutan. Penanganan degradasi lingkungan yang tidak baik pada dasarnya akan berdampak pada penurunan kualitas pembangunan yang

seharusnya dapat dinikmati oleh masyarakat. Di samping itu, kualitas hidup akan turut menurun, dan justru akan menimbulkan masalah baru yang lebih kompleks. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah daerah perlu memperkuat kebijakan dan regulasi terkait pengelolaan lingkungan yang baik, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan, dan mempromosikan praktik-praktik pembangunan yang berkelanjutan.

5) Ketahanan air, energi, dan pangan yang rentan

Ketahanan air, energi, dan pangan akan menjadi aspek yang vital dalam memastikan kualitas hidup masyarakat meningkat dan mendukung upaya untuk mencapai kesejahteraan ekonomi. Adanya kerentanan pada ketiga komponen tersebut akan mengancam ketahanan daerah dan stabilitas sosial. Adanya kerawanan ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti perubahan iklim, eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan, dan infrastruktur yang tidak memadai. Meningkatkan ketahanan air, energi, dan pangan merupakan hal yang penting untuk memastikan pembangunan yang berkelanjutan. Pemerintah perlu mengembangkan sumber-sumber energi terbarukan, meningkatkan efisiensi penggunaan air dan energi, dan meningkatkan produksi pangan yang berkelanjutan dengan memprioritaskan pada penggunaan teknologi dan pengembangan inovasi.

6) Belum optimalnya pembangunan daerah pedalaman dan tertinggal serta ketimpangan pembangunan antarzona pembangunan

Luasnya wilayah di Provinsi Kalimantan Tengah menyebabkan kompleksitas pembangunan daerah dan seringkali menimbulkan ketimpangan yang terjadi antarwilayah kabupaten/kota. Ketimpangan ini terlihat dari masih ditemukannya desa yang belum teraliri listrik dan sinyal komunikasi, waktu tempuh ke pusat kota yang lama, hingga belum optimalnya upaya afirmasi pada kelompok masyarakat adat di pedalaman. Hal tersebut dalam jangka panjang dapat menyebabkan konflik sosial dan muaranya akan menghambat upaya pembangunan. Membangun daerah yang tertinggal dan mempersempit ketimpangan antar daerah merupakan kunci untuk mencapai pembangunan yang inklusif. Pemerintah perlu meningkatkan investasi pengembangan ekonomi di daerah-daerah tertinggal, mengembangkan infrastruktur, dan meningkatkan akses ke layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan administrasi pemerintahan.

7) Minimnya hilirisasi dan diversifikasi produk turunan sumber daya alam

Arah kebijakan nasional salah satunya berkaitan dengan upaya hilirisasi produk sumber daya alam agar mendapatkan nilai tambah bagi perekonomian sekaligus menyerap tenaga kerja. Upaya hilirisasi ini kemudian akan bermuara pada diversifikasi produk sumber daya alam yang dapat dijual ke pasar. Kondisi ini dinilai masih belum berjalan dengan baik di Provinsi Kalimantan Tengah. Dalam hal ini, disinyalir bahwa SDA yang sifatnya bahan mentah masih diperjualbelikan dengan nilai tambah yang rendah. Salah satu akibat yang muncul adalah adanya ketergantungan industri lokal pada ekspor bahan baku. Dalam jangka panjang, ketergantungan terhadap bahan mentah sumber daya alam ini dapat mengancam ketahanan nasional karena sifat SDA itu sendiri yang tidak terbarukan. Di samping itu, akan muncul pertumbuhan ekonomi yang tidak berkelanjutan. Untuk mendorong upaya hilirisasi dan diversifikasi ini, pemerintah perlu mendorong investasi di sektor industri hilir pengolah SDA, meningkatkan riset dan inovasi di bidang SDA, dan meningkatkan akses dan kerjasama perdagangan ke pasar internasional.

8) Belum optimalnya inovasi dan pemanfaatan teknologi untuk menunjang pembangunan

Untuk meningkatkan produktivitas ekonomi hingga daya saing daerah, riset, inovasi, dan teknologi menjadi kunci untuk mencapai hal tersebut. Rendahnya upaya riset, inovasi, dan teknologi ini dapat berdampak pada pembangunan yang sifatnya akan selalu *business-as-usual*. Padahal Provinsi Kalimantan Tengah menargetkan posisinya sebagai **Kalteng Tangguh 2045** yang mampu menjadi lumbung pangan dan energi nasional. Perlu adanya upaya pengembangan mutakhir terhadap teknologi baru yang dapat berdampak pada pembangunan, seperti sektor pertanian, perikanan, perindustrian, hingga pariwisata. Pemerintah daerah perlu meningkatkan investasi dalam riset dan pengembangan, meningkatkan akses ke internet dan teknologi digital, dan mendorong kerja sama antara sektor publik dan swasta dalam pengembangan teknologi untuk mendukung pembangunan.

9) Komitmen pembangunan kesehatan yang berkualitas, inklusif, dan terjangkau

Komitmen dalam penyelenggaraan dan pembangunan kesehatan berfungsi untuk mendukung kesejahteraan sosial. Kemudahan akses terhadap fasilitas kesehatan yang berkualitas dan terjangkau akan meningkatkan tingkat kesehatan masyarakat. Kerjasama swasta dengan pemerintah daerah dalam pelayanan kesehatan

masyarakat juga dapat dilakukan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, baik kesehatan jasmani maupun kesehatan rohani. Selain itu, program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan oleh pemerintah pusat juga dapat menjadi pendukung dalam penanganan permasalahan *stunting*. Akan tetapi, pemberian MBG juga perlu memperhatikan makanan yang diberikan, harus dipastikan bahwa makanan tersebut bergizi seimbang dan mengurangi pemberian makanan *ultra* proses kepada anak-anak.

10) Pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan

Pertumbuhan ekonomi daerah yang ditargetkan sebesar 7-8% pada tahun 2029 perlu didukung dengan pengembangan sumber pendapatan pada sektor-sektor produktif dan berkelanjutan. Pengembangan industri baru di bidang agrikultur dan industri pengolahan makanan diharapkan dapat menjadi generator ekonomi baru yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Tengah. Selain itu, pengembangan industri-industri agrikultur juga dapat mendorong pertumbuhan di zona timur yang ekonominya ditopang oleh sektor pertanian.

11) Perlunya peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan kebudayaan lokal

Peningkatan kesejahteraan sosial dapat dilakukan dengan menuntaskan kantong-kantong kemiskinan di daerah perdesaan melalui kebijakan *afirmatif*. Pengentasan kemiskinan yang dilakukan perlu memperhatikan kearifan lokal dan memberdayakan masyarakat untuk mandiri finansial secara berkelanjutan. Pemberian insentif selain bantuan langsung tunai perlu dipertimbangkan, seperti contohnya pelatihan kewirausahaan dan pelatihan keterampilan khusus. Lebih lanjut, pemerintah juga perlu bekerja sama dengan pihak swasta untuk menyediakan lapangan pekerjaan yang menyerap tenaga kerja dari hasil pelatihan tersebut.

Penguatan budaya lokal juga penting untuk dilakukan dalam menghadapi tantangan pembangunan di era digital. Pemerintah harus hadir secara proaktif untuk melindungi dan menghidupkan kembali seluruh khazanah budaya lokal yang menjadi ciri khasnya, baik itu budaya fisik maupun non fisik. Nilai budaya lokal yang dilestarikan dapat menjadi sumberdaya ekonomi baru yang dapat menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan asli daerah, dan memperluas peluang usaha masyarakat.

Pemerintah perlu hadir dalam penguatan budaya lokal melalui pengembangan berbasis komunitas. Masyarakat dapat terlibat dengan aktif dalam kegiatan kebudayaan, baik sebagai pelaku, penikmat, maupun pengembang. Hal ini memastikan bahwa kebudayaan tidak hanya "dipajang", tetapi hidup dan berkembang melalui interaksi dan partisipasi aktif.

12) Pembangunan berkelanjutan dan resilien

Dalam melakukan pembangunan di Kalimantan Tengah, diperlukan pendekatan dalam pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dan resilien. Pengelolaan sampah yang berkelanjutan, penyediaan sanitasi aman dan berkelanjutan, serta fasilitasi perumahan yang terintegrasi dengan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) merupakan beberapa fokus utama dalam mencapai pembangunan berkelanjutan dan resilien di Kalimantan Tengah.

Kebijakan-kebijakan integratif yang mendorong praktik-praktik keberlanjutan dan resilien dapat menjadi salah satu contoh dalam mendorong pembangunan yang berkelanjutan dan resilien. Dengan mencapai pembangunan berkelanjutan dan resilien, diharapkan pembangunan yang terjadi di Kalimantan Tengah akan meningkatkan kualitas hidup bagi seluruh lapisan masyarakat dan tidak menciptakan kesenjangan sosial.

Pada RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah, arah pengembangan Kabupaten Barito Utara adalah pada arah pembangunan dan pengembangan lumbung energi baru dan terbarukan Kalimantan, serta wilayah mitra dari pembangunan IKN di Kalimantan Timur. Lokasi Kabupaten Kabupaten Barito Utara yang berada di Zona Timur dan bersebelahan dengan Provinsi Kalimantan Timur berakibat pada arah pembangunan dengan sejumlah kabupaten di Zona Timur menjadi wilayah mitra pembangunan IKN. Di samping itu, Kabupaten Barito Utara juga diproyeksikan memiliki Kawasan Sentra Perikanan terpadu hulu dan hilir sehingga dapat mendukung penyediaan sumber pangan dari perikanan untuk IKN. Selain itu, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Utara juga memiliki potensi energi baru dan terbarukan (EBT) yang besar, tetapi masih belum tergali secara optimal. Adapun, potensi EBT yang terdapat di kedua Kabupaten tersebut diantaranya energi air dan surya.

2.6.3. Isu Strategis Daerah Tahun 2025-2029

Isu strategis daerah diturunkan dari permasalahan daerah dan juga melihat isu strategis lainnya yang termuat pada RPJPD Kabupaten Barito Utara tahun 2025-2045, KLHS RPJPD Barito Utara tahun 2025-2045, KLHS RPJMD tahun 2025-2029, KLHS RTRW tahun 2025-2029. Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.162.

Tabel 2.162. Isu Strategis Daerah Kabupaten Barito Utara

No	RPJPD 2025-2045	KLHS RPJPD 2025-2045	KLHS RPJMD 2025-2029	KLHS RTRW 2025-2029	RPJMD 2025-2029
1	Infrastruktur Wilayah	Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan	Infrastruktur Wilayah dan Pemukiman yang Berkelanjutan	Degradasi lingkungan dan sumberdaya alam;	Infrastruktur Wilayah dan Pemukiman yang Adil, Merata dan Berkelanjutan
2	Pendidikan	Kehidupan Sehat dan Sejahtera	Kehidupan Sehat dan Sejahtera dengan pendidikan berkualitas	Penurunan Kualitas dan kuantitas air;	Kehidupan Sehat dan Sejahtera
3	Kesehatan	Kemiskinan	Pemerataan ekonomi, berkurangnya kesenjangan dan Kemiskinan	Peningkatan Intensitas Bencana;	Peningkatan dan Pemerataan Ekonomi, Berkurangnya Kesenjangan dan Kemiskinan
4	Pemerataan Ekonomi	Air Bersih dan sanitasi layak	Pemerataan Fasilitas Pendidikan	Meningkatnya ketimpangan antar wilayah;	Pendidikan Berkualitas
5	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Berkurangnya Kesenjangan	Air Bersih dan Sanitasi Layak	Integrasi perencanaan;	Air Bersih dan Sanitasi Layak
6	Lingkungan Hidup	Ekosistem Daratan	Lingkungan Hidup dan Ekosistem Daratan sehat, lestari dan berkelanjutan	Pengembangan agroindustri perkebunan, kehutanan, pertanian, pariwisata dan perikanan; dan	Lingkungan Hidup dan Ekosistem Daratan sehat, lestari dan berkelanjutan
7	Tata Kelola Pemerintahan		Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih berbasis teknologi informasi	Berkurangnya keanekaragaman hayati.	Ketahanan Sosial dan Budaya

No	RPJPD 2025-2045	KLHS RPJPD 2025-2045	KLHS RPJMD 2025-2029	KLHS RTRW 2025-2029	RPJMD 2025-2029
8					Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih berbasis teknologi informasi

Sumber: RPJPD Kabupaten Barito Utara Tahun 2025-2045, KLHS RPJPD Kabupaten Barito Utara Tahun 2025-2024, KLHS RPJMD Kabupaten Barito Utara Tahun 2025-2029, KLHS RTRW Kabupaten Barito Utara Tahun 2025-2029.

Berdasar Tabel 2.162. di atas terdapat delapan isu strategis daerah Kabupaten Barito Utara, yakni:

1) Infrastruktur Wilayah dan Permukiman yang Adil dan Merata

Isu Strategis Daerah Kabupaten Barito Utara untuk periode 2025–2029, khususnya yang berkaitan dengan Infrastruktur Wilayah dan Pemukiman yang Adil, Merata dan Berkelanjutan berdasarkan KLHS RPJPD Kabupaten Barito Utara 2025-2045 dan KLHS RPJMD Kabupaten Barito Utara 2025-2029 menunjukkan bahwa tantangan terbesar adalah mewujudkan jaringan infrastruktur yang benar-benar andal, terutama dalam menghubungkan wilayah-wilayah terisolasi dengan pusat-pusat ekonomi daerah. Secara aktual, isu ini mencakup beberapa hal: pertama, masih rendahnya persentase kemandapan jalan dan jembatan yang menghubungkan sentra-sentra produksi (seperti pertambangan dan perkebunan) dengan pusat distribusi, yang secara langsung menyebabkan tingginya biaya logistik daerah. Kedua, belum meratanya akses terhadap infrastruktur pelayanan dasar seperti air minum perpipaan dan sanitasi yang layak di seluruh kawasan permukiman, terutama di pedesaan dan pinggiran kota, yang berdampak pada kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Ketiga, perlunya penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) perumahan yang memadai, serta penanganan kawasan kumuh atau rawan bencana (seperti rawan longsor dan banjir) untuk menciptakan permukiman yang aman dan berkelanjutan.

Oleh karena itu, arah kebijakan strategis Barito Utara selama periode 2025–2029 akan berfokus pada percepatan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan dan jembatan yang terintegrasi, serta pengembangan jaringan air minum (PDAM) dan penataan kawasan permukiman secara berkeadilan, sejalan dengan visi daerah untuk menjadi wilayah yang maju, tumbuh pesat, sejahtera, dan berkeadilan. Kabupaten Barito Utara menghadapi masalah konektivitas fisik yang signifikan: data Statistik Daerah 2024

(BPS Kab. Barito Utara) menunjukkan bahwa 60,45% permukaan jalan di kabupaten ini berada dalam kondisi rusak berat, dengan konsentrasi kerusakan tertinggi di Kecamatan Teweh Tengah fenomena yang langsung menghambat mobilitas barang, akses layanan, dan kegiatan ekonomi lokal. Kondisi perkerasan jalan yang terbatas meningkatkan biaya logistik, memperpanjang waktu tempuh antar-pusat pelayanan, dan menjadi hambatan utama bagi pemerataan pembangunan wilayah. Panjang jalan kabupaten di Kabupaten Barito Utara pada tahun 2022 adalah 758,140 km. Berdasarkan kondisi permukaan jalan 320,904 km merupakan jalan dalam kondisi baik; 37,990 km dalam kondisi sedang dan 71,316 km dalam kondisi rusak serta 327,930 km dalam kondisi rusak berat. Panjang jalan menurut Jenis Permukaan dapat dilihat pada Tabel 2.163.

Tabel 2.163. Panjang Jalan Menurut Kondisi Jalan

Kondisi Jalan	Panjang Jalan (km)			
	2019	2020	2021	2022
Baik	273,234	272,399	303,543	320,904
Sedang	106,201	106,136	76,487	37,99
Rusak	111,276	100,906	62,315	71,316
Rusak Berat	267,429	278,699	315,795	327,93
Jumlah	758,140	758,140	758,140	758,140

Sumber: Kabupaten Barito Utara Dalam Angka, 2023.

Tabel 2.164. Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan

Kecamatan	Panjang Jalan (km)				
	Aspal	Perkerasan Beton	Telfort/Kerikil	Tanah	Jumlah
Montalat	13,17	9,41	22,78	72,75	118,10
Gunung Timang	49,15	2,86	6,60	28,00	86,60
Gunung Purei	-	4,40	0,19	15,72	20,30
Teweh Timur	39,49	20,55	19,08	42,09	121,20
Teweh Tengah	55,40	41,04	16,72	74,34	187,49
Teweh Baru	16,05	23,02	3,68	28,61	71,35
Teweh Selatan	34,35	13,14	17,47	19,05	84,00
Lahei	7,12	21,52	3,52	18,95	51,10
Lahei Barat	2,02	9,49	5,25	1,25	18,00
Barito Utara	216,733	145,398	95,254	300,755	758,14

Sumber: Kabupaten Barito Utara Dalam Angka, 2023.

Ketersediaan air bersih dan sanitasi masih menjadi isu strategis yang perlu prioritas. Laporan-laporan PUPR dan LKIP OPD PUPR Barito Utara 2024–2025 merekam upaya pembangunan SPAM dan program PAMSIMAS di beberapa desa (proyek SPAM di

Hurung Enepe dan Lampeong), namun cakupan layanan belum merata dan beberapa wilayah pedalaman masih bergantung pada sumber permukaan yang rentan pencemaran—membuat target akses air minum layak perlu percepatan melalui investasi infrastruktur dan pengelolaan sumber daya air yang lebih kuat.

Akses energi dan konektivitas digital juga menjadi isu pembatas. Statistik operasional PLN dan data BPS menunjukkan perlunya perluasan jaringan listrik dan peningkatan kapasitas distribusi untuk mendukung pusat-pusat kegiatan ekonomi dan pemukiman baru; di sisi lain, program konektivitas internet desa dan penguatan infrastruktur TIK tercatat sebagai prioritas, namun implementasi perlu percepatan agar layanan publik digital dan pendidikan jarak jauh dapat diakses merata. Kesenjangan kelistrikan dan digital berimplikasi pada pelayanan kesehatan jarak jauh, pendidikan, dan pertumbuhan UMKM digital.

Isu lingkungan dan daya dukung lahan menjadi faktor pengikat pada misi pemukiman berkelanjutan. Dokumen KLHS yang terkait RPJMD/Renstra menegaskan perlunya menjaga kawasan lindung, menekan alih fungsi lahan kritis, dan memperkuat pengelolaan DAS sebagai strategi mitigasi banjir, erosi, dan menurunnya kualitas air baku hal ini penting untuk memastikan pembangunan infrastruktur tidak merusak kapasitas lingkungan setempat dan menimbulkan risiko bencana berulang. Integrasi mitigasi lingkungan dalam setiap proyek infrastruktur (AMDAL/UKL-UPL, *green infrastructure*) menjadi kebutuhan strategi. Dari sisi perencanaan dan tata kelola, proses penyusunan RPJMD 2025–2029 menunjukkan adanya upaya partisipatif (forum konsultasi publik, FPD) dan kesiapan perangkat daerah untuk menyusun rancangan teknokratik; namun tantangan tetap pada sinkronisasi antar-dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra OPD, RKPD), ketersediaan data spasial/indeks sektoral yang mutakhir, serta kemampuan pembiayaan (APBD/DAK/kerjasama swasta) untuk merealisasikan skala intervensi infrastruktur yang diperlukan.

Penguatan sistem pemantauan kinerja (indikator capaian, IKM/IKL) dan aliran pendanaan terstruktur diperlukan untuk menjamin target terlaksana dan berkelanjutan. Isu strategis kunci yang harus menjadi fokus misi Infrastruktur Wilayah dan Pemukiman 2025–2029 di Barito Utara adalah (1) penanggulangan kerusakan jaringan jalan untuk memulihkan konektivitas dan menurunkan biaya logistik; (2) percepatan perluasan SPAM, sanitasi, dan proteksi sumber air bagi pemukiman pedalaman; (3) perluasan energi dan

konektivitas digital untuk mendukung layanan dasar dan ekonomi; (4) integrasi pengelolaan lingkungan (KLHS/DAS/RTH) dalam setiap program infrastruktur; dan (5) penguatan tata kelola perencanaan dan pembiayaan untuk memastikan program prioritas dapat dilaksanakan secara adil, merata, dan berkelanjutan. Saran intervensi prioritas mencakup program rehabilitasi jalan strategis, skema SPAM desa berbasis sumber lokal, perluasan elektrifikasi dan internet desa, pelaksanaan green infrastructure pada proyek-proyek besar, serta pembentukan mekanisme pembiayaan gabungan (APBD+DAK+KPBU/CSR) yang diarahkan pada outcome terukur, seperti terlihat pada Tabel 2.165.

Tabel 2.165. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Utara Tahun 2021-2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	2021		2022		2023		2024	
			Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)
1	Meningkatnya kualitas jalan dan jembatan	Persentase jalan Kabupaten dalam kondisi baik (>40 KM/jam)	43,82	38,06	48,25	38,99	53,13	46,41	63,12	0
		Persentase Panjang Jembatan dalam Kondisi Baik	80,64	84,17	91,1	84,61	94,7	94,3	96,5	0
2	Meningkatnya kualitas sumber daya air, irigasi, dan penanggulangan banjir	Persentase meningkatnya jalan penghubung yang tidak terkena banjir	43,23	13,49	61,3	62,77	0	0	0	0
		Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	55	60,59	0	0	66,3	63,05	76,3	0
3	Meningkatnya rumah tangga yang berakses air bersih	Persentase rumah tangga berakses air bersih	51,63	49,56	54,21	52,33	56,92	55,07	57,95	0
4	Meningkatnya sarana dan prasarana sanitasi permukiman	Persentase drainase dalam kondisi baik	70,68	69,05	74,2	75	77,92	112,89	86,85	0
		Persentase rumah tinggal bersanitasi	65	51,45	70	52,53	75	52,81	89	0
5	Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang	Persentase kesesuaian pemanfaatan RTRW	72	0,63	66,67	100	100	100	100	0

Sumber: Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Utara Tahun 2025.

Dengan berkembangnya jumlah aspirasi yang diusulkan dari para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait dengan pelayanan pada SKPD, lebih khusus lagi aspirasi yang diusulkan masyarakat pada saat Musyawarah Pembangunan tingkat desa dan kecamatan. Untuk Tahun Anggaran 2025 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Utara mencatat beberapa usulan/aspirasi masyarakat, dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi Dinas PUPR Kabupaten Barito Utara. Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Utara Tahun 2025 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikatornya yang akan dilaksanakan pada tahun 2025. Dalam merumuskan program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu: (1) berpedoman pada RKPD Kabupaten Barito Utara Tahun 2025 serta Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Utara Tahun 2024-2026; (2) mendukung pencapaian visi dan misi Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Barito Utara. Dalam hal ini, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Utara memiliki peran dalam pencapaian tujuan “Peningkatan Infrastruktur Wilayah” dan Sasaran ke-1 yaitu “meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur jalan dan jembatan”, (3) keserasian dan keterpaduan pembangunan dalam kerangka pembangunan daerah Kabupaten Barito Utara; (4) ketersediaan data dan informasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah; (5) program dan kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Utara; penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan

Kabupaten Barito Utara menghadapi sejumlah tantangan strategis dalam pembangunan infrastruktur wilayah dan permukiman yang adil dan berkelanjutan. Kondisi geografis wilayah yang didominasi topografi bergunung dan lembah serta jaringan sungai besar seperti Sungai Barito, menyebabkan ketimpangan akses antarwilayah, khususnya antara kawasan perkotaan Muara Teweh dengan kecamatan pedalaman seperti Kecamatan Gunung Purei, Kecamatan Teweh Timur, dan Kecamatan Lahei Barat. Berdasarkan BPS Kabupaten Barito Utara (2024), total panjang jalan kabupaten mencapai 1.263,97 km, dengan kondisi jalan mantap hanya sekitar 53,4%. Hal ini menunjukkan masih tingginya

kebutuhan peningkatan dan pemeliharaan infrastruktur jalan dalam upaya meningkatkan kelancaran konektivitas antarwilayah serta menurunkan biaya logistik barang dan jasa.

2) Kehidupan Sehat dan Sejahtera

Isu Strategis Daerah Kabupaten Barito Utara untuk periode 2025–2029, khususnya yang berkaitan dengan Misi Kehidupan Sehat dan Sejahtera (Misi 1), berakar dari kompleksitas tantangan makro kesehatan, kerentanan sistem layanan, dan masalah kualitas SDM. Isu-isu ini menuntut intervensi kebijakan yang terfokus pada percepatan indikator utama pembangunan manusia. Isu strategis ini mencakup tiga dimensi utama: pembenahan indikator makro, penguatan modal SDM melalui gizi, dan peningkatan mutu layanan.

a) Rendahnya capaian Angka Harapan Hidup (AHH) dan ancaman beban ganda penyakit

Isu strategis yang paling mendasar adalah stagnasi Angka Harapan Hidup (AHH) yang hanya meningkat secara marginal sebesar 0,05 tahun dalam lima tahun (2018–2022). Stagnasi AHH ini secara langsung menahan laju Indeks Pembangunan Manusia (IPM) daerah. Lambatnya peningkatan AHH diperburuk oleh dua ancaman kesehatan utama: kerentanan sistem Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) dan lonjakan Penyakit Tidak Menular (PTM) yang tidak terkontrol.

- Kerentanan KIA ditandai oleh lonjakan ekstrem Angka Kematian Ibu (AKI) hingga 364 per 100.000 Kelahiran Hidup pada tahun 2021, hal ini menunjukkan sistem kesehatan yang belum *resilien* terhadap krisis dan masih adanya kendala struktural "Tiga Terlambat" (geografis dan penanganan).
- Ancaman PTM didorong oleh rendahnya cakupan pelayanan Hipertensi yang hanya mencapai 15,64% pada tahun 2022. Cakupan yang sangat minim ini menciptakan bom waktu kesehatan berupa lonjakan komplikasi (stroke, gagal ginjal) yang akan membebani biaya Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di masa depan.

Oleh karena itu, kebijakan RPJMD harus diarahkan pada percepatan AHH melalui pergeseran strategi dari kuratif ke promotif-preventif aktif dalam pengendalian PTM dan penguatan ketahanan sistem KIA untuk mencapai target AKI yang aman dan konsisten.

b) Keterbatasan SDM, pemerataan layanan, dan urgensi penurunan stunting

Isu strategis kedua berfokus pada kualitas dan pemerataan layanan yang menjadi pilar peningkatan kualitas SDM.

- Kualitas dan kuantitas SDM

Permasalahan struktural yang mendesak adalah belum memadainya fasilitas pelayanan kesehatan dan keterbatasan tenaga kesehatan yang kritis, terutama dokter umum dan dokter gigi, karena minimnya peminat untuk bekerja di Kabupaten Barito Utara. Hal ini menghambat pemerataan dan akses masyarakat terhadap layanan esensial.

- Akselerasi *stunting*

Meskipun Kabupaten Barito Utara berhasil menekan prevalensi stunting ke angka 19,60% pada tahun 2022 (di bawah ambang batas WHO), target ambisius nasional 14% pada tahun 2026 menjadikannya program *breakthrough* dengan urgensi tertinggi. Penurunan *stunting* memerlukan konvergensi kebijakan gizi spesifik dan sensitif serta dukungan data yang harmonis.

Strategi yang harus diambil adalah peningkatan mutu dan pemerataan layanan, didukung dengan target ambisius 100% Puskesmas terakreditasi pada tahun 2026 dan implementasi program insentif untuk menarik dan mempertahankan tenaga kesehatan.

c) Risiko lingkungan dan ancaman kegagalan eliminasi penyakit menular

Isu strategis kesehatan sangat bergantung pada keberhasilan Isu Strategis Air Bersih dan Sanitasi Layak (Misi 2). Masih adanya perilaku Buang Air Besar Sembarangan (BABS) dan baru 36% desa yang mendeklarasikan ODF menjadi faktor determinan lingkungan yang secara langsung mengancam keberhasilan kesehatan.

- Ancaman TB dan *stunting*

Rendahnya capaian ODF menciptakan risiko kontaminasi lingkungan yang menghambat upaya penurunan stunting dan menjadi faktor risiko utama penularan Tuberkulosis (TB). Meskipun kinerja penemuan kasus TB sudah

tinggi (\$95,92\%\$ pada tahun 2022), eliminasi akan sulit dicapai tanpa pembenahan sanitasi.

- Risiko impor malaria

Keberhasilan Kabupaten Barito Utara yang telah mendekati status Eliminasi Malaria terancam oleh tingginya mobilitas penduduk (sektor pertambangan/perkebunan).

Oleh karena itu, RPJMD wajib mengintegrasikan alokasi anggaran infrastruktur sanitasi dan air bersih dengan indikator kinerja kesehatan untuk menjaga keberhasilan pengendalian penyakit menular dan mewujudkan lingkungan hidup yang mendukung kualitas hidup sehat berkelanjutan.

Selain itu keselarasan indikator pusat-daerah juga perlu disinkronkan yang mana untuk indikator bidang kesehatan dalam RPJMN terdiri dari 17 indikator dan dalam Rencana Induk Bidang Kesehatan (RIBK) sebanyak 34 indikator. Dalam dokumen perencanaan daerah pada RPJMD dan Renstra setidaknya minimal ada 70% indikator yang disinkronisasikan.

Tabel 2.166. Indikator Sinkronisasi Pusat-Daerah Bidang Kesehatan

No.	Indikator Kinerja Kabupaten/Kota	Keterangan
1	Jumlah kematian ibu	RIBK, RPJMN, IUP
2	Jumlah kematian balita	RIBK, RPJMN, Non-IUP
3	Prevalensi stunting	RIBK, RPJMN, IUP
4	Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis	RIBK, RPJMN, Non-IUP
5	Cakupan kepesertaan JKN	RPJMN, IUP
	Cakupan kepesertaan aktif jaminan kesehatan nasional (JKN)#5	RIBK, Non-IUP
6	Prevalensi Depresi pada usia ≥ 15 tahun	RIBK, RPJMN, Non-IUP
7	Prevalensi Obesitas > 18tahun	RIBK, RPJMN, Non-IUP
8	Jumlah kab/kota yang memiliki Unit Pelayanan Kesehatan Tingkat Desa/Kelurahan sesuai standar	RPJMN, Non-IUP
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar#8	RIBK, Non-IUP
9	Persentase Puskesmas terakreditasi paripurna	RPJMN, Non-IUP
10	Persentase RS terakreditasi paripurna	RPJMN, Non-IUP
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna#9,#10	RIBK, Non-IUP
11	Puskesmas dengan ketersediaan obat esensial dan vaksin IRL (Imunisasi Rutin Lengkap)	RPJMN, Non-IUP



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Tahun 2025-2029**

No.	Indikator Kinerja Kabupaten/Kota	Keterangan
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar#11	RIBK, Non-IUP
12	Persentase lanjut usia yang mandiri	RIBK, RPJMN, Non-IUP
13	Persentase merokok penduduk 10-21 tahun	RIBK, RPJMN, Non-IUP
14	Insidensi TBC	RPJMN, Non-IUP
	Angka keberhasilan pengobatan TB#14	RIBK, IUP
	Cakupan penemuan kasus TB#14	RIBK, IUP
15	Eliminasi Kusta	RPJMN, Non-IUP
16	Persentase Puskesmas dengan SDMk sesuai standar	RIBK, RPJMN, Non-IUP
17	Persentase RS pemerintah dengan dokter spesialis sesuai standar	RIBK, RPJMN, Non-IUP
18	Cakupan imunisasi bayi lengkap	RIBK, Non-IUP
19	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	RIBK, Non-IUP
20	Proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup	RIBK, Non-IUP
21	Usia harapan hidup	RIBK, IUP
22	<i>Total Fertility Rate</i> (Angka kelahiran total)	RIBK, Non-IUP
23	Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat	RIBK, Non-IUP
24	Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat	RIBK, Non-IUP
25	Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan nasional	RIBK, Non-IUP
26	Rasio tenaga kesehatan dan tenaga medis terhadap populasi	RIBK, Non-IUP
27	Proporsi kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat/cara KB modern (<i>proportion of demand satisfied by modern methods</i>)	RIBK, Non-IUP
28	Angka kelahiran menurut usia tertentu/ <i>Age Spesific Fertility Rate</i> (ASFR) 15-19 tahun	RIBK, Non-IUP
29	Persentase KB Pasca persalinan (KBPP)	RIBK, Non-IUP
30	Persentase penerbitan dan pemenuhan komitmen SPP- IRT sesuai standar	RIBK, Non-IUP
31	Persentase pangan industri rumah tangga aman dan bermutu	RIBK, Non-IUP
32	Persentase sarana IRTP yang memenuhi ketentuan	RIBK, Non-IUP
33	Persentase apotek dan toko obat yang mampu memelihara persyaratan perizinan	RIBK, Non-IUP
34	Persentase rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan dari lintas sektor yang ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah	RIBK, Non-IUP

3) Peningkatan dan Pemerataan Ekonomi, Berkurangnya Kesenjangan dan Kemiskinan

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Barito Utara dalam lima tahun terakhir menunjukkan tren positif, namun masih menghadapi tantangan struktural berupa dominasi sektor pertambangan, belum optimalnya hilirisasi sektor unggulan, serta kesenjangan ekonomi antarwilayah. Upaya pemerataan ekonomi di daerah ini diarahkan untuk menciptakan pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan, sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Kabupaten Barito Utara memiliki posisi strategis sebagai lumbung energi baru dan terbarukan (EBT) Kalimantan Tengah serta wilayah mitra pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Kondisi ini membuka peluang pengembangan sektor-sektor produktif seperti perkebunan, kehutanan, perikanan terpadu, energi bersih, dan industri pengolahan yang mampu menciptakan nilai tambah ekonomi serta lapangan kerja produktif di tingkat lokal.

Permasalahan dan Tantangan antara lain: Struktur ekonomi masih didominasi sektor pertambangan dengan nilai tambah rendah dan keterkaitan antar sektor yang lemah. Belum optimalnya hilirisasi hasil perkebunan dan kehutanan yang seharusnya mampu menciptakan industri pengolahan lokal. Ketimpangan pendapatan antarwilayah dan antar kelompok sosial ekonomi masih tinggi, terutama antara wilayah perkotaan Muara Teweh dan desa-desa di wilayah barat dan utara. Produktivitas sektor pertanian dan perikanan masih terbatas karena akses permodalan, teknologi, dan infrastruktur belum memadai. Jumlah UMKM yang tumbuh belum sebanding dengan potensi pasar dan sumber daya yang tersedia. Akses dan diversifikasi sumber energi baru terbarukan masih rendah, dengan ketergantungan besar pada energi fosil. Pelaksanaan program pengentasan kemiskinan belum terintegrasi secara optimal, terutama dalam penentuan sasaran dan keberlanjutan dampak.

Arah kebijakan pembangunan ekonomi lima tahun ke depan difokuskan pada transformasi ekonomi inklusif, hilirisasi sektor unggulan, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat desa. Strategi utamanya meliputi: (1) transformasi ekonomi dan hilirisasi industri dengan mengembangkan industri pengolahan berbasis hasil pertanian, perkebunan, dan kehutanan. Meningkatkan investasi melalui kemudahan berusaha dan promosi potensi unggulan daerah. Mendorong penerapan ekonomi hijau dan investasi berkelanjutan; (2) peningkatan kemandirian ekonomi lokal dengan menguatkan kapasitas UMKM dan koperasi melalui pelatihan, akses modal, dan digitalisasi usaha. Mengembangkan sentra ekonomi kreatif dan kewirausahaan muda berbasis potensi lokal. Meningkatkan peran

BUMDes dan kemitraan usaha desa-kota; (3) pemerataan peluang ekonomi dan pengurangan kemiskinan dengan memperluas lapangan kerja produktif melalui program padat karya dan pengembangan ekonomi perdesaan. Menyusun kebijakan perlindungan sosial yang adaptif berbasis data terpadu (DTKS). Mendorong peningkatan pendapatan masyarakat melalui sektor pertanian terpadu dan pengelolaan pangan mandiri.

Peningkatan dan pemerataan ekonomi daerah diarahkan untuk memperkuat fondasi pertumbuhan yang inklusif, berdaya saing, dan berkeadilan sosial. Tujuan utama dari kebijakan ini tidak hanya menitikberatkan pada percepatan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada pemerataan manfaat pembangunan, peningkatan produktivitas sektor unggulan, serta pengurangan tingkat kemiskinan dan kesenjangan antarwilayah. Kebijakan pembangunan ekonomi Kabupaten Barito Utara 2025–2029 juga difokuskan untuk memastikan keberlanjutan sumber daya alam, meningkatkan peran UMKM sebagai penggerak ekonomi lokal, serta menciptakan lapangan kerja baru di sektor-sektor produktif. Dengan demikian, arah kebijakan ekonomi daerah menyeimbangkan antara pertumbuhan (*growth*), pemerataan (*equity*), dan keberlanjutan (*sustainability*).

Tabel 2.167. Tujuan dan Sasaran Peningkatan dan Pemerataan Ekonomi, Bekurangnya Kesenjangan dan Kemiskinan di Kabupaten Barito Utara

No.	Tujuan	Sasaran Pokok
1	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan	1. Pertumbuhan ekonomi meningkat dari 3,63% (2025) menjadi 7,2% (2029) 2. PDRB per kapita meningkat dari Rp 97,79 juta (2025) menjadi Rp 140,9 juta (2029).
2	Mengurangi tingkat kemiskinan dan ketimpangan sosial ekonomi	1. Tingkat kemiskinan turun dari 5,89% (2025) menjadi 2,2% (2029) 2. Rasio Gini menurun dari 0,29 menjadi 0,24.
3	Meningkatkan produktivitas sektor unggulan daerah	1. Kontribusi sektor industri pengolahan meningkat dari 8,25% menjadi 9,5%. 2. Nilai ekspor produk olahan lokal meningkat setiap tahun.
4	Memperluas kesempatan kerja dan pemberdayaan masyarakat	1. Jumlah UMKM produktif meningkat rata-rata 10% per tahun 2. Rasio wirausaha produktif terhadap penduduk usia kerja meningkat dari 1,8% menjadi 3%.
5	Meningkatkan efektivitas program perlindungan sosial	1. Ketepatan sasaran DTKS meningkat 2. Jumlah penerima bantuan sosial produktif meningkat di wilayah tertinggal.

Tujuan dan sasaran pembangunan ekonomi daerah sebagaimana ditunjukkan pada tabel di atas merupakan wujud nyata dari orientasi pembangunan inklusif dan berkeadilan di Kabupaten Barito Utara. Kebijakan ini tidak hanya diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi makro, tetapi juga memastikan pemerataan hasil pembangunan antarwilayah, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan pengurangan kemiskinan secara berkelanjutan. Pencapaian sasaran tersebut menuntut sinergi lintas sektor, terutama antara bidang ekonomi, infrastruktur, sosial, dan lingkungan hidup, agar pertumbuhan ekonomi daerah dapat benar-benar menjadi motor penggerak kesejahteraan dan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Kabupaten Barito Utara.

Program prioritas pembangunan ekonomi Kabupaten Barito Utara dirancang untuk memperkuat daya saing daerah, meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat, serta memastikan pertumbuhan yang berkeadilan dan berkelanjutan. Setiap program menjadi instrumen kebijakan yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, baik melalui penguatan sektor unggulan, pemberdayaan ekonomi lokal, maupun penciptaan nilai tambah sumber daya alam. Uraian dari masing-masing program prioritas tersebut tersaji pada Tabel 2.168.

Tabel 2.168. Program Prioritas Peningkatan dan Pemerataan Ekonomi Kabupaten Barito Utara 2025–2029

Program	Tujuan	Fokus Kegiatan Utama	Pelaksana Utama (SKPD)
Program Pengembangan dan Hilirisasi Industri Lokal	Mendorong transformasi dari ekonomi dari berbasis sumber daya mentah menuju ekonomi bernilai tambah tinggi melalui pengolahan hasil pertanian, perkebunan, kehutanan, dan pertambangan.	a. Pengembangan sentra industri kecil dan menengah (IKM) berbasis potensi lokal (karet, kayu, CPO, hasil hutan bukan kayu) b. Dukungan infrastruktur dan insentif investasi bagi industri pengolahan c. Kemitraan antara pelaku usaha besar dan UMKM dalam rantai pasok lokal (<i>local value chain</i>).	DISDAGRIN, DISTAN, DISLH
Program Pemberdayaan UMKM dan Ekonomi Kreatif	Memperkuat kapasitas usaha kecil dan menengah serta meningkatkan kontribusinya terhadap perekonomian daerah.	a. Pelatihan kewirausahaan, manajemen bisnis, dan digitalisasi UMKM b. Fasilitasi akses permodalan melalui KUR, lembaga keuangan mikro, dan program IKAD.	DISNAKERTRANSKOPUKM, BPPD, BAPPEDALITBANG



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029

Program	Tujuan	Fokus Kegiatan Utama	Pelaksana Utama (SKPD)
		c. Peningkatan daya saing ekonomi kreatif berbasis budaya lokal dan potensi pariwisata.	
Program Ketahanan Pangan dan Peningkatan Produksi Pertanian	Menjamin ketersediaan dan kemandirian pangan, serta meningkatkan produktivitas sektor pertanian sebagai penopang utama ekonomi lokal.	a. Peningkatan sarana dan prasarana pertanian (irigasi, jalan usaha tani, alat mesin pertanian) b. Pengembangan kawasan sentra produksi pangan terpadu dan ketahanan pangan desa. c. Diversifikasi produksi pertanian berkelanjutan berbasis potensi wilayah.	DISTAN, DKPP
Program Pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT)	Mewujudkan ketahanan energi daerah melalui pemanfaatan potensi energi terbarukan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.	a. Pembangunan dan pengembangan PLTS, mikrohidro, dan biomassa di wilayah pedesaan. b. Pengembangan Desa Mandiri Energi berbasis potensi lokal. c. Peningkatan efisiensi dan diversifikasi energi melalui konservasi dan edukasi energi bersih.	DISHUB, DISPERKIMTAN, BAPPEDALITBANG
Program Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial Terpadu	Mengurangi tingkat kemiskinan melalui kebijakan perlindungan sosial yang adaptif, inklusif, dan berbasis data terpadu.	a. Penguatan sistem Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). b. Bantuan sosial produktif dan pemberdayaan keluarga miskin. c. Pengembangan integrasi program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.	DISSOPMD, DISDALDUKP3A
Program Pengembangan Kawasan Perikanan Terpadu	Mendorong peningkatan produksi, pengolahan, dan pemasaran hasil perikanan untuk memperkuat ketahanan pangan dan ekonomi lokal.	a. Pengembangan budidaya ikan air tawar terpadu di wilayah perdesaan. b. Fasilitasi industri pengolahan hasil perikanan skala kecil-menengah. c. Penguatan koperasi nelayan dan pengelolaan sumber daya perairan.	DKPP

Program	Tujuan	Fokus Kegiatan Utama	Pelaksana Utama (SKPD)
Program Promosi Investasi dan Kemudahan Berusaha	Meningkatkan minat investasi daerah melalui pelayanan terpadu dan promosi potensi ekonomi daerah.	a. Peningkatan kualitas pelayanan perizinan berbasis digital (OSS daerah). b. Promosi potensi investasi unggulan (perkebunan, energi, industri, pariwisata). c. Pemberian insentif investasi bagi usaha yang berorientasi hijau dan berkelanjutan.	DPMPTSP, BAPPEDALITBANG

Ketujuh program prioritas di atas merupakan tulang punggung kebijakan ekonomi daerah dalam lima tahun ke depan. Program-program ini saling terintegrasi dan diarahkan untuk:

- meningkatkan nilai tambah ekonomi daerah;
- memperkuat peran masyarakat dalam kegiatan ekonomi produktif;
- meningkatkan daya saing investasi dan lapangan kerja; serta
- memastikan keberlanjutan sumber daya alam dan energi bersih.

Melalui pelaksanaan program prioritas ini, Kabupaten Barito Utara diharapkan mampu bertransformasi menuju ekonomi hijau, mandiri, dan berkeadilan, sejalan dengan arah pembangunan Kalimantan Tengah dan dukungan terhadap pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Pelaksanaan program dan kebijakan di bawah Misi 4 diharapkan menghasilkan perubahan nyata dalam struktur dan kualitas perekonomian Kabupaten Barito Utara selama periode 2025–2029. Hasil yang diharapkan tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi secara kuantitatif, tetapi juga dari pemerataan manfaat pembangunan, peningkatan produktivitas sektor unggulan, serta terciptanya ekonomi hijau dan berkelanjutan. Hasil yang diharapkan dari pelaksanaan Misi 4 RPJMD Kabupaten Barito Utara Tahun 2025-2029 tersaji pada Tabel 2.169.

Tabel 2.169. Hasil yang Diharapkan Pelaksanaan Misi 4 Kabupaten Barito Utara 2025–2029

Hasil yang Diharapkan	Indikator Keberhasilan	Target 2029	Penanggung Jawab Utama (SKPD)
Struktur ekonomi daerah lebih seimbang dan berdaya saing tinggi	a. Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB meningkat dari 8,25% menjadi 9,5%.	Struktur ekonomi daerah tidak lagi bergantung pada sektor ekstraktif dan tumbuh lebih seimbang antara industri, pertanian, dan jasa.	BAPPEDALITBANG, DISDAGRIN, DISTAN



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Tahun 2025-2029**

Hasil yang Diharapkan	Indikator Keberhasilan	Target 2029	Penanggung Jawab Utama (SKPD)
Penurunan signifikan tingkat kemiskinan dan ketimpangan antarwilayah	b. PDRB per kapita naik dari Rp 97,79 juta menjadi Rp 140,9 juta. c. Laju pertumbuhan ekonomi mencapai 7,2%. a. Tingkat kemiskinan turun dari 5,89% menjadi 2,2%. b. Rasio Gini menurun dari 0,29 menjadi 0,24. c. Indeks Ketimpangan Wilayah (IKW) turun menjadi 0,65.	Penurunan kemiskinan secara berkelanjutan dan pemerataan kesejahteraan antar kecamatan tercapai.	DISSOPMD, BAPPEDALITBANG, BPS
Pertumbuhan UMKM dan wirausaha produktif sebagai motor ekonomi lokal	a. Jumlah UMKM produktif meningkat rata-rata 10% per tahun. b. Rasio wirausaha naik dari 1,8% menjadi 3%. c. Nilai ekspor produk olahan meningkat tiap tahun.	UMKM menjadi penggerak ekonomi lokal dan penyerap tenaga kerja terbesar.	DISNAKERTRANSKOPUKM, BPPD, BAPPEDALITBANG
Peningkatan kontribusi sektor pengolahan dan energi bersih terhadap PDRB	a. Kapasitas energi baru terpasang naik dari 2,5 MW menjadi 3,2 MW. b. Penggunaan energi terbarukan meningkat dari 7,5% menjadi 9,5%. c. Rasio elektrifikasi desa mencapai 100%.	Terciptanya ketahanan energi daerah dan transisi menuju energi bersih berbasis potensi lokal.	DISHUB, DISPERKIMTAN, BAPPEDALITBANG
Terciptanya ekonomi hijau dan berkelanjutan yang memberi manfaat bagi masyarakat luas	a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) meningkat dari 76,34 menjadi 78,50.	Terwujudnya praktik ekonomi hijau dan tanggung jawab sosial perusahaan yang mendukung	DISLH, DISTAN, BAPPEDALITBANG

Hasil yang Diharapkan	Indikator Keberhasilan	Target 2029	Penanggung Jawab Utama (SKPD)
	b. Luas rehabilitasi lahan kritis dan reklamasi meningkat setiap tahun. c. 75% perusahaan aktif melaksanakan CSR dan pelestarian lingkungan.	pembangunan berkelanjutan.	

4) Pendidikan Berkualitas

Pendidikan berkualitas merupakan salah satu isu strategis yang dapat menjadi fondasi keberhasilan seluruh pilar pembangunan di Kabupaten Barito Utara. Pendidikan berkualitas dalam konteks pembangunan daerah dapat didefinisikan atau dijelaskan sebagai sebuah sistem pendidikan yang memenuhi empat pilar utama: 1) Akses yang inklusif dan merata bagi seluruh anak; 2) Kualitas input yang didukung oleh tenaga pendidik yang kompeten dan sarana prasarana yang memadai; 3) Relevansi dan hasil pembelajaran yang menghasilkan lulusan berdaya saing; 4) Tata kelola yang efektif. Jika pilar-pilar ini belum dapat dipenuhi dengan baik, maka pencapaian target pembangunan manusia, peningkatan daya saing ekonomi, dan kualitas tata kelola pemerintahan akan terhambat.

Adapun yang mendasari pentingnya pendidikan berkualitas ini adalah dampaknya dan hubungannya secara langsung terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Meskipun IPM Kabupaten Barito Utara terus meningkat, capaian pada tahun 2024 sebesar 73,17 secara konsisten berada di bawah rata-rata Provinsi Kalimantan Tengah (74,73) dan Indonesia (75,02). Kesenjangan ini terutama disebabkan oleh lemahnya dimensi pendidikan. Data di tahun 2024 menunjukkan adanya jarak yang signifikan antara Harapan Lama Sekolah (HLS) sebesar 12,78 tahun dengan realitas Rata-rata Lama Sekolah (RLS) penduduk yang hanya mencapai 8,87 tahun (setara dengan tamat SMP). Angka ini menegaskan bahwa sistem pendidikan belum berhasil mempertahankan siswa hingga jenjang menengah, merefleksikan tantangan pada pilar akses dan pemerataan. Tingkat partisipasi sekolah untuk kelompok usia 16-18 tahun masih rendah yaitu hanya berkisar 65,31%, serta Angka Partisipasi Murni (APM) jenjang SMP/MTs yang menunjukkan tren penurunan menjadi sekitar 83,86%. Masalah ini juga diperumit oleh

kondisi geografis (yang menghambat akses) dan kurangnya kesadaran masyarakat dan orang tua terhadap pentingnya pendidikan bagi anak-anaknya

Dari sisi kualitas input, sistem pendidikan daerah menghadapi tantangan ganda. Kualitas tenaga pendidik masih belum optimal, di mana hanya sekitar 9,39% atau 159 guru PNS jenjang dasar belum memenuhi kualifikasi S1/D-IV. Rasio guru yang memiliki sertifikasi profesi juga hanya mencapai 34,55%, jauh dari target sebesar 88%. Pada saat yang sama, kondisi sarana dan prasarana juga memprihatinkan, dengan 12,43% bangunan SD dan 14,63% bangunan SMP dilaporkan dalam kondisi rusak, serta masih banyak sekolah yang kekurangan fasilitas dasar seperti perpustakaan dan laboratorium.

Selain itu, dampak dari kurangnya atau rendahnya akses dan kualitas input ini dapat terlihat jelas pada pilar relevansi dan hasil pembelajaran. Lulusan yang dihasilkan belum sepenuhnya memiliki kompetensi yang dibutuhkan, sehingga sektor ketenagakerjaan tidak dapat berkembang dengan optimal. Oleh karena itu, salah satu target yang perlu dicapai oleh pemerintah daerah yaitu meningkatkan kompetensi literasi dan numerasi siswa. Di sisi lain, kondisi ini secara langsung menghambat diversifikasi ekonomi daerah yang masih sangat bergantung pada sektor pertambangan dengan daya serap tenaga kerja yang rendah, serta berkontribusi pada Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang pada tahun 2024 sebesar 4,71%.

Sementara itu, pendidikan berkualitas dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Berbagai Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah, mulai dari badan pengelola keuangan hingga kepegawaian, secara eksplisit menyoroti perlunya peningkatan kompetensi sumber daya manusia aparatur melalui pendidikan dan pelatihan. Tanpa fondasi pendidikan yang kuat, upaya untuk menciptakan birokrasi yang profesional, akuntabel, dan berbasis digital akan terhambat, sehingga memperlambat kualitas pelayanan publik secara keseluruhan.

Beberapa tindakan atau langkah strategis yang direkomendasikan dan dapat dilakukan untuk mewujudkan pendidikan berkualitas dijelaskan dalam Tabel 2.170.

Tabel 2.170. Tujuan dan Langkah Strategis dalam Mewujudkan Pendidikan Berkualitas

Tujuan	Langkah Strategis
Memperluas akses dan menjamin pemerataan pendidikan.	▪ Fokus pada Pendidikan Usia Dini (PAUD) dan Menengah: Pentingnya penyelenggaraan pendidikan anak usia dini untuk membangun fondasi yang kuat,



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Tahun 2025-2029

Tujuan	Langkah Strategis
	serta meningkatkan akses dan kualitas pendidikan dasar. ▪ Mendorong Partisipasi Siswa: Mengatasi penyebab siswa putus sekolah, seperti faktor ekonomi, geografis, dan motivasi orang tua, menjadi krusial. Strategi yang dapat dilakukan adalah menyediakan layanan pendidikan dasar dan menengah yang terjangkau, bebas diskriminasi, dan berkualitas, serta secara aktif mendorong partisipasi anak-anak dalam program pendidikan awal. ▪ Pemberdayaan Orang Tua dan Masyarakat: Keberhasilan pendidikan tidak hanya bergantung pada sekolah. Penting untuk memberdayakan orang tua dalam pendidikan anak-anaknya dan memberikan pendidikan terhadap orang tua, mengakui peran vital keluarga dalam ekosistem pendidikan.
Meningkatkan kualitas input: Tenaga pendidik dan sarana prasarana.	▪ Peningkatan Kualifikasi dan Kompetensi Guru: Tindakan spesifik yang harus dilakukan adalah memberikan pelatihan, dukungan, dan pendampingan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas pengajaran, serta mendorong pemenuhan kualifikasi akademik S1/D-IV bagi guru yang belum memenuhinya. ▪ Rehabilitasi dan Modernisasi Sarana Prasarana: Mengatasi masalah bangunan sekolah yang rusak dan kekurangan fasilitas dasar menjadi prioritas. Arah kebijakan yang ditetapkan adalah meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan dasar, termasuk buku referensi, alat peraga, dan media pembelajaran modern. ▪ Pemanfaatan Teknologi Pembelajaran: Untuk meningkatkan jangkauan dan kualitas, penting untuk mendorong pemanfaatan dan maksimalisasi teknologi pembelajaran secara daring sebagai alat untuk pemerataan akses dan inovasi metode pengajaran.
Meningkatkan relevansi dan hasil pembelajaran.	▪ Penguatan Pendidikan Vokasi yang Sesuai Pasar Kerja: Untuk mengatasi ketidaksesuaian keterampilan tenaga kerja dengan kebutuhan pasar atau industri (<i>skill mismatch</i>), direkomendasikan untuk menyelenggarakan vokasi bagi penduduk usia produktif yang mampu mengakomodir kebutuhan Angkatan Tenaga Kerja bagi Sektor Unggulan. Ini adalah langkah strategis untuk menghubungkan dunia pendidikan dengan dunia industri. ▪ Pengembangan Pendidikan Tinggi yang Selaras dengan Potensi Daerah: Arah kebijakan jangka panjang adalah mempercepat partisipasi pendidikan tinggi dengan mengembangkan program studi (prodi) yang relevan, yang disesuaikan dengan komoditas

Tujuan	Langkah Strategis
	unggulan wilayah. Selain itu, diusulkan pembangunan perguruan tinggi berstandar internasional yang fokus pada riset dan klaster ekonomi potensial. ▪ Fokus pada Kompetensi Fundamental: Di tingkat dasar dan menengah, fokus harus diberikan pada peningkatan kompetensi literasi dan numerasi siswa, yang menjadi indikator kinerja utama dan fondasi untuk semua pembelajaran lanjutan.
Memperkuat tata kelola, pendanaan, dan pengawasan.	▪ Pemantauan dan Evaluasi Mutu Berkala: Untuk memastikan kualitas tetap terjaga, direkomendasikan untuk melakukan pemantauan dan evaluasi berkala terhadap mutu pendidikan di semua jenjang. ▪ Optimalisasi dan Inovasi Pendanaan: Selain mengandalkan dana transfer, dapat dilakukan peningkatan bantuan operasional sekolah daerah (BOSDA), sebagai upaya intervensi fiskal daerah untuk menunjang operasional sekolah. ▪ Penguatan Sinergi dan Kemitraan: Mengembangkan kerjasama dan kemitraan pada lembaga pendidikan non-pemerintah untuk memperluas akses terhadap pendidikan berkualitas. Hal ini juga mencakup sinergi antar-OPD.

5) Air Bersih dan Sanitasi Layak

Air Bersih dan Sanitasi Layak merupakan Isu Strategis Daerah Kabupaten Barito Utara untuk periode 2025–2029, Isu strategis daerah Kabupaten Barito Utara terkait pemenuhan Air Bersih dan Sanitasi Layak adalah tantangan dalam mencapai cakupan dan kualitas pelayanan yang merata, sejalan dengan target nasional Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Isu ini berakar pada keterbatasan jaringan perpipaan dan rendahnya persentase akses sanitasi aman di wilayah permukiman, terutama di luar ibu kota kabupaten (Muara Teweh). Capaian dan Isu Strategis Air Bersih dan Sanitasi di Barito Utara, Secara aktual, berdasarkan dokumen perencanaan daerah (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah/LKIP) Kabupaten Barito Utara untuk periode terakhir (data tahun 2024 yang merujuk pada Renstra sebelumnya), pemenuhan air bersih dan sanitasi menjadi sasaran strategis yang difokuskan pada peningkatan kualitas layanan dasar. Target Akses Air Bersih Layak: Salah satu sasaran strategis yang dicanangkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Barito Utara adalah peningkatan persentase rumah tangga yang berakses air bersih. Misalnya, pada tahun 2024, target yang ditetapkan adalah sekitar 56,92% rumah tangga memiliki akses terhadap air bersih, menunjukkan masih adanya gap yang besar untuk mencapai target universal 100%.

Permasalahan/kendala utama adalah belum adanya pemerataan jaringan perpipaan air minum, khususnya pada daerah kumuh, daerah khusus, dan daerah dengan masyarakat berpenghasilan rendah. Selain itu, menurunnya kualitas dan kuantitas air baku juga menjadi tantangan serius, yang memerlukan pembangunan sarana dan prasarana air bersih yang baru dan berkelanjutan. Target Akses Sanitasi Layak: Untuk sektor sanitasi, target utama adalah peningkatan persentase rumah tinggal bersanitasi layak. Data menunjukkan bahwa pada tahun 2023, target yang ditetapkan sebesar 65,00% (berdasarkan dokumen APBD dan target IKU), yang berarti hampir sepertiga rumah tangga masih memerlukan intervensi untuk mencapai sanitasi layak. Target ini jauh dari target sanitasi layak nasional yang pada periode yang sama berkisar di atas 75%.

Isu strategisnya adalah meningkatnya kebutuhan akses pelayanan sanitasi seiring pertumbuhan penduduk, serta tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya akses sanitasi yang layak dan aman. Selain itu, terdapat perubahan paradigma di tingkat nasional untuk fokus pada akses sanitasi aman dan berkelanjutan (bukan hanya layak), yang menuntut pemerintah daerah untuk tidak hanya membangun jamban, tetapi juga memastikan sistem pengolahan air limbah yang benar. Secara keseluruhan, pemenuhan air bersih dan sanitasi layak di Barito Utara masih menjadi isu krusial karena cakupan pelayanan belum optimal, dan perlu ditingkatkan melalui pembangunan sarana prasarana air bersih dan sanitasi masyarakat yang mendukung Capaian Standar Pelayanan Minimum (SPM), yang merupakan prioritas dalam Rencana Strategis Dinas PUPR. Pemenuhan akses air bersih dan sanitasi di Kabupaten Barito Utara menunjukkan capaian nyata tetapi masih terdapat kesenjangan pelayanan yang cukup besar antara pusat kota dan wilayah pedalaman.

Menurut publikasi Statistik Daerah Kabupaten Barito Utara 2024 (BPS), pada 2023 PDAM Barito Utara menyalurkan 4.370.976,18 m³ air kepada 16.696 pelanggan, menunjukkan keberadaan layanan perpipaan di sejumlah pusat permukiman namun belum menyentuh mayoritas permukiman desa. Pada sisi perilaku dan sumber air, mayoritas rumah tangga mengandalkan air kemasan/isi ulang untuk minum (51,27%), sementara untuk mandi/cuci 45,36% rumah tangga menggunakan air leding; sisanya masih memakai sumur dan sumber permukaan (sungai/danau) yang rentan kualitasnya. Dari sisi sanitasi, 53,01% rumah tangga memiliki sistem pembuangan tinja berupa tangki septik/IPAL, tetapi 17,43% rumah tangga tercatat belum memiliki fasilitas buang air besar pribadi (menggunakan MCK umum atau tidak ada), yang menandakan risiko kesehatan lingkungan masih nyata

di beberapa wilayah. (Sumber data utama: Statistik Daerah Kabupaten Barito Utara 2024 — BPS). Evaluasi kinerja instansi terkait—khususnya Dinas PUPR dan pengelola PDAM—menunjukkan bahwa program pembangunan SPAM jaringan perpipaan dan program PAMSIMAS telah dilaksanakan di sejumlah desa/klaster, tetapi capaian belum merata dan realisasi fasilitas kerap terbatas oleh kapasitas pembiayaan daerah serta kendala operasional (pemeliharaan, bahan baku, dan SDM pengelola).

Laporan Renstra dan LKIP Dinas PUPR Kabupaten menyatakan bahwa pengelolaan air minum dan air limbah “belum optimal” dan masih memerlukan percepatan investasi serta dukungan pembiayaan berkelanjutan untuk memperluas cakupan layanan ke desa-desa terpencil. Implementasi PAMSIMAS/PROGRAM SPAM menunjukkan hasil baik pada lokasi intervensi (beberapa desa mencapai cakupan jaringan dan SR ke rumah penduduk), tetapi skala program masih belum mencukupi untuk menutup kesenjangan kabupaten secara keseluruhan. Implikasinya: meskipun terdapat infrastruktur dasar dan sejumlah proyek berhasil (PDAM, SPAM desa, PAMSIMAS), masih ada kebutuhan mendesak untuk (1) memperluas jaringan perpipaan dan meningkatkan konektivitas SPAM ke lebih banyak rumah tangga, (2) menguatkan pengelolaan operasional PDAM (teknis dan komersial) agar produksi dan distribusi air dapat andal dan terjaga kualitasnya, (3) mempercepat program sanitasi komunal dan perilaku PHBS untuk mengurangi praktik sanitasi tidak layak, dan (4) mengamankan sumber pembiayaan berkelanjutan (kombinasi APBD/DAK/KPBU/CSR/dana bergulir) serta memperkuat kapasitas perawatan dan pemantauan kualitas air (uji bakteriologis/kimia secara rutin). Rekomendasi prioritas teknis meliputi: pemetaan desa prioritas tanpa layanan layak; program jaringan produksi-distribusi skala kecil (desa/klaster) yang mudah dikelola; program peningkatan kapasitas UPT/PDAM (pemeliharaan, manajemen tarif dan koleksi); serta integrasi sanitasi total berbasis masyarakat (STBM) sebagai program pengurangan risiko penyakit terkait sanitasi. ODF (*open defecation free*) Buang Air Besar Sembarangan (BABS) Nol, Dalam kehidupan sehari-hari, praktik hidup sehat merupakan salah satu wujud Revolusi Mental.

Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) menjadi sebuah pilihan dalam mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang lebih baik. Mari kita bersamasama melaksanakan Germas dengan 5 kegiatan fokus utama yaitu: 1) Melakukan aktivitas fisik 30 menit per hari; 2) mengonsumsi buah dan sayur sesuai pedoman gizi seimbang; 3) memeriksakan kesehatan secara rutin minimal 6 bulan sekali sebagai upaya deteksi dini penyakit; 4) tidak merokok; dan 5) memberikan ASI Eksklusif pada bayi berusia 0-6 bulan. Salah satu wujud

nyata pembangunan desa yaitu penyiapan desa dengan program “Stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS) NOL”, hal ini sesuai dengan Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 30 Tahun 2015 tentang Stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS) NOL. Desa-desanya yang telah mencapai (BABS NOL) yang baru 16,5% atau 17 desa dari 103 Desa/Kelurahan se Kabupaten Barito Utara. Desa yang telah mencapai BABS NOL di Kabupaten Barito Utara seperti tersaji pada Tabel 2.171.

Tabel 2.171. Daftar Desa yang Telah Mencapai BABS NOL di Kabupaten Barito Utara

No	Kecamatan	Desa	Tanggal Verifikasi
1	Teweh Selatan	Pandran Permai	07 November 2017
2	Teweh Selatan	Pandran Raya	07 November 2017
3	Teweh Selatan	Tawan Jaya	16 April 2019
4	Teweh Selatan	Trahean	04 Oktober 2019
5	Lahei Barat	Papar Pujung	10 Februari 2018
6	Gunung Timang	Jaman	22 Agustus 2020
7	Gunung Timang	Kandui	30 November 2020
8	Gunung Timang	Malungai	08 November 2018
9	Gunung Timang	Payang Ara	22 Oktober 2020
10	Gunung Timang	Pelari	21 Oktober 2020
11	Gunung Timang	Rarawa	09 November 2018
12	Gunung Timang	Sangkorang	02 September 2020
13	Gunung Timang	Tapen Raya	06 September 2020
14	Gunung Timang	Baliti	09 November 2020
15	Montallat	Rubei	24 September 2019
16	Gunung Purei	Payang	07 Desember 2017
17	Teweh Baru	Gandring	-

Sumber: Renja & Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Utara, 2025.

Tabel 2.172. Matriks Evaluasi Isu Strategis Pemeuhan Air Bersih dan Sanitasi Layak Kabupaten Barito Utara

Aspek/Indikator	Sumber Data (Terbaru)	Baseline 2023	Capaian 2024 (Estimasi/Evaluasi)	Kesenjangan/Permasalahan Utama	Rekomendasi Arah Kebijakan & Program Prioritas
Persentase rumah tangga dengan akses air minum layak	BPS Barito Utara 2024 (Publikasi Statistik Daerah)	77,54%	±78–80% (perkiraan, belum merata di pedesaan)	Cakupan layanan masih terkonsentrasi di wilayah perkotaan (Muara Teweh dan sekitarnya). Wilayah pedesaan dan perbatasan belum memiliki jaringan SPAM permanen.	Peningkatan jaringan SPAM desa/klaster, penguatan PDAM dalam produksi dan distribusi, integrasi dengan PAMSIMAS dan DAK Air Minum.



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029

Persentase rumah tangga dengan akses sumber air bersih	Dinas PUPR Kalteng (2023)	80,70%	±81%	Sebagian besar rumah tangga masih bergantung pada air kemasan dan air permukaan; belum ada sistem pengolahan air baku yang andal di beberapa wilayah.	Pembangunan IPA (Instalasi Pengolahan Air) kapasitas kecil-menengah di desa prioritas; pemetaan sumber air baku potensial (sungai dan sumur bor).
Jumlah pelanggan PDAM aktif	PDAM Barito Utara (dalam Statistik Daerah 2024)	16.696 pelanggan	±17.000 pelanggan	Keterbatasan kapasitas produksi dan jangkauan distribusi, terutama di luar Muara Teweh.	Revitalisasi jaringan perpipaan, perluasan sambungan rumah (SR) baru melalui DAK fisik dan dana CSR sektor tambang.
Volume air bersih yang disalurkan PDAM	PDAM Barito Utara 2023 (BPS 2024)	4.370.976,18 m³/tahun	±4,5 juta m³/tahun	Kualitas air dan kontinuitas distribusi masih belum stabil; kehilangan air (non-revenue water) relatif tinggi (>30%).	Program efisiensi teknis PDAM (pengurangan kebocoran, optimalisasi intake dan IPA), serta digitalisasi sistem pengukuran (meterisasi).
Persentase rumah tangga dengan fasilitas sanitasi layak (tangki septik/IPAL)	BPS 2024	53,01%	±55%	Masih ada ±17% rumah tangga tanpa fasilitas BAB pribadi (menggunakan MCK umum atau tidak ada sama sekali).	Pembangunan IPAL komunal berbasis masyarakat (STBM), pelatihan operator desa, bantuan bahan bangunan sanitasi individu.
Persentase rumah tangga dengan perilaku BAB sembarangan	BPS 2024 (indikasi STBM)	5-7% rumah tangga	±5% (menurun)	Praktik sanitasi tidak layak masih ditemukan di wilayah pedalaman (Teweh Timur, Gunung Purei).	Intensifikasi promosi PHBS, program STBM lintas sektor (Dinkes, PUPR, Desa), dan pemberian insentif bagi desa ODF.
Rasio infrastruktur air bersih dan sanitasi terhadap kebutuhan penduduk	Estimasi Bappeda 2024	0,6 : 1	±0,65 : 1	Belum seimbang antara kapasitas infrastruktur dan pertumbuhan penduduk serta permukiman baru.	



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029

Sistem penyediaan air minum di Kabupaten Barito Utara yang ditangani pemerintah, saat ini di kelola oleh Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Barito Utara. PDAM Kabupaten Barito Utara telah melayani 9 kecamatan wilayah administratif dan ada 1 unit BNA/Kota (Kota Muara Teweh) dan 10 SPAM IKK serta 1 unit SPAM Desa.



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Tahun 2025-2029**

Tabel 2.173. Cakupan Layanan SPAM Kabupaten Barito Utara

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk Tahun 2022	Jaringan Perpipaan (JP)					Bukan Jaringan Perpipaan (BJP)		Total Penduduk Terlayani	Cakupan Pelayanan (%)				
			PDAM		Non-PDAM (PAMSIMAS)		Total Penduduk (jiwa)	Sumur Gali/Sumur Bor							
			Pelanggan (unit)	Penduduk Terlayani (jiwa)	Pelanggan (unit)	Penduduk Terlayani (jiwa)		Jumlah Sarana (unit)	Penduduk Terlayani (jiwa)		JP+BJP	PDAM	Non-PDAM (PAMSIMAS)	JP	BJP
1	Montallat	12034	913	2922	184	589	3510	305	976	4486	24,28	4,89	29,17	8,11	37,28
2	Gunung Timang	12990	600	1920	541	1731	3651	190	608	4259	14,78	13,33	28,11	4,68	32,79
3	Gunung Purei	2938	406	1299	131	419	1718	48	154	1872	44,22	14,27	58,49	5,23	63,72
4	Teweh Timur	6926	502	1606	124	397	2003	853	2730	4733	23,19	5,73	28,92	39,41	68,33
5	Teweh Tengah	58563	10417	33334	399	1277	34611	595	1904	36515	56,92	2,18	59,1	3,25	62,35
6	Teweh Baru	22718	1366	4371	1234	3949	8320	115	368	8688	19,24	17,38	36,62	1,62	38,24
7	Teweh Selatan	15365	432	1382	362	1158	2541	1792	5734	8275	9	7,54	16,54	37,32	53,86
8	Lahei	14568	822	2630	523	1674	4304	17	54	4358	18,06	11,49	29,54	0,37	29,92
9	Lahei Barat	11804	599	1917	341	1091	3008	5	16	3024	16,24	9,24	25,48	0,14	25,62
	Jumlah	157906	16057	51382	3839	12285	63667	3920	12544	76211	32,54	7,78	40,32	7,94	48,26

6) Lingkungan Hidup dan Ekosistem Daratan Sehat, Lestari dan Berkelanjutan

Kabupaten Barito Utara dianugerahi kekayaan alam yang luar biasa, mulai dari hamparan hutan tropis yang luas, aliran sungai besar yang menjadi urat nadi kehidupan, hingga potensi sektor pertanian dan perikanan yang menjanjikan bagi kesejahteraan masyarakat. Namun, pesatnya aktivitas pertambangan, alih fungsi lahan, serta degradasi ekosistem telah menimbulkan tekanan serius terhadap keberlanjutan lingkungan. Kondisi ini menjadikan isu “Lingkungan Hidup dan Ekosistem Sehat, Lestari, dan Berkelanjutan” sebagai salah satu isu strategis utama dalam RPJMD Kabupaten Barito Utara. Isu ini menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan, agar pembangunan yang dilakukan tidak mengorbankan daya dukung dan daya tampung lingkungan yang menjadi penopang utama kehidupan masyarakat.

Tujuan utama dari isu strategis ini adalah menurunkan tingkat pencemaran dan kerusakan lingkungan yang kian meningkat, serta meningkatkan kualitas ekosistem hutan, sungai, dan lahan pertanian yang menjadi basis ekonomi lokal. Selain itu, isu ini mendorong penerapan praktik pembangunan yang ramah lingkungan, termasuk dalam sektor industri, pertanian, dan pemukiman, guna meminimalkan dampak negatif terhadap alam. Upaya ini juga diarahkan untuk memastikan keberlanjutan sumber daya alam sebagai fondasi ketahanan pangan, ketahanan energi, dan keberlangsungan ekonomi masyarakat Barito Utara dalam jangka panjang. Dengan demikian, pembangunan daerah tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjamin kelestarian lingkungan bagi generasi mendatang.

Kabupaten Barito Utara memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah, mulai dari hutan tropis, sungai Barito yang membentang sepanjang ± 900 km, hingga potensi geologi dan bentang alam yang unik. Wilayah ini didominasi oleh perbukitan struktural lipatan bermaterial campuran batuan sedimen karbonat dan non-karbonat, yang mencakup 88,39% dari total luas wilayah kabupaten (998.480,80 ha). Jenis tanah yang paling dominan adalah podsolik (72,24%), yang memiliki karakteristik rentan terhadap erosi dan degradasi bila tidak dikelola secara bijak.

Sistem Daerah Aliran Sungai (DAS) Barito yang melintasi wilayah ini terbagi menjadi lima sub-DAS utama, dengan Sub DAS Teweh mencakup 35,63% dan Sub DAS Lahei 34,39% dari total wilayah. Fungsi ekologis sungai dan hutan sangat penting sebagai penyangga

kehidupan masyarakat, terutama dalam penyediaan air bersih, pengendalian banjir, dan pelestarian keanekaragaman hayati.

Namun, pesatnya pertumbuhan sektor pertambangan, perkebunan, dan pembangunan infrastruktur membawa tantangan besar terhadap kelestarian lingkungan dan keseimbangan ekosistem. Isu strategis ini muncul sebagai respons terhadap tekanan ekologis yang semakin meningkat, seperti:

a. Alih fungsi lahan

Alih fungsi lahan secara masif untuk kepentingan pertambangan dan perkebunan di Kabupaten Barito Utara menjadi salah satu penyebab utama tekanan terhadap lingkungan hidup. Luas perizinan eksploitasi tambang dan perkebunan tercatat mencapai ratusan ribu hektare, dengan izin perkebunan swasta dan rakyat seluas 345.686,52 hektare serta izin usaha pertambangan eksplorasi seluas 174.081,32 hektare yang tersebar di sembilan kecamatan. Aktivitas ini sebagian besar berlangsung di dalam kawasan hutan produksi dan lindung, sehingga berisiko mempercepat degradasi lingkungan, mengganggu fungsi ekologis hutan, serta memicu erosi, sedimentasi, dan penurunan kualitas air di wilayah sekitar.

b. Penurunan kualitas air dan tanah

Aktivitas eksploitasi sumber daya alam di Kabupaten Barito Utara, khususnya di sektor pertambangan dan pemukiman padat, telah menyebabkan penurunan kualitas air dan tanah yang signifikan. Jumlah titik pencemaran meningkat dari 18 titik pada tahun 2022 menjadi 24 titik pada tahun 2023, menunjukkan eskalasi tekanan terhadap lingkungan. Penurunan kualitas air Sungai Barito sebagai sumber utama kehidupan masyarakat berdampak langsung pada sektor perikanan tangkap, yang mengalami penurunan hasil, serta menimbulkan risiko kesehatan masyarakat akibat paparan air tercemar. Kondisi ini menegaskan pentingnya pengendalian pencemaran dan pengelolaan lingkungan yang lebih ketat untuk menjaga keberlanjutan ekosistem perairan dan kualitas hidup masyarakat.

c. Ancaman terhadap keanekaragaman hayati

Kawasan hutan di Kabupaten Barito Utara menghadapi ancaman serius terhadap keanekaragaman hayati akibat tekanan dari pembalakan liar dan konversi lahan untuk kepentingan ekonomi. Aktivitas ini tidak hanya mengganggu keseimbangan ekosistem, tetapi juga mengancam habitat alami flora dan fauna endemik yang

bergantung pada tutupan hutan. Peningkatan produksi kelapa sawit dari 8.151 ton pada tahun 2023 menjadi 8.284 ton pada tahun 2024 mencerminkan ekspansi lahan perkebunan yang berisiko mempersempit ruang hidup spesies alami dan mempercepat degradasi lingkungan. Jika tidak dikendalikan, tren ini dapat menyebabkan hilangnya fungsi ekologis hutan sebagai penyangga kehidupan dan sumber daya hayati.

d. Ketimpangan akses terhadap air bersih dan sanitasi di wilayah terpencil

Ketimpangan akses terhadap air bersih dan sanitasi masih menjadi tantangan nyata di wilayah terpencil Kabupaten Barito Utara, khususnya di kecamatan seperti Gunung Purei, Montallat, dan Teweh Timur. Keterbatasan infrastruktur dasar dan layanan publik di daerah-daerah ini menyebabkan sebagian besar masyarakat belum menikmati akses yang layak terhadap sumber air bersih dan sistem pengelolaan limbah yang memadai. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada kesehatan dan kualitas hidup masyarakat, tetapi juga memperbesar risiko pencemaran lingkungan akibat limbah domestik yang tidak tertangani. Oleh karena itu, peningkatan layanan air bersih dan sanitasi di wilayah terpencil menjadi prioritas penting dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

e. Timbulan sampah yang belum tertangani secara optimal

Timbulan sampah di Kabupaten Barito Utara yang mencapai sekitar 14.500 ton per tahun menunjukkan tantangan serius dalam pengelolaan limbah domestik. Dengan tingkat pengelolaan yang baru mencapai sekitar 62%, masih terdapat sekitar 38% sampah yang belum tertangani secara optimal, berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan dan gangguan kesehatan masyarakat. Kondisi ini mencerminkan perlunya peningkatan kapasitas sistem pengumpulan, pengolahan, dan pemanfaatan sampah, serta penguatan edukasi dan partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan. Upaya ini menjadi bagian penting dalam mewujudkan tata kelola lingkungan yang berkelanjutan dan mendukung kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh.

Isu lingkungan hidup dan ekosistem berkelanjutan menjadi krusial dalam pembangunan Kabupaten Barito Utara karena selaras dengan visi daerah yang menekankan prinsip keadilan dan keberlanjutan. Misi pembangunan juga menggarisbawahi pentingnya pemanfaatan sumber daya alam secara adil dan seimbang dengan pelestariannya,

sehingga tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjaga kelestarian lingkungan. Program-program unggulan seperti pembangunan sarana air bersih desa, pemberdayaan kelompok tani, dan penguatan peran adat dalam pelestarian budaya lokal turut memperkuat pendekatan pengelolaan lingkungan berbasis komunitas, yang menempatkan masyarakat sebagai aktor utama dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan kualitas hidup secara berkelanjutan.

Untuk menjawab berbagai tantangan lingkungan yang dihadapi Kabupaten Barito Utara, arah kebijakan yang perlu diambil mencakup penguatan regulasi dan pengawasan terhadap aktivitas pertambangan dan perkebunan agar lebih terkendali dan berkelanjutan. Upaya rehabilitasi lahan kritis serta perlindungan kawasan konservasi dan Daerah Aliran Sungai (DAS) Barito menjadi prioritas dalam menjaga fungsi ekologis wilayah. Selain itu, pengembangan ekonomi hijau berbasis potensi lokal seperti pertanian organik, ekowisata, dan perikanan berkelanjutan perlu didorong untuk menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Peningkatan literasi lingkungan dan partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam juga menjadi kunci keberhasilan kebijakan ini. Integrasi kebijakan lingkungan ke dalam perencanaan pembangunan lintas sektor serta investasi dalam teknologi pengelolaan sampah dan limbah domestik maupun industri akan memperkuat fondasi pembangunan berkelanjutan di Barito Utara.

Isu strategis ini bukan hanya soal menjaga alam, tetapi juga tentang menjamin keberlanjutan hidup masyarakat Barito Utara hari ini dan generasi mendatang. Dengan pendekatan kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha, Kabupaten Barito Utara dapat menjadi contoh daerah yang tumbuh pesat tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan.

7) Ketahanan Sosial dan Budaya

Berkaitan dengan ketahanan sosial dapat mengacu pada IPM. Selama periode 2019–2024, IPM Kabupaten Barito Utara menunjukkan tren peningkatan yang konsisten, menandakan perbaikan kualitas pembangunan manusia di berbagai sektor. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, nilai IPM meningkat dari 70,52 pada tahun 2019 menjadi 72,31 pada tahun 2024. Dengan capaian ini, Barito Utara telah masuk dalam kategori “tinggi” dan menunjukkan kinerja pembangunan manusia yang lebih baik dibanding rata-rata beberapa kabupaten lain di Kalimantan Tengah. Pada aspek sosial lainnya untuk

tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman dan Keindahan) sebesar 87,5% pada tahun 2025, persentase konflik yang tertangani pada tahun 2025 sebesar 80%, persentase penduduk miskin 5,07%, indeks kepuasan masyarakat kategori B dengan nilai 78, angka prevalensi stunting masih 16% (Baperida Kabupaten Barito Utara, 2025). Kondisi ini menunjukkan bahwa ketahanan sosial untuk Kabupaten Barito Utara masih perlu ditingkatkan untuk 5 tahun kedepan. Kualitas kesehatan, pendidikan dan standard hidup layak pada suatu keluarga menjadi pondasi terbangunnya IPM yang tinggi sehingga ketahanan sosia juga terbentuk dengan baik.

Keluarga sebagai unit terkecil pembangunan dapat menjadi cerminan ketahanan sosial. Indeks Kualitas Keluarga harus ditunjang oleh dimensi kualitas ketahanan kesehatan, pendidikan, dan ketahanan ekonomi. Peningkatan ketahanan sosial dapat dilakukan dengan menuntaskan kantong-kantong kemiskinan di daerah perdesaan melalui kebijakan afirmatif. Pengentasan kemiskinan yang dilakukan perlu memperhatikan kearifan lokal dan memberdayakan masyarakat supaya mandiri finansial secara berkelanjutan. Pemberian insentif selain bantuan langsung tunai perlu dipertimbangkan, seperti contohnya pelatihan kewirausahaan dan pelatihan keterampilan khusus. Lebih lanjut, pemerintah juga perlu bekerjasama dengan pihak swasta untuk menyediakan lapangan pekerjaan yang dapat menyerap tenaga kerja dari hasil pelatihan tersebut.

Penguatan ketahanan budaya lokal juga penting untuk dilakukan dalam menghadapi tantangan pembangunan di era digital. Pemerintah harus hadir secara proaktif untuk melindungi dan menghidupkan kembali seluruh khazanah budaya lokal yang menjadi ciri khasnya, baik itu budaya fisik maupun non fisik. Nilai budaya lokal yang dilestarikan dapat menjadi sumberdaya ekonomi baru yang dapat menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan asli daerah, dan memperluas peluang usaha masyarakat. Pemerintah perlu hadir dalam penguatan budaya lokal melalui pengembangan berbasis komunitas. Masyarakat dapat terlibat dengan aktif dalam kegiatan kebudayaan, baik sebagai pelaku, penikmat, maupun pengembang. Hal ini memastikan bahwa kebudayaan tidak hanya "dipajang", tetapi hidup dan berkembang melalui interaksi dan partisipasi aktif.

Kabupaten Barito Utara memiliki suku atau penduduk asli yaitu suku Dayak Bakumpai dan Dayak Taboyan atau disebut juga Dayak Tawoyan. Bahasa yang digunakan, selain bahasa resmi nasional (bahasa Indonesia), dalam keseharian penduduk juga memakai

bahasa Dayak dengan dialek Barito Utara. Berdasarkan kondisi demografi, 73% penduduknya beragama Islam, 11% beragama Protestan, 11% beragama Hindu, dan sisanya beragama Budha, Konghucu, Katolik, serta agama/kepercayaan lainnya (BPS Kabupaten Barito Utara, 2025).

Kabupaten Barito Utara memiliki kebudayaan khas daerah yang beragam berupa tarian, alat musik, dan sebagainya. Di kabupaten ini terdapat 16 sanggar seni budaya yang dibina oleh pemerintah daerah (Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga, 2025). Kekayaan budaya tersebut tercermin dalam tradisi yang masih dipertahankan, seperti *Batuyang*, *Maulid Bakumpai*, dan ritual pengobatan *Badewah Dayak*. Praktik-praktik tersebut membentuk kerangka sosial dan nilai-nilai luhur masyarakat setempat.

Kekuatan budaya tersebut berakar pada kearifan lokal dalam mengelola sumber daya. Masyarakat Dayak, khususnya yang menganut kepercayaan Kaharingan, memiliki sistem hukum adat yang ketat dalam mengatur hubungan dengan lingkungan. Norma adat ini, yang diimplementasikan oleh tokoh adat seperti *Damang*, membatasi pemanfaatan hutan dan sumber daya alam, bahkan di kawasan sakral seperti Gunung Lumut. Ketaatan terhadap hukum adat tersebut adalah wujud nyata upaya pelestarian lingkungan tradisional.

Di sisi lain, Kabupaten Barito Utara merupakan wilayah dengan konsentrasi *site* tambang batubara yang besar. Sektor pertambangan ini menjadi salah satu motor ekonomi utama, namun menimbulkan dampak lingkungan yang signifikan. Laporan studi menunjukkan bahwa kegiatan pertambangan batubara berpotensi menyebabkan terjadinya polusi air, polusi udara, dan pencemaran tanah. Oleh sebab itu, sangat penting bagi perusahaan tambang untuk rutin melakukan pemantauan kualitas lingkungan agar baku mutu lingkungan tidak terlampaui. Tantangan terbesar bagi Kabupaten Barito Utara adalah dalam menyeimbangkan pembangunan industri dengan pelestarian budaya dan lingkungan. Diperlukan sinergi antara regulasi pemerintah, penegakan hukum adat, dan tanggung jawab perusahaan. Upaya seperti rehabilitasi lahan bekas tambang harus diintensifkan. Tujuannya adalah memastikan agar kekayaan mineral tidak mengorbankan warisan budaya leluhur dan kelestarian ekosistem di wilayah tersebut.

8) Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Berbasis Teknologi Informasi

Hasil evaluasi tahun 2023, nilai SAKIP Kabupaten Barito Utara masih berada di bawah rata-rata nasional, yaitu 63,36. Kendala utama yang dihadapi dalam peningkatan nilai SAKIP ini yakni rumusan sasaran strategis yang belum berorientasi pada hasil, indikator kinerja yang kurang relevan, serta pelaksanaan pemantauan kinerja yang belum optimal. Selain itu, factor seperti tidak efisiennya pemberian TPP dan tidak jelasnya laporan penyelenggaraan pemerintah daerah, juga menghambat pencapaian kinerja yang lebih baik. Dalam upaya reformasi birokrasi, Pemerintah Kabupaten Barito Utara telah melakukan berbagai upaya perbaikan, termasuk dalam penyederhanaan struktur birokrasi, serta *digitalisasi* melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Indeks SPBE Pemerintah Kabupaten Barito Utara pada tahun 2024 sebesar 2,73 (baik). Nilai berada di atas rata-rata nilai indeks kabupaten (2,45), namun berada di bawah rata-rata provinsi dan nasional yang masing-masing nilai rata-rata indeksnya 3,42 dan 3,12. Adapun nilai indeks meliputi domain kebijakan SPBE, domain tata kelola SPBE, domain manajemen SPBE, dan domain layanan SPBE. Dari masing-masing domain tersebut memiliki beberapa aspek. Lebih jelas terkait nilai tersebut disajikan pada Tabel 2.174.

Tabel 2.174. Nilai Indeks SPBE, Domain, dan Aspek Kabupaten Barito Utara Tahun 2024

Nama Indeks	Nilai 2024	Predikat
SPBE	2,73	Baik
Domain Kebijakan SPBE	2,90	Baik
<i>Aspek 1 - Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE</i>	2,90	Baik
Domain Tata Kelola SPBE	2,20	Cukup
<i>Aspek 2 - Perencanaan strategis SPBE</i>	2,50	Cukup
<i>Aspek 3 - Teknologi Informasi dan Komunikasi</i>	1,75	Kurang
<i>Aspek 4 - Penyelenggara SPBE</i>	2,50	Cukup
Domain Manajemen SPBE	1,09	Kurang
<i>Aspek 5 - Penerapan Manajemen SPBE</i>	1,13	Kurang
<i>Aspek 6 - Audit TIK</i>	1,00	Kurang
Domain Layanan SPBE	3,56	Sangat baik
<i>Aspek 7 - Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik</i>	3,60	Sangat baik
<i>Aspek 8 - Layanan Publik Berbasis Elektronik</i>	3,50	Sangat baik

Sumber: Laporan Hasil Evaluasi SPBE Tahun 2024 Pemerintah Kab. Barito Utara (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, 2024).

Berdasar pada Tabel 2.174 di atas, terlihat bahwa ada dua domain SPBE yang berada di bawah predikat baik (indeks minimal 2,60) atau berada predikat kurang-cukup yakni

Domain Tata Kelola SPBE (2,20) predikat cukup, dan Domain Manajemen SPBE (1,09) predikat kurang. Dari segi aspek penilaian memiliki nilai indeks dengan predikat kurang-sangat baik.

a. *Aspek 1 – kebijakan internal tata kelola SPBE*

Secara keseluruhan penerapan pada aspek kebijakan internal tata kelola SPBE yang sudah dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten Barito Utara adalah dengan adanya kebijakan arsitektur SPBE, kebijakan peta rencana SPBE, kebijakan manajemen data, kebijakan pembangunan aplikasi SPBE, kebijakan layanan pusat data, kebijakan layanan jaringan intra, kebijakan penggunaan sistem penghubung layanan, kebijakan keamanan informasi, kebijakan audit TIK, dan kebijakan tim koordinasi SPBE.

Namun di sisi lain, pemerintah Kabupaten Barito Utara masih memiliki kelemahan terkait kebijakan manajemen keamanan informasi, dimana kebijakan manajemen keamanan informasi hanya secara umum dan cakupannya belum dapat menguraikan secara detail sebagaimana turunan dari PerBSSN 4/2021 dimana pemerintah daerah harus memiliki pengaturan sendiri.

b. *Aspek 2 – perencanaan strategis SPBE*

Secara keseluruhan penerapan pada aspek perencanaan strategis SPBE yang sudah dipenuhi Pemerintah Kabupaten Barito Utara adalah adanya arsitektur SPBE, peta rencana SPBE, keterpaduan rencana dan anggaran SPBE, dan inovasi proses bisnis SPBE.

Kelemahan pada aspek ini berupa keterpaduan rencana dan anggaran SPBE dan inovasi proses bisnis SPBE, dimana keterpaduan rencana dan anggaran SPBE hanya mengkonsultasikan sebagian rencana dan anggaran SPBE (jarkomdat) kepada perangkat pengelola TIK, inovasi proses bisnis SPBE belum melakukan perbaikan proses bisnis sebagai bentuk inovasi proses bisnis.

c. *Aspek 3 – teknologi informasi dan komunikasi*

Secara keseluruhan penerapan pada aspek teknologi informasi dan komunikasi yang sudah dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten Barito Utara dengan adanya layanan pusat data dan layanan jaringan intra.

Kelamahan pada aspek ini berupa pembangunan aplikasi SPBE, penggunaan sistem penghubung layanan, dan layanan pusat data, dimanana aplikasi SPBE belum menerapkan siklus pembangunan aplikasi, penggunaan sistem penghubung layanan belum ada sistem penghubung layanan, sementara layanan pusat data telah dimanfaatkan namun hanya pada sebagian perangkat daerah.

d. *Aspek 4 – penyelenggara SPBE*

Secara keseluruhan penerapan pada aspek penyelenggara SPBE yang sudah dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten Barito Utara adalah dengan adanya pelaksana tim koordinasi SPBE dan kolaborasi penerapan SPBE. Pada aspek ini Pemerintah Kabupaten Barito Utara memiliki kelemahan terkait pelaksanaan tim koordinasi SPBE, dimana tim koordinasi telah ditetapkan namun tugas/program belum seluruhnya dilaksanakan.

e. *Aspek 5 – penerapan manajemen SPBE*

Secara keseluruhan penerapan pada aspek penerapana manajemen yang sudah dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten Barito Utara adalah dengan adanya penerapan Manajemen Risiko SPBE. Pada aspek ini terdapat kelemahan dalam beberapa indikator yakni penerapan manajemen keamanan informasi, manajemen data, manajemen asset TIK, kompetensi sumber daya manusia SPBE, manajemen perubahan, manajemen pengetahuan, manajemen layanan SPBE, dan manajemen risiko SPBE.

Penerapan manajemen keamanan informasi belum memiliki pedoman atau standar yang diacu. Dokumentasi penerapan manajemen data belum ditemukan seperti daftar data induk dan basis data yang dikelola. Dokumentasi penerapan manajemen asset TIK juga belum ada. Pemenuhan kompetensi SDM SPBE belum diterapkan, mencakup kompetensi di bidang proses bisnis pemerintahan, arsitektur SPBE, data dan informasi, keamanan SPBE, aplikasi SPBE, dan infrastruktur SPBE. Dokumentasi penerapan manajemen perubahan, manajemen pengetahuan, dan manajemen layanan SPBE belum ada. Penerapan manajemen risiko SPBE tidak mengacu pada pedoman yang telah ditetapkan, hanya berupa SOP dan tata cara.

f. *Aspek 6 – pelaksanaan audit TIK*

Pada aspek pelaksanaan audit TIK, masih terdapat kelemahan terkait pelaksanaan audit infrastruktur SPBe, pelaksanaan audit aplikasi SPBE, dan pelaksanaan audit keamanan SPBE, dimana pelaksanaan audit belum dilakukan.

g. *Aspek 7 – layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik*

Secara keseluruhan penerapan pada aspek layanan administrasi berbasis elektronik yang sudah dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten Barito Utara antara lain berupa layanan perencanaan, layanan penganggaran, layanan keuangan, layanan pengadaan barang dan jasa, layanan kepegawaian, layanan kearsipan dinamis, layanan pengelolaan barang milik negara/daerah, layanan pengawasan internal pemerintah, layanan akuntabilitas kinerja organisasi, dan layanan kinerja pegawai. Aspek ini memiliki kekuatan berupa adanya layanan kepegawaian, layanan perencanaan, layanan penganggaran, layanan pengadaan barang dan jasa, layanan kearsipan dinamis, dan layanan kinerja pegawai yang menjadi kekuatan dalam penerapan SPBE pada Pemerintah Kabupaten Barito Utara.

Beberapa layanan telah menggunakan aplikasi umum atau aplikasi berbagi pakasi seperti layanan kepegawaian menggunakan SIASN, layanan perencanaan dan penganggaran menggunakan SIPD, layanan pengadaan barang dan jasa menggunakan SPSE, layanan kearsipan dinamis menggunakan SRIKANDI, sementara layanan kinerja pegawai menggunakan aplikasi yang dikembangkan sendiri berupa e-Kinerja yang telah memiliki fitur transaksi dan mampu terintegrasi dengan aplikasi lain SIDIAN (presensi) dan SIKA (penentuan TPP).

h. *Aspek 8 – layanan publik berbasis elektronik*

Secara keseluruhan penerapan pada aspek ini sudah dipenuhi dengan adanya layanan pengaduan pelayanan publik, layanan data terbuka, jaringan dokumentasi dan informasi hukum (JDIH), layanan publik sektor 1, 2, dan 3.

Aspek ini memiliki kekuatan berupa adanya layanan publik sektor 1, 2, dan 3, serta layanan pengaduan pelayanan publik yang menjadi kekuatan dalam penerapan SPBE di Kabupaten Barito Utara. Layanan publik sektor 2 dibuktikan dengan Dokumentasi penggunaan elsimil yang menunjukkan bahwa layanan publik sectoral berbasis elektronik yang mendukung RB tematik (stunting) telah dimanfaatkan, layanan publik

sektor 1 dibuktikan dengan dokumentasi penggunaan *myBPHTB* yang dapat terhubung dengan aplikasi BPN yang menunjukkan bahwa layanan publik sektoral berbasis elektronik yang dikembangkan sendiri yang memiliki fitur transaksi serta telah dapat berkolaborasi dan telah dimanfaatkan. Layanan publik sektor 3 dibuktikan dengan dokumentasi penggunaan OSS yang menunjukkan bahwa layanan publik sektoral berupa aplikasi berbagi pakai OSS telah dimanfaatkan. Layanan pengaduan pelayanan publik dibuktikan dengan dokumentasi penggunaan aplikasi umum SP4N Lapor.

Selain memiliki kekuatan, aspek ini masih memiliki kelemahan berupa layanan jaringan dokumentasi dan informasi hukum (JIDH) dan layanan data terbuka, dimana layanan JDIH dan SIMDATA menggunakan layanan berbasis elektronik yang dikembangkan sendiri dan belum memiliki fitur transaksi.

Delapan isu strategis tersebut jika dikaitkan dengan delapan misi kepala daerah Kabupaten Barito Utara dapat dilihat pada Tabel 2.175.

Tabel 2.175. Keterkaitan Isu Strategis Daerah dengan Misi Kepala Daerah

No.	Isu Strategis Daerah	Misi
1.	Infrastruktur Wilayah dan Pemukiman yang Adil, Merata dan Berkelanjutan	Misi 2: Meningkatkan pembangunan infrastruktur secara adil dan merata dalam rangka menunjang peningkatan kualitas pembangunan perekonomian, kesehatan, pendidikan, pelayanan masyarakat, pemerintahan, kebudayaan, pemuda, dan olahraga
2.	Kehidupan Sehat dan Sejahtera	Misi 1: Mewujudkan sumber daya manusia yang religius, berakhlak, sehat, cerdas, produktif, berwawasan maju, terampil, mampu bersaing, kreatif, serta memanfaatkan kemajuan dan globalisasi teknologi informasi
3.	Peningkatan dan Pemerataan Ekonomi, Berkurangnya Kesenjangan dan Kemiskinan	Misi 3: Mewujudkan peningkatan ekonomi masyarakat melalui pembangunan dan pemberdayaan pertanian rakyat secara terpadu, terarah dan berkelanjutan melalui usaha pertanian pangan, perikanan, peternakan, perkebunan, dan hortikultura untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan peningkatan produksi daerah
4.	Pendidikan Berkualitas	Misi 1: Mewujudkan sumber daya manusia yang religius, berakhlak, sehat, cerdas, produktif, berwawasan maju, terampil, mampu bersaing, kreatif, serta memanfaatkan kemajuan dan globalisasi teknologi informasi



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Tahun 2025-2029**

No.	Isu Strategis Daerah	Misi
5.	Air Bersih dan Sanitasi Layak	Misi 2: Meningkatkan pembangunan infrastruktur secara adil dan merata dalam rangka menunjang peningkatan kualitas pembangunan perekonomian, kesehatan, pendidikan, pelayanan masyarakat, pemerintahan, kebudayaan, pemuda, dan olahraga
6.	Lingkungan Hidup dan Ekosistem Daratan	Misi 4: Meningkatkan produktivitas perekonomian melalui optimalisasi sektor – sektor potensial; kehutanan, perkebunan, pertambangan dan energi dalam memanfaatkan sumber daya alam secara berkeadilan bagi masyarakat dan dunia usaha serta seimbang dengan pelestariannya
7.	Ketahanan Sosial dan Budaya	Misi 6: Meningkatkan peran serta lembaga adat dalam pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan untuk melestarikan nilai – nilai kearifan lokal, budaya, kesenian daerah, dan nasional. Misi 7: Meningkatkan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, fakir miskin, disabilitas, orang terlantar, dan lansia.
8.	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih berbasis teknologi informasi	Misi 5: Menciptakan pelayanan pemerintahan yang baik, mengayomi, bertanggung jawab, berkeadilan dengan didukung oleh aparatur pemerintah yang bersih, jujur, profesional, dan sejahtera



BAB III VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN



BAB III

VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini ini memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan, serta program prioritas pembangunan daerah dari RPJMD Kabupaten Barito Utara. Visi dan misi berfungsi sebagai panduan dalam merumuskan tujuan dan sasaran, sementara tujuan dan sasaran mencerminkan kondisi yang ingin dicapai dalam 5 tahun mendatang. Perumusan tujuan dan sasaran ini didasarkan pada isu-isu strategis, serta permasalahan yang telah diidentifikasi dalam bab sebelumnya, Kemudian dirumuskan strategi dan arah kebijakan serta program prioritas Pembangunan daerah.

Pembangunan dalam konsep daerah otonom diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat berdasarkan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai tindak lanjutnya, pemerintah daerah berupaya mewujudkan kesejahteraan yang dimaksud melalui penyelenggaraan pembangunan daerah. Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pembangunan daerah juga mendukung pencapaian target pembangunan provinsi dan nasional dengan memperhatikan karakteristik dan kemampuan yang dimiliki kabupaten. Dalam kaitannya dengan sistem perencanaan pembangunan, maka keberadaan RPJMD Kabupaten Barito Utara tahun 2025-2029 merupakan satu bagian yang utuh dari manajemen kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara dalam menjalankan arahan pembangunan yang telah tertuang dalam RPJPD tahun 2025-2045 dan selanjutnya diselaraskan dengan RPJPD Provinsi Kalimantan Tengah dan RPJMN 2025-2029.

3.1. Visi

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah. Visi RPJMD Tahun 2025-2029 adalah rumusan umum mengenai keadaan atau kondisi daerah yang diinginkan/terwujud pada tahun 2029 sebagai hasil pembangunan selama 5 (lima) tahun. Visi pembangunan daerah akan dilaksanakan melalui Misi. Misi RPJMD Tahun 2025-2029 adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan oleh daerah untuk mewujudkan visi RPJMD Tahun 2025-2029.

3.1.1. Keterkaitan dengan Visi dan Misi RPJMN Tahun 2025-2029 dan RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2029

Mengingat perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian integral perencanaan pembangunan nasional, diperlukan penyelarasan RPJMD Kabupaten Barito Utara Tahun 2025-2029 dengan RPJMN Tahun 2025-2029 dan RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2029. Penyelarasan ini mencakup penyelarasan kinerja dan periodisasinya. Penyelarasan dimaksudkan bahwa di samping RPJMD Tahun 2025-2029 menjabarkan visi, misi, dan program bupati dan wakil bupati terpilih, sekaligus juga merupakan bagian dari upaya mendukung pelaksanaan dan pencapaian 8 (delapan) Asta Cita yang dicanangkan oleh Presiden dan Wakil Presiden RI Tahun 2025-2029. Selain itu, perencanaan pembangunan Kabupaten Barito Utara juga disusun secara bersinergi dengan perencanaan pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah. Keterkaitan visi dan misi RPJMD Kabupaten Barito Utara dengan visi dan misi RPJMN dan RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah dimuat dalam Tabel 3.1.

Tabel 3.1. Keterkaitan Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Barito Utara dengan RPJMN Tahun 2025-2029 dan RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2029

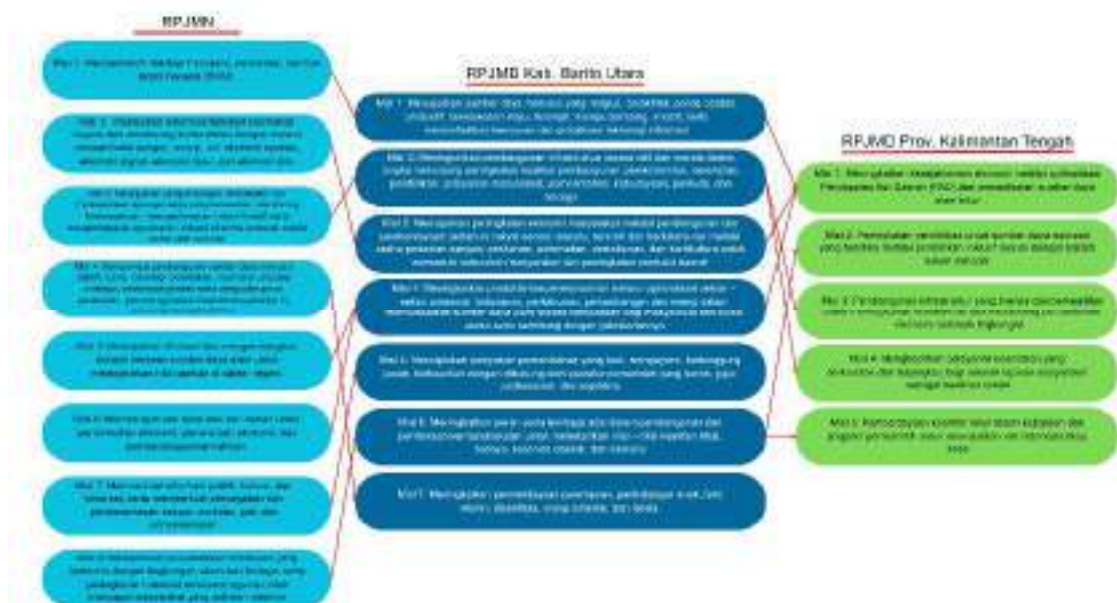
RPJM Nasional Tahun 2025-2029	RPJMD Kabupaten Barito Utara Tahun 2025-2029	RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2029
VISI		
Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045	Terwujudnya Kabupaten Barito Utara yang Maju, Tumbuh Pesat, Sejahtera, dan Berkeadilan	Mengangkat Harkat dan Martabat Khususnya Masyarakat Dayak dan Masyarakat Kalimantan Tengah Umumnya (Mangkatang Utus), dengan Kearifan Lokal dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia Menuju Kalteng Maju, Modern, Bermartabat, dan Berkah, Menuju Indonesia Emas 2045
MISI		
Asta Cita 1: Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Misi 1: Mewujudkan sumber daya manusia yang religius, berakhlak, sehat, cerdas, produktif, berwawasan maju, terampil, mampu bersaing, kreatif, serta memanfaatkan kemajuan dan globalisasi teknologi informasi	Misi 2: Peningkatan pendidikan untuk sumber daya manusia yang beretika melalui pendidikan inklusif sesuai dengan kaidah belum bahadat



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029

RPJM Nasional Tahun 2025-2029	RPJMD Kabupaten Barito Utara Tahun 2025-2029	RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2029
Asta Cita 3: Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Misi 2: Meningkatkan pembangunan infrastruktur secara adil dan merata dalam rangka menunjang peningkatan kualitas pembangunan perekonomian, kesehatan, pendidikan, pelayanan masyarakat, pemerintahan, kebudayaan, pemuda, dan olahraga	- Misi 3: Pembangunan infrastruktur yang merata dan berkeadilan untuk meningkatkan konektivitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi berbasis lingkungan - Misi 4: Menghadirkan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat sebagai keadilan sosial
Asta Cita 2: Mantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air; ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Misi 3: Mewujudkan peningkatan ekonomi masyarakat melalui pembangunan dan pemberdayaan pertanian rakyat secara terpadu, terarah dan berkelanjutan melalui usaha pertanian pangan, perikanan, peternakan, perkebunan, dan hortikultura untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan peningkatan produksi daerah	Misi 1: Meningkatkan kesejahteraan ekonomi melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pemanfaatan sumber daya alam lokal
- Asta Cita 5: Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. - Asta Cita 6: Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.	Misi 4: Meningkatkan produktivitas perekonomian melalui optimalisasi sektor – sektor potensial; kehutanan, perkebunan, pertambangan dan energi dalam memanfaatkan sumber daya alam secara berkeadilan bagi masyarakat dan dunia usaha serta seimbang dengan pelestariannya	Misi 1: Meningkatkan kesejahteraan ekonomi melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pemanfaatan sumber daya alam lokal
Asta Cita 7: Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Misi 5: Menciptakan pelayanan pemerintahan yang baik, mengayomi, bertanggung jawab, berkeadilan dengan didukung oleh aparaturnya yang bersih, jujur, profesional, dan sejahtera	

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029		
RPJM Nasional Tahun 2025-2029	RPJMD Kabupaten Barito Utara Tahun 2025-2029	RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2029
Asta Cita 8: Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat agama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	Misi 6: Meningkatkan peran serta lembaga adat dalam pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan untuk melestarikan nilai-nilai kearifan lokal, budaya, kesenian daerah, dan nasional	- Misi 2: Peningkatan pendidikan untuk sumber daya manusia yang beretika melalui pendidikan inklusif sesuai dengan kaidah belom bahadat - Misi 5: Pemberdayaan kearifan lokal dalam kebijakan dan program pemerintah untuk mewujudkan visi Indonesia Maju 2045
Asta Cita 4: Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender; serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Misi 7: Meningkatkan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, fakir miskin, disabilitas, orang terlantar, dan lansia.	-



Gambar 3.1. Keterkaitan Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Barito Utara dengan RPJMN Tahun 2025-2029 dan RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2029.

3.1.2. RPJMD Selaras dengan RPJPD Kabupaten Barito Utara

Visi RPJPD Kabupaten Barito Utara adalah pandangan jangka panjang selama 20 tahun (2025-2045) mengenai pembangunan daerah yang didasarkan pada kepentingan daerah. Visi RPJPD menggambarkan gambaran arah pembangunan atau kondisi masa depan yang diharapkan oleh masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Barito Utara dapat terwujud. Visi ini menjelaskan arah atau kondisi ideal yang ingin dicapai sesuai dengan kondisi saat ini, dengan mempertimbangkan hasil analisis tren periode sebelumnya, RPJPD Provinsi, RPJP Nasional maupun RTRW, sehingga dapat ditentukan target masa depan yang diinginkan. Visi bukan sekadar impian atau serangkaian harapan, melainkan suatu komitmen dan usaha untuk merencanakan dan mengelola perubahan demi mencapai tujuan yang diinginkan.

Visi pembangunan Kabupaten Barito Utara tahun 2025-2045 dirumuskan setelah mengkaji kondisi umum daerah, menganalisis potensi dan permasalahan yang ada, menilai isu-isu strategis, dan memperhatikan aspirasi dari pemangku kepentingan (*stakeholders*), potensi unggulan daerah sebagaimana tertuang dalam RTRW Kabupaten Barito Utara, KLHS Visi dan Misi Daerah Kabupaten Barito Utara, serta mengakomodasikan kekuatan dan peluang serta keunikan “kompetitif” yang dimiliki Kabupaten Barito Utara dalam jangka panjang yang kemudian dirumuskan visi sebagai berikut:

“BARITO UTARA MAJU, ADIL, TERARAH DAN BERKELANJUTAN”

Visi tersebut merupakan pengejawantahan sebuah proses dalam merangkai dan mewujudkan rajutan mimpi masyarakat Barito Utara di masa mendatang. Adapun turunan daripada visi RPJPD Kabupaten Barito Utara diwujudkan dalam periodisasi lima tahunan pelaksanaan RPJPD Kabupaten Barito Utara sampai dengan tahun 2045. Sasaran Visi Terwujudnya Kabupaten Barito Utara sebagai kabupaten Maju 2045 dijabarkan dalam poin-poin sasaran visi yang sejatinya merupakan bagian dalam cita-cita besar Bangsa Indonesia untuk menuju Indonesia Emas 2045.

Adapun keterkaitan antara sasaran visi RPJPN, RPJPD Provinsi Kalimantan Tengah dengan Kabupaten Barito Utara melalui lima sasaran utama visi: (1) Peningkatan pendapatan per kapita, (2) kemiskinan menurun dan ketimpangan berkurang, (3) kepemimpinan berintegritas, (4) peningkatan daya saing sumber daya manusia, dan (5) penurunan emisi GRK menuju *Net Zero Emission*. Adapun misi RPJPD Kabupaten Barito Utara terdiri dari 8 misi sebagai berikut:

- 1) Membangun kualitas manusia yang sehat, unggul, berdaya saing, dan adaptif, yaitu transformasi pembangunan yang berfokus pada upaya membangun kualitas dan kapasitas sumber daya manusia di Kabupaten Barito Utara yang semakin meningkat dan unggul baik dalam bidang pendidikan, kesehatan dan sosial.
- 2) Mewujudkan pertumbuhan ekonomi berwawasan lingkungan, yaitu transformasi pemanfaatan sumber daya alam, rehabilitasi lahan dan peningkatan produktivitas berbasis kekuatan ekonomi hijau yang adil, merata dan berkelanjutan.
- 3) Mewujudkan reformasi birokrasi pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adaptif, yaitu transformasi pembangunan yang berfokus pada upaya membangun kualitas dan kapasitas sumber daya manusia di Kabupaten Barito Utara yang semakin meningkat dan unggul baik dalam bidang pendidikan dengan memantapkan stabilitas ekonomi, politik, serta keamanan daerah.
- 4) Mewujudkan keamanan daerah tangguh, demokrasi substansial dan stabilitas ekonomi makro daerah dengan memantapkan stabilitas ekonomi, politik, serta keamanan daerah
- 5) Mewujudkan ketahanan sosial, budaya dan ekologi dengan memperluas ketangguhan individu, keluarga, komunitas, masyarakat, pembangunan karakter, dan lingkungan yang mampu menyeimbangkan hubungan timbal balik antara sosial budaya dan ekologi, serta mengoptimalkan modal sosial budaya untuk tahan menghadapi berbagai bencana, perubahan iklim, dan guncangan, serta dapat berpartisipasi dalam pembangunan dan menjaga keberlanjutan sumber daya alam.
- 6) Mewujudkan pembangunan yang inklusif dan bermartabat, yaitu penerapan pembangunan yang berfokus pada upaya partisipatif, non diskriminatif dan akuntabel.
- 7) Mewujudkan pembangunan infrastruktur wilayah yang berkeadilan, berkualitas dan ramah lingkungan;
- 8) Mewujudkan kesinambungan pembangunan daerah antarperiode yang diwujudkan melalui kaidah pelaksanaan yang efektif serta pembiayaan pembangunan.

Pada delapan misi ini keberlanjutan pembangunan daerah perlu diterjemahkan dalam dokumen perencanaan, baik yang bersifat lintas sektor, lintas daerah, serta lintas periode. Hal ini guna menjamin keberlanjutan pembangunan di berbagai sektor, di seluruh wilayah, dan setiap periode pembangunan. Selain keberlanjutan secara substansi, penerjemahan kebutuhan anggaran dan skema pembiayaan pembangunan perlu didorong untuk

menggunakan berbagai skema kreatif, efisien, dan efektif untuk mencapai sasaran pokok pembangunan.

Periode 2025-2029 RPJPD Kabupaten Barito Utara menyebutkan sebagai fondasi awal. Pada periode ini, fokus utama adalah membangun fondasi yang kuat untuk industrialisasi dan hilirisasi. Pemerintah daerah akan memprioritaskan peningkatan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, pelabuhan, dan bandara untuk mendukung konektivitas dan aksesibilitas. Selain itu, pengembangan sumber daya manusia akan menjadi kunci melalui pendidikan dan pelatihan vokasi yang sesuai dengan kebutuhan industri. Pemetaan potensi minyak dan gas (migas), serta penyusunan rencana pengembangan industri hilir migas juga akan dilakukan. Di sektor pertanian, peningkatan produktivitas melalui teknologi dan inovasi serta pengembangan sistem logistik dan distribusi yang efisien akan menjadi fokus. Identifikasi potensi energi bersih berbasis gas dan penyusunan rencana pengembangan akan dimulai. Terakhir, komunikasi dan kerjasama dengan pemerintah pusat dan daerah terkait IKN akan dibangun untuk mengidentifikasi peluang dan peran serta Kabupaten Barito Utara.

3.1.3. Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Barito Utara Tahun 2025-2029

Visi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Utara selama masa jabatan tahun 2025-2029 telah menjadi visi daerah selama 5 (lima) tahun ke depan. Visi RPJMD Kabupaten Barito Utara Tahun 2025-2029 adalah:

“TERWUJUDNYA KABUPATEN BARITO UTARA YANG MAJU, TUMBUH PESAT, SEJAHTERA, DAN BERKEADILAN”

Pokok-pokok pernyataan Visi RPJMD memiliki makna sebagai berikut:

- a. **MAJU:** makna maju menunjukkan bahwa pembangunan Kabupaten Barito Utara berorientasi pada kemajuan dan unggul dalam berbagai bidang. Makna maju juga menunjukkan adanya masyarakat yang kreatif, dinamis, berpikir positif, mampu bersaing, serta memanfaatkan kemajuan dan globalisasi teknologi informasi
- b. **TUMBUH PESAT:** memiliki makna bahwa pembangunan Kabupaten Barito Utara akan tumbuh pesat dalam pengembangan sumberdaya manusia, pembangunan infrastruktur, peningkatan produktifitas dan perekonomian masyarakat.
- c. **SEJAHTERA:** masyarakat sejahtera adalah masyarakat yang hidup dalam keadaan sehat, damai, dan sejahtera. Masyarakat sejahtera juga memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani, rohani, dan sosial serta kebutuhan dasar seperti

pangan, sandang dan papan. Sejahtera berarti juga terbebas dari kemiskinan, kebodohan, dan rasa takut.

- d. **BERKEADILAN:** makna berkeadilan menunjukkan bahwa proses Pembangunan dilaksanakan secara adil dan merata. Manfaat dan hasil pembangunan bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat. Berkeadilan disini juga mengandung makna bahwa masyarakat bisa mengakses semua infrastruktur dasar, sumberdaya alam dan layanan pemerintah di segala bidang.

Dalam mewujudkan visi, maka ditetapkan 7 (tujuh) misi. Rumusan misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Barito Utara menggambarkan kondisi yang diharapkan dapat terwujud selama 5 (lima) tahun ke depan. Misi RPJMD Kabupaten Barito Utara tahun 2025-2029 yaitu:

1. mewujudkan sumber daya manusia yang religius, berakhlak, sehat, cerdas, produktif, berwawasan maju, terampil, mampu bersaing, kreatif, serta memanfaatkan kemajuan dan globalisasi teknologi informasi;
2. meningkatkan pembangunan infrastruktur secara adil dan merata dalam rangka menunjang peningkatan kualitas pembangunan perekonomian, kesehatan, pendidikan, pelayanan masyarakat, pemerintahan, kebudayaan, pemuda, dan olahraga;
3. mewujudkan peningkatan ekonomi masyarakat melalui pembangunan dan pemberdayaan pertanian rakyat secara terpadu, terarah dan berkelanjutan melalui usaha pertanian pangan, perikanan, peternakan, perkebunan, dan hortikultura untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan peningkatan produksi daerah;
4. meningkatkan produktivitas perekonomian melalui optimalisasi sektor-sektor potensial; kehutanan, perkebunan, pertambangan dan energi dalam memanfaatkan sumber daya alam secara berkeadilan bagi masyarakat dan dunia usaha serta seimbang dengan pelestariannya;
5. menciptakan pelayanan pemerintahan yang baik, mengayomi, bertanggung jawab, berkeadilan dengan didukung oleh aparatur pemerintah yang bersih, jujur, profesional, dan sejahtera;
6. meningkatkan peran serta lembaga adat dalam pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan untuk melestarikan nilai-nilai kearifan lokal, budaya, kesenian daerah, dan nasional

7. meningkatkan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, fakir miskin, disabilitas, orang terlantar, dan lansia.

Penjelasan masing-masing misi pembangunan Kabupaten Barito Utara tahun 2025-2029, sebagai berikut:

Misi 1: Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Religius, Berakhlak, Sehat, Cerdas, Produktif, Berwawasan Maju, Terampil, Mampu Bersaing, Kreatif, serta Memanfaatkan Kemajuan dan Globalisasi Teknologi Informasi

Misi ini diimplementasikan melalui strategi holistik yang berfokus pada 2 pilar utama: peningkatan kualitas kesehatan dan peningkatan kapasitas intelektual. Di bidang kesehatan dan umur panjang, fokus utama adalah mempercepat peningkatan Angka Harapan Hidup (AHH) secara signifikan hingga mencapai target di atas 73,65 tahun pada tahun 2029, melalui intervensi penyakit kronis yang lebih proaktif, terutama dengan meningkatkan cakupan pelayanan hipertensi menjadi minimal 60%.

Prioritas mendesak lainnya adalah penanggulangan masalah gizi dengan target ambisius menurunkan *prevalensi stunting* di bawah ambang batas masalah kesehatan masyarakat, yaitu mencapai 14,0% pada tahun 2026. Selain itu, untuk menstabilkan dan menekan fluktuasi Angka Kematian Ibu (AKI), target ditetapkan di bawah 60 per 100.000 Kelahiran Hidup pada tahun 2026. Semua upaya ini didukung oleh penguatan sistem layanan primer, termasuk komitmen untuk memastikan 100% Puskesmas terakreditasi pada tahun 2026 dan melaksanakan konvergensi lintas sektor, seperti penjaminan 100% desa/kelurahan mencapai status ODF (bebas BABS) pada tahun 2029. Secara keseluruhan, misi 1 ini berfungsi sebagai landasan untuk menciptakan modal insani yang tidak hanya sehat secara fisik, tetapi juga cerdas, terampil, dan produktif, siap mengisi bonus demografi dan memanfaatkan kemajuan teknologi demi kemajuan daerah.

Misi 2: Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Secara Adil dan Merata dalam Rangka Menunjang Peningkatan Kualitas Pembangunan Perekonomian, Kesehatan, Pendidikan, Pelayanan Masyarakat, Pemerintahan, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga

Pembangunan infrastruktur difokuskan untuk dilakukan secara adil dan merata di seluruh wilayah guna memperkuat konektivitas antarwilayah, memperlancar aktivitas ekonomi, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Infrastruktur dipandang sebagai penopang utama dalam peningkatan produktivitas ekonomi, pemerataan akses pendidikan dan kesehatan, serta penguatan pelayanan pemerintahan. Melalui pembangunan jalan,

jembatan, sarana pendidikan, kesehatan, fasilitas pemuda, olahraga, dan kebudayaan, diharapkan tercipta pertumbuhan ekonomi yang *inklusif*, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan terwujudnya pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Misi ini memiliki beberapa tujuan antara lain meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur dasar secara merata di seluruh wilayah; mendorong konektivitas dan aksesibilitas antarpusat kegiatan ekonomi, pendidikan, dan pelayanan publik; menunjang peningkatan daya saing daerah melalui penguatan infrastruktur strategis; serta mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui infrastruktur sosial, budaya, dan olahraga yang memadai.

Misi ini menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur di Kabupaten Barito Utara harus dilakukan secara merata antarwilayah, berkeadilan sosial, dan berkelanjutan lingkungan, dengan tujuan utama meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta mendukung seluruh aspek pembangunan (ekonomi, sosial, dan pelayanan publik). Infrastruktur tidak hanya dilihat sebagai pembangunan fisik, tetapi juga sebagai pengungkit pertumbuhan ekonomi daerah, peningkatan pelayanan dasar, serta pemerataan hasil pembangunan antarwilayah perkotaan (Muara Teweh) dan pedalaman (Kecamatan Lahei, Kecamatan Gunung Purei, Kecamatan Teweh Timur, Kecamatan Gunung Timang, dan Kecamatan Teweh Baru).

Misi ini memiliki tujuan utama untuk mewujudkan pemerataan pembangunan infrastruktur wilayah dalam upaya memperkuat konektivitas antarkecamatan dan desa; menyediakan infrastruktur dasar berkualitas yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat (air minum, sanitasi, perumahan, dan transportasi); menguatkan infrastruktur sosial dan ekonomi sebagai penopang produktivitas sektor unggulan (pertanian, perdagangan, industri kecil, dan pariwisata); meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik melalui pengembangan sarana pendidikan, kesehatan, dan pemerintahan; serta mengintegrasikan pembangunan infrastruktur dengan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan

Misi 3: Mewujudkan Peningkatan Ekonomi Masyarakat Melalui Pembangunan dan Pemberdayaan Pertanian Rakyat secara Terpadu, Terarah dan Berkelanjutan Melalui Usaha Pertanian Pangan, Perikanan, Peternakan, Perkebunan, dan Hortikultura untuk Memenuhi Kebutuhan Masyarakat dan Peningkatan Produksi Daerah

Peningkatan ekonomi masyarakat di Kabupaten Barito Utara dapat dicapai melalui penguatan sektor pertanian yang meliputi pangan, perikanan, peternakan, perkebunan, dan hortikultura. Sebagai bagian dari misi ini, sektor-sektor tersebut akan dikembangkan secara

terpadu dan berkelanjutan, dengan fokus pada peningkatan produksi unggulan daerah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara lebih efisien.

Dengan memanfaatkan potensi besar yang dimiliki, sektor pertanian akan menjadi penggerak utama ekonomi daerah. Upaya pemberdayaan masyarakat akan berfokus pada peningkatan kapasitas petani dan pelaku usaha pertanian lainnya untuk mengelola sumber daya alam secara bijaksana dan efektif. Konsep keberlanjutan menjadi prinsip dasar dalam setiap kegiatan yang dilakukan, dengan tujuan untuk memastikan bahwa hasil yang dicapai tidak hanya memberikan manfaat jangka pendek, tetapi juga dapat terus dinikmati oleh generasi mendatang.

Pemberdayaan masyarakat di sektor perikanan dan peternakan juga akan diperkuat, dengan mengoptimalkan potensi sumber daya alam yang ada. Hal ini akan memperluas lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan pada saat yang sama memperkuat ketahanan pangan di tingkat lokal. Dengan keberhasilan sektor-sektor ini, Kabupaten Barito Utara tidak hanya akan mampu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, tetapi juga menciptakan *surplus* produk yang dapat dipasarkan ke luar daerah.

Sektor perkebunan dan hortikultura, yang memiliki potensi besar, juga akan didorong untuk tumbuh lebih maju. Tanaman *biofarmaka* dan berbagai produk hortikultura akan dikembangkan untuk mendukung keberlanjutan produksi pertanian. Hal ini tidak hanya memberikan kontribusi pada peningkatan ekonomi masyarakat, tetapi juga berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem daerah.

Pembangunan ekonomi berbasis pertanian yang terpadu ini juga akan menciptakan hubungan yang saling mendukung antarsektor yakni pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan, dan hortikultura. Keberlanjutan produksi dan pengelolaan sumber daya alam yang lebih baik akan menciptakan fondasi yang kuat bagi pembangunan ekonomi daerah, dengan dampak positif yang luas bagi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Barito Utara.

Misi 4: Meningkatkan Produktivitas Perekonomian Melalui Optimalisasi Sektor-Sektor Potensial; Kehutanan, Perkebunan, Pertambangan dan Energi dalam Memanfaatkan Sumber Daya Alam secara Berkeadilan Bagi Masyarakat dan Dunia Usaha serta Seimbang dengan Pelestariannya

Misi ini menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Barito Utara untuk mewujudkan transformasi ekonomi yang *inklusif*, berdaya saing, dan berkelanjutan melalui pengelolaan sumber daya alam yang produktif, adil, dan lestari. Arah kebijakan ekonomi lima tahun ke

depan tidak hanya difokuskan pada peningkatan pertumbuhan, tetapi juga pada pemerataan manfaat, penciptaan nilai tambah lokal, dan keberlanjutan lingkungan hidup.

Kabupaten Barito Utara memiliki posisi strategis sebagai lumbung energi baru dan terbarukan (EBT) di Provinsi Kalimantan Tengah sekaligus wilayah mitra pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Provinsi Kalimantan Timur. Letak geografis ini memberikan peluang besar untuk memperkuat struktur ekonomi daerah melalui hilirisasi hasil perkebunan dan kehutanan, pengembangan energi bersih, serta pengelolaan potensi perikanan terpadu guna mendukung ketahanan pangan regional.

Makna utama dari Misi 4 adalah mempercepat pergeseran struktur ekonomi dari ketergantungan pada eksploitasi sumber daya alam mentah menuju ekonomi berbasis inovasi, nilai tambah, dan keberlanjutan lingkungan. Optimalisasi sektor unggulan seperti kehutanan, perkebunan, pertambangan, energi, dan perikanan dilakukan dengan prinsip keadilan sosial, pelestarian ekosistem, serta kemitraan produktif antara masyarakat, pemerintah, dan dunia usaha.

Secara substantif, misi 4 mencerminkan empat arah transformasi ekonomi Kabupaten Barito Utara:

- a. menggerakkan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berdaya saing tinggi;
- b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui produktivitas sektor unggulan yang berkelanjutan;
- c. mengubah paradigma pembangunan dari *resource-based* menuju *innovation-driven economy*;
- d. menyeimbangkan eksploitasi sumber daya alam dengan pelestarian ekosistem dan daya dukung lingkungan.

Dengan fondasi ini, Kabupaten Barito Utara diarahkan menjadi sentra energi bersih, industri pengolahan berbasis lokal, dan kawasan penyangga pangan berkelanjutan bagi wilayah Kalimantan bagian timur, sejalan dengan agenda nasional transformasi ekonomi hijau (*green economy*). Dalam upaya mewujudkan transformasi ekonomi yang berdaya saing dan berkelanjutan, Kabupaten Barito Utara menghadapi sejumlah tantangan struktural dan sektoral yang perlu diatasi secara terencana. Tantangan tersebut meliputi:

- a. struktur ekonomi daerah yang masih bergantung pada sektor ekstraktif, terutama pertambangan, dengan nilai tambah yang relatif rendah dan belum banyak terserap ke ekonomi lokal;
- b. belum optimalnya hilirisasi hasil perkebunan dan kehutanan, terutama pada komoditas karet, kelapa sawit, dan hasil hutan bukan kayu, sehingga kontribusinya terhadap PDRB belum maksimal;
- c. produktivitas UMKM dan industri kecil menengah (IKM) masih rendah, baik dari sisi skala usaha, inovasi produk, maupun pemanfaatan teknologi digital;
- d. ketergantungan energi pada sumber fosil, sementara potensi energi baru dan terbarukan (EBT) seperti surya, air, dan biomassa belum tergarap optimal;
- e. kualitas infrastruktur ekonomi belum merata, terutama akses jalan produksi, jembatan penghubung antar sentra produksi, dan infrastruktur pendukung kawasan pangan terpadu;
- f. tantangan pengawasan lingkungan hidup terhadap aktivitas pertambangan dan industri, termasuk keterbatasan kapasitas pengawasan serta belum optimalnya implementasi CSR perusahaan;
- g. sinergi antara pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya dan tanggung jawab sosial belum berjalan efektif;
- h. kesenjangan antarwilayah kecamatan dalam akses ekonomi, infrastruktur, dan peluang investasi.

Tantangan-tantangan ini menjadi titik fokus kebijakan ekonomi daerah selama periode RPJMD 2025–2029 untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, merata, dan berkelanjutan.

Misi 5: Menciptakan Pelayanan Pemerintahan yang Baik, Mengayomi, Bertanggung Jawab, Berkeadilan dengan Didukung oleh Aparatur Pemerintah yang Bersih, Jujur, Profesional, dan Sejahtera

Dalam rangka mewujudkan misi 5, Pemerintah Kabupaten Barito Utara menetapkan sejumlah program prioritas yang bersifat strategis, terukur, dan berkelanjutan. Program-program ini diarahkan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta membangun kapasitas aparatur sipil negara (ASN) yang profesional dan berintegritas. Selain itu, partisipasi masyarakat dan pemerataan akses layanan menjadi bagian penting dalam memastikan keadilan dan inklusivitas pembangunan.

Tujuan strategis misi 5 sebagai berikut:

- a. terwujudnya birokrasi yang bersih, efisien, dan akuntabel;
- b. meningkatnya kualitas dan aksesibilitas pelayanan publik;
- c. terbangunnya budaya kerja ASN yang profesional dan melayani;
- d. meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan pembangunan.

Program prioritas dari misi 5 sebagai berikut:

- a. **reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan** fokus pada penyederhanaan struktur, peningkatan efisiensi, dan penguatan sistem pengawasan internal;
- b. **peningkatan kualitas pelayanan publik** meliputi pengembangan mal pelayanan publik, digitalisasi layanan, dan peningkatan kepuasan masyarakat;
- c. **penguatan kompetensi dan profesionalisme ASN** melalui pelatihan, sertifikasi, dan penerapan sistem merit berbasis kinerja;
- d. **digitalisasi layanan pemerintahan** pengembangan sistem informasi pelayanan publik dan integrasi antar perangkat daerah;
- e. **forum konsultasi dan partisipasi masyarakat** pembentukan dan penguatan forum konsultasi publik di tingkat desa dan kecamatan;
- f. **pemerataan akses layanan publik di wilayah terpencil** melalui mobilisasi ASN, layanan keliling, dan penguatan peran kecamatan sebagai ujung tombak pelayanan;
- g. **penguatan etika dan budaya kerja ASN** penanaman nilai integritas, tanggung jawab, dan semangat melayani dalam budaya kerja birokrasi;
- h. **monitoring dan evaluasi kinerja pelayanan publik** pengembangan sistem evaluasi berbasis data untuk menjamin akuntabilitas dan perbaikan berkelanjutan;
- i. **peningkatan kesejahteraan aparatur pemerintah daerah** meliputi peningkatan tunjangan dan perlindungan kerja bagi PNS, PPPK, dan tenaga kontrak, serta pemberian bantuan biaya tugas belajar untuk jenjang pendidikan S2 dan S3 sebagai upaya peningkatan kapasitas sdm secara berkelanjutan.

Strategi pelaksanaan antara lain:

- a. penetapan indikator kinerja tahunan yang terukur dan realistis;
- b. penugasan OPD penanggung jawab sesuai kewenangan dan kapasitas;
- c. sinkronisasi program dengan kebijakan nasional dan provinsi;
- d. pelibatan masyarakat dan pemangku kepentingan dalam proses perencanaan dan evaluasi.

Program prioritas misi 5 menjadi fondasi penting dalam membangun pemerintahan yang melayani dan dipercaya masyarakat. Melalui pelaksanaan yang konsisten dan evaluasi berkala, diharapkan tercipta warisan birokrasi yang profesional, transparan, dan berkeadilan bagi generasi mendatang.

Misi 6: Meningkatkan Peran Serta Lembaga Adat dalam Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan untuk Melestarikan Nilai-Nilai Kearifan Lokal, Budaya, Kesenian Daerah, dan Nasional

Meningkatkan peran serta lembaga adat dalam pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan merupakan upaya strategis untuk memperkuat jati diri bangsa melalui pelestarian nilai-nilai kearifan lokal, budaya, dan kesenian daerah. Lembaga adat memiliki posisi dan peran penting dalam mengelola nilai-nilai tradisional, norma sosial, dan sistem pengetahuan lokal yang telah terbukti menjaga keharmonisan masyarakat selama berabad-abad.

Selain itu lembaga adat memiliki peran penting dalam pembinaan kemasyarakatan seperti menjaga ketertiban sosial, penyelesaian konflik yang dilaksanakan secara musyawarah, serta pelestarian tradisi, bahasa, dan kesenian daerah. Melalui kegiatan seperti pelatihan festival budaya, upacara adat, dan pendidikan berbasis kearifan lokal, nilai-nilai luhur seperti gotong royong, toleransi, dan rasa hormat terhadap lingkungan dapat terus diwariskan kepada generasi muda.

Peran lembaga adat dapat dioptimalkan melalui pelibatan aktif dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di tingkat desa atau daerah. Dengan demikian, kebijakan dan program pembangunan akan lebih selaras dengan karakter sosial-budaya masyarakat setempat, serta dapat mendorong tumbuhnya rasa memiliki dan tanggung jawab bersama. Dengan diperkuatnya sinergi antara lembaga adat, pemerintah daerah, dan masyarakat, diharapkan akan terbentuk pembangunan yang tidak hanya berorientasi pada kemajuan ekonomi, tetapi juga berlandaskan pada pelestarian budaya dan penguatan identitas nasional.

Misi ini relevan dengan visi Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah yakni Kalteng Maju, di mana visi ini mengindikasikan upaya menuju Provinsi Kalimantan Tengah yang meningkatkan kualitas sumber daya manusianya, berkembang perekonomiannya, dan mampu bersaing dengan daerah lainnya. Selanjutnya juga relevan dengan visi Kalteng Bermartabat, yang menunjukkan adanya peningkatan pada aspek sosial dan budaya

masyarakat. Hal ini kemudian mampu meningkatkan martabat masyarakat yang dicirikan dari kearifan lokal, kehidupan yang harmonis dan berdampingan tanpa adanya konflik, dan teguh dalam mempertahankan adat istiadat serta kebudayaan yang berasal dari leluhur.

Misi ini juga relevan dengan beberapa poin yang tertuang dalam Asta Cita (8 misi) Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Rakabuming Raka, dalam visi **“Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”**. Beberapa poin Asta Cita yang relevan dengan misi ini antara lain:

- misi ke-4: memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), pendidikan, kesehatan, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas;
- misi ke-6: membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan;
- misi ke-8: memperkuat penyelerasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya; serta meningkatkan toleransi antar umat beragama.

Misi 7: Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Fakir Miskin, Disabilitas, Orang Terlantar, dan Lansia.

Misi 7, “meningkatkan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, fakir miskin, disabilitas, orang terlantar, dan lansia”, merupakan respons afirmatif dan terfokus terhadap temuan dalam gambaran umum daerah. Teridentifikasi adanya “kerentanan sosial kelompok PMKS” serta “ketidakmerataan akses terhadap sumber daya” yang berkontribusi pada angka kemiskinan 5,67% pada tahun 2024. Misi ini menetapkan komitmen dasar pemerintah daerah untuk hadir secara spesifik bagi kelompok-kelompok yang paling rentan, memastikan bahwa mereka tidak tertinggal dalam proses pembangunan dan menjadi subjek prioritas dalam alokasi sumber daya.

Komitmen ini kemudian diterjemahkan secara terukur ke dalam dokumen perencanaan tahunan pemerintah daerah yang menetapkan sasaran-sasaran strategis yang relevan. Keberhasilan misi 7 ini akan diukur melalui indikator-indikator kunci seperti menurunnya angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrem (ditargetkan sekitar 5,05%), meningkatnya Kesejahteraan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), serta meningkatnya kualitas hidup perempuan dan anak”. Penetapan target ini memastikan bahwa misi yang bersifat kualitatif memiliki padanan kuantitatif yang jelas dalam rencana kinerja dan pembangunan daerah yang akan dicapai melalui urusan Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A), serta sinergi lintas OPD.

Secara operasional, langkah ideal pertama yang krusial dan telah teridentifikasi dalam rencana kinerja adalah pembenahan data. Akar masalah “Data sasaran DTKS tidak akurat” yang teridentifikasi dijawab langsung melalui program pengelolaan data fakir miskin, dengan fokus utama pada verifikasi dan validasi (Ver-Val) DTKS. Langkah fundamental ini sangat penting untuk menjamin program perlindungan sosial tepat sasaran. Selanjutnya, program spesifik dijalankan secara paralel seperti program rehabilitasi sosial untuk memfasilitasi disabilitas dan lansia (misalnya melalui bantuan alat bantu dan layanan *home care*), serta program perlindungan komprehensif bagi perempuan dan anak melalui layanan UPTD PPA dan upaya pemenuhan hak anak untuk meraih predikat Kabupaten Layak Anak (KLA).

Langkah ideal ke depan, sejalan dengan temuan yang ada mengenai “kurangnya sinergi program perlindungan sosial”, adalah mengintegrasikan seluruh layanan ini dari hulu ke hilir. Keberhasilan misi 7 tidak hanya diukur dari seberapa banyak bantuan (*karitatif*) yang tersalurkan, tetapi seberapa kuat sinergi antar-OPD (sosial, P3A, kesehatan, pendidikan) dalam menciptakan sistem perlindungan sosial yang komprehensif. Tujuannya adalah mentransformasi program dari sekadar perlindungan menjadi pemberdayaan, melalui program seperti Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dan Peningkatan Peranan Wanita menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS), sehingga kelompok rentan dapat berangsur-angsur mandiri dan keluar dari siklus kemiskinan secara permanen.

Keterkaitan dari 7 misi tersebut dengan isu strategis RPJMD Kabupaten Barito Utara tahun 2025-2029 seperti tersaji pada Tabel 3.2.

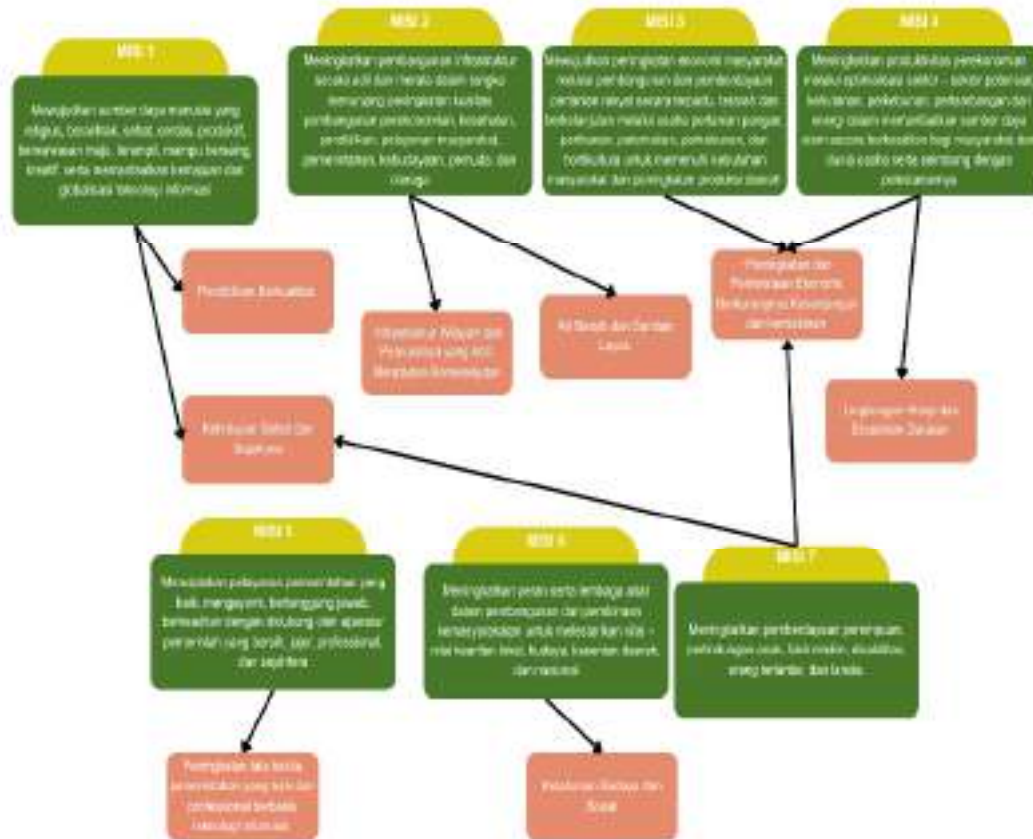
Tabel 3.2. Keterkaitan Misi Bupati dengan Isu Strategis

No.	Misi Bupati	Isu Strategis RPJMD
1	Mewujudkan sumber daya manusia yang religius, berakhlak, sehat, cerdas, produktif, berwawasan maju, terampil, mampu bersaing, kreatif, serta memanfaatkan kemajuan dan globalisasi teknologi informasi	• Kehidupan Sehat dan Sejahtera • Pendidikan Berkualitas
2	Meningkatkan pembangunan infrastruktur secara adil dan merata dalam rangka menunjang peningkatan kualitas pembangunan perekonomian, kesehatan, pendidikan, pelayanan masyarakat, pemerintahan, kebudayaan, pemuda, dan olahraga	• Infrastruktur Wilayah dan Pemukiman yang Adil, Merata dan Berkelanjutan • Air Bersih dan Sanitasi Layak



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Tahun 2025-2029**

No.	Misi Bupati	Isu Strategis RPJMD
3	Mewujudkan peningkatan ekonomi masyarakat melalui pembangunan dan pemberdayaan pertanian rakyat secara terpadu, terarah dan berkelanjutan melalui usaha pertanian pangan, perikanan, peternakan, perkebunan, dan hortikultura untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan peningkatan produksi daerah	• Peningkatan dan Pemerataan Ekonomi, Berkurangnya Kesenjangan dan kemiskinan
4	Meningkatkan produktivitas perekonomian melalui optimalisasi sektor – sektor potensial; kehutanan, perkebunan, pertambangan dan energi dalam memanfaatkan sumber daya alam secara berkeadilan bagi masyarakat dan dunia usaha serta seimbang dengan pelestariannya	• Peningkatan dan Pemerataan Ekonomi, Berkurangnya Kesenjangan dan Kemiskinan • Lingkungan Hidup dan Ekosistem Daratan
5	Menciptakan pelayanan pemerintahan yang baik, mengayomi, bertanggung jawab, berkeadilan dengan didukung oleh aparatur pemerintah yang bersih, jujur, professional, dan sejahtera	• Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dan professional berbasis teknologi informasi
6	Meningkatkan peran serta lembaga adat dalam pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan untuk melestarikan nilai – nilai kearifan lokal, budaya, kesenian daerah, dan nasional	• Ketahanan Budaya dan Sosial
7	Meningkatkan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, fakir miskin, disabilitas, orang terlantar, dan lansia.	• Peningkatan dan Pemerataan Ekonomi, Berkurangnya Kesenjangan dan Kemiskinan • Kehidupan Sehat dan Sejahtera • Ketahanan Sosial dan Budaya



Gambar 3.2. Keterkaitan Misi Bupati dengan Isu Strategis RPJMD 2025-2029.

3.2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran pembangunan jangka 5 (lima) tahun Kabupaten Barito Utara diturunkan dari misi yang telah disusun oleh kepala daerah. Terdapat 13 tujuan dan 29 sasaran yang tersebar pada setiap misi yang telah ditetapkan beserta dengan indikator yang akan digunakan dalam mengukur keberhasilan mencapai tujuan dan sasaran yang telah direncanakan. Rincian tujuan dan sasaran pembangunan jangka 5 (lima) tahun Kabupaten Barito Utara disajikan dalam bentuk matriks yang dapat dilihat pada Tabel 3.3.

Tabel 3.3. Matriks Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Indikator Pembangunan 5 Tahun Kabupaten Barito Utara

MISI, TUJUAN, SASARAN		INDIKATOR		BASELINE		TARGET TAHUN				
				2024	Target (2025)	2026	2027	2028	2029	2030
VISI: TERWUJUDNYA KABUPATEN BARITO UTARA YANG MAJU, TUMBUH PESAT, SEJAHTERA, DAN BERKEADILAN										
1.	MISI 1: Mewujudkan sumber daya manusia yang religius, berakhlak, sehat, cerdas, produktif, berwawasan maju, terampil, mampu bersaing, kreatif, serta memanfaatkan kemajuan dan globalisasi teknologi informasi.									
1.1.	Tujuan 1: Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia, kehidupan beragama, sosial dan budaya masyarakat yang harmoni dan kondusif	1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	72,31	72,75	73,00	73,40	73,85	74,35	74,76
		2	Indeks Kualitas Keluarga	74,00	74,20	74,25	74,28	74,30	74,50	75,00
		3	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	64,27	65,55	66,86	68,20	69,56	70,95	72,00
1.1.1.	Sasaran 1: Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	1	Angka Harapan Hidup (AHH)	73,65	73,73	73,81	73,89	73,97	74,05	74,13
		2	Prevalensi stunting	15,30	15,00	15,00	14,62	13,88	13,19	13,12
1.1.2.	Sasaran 2: Meningkatnya pendidikan berkualitas	1	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	9,35	9,45	9,60	9,75	9,90	10,05	10,19
		2	Harapan Lama Sekolah (HLS)	12,90	13,00	13,10	13,25	13,40	13,50	13,62
1.1.3.	Sasaran 3. Meningkatnya Kualitas Kehidupan Umat Beragama	1	Persentase peningkatan audiens MTQ/Pesparawi/Pesperani/Utsawa Dharma Gita/Swayamvara Tripitaka Gatha	N/A	15.,00	21,46	36,70	25,00	52,26	61,58
		2	Persentase peningkatan peserta event seni budaya	N/A	0,00	19,86	3,33	3,87	18,57	23,16



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Tahun 2025-2029**

MISI, TUJUAN, SASARAN		INDIKATOR		BASELINE		TARGET TAHUN				
				2024	Target (2025)	2026	2027	2028	2029	2030
		3	Persentase lembaga agama dan sosial keagamaan yang telah menerima pendampingan atau pembinaan tata kelola kelembagaan	N/A	41,21	41,71	56,21	65,71	84,21	94,46
2.	Misi 2: Meningkatkan pembangunan infrastruktur secara adil dan merata dalam rangka menunjang peningkatan kualitas pembangunan perekonomian, kesehatan, pendidikan, pelayanan masyarakat, pemerintahan, kebudayaan, pemuda, dan olahraga									
2.1.	Tujuan: Meningkatnya kualitas insfrastruktur secara adil dan merata dalam menunjang peningkatan kualitas Pembangunan disegala sektor dengan daya dukung lingkungan yang berdampak pada kemajuan daerah secara berkelanjutan	1	Peningkatan aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah pemerataan akses mobilitas Masyarakat (%)	31,5	40	50	58	64	70	75
		2	Keseimbangan antara pembangunan dan kemampuan lingkungan kondisi lingkungan akibat aktivitas pembangunan (%)	30	35	40	45	55	60	75
2.1.1.	Sasaran 1: Sasaran di Bidang Perekonomian • Meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas ekonomi antar wilayah, melalui pembangunan dan perbaikan jalan, jembatan, pelabuhan, serta sarana transportasi. • Menurunkan biaya logistik dan distribusi barang dan jasa untuk	1	Tingkat Kemiskinan (%)	5,67	4,61	4,19	3,77	3,35	2,93	2,52
		2	Total kredit terhadap PDRB (%)	20,8	21,80	23,85	25,90	27,95	30,00	32,05
		3	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,08	6,5	7,0	7,3	7,5	7,5	7,8
		4	Tingkat inflasi (%)	1,01	2,5±1,0	2,5±1,0	2,5±1,0	2,5±1,0	2,5±1,0	2,5±1,0



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Tahun 2025-2029**

MISI, TUJUAN, SASARAN		INDIKATOR		BASELINE		TARGET TAHUN				
				2024	Target (2025)	2026	2027	2028	2029	2030
	mendukung pertumbuhan sektor perdagangan, industri kecil menengah, dan pertanian. • Mendorong pemerataan investasi dan aktivitas ekonomi di wilayah pedesaan dan perdesaan terpencil. • Meningkatkan daya saing daerah melalui penyediaan infrastruktur pendukung kawasan industri, pasar rakyat, dan sentra ekonomi produktif.									
2.1.2.	Sasaran 2: Sasaran di Bidang Lingkungan, Kesehatan • Meningkatkan IKL, akses masyarakat terhadap layanan kesehatan dengan membangun atau merehabilitasi fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan posyandu. Memperluas jangkauan pelayanan kesehatan dasar di daerah terpencil melalui infrastruktur transportasi dan komunikasi yang memadai. • Menjamin ketersediaan air bersih dan sanitasi layak, untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	1	Proporsi sekolah dengan akses ke listrik, internet untuk tujuan pengajaran, komputer untuk tujuan pengajaran, air minum layak, fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, dan fasilitas cuci tangan (terdiri air/sanitasi/dan higienis bagi semua (<i>wash</i>)).	67,54	70,6	75,88	81,16	86,44	91,72	97,00



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Tahun 2025-2029**

MISI, TUJUAN, SASARAN		INDIKATOR		BASELINE		TARGET TAHUN				
				2024	Target (2025)	2026	2027	2028	2029	2030
2.1.3.	Sasaran 3: Sasaran di Bidang Pendidikan	1	Indeks pembangunan literasi masyarakat	70,45	74,27	75,95	77,62	79,30	80,97	82,65
	- Meningkatkan pemerataan akses pendidikan melalui pembangunan sekolah, ruang kelas baru, laboratorium, dan sarana penunjang pendidikan di seluruh wilayah. - Meningkatkan mutu pembelajaran dengan dukungan infrastruktur digital dan jaringan internet bagi sekolah. - Menekan kesenjangan pendidikan antar wilayah melalui penyediaan sarana pendidikan di daerah tertinggal.	2	Indeks Literasi Digital	3,55	3,70	3,75	3,80	3,85	3,90	3,95
2.1.4.	Sasaran 4: Sasaran di Bidang Pelayanan Masyarakat	1	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	55,8	59,87	60,26	61,43	62,82	63,76	64,89
	- Meningkatkan kualitas dan efisiensi pelayanan publik melalui pembangunan infrastruktur pemerintahan (kantor pelayanan, sistem informasi, dan fasilitas umum). - Mewujudkan pelayanan publik yang mudah diakses, cepat, dan									



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Tahun 2025-2029**

MISI, TUJUAN, SASARAN		INDIKATOR		BASELINE		TARGET TAHUN				
				2024	Target (2025)	2026	2027	2028	2029	2030
	transparan bagi seluruh lapisan masyarakat. • Menunjang pelayanan dasar masyarakat, air minum, listrik, transportasi publik, dan perumahan.									
3.	Misi 3: Mewujudkan peningkatan ekonomi masyarakat melalui pembangunan dan pemberdayaan pertanian rakyat secara terpadu, terarah dan berkelanjutan melalui usaha pertanian pangan, perikanan, peternakan, perkebunan, dan hortikultura untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan peningkatan produksi daerah									
3.1.	Tujuan: Meningkatkan produktivitas sektor pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, dan hortikultura serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pemberdayaan, akses pelatihan, dan teknologi pertanian berkelanjutan.	1	Indeks ketahanan pangan	84,45	84,91	84,97	85,02	85,07	85,11	85,15
3.1.1.	Sasaran 1: Meningkatkan produktivitas sektor pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, dan hortikultura untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat dan meningkatkan produksi daerah	1	Laju pertumbuhan produktivitas pertanian pangan (%)	102	106	110	113	116	118	120
		2	Produksi perikanan tangkap & budidaya (ton)	5.400	5.700	6.050	6.350	6.600	6.850	7.000
		3	Produksi hasil perkebunan unggulan (sawit/karet/kelapa) (ton)	15.300	15.800	16.400	16.900	17.300	17.600	17.900



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Tahun 2025-2029**

MISI, TUJUAN, SASARAN		INDIKATOR		BASELINE		TARGET TAHUN				
				2024	Target (2025)	2026	2027	2028	2029	2030
		4	Ekstensifikasi dan cetak sawah % (<i>sesuai rencana kawasan AOI KSPP Barito utara 38.170,90 ha</i>)	0.00	1,05	3,15	7,33	11,79	17,82	23,59
3.1.2.	Sasaran 2: Meningkatkan akses masyarakat terhadap pelatihan dan teknologi pertanian berkelanjutan untuk mendukung keberlanjutan sektor pertanian	1	Jumlah kelompok tani/nelayan binaan aktif (unit)	230	245	260	275	290	310	330
		2	Persentase petani yang mengakses teknologi ramah lingkungan (%)	25	30	35	40	45	50	55
		3	Jumlah pelatihan pertanian berkelanjutan terlaksana (kegiatan/tahun)	18	20	22	24	26	28	30
3.1.3.	Sasaran 3: Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pemberdayaan, akses pelatihan, dan teknologi pertanian berkelanjutan	1	Persentase rumah tangga tani di atas garis kemiskinan (%)	72	74	76	78	80	82	85
		2	Nilai Tukar Petani (NTP)	112	114	116	118	120	122	125
		3	Persentase desa pertanian mandiri dan berkelanjutan (%)	18	22	25	30	35	40	45
		4	Persentase tenaga kerja sektor pertanian tersertifikasi (%)	12	15	18	22	25	28	30
4	Misi 4: Meningkatkan produktivitas perekonomian melalui optimalisasi sektor – sektor potensial; kehutanan, perkebunan, pertambangan dan energi dalam memanfaatkan sumber daya alam secara berkeadilan bagi masyarakat dan dunia usaha serta seimbang dengan pelestariannya									



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Tahun 2025-2029**

MISI, TUJUAN, SASARAN		INDIKATOR	BASELINE		TARGET TAHUN				
			2024	Target (2025)	2026	2027	2028	2029	2030
4.1.	Tujuan 1: Meningkatkan nilai tambah dan daya saing sektor unggulan daerah	1 Rasio PDRB sektor industri pengolahan terhadap total PDRB (%)	8,25	8,5	8,8	9,1	9,4	9,7	10,0
4.1.1.	Sasaran 1: Meningkatkan kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB daerah	1 Rasio PDRB sektor industri pengolahan terhadap total PDRB (%)	8,25	8,5	8,8	9,1	9,4	9,7	10,0
4.1.2.	Sasaran 2: Meningkatnya hilirisasi hasil perkebunan, kehutanan, dan perikanan	2 Nilai ekspor produk olahan lokal (miliar Rp)	220	250	280	310	350	390	430
4.1.3.	Sasaran 3: Meningkatnya investasi dan inovasi di sektor ekonomi daerah	3 Jumlah investasi baru (miliar Rp)	480	510	550	590	630	670	720
4.2.	Tujuan 2: Meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat dan pelaku usaha lokal	1 Jumlah UMKM aktif (unit)	7.500	7.800	8.200	8.700	9.200	9.800	10.400
4.2.1.	Sasaran 1: Meningkatnya jumlah UMKM produktif di sektor pengolahan, perdagangan, dan jasa	1 Jumlah UMKM aktif (unit)	7.500	7.800	8.200	8.700	9.200	9.800	10.400



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Tahun 2025-2029**

MISI, TUJUAN, SASARAN		INDIKATOR	BASELINE		TARGET TAHUN				
			2024	Target (2025)	2026	2027	2028	2029	2030
4.2.2.	Sasaran 2: Meningkatnya akses permodalan, pelatihan, dan digitalisasi UMKM	1 Persentase UMKM dengan akses pembiayaan formal (%)	38	41	44	48	52	56	60
4.2.3.	Sasaran 3: Meningkatnya kewirausahaan dan inovasi lokal	1 Rasio wirausaha produktif terhadap penduduk usia kerja (%)	1,8	2,0	2,2	2,4	2,6	2,8	3,0
4.3.	Tujuan 3: Meningkatkan tata kelola sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup	1 Persentase perusahaan melaksanakan CSR dan pengawasan lingkungan (%)	65	70	75	78	80	82	85
4.3.1.	Sasaran 1: Meningkatnya efektivitas pengawasan dan pengelolaan lingkungan berkelanjutan	1 Persentase perusahaan melaksanakan CSR dan pengawasan lingkungan (%)	65	70	75	78	80	82	85
4.3.2.	Sasaran 2: Meningkatnya luas lahan rehabilitasi dan reklamasi pascatambang	1 Luas areal rehabilitasi dan reklamasi (hektar)	1.250	1.350	1.500	1.650	1.800	2.000	2.200
4.3.3.	Sasaran 3: Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	1 Nilai IKLH (indeks)	76,34	76,80	77,20	77,60	78,00	78,50	79,00
4.4.	Tujuan 4:	1 Kapasitas terpasang EBT (MW)	2,5	2,8	3,2	3,6	4,0	4,5	5,0



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Tahun 2025-2029**

MISI, TUJUAN, SASARAN			INDIKATOR	BASELINE		TARGET TAHUN				
				2024	Target (2025)	2026	2027	2028	2029	2030
	Meningkatkan ketahanan energi dan pengembangan energi baru terbarukan (EBT)									
4.4.1.	Sasaran 1: Meningkatnya kapasitas energi terbarukan di wilayah perdesaan	1	Kapasitas terpasang EBT (MW)	2,5	2,8	3,2	3,6	4,0	4,5	5,0
4.4.2.	Sasaran 2: Meningkatnya efisiensi dan diversifikasi energi daerah	1	Persentase energi terbarukan terhadap total konsumsi energi (%)	7,5	8,0	9,0	10,0	11,0	12,0	13,0
4.4.3.	Sasaran 3: Meningkatnya kawasan energi mandiri berbasis desa	1	Jumlah desa dengan infrastruktur EBT (desa)	5	7	10	13	16	20	25
5	Misi 5: <i>Menciptakan pelayanan pemerintahan yang baik, merayomi, bertanggung jawab, berkeadilan dengan didukung oleh aparatur pemerintah yang bersih, jujur, profesional, dan sejahtera.</i>									
5.1.	Tujuan 1: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	1	Indeks Kepuasan Masyarakat/IKM (poin)	NA	80	82	84	86	88	90
		2	Indeks Reformasi Birokrasi (poin)	NA	70	72	74	76	78	80
5.1.1.	Sasaran 1:	1	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti (%)	NA	60	65	70	75	80	85



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Tahun 2025-2029**

MISI, TUJUAN, SASARAN		INDIKATOR		BASELINE		TARGET TAHUN				
				2024	Target (2025)	2026	2027	2028	2029	2030
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	2	Jumlah layanan publikasi berbasis digital (layanan)	NA	10	15	20	25	30	35
5.2.	Tujuan 2: Meningkatkan integritas dan profesionalisme ASN	1	Persentase ASN bersertifikat kompetensi (%)	NA	40	50	60	70	80	90
		2	Indeks profesionalitas ASN (poin)	NA	40	50	60	70	80	90
5.2.1.	Sasaran 1: Meningkatnya kompetensi dan integritas aparatur	1	Jumlah ASN mengikuti pelatihan (orang)	NA	500	600	700	800	900	1000
		2	Persentase ASN dengan penilaian kinerja "Baik" (%)	NA	60	65	70	75	80	85
5.3.	Tujuan 3: Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah	1	Opini BPK (WTP)	NA	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		2	Nilai SAKIP minimal "B" (kategori)	NA	B	B	B	BB	BB	A
5.3.1.	Sasaran 1: Meningkatnya opini BPK dan nilai SAKIP	1	Persentase OPD menyampaikan laporan tepat waktu (%)	NA	85	88	90	92	94	96
		2	Jumlah rekomendasi BPK yang ditindaklanjuti (%)	NA	70	75	80	85	90	95
5.4.	Tujuan 4: Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan publik	1	Jumlah forum konsultasi publik (forum)	NA	5	7	9	11	13	15
		2	Indeks Demokrasi Daerah (poin)	NA	72	74	76	78	80	82
5.4.1.	Sasaran 1:	1	Jumlah forum konsultasi publik (forum)	NA	5	7	9	11	13	15



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Tahun 2025-2029**

MISI, TUJUAN, SASARAN		INDIKATOR		BASELINE		TARGET TAHUN				
				2024	Target (2025)	2026	2027	2028	2029	2030
	Meningkatnya indeks partisipasi publik	2	Persentase rekomendasi masyarakat yang diakomodasi (%)	NA	40	45	50	55	60	65
6	Misi 6: Meningkatkan peran serta lembaga adat dalam pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan untuk melestarikan nilai-nilai kearifan lokal, budaya, kesenian daerah, dan nasional									
6.1.	Tujuan: Terwujudnya peningkatan peran lembaga adat dalam pembangunan dan pembinaan masyarakat	1	Indeks partisipasi lembaga adat dalam pembangunan daerah (skor)	NA	60	70	80	90	95	100
		2	Persentase lembaga adat yang aktif berperan dalam pembinaan masyarakat (%)	NA	65	70	75	80	85	90
6.1.1.	Sasaran 1: Meningkatnya peran lembaga adat dalam pembangunan dan pembinaan masyarakat	1	Persentase lembaga adat yang berpartisipasi aktif dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan (%)	NA	65	70	75	80	85	90
6.1.2.	Sasaran 2: Terwujudnya kelestarian nilai-nilai kearifan lokal, budaya, kesenian daerah, dan nasional	1	Indeks pembangunan kebudayaan daerah (skor 0-100)	NA	45	50	60	70	75	80
		2	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pelestarian budaya	NA	60	62	63	64	65	65
		3	Jumlah komunitas budaya dan kesenian yang aktif (komunitas)	NA	70	75	80	85	90	95



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Tahun 2025-2029**

MISI, TUJUAN, SASARAN		INDIKATOR		BASELINE		TARGET TAHUN				
				2024	Target (2025)	2026	2027	2028	2029	2030
		4	Jumlah warisan tak benda (WBTb) dan benda yang diakui atau terdaftar	NA	61	62	63	64	65	65
7	Misi 7 Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Fakir Miskin, Disabilitas, Orang Terlantar, dan Lansia									
7.1.	Tujuan 1: Terwujudnya kualitas hidup yang merata dan perlindungan sosial bagi kelompok rentan	1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	72,31	72,75	73,00	73,40	73,85	74,35	74,76
7.1.1.	Sasaran 1: Menurunnya tingkat kemiskinan dan ketimpangan	1	Persentase Penduduk Miskin (P0) (%)	5,67	5,60	5,40	5,20	5,00	4,80	4,60
		2	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	0,89	0,85	0,80	0,75	0,70	0,65	0,60
		3	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	0,22	0,20	0,19	0,18	0,17	0,16	0,15
		4	Indeks Gini (Gini Ratio)	0,269	0,265	0,261	0,257	0,253	0,249	0,245
7.1.2	Sasaran 2: Meningkatnya kesetaraan gender, perlindungan perempuan, dan pemenuhan hak anak.	1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	87,96	88,14	88,32	88,50	88,68	88,86	89,04
		2	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	87,49	87,88	88,29	88,69	89,09	89,49	89,89
		3	Persentase Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak yang Tertangani	11	16	21	26	31	36	41
		4	Prevalensi Stunting (Balita) (dalam persen)	20,4	19,3	18,2	17,1	16,0	14,9	13,8
		5	Predikat Kabupaten Layak Anak (KLA)	N/A	Predikat KLA	Predikat KLA	Predikat KLA	Predikat KLA	Predikat KLA	Predikat KLA



3.3. Strategi dan Arah Kebijakan

3.3.1. Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan

Tabel 3.4. Visi, Misi, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan

Kode Misi	Misi	Kode Tujuan	Tujuan	Kode Sasaran	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	Mewujudkan sumber daya manusia yang religius, berakhlak, sehat, cerdas, produktif, berwawasan maju, terampil, mampu bersaing, kreatif, serta memanfaatkan kemajuan dan globalisasi teknologi informasi.	1.1.	Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia, kehidupan beragama, sosial dan budaya masyarakat yang harmoni dan kondusif	1.1.1.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	1. Penguatan Sistem Pelayanan Kesehatan Primer dan Rujukan yang Merata.	1. Peningkatan kualitas dan pemerataan tenaga kesehatan di seluruh Puskesmas, khususnya di daerah terpencil. 2. Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana dasar (alat kesehatan, obat) serta optimalisasi sistem rujukan digital. 3. Akselerasi pencapaian Universal Health Coverage (UHC) dan peningkatan pemanfaatan layanan kesehatan program JKN.
						2. Intervensi Spesifik dan Sensitif Terpadu untuk Perbaikan Gizi dan Stunting.	1. Pelaksanaan audit kasus stunting dan intervensi yang menyasar langsung kelompok 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). 2. Penguatan ketahanan pangan keluarga utamakan pangan lokal dan edukasi gizi seimbang melalui kerjasama multisektor
						3. Pencegahan Penyakit dan Promosi Kesehatan	1. Penguatan surveilans dan pengendalian penyakit menular, serta perluasan skrining faktor risiko Penyakit Tidak Menular (PTM).



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Tahun 2025-2029**

Kode Misi	Misi	Kode Tujuan	Tujuan	Kode Sasaran	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
							2. Percepatan implementasi program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) secara menyeluruh (Stop Buang Air Besar Sembarangan). 3. Intensifikasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) melalui Posyandu dan media komunikasi publik.
				1.1.2.	Meningkatnya pendidikan berkualitas	1. Peningkatan Kualitas dan Keterjangkauan Akses Pendidikan Menengah.	1. Program Pendidikan Gratis 16 Tahun yang mencakup bantuan biaya sekolah dan operasional siswa di jenjang SD, SMP, hingga SMA/SMK (sesuai kewenangan) untuk menekan angka putus sekolah. 2. Peningkatan rasio dan mutu sekolah lanjutan di tingkat kecamatan untuk mempermudah akses geografis dan mengurangi biaya transportasi/tinggal siswa.
						2. Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik dan Relevansi Kurikulum.	1. Program Digitalisasi dan Peningkatan Kompetensi Guru (pedagogik, profesional, TIK) yang terintegrasi dan fokus pada adaptasi Kurikulum nasional 2. Penguatan "link and match" dengan dunia usaha/industri untuk pendidikan vokasi (jika relevan di tingkat Kab.), serta pelatihan keterampilan bagi lulusan agar relevan dengan kebutuhan pasar kerja lokal Barito Utara.



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Tahun 2025-2029**

Kode Misi	Misi	Kode Tujuan	Tujuan	Kode Sasaran	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
						3. Penguatan Sistem Data dan Intervensi Pencegahan Putus Sekolah.	1. Pengembangan Sistem Informasi Data Pendidikan Terpadu untuk pemantauan real-time data RLS, HLS, dan Anak Tidak Sekolah (ATS) berbasis by name by address. 2. Pemberian Bantuan Pendidikan Spesifik (seperti beasiswa dan parenting skill) yang ditargetkan pada keluarga miskin dan wilayah 3T untuk mempertahankan siswa tetap bersekolah hingga jenjang tertinggi.
2.	Meningkatkan pembangunan infrastruktur secara adil dan merata dalam rangka menunjang peningkatan kualitas pembangunan perekonomian, kesehatan, pendidikan, pelayanan masyarakat, pemerintahan, kebudayaan, pemuda, dan olahraga	2.1.	Meningkatnya kualitas infrastruktur secara adil dan merata dalam menunjang peningkatan kualitas Pembangunan disegala sektor dengan daya dukung lingkungan yang berdampak pada kemajuan daerah secara berkelanjutan	2.1.1.	Sasaran di Bidang Perekonomian • Meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas ekonomi antar wilayah, melalui pembangunan dan perbaikan jalan, jembatan, pelabuhan, serta sarana transportasi. • Menurunkan biaya logistik dan distribusi barang dan jasa untuk mendukung pertumbuhan	1. Mengembangkan jaringan transportasi multimoda (darat-sungai-udara) untuk memperlancar arus barang dan jasa dari daerah produksi ke pasar. 2. Meningkatkan aksesibilitas kawasan potensial ekonomi seperti pertanian, perkebunan, dan pertambangan dengan membuka jalur distribusi baru. 3. Memperkuat kerja sama regional antarwilayah (kabupaten tetangga di Kalteng dan Kalsel) untuk integrasi ekonomi dan peningkatan arus perdagangan.	1. Peningkatan Konektivitas dan Aksesibilitas Ekonomi Antarwilayah 2. Meningkatkan pembangunan dan rehabilitasi jalan strategis kabupaten dan antar-kecamatan untuk memperlancar arus barang dan jasa. 3. Penurunan Biaya Logistik dan Distribusi Barang dan Jasa 4. Penyediaan infrastruktur jalan produksi pertanian dan perkebunan untuk mempermudah akses hasil panen ke pasar. 5. Meningkatkan efisiensi sistem transportasi dan distribusi logistik melalui digitalisasi rantai pasok, penyediaan gudang dan depo logistik daerah



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Tahun 2025-2029**

Kode Misi	Misi	Kode Tujuan	Tujuan	Kode Sasaran	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
					sektor perdagangan, industri kecil menengah, dan pertanian. • Mendorong pemerataan investasi dan aktivitas ekonomi di wilayah pedesaan dan perdesaan terpencil. • Meningkatkan daya saing daerah melalui penyediaan infrastruktur pendukung kawasan industri, pasar rakyat, dan sentra ekonomi produktif.	4. Memperluas jaringan transportasi darat dan sungai dengan pembangunan dan rehabilitasi jalan kabupaten, jalan produksi, dan jembatan penghubung antar-kecamatan.	
				2.1.2.	Sasaran di Bidang lingkungan dan Kesehatan • Meningkatkan IKL, akses masyarakat terhadap layanan kesehatan dengan membangun atau merehabilitasi	Strategi untuk Meningkatkan Indeks Kualitas Lingkungan (IKL): 1. Melakukan rehabilitasi dan konservasi lahan kritis melalui penanaman pohon dan reboisasi di daerah tangkapan air. 2. Meningkatkan pengendalian pencemaran udara dan air dengan	1. Peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan (IKL) dan Kualitas Hidup Masyarakat 2. Memperkuat program pengendalian pencemaran air, udara, dan tanah, terutama di sekitar kawasan pertambangan dan permukiman padat. 3. Meningkatkan kegiatan rehabilitasi dan konservasi lahan kritis serta pengelolaan Daerah



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Tahun 2025-2029**

Kode Misi	Misi	Kode Tujuan	Tujuan	Kode Sasaran	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
					fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan posyandu. - Memperluas jangkauan pelayanan kesehatan dasar di daerah terpencil melalui infrastruktur transportasi dan komunikasi yang memadai. - Menjamin ketersediaan air bersih dan sanitasi layak, untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.	monitoring rutin kualitas lingkungan dan pengawasan kegiatan industri. Strategi untuk Meningkatkan IKL dan Akses Masyarakat terhadap Layanan Kesehatan - Meningkatkan pembangunan dan rehabilitasi sarana kesehatan seperti rumah sakit daerah, puskesmas, pustu, dan posyandu terutama di wilayah dengan cakupan rendah. - Meningkatkan ketersediaan tenaga kesehatan profesional (dokter, bidan, perawat, tenaga gizi, dan sanitarian) melalui penempatan berbasis kebutuhan wilayah. - Mengoptimalkan sistem rujukan pelayanan kesehatan antar fasilitas kesehatan di tingkat desa, kecamatan, dan kabupaten agar lebih cepat dan efisien. Strategi untuk Memperluas Jangkauan Pelayanan Kesehatan di Daerah Terpencil	Aliran Sungai (DAS) prioritas untuk menjaga daya dukung lingkungan. - Peningkatan Aksesibilitas dan Mutu Layanan Kesehatan Masyarakat - Pembangunan dan rehabilitasi fasilitas kesehatan dasar dan rujukan, seperti RSUD, Puskesmas, Pustu, Posyandu, dan Polindes di seluruh kecamatan. - Peningkatan standar mutu sarana, prasarana, dan peralatan medis, termasuk laboratorium dan ambulans keliling di wilayah terpencil. - Peningkatan Ketersediaan Air Bersih dan Sanitasi Layak - Pembangunan dan peningkatan SPAM (Sistem Penyediaan Air Minum) berbasis sumber air lokal (sumur bor, air permukaan, dan air tanah). - Penguatan Tata Kelola dan Pembiayaan Layanan Lingkungan dan Kesehatan - Peningkatan alokasi anggaran untuk program prioritas lingkungan hidup dan kesehatan dasar.



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Tahun 2025-2029

Kode Misi	Misi	Kode Tujuan	Tujuan	Kode Sasaran	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
						1. Membangun sarana transportasi dan komunikasi yang memadai menuju daerah terpencil, terutama akses jalan ke puskesmas dan rumah sakit rujukan. 2. Mengembangkan layanan kesehatan bergerak (mobile clinic) untuk menjangkau masyarakat di wilayah sulit dijangkau. Strategi untuk Menjamin Ketersediaan Air Bersih dan Sanitasi Layak 1. Meningkatkan pembangunan jaringan sistem penyediaan air minum (SPAM) baik skala kota maupun pedesaan, termasuk jaringan perpipaan baru. 2. Meningkatkan cakupan layanan air minum layak melalui optimalisasi peran PDAM dan pengelolaan air berbasis masyarakat (PAMSIMAS). 3. Mengembangkan sistem pengelolaan air limbah domestik seperti IPAL komunal dan tangki septik kedap di permukiman padat.	



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Tahun 2025-2029**

Kode Misi	Misi	Kode Tujuan	Tujuan	Kode Sasaran	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
				2.1.3.	Sasaran di Bidang Pendidikan - Meningkatkan pemerataan akses pendidikan melalui pembangunan sekolah, ruang kelas baru, laboratorium, dan sarana penunjang pendidikan di seluruh wilayah. - Meningkatkan mutu pembelajaran dengan dukungan infrastruktur digital dan jaringan internet bagi sekolah. - Menekan kesenjangan pendidikan antar wilayah melalui penyediaan sarana pendidikan di daerah tertinggal	Strategi untuk Meningkatkan Pemerataan Akses Pendidikan: - Meningkatkan pembangunan unit sekolah baru (USB) di wilayah dengan tingkat partisipasi sekolah rendah, baik jenjang PAUD, SD, SMP, maupun SMA. - Membangun ruang kelas baru (RKB), laboratorium, dan sarana pendukung pendidikan seperti perpustakaan, asrama siswa, dan ruang keterampilan - Meningkatkan rehabilitasi dan pemeliharaan sarana pendidikan agar layak, aman, dan nyaman untuk kegiatan belajar mengajar. Strategi untuk Meningkatkan Mutu Pembelajaran dengan Dukungan Infrastruktur Digital: - Meningkatkan jaringan internet dan konektivitas digital sekolah terutama di wilayah pedesaan dan perbatasan - Mengembangkan sistem pembelajaran berbasis	- Pemerataan Akses Pendidikan di Seluruh Wilayah - Menyediakan sarana dan prasarana pendidikan dasar (SD, SMP) serta pendidikan menengah (SMA/SMK) sesuai kebutuhan wilayah. - Peningkatan Mutu Pembelajaran dan Kualitas SDM Pendidikan - Peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan melalui pelatihan, sertifikasi, dan penguasaan teknologi pembelajaran digital. - pengurangan Kesenjangan Pendidikan Antarwilayah - Pemerataan distribusi guru dan tenaga kependidikan di seluruh wilayah, termasuk insentif bagi guru di daerah terpencil dan pedalaman. - Penguatan Infrastruktur dan Pembiayaan Pendidikan - Optimalisasi alokasi APBD dan dana transfer (DAK Pendidikan, BOS, dan BOP) untuk pembangunan sarana pendidikan. - Penguatan Pendidikan Karakter dan Berkelanjutan - Mengintegrasikan nilai-nilai karakter, budaya lokal, dan keberlanjutan lingkungan dalam kurikulum pendidikan daerah.



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Tahun 2025-2029**

Kode Misi	Misi	Kode Tujuan	Tujuan	Kode Sasaran	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
						digital dan e-learning di sekolah-sekolah untuk mendukung transformasi Pendidikan 3. Menjalin kerja sama dengan penyedia layanan internet dan lembaga pendidikan tinggi dalam pengembangan infrastruktur digital pendidikan. Strategi untuk Menekan Kesenjangan Pendidikan Antarwilayah: 1. Menerapkan kebijakan afirmatif pendidikan di daerah tertinggal, terpencil, dan perbatasan, melalui bantuan sarana belajar, beasiswa, dan program khusus guru. 2. Meningkatkan program beasiswa daerah dan bantuan pendidikan bagi siswa berprestasi maupun dari keluarga kurang mampu.	
				2.1.4.	Sasaran di Bidang Pelayanan Masyarakat Meningkatkan kualitas dan efisiensi	Strategi untuk Meningkatkan Kualitas dan Efisiensi Pelayanan Publik 1. Mendorong penyederhanaan prosedur pelayanan dan penerapan	1. Peningkatan Kualitas dan Efisiensi Pelayanan Publik 2. Membangun dan merehabilitasi infrastruktur pemerintahan dan fasilitas pelayanan publik seperti kantor kecamatan, kelurahan, dan balai pelayanan terpadu.



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Tahun 2025-2029**

Kode Misi	Misi	Kode Tujuan	Tujuan	Kode Sasaran	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
					elayanan publik melalui pembangunan infrastruktur pemerintahan (kantor pelayanan, sistem informasi, dan fasilitas umum). - Mewujudkan pelayanan publik yang mudah diakses, cepat, dan transparan bagi seluruh lapisan masyarakat. - Menunjang pelayanan dasar masyarakat, air minum, listrik, transportasi publik, dan perumahan.	Standar Pelayanan Publik (SPP) di semua OPD. - Meningkatkan kapasitas dan profesionalisme ASN melalui pelatihan pelayanan prima, komunikasi publik, dan etika birokrasi. - Mengembangkan sistem pengaduan dan survei kepuasan masyarakat online untuk meningkatkan akuntabilitas dan perbaikan kinerja pelayanan. Strategi untuk Mewujudkan Pelayanan Publik yang Mudah Diakses, Cepat, dan Transparan - Mengembangkan sistem layanan publik digital terintegrasi (smart governance) yang menghubungkan layanan kependudukan, perizinan, dan sosial. - Meningkatkan pemerataan akses layanan administrasi kependudukan di seluruh kecamatan dan desa melalui mobile service dan layanan keliling.	- Mewujudkan Pelayanan Publik yang Mudah Diakses, Cepat, dan Transparan - Peningkatan akses masyarakat terhadap layanan publik hingga ke tingkat desa melalui digitalisasi dan penguatan kapasitas perangkat desa. - Penunjang Pelayanan Dasar Masyarakat (Air Minum, Listrik, Transportasi Publik, dan Perumahan) - Peningkatan akses dan kualitas layanan air minum melalui pengembangan SPAM (Sistem Penyediaan Air Minum) dan jaringan distribusi ke wilayah perdesaan. - Perluasan akses listrik desa dan energi terbarukan, khususnya di daerah pedalaman dan terpencil.



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Tahun 2025-2029**

Kode Misi	Misi	Kode Tujuan	Tujuan	Kode Sasaran	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
						3. Mendorong partisipasi masyarakat dalam evaluasi layanan publik melalui survei kepuasan dan forum konsultasi publik. 4. Memperkuat keterbukaan informasi publik (KIP) dengan penyediaan data layanan yang transparan, mudah diakses, dan berbasis web. 5. Meningkatkan kecepatan layanan administrasi pemerintahan dengan penerapan sistem antrian online dan layanan elektronik (e-service). 6. Mengembangkan pusat layanan informasi masyarakat (call center, command center, dan help desk) untuk memudahkan interaksi dengan pemerintah. 7. Mendorong kolaborasi antar sektor (pemerintah, swasta, dan masyarakat) untuk peningkatan kualitas pelayanan publik. Strategi untuk Menunjang Pelayanan Dasar Masyarakat (Air Minum, Listrik,	



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Tahun 2025-2029**

Kode Misi	Misi	Kode Tujuan	Tujuan	Kode Sasaran	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
						Transportasi Publik, dan Perumahan) 1. Memperluas cakupan layanan air minum layak dan aman melalui penguatan PDAM dan program SPAM pedesaan. 2. Mendorong pembangunan sistem air bersih berbasis masyarakat (PAMSIMAS) di daerah yang belum terlayani.	
3	Mewujudkan peningkatan ekonomi masyarakat melalui pembangunan dan pemberdayaan pertanian rakyat secara terpadu, terarah dan berkelanjutan melalui usaha pertanian pangan, perikanan, peternakan, perkebunan, dan hortikultura untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan peningkatan produksi daerah	3.1.	Meningkatkan produktivitas sektor pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, dan hortikultura serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pemberdayaan, akses pelatihan, dan teknologi pertanian berkelanjutan.	3.1.1.	Meningkatkan produktivitas sektor pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, dan hortikultura untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat dan meningkatkan produksi daerah	Penerapan teknologi pertanian yang ramah lingkungan dan peningkatan kapasitas petani melalui pelatihan berkelanjutan.	1. Menyediakan akses kepada petani untuk menggunakan teknologi pertanian ramah lingkungan yang meningkatkan produktivitas. 2. Memberikan pelatihan kepada petani tentang teknik pertanian terbaru dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Tahun 2025-2029**

Kode Misi	Misi	Kode Tujuan	Tujuan	Kode Sasaran	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
				3.1.2.	Meningkatkan akses masyarakat terhadap pelatihan dan teknologi pertanian berkelanjutan untuk mendukung keberlanjutan sektor pertanian	Penyuluhan dan pelatihan pertanian berkelanjutan serta akses teknologi pertanian modern bagi petani.	1. Meningkatkan kerja sama dengan lembaga pendidikan dan sektor swasta untuk menyediakan pelatihan dan penyuluhan yang dapat diakses oleh petani. 2. Menyediakan infrastruktur yang mendukung penyebaran teknologi pertanian berkelanjutan di daerah pedesaan.
				3.1.3.	Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pemberdayaan, akses pelatihan, dan teknologi pertanian berkelanjutan	Peningkatan akses sanitasi, energi terbarukan, dan pangan bergizi di masyarakat.	1. Mengintegrasikan program akses sanitasi dan energi terbarukan dengan kegiatan pertanian untuk mendukung kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. 2. Mendorong pengembangan pasar lokal untuk pangan bergizi yang dapat diakses oleh masyarakat dengan harga yang terjangkau.
4	Meningkatkan produktivitas perekonomian melalui optimalisasi sektor – sektor potensial; kehutanan, perkebunan, pertambangan dan energi dalam memanfaatkan sumber daya alam secara berkeadilan bagi masyarakat dan dunia usaha serta seimbang	4.1.	Meningkatkan nilai tambah dan daya saing sektor unggulan daerah	4.1.1.	Meningkatkan kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB	Memperkuat rantai nilai (value-chain) dalam pengolahan hasil pertambangan, perkebunan dan kehutanan; mengembangkan klaster industri pengolahan berbasis bahan baku lokal; mendorong investasi sektor pengolahan di kawasan strategis.	1. Menetapkan kawasan industri pengolahan bahan baku unggulan (misalnya kayu olahan, karet, kakao, batubara-terlola) dengan insentif fiskal dan kemudahan perizinan. 2. Kolaborasi antara pemerintah daerah, perguruan tinggi dan dunia usaha untuk riset & pengembangan teknologi pengolahan lokal, serta sertifikasi mutu produk daerah. 3. Fasilitasi perluasan pasar nasional dan ekspor untuk produk pengolahan daerah melalui



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Tahun 2025-2029**

Kode Misi	Misi	Kode Tujuan	Tujuan	Kode Sasaran	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	dengan pelestariannya						promosi, pameran, dan kemitraan internasional. 4. Menyederhanakan dan mempercepat izin investasi sektor pengolahan, terutama yang berbasis bahan baku lokal, serta memperkuat daya saing dengan logistik/infra memadai.
				4.1.2.	Meningkatnya hilirisasi perkebunan, kehutanan, perikanan hasil dan	Mengoptimalkan pemanfaatan komoditas unggulan daerah melalui pengolahan lanjutan dan diversifikasi produk; memperkuat kelembagaan petani/petak serta kemitraan dengan sektor swasta; memperkuat sistem pemasaran dan branding produk lokal.	1. Mendorong pembentukan koperasi atau BUMDes yang mengelola pengolahan hasil perkebunan/kehutanan/perikanan (contoh: kayu olahan, karet, kakao, sawit, budidaya perikanan). 2. Pendampingan teknis dan pelatihan pengolahan produk, peningkatan mutu, kemasan, sertifikasi, dan pemasaran digital. 3. Pengembangan program kemitraan petani/pengusaha dengan industri pengolahan, dengan skema bagi hasil yang adil dan pelibatan masyarakat lokal. 4. Penguatan akses ke pasar melalui e-commerce, pusat pemasaran, dan koordinasi antar pemerintah daerah serta swasta.
				4.1.3.	Meningkatnya investasi dan inovasi	Menarik investasi baik domestic maupun asing ke sektor unggulan,	1. Membentuk satu pintu layanan investasi daerah (One Stop Service) dengan pelayanan cepat,



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Tahun 2025-2029**

Kode Misi	Misi	Kode Tujuan	Tujuan	Kode Sasaran	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
					di sektor ekonomi daerah	memperkuat iklim investasi dan inovasi; mendukung start-up lokal dan teknologi berbasis sumber daya alam daerah.	kepastian hukum, dan insentif untuk sektor unggulan. 2. Menyediakan fasilitas inkubator bisnis dan riset inovasi untuk UMKM dan start-up yang memanfaatkan sumber daya lokal serta teknologi hijau. 3. Menetapkan kebijakan insentif (misalnya tax holiday, kemudahan lahan, subsidi energi terbarukan) bagi investor yang masuk ke sektor potensi unggulan dengan dampak sosial tinggi. 4. Mengembangkan kemitraan antara akademisi, LSM lokal dan sektor industri untuk menghasilkan inovasi produk dan proses yang berkelanjutan.
		4.2.	Meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat dan pelaku usaha lokal	4.2.1.	Meningkatnya jumlah UMKM produktif di sektor pengolahan, perdagangan, dan jasa	Memperluas skala dan produktivitas UMKM melalui diversifikasi usaha, akses teknologi, digitalisasi, serta integrasi ke rantai nilai unggulan daerah.	1. Program pembinaan intensif UMKM (pelatihan manajemen, higienitas, standar mutu, pemasaran digital) khusus pada kegiatan yang terkait sektor unggulan (pertanian, kehutanan, perikanan, jasa pendukung). 2. Fasilitasi platform digital dan marketplace lokal agar UMKM lokal dapat menjangkau pasar nasional dan ekspor. 3. Skema penyertaan modal (mikro/keompok) dengan bunga rendah atau hibah untuk UMKM



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Tahun 2025-2029**

Kode Misi	Misi	Kode Tujuan	Tujuan	Kode Sasaran	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
							yang mengolah bahan lokal dan berkeadilan sosial. 4. Penyediaan pusat inkubasi UMKM di kecamatan/kabupaten dengan fasilitas <i>co-working</i> , pelatihan, jaringan bisnis serta mentoring.
				4.2.2.	Meningkatnya akses permodalan, pelatihan, dan digitalisasi UMKM	Memperkuat akses pembiayaan, pelatihan keterampilan, dan adopsi teknologi digital bagi UMKM untuk meningkatkan daya saing dan efisiensi usaha.	1. Kerjasama dengan lembaga keuangan lokal atau nasional untuk menyediakan kredit mikro/UMKM dengan syarat ringan dan pendampingan bisnis. 2. Program pelatihan massal untuk digitalisasi usaha (misalnya e-commerce, pembayaran digital, pemasaran online, manajemen stok) terutama untuk pelaku di desa dan kawasan terpencil. 3. Mengembangkan platform bantuan digital pemerintah daerah (aplikasi/portal) yang memfasilitasi registrasi UMKM, akses pasar, jaringan mitra, dan pelaporan digital. 4. Mendorong pembentukan komunitas pelaku UMKM (klaster) yang saling berbagi pengalaman, modal, dan teknologi, serta menghubungkan ke investor atau pembeli besar.



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Tahun 2025-2029**

Kode Misi	Misi	Kode Tujuan	Tujuan	Kode Sasaran	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
				4.2.3.	Meningkatnya kewirausahaan dan inovasi lokal	Menciptakan lingkungan yang mendukung wirausaha muda dan inovasi berbasis potensi lokal, serta menghubungkan inovator dengan modal dan pasar.	1. Program pengembangan wirausaha muda (start-up), inkubator dan kompetisi inovasi berbasis sumber daya alam (contoh: aplikasi pengolahan limbah tambang, produk ramah lingkungan dari kayu, bioenergi). 2. Menetapkan insentif atau penghargaan untuk inovasi lokal yang berhasil skala produksi atau komersial. 3. Kerjasama dengan perguruan tinggi dan lembaga penelitian untuk riset bersama dan komersialisasi teknologi lokal. 4. Mendorong pembentukan kawasan kreatif/industri ringan berbasis inovasi dan pelibatan masyarakat lokal dalam pengembangan produk.
		4.3.	Meningkatkan tata kelola sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup	4.3.1.	Meningkatnya efektivitas pengawasan pengelolaan lingkungan berkelanjutan	Penguatan regulasi, pengawasan dan penegakan hukum lingkungan, serta pelibatan masyarakat dan lembaga adat dalam pengelolaan SDA.	1. Memperkuat kapasitas monitoring dan evaluasi lingkungan hidup melalui sistem informasi lingkungan daerah, satgas pengawasan dan pelaporan publik. 2. Menetapkan zonasi eksploitasi sumber daya alam yang didasari studi AMDAL dan KLHS, serta memastikan izin berusaha memenuhi persyaratan lingkungan. 3. Melibatkan lembaga adat, masyarakat lokal dan pengelola



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Tahun 2025-2029**

Kode Misi	Misi	Kode Tujuan	Tujuan	Kode Sasaran	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
							kawasan dalam pengawasan dan restitusi lingkungan, serta sistem insentif bagi perusahaan yang menerapkan praktik lestari. 4. Meningkatkan transparansi dan partisipasi publik dalam pengelolaan lingkungan melalui platform pelaporan warga dan data terbuka.
				4.3.2.	Meningkatnya luas lahan rehabilitasi dan reklamasi pascatambang	Mendorong program rehabilitasi lahan dan reklamasi pascatambang, serta pengembangan ekonomi hijau (green economy) pada wilayah bekas tambang.	1. Menetapkan target rehabilitasi lahan pasca-tambang dan melakukan kerjasama dengan perusahaan tambang untuk mendanai reklamasi (life-cycle cost) atau pengalihfungsian lahan. 2. Pengembangan kegiatan ekonomi berbasis lahan rehabilitasi (misalnya agroforestry, ekowisata, mangrove, budidaya kelapa dan ikan) sebagai alternatif untuk masyarakat lokal. 3. Insentif bagi investor atau pelaku usaha yang mengubah lahan bekas tambang menjadi kawasan produktif ramah lingkungan. 4. Melakukan pemantauan berkala dan publikasi capaian luas rehabilitasi serta kualitas lahan pascatambang.



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Tahun 2025-2029**

Kode Misi	Misi	Kode Tujuan	Tujuan	Kode Sasaran	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
				4.3.3.	Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Integrasi indikator lingkungan ke dalam proses perencanaan pembangunan daerah dan peningkatan kualitas lingkungan hidup sebagai bagian utama pertumbuhan ekonomi.	1. Menetapkan target peningkatan IKLH sebagai komponen kunci dalam RPJMD dan memantau capaian tahunan secara terbuka. 2. Menyusun program peningkatan kualitas udara, air, tanah dan pengelolaan limbah yang efektif serta mendorong ekonomi sirkular. 3. Mengintegrasikan ekosistem mangrove, hutan adat dan kawasan konservasi ke dalam strategi pembangunan berbasis lingkungan dan lokal. 4. Menjalankan kampanye lingkungan dengan melibatkan sekolah, masyarakat dan sektor swasta untuk meningkatkan kesadaran serta partisipasi dalam pelestarian lingkungan.
		4.4.	Meningkatkan ketahanan energi dan pengembangan energi baru terbarukan (EBT)	4.4.1.	Meningkatnya kapasitas energi terbarukan di wilayah pedesaan	Meningkatnya kapasitas energi terbarukan di wilayah pedesaan Strategi: Mengembangkan infrastruktur EBT (matahari, air, biomassa, angin) terutama di kawasan pedesaan dan terpencil serta memperkuat jaringan distribusi listrik.	1. Memetakan potensi EBT di daerah, prioritas pada pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dan mikrohidro di desa-desa yang belum tersentuh jaringan listrik. 2. Mendorong kerjasama pemerintah daerah dengan swasta dan masyarakat desa untuk pembangunan mini-grid EBT dan sistem off-grid. 3. Menyediakan insentif dan skema pembiayaan khusus untuk proyek EBT skala kecil dan menengah, serta pelatihan teknis untuk



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Tahun 2025-2029**

Kode Misi	Misi	Kode Tujuan	Tujuan	Kode Sasaran	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
							masyarakat desa dalam operasional dan pemeliharaan. 4. Penguatan jaringan distribusi dan integrasi EBT ke sistem listrik utama guna meningkatkan keandalan dan menurunkan biaya listrik di wilayah pedesaan.
				4.4.2.	Meningkatnya efisiensi dan diversifikasi energi daerah	Mendorong penggunaan teknologi efisiensi energi, diversifikasi sumber energi dan pengembangan sistem energi berbasis lokal.	1. Program audit energi dan efisiensi di gedung pemerintah daerah, sekolah, rumah sakit dan fasilitas umum. 2. Promosi penggunaan energi terbarukan di sektor swasta dan rumah tangga melalui insentif atau subsidi awal. 3. Pengembangan sumber energi alternatif seperti biomassa dari limbah perkebunan dan kehutanan serta pemanfaatan gas metana tambang. 4. Menetapkan standar efisiensi dan regulasi pemakaian energi di sektor industri dan publik, serta mendorong inovasi teknologi energi lokal.
				4.4.3.	Meningkatnya energi mandiri berbasis desa	Mengembangkan wilayah-wilayah percontohan desa mandiri energi dengan integrasi EBT, sistem distribusi lokal, dan pelibatan masyarakat.	1. Menunjuk beberapa desa percontohan sebagai "Desa Energi Mandiri" yang mendapatkan dukungan pembiayaan, teknologi dan pelatihan. 2. Mengembangkan skema kemitraan antara desa, investor



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Tahun 2025-2029**

Kode Misi	Misi	Kode Tujuan	Tujuan	Kode Sasaran	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
							dan instansi pemerintah untuk pembangunan fasilitas energi mandiri seperti PLTS atap, mikrohidro, dan biogas. 3. Integrasi program energi mandiri dengan pemberdayaan ekonomi desa sehingga surplus energi dapat menjadi sumber pendapatan lokal (misalnya pihak desa sebagai pengelola sistem mini-grid). 4. Monitoring dan evaluasi capaian desa energi mandiri secara berkala serta menyebarkan model ke desa-desa lain di kabupaten.
5	Menciptakan pelayanan pemerintahan yang baik, merayomi, bertanggung jawab, berkeadilan dengan didukung oleh aparatur pemerintah yang jujur, profesional, dan sejahtera.	5.1.	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	1. Digitalisasi layanan public 2. Simplifikasi prosedur pelayanan 3. Peningkatan kapasitas SDM pelayanan	1. Pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) 2. Penerapan standar pelayanan minimal 3. Revitalisasi unit layanan publik
		5.2.	Meningkatkan integritas dan profesionalisme ASN	5.2.1.	Meningkatnya kompetensi dan integritas aparatur	1. Reformasi manajemen ASN 2. Pelatihan berbasis kompetensi 3. Sistem penghargaan dan sanksi berbasis kinerja	1. Peningkatan kualitas rekrutmen dan promosi ASN 2. Sertifikasi kompetensi ASN 3. Peningkatan kesejahteraan dan etika kerja aparatur



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Tahun 2025-2029**

Kode Misi	Misi	Kode Tujuan	Tujuan	Kode Sasaran	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		5.3.	Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah	5.3.1.	Meningkatnya opini BPK dan nilai SAKIP	1. Penguatan sistem pengawasan internal 2. Peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan 3. Penerapan e-budgeting dan e-audit	1. Optimalisasi peran Inspektorat 2. Peningkatan kualitas laporan keuangan 3. Integrasi sistem perencanaan dan penganggaran
		5.4.	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan publik	5.4.1.	Meningkatnya indeks partisipasi publik	1. Penguatan forum konsultasi public 2. Transparansi informasi pembangunan 3. Peningkatan literasi kebijakan publik	1. Pengembangan kanal aspirasi masyarakat 2. Peningkatan akses informasi pembangunan 3. Pelibatan masyarakat dalam musrenbang dan evaluasi kebijakan
6.	Meningkatkan peran serta lembaga adat dalam pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan untuk melestarikan nilai-nilai kearifan lokal, budaya, kesenian daerah, dan nasional	6.1.	Terwujudnya peningkatan peran lembaga adat dalam pembangunan dan pembinaan masyarakat	6.1.1.	Meningkatnya peran lembaga adat dalam pembangunan dan pembinaan masyarakat	1. Penguatan kelembagaan dan legalitas lembaga adat	1. Menetapkan dan memperbarui dasar hukum pembentukan serta pengakuan lembaga adat melalui peraturan daerah atau peraturan desa 2. Melakukan registrasi, verifikasi, dan pembinaan terhadap lembaga adat yang ada 3. Meningkatkan kapasitas kelembagaan adat dalam tata kelola, administrasi dan akuntabilitas
						2. Peningkatan kapasitas dan kompetensi lembaga adat	1. Menyelenggarakan pelatihan kepemimpinan, mediasi sosial, dan pengelolaan konflik berbasis adat 2. Memberikan pendidikan dan pelatihan nilai-nilai adat dan budaya kepada generasi muda 3. Mendorong lembaga adat berperan dalam pembinaan sosial



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Tahun 2025-2029**

Kode Misi	Misi	Kode Tujuan	Tujuan	Kode Sasaran	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
							dan pembangunan karakter masyarakat
						3. Integrasi peran lembaga adat dalam proses pembangunan daerah	1. Melibatkan lembaga adat dalam forum musyawarah pembangunan (Musrenbang, RPJMDes, dan Konsultasi Publik) 2. Menjadikan lembaga adat mitra pemerintah dalam pelaksanaan program sosial, budaya, dan ketentraman masyarakat 3. Meningkatkan komunikasi dan koordinasi antara pemerintah daerah dan lembaga adat
						4. Pemberdayaan lembaga adat dalam penyelesaian masalah sosial dan pembinaan masyarakat	1. Memperkuat peran lembaga adat sebagai mediator dalam penyelesaian konflik sosial dan sengketa masyarakat. 2. Mendorong penggunaan hukum adat dalam penyelesaian masalah sosial tertentu sesuai dengan nilai-nilai lokal. 3. Mengembangkan sistem penghargaan bagi lembaga adat yang berprestasi dalam pembinaan masyarakat.
						5. Pelestarian nilai-nilai adat dan budaya dalam kehidupan masyarakat	1. Mengintegrasikan nilai-nilai adat dalam kegiatan pendidikan karakter dan sosial kemasyarakatan. 2. Mendukung kegiatan adat dan budaya sebagai sarana memperkuat kohesi sosial.



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Tahun 2025-2029**

Kode Misi	Misi	Kode Tujuan	Tujuan	Kode Sasaran	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
							3. Mengembangkan dokumentasi dan promosi kearifan lokal yang dijaga oleh lembaga adat.
						6. Penguatan kemitraan dan dukungan sumber daya bagi lembaga adat	1. Menyediakan dukungan anggaran dan fasilitas kegiatan lembaga adat melalui APBD atau kemitraan CSR 2. Membangun jaringan kerja sama antara lembaga adat dengan dunia pendidikan, LSM, dan sektor swasta. 3. Memfasilitasi pertukaran pengetahuan dan pengalaman antar lembaga adat.
				6.1.2.	Terwujudnya kelestarian nilai-nilai kearifan lokal, budaya, kesenian daerah, dan nasional	1. Penguatan kelembagaan dan regulasi pelestarian budaya	1. Menyusun dan memperbarui regulasi daerah (Perda/Perkada) tentang pelestarian budaya dan kearifan lokal 2. Mengoptimalkan peran lembaga adat, dewan kesenian, dan komunitas budaya sebagai mitra pemerintah. 3. Meningkatkan koordinasi antar-OPD dan lembaga budaya dalam pengelolaan nilai-nilai budaya daerah.
						2. Peningkatan kapasitas pelaku seni, budaya, dan komunitas lokal	1. Menyelenggarakan pelatihan dan pembinaan bagi seniman, budayawan, dan pegiat kearifan lokal 2. Mendorong regenerasi pelaku seni dan pewarisan budaya kepada generasi muda.



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Tahun 2025-2029**

Kode Misi	Misi	Kode Tujuan	Tujuan	Kode Sasaran	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
							3. Fasilitasi pelaku budaya dalam kegiatan promosi dan pameran daerah maupun nasional.
						3. Pengembangan dan pelestarian warisan budaya daerah	
7.	Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Fakir Miskin, Disabilitas, Orang Terlantar, dan Lansia	7.1.	Terwujudnya kualitas hidup yang merata dan perlindungan sosial bagi kelompok rentan	7.1.1.	Menurunnya tingkat kemiskinan dan ketimpangan	Strategi penanggulangan kemiskinan dan ketimpangan dapat diimplementasikan melalui tiga langkah: 1. Penajaman ketepatan sasaran melalui verifikasi dan validasi DTKS secara berkala. 2. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin, dengan memastikan 100% dari mereka terdaftar dalam PBI-JKN serta menerima bansos (PKH/BPNT) secara tepat waktu. 3. Meningkatkan pendapatan dan	Misi 7 difokuskan pada transformasi sosial yang inklusif dan berkeadilan guna mewujudkan kualitas hidup yang merata bagi seluruh kelompok masyarakat. Adapun beberapa arah kebijakan yang perlu ditetapkan yaitu: 1. Ditetapkan kebijakan konvergensi penanggulangan kemiskinan yang terpadu dan tepat sasaran. Kebijakan ini mengamanatkan bahwa seluruh intervensi kemiskinan, baik perlindungan sosial maupun pemberdayaan, harus terintegrasi dan mengacu pada satu data sasaran tunggal (DTKS) yang akurat. Kebijakan ini juga mencakup pemerataan pembangunan infrastruktur dasar sebagai kebijakan afirmatif untuk mengurangi kesenjangan



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Tahun 2025-2029

Kode Misi	Misi	Kode Tujuan	Tujuan	Kode Sasaran	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
						kemandirian melalui program padat karya (termasuk optimalisasi Dana Desa), program graduasi kemiskinan (pelatihan wirausaha dan bantuan modal UMKM), serta fokus pembangunan infrastruktur dasar di desa-desa tertinggal.	(Rasio Gini), dengan memprioritaskan alokasi anggaran ke wilayah kantong-kantong kemiskinan untuk membuka akses ekonomi dan sosial. 2. Ditetapkan kebijakan akselerasi peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan dua fokus utama. Fokus pertama adalah percepatan penurunan stunting melalui intervensi spesifik, sensitive, dan kolektif. Ini bukan lagi hanya program kesehatan, tetapi kebijakan daerah yang mewajibkan seluruh SKPD (termasuk PUPR untuk sanitasi, Dinas Pangan untuk gizi, dan Disdik untuk pola asuh) berkolaborasi di satu lokus yang sama. Fokus kedua adalah peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar (pendidikan dan kesehatan) yang merata untuk memastikan setiap warga dapat hidup lebih sehat dan bersekolah lebih lama, sebagai pilar utama pencapaian target IPM.
				7.1.2.	Meningkatnya kesetaraan gender, perlindungan perempuan, dan pemenuhan hak anak.	Strategi peningkatan kualitas SDM dapat diimplementasikan melalui intervensi ganda. Untuk stunting, dilakukan intervensi “hulu-hilir” pada 1.000 HPK; intervensi spesifik (Dinkes) mengawal gizi remaja putri, ibu hamil, dan balita (termasuk PMT protein	3. Ditetapkan kebijakan penguatan sistem perlindungan dan pembangunan inklusif bagi kelompok rentan. Ini mencakup mandat untuk pengarusutamaan gender (PUG) dalam seluruh siklus perencanaan dan penganggaran, guna memastikan partisipasi



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Tahun 2025-2029**

Kode Misi	Misi	Kode Tujuan	Tujuan	Kode Sasaran	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
						hewani), sementara intervensi sensitif (SKPD lain) memastikan ketersediaan air bersih, jamban sehat, dan ketahanan pangan keluarga. Untuk IPM, strateginya adalah menekan angka putus sekolah melalui bantuan operasional, beasiswa, dan penguatan pendidikan vokasi (untuk HLS/RLS), serta memperkuat layanan kesehatan promotif-preventif di Puskesmas untuk mendongkrak angka harapan hidup. Strategi pembangunan inklusif difokuskan pada partisipasi dan perlindungan. Untuk gender, strateginya adalah mendorong partisipasi	perempuan dalam pengambilan keputusan dan akses ekonomi (target IPG/IDG). Kebijakan ini juga mengamankan pemenuhan hak-hak anak secara holistik melalui kerangka Kabupaten Layak Anak (KLA) dan penguatan layanan perlindungan bagi perempuan, anak, dan disabilitas dari segala bentuk kekerasan, melalui pengalokasian sumber daya yang memadai bagi UPTD PPA dan layanan rumah aman.



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Tahun 2025-2029**

Kode Misi	Misi	Kode Tujuan	Tujuan	Kode Sasaran	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
						ekonomi dan politik perempuan melalui pelatihan kepemimpinan dan fasilitasi akses permodalan bagi UMKM perempuan. Untuk perlindungan, strateginya adalah memperkuat kelembagaan layanan dengan meningkatkan kapasitas UPTD PPA dan jejaringnya (hingga ke desa) dalam menangani kasus kekerasan. Untuk KLA, strateginya adalah pemenuhan 5 klaster hak anak secara sistematis, seperti percepatan cakupan akta lahir, pembentukan Sekolah Ramah Anak (SRA) di setiap kecamatan, dan penyediaan ruang bermain yang layak. Seluruh strategi	

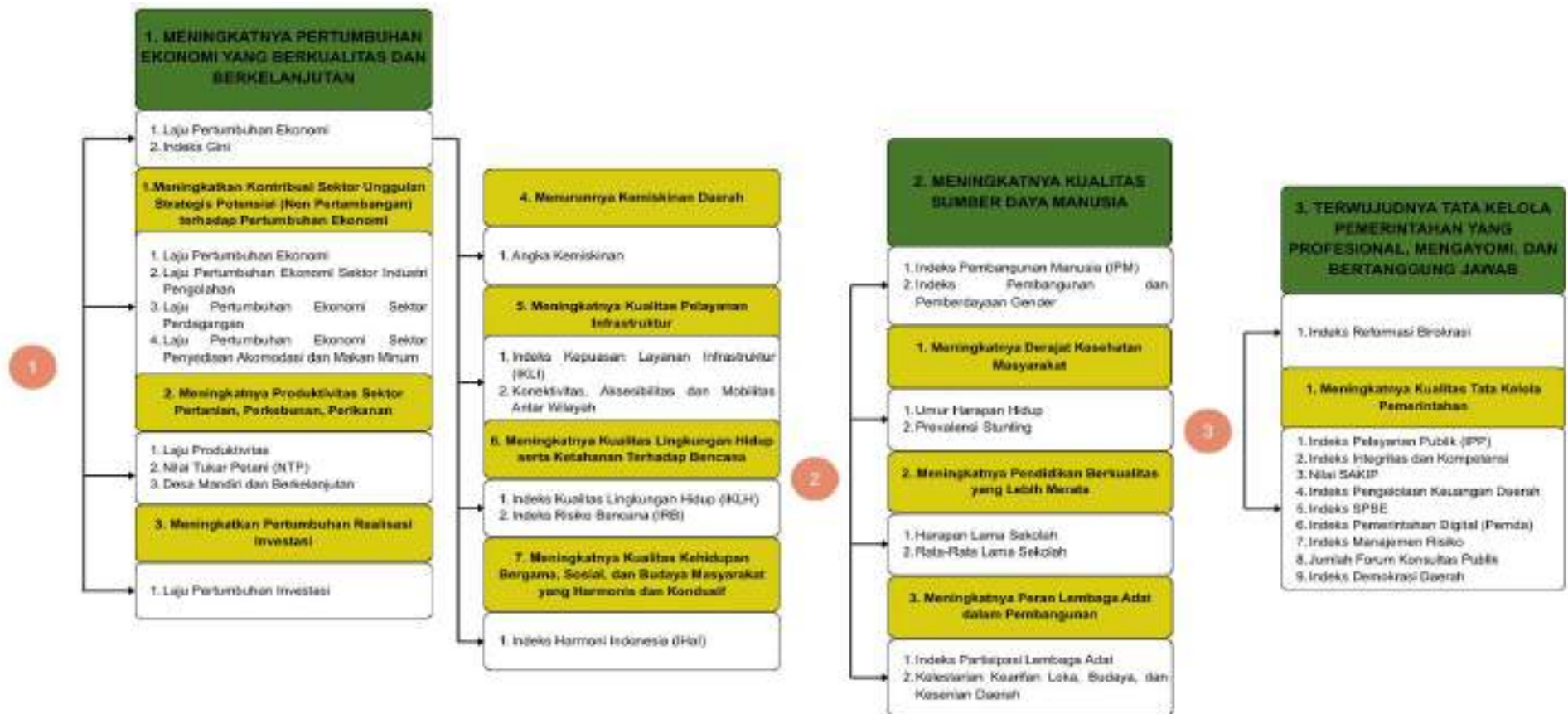


**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Tahun 2025-2029**

Kode Misi	Misi	Kode Tujuan	Tujuan	Kode Sasaran	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
						ini dikunci oleh strategi konvergensi yang dipimpin langsung oleh kepala daerah, didukung anggaran berbasis kinerja, dan monitoring berbasis data yang ketat.	



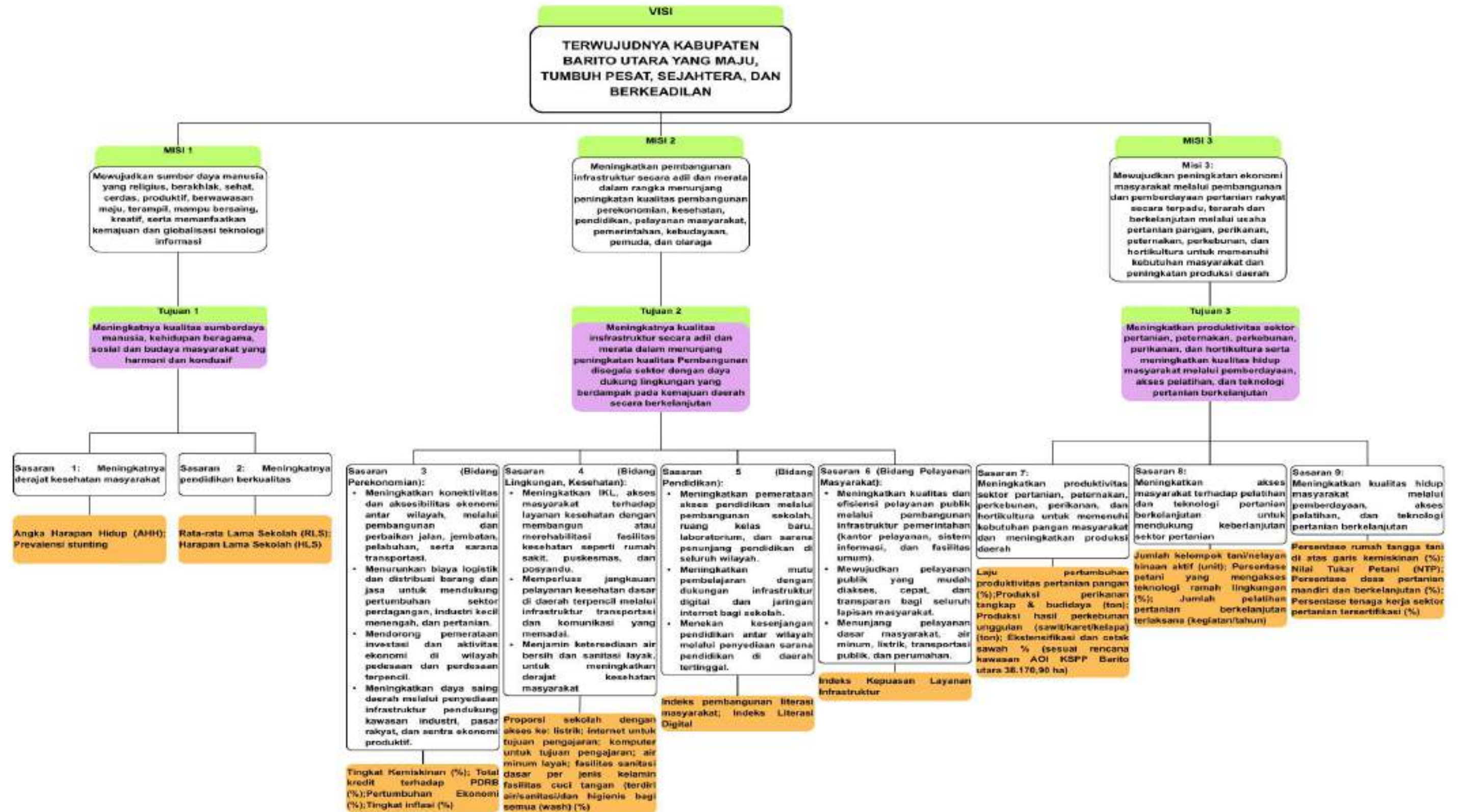
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029

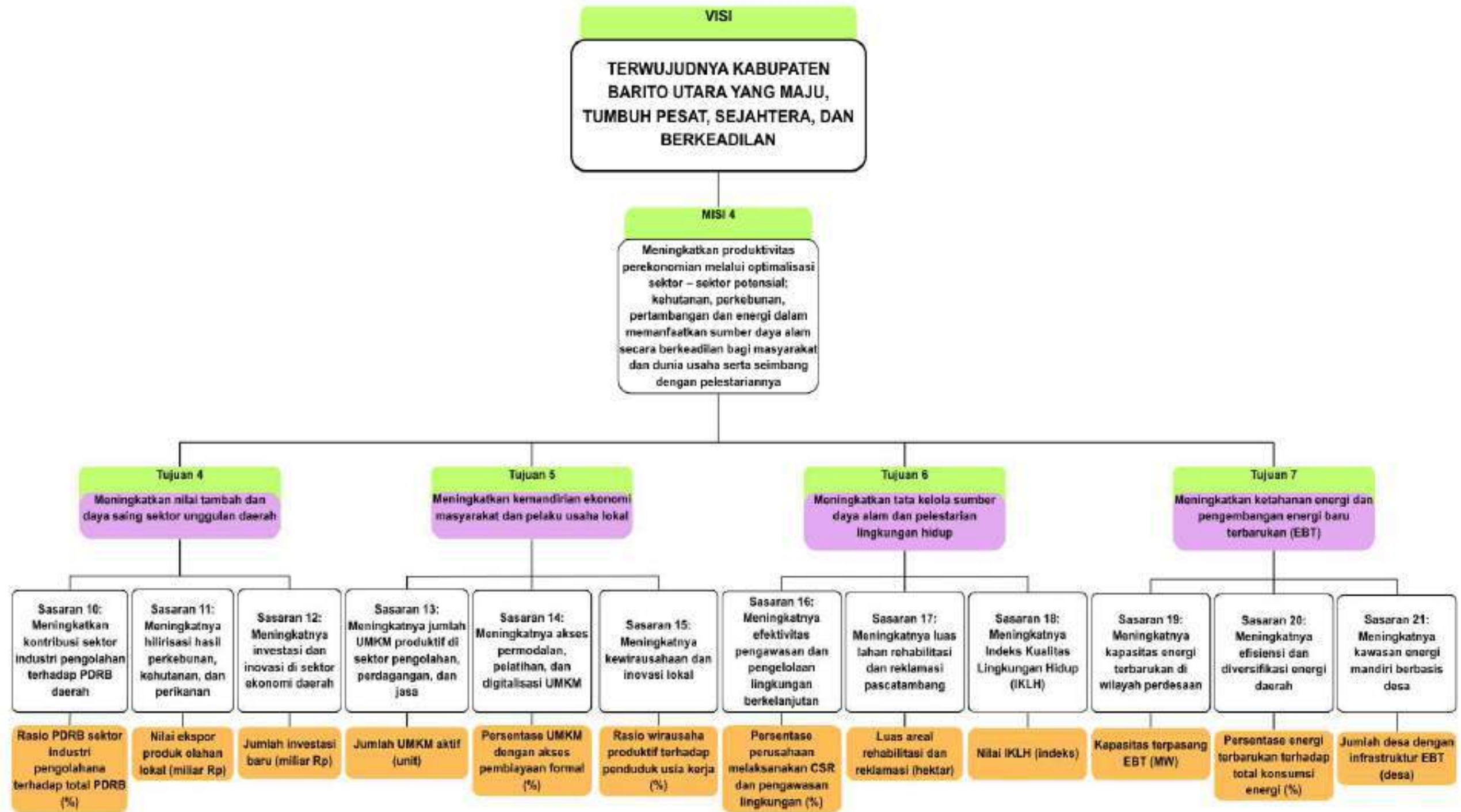


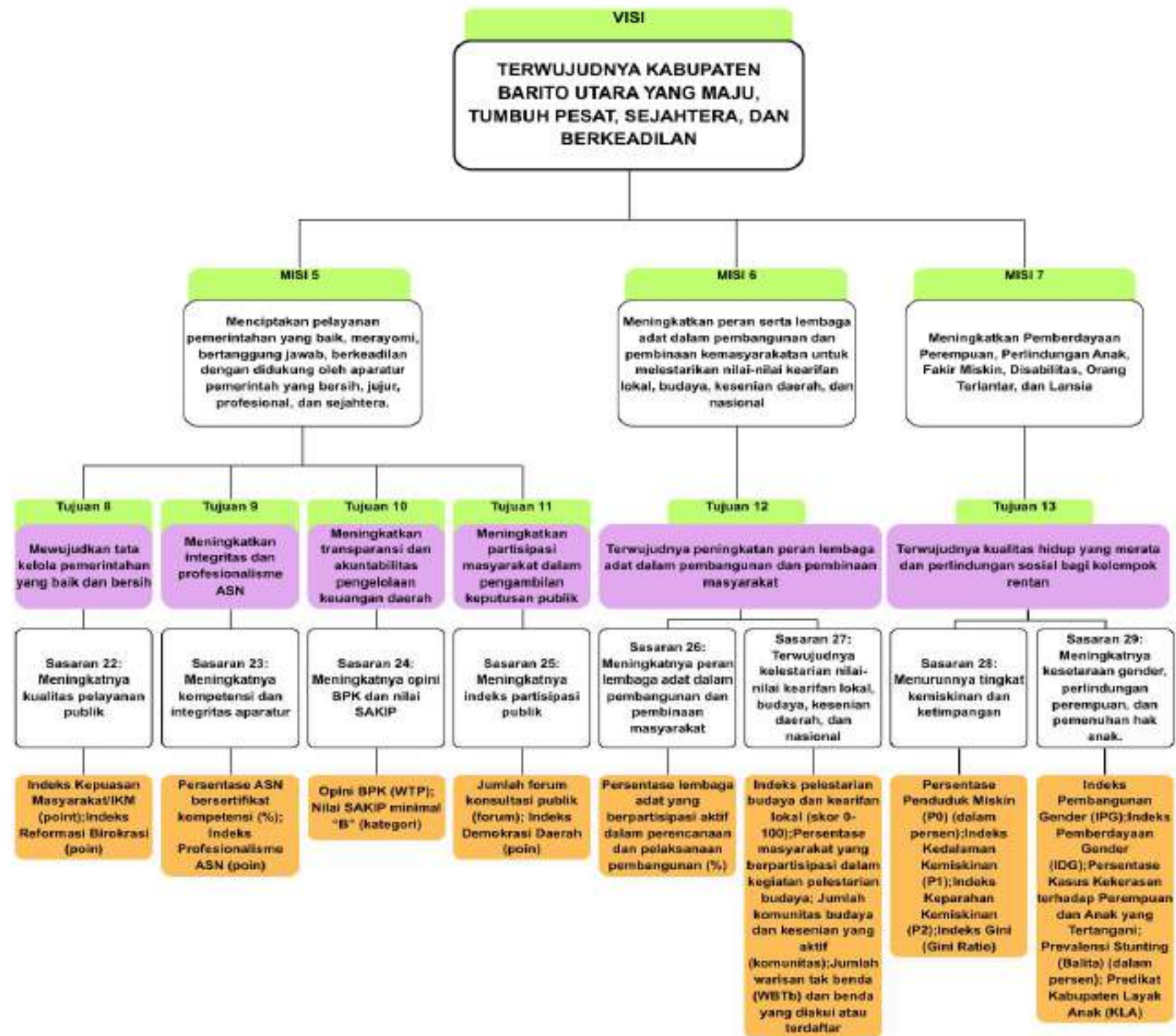
Gambar 3.3. Pohon Kinerja RPJMD Kabupaten Barito Utara 2025-2029.



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Tahun 2025-2029







Gambar 3.4. Cascading Kinerja RPJMD Kabupaten Barito Utara 2025-2029.

3.3.2. Pentahapan Pembangunan

Penahapan pembangunan sebagai bagian dari strategi pembangunan, dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan. Penahapan pembangunan adalah prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran kepala daerah. Penahapan pembangunan dapat disajikan seperti pada Gambar 3.5.



Gambar 3.5. Tahapan Pembangunan RPJMD Kabupaten Barito Utara.

Penahapan pembangunan Kabupaten Barito Utara diuraikan sebagai berikut:

1) Tahun 2026: Peningkatan Pembangunan Infrastruktur secara Adil dan Merata dalam Menunjang Peningkatan Kualitas Pembangunan di Semua Sektor

Tahun 2026 fokus pada upaya meningkatkan pembangunan infrastruktur secara adil dan merata dalam rangka menunjang peningkatan kualitas pembangunan perekonomian, kesehatan, pendidikan, pelayanan masyarakat, pemerintahan, kebudayaan, pemuda, dan olahraga.

2) Tahun 2027: Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Religius, Sehatan, Cerdas, Produktif, Inovatif, dan Berdaya Saing dengan Pelayanan Pemerintah yang Profesional dan Bertanggung Jawab

Pada tahun 2027 pembangunan fokus untuk mewujudkan sumber daya manusia yang religius, berakhlak, sehat, cerdas, produktif, berwawasan maju, terampil, mampu

bersaing, kreatif, serta memanfaatkan kemajuan dan globalisasi teknologi informasi. Serta menciptakan pelayanan pemerintahan yang baik, mengayomi, bertanggung jawab, berkeadilan dengan didukung oleh aparatur pemerintah yang bersih, jujur, profesional, dan sejahtera.

3) Tahun 2028: Peningkatan Produktivitas Perekonomian Melalui Optimalisasi Sektor-Sektor Potensial Sumber Daya Alam secara Berkeadilan dan Berkelanjutan

Dengan landasan SDM yang tangguh dan maju disertai dukungan pembangunan infrastruktur yang adil dan merata maka pada tahun 2028 difokuskan untuk mewujudkan peningkatan ekonomi masyarakat melalui pembangunan dan pemberdayaan pertanian rakyat secara terpadu, terarah dan berkelanjutan melalui usaha pertanian pangan, perikanan, peternakan, perkebunan, dan hortikultura untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan peningkatan produksi daerah. Selain itu juga dilakukan peningkatan produktivitas perekonomian melalui optimalisasi sektor-sektor potensial; kehutanan, perkebunan, pertambangan dan energi dalam memanfaatkan sumber daya alam secara berkeadilan bagi masyarakat dan dunia usaha serta seimbang dengan pelestariannya.

4) Tahun 2029: Peningkatan Peran Serta Lembaga Adat dalam Pembangunan dan Peningkatan Pemberdayaan Perempuan dan Kelompok Masyarakat Rentan

Pada tahun 2029 difokuskan pada peningkatan peran serta lembaga adat dalam pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan untuk melestarikan nilai – nilai kearifan lokal, budaya, kesenian daerah, dan nasional. Selain itu juga dilakukan peningkatan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, fakir miskin, disabilitas, orang terlantar, dan lansia.

5) Tahun 2030: Terwujudnya Kabupaten Barito Utara yang Maju, Tumbuh Pesat, Sejahtera, dan Berkeadilan

Pada tahun 2030 merupakan tahapan terakhir dari seluruh capaian pembangunan sebelumnya, sehingga mampu menempatkan Kabupaten Barito Utara menjadi kabupaten yang **MAJU** yaitu menunjukkan bahwa masyarakat Kabupaten Barito Utara telah menjadi masyarakat yang kreatif, dinamis, berpikir positif, mampu bersaing, serta memanfaatkan kemajuan dan globalisasi teknologi informasi. **TUMBUH PESAT** memiliki makna bahwa pembangunan Kabupaten Barito Utara akan tumbuh pesat dalam pengembangan sumberdaya manusia, pembangunan infrastruktur,

peningkatan produktifitas dan perekonomian masyarakat. **SEJAHTERA** artinya masyarakat di Kabupaten Barito Utara hidup dalam keadaan sehat, damai, dan sejahtera. Masyarakat sejahtera juga memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani, rohani, dan sosial serta kebutuhan dasar seperti pangan, sandang dan papan. Sejahtera berarti juga terbebas dari kemiskinan, kebodohan, dan rasa takut. **BERKEADILAN** menunjukkan bahwa proses pembangunan dilaksanakan secara adil dan merata. Manfaat dan hasil pembangunan bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat. Berkeadilan disini juga mengandung makna bahwa masyarakat bisa mengakses semua infrastruktur dasar, sumberdaya alam dan layanan pemerintah di segala bidang.

3.3.3. Arah Pembangunan Kebijakan Kewilayahan

Penelaahan terhadap isu strategis RTRW Kabupaten Barito Utara Tahun 2019-2039 bertujuan untuk mewujudkan keselarasan rencana pembangunan jangka menengah daerah dengan struktur dan pola pemanfaatan ruang yang telah disusun. Sebelum menelaah struktur dan pola ruang tersebut, maka perlu ditelaah tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang Kabupaten Barito Utara.

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Utara tahun 2019-2039, tujuan penataan ruang wilayah adalah untuk mewujudkan ruang wilayah Kabupaten yang berkeseimbangan lingkungan berbasis pengembangan pertanian, agroindustri, pertambangan dan pariwisata.

Kemudian untuk mencapai tujuan penataan ruang Kabupaten Barito Utara disusun kebijakan penataan ruang yang meliputi:

- a. Pengaturan keseimbangan pemanfaatan ruang budidaya dan non budidaya secara berkelanjutan.
- b. Pengembangan prasarana wilayah dalam rangka mendukung pemerataan pembangunan dan keseimbangan perkembangan wilayah.
- c. Pengembangan sektor pertanian dengan pola intensifikasi dan ekstensifikasi dengan berorientasi pada keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup.
- d. Pemanfaatan potensi gas dan sumber energi Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) untuk pengembangan aglomerasi industri.

- e. Pengembangan industri pengolahan hasil kegiatan agro dengan memanfaatkan komoditas unggulan wilayah (agroindustri).
- f. Pengembangan sektor pertambangan dengan prinsip pengelolaan berkelanjutan.
- g. Pengembangan sektor pariwisata dengan memanfaatkan potensi unggulan wisata daerah.

Tujuan tersebut juga dijabarkan kembali kedalam strategi penataan ruang wilayah Kabupaten antara lain:

- a. Strategi pengaturan keseimbangan pemanfaatan ruang budidaya dan non budidaya secara berkelanjutan, meliputi:
 - 1) mendorong terselenggaranya pembangunan kawasan yang dapat menjamin tetap berlangsungnya konservasi lahan hutan, menjamin tersedianya air tanah dan air permukaan, serta penanggulangan bahaya rawan kebakaran hutan, dengan mempertimbangkan daya dukung lingkungan yang berkelanjutan dalam pengelolaan kawasan;
 - 2) meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan pengendalian kerusakan dan pencemaran lingkungan;
 - 3) memastikan penetapan tata batas kawasan lindung dan kawasan budidaya untuk memberikan kepastian rencana pemanfaatan ruang dan investasi;
 - 4) mempertahankan persentase kawasan hutan dan non kawasan hutan berdasarkan fungsinya;
 - 5) memberikan izin usaha pengelolaan pertambangan secara terkendali dan terkoordinasi;
 - 6) melakukan penertiban secara berkala dan kontinyu atas kegiatan usaha eksploitasi pertambangan.
- b. Strategi pengembangan prasarana wilayah dalam rangka mendukung pemerataan pembangunan dan keseimbangan perkembangan wilayah, meliputi:
 - 1) membangun prasarana dan sarana wilayah untuk mendukung keseimbangan dan konsistensi arahan pemanfaatan ruang wilayah;
 - 2) mendorong terselenggaranya pengembangan kawasan yang berorientasi pada keterpaduan antara perkotaan dan perdesaan sebagai satu kesatuan wilayah;

- 3) mensyaratkan kepada pengelola pertambangan/perkebunan untuk berkontribusi langsung dalam upaya pengembangan prasarana dan sarana dasar wilayah/kawasan.
- c. Strategi pengembangan sektor pertanian dengan pola intensifikasi dan ekstentifikasi dengan berorientasi pada keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup, meliputi:
 - 1) mendorong pengembangan pertanian, perkebunan dan perikanan terintegrasi berbasis kawasan demi terciptanya kawasan ekonomi produktif yang mampu merangsang pertumbuhan sektor lainnya dan meningkatkan perkembangan kawasan secara lebih luas;
 - 2) meningkatkan teknologi pertanian ramah lingkungan, sehingga terjadi peningkatan produksi dengan kualitas yang lebih baik dan bernilai ekonomi tinggi dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan;
 - 3) memperluas lahan pertanian dalam rangka mendukung pola ekstentifikasi pertanian;
 - 4) membangun dan meningkatkan prasarana pertanian;
 - 5) penguatan pemasaran hasil pertanian melalui peningkatan sumberdaya manusia dan kelembagaannya;
 - 6) membentuk dan mengembangkan kemitraan antara perusahaan perkebunan besar dengan perkebunan rakyat untuk menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- d. Strategi pengembangan industri pemanfaatan potensi gas dan sumber energi Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) untuk pengembangan aglomerasi industri, meliputi:
 - 1) peningkatan dan pengembangan infrastruktur jaringan transportasi darat, sungai, udara dan jaringan prasarana lainnya yang terintegrasi dan pada kawasan aglomerasi industri;
 - 2) mendorong masuknya penanaman modal untuk melakukan investasi dan kegiatan industri melalui upaya-upaya promosi dan kemudahan pelayanan perizinan;
 - 3) mendorong investasi yang berorientasi pada penyediaan lapangan kerja dan pengembangan potensi lokal bagi masyarakat
 - 4) mendorong kerjasama penyediaan tenaga listrik untuk kebutuhan kegiatan industri;

- 5) mendorong terciptanya jaringan pemasaran hasil industri melalui upaya peningkatan kegiatan ekonomi masyarakat dan kerjasama antardaerah disektor ekonomi termasuk kerjasama perdagangan dan pemasaran;
- e. Strategi pengembangan industri pengolahan hasil kegiatan agro dengan memanfaatkan komoditas unggulan wilayah (agroindustri), meliputi:
 - 1) mengembangkan industri pengolahan hasil kegiatan agro (pertanian, perkebunan dan kehutanan) yang ramah lingkungan sesuai komoditas unggulan kawasan dan kebutuhan pasar (agroindustri dan agribisnis).
 - 2) meningkatkan kegiatan agroindustri melalui peningkatan prasarana dan sarana pendukung, serta pemasaran yang lebih agresif dan efektif.
 - 3) meningkatkan produktivitas hasil perkebunan melalui intensifikasi dan teknologi perkebunan yang ramah lingkungan.
 - 4) memberikan kemudahan bagi investor untuk berinvestasi.
 - 5) mendorong investasi yang berorientasi pada penyediaan lapangan kerja bagi masyarakat.
- f. Strategi pengembangan sektor pertambangan dengan prinsip pengelolaan berkelanjutan, meliputi:
 - 1) memetakan potensi pertambangan secara lebih detail dan jelas dalam rangka memberikan informasi secara jelas tentang potensi pertambangan kepada peminat usaha pertambangan;
 - 2) memberikan informasi secara jelas dan tegas mengenai aturan dan prosedur pengelolaan pertambangan terkait pelestarian lingkungan hidup;
 - 3) memberikan kemudahan bagi investor untuk berinvestasi dengan tetap mempertimbangkan aspek-aspek pengelolaan lingkungan hidup;
 - 4) merumuskan prosedur perijinan bagi kegiatan usaha pertambangan terkait pemanfaatan, pengendalian dan pengawasannya.
- g. Strategi pengembangan sektor pariwisata dengan memanfaatkan potensi unggulan wisata daerah, meliputi:
 - 1) melakukan inventarisasi dan penggalan potensi wisata daerah;
 - 2) meningkatkan kegiatan pariwisata melalui peningkatan prasarana dan sarana pendukungnya;
 - 3) menyelenggarakan even-even wisata tahunan dan terjadwal, sehingga mampu menarik wisatawan;

- 4) meningkatkan pengelolaan objek wisata yang lebih professional serta pemasaran yang lebih agresif dan efektif.

Rencana kawasan strategis kabupaten berdasarkan rencana tata ruang wilayah terdiri dari:

1. Kawasan strategis nasional

Pengembangan kawasan strategis nasional adalah yang ditetapkan dalam rencana tata ruang wilayah nasional dan rencana tata ruang pulau meliputi:

- a. kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, terdiri atas:
 - Kawasan pengembangan sektor pertanian, perkebunan, pertambangan, kehutanan, minyak dan gas bumi tersebar di 9 (sembilan) kecamatan di wilayah kabupaten.
 - Kawasan pusat kegiatan wilayah kota Muara Teweh dan sekitarnya untuk revitalisasi dan percepatan pengembangan kota-kota pusat pertumbuhan nasional.
 - Daerah Aliran Sungai (DAS) Barito sebagai pengembangan atau peningkatan ekonomi kawasan strategis nasional di kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS).
 - Infrastruktur jalur kereta api dari Puruk Cahu-Bengkuang melalui kabupaten Barito Utara sebagai peningkatan ekonomi kawasan strategis nasional.
- b. kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumberdaya alam dan/atau teknologi tinggi, yaitu Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) blok Bangkanai di Kecamatan Lahei sebagai pengembangan pembangkitan tenaga listrik nasional.
- c. kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, terdiri atas:
 - Wilayah Sungai Barito sebagai konservasi sumberdaya air, pendayagunaan sumberdaya air, dan pengendalian daya rusak air;
 - kawasan suaka alam Pararawen di Kecamatan Teweh Tengah sebagai pengembangan kawasan lindung nasional;

- kawasan jantung Kalimantan atau *Heart of Borneo* (HoB) sebagai pengembangan atau peningkatan kualitas kawasan strategis nasional.

2. Kawasan strategis provinsi

Kawasan strategis provinsi sebagaimana adalah yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah meliputi:

- a. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, terdiri atas:
 - Kawasan *food estate* di Provinsi Kalimantan Tengah terdapat di Kecamatan Gunung Timang, Kecamatan Teweh Selatan, Kecamatan Teweh Baru, Kecamatan Montallat, Kecamatan Teweh Timur, dan Kecamatan Gunung Purei.
 - Kawasan pertanian berkelanjutan yang dipaduserasikan dengan pengembangan irigasi teknis di Kecamatan Teweh Selatan, Kecamatan Gunung Timang, dan Kecamatan Montallat.
 - Kawasan pengembangan peternakan ruminansia dan non ruminansia tersebar di sembilan kecamatan di wilayah kabupaten.
 - Kawasan perkebunan kelapa sawit, kelapa, karet, lada dan kakao tersebar di sembilan kecamatan di wilayah kabupaten.
 - Kawasan strategis ekonomi sektor unggulan *minapolitan* tersebar di sembilan kecamatan di wilayah kabupaten.
- b. Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya, yaitu kawasan strategis sekitar kawasan adat masyarakat terutama bagi umat Hindu Kaharingan di Kecamatan Teweh Tengah, Kecamatan Lahei Barat, Kecamatan Gunung Purei, dan Kecamatan Gunung Timang.
- c. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumberdaya alam dan/atau teknologi tinggi, yaitu kawasan berpotensi pengembangan sumberdaya energi di Kecamatan Lahei.
- d. Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, terdiri atas :
 - Kawasan strategis DAS Barito di Kecamatan Lahei Barat, Kecamatan Lahei, Kecamatan Teweh Tengah, Kecamatan Teweh Baru, Kecamatan Teweh Selatan, dan Kecamatan Montallat.

- Kawasan strategis *Heart of Borneo* (HoB) di Kecamatan Lahei.
 - Cagar alam Pararawen I dan II di Kecamatan Teweh Tengah sebagai kawasan strategis perlindungan keanekaragaman hayati.
3. Kawasan strategis kabupaten
- Kawasan strategis kabupaten, meliputi:
- a. kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi terdiri atas:
 - Kawasan *aglomerasi* industri di sekitar kawasan energi Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) Blok Bangkanai di Kecamatan Lahei.
 - Kawasan berbasis pertanian Trinsing dan Trahean di Kecamatan Teweh Selatan sebagai kawasan pengembangan agrowisata dan *agropolitan*.
 - Kawasan pariwisata tersebar di sembilan kecamatan di wilayah kabupaten.
 - b. kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya yaitu kawasan kearifan lokal budaya dan masyarakat adat hutan lindung Gunung Lumut di Kecamatan Gunung Purei.
 - c. kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumberdaya alam dan/atau teknologi tinggi, yaitu kawasan potensi minyak dan gas bumi di Kecamatan Lahei, Kecamatan Teweh Baru, dan Kecamatan Teweh Timur.
 - d. kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup yaitu kawasan keanekaragaman hayati Danau Butong di Kecamatan Teweh Selatan.

Adapun untuk Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten Barito Utara terdiri dari:

- a. Sistem perkotaan dan pusat-pusat kegiatan lainnya
- b. Sistem jaringan prasarana utama
- c. Sistem jaringan prasarana lainnya.

Penelaahan disusun sesuai pedoman Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dan Permen ATR/BPN Nomor 1 Tahun 2018 Kewilayahan RTRW Kabupaten Barito Utara Tahun 2019–2039 menetapkan arah penataan ruang wilayah sebagai dasar

pengembangan kegiatan sosial, ekonomi, dan lingkungan secara berkelanjutan. RTRW tersebut membagi wilayah kabupaten menjadi beberapa fungsi ruang utama:

- a. kawasan lindung dan konservasi sumber daya alam,
- b. kawasan budidaya pertanian, kehutanan, dan perkebunan,
- c. kawasan pertambangan dan industri,
- d. kawasan permukiman perkotaan dan perdesaan, serta
- e. kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Dalam konteks RPJMD 2025–2029, penelaahan kewilayahan ini bertujuan untuk:

- a. menjamin kesesuaian arah pembangunan daerah dengan rencana tata ruang,
- b. mengidentifikasi isu strategis pembangunan wilayah, dan
- c. merumuskan kebijakan pembangunan yang adil, merata, serta berkelanjutan secara spasial.

Berdasarkan penelaahan RTRW dan kondisi faktual, arah pembangunan kewilayahan Kabupaten Barito Utara dalam pembangunan periode 2025–2029 adalah sebagai berikut:

- a. Penguatan struktur ruang wilayah dengan cara:
 - mengembangkan sistem pusat pertumbuhan wilayah (Muara Teweh–Lahei–Gunung Timang) sebagai koridor utama ekonomi dan pelayanan publik;
 - mendorong pemerataan pembangunan ke wilayah utara (Kecamatan Teweh Timur, Kecamatan Gunung Purei, Kecamatan Lahei Barat) melalui pembangunan infrastruktur konektivitas dan layanan dasar;
 - menetapkan kawasan strategis ekonomi dan industri kecil di sekitar jalur transportasi darat dan sungai;
 - mengembangkan jaringan jalan kolektor penghubung antar pusat kegiatan wilayah (PKW dan PPK).
- b. Pengembangan pola ruang wilayah dengan cara:
 - melindungi dan merehabilitasi kawasan lindung DAS Barito dan Teweh melalui kegiatan reboisasi dan pengendalian alih fungsi lahan;
 - menetapkan zona konservasi air tanah dan sempadan sungai sebagai batas pengembangan permukiman;
 - mengembangkan kawasan budidaya pertanian berkelanjutan berbasis lahan kering dan rawa di wilayah selatan;

- memperkuat jaringan irigasi, embung, dan waduk kecil di kawasan pertanian produktif.
- c. Pengembangan infrastruktur wilayah dengan cara:
- peningkatan kualitas jalan kabupaten dan pembangunan jembatan penghubung antarwilayah strategis;
 - pengembangan pelabuhan sungai di Muara Teweh dan Lahei sebagai simpul transportasi logistik dan ekonomi;
 - pembangunan SPAM regional, TPA *sanitary landfill*, dan IPAL komunal di pusat-pusat permukiman. Pembangunan jaringan telekomunikasi dan energi di daerah pedalaman untuk mendukung pemerataan digitalisasi.
- d. Pengembangan Kawasan Strategis (KSD).

Berdasarkan RTRW, terdapat 4 kawasan strategis yang diarahkan menjadi fokus pembangunan dalam RPJMD 2025–2029 seperti tersaji pada Tabel 3.5.

Tabel 3.5. Kawasan Strategis Fokus RPJMD 2025-2029 Kabupaten Barito Utara

Kawasan Strategis Daerah (KSD)	Fungsi Utama Pengembangan	Arah Pembangunan 2025–2029
KSD Muara Teweh – Teweh Tengah	Pusat administrasi, perdagangan, dan jasa	Penguatan sarana perkotaan, drainase, dan perumahan layak huni
KSD Lahei – Lahei Barat	Sentra pertanian dan pelabuhan sungai	Pengembangan pelabuhan barang dan dermaga rakyat
KSD Gunung Timang – Teweh Timur	Kawasan industri kecil dan hasil hutan	Pembangunan kawasan industri hijau dan UMKM berbasis lokal
KSD Gunung Purei – Montallat	Kawasan wisata alam dan konservasi	Penguatan infrastruktur pariwisata dan konservasi alam

Tabel 3.6. Arah Kebijakan RPJMD 2025-2029 Kabupaten Barito Utara

Bidang Pengembangan	Arah Kebijakan RPJMD 2025–2029
Infrastruktur Wilayah	Pembangunan jaringan jalan, jembatan, pelabuhan sungai, dan sarana transportasi antarwilayah untuk memperkuat konektivitas ekonomi.
Permukiman dan Tata Ruang	Pengendalian pertumbuhan permukiman agar sesuai dengan daya dukung lingkungan dan rencana pola ruang RTRW.
Ekonomi dan Investasi Wilayah	Pengembangan kawasan industri kecil dan sentra ekonomi desa berbasis sumber daya lokal di setiap kecamatan.
Pelayanan Dasar	Pemerataan akses terhadap air bersih, pendidikan, kesehatan, dan energi di seluruh wilayah, terutama pedalaman.

Bidang Pengembangan	Arah Kebijakan RPJMD 2025–2029
Lingkungan dan Ketahanan Bencana	Rehabilitasi DAS, pengendalian banjir, serta penerapan prinsip <i>green infrastructure</i> di kawasan perkotaan dan industri.
Kawasan Strategis Ekonomi	Peningkatan infrastruktur logistik dan energi pada kawasan industri kecil, wisata alam, dan pelabuhan sungai.

Penjabaran RTRW Kabupaten Barito Utara (2019–2039) menjadi landasan spasial bagi pencapaian misi RPJMD 2025–2029. Adapun hubungan antara RTRW Kabupaten Barito Utara dengan Misi RPJMD Kabupaten Barito Utara Tahun 2025-2029 seperti tersaji pada Tabel 3.7.

Tabel 3.7. Hubungan RTRW Kabupaten Barito Utara dengan Misi RPJMD Kabupaten Barito Utara Tahun 2025-2029

Arah RTRW 2019–2039	Integrasi dalam Misi RPJMD 2025–2029	Keluaran (Output) Pembangunan
Penguatan pusat kegiatan wilayah (PKW dan PPK)	Pemerataan infrastruktur ekonomi antar kecamatan	Jalan strategis, pelabuhan sungai, kawasan industri kecil
Perlindungan kawasan lindung dan DAS	Infrastruktur berkelanjutan dengan daya dukung lingkungan	Program drainase, TPA <i>sanitary landfill</i> , penghijauan DAS
Pengembangan kawasan industri kecil dan wisata alam	Peningkatan daya saing ekonomi lokal	Kawasan pariwisata dan industri UMKM terpadu
Peningkatan sistem transportasi darat dan sungai	Konektivitas wilayah dan efisiensi logistik	Jembatan penghubung, pelabuhan logistik, dermaga rakyat
Penguatan infrastruktur pelayanan publik	Peningkatan pelayanan dasar dan sosial	RSUD, sekolah terpadu, fasilitas olahraga dan budaya

Arah pembangunan kewilayahan Kabupaten Barito Utara sebagai berikut:

- Pembangunan wilayah diarahkan untuk mengurangi kesenjangan antarkecamatan melalui peningkatan konektivitas, pelayanan dasar, dan pemerataan investasi.
- Integrasi RTRW dan RPJMD menjadi dasar penentuan lokasi proyek strategis daerah (jalan penghubung, SPAM, TPA, IPAL, pelabuhan sungai).
- Fokus pengembangan wilayah 2025–2029 diarahkan pada tiga koridor utama:
 - Koridor Selatan (Muara Teweh – Gunung Timang) → pusat administrasi dan industri kecil.
 - Koridor Tengah (Lahei – Teweh Tengah) → kawasan pertanian dan pelabuhan sungai.

- Koridor Utara (Gunung Purei – Montallat) → kawasan konservasi dan wisata alam.
- d. Seluruh pengembangan wilayah dilakukan dengan prinsip adil, merata, dan berkelanjutan, selaras dengan misi RPJMD: *“Meningkatkan pembangunan infrastruktur secara adil dan merata dalam rangka menunjang peningkatan kualitas pembangunan perekonomian, kesehatan, pendidikan, dan pelayanan masyarakat di Kabupaten Barito Utara.”*

3.4. Program Prioritas Daerah

Program unggulan pemerintah daerah dalam jangka waktu lima tahun kedepan disarikan dari janji-janji politik kepala dan wakil kepala daerah saat melakukan kampanye pemilihan umum kepala daerah tahun 2025. Dalam hal ini, program unggulan yang ditawarkan, sebagaimana tercantum dalam dokumen visi, misi, dan program yang diberikan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Barito Utara.

Program unggulan yang dijadikan sebagai program prioritas daerah tersebut meliputi (1) pendidikan gratis 16 tahun; (2) beasiswa prestadi kedokteran, akademi TNI & Polri, hukum, sosial, teknil, dan lain sebagainya; (3) peningkatan pembangunan kesehatan masyarakat (BPJS gratis, akses kesehatan dan layanan kesehatan prima); (4) mendirikan balai latihan yang layak guna peningkatan keterampilan tenaga kerja serta menjamin kepastian kerja; (5) pemberian satu paket alat berat secara bertahap guna peningkatan infrastruktur desa, sektor peternakan, dan perikanan, serta pembukaan lahan pertanian bagi kelompok tani; (6) pemberian santunan duka dan bantuan biaya persalinan; (7) pemberian bantuan tetap untuk penyandang disabilitas (cacat) dan orang berkebutuhan khusus, serta lansia; (8) pemberian insentif kepada pengurus adat, damang dan mantir pengurus tempat ibadah, tenaga pendidikan agama serta peningkatan insentif untuk aparat desa (perangkat desa, BPD, sampai RT); (9) pemberian ambulance desa dan pembangunan sarana air bersih di kelurahan/desa; (10) peningkatan kesejahteraan PNS dan PPPK serta tenaga kontrak pemerintah daerah dan bantuan biaya tugas belajar untuk jenjang S2 dan S3; (11) penguatan peran lembaga adat dalam pembangunan dan pembinaan masyarakat.

a. Pendidikan Gratis 16 Tahun

Program ini menjadi jawaban atas permasalahan pemerataan akses pendidikan di daerah. Melalui penyediaan pendidikan gratis selama 16 tahun, pemerintah daerah

berkomitmen mencetak generasi cerdas dan berdaya saing sesuai misi peningkatan kualitas sumber daya manusia. Program ini juga sejalan dengan potensi daerah yang memiliki bonus demografi usia produktif.

b. Beasiswa Prestasi Kedokteran, Akademi TNI & Polri, Hukum, Sosial, Teknik dan Lain Sebagainya

Program ini diarahkan untuk mendorong anak daerah berprestasi agar dapat menempuh pendidikan tinggi di bidang strategis. Tujuannya adalah menciptakan kader profesional yang kelak berkontribusi bagi pembangunan daerah, sejalan dengan isu peningkatan kapasitas SDM unggul dan berintegritas.

c. Peningkatan Pembangunan Kesehatan Masyarakat (BPJS Gratis, Akses Kesehatan dan Layanan Kesehatan Prima)

Program BPJS adalah langkah strategis untuk memperkuat capaian *Universal Health Coverage* (UHC) Kabupaten Barito Utara yang sudah tinggi (mencapai 98%). Meskipun kepesertaan JKN telah merata, tantangan yang perlu dijawab adalah optimalisasi pemanfaatan dan pemerataan akses layanan kesehatan, terutama bagi masyarakat di pelosok desa. Oleh karena itu, penekanan pada akses kesehatan dan layanan prima menjadi kunci agar tingginya kepemilikan jaminan kesehatan benar-benar diterjemahkan menjadi peningkatan derajat kesehatan masyarakat, sejalan dengan mandat Rancangan Akhir RPJPD 2025-2045 untuk mewujudkan sumber daya manusia yang unggul.

d. Mendirikan Balai Latihan yang Layak Guna Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja serta Menjamin Kepastian Kerja

Program ini hadir untuk menjawab permasalahan pengangguran dan rendahnya keterampilan tenaga kerja lokal. Pendirian balai latihan kerja akan meningkatkan kemampuan teknis dan menjamin kepastian kerja sesuai kebutuhan sektor unggulan daerah, seperti pertanian, jasa, dan industri kecil menengah.

e. Pemberian Satu Paket Alat Berat Secara Bertahap Guna Peningkatan Infrastruktur Desa, Sektor Peternakan, dan Perikaann, serta Pembukaan Lahan Pertanian bagi Kelompok Tani

Program pemberian satu paket alat berat secara bertahap yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Utara memiliki keselarasan yang kuat dengan Misi 3 dalam dokumen RPJMD Kabupaten Barito Utara, yang bertujuan untuk mewujudkan peningkatan ekonomi masyarakat melalui pembangunan dan pemberdayaan sektor pertanian rakyat secara terpadu, terarah, dan berkelanjutan. Misi ini menekankan pada penguatan sektor

pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan, dan hortikultura untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat dan meningkatkan produksi daerah.

Salah satu upaya konkret yang dilakukan melalui program ini adalah peningkatan produktivitas sektor-sektor tersebut, khususnya dalam memperluas akses lahan pertanian, serta mendukung pengelolaan sektor peternakan dan perikanan secara lebih efisien. Program ini berfokus pada Sasaran 1 dalam RPJMD, yang berorientasi pada peningkatan produktivitas pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, dan hortikultura untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat dan meningkatkan produksi daerah. Pemberian alat berat ini, yang disalurkan secara bertahap, diharapkan mampu mendorong peningkatan kapasitas produksi, serta penerapan teknologi pertanian yang ramah lingkungan sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Dalam konteks ini, program pemberian alat berat secara bertahap juga sejalan dengan Strategi 1 dalam RPJMD Kabupaten Barito Utara, yaitu penerapan teknologi pertanian yang ramah lingkungan serta peningkatan kapasitas petani melalui pelatihan berkelanjutan. Penggunaan alat berat yang didistribusikan kepada kelompok tani diharapkan dapat meningkatkan produktivitas sektor pertanian, peternakan, dan perikanan, serta memperluas jangkauan produksi di wilayah pedesaan. Selain itu, program ini juga berupaya untuk memberikan akses kepada petani dan masyarakat dalam menggunakan teknologi pertanian yang modern dan efisien, guna mengoptimalkan hasil pertanian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Arah kebijakan yang mendasari program ini mencakup penyediaan pelatihan kepada petani mengenai teknik pertanian terbaru, serta pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, yang sesuai dengan Sasaran 2 dan 3 dalam RPJMD. Melalui pelatihan dan penyuluhan yang berkelanjutan, program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, serta mengintegrasikan sektor pertanian dengan upaya peningkatan sanitasi, energi terbarukan, dan akses terhadap pangan bergizi. Pemberian alat berat sebagai bagian dari strategi ini akan memperkuat keberlanjutan sektor pertanian dan perikanan, serta membuka peluang pasar bagi hasil pertanian yang lebih berkelanjutan.

Program pemberian alat berat ini memberikan kontribusi signifikan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran dalam RPJMD Kabupaten Barito Utara, dengan memfokuskan pada pemberdayaan sektor pertanian, peternakan, perikanan, dan perkebunan. Selain itu, program ini juga berperan dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui akses terhadap

pelatihan, teknologi pertanian, serta infrastruktur yang mendukung pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Pemberian alat berat secara bertahap akan memperkuat produktivitas sektor-sektor terkait, yang pada gilirannya berkontribusi pada peningkatan ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat desa. Program ini sejalan dengan visi daerah untuk mewujudkan Babupaten Barito Utara yang maju, tumbuh pesat, sejahtera, dan berkeadilan.

f. Pemberian Santunan Duka dan Bantuan Biaya Persalinan

Program ini merupakan inisiatif untuk menyediakan jaring pengaman sosial adaptif yang berorientasi pada siklus hidup. Santunan duka membantu meringankan beban ekonomi keluarga saat terjadi musibah, sementara bantuan biaya persalinan (melalui inisiasi program 100 hari kerja Bupati) secara langsung mendukung peningkatan kesehatan ibu dan anak, serta menekan risiko kesulitan ekonomi dalam mengakses layanan kesehatan ibu melahirkan. Program ini berfokus pada perlindungan finansial dalam kondisi krisis demografis dan keluarga.

g. Pemberian Bantuan Tetap untuk Penyandang Disabilitas (Cacat) dan Orang Berkebutuhan Khusus, serta Lansia

Program ini menegaskan prinsip pembangunan yang berkeadilan, inklusif, dan bermartabat. Pemberian bantuan tetap secara eksplisit menyasar kelompok masyarakat paling rentan yang seringkali menghadapi risiko ganda, baik dari segi ekonomi maupun kebutuhan kesehatan khusus. Program ini sekaligus bersinergi dengan upaya pemerintah daerah untuk memastikan kelompok berkebutuhan khusus dan lansia mendapatkan kemudahan akses dan dukungan layanan JKN yang berkelanjutan.

h. Pemberian Insentif Kepada Pengurus Adat, Damang dan Mantir Pengurus Tempat Ibadah, Tenaga Pendidikan Agama serta Peningkatan Insentif untuk Aparat Desa (Perangkat Desa, BPD, sampai RT)

Peran sosial dan kultural masyarakat adat serta aparat desa sangat penting dalam menjaga ketertiban, kerukunan, dan pelayanan publik. Sebagai salah satu bentuk penghargaan kepada mereka, program ini dihadirkan dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan dan motivasi pengabdian mereka. Adapun hadirnya program ini dilandasi oleh pentingnya peran sosial dan kultural dalam menjaga harmoni masyarakat. Insentif diberikan untuk meningkatkan motivasi dan kesejahteraan para pengabdian masyarakat serta memperkuat tata kelola pemerintahan desa.

i. Pemberian Ambulance Desa dan Pembangunan Sarana Air Bersih di Kelurahan/Desa

Program ini fokus pada pemerataan pelayanan dasar di desa. Penyediaan ambulance desa meningkatkan akses layanan kesehatan darurat, sementara pembangunan sarana air bersih menjawab isu ketersediaan air layak konsumsi bagi masyarakat pedesaan.

j. Peningkatan Kesejahteraan PNS dan PPPK serta Tenaga Kontrak Pemerintah Daerah dan Bantuan Biaya Tugas Belajar Untuk Jenjang S2 dan S3

Program ini diarahkan untuk meningkatkan motivasi dan kinerja aparatur daerah melalui peningkatan kesejahteraan dan kesempatan pengembangan diri. Hal ini sejalan dengan misi reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang profesional dan berintegritas.

k. Penguatan Peran Lembaga Adat dalam Pembangunan dan Pembinaan Masyarakat

Nilai-nilai kearifan lokal mulai tergerus oleh arus modernisasi, padahal lembaga adat memiliki peran strategis dalam menjaga keharmonisan sosial dan budaya. Hadirnya program unggulan dalam upaya penguatan peran lembaga adat dalam pembangunan dan pembinaan masyarakat menegaskan pentingnya pelestarian nilai-nilai kearifan lokal dalam pembangunan daerah. Melalui peran lembaga adat, masyarakat didorong menjadi subjek pembangunan yang berbudaya, harmonis, dan berdaya, sesuai potensi sosial budaya lokal.



**BAB IV PROGRAM PERANGKAT
DAERAH DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
DAERAH**



BAB IV

PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

4.1. Program Perangkat Daerah

Program Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2025–2029 disusun untuk menerjemahkan visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah ke dalam bentuk kegiatan yang operasional dan terukur. Program ini diarahkan untuk memperkuat sinergi lintas sektor, mengoptimalkan efektivitas belanja daerah, serta memperkuat kontribusi perangkat daerah terhadap capaian indikator makro pembangunan.

Fokus penyusunan program dilakukan dengan memperhatikan:

- 1) konsistensi dengan RPJPD Kabupaten Barito Utara 2025-2045;
- 2) arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah dan RPJMN 2025-2029;
- 3) isu strategis daerah yang telah diidentifikasi dalam Bab II;
- 4) ketersediaan ruang fiskal daerah berdasarkan proyeksi keuangan dan KUA-PPAS.

Tabel 4.1. Program Perangkat Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030			
		2024	2025	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														
1.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														
Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	Persentase kegiatan pendukung urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan	100,00	100,00	100,00	353.023.214.385	100,00	370.674.375.104	100,00	388.325.535.823	100,00	405.976.696.542	100,00	423.627.857.262,00	1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIIKAN
1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN														
Meningkatnya akses dan layanan Pendidikan Dasar	APK SD/ sederajat (%)	100,00	100,00	100,00	23.728.543.472	100,00	24.914.970.646	100,00	26.101.397.819	100,00	27.287.824.992	100,00	28.474.252.166,00	1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN
	APM SD/ sederajat (%)	80,00	85,00	90,00	8.497.018.528	91,00	8.921.869.454	92,00	9.346.720.380	93,00	9.771.571.307	94,00	10.196.422.233,00	1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN
	APK SMP/ sederajat (%)	90,00	90,00	100,00	23.270.969.110	100,00	24.434.517.566	100,00	25.598.066.021	100,00	26.761.614.476	100,00	27.925.162.932,00	1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN
	APM SMP/ sederajat (%)	61,00	65,00	75,00	8.560.546.389	76,00	8.988.573.708	77,00	9.416.601.027	78,00	9.844.628.347	79,00	10.272.655.666,00	1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pendidikan	Persentase Satuan PAUD yang berkaredetasi Minimal B (%)	53,42	64,28	72,26	700.949.875	82,90	735.997.369	96,20	771.044.862	100,00	806.092.356	100,00	841.139.850,00	1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN
Meningkatnya akses dan layanan pendidikan non formal	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kesetaraan	21,59	25,69	29,78	1.541.666.000	33,88	1.618.749.300	37,80	1.695.832.600	42,08	1.772.915.900	46,18	1.849.999.200,00	1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN
Meningkatnya Kualitas Pembelajaran berdasarkan asesmen nasional	Persentase Sekolah Dasar yang mendapatkan kenaikan nilai literasi berdasarkan asesmen nasional (%)	53,75	56,25	58,75	637.292.000	61,25	669.156.600	63,75	701.021.200	66,25	732.885.800	68,75	764.750.400,00	1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN
	Persentase Sekolah Menengah Pertama yang mendapatkan kenaikan nilai literasi berdasarkan asesmen nasional (%)	66,55	67,65	68,75	613.565.750	69,85	644.244.038	70,95	674.922.325	72,05	705.600.612	73,15	736.278.900,00	1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN
	Persentase Sekolah Dasar yang mendapatkan kenaikan nilai Numerasi berdasarkan asesmen nasional (%)	47,34	50,24	53,14	637.292.000	56,04	669.156.600	58,94	701.021.200	61,84	732.885.800	64,74	764.750.400,00	1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN
	Persentase Sekolah Menengah Pertama yang mendapatkan kenaikan nilai Numerasi berdasarkan asesmen nasional (%)	58,93	60,43	61,93	613.565.750	63,43	644.244.038	64,93	674.922.325	66,43	705.600.612	67,93	736.278.900,00	1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN
Meningkatnya akses dan layanan pendidikan jenjang PAUD	APK PAUD (%)	84,51	87,48	90,45	20.449.520.000	93,00	21.471.996.000	95,55	22.494.472.000	98,10	23.516.948.000	100,00	24.539.424.000,00	1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Belajar	Persentase Sekolah Dasar yang mendapatkan kenaikan nilai iklim keamanan berdasarkan survey lingkungan belajar (%)	73,36	74,26	75,16	350.000.000	76,06	367.500.000	76,96	385.000.000	77,86	402.500.000	78,76	420.000.000,00	1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
		2024	2025	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Persentase Sekolah Menengah Pertama yang mendapatkan kenaikan nilai iklim keamanan berdasarkan survey lingkungan belajar (%)	70,90	72,40	73,90	350.000.000	75,40	367.500.000	76,90	385.000.000	78,40	402.500.000	79,90	420.000.000,00	1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN
	Persentase Sekolah Dasar yang mendapatkan kenaikan nilai iklim kebhinekaan berdasarkan survey lingkungan belajar (%)	69,76	70,76	71,76	350.000.000	72,76	367.500.000	73,76	385.000.000	74,76	402.500.000	75,76	420.000.000,00	1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN
	Persentase Sekolah Menengah Pertama yang mendapatkan kenaikan nilai iklim kebhinekaan berdasarkan survey lingkungan belajar (%)	71.10	72.10	73.10	350.000.000	74.10	367.500.000	75.10	385.000.000	76.10	402.500.000	77.10	420.000.000,00	1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN
	Persentase Sekolah Dasar yang mendapatkan kenaikan nilai iklim inklusivitas berdasarkan survey lingkungan belajar (%)	56.60	59.10	61.60	350.000.000	64.10	367.500.000	66.60	385.000.000	69.10	402.500.000	71.60	420.000.000,00	1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN
	Persentase Sekolah Menengah Pertama yang mendapatkan kenaikan nilai iklim inklusivitas berdasarkan survey lingkungan belajar (%)	56.83	59.23	61.63	350.000.000	64.03	367.500.000	66.43	385.000.000	68.83	402.500.000	71.23	420.000.000,00	1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN
1.01.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM														
BOS PUSAT	Persentase Tercapainya BOS Pusat (%)	100	100	100	29.254.377.215	100	30.717.096.076	100	32.179.814.936	100	33.642.533.797	100	35105252658	1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN
1.01.04 - PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN														
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pendidikan	Proporsi Guru PAUD dengan Kualifikasi S1/D4	45.94	45.78	46.78	529.477.400	47.78	555.951.270	48.78	582.425.140	49.78	608.899.010	50.78	635372880	1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN
	Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD yang Kompeten (%)													1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN
1.01.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN														
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pendidikan	Persentase Satuan Pendidikan Jenjang PAUD dan Non Formal yang Diupdate Perizinannya (%)	100	100	100	300.000.000	100	315.000.000	100	330.000.000	100	345.000.000	100	360000000	1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN
1.01.06 - PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA														
Meningkatnya Kualitas Pembelajaran berdasarkan asesmen nasional	Persentase bahasa dan sastra yang dikembangkan (%)	100	100	100	564.362.600	100	592.580.730	100	620.798.860	100	649.016.990	100	677235120	1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
		2024	2025	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN														
1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		236.186.322.989,8 6	1 Dokumen	1 Dokumen	26.216.681.851.875	1 Dokumen	29.100.516.855.581	1 Dokumen	32.301.573.709.69 5	1 Dokumen	35.854.746.817.761	1 Dokumen	39.798.768.967.715,0 0	1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1,433,728,750.00	1 Dokumen	1 Dokumen	159.143.891.250	1 Dokumen	176.649.719.288	1 Dokumen	196.081.188.409	1 Dokumen	217.650.119.134	1 Dokumen	241.591.632.239,00	1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang Disusun Tepat Waktu	300,000,000.00	100	100	33.300.000.000	100	36.963.000.000	100	41.028.930.000	100	45.542.112.300	100	50.551.744.653,00	1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN
Koordinasi dan Penyusunan RKA-SKPD	Tersedianya dokumen RKA-SKPD yang Disusun Tepat Waktu	300,000,000.00	100	100	33.300.000.000	100	36.963.000.000	100	41.028.930.000	100	45.542.112.300	100	50.551.744.653,00	1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersedianya dokumen Perubahan RKA-SKPD yang Disusun Tepat Waktu	113,979,800.00	100	100	12.651.757.800	100	14.043.451.158	100	15.588.230.785	100	17.302.936.172	100	19.206.259.151,00	1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersedianya dokumen DPA-SKPD Tepat Waktu	238,920,650.00	100	100	26.520.192.150	100	29.437.413.287	100	32.675.528.748	100	36.269.836.910	100	40.259.518.970,00	1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Tersedianya dokumen Perubahan DPA-SKPD Tepat Waktu	180,828,300.00	100	100	20.071.941.300	100	22.279.854.843	100	24.730.638.876	100	27.451.009.152	100	30.470.620.159,00	1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya dokumen Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang Tepat Waktu	150,000,000.00	100	100	16.650.000.000	100	18.481.500.000	100	20.514.465.000	100	22.771.056.150	100	25.275.872.327,00	1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dinas Kesehatan)	150,000,000.00	100	100	16.650.000.000	100	18.481.500.000	100	20.514.465.000	100	22.771.056.150	100	25.275.872.327,00	1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN
1 02 01 2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	213,736,958,080.0 0	100	100	23.724.802.346.880	100	26.334.530.605.037	100	29.231.328.971.59 1	100	32.446.775.158.466	100	36.015.920.425.897,0 0	1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	193,735,132,450.0 0	100	100	21.504.599.701.950	100	23.870.105.669.165	100	26.495.817.292.77 3	100	29.410.357.194.978	100	32.645.496.486.425,0 0	1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya administrasi pelaksanaan tugas ASN	17,730,720,000.00	100	100	1.968.109.920.000	100	2.184.602.011.200	100	2.424.908.232.432	100	2.691.648.138.000	100	2.987.729.433.179,00	1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN
Pelaksanaan dan Penatausahaan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dinas Kesehatan)	1,863,566,630.00	100	100	206.855.895.930	100	229.610.044.482	100	254.867.149.375	100	282.902.535.807	100	314.021.814.745,00	1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Terkoordinasi dan terlaksananya Akuntansi SKPD (Dinas Kesehatan)	150,000,000.00	100	100	16.650.000.000	100	18.481.500.000	100	20.514.465.000	100	22.771.056.150	100	25.275.872.327,00	1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
		2024	2025	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Terlaksananya LKAT SKPD Dinas Kesehatan	70,000,000.00	100	100	7.770.000.000	100	8.624.700.000	100	9.573.417.000	100	10.626.492.870	100	11.795.407.086,00	1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN
Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Terkelolanya Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan (Dinas Kesehatan)	42,500,000.00	100	100	4.717.500.000	100	5.236.425.000	100	5.812.431.750	100	6.451.799.243	100	7.161.497.159,00	1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Terkoordinasi dan tersusunnya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	75,000,000.00	100	100	8.325.000.000	100	9.240.750.000	100	10.257.232.500	100	11.385.528.075	100	12.637.936.163,00	1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tersusunnya laporan dan analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dinas Kesehatan)	70,039,000.00	100	100	7.774.329.000	100	8.629.505.190	100	9.578.750.761	100	10.632.413.345	100	11.801.978.813,00	1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN
1 02 01 2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	210,369,000.00	100	100	23.350.959.000	100	25.919.564.490	100	28.770.716.584	100	31.935.495.408	100	35.448.399.903,00	1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Tersusunnya rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	70,123,000.00	2 Kali Keg	2 Kali Keg	7.783.653.000	2 Kali Keg	8.639.854.830	2 Kali Keg	9.590.238.861	2 Kali Keg	10.645.165.136	2 Kali Keg	11.816.133.301,00	1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN
Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Terlaksananya Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	70,123,000.00	2 Kali Keg	2 Kali Keg	7.783.653.000	2 Kali Keg	8.639.854.830	2 Kali Keg	9.590.238.861	2 Kali Keg	10.645.165.136	2 Kali Keg	11.816.133.301,00	1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terekonnya Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	70,123,000.00	2 Kali Keg	2 Kali Keg	7.783.653.000	2 Kali Keg	8.639.854.830	2 Kali Keg	9.590.238.861	2 Kali Keg	10.645.165.136	2 Kali Keg	11.816.133.301,00	1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN
1 02 01 2.04 - Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	715,000,000.00	100	100	79.365.000.000	100	88.095.150.000	100	97.785.616.500	100	108.542.034.315	100	120.481.658.090,00	1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN
Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Terlaksananya rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	715,000,000.00	100	100	79.365.000.000	100	88.095.150.000	100	97.785.616.500	100	108.542.034.315	100	120.481.658.090,00	1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN
1 02 01 2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1,342,323,000.00	100	100	148.997.853.000	100	165.387.616.830	100	183.580.254.681	100	203.774.082.696	100	226.189.231.793,00	1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	232,500,000.00	100	100	25.807.500.000	100	28.646.325.000	100	31.797.420.750	100	35.295.137.033	100	39.177.602.106,00	1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Terkoordinasinya dan terlaksananya Sistem Informasi Kepegawaian (Dinas Kesehatan)	250,080,000.00	85	85	27.758.880.000	85	30.812.356.800	85	34.201.716.048	85	37.963.904.813	85	42.139.934.343,00	1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	150,065,000.00	85	85	16.657.215.000	85	18.489.508.650	85	20.523.354.602	85	22.780.923.608	85	25.286.825.205,00	1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	659,400,000.00	85	85	73.193.400.000	85	81.244.674.000	85	90.181.588.140	85	100.101.562.835	85	111.112.734.747,00	1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
		2024	2025	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan PerundangUndangan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-	50,278,000.00	85	85	5.580.858.000	85	6.194.752.380	85	6.876.175.142	85	7.632.554.407	85	8.472.135.392,00	1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN
1 02 01 2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah		7,942,850,668.86			881.656.424.243		978.638.630.910		1.086.288.880.310		1.205.780.657.145		1.338.416.529.430,00	1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Dinas Kesehatan)	350,000,000.00	85	85	38.850.000.000		43.123.500.000		47.867.085.000		53.132.464.350		58.977.035.429,00	1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	350,000,000.00	100	100	38.850.000.000	100	43.123.500.000	100	47.867.085.000	100	53.132.464.350	100	58.977.035.429,00	1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor (Dinas Kesehatan)	2,257,423,268.86	100	100	250.573.982.843	100	278.137.120.956	100	308.732.204.261	100	342.692.746.730	100	380.388.948.871,00	1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan (Dinas Kesehatan)	2,831,595,650.00	100	100	314.307.117.150	100	348.880.900.037	100	387.257.799.041	100	429.856.156.935	100	477.140.334.198,00	1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	150,008,750.00	100	100	16.650.971.250	100	18.482.578.088	100	20.515.661.677	100	22.772.384.462	100	25.277.346.752,00	1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya Fasilitasi Kunjungan Tamu (Dinas Kesehatan)	203,815,000.00	100	100	22.623.465.000	100	25.112.046.150	100	27.874.371.227	100	30.940.552.061	100	34.344.012.788,00	1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1,800,008,000.00	100	100	199.800.888.000	100	221.778.985.680	100	246.174.674.105	100	273.253.888.256	100	303.311.815.965,00	1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN
1 02 01 2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		4,154,060,000.00	100	100	461.100.660.000	100	511.821.732.600	100	568.122.123.186	100	630.615.556.736	100	699.983.267.977,00	1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3,538,260,000.00	100	100	392.746.860.000	100	435.949.014.600	100	483.903.406.206	100	537.132.780.889	100	596.217.386.786,00	1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN
Pengadaan Mebel	Terlaksananya Pengadaan Mebel	449,800,000.00	100	100	49.927.800.000	100	55.419.858.000	100	61.516.042.380	100	68.282.807.042	100	75.793.915.816,00	1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	166,000,000.00	100	100	18.426.000.000	100	20.452.860.000	100	22.702.674.600	100	25.199.968.806	100	27.971.965.375,00	1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN
1 02 01 2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersediannya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5,186,983,491.00	100	100	575.755.167.501	100	639.088.235.926	100	709.387.941.878	100	787.420.615.485	100	874.036.883.188,00	1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	50,000,000.00	1 Tahun	1 Tahun	5.550.000.000	1 Tahun	6.160.500.000	1 Tahun	6.838.155.000	1 Tahun	7.590.352.050	1 Tahun	8.425.290.776,00	1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
		2024	2025	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4,691,203,491.00	1 Tahun	1 Tahun	520.723.587.501	1 Tahun	578.003.182.126	1 Tahun	641.583.532.160	1 Tahun	712.157.720.698	1 Tahun	790.495.069.974,00	1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	344,500,000.00	1 Tahun	1 Tahun	38.239.500.000	1 Tahun	42.445.845.000	1 Tahun	47.114.887.950	1 Tahun	52.297.525.625	1 Tahun	58.050.253.443,00	1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	101,280,000.00	1 Tahun	1 Tahun	11.242.080.000	1 Tahun	12.478.708.800	1 Tahun	13.851.366.768	1 Tahun	15.375.017.112	1 Tahun	17.066.268.995,00	1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN
1 02 01 2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersediannya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2,179,050,000.00	1 Tahun	1 Tahun	241.874.550.000	1 Tahun	268.480.750.500	1 Tahun	298.013.633.055	1 Tahun	330.795.132.691	1 Tahun	367.182.597.287,00	1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1,524,050,000.00	100	100	169.169.550.000	100	187.778.200.500	100	208.433.802.555	100	231.361.520.836	100	256.811.288.128,00	1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	155,000,000.00	100	100	17.205.000.000	100	19.097.550.000	100	21.198.280.500	100	23.530.091.355	100	26.118.401.404,00	1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	500,000,000.00	100	100	55.500.000.000	100	61.605.000.000	100	68.381.550.000	100	75.903.520.500	100	84.252.907.755,00	1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN
1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Tersedianya Program Terkait Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	90,957,411,853.14	100	100	10.096.272.715.699	100	11.206.862.714.425	100	12.439.617.613.012	100	13.807.975.550.444	100	15.326.852.860.992,00	1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN
1 02 02 2.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Menurunnya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular dan tidak menular serta Penanggulangan Wabah	25,814,771,670.00	100	100	2.865.439.655.370	100	3.180.638.017.461	100	3.530.508.199.381	100	3.918.864.101.313	100	4.349.939.152.458,00	1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN
Pembangunan Puskesmas	tersedianya Pembangunan Puskesmas	1,198,574,430.00	100	100	133.041.761.730	100	147.676.355.520	100	163.920.754.628	100	181.952.037.637	100	201.966.761.777,00	1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN
Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Tersedianya Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1,198,574,430.00	100	100	133.041.761.730	100	147.676.355.520	100	163.920.754.628	100	181.952.037.637	100	201.966.761.777,00	1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN
Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Tersedianya Rumah Dinas bagi Tenaga Kesehatan	3,186,801,290.00	100	100	353.734.943.190	100	392.645.786.941	100	435.836.823.504	100	483.778.874.090	100	536.994.550.240,00	1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN
Pengembangan Puskesmas	Tersedianya Puskesmas yang Ditingkatkan	8,913,080,000.00	100	100	989.351.880.000	100	1.098.180.586.800	100	1.218.980.451.348	100	1.353.068.300.996	100	1.501.905.814.106,00	1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
		2024	2025	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan Fasilitas Kesehatan	1,198,574,430.00	100	100	133.041.761.730	100	147.676.355.520	100	163.920.754.628	100	181.952.037.637	100	201.966.761.777,00	1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN
Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Tersedianya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	3,186,801,290.00	100	100	353.734.943.190	100	392.645.786.941	100	435.836.823.504	100	483.778.874.090	100	536.994.550.240,00	1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN
Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Tersedianya dan terpeliharanya Alat Kalibrasi	175,000,000.00	100	100	19.425.000.000	100	21.561.750.000	100	23.933.542.500	100	26.566.232.175	100	29.488.517.714,00	1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN
Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Tersediannya Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	6,336,165,800.00	100	100	703.314.403.800	100	780.678.988.218	100	866.553.676.922	100	961.874.581.383	100	1.067.680.785.336,00	1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Tersedianya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	70,000,000.00	100	100	7.770.000.000	100	8.624.700.000	100	9.573.417.000	100	10.626.492.870	100	11.795.407.086,00	1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN
Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Terlaksananya distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	351,200,000.00	100	100	38.983.200.000	100	43.271.352.000	100	48.031.200.720	100	53.314.632.799	100	59.179.242.407,00	1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN
1 02 02 2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		63,058,177,183.14	100	100	6.999.457.667.329	100	7.769.398.010.735	100	8.624.031.791.915	100	9.572.675.289.026	100	10.625.669.570.819,00	1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persentase Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	334,855,250.00	100	100	37.168.932.750	100	41.257.515.353	100	45.795.842.041	100	50.833.384.666	100	56.425.056.979,00	1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Persentase Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar	335,342,000.00	100	100	37.222.962.000	100	41.317.487.820	100	45.862.411.480	100	50.907.276.743	100	56.507.077.185,00	1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Persentase Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar	345,796,875.00	100	100	38.383.453.125	100	42.605.632.969	100	47.292.252.595	100	52.494.400.381	100	58.268.784.423,00	1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Persentase Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	338,374,875.00	100	100	37.559.611.125	100	41.691.168.349	100	46.277.196.867	100	51.367.688.522	100	57.018.134.260,00	1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Presentase pelayanan kesehatan anak usia sekolah dan remaja Sesuai Standar	346,955,250.00	100	100	38.512.032.750	100	42.748.356.353	100	47.450.675.551	100	52.670.249.862	100	58.463.977.347,00	1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
		2024	2025	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Memberikan pelayanan skrining kesehatan warga negara; berusia 15 – 19 tahun adalah persentase penduduk Usia 15 – 19 tahun,yang mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun	348,736,500.00	100	100	38.709.751.500	100	42.967.824.165	100	47.694.284.823	100	52.940.656.154	100	58.764.128.331,00	1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Persentase pelayanan kesehatan Lanjut Usia Sesuai Standar	336,057,125.00	100	100	37.302.340.875	100	41.405.598.371	100	45.960.214.192	100	51.015.837.753	100	56.627.579.906,00	1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar bagi penyandang DM dinilai dari persentase penyandang DM yang mendapatkan pelayanan sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.	348,732,250.00	100	100	38.709.279.750	100	42.967.300.523	100	47.693.703.580	100	52.940.010.974	100	58.763.412.181,00	1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar bagi penderita hipertensi, dinilai dari persentase jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun	348,738,500.00	100	100	38.709.973.500	100	42.968.070.585	100	47.694.558.349	100	52.940.959.768	100	58.764.465.342,00	1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Memberikan pelayanan kesehatan ODGJ berat dinilai dengan jumlah ODGJ berat (psikotik) di wilayah kerjanya yang mendapat pelayanan kesehatan jiwa promotif preventif sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun.	347,201,500.00	100	100	38.539.366.500	100	42.778.696.815	100	47.484.353.465	100	52.707.632.346	100	58.505.471.904,00	1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Penemuan kasus penderita Tuberkulosis dan pengobatannya	340,083,000.00	100	100	37.749.213.000	100	41.901.626.430	100	46.510.805.337	100	51.626.993.924	100	57.305.963.256,00	1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Penemuan kasus penderita HIV/AIDS dan pengobatannya	350,270,000.00	100	100	38.879.970.000	100	43.156.766.700	100	47.904.011.037	100	53.173.452.251	100	59.022.531.999,00	1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Presentase pelayananan kesehatan bagi penduduk pada kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	107,550,000.00	100	100	11.938.050.000	100	13.251.235.500	100	14.708.871.405	100	16.326.847.260	100	18.122.800.458,00	1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Presentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	157,550,000.00	100	100	17.488.050.000	100	19.411.735.500	100	21.547.026.405	100	23.917.199.310	100	26.548.091.234,00	1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1. Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita ;2. Prevalensi Wasting (gizi kurang dan gizi buruk) pada balita;3. Cakupan ibu hamil yang mendapat Tablet Tambah Darah (TTD) minimal 90 tablet selama masa kehamilan;4. Cakupan Bayi Usia Kurang dari 6 bulan Mendapat ASI Eksklusif	144,728,000.00	100	100	16.064.808.000	100	17.831.936.880	100	19.793.449.937	100	21.970.729.430	100	24.387.509.667,00	1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Persentase Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olah Raga ASN dan Kelompok Masyarakat	153,816,000.00	100	100	17.073.576.000	100	18.951.669.360	100	21.036.352.990	100	23.350.351.818	100	25.918.890.518,00	1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Meningkatnya penyehatan dan pengawasan kualitas lingkungan	292,096,000.00	100	100	32.422.656.000	100	35.989.148.160	100	39.947.954.458	100	44.342.229.448	100	49.219.874.687,00	1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN
Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Persentase Indikator Gerakan Masyarakat Hidup Sehat(GERMAS) yang Dikampanyekan dan Dilaksanakan	111,292,000.00	100	100	12.353.412.000	100	13.712.287.320	100	15.220.638.925	100	16.894.909.207	100	18.753.349.220,00	1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Cakupan Puskesmas Yang melaksanakan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	108,844,250.00	100	100	12.081.711.750	100	13.410.700.043	100	14.885.877.047	100	16.523.323.522	100	18.340.889.110,00	1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
		2024	2025	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Presentase Pengelolaan Surveilans Kesehatan	614,838,208.00	100	100	68.247.041.088	100	75.754.215.608	100	84.087.179.325	100	93.336.769.050	100	103.603.813.646,00	1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Persentase penderita gangguan mental emosional pada penduduk ≥ 15 tahun yang mendapat layanan	25,315,132,500.00	100	100	2.809.979.707.500	100	3.119.077.475.325	100	3.462.175.997.611	100	3.843.015.357.348	100	4.265.747.046.656,00	1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Presentase penderita depresi pada penduduk ≥ 15 tahun yang mendapat layanan	100,532,000.00	100	100	11.159.052.000	100	12.386.547.720	100	13.749.067.969	100	15.261.465.446	100	16.940.226.645,00	1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Penemuan Kasus AFP Non Polio Penemuan Kasus Campak-Rubella Peningkatan Kapasitas Pengelola Surveilans Jumlah Jemaah Calon Haji pada Pemeriksaan Tahap I dan II yang di periksa Jumlah Jemaah Calon Haji yang dilakukan pembinaan masa tunggu dan masa kebwerangkatan Persentase Jemaah Calon haji yang memperoleh pengukuran kebugaran Persentase Jemaah Calon Haji mendapat proteksi/ perlindungan terhadap penyakit Meningitis Meningokokus Persentase Jemaah Calon Haji mendapat pelayanan kesehatan haji dari kabupaten ke embarkasi haji Jumlah pengelola Haji RSUD/Puskesmas yang memiliki sertifikat pelatihan Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Persentase Bayi usia 0-11 bulan mendapat Imunisasi Dasar Lengkap Persentase Bayi usia 12-23 bulan mendapat Imunisasi Dasar Lengkap Persentase Bayi usia 0-11 bulan mendapat imunisasi antigen baru Persentase anak usia 12-24 bulan mendapat Imunisasi lanjutan baduta Persentase anak yang mendapat Imunisasi lanjutan Lengkap Persentase WUS memiliki status Imunisasi T2+ Jumlah pengelola imunisasi RSUD/Puskesmas yang memiliki sertifikat pelatihan	2,104,072,000.00	100	100	233.551.992.000	100	259.242.711.120	100	287.759.409.343	100	319.412.944.371	100	354.548.368.252,00	1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN
Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Penduduk yang menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	26,812,829,200.14	100	100	2.976.224.041.216	100	3.303.608.685.749	100	3.667.005.641.182		4.070.376.261.712		4.518.117.650.500,00	1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN
Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	Menyelenggarakan upaya pencegahan dan pengendalian masalah kesehatan jiwa dan NAPZA di 70% SMA dan yang	210,030,000.00	100	100	23.313.330.000	100	25.877.796.300	100	28.724.353.893		31.884.032.821		35.391.276.432,00	1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN
Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Terbentuknya Forum Kabupaten Sehat dan Tim Pembina Teknis Kabupaten Sehat	300,000,000.00	80	80	33.300.000.000	85	36.963.000.000	90	41.028.930.000	95	45.542.112.300	100	50.551.744.653,00	1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN
Operasional Puskesmas Pelayanan	Operasional Pelayanan Puskesmas	107,940,000.00	100	100	11.981.340.000	100	13.299.287.400	100	14.762.209.014	100	16.386.052.006	100	18.188.517.726,00	1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN
Operasional Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	Terlaksananya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	70,000,000.00	100	100	7.770.000.000	100	8.624.700.000	100	9.573.417.000	100	10.626.492.870	100	11.795.407.086,00	1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
		2024	2025	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	605,864,500.00	100	100	67.250.959.500	100	74.648.565.045	100	82.859.907.200	100	91.974.496.992	100	102.091.691.661,00	1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN
Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Presentase Investigasi awal kejadian tidak diharapkan (kejadian ikutan pasca imunisasi dan pemberian obat massal)	79,927,000.00	100	100	8.871.897.000	100	9.847.805.670	100	10.931.064.294	100	12.133.481.366	100	13.468.164.316,00	1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN
Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Presentase pelaksanaan kewaspadaan dini dan respon wabah	69,920,000.00	100	100	7.761.120.000	100	8.614.843.200	100	9.562.475.952	100	10.614.348.307	100	11.781.926.620,00	1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN
Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Tersedianya SPGDT dengan adanya PSC 119, serta penguatan jejraing SPGDT	69,975,000.00	1 PSC Kabupaten	1 PSC Kabupaten	7.767.225.000	1 PSC Kabupaten	8.621.619.750	1 PSC Kabupaten	9.569.997.923	1 PSC Kabupaten	10.622.697.694	1 PSC Kabupaten	11.791.194.440,00	1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN
Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar bagi penderita tuberkulosis, dinilai dari persentase jumlah penderita tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun	600,097,400.00	80	80	66.610.811.400	85	73.938.000.654	90	82.071.180.726	95	91.099.010.606	100	101.119.901.772,00	1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN
Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar bagi penderita HIV, dinilai dari persentase jumlah penderita HIV yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun	200,000,000.00	100	100	22.200.000.000	100	24.642.000.000	100	27.352.620.000	100	30.361.408.200	100	33.701.163.102,00	1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN
Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar bagi penderita malaria	200,000,000.00	100	100	22.200.000.000	100	24.642.000.000	100	27.352.620.000	100	30.361.408.200	100	33.701.163.102,00	1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN
Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota	tersediannya data SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota	200,000,000.00	1 Dokumen	1 Dokumen	22.200.000.000	1 Dokumen	24.642.000.000	1 Dokumen	27.352.620.000	1 Dokumen	30.361.408.200	1 Dokumen	33.701.163.102,00	1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN
Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Persentase pelayanan kesehatan Ibu dan Anak Sesuai Standar	200,000,000.00	100	100	22.200.000.000	100	24.642.000.000	100	27.352.620.000	100	30.361.408.200	100	33.701.163.102,00	1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN
1 02 02 2.03 - Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi		900,000,000.00	100.00	100.00	99.900.000.000	100.00	110.889.000.000	100.00	123.086.790.000	100.00	136.626.336.900	100.00	151.655.233.959,00	1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN
Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Terlaksananya Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	900,000,000.00	100	100	99.900.000.000	100	110.889.000.000	100	123.086.790.000	100	136.626.336.900	100	151.655.233.959,00	1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN
1 02 02 2.04 - Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		1,184,463,000.00	100.00	100.00	131.475.393.000	100.00	145.937.686.230	100.00	161.990.831.715	100.00	179.809.823.204	100.00	199.588.903.756,00	1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	Presentase Monitoring Evaluasi Perizinan RS Tipe, C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	104,780,000.00	100	100	11.630.580.000	100	12.909.943.800	100	14.330.037.618	100	15.906.341.756	100	17.656.039.349,00	1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
		2024	2025	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Puskesmas dan Labkes yang menerapkan PPK BLUD	339,283,500.00	100	100	37.660.468.500	100	41.803.120.035	100	46.401.463.239	100	51.505.624.195	100	57.171.242.857,00	1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN
Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Presentase Mutu Layanan Fasilitas Kesehatan	540,400,000.00	100	100	59.984.400.000	100	66.582.684.000	100	73.906.779.240	100	82.036.524.956	100	91.060.542.702,00	1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN
Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Adanya Rumusan Dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	199,999,500.00	100	100	22.199.944.500	100	24.641.938.395	100	27.352.551.618	100	30.361.332.296	100	33.701.078.849,00	1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN
01 02 03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN														1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN
1 02 03 2.01 - Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Capaian Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	52,390,000.00	100	100	5.815.290.000	100	6.454.971.900	100	7.165.018.809	100	7.953.170.878	100	8.828.019.675,00	1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN
Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Meningkatnya kualitas dalam pengendalian perizinan tenaga kesehatan	52,390,000.00	100	100	5.815.290.000	100	6.454.971.900	100	7.165.018.809	100	7.953.170.878	100	8.828.019.675,00	1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN
1 02 03 2.02 - Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota		261,980,000.00	100	100	29.079.780.000	100	32.278.555.800	100	35.829.196.938	100	39.770.408.601	100	44.145.153.547,00	1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN
Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Presentase Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	78,530,000.00	100	100	8.716.830.000	100	9.675.681.300	100	10.740.006.243	100	11.921.406.930	100	13.232.761.692,00	1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN
Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Presentase Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	52,390,000.00	100	100	5.815.290.000	100	6.454.971.900	100	7.165.018.809	100	7.953.170.878	100	8.828.019.675,00	1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN
Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Presentase Pembinaan dan pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	131,060,000.00	100	100	14.547.660.000	100	16.147.902.600	100	17.924.171.886	100	19.895.830.793	100	22.084.372.181,00	1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN
1 02 03 2.03 - Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota														1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	104,841,000.00	100	100	11.637.351.000	100	12.917.459.610	100	14.338.380.167	100	15.915.601.985	100	17.666.318.204,00	1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				2026		2027		2028		2029		2030			
		2024	2025	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
01 02 04 - PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN														-	1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN
1 02 04 2.01 - Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)														-	1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Meningkatnya Cakupan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang memiliki izin	358,212,000.00	100	100	39.761.532.000	100	44.135.300.520	100	48.990.183.577	100	54.379.103.771	100	60.360.805.185,00	1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN	
1 02 04 2.02 - Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga														-	1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Meningkatnya Penilaian Pree Market PKRT	52,388,000.00			5.815.068.000	100	6.454.725.480	100	7.164.745.283	100	7.952.867.264	100	8.827.682.663,00	1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN	
1 02 04 2.03 - Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga			100	100		100		100		100		100		-	1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Capaian Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangg	137,926,000.00	100	100	15.309.786.000	100	16.993.862.460	100	18.863.187.331	100	20.938.137.937	100	23.241.333.110,00	1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
		2024	2025	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1 02 04 2.04 - Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Meningkatnya capaian Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	78,282,000.00	100	100	8.689.302.000	100	9.645.125.220	100	10.706.088.994	100	11.883.758.784	100	13.190.972.250,00	1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Terwujudnya TPM (Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depo Air Minum) Yang Bersertifikat	78,282,000.00	100	100	8.689.302.000	100	9.645.125.220	100	10.706.088.994	100	11.883.758.784	100	13.190.972.250,00	1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN
1 02 04 2.05 - Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan		75,000,000.00	100	100	8.325.000.000	100	9.240.750.000	100	10.257.232.500	100	11.385.528.075	100	12.637.936.163,00	1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Memastikan Sentra Makanan dan Makanan Jajanan Yang Bersih dan Sehat	75,000,000.00	100	100	8.325.000.000	100	9.240.750.000	100	10.257.232.500	100	11.385.528.075	100	12.637.936.163,00	1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN
1 02 04 2.06 - Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga		80,000,000.00	100	100	8.880.000.000	100	9.856.800.000	100	10.941.048.000	100	12.144.563.280	100	13.480.465.241,00	1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN
Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Cakupan Makanan dan Minuman Yang Ada di Pasaran serta Meningkatnya kualitas Makanan Minuman yang Beredar	80,000,000.00	100	100	8.880.000.000	100	9.856.800.000	100	10.941.048.000	100	12.144.563.280	100	13.480.465.241,00	1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN
01 02 05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN														1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN
1 02 05 2.01 - Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		133,879,500.00	100	100	14.860.624.500	100	16.495.293.195	100	18.309.775.446	100	20.323.850.746	100	22.559.474.328,00	1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN
Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah pedoman/regulasi/rekomendasi kebijakan penerapan Germas (Non IKU)	66,367,500.00	100	100	7.366.792.500	100	8.177.139.675	100	9.076.625.039	100	10.075.053.794	100	11.183.309.711,00	1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
		2024	2025	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Teknologi Tepat Guna (TTG) sesuai lokal spesifik daerah dalam pengamanan kualitas air minum dan sanitasi aman	Meningkatnya Capaian Teknologi Tepat Guna (TTG) sesuai lokal spesifik daerah dalam pengamanan kualitas air minum dan sanitasi aman	67,512,000.00	100	100	7.493.832.000	100	8.318.153.520	100	9.233.150.407	100	10.248.796.952	100	11.376.164.617,00	1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN
1 02 05 2.02 - Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		120,413,750.00	100	100	13.365.926.250	100	14.836.178.138	100	16.468.157.733	100	18.279.655.083	100	20.290.417.142,00	1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN
Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Persentase Kabupaten yang menerapkan kebijakan Germas (Non IKU)	120,413,750.00	100	100	13.365.926.250	100	14.836.178.138	100	16.468.157.733	100	18.279.655.083	100	20.290.417.142,00	1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN
1 02 05 2.03 - Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		155,373,500.00	100	100	17.246.458.500	100	19.143.568.935	100	21.249.361.518	100	23.586.791.285	100	26.181.338.326,00	1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Persentase Kabupaten Melaksanakan Pembinaan Posyandu aktif (Non IKU)	155,373,500.00	100	100	17.246.458.500	100	19.143.568.935	100	21.249.361.518	100	23.586.791.285	100	26.181.338.326,00	1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN
1 02 01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA													-	
1.02.0.00.0.00.01.0002 - RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUARA TEWEH		103.407.765.888,00	100	100	114.782.620.136	100	127.408.708.351	100	141.423.666.269	100	156.980.269.559	100	174.248.099.210,25	RSUD
1 02 01 2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Meningatnya Pelayanan dan Penunjanh Pelayanan BLUD	10.897.489.526,00			10.897.489.526		10.897.489.526		12.096.213.374		13.426.796.845		14.903.744.497,93	
Pendapatan BLUD Labkesda Kab.Barito Utara	Peningkatan Pendapatan BLUD Labkesda	1.359.364.800,00	100	100	1.359.364.800	100	1.359.364.800	100	1.508.894.928	100	1.674.873.370	100	1.859.109.440,79	LABKESDA
Pendapatan BLUD UPT. Puskesmas Muara Teweh	Meningkatnya Capaian Layanan Kesehatan Masyarakat wilayah puskesmas terkait	1.347.276.456,00	100	100	1.347.276.456	100	1.347.276.456	100	1.495.476.866	100	1.659.979.321	100	1.842.577.046,80	PUSKESMAS WILAYAH KAB.BARITO UTARA
Pendapatan BLUD UPT. Puskesmas Lanjas	Meningkatnya Capaian Layanan Kesehatan Masyarakat wilayah puskesmas terkait	1.606.813.015,00	100	100	1.606.813.015	100	1.606.813.015	100	1.783.562.447	100	1.979.754.316	100	2.197.527.290,52	PUSKESMAS WILAYAH KAB.BARITO UTARA
Pendapatan BLUD UPT. Puskesmas Kandui	Meningkatnya Capaian Layanan Kesehatan Masyarakat wilayah puskesmas terkait	506.400.000,00	100	100	506.400.000	100	506.400.000	100	562.104.000	100	623.935.440	100	692.568.338,40	PUSKESMAS WILAYAH KAB.BARITO UTARA
Pendapatan BLUD UPT. Puskesmas Sikui	Meningkatnya Capaian Layanan Kesehatan Masyarakat wilayah puskesmas terkait	788.000.000,00	100	100	788.000.000	100	788.000.000	100	874.680.000	100	970.894.800	100	1.077.693.228,00	PUSKESMAS WILAYAH KAB.BARITO UTARA
Pendapatan BLUD UPT. Puskesmas Sei Rahayu	Meningkatnya Capaian Layanan Kesehatan Masyarakat wilayah puskesmas terkait	346.160.000,00	100	100	346.160.000	100	346.160.000	100	384.237.600	100	426.503.736	100	473.419.146,96	PUSKESMAS WILAYAH KAB.BARITO UTARA

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
		2024	2025	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Pendapatan BLUD UPT. Puskesmas Batu Raya	Meningkatnya Capaian Layanan Kesehatan Masyarakat wilayah puskesmas terkait	453.860.004,00	100	100	453.860.004	100	453.860.004	100	503.784.604	100	559.200.911	100	620.713.011,13	PUSKESMAS WILAYAH KAB.BARITO UTARA
Pendapatan BLUD UPT. Puskesmas Ketapang	Meningkatnya Capaian Layanan Kesehatan Masyarakat wilayah puskesmas terkait	197.741.940,00	100	100	197.741.940	100	197.741.940	100	219.493.553	100	243.637.844	100	270.438.007,14	PUSKESMAS WILAYAH KAB.BARITO UTARA
Pendapatan BLUD UPT. Puskesmas Tumpang Laung	Meningkatnya Capaian Layanan Kesehatan Masyarakat wilayah puskesmas terkait	576.000.000,00	100	100	576.000.000	100	576.000.000	100	639.360.000	100	709.689.600	100	787.755.456,00	PUSKESMAS WILAYAH KAB.BARITO UTARA
Pendapatan BLUD UPT. Puskesmas Benao	Meningkatnya Capaian Layanan Kesehatan Masyarakat wilayah puskesmas terkait	478.500.000,00	100	100	478.500.000	100	478.500.000	100	531.135.000	100	589.559.850	100	654.411.433,50	PUSKESMAS WILAYAH KAB.BARITO UTARA
Pendapatan BLUD UPT. Puskesmas Lahei I	Meningkatnya Capaian Layanan Kesehatan Masyarakat wilayah puskesmas terkait	804.893.524,00	100	100	804.893.524	100	804.893.524	100	893.431.812	100	991.709.311	100	1.100.797.335,12	PUSKESMAS WILAYAH KAB.BARITO UTARA
Pendapatan BLUD UPT. Puskesmas Lahei II	Meningkatnya Capaian Layanan Kesehatan Masyarakat wilayah puskesmas terkait	684.000.000,00	100	100	684.000.000	100	684.000.000	100	759.240.000	100	842.756.400	100	935.459.604,00	PUSKESMAS WILAYAH KAB.BARITO UTARA
Pendapatan BLUD UPT. Puskesmas Benangin	Meningkatnya Capaian Layanan Kesehatan Masyarakat wilayah puskesmas terkait	174.000.000,00	100	100	174.000.000	100	174.000.000	100	193.140.000	100	214.385.400	100	237.967.794,00	PUSKESMAS WILAYAH KAB.BARITO UTARA
Pendapatan BLUD UPT. Puskesmas Lampeong	Meningkatnya Capaian Layanan Kesehatan Masyarakat wilayah puskesmas terkait	187.783.659,00	100	100	187.783.659	100	187.783.659	100	208.439.861	100	231.368.246	100	256.818.753,34	PUSKESMAS WILAYAH KAB.BARITO UTARA
Pendapatan BLUD UPT. Puskesmas Mampuak	Meningkatnya Capaian Layanan Kesehatan Masyarakat wilayah puskesmas terkait	157.500.000,00	100	100	157.500.000	100	157.500.000	100	174.825.000	100	194.055.750	100	215.401.882,50	PUSKESMAS WILAYAH KAB.BARITO UTARA
Pendapatan BLUD UPT. Puskesmas Trahean	Meningkatnya Capaian Layanan Kesehatan Masyarakat wilayah puskesmas terkait	295.000.000,00	100	100	295.000.000	100	295.000.000	100	327.450.000	100	363.469.500	100	403.451.145,00	PUSKESMAS WILAYAH KAB.BARITO UTARA
Pendapatan BLUD UPT. Puskesmas Butong	Meningkatnya Capaian Layanan Kesehatan Masyarakat wilayah puskesmas terkait	534.196.128,00	100	100	534.196.128	100	534.196.128	100	592.957.702	100	658.183.049	100	730.583.184,73	PUSKESMAS WILAYAH KAB.BARITO UTARA
Pendapatan BLUD UPT. Puskesmas Lemo	Meningkatnya Capaian Layanan Kesehatan Masyarakat	400.000.000,00	100	100	400.000.000	100	400.000.000	100	444.000.000	100	492.840.000	100	547.052.400,00	PUSKESMAS WILAYAH KAB.BARITO UTARA
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG														
1.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														
Meningkatnya Kelancaran Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan (Nilai)		100	100		100		100		100		100		1.03.1.04.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
		2024	2025	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)														
Meningkatnya Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder di Kabupaten	Persentase luas areal tanam yang terlayani irigasi (%)	28.42	37.35	46.28	6.949.651.500	55.22	7.123.392.788	64.15	7.301.477.607	73.08	7.484.014.547			BIDANG SUMBER DAYA AIR
Meningkatnya Infrastruktur Pengendali Banjir yang Terbangun	Persentase infrastruktur pengendali banjir yang terbangun (%)	45.75	56.25	67.19	35.277.155.000	78.13	36.159.083.875	89.06	37.063.060.972	100	37.989.637.496			BIDANG SUMBER DAYA AIR
1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM														
Meningkatnya Sarana Air Minum Yang aman	Persentase rumah tangga dengan akses air minum aman (%)	2.5	3	4.40	22.000.000.000	5.60	22.550.000.000	6.80	23.113.750.000	8.00	23.691.593.750	8.00		BIDANG CIPTA KARYA
1.03.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL														
Meningkatnya pengembangan sistem persampahan	Persentase terbangunnya sarana prasarana persampahan sesuai standar (%)	0	0	0	-			25	300.000.000	50	300.000.000	75	300.000.000	1.03.1.04.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.05 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH														
Meningkatnya Sarana Air Limbah Domestik yang Aman	Persentase rumah tangga yang terlayani air limbah aman (%)	1.8	2.5	4.00	7.852.449.250	5.00	8.048.760.481	7.00	8.249.979.493	9.00	8.456.228.981	9.00		BIDANG CIPTA KARYA
1.03.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE														
meningkatkan kualitas sistem drainase perkotaan	Panjang Drainase yang Dibangun/Ditingkat kan (Meter)	13711	1400	1400	650.000.000.000	1400	6.662.500.000	1400	6.829.062.500	1400	6.999.789.063	20711		BIDANG CIPTA KARYA
1.03.08 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG														
meningkatkan kualitas bangunan gedung	Bangunan Strategis Provinsi Gedung yang dan dibangun ditingkatkan (unit)	5	6	7	157.000.000.000	8	160.925.000.000	9	164.948.125.000	10	169.071.828.125	10		BIDANG CIPTA KARYA
1.03.09 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA														
Meningkatnya bangunan gedung yang memenuhi kriteria ramah lingkungan	Persentase bangunan/gedung publik ramah lingkungan (%)	100	100	100		100		100		100		100		1.03.1.04.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
		2024	2025	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN														
Meningkatnya kualitas sarana jalan	Persentase jalan dalam kondisi mantap (%)	56.26	62.87	75.37	454.844.371.113	85.57	466.215.480.391	95.76	477.870.867.401	100.00	489.817.639.086			BIDANG BINA MARGA
Meningkatnya kualitas sarana jembatan	Persentase jembatan dalam kondisi mantap (%)	84.14	87.37	90.61	251.356.092.750	93.84	257.639.995.069	97.08	264.080.994.945	100.00	270.683.019.819			BIDANG BINA MARGA
1.03.11 - PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI														
Meningkatnya tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	Persentase Tenaga kerja konstruksi yang memiliki sertifikat tenaga terampil (%)	92	30	50	827.497.500	68	848.184.938	80	869.389.561	80	891.124.300	400		BIDANG JASA KONSTRUKSI
1.03.12 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG														
Cakupan wilayah dengan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)	Persentase wilayah yang memiliki RDTR sesuai ketentuan (%)	11.11	22.22	33.33	1.800.000.000	55.55	1.845.000.000	77.78	1.891.125.000	100	1.938.403.125	100		BIDANG TATA RUANG
1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN														
1.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN														
Meningkatnya penyediaan dan kualitas rumah layak huninya bagi masyarakat	Jumlah penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana (unit)	0	0	0	-	0	-	20	1.500.000.000	20	1.625.000.000	20	1.750.000.000	1.03.1.04.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.04.03 - PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN														
Meningkatnya Kualitas kawasan Permukiman Kumuh	Persentase Luasan Kawasan Permukiman kumuh yang tertangani (%)	1,37%	13,048 %	23,42 %	3.000.000.000	35,1 %	3.000.000.000	46,77 %	3.150.000.000	58,44 %	3.225.000.000	70,11 %	3.300.000.000	1.03.1.04.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.04.04 - PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH														
Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah rumah tidak layak huni yang ditangani (unit)	1.935	85	250	10.937.500.000	260	11.375.000.000	275	13.750.000.000	285	14.250.000.000	300	16.875.000.000	1.03.1.04.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.04.05 - PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)														
Meningkatnya Kualitas Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum	Jumlah jalan lingkungan yang ditangani (unit)	10	4	10	2.500.000.000	15	4.500.000.000	20	6.000.000.000	25	10.000.000.000	30	12.000.000.000	1.03.1.04.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	Jumlah drainase lingkungan yang ditangani (unit)	0	0	5	1.000.000.000	7	1.400.000.000	10	2.000.000.000	15	3.750.000.000	20	5.000.000.000	1.03.1.04.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
		2024	2025	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT														
1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														
Meningkatnya Kelancaran Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah (POL PP)	Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan (Nilai)	70	70	77	80.000.000	77	80.000.000	80	85.000.000	80	85.000.000	100	90.000.000	1.05.0.00.0.00.03.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Terpenuhinya Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (BPBD)	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%)	100%	100%	100%	27.831.461.268	100%	30.614.607.395	100%	33.676.068.134	100%	37.043.674.948	100%	40748042442	1.05.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Meningkatnya kualitas tata kelola dan kinerja Perangkat daerah	Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan (Nilai)	12.655.567.501	23.233.773.315	100%	24.388.156.417	100%	26.826.972.058	100%	29.509.669.264	100%	32.460.636.190	100%	35.706.699.809	1.05.0.00.0.00.02.0000 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM														
Meningkatnya Kualitas anggota Satpol PP	Jumlah Anggota Satpol PP yang bersertifikat Tekhnis (Orang)	8	55	55	500.000.000	39	500.000.000	39	500.000.000	39	500.000.000	39	500.000.000	1.05.0.00.0.00.03.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	Jumlah anggota Satpol PP yang bersertifikat dasar (Orang)													1.05.0.00.0.00.03.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Berkurangnya daerah rawan pelanggaran perda	Persentase berkurangnya daerah rawan pelanggaran Perda (%)	40	60	75	50.000.000	75	50.000.000	80	60.000.000	85	65.000.000	90	75.000.000	1.05.0.00.0.00.03.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Terlaksananya mekanisme penanganan gangguan trantibum	Persentase Penanganan trantibum (%)	0	0	10	20.000.000	10	20.000.000	15	30.000.000	15	30.000.000	20	40.000.000	1.05.0.00.0.00.03.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Meningkatnya Kapasitas Anggota Satlinmas	Persentase anggota Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) yang ditingkatkan kapasitasnya (%)	70	70	80	100.000.000	85	150.000.000	85	150.000.000	90	175.000.000	100	200.000.000	1.05.0.00.0.00.03.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.03 - PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA														
Meningkatnya Layanan informasi rawan bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana (%)	100%	100%	100%	404.227.362	100%	444.650.098	100%	489.115.108	100%	538.026.618	100%	591829280	1.05.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Meningkatnya layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana (%)	100%	100%	100%	2.954.722.100	100%	3.250.194.310	100%	3.575.213.742	100%	3.932.735.116	100%	4326008627	1.05.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Meningkatnya layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana (%)	100%	100%	100%	2.293.258.294	100%	2.522.584.123	100%	2.774.842.536	100%	3.052.326.789	100%	3357559468	1.05.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Meningkatnya Pelaksanaan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase Pelaksanaan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana (%)	100%	100%	100%	1.576.085.765	100%	1.733.694.341	100%	1.907.063.775	100%	2.097.770.153	100%	2307547168	1.05.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
		2024	2025	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1.05.04 - PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN														
Meningkatnya Layanan Penanganan Kebakaran dan Non Kebakaran	Persentase layanan penanganan kebakaran dan non kebakaran (%)	2.074.996.780	2.767.528.335	100 %	12.238.000.000	100%	13.461.800.000	100%	14.807.980.000	100%	16.288.778.000	100%	17.917.655.800	1.05.0.00.0.00.02.0000 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL														
1.06.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														
Meningkatnya kualitas tata kelola dan kinerja perangkat daerah	Indeks Kepuasan Layanan Keseekretariatan (Nilai)	100	100	100	7.879.351.828	100	7.979.351.828	100	8.879.351.828	100	8.979.351.828	100	9.879.351.828	1.06.0.00.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
1.06.02 - PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL														
Meningkatnya kompetensi dan kapasitas sumber daya manusia potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS) dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang berkualifikasi terampil dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial (%)	22.05	22.36	22.67	1.552.144.000	22.98	1.652.144.000	23.30	1.752.144.000	23.62	1.852.144.000	23.93	1.952.144.000	1.06.0.00.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL														
Meningkatnya pemenuhan layanan rehabilitasi sosial	Persentase PPKS yang terpulihkan fungsi sosialnya (%)	22.05	22.36	22.67	4.226.486.616	22.98	4.326.486.616	23.30	4.426.486.616	23.62	4.526.486.616	23.93	4.626.486.616	1.06.0.00.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL														
Meningkatnya kesejahteraan keluarga miskin/rentan yang mandiri	Persentase keluarga miskin/rentan yang keluar dari kategori miskin/rentan (%)	60	70	75	346.070.944	80	370.000.000	85	400.000.000	90	430.000.000	100	460.000.000	1.06.0.00.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
1.06.06 - PROGRAM PENANGANAN BENCANA														
Meningkatnya persentase korban bencana alam dan sosial pasca bencana yang mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan Dasar	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhannya Pasca Bencana (%)	100	100	100	1.948.100.000	100	2.000.000.000	100	2.100.000.000	100	2.200.000.000	100	2.300.000.000	1.06.0.00.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
		2024	2025	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1.06.07 - PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN														
Meningkatnya kualitas pengelolaan dan pemeliharaan Taman Makam Pahlawan sesuai standar	PERSENTASE MAKAM PAHLAWAN DALAM KONDISI BAIK (%)	100	100	100	72.800.000	100	100.000.000	100	150.000.000	100	200.000.000	100	250.000.000	1.06.0.00.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA														
2.07.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														
Meningkatnya Kelancaran Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan (Nilai)	100	100	100		100		100		100		100		2.17.3.32.2.07.01.0000 DINAS TENAGA KERJA,TRANSMIGRASI KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.07.02 - PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA														
Terciptanya keseimbangan antara kebutuhan dan ketersediaan tenaga Kerja	Persentase perusahaan yang menyusun rencana tenaga kerja (%)			9,75 %	157.317.000	14,63 %	171.317.000	19,51 %	191.317.000	24,39 %	211.317.000	29,26 %	231.317.000	2.17.3.32.2.07.01.0000 DINAS TENAGA KERJA,TRANSMIGRASI KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.07.03 - PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA														
Meningkatnya Kualitas Tenga Kerja	Persentase Pencari Kerja yang mendapatkan pekerjaan sesuai dengan pelatihan kompetensi yang diberikan (%)	49 %	65 %	75,58 %	2.200.000.000	78,13 %	2.500.000.000	79,86 %	2.800.000.000	81,25 %	3.100.000.000	85,22 %	3.400.000.000	2.17.3.32.2.07.01.0000 DINAS TENAGA KERJA,TRANSMIGRASI KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.07.04 - PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA														
Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja	Persentase Kebutuhan Kerja yang terpenuhi (%)		9,52 %	10.971 %	151.317.000	13,431 %	171.317.000	15,858 %	191.317.000	18,277 %	211.317.000	20,664 %	231.317.000	2.17.3.32.2.07.01.0000 DINAS TENAGA KERJA,TRANSMIGRASI KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.07.05 - PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL														
Terciptanya hubungan industrial yang harmonis	Persentase Tenaga Kerja yang Terlindungi Hak-haknya (%)	100%	100%	100%	115.763.000	100%	126.800.000	100%	126.800.000	100%	130.000.000	100%	135.000.000	2.17.3.32.2.07.01.0000 DINAS TENAGA KERJA,TRANSMIGRASI KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK														



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
		2024	2025	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
2.08.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														
Meningkatnya Kelancaran Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Layanan Keseekretariatan (Nilai)	0	0	85	10.000.000	90	50.000.000	95	75.000.000	95	120.000.000	95	165.000.000	2.08.2.14.2.13.01.0000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.02 - PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN														
Meningkatnya Pengarus Utamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase keterwakilan perempuan dalam jabatan pemerintahan dan organisasi kemasyarakatan (%)	50	50,2	50,4	-	50,6	80.000.000	50,8	120.000.000	60	175.000.000	60,2	210.000.000	2.08.2.14.2.13.01.0000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	Persentase Anggaran Responsif Gender (%)	1	1,2	1,3	-	1,5	100.000.000	1,7	150.000.000	1,8	200.000.000	2	250.000.000	2.08.2.14.2.13.01.0000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	Indeks Pembangunan Gender(IPG)		87,96	87,98	-	88	75.000.000	88,02	135.000.000	88,04	170.000.000	88,006	230.000.000	2.08.2.14.2.13.01.0000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	Indeks pemberdayaan Gender (IDG)		87,49	87,51	-	87,53	65.000.000.000	87,55	100.000.000	87,57	165.000.000	87,,59	24500000	2.08.2.14.2.13.01.0000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	Indeks Ketimpangan Gender(IKG)		0,4	0,39	-	0,38	80.000.000	0,0,37	120.000.000	0,36	160.000.000	0,36	220.000.000	2.08.2.14.2.13.01.0000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN														



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
		2024	2025	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya perlindungan Perempuan	Persentase kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Yang Ditangani (%)	90%	90%	90%	35.000.000	90%	100.000.000	90%	150.000.000	90%	200.000.000	90%	250.000.000	2.08.2.14.2.13.01.0000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.04 - PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA														
Meningkatnya kualitas dan layanan komprehensif bagi keluarga	Indeks Kualitas Keluarga (Indeks)	74	74,2	74,25	10.000.000	74,28	144.145.900	74,3	175.000.000	74,5	230.000.000	75	280.000.000	2.08.2.14.2.13.01.0000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.05 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK														
Meningkatnya Pemanfaatan Data Gender dan Anak	Persentase Instansi yang Berkontribusi dalam Penyusunan Data Gender dan Anak (%)	80	80	83	35.000.000	83	75.000.000	84	125.000.000	85	175.000.000	85	230.000.000	2.08.2.14.2.13.01.0000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.06 - PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)														
Meningkatnya pemenuhan hak anak	Persentase Desa Layak Anak (%)	0	50	55	40.000.000	58	140.000.000	60	185.000.000	63	240.000.000	65%	280.000.000	2.08.2.14.2.13.01.0000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.07 - PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK														
Meningkatnya Perlindungan Khusus Anak	Persentase Anak Korban Kekerasan yangditangani (%)		90	90	21.000.000	9	145.000.000	90	195.000.000	90	250.000.000	90	300.000.000	2.08.2.14.2.13.01.0000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	Indeks Perlindungan Anak(IPA)		63	63,2		63,4	150.000.000	63,8	200.000.000	64	250.000.000	64,3	300.000.000	2.08.2.14.2.13.01.0000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
		2024	2025	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN														
2.09.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN														
Meningkatnya Infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan	Jumlah Unit infrastruktur dalam mendukung kemandirian pangan (Unit)	7 Unit	7 Unit	7 Unit	182.000.000	7 Unit	200.200.000	7 Unit	220.220.000	7 Unit	242.242.000	8 Unit	226.466.200	2.09.3.27.3.25.01.0000 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
2.09.03 - PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT														
Meningkatnya Kemandirian Pangan	Skor PPH Ketersediaan (Nilai)	2.266,22 kalori	2.266,22 kalori	2.266,22 kalori	20.000.000	2.266,22 kalori	22.000.000	2.266,22 kalori	24.200.000	2.266,22 kalori	26.620.000	2.266,22 kalori	29.282.000	2.09.3.27.3.25.01.0000 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
Meningkatnya Pemanfaatan Pangan	Skor PPH Konsumsi (Nilai)	86,2	88,5	90,8	234.765.397	93,1	281.718.476	95,4	338.062.171	97,7	405.674.606	100	486.809.527	2.09.3.27.3.25.01.0000 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
2.09.04 - PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN														
Meningkatnya penanganan daerah rawan pangan	Persentase penurunan desa rentan pangan dan desa rawan pangan (%)	20,39%	20,39%	18,39%	80.445.000	16,39%	88.445.000	14,39%	97.289.500	12,39%	107.018.450	10,39%	117.720.295	2.09.3.27.3.25.01.0000 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
2.09.05 - PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN														
Meningkatnya keamanan dan mutu pangan segar	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi	50	70	75	48.234.500	80	96.469.000	85	115.762.800	90	138.915.360	95	166.698.432	2.09.3.27.3.25.01.0000 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN														
2.10.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														
Meningkatnya Kelancaran Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan (Nilai)	100	100	100		100		100		100		100		2.10.2.11.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
2.10.04 - PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN														
Meningkatnya Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Persentase Sengketa Tanah Garapan yang Terselesaikan (%)	100	100	100		100		100		100		100		2.10.2.11.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
		2024	2025	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
2.10.05 - PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN														
Meningkatnya Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan (%)	9,95	15	2 Keputusan	18.043.224.572	2 Keputusan	16.136.450.251	2 Keputusan	13.295.669.213	2 Keputusan	12.910.268.524	2 Keputusan	13.285.596.400	2.10.2.11.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
2.10.06 - PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE														
Meningkatnya Redistribusi Tanah, dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	Persentase Redistribusi Tanah Dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee (%)	70	80	1 Lap	117.405.000	1 Lap	117.405.000	1 Lap	201.910.000	1 Lap	117.405.000	1 Lap	117.405.000	2.10.2.11.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
2.10.09 - PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH														
Meningkatnya Pengelolaan Izin Membuka Tanah	Persentase Pengelolaan Izin Membuka Tanah (%)													2.10.2.11.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
2.10.10 - PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH														
Meningkatnya Penatagunaan Tanah	Persentase Penatagunaan Tanah (%)													2.10.2.11.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP														
2.11.02 - PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP														
Meningkatnya Efektivitas Kajian Lingkungan untuk Memitigasi Dampak Kebijakan/Rencana/Progra m (KRP)	Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang ditindaklanjuti (%)	100%	100%	100%	791.120.710	100%	909.788.817	100%	1.046.257.139	100%	1.203.195.710	100%	1.383.675.066	2.10.2.11.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.03 - PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP														
Meningkatnya Pengendalian Pencemaran/Kerusakan Lingkungan Hidup	Peningkatan Kualitas Air (Nilai)	52,03	72,29	72,49	2.672.405.000	72,69	3.073.265.750	72,89	3.534.255.613	73,09	4.064.393.954	73,29	4.674.053.048	2.10.2.11.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	Peningkatan Kualitas Udara (Nilai)	87,7	79,82	80,12		80,42		80,72		81,02		81,32		2.10.2.11.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
		2024	2025	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Peningkatan Kualitas Lahan (Nilai)	84,73	84,53	84,6		84,67		84,73		84,8		84,87		2.10.2.11.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.04 - PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)														
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Indeks)	100%	100%	100%	467.567.200	100%	537.702.280	100%	618.357.622	100%	711.111.265	100%	817.777.955	2.10.2.11.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.05 - PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)														
Meningkatnya Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase Limbah B3 yang Terkelola (%)	100%	100%	100%	62.478.000	100%	71.849.700	100%	82.627.155	100%	95.021.228	100%	109.274.412	2.10.2.11.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)														
Meningkatnya Ketaatan Pelaku Usaha/Kegiatan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase pelaku usaha/kegiatan yang taat terhadap ijin lingkungan (%)	100%		100%	368.906.000	100%	424.241.900	100%	487.878.185	100%	561.059.913	100%	645.218.900	2.10.2.11.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.07 - PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH														
Meningkatnya Kapasitas Masyarakat Hukum Adat (MHA) Terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase MHA yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Persentase)	100%	100%	100%	284.672.000	100%	327.372.800	100%	376.478.720	100%	432.950.528	100%	497.893.107	2.10.2.11.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.08 - PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT														



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
		2024	2025	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya Kapasitas Pendidikan, Pelatihan dan Peyuluhan Lingkungan Hidup	Persentase Peningkatan Pendidikan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup	100%	100%	100%	279.952.000	100%	321.944.800	100%	370.236.520	100%	425.771.998	100%	489.637.798	2.10.2.11.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.09 - PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT														
Meningkatnya Kinerja Pemangku Kepentingan dalam Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)	Jumlah Penghargaan Lingkungan Hidup yang diterima (Angka)	0	0	0	20.000.000	0	23.000.000	1	26.450.000	1	30.417.500	1	34.980.125	2.10.2.11.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.10 - PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP														
Meningkatnya Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup Sesuai Standar	Persentase Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup (%)	100%	100%	100%	240.227.900	100%	276.262.085	100%	317.701.398	100%	365.356.607	100%	420.160.099	2.10.2.11.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.11 - PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN														
Meningkatnya Pengelolaan Persampahan	Persentase Pengurangan Sampah (%)	30%	30%	31,2%	10.602.770.000	31,7%	12.193.185.500	32,1%	14.022.163.325	32,6%	16.125.487.824	33,1%	18.544.310.997	2.10.2.11.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	Persentase Penanganan Sampah (%)	70%	70%	68,8%		68,3%		67,9%		67,4%		66,9%		2.10.2.11.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL														
2.12.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														
Meningkatnya Kelancaran Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (Nilai)	86,48	87	87,5	8.604.827.134	88	9.465.309.847	88,5	9.713.924.758	89	10411 840832	89,5	11453 024915	2.12.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.02 - PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK														
Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk	Persentase Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk (%)	56,96	64,5	67	554.399.536	69,5	609.839.490	71,5	670.823.439	74,5	737.905.782	78,5	81169636	2.12.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.03 - PROGRAM PENCATATAN SIPIL														
Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil	Persentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil (%)	77	84	84,6	362.362.500	85,14	398.598.750	85,88	438.458.625	86,6	482.304.486	87,3	5.305.349.363,00	2.12.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	Persentase Kepemilikan Akta Kematian (%)													2.12.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
		2024	2025	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Persentase Kepemilikan Akta Perkawinan (%)													2.12.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	Persentase Kepemilikan Akta Perceraian (%)													2.12.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.04 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN														
Meningkatnya Kualitas Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase OPD yang Memanfaatkan Data Kependudukan melalui PKS dan hak akses (%)	27,78	75	50	40.000.000	55	440.000.000	60	484.000.000	65	532.400.000	70	585.640.000	2.12.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	Persentase data anomali yang diturunkan (data ganda) (%)													2.12.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.05 - PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN														
Meningkatnya Pengelolaan profil kependudukan	Ketersediaan data profil kependudukan sesuai standard (Dokumen)	2	2	2	45.000.000	2	49.500.000	2	54.450.000	2	59.895.000	2	65.884.500	2.12.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA														
2.13.02 - PROGRAM PENATAAN DESA														
Meningkatnya penataan desa	Persentase Desa yang Tertata Dengan Baik (%)	8.60	9.67	10.75	90.000.000	11.83	100.000.000	12.90	110.000.000	13.98	120.000.000	15.05	130.000.000	2.08.2.14.2.13.01.0000 DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.03 - PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA														
Meningkatnya kualitas kerjasama desa	Persentase Desa Yang Aktif Melakukan Kerjasama (%)	8.60	9.67	10.75	100.000.000	11.83	150.000.000	12.90	200.000.000	13.98	250.000.000	15.05	300.000.000	2.08.2.14.2.13.01.0000 DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.04 - PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA														
Meningkatnya Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang tertib, transparan, dan akuntabel dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa (%)	8.60	9.67	10.75	844.303.728	11.83	887.303.728	12.90	930.303.728	13.98	973.303.728	15.05	1.016.303.728	2.08.2.14.2.13.01.0000 DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN														



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
		2024	2025	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
MASYARAKAT HUKUM ADAT														
Meningkatnya Pemberdayaan Kelembagaan Desa dan Lembaga Adat Desa	Persentase Pemberdayaan Kelembagaan Desa (%)	8.60	9.67	10.75	8.210.000.000	11.83	8.620.500.000	12.90	9.030.500.000	13.98	9.440.500.000	15.05	9.850.500.000	2.08.2.14.2.13.01.0000 DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA														
2.14.02 - PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK														
Menurunnya kelahiran remaja	Angka Kelahiran remaja usia 15 - 19 tahun (ASFR) (Angka)	44,2			-		90.000.000		145.000.000		200.000.000		250.000.000	2.08.2.14.2.13.01.0000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUAN ANAK
Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk	Total Ferlility Rate (TFR)	2,22			20.000.000		150.000.000		200.000.000		275.000.000		350.000.000	2.08.2.14.2.13.01.0000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUAN ANAK
	Persentase Kampung Keluarga Berkualitas Mandiri / Berkelanjutan	0	6,4	7,04	35.000.000	7,74	75.000.000	8,52	145.000.000	9,37	200.000.000	10,13	250.000.000	2.08.2.14.2.13.01.0000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUAN ANAK
2.14.03 - PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)														
Meningkatnya Contraceptive Prevalence Rate	Persentase Contraceptive Prevalence Rate (CPR) (%)		73,77	74,86	25.000.000	75,98	125.000.000	77,11	175.000.000	78,26	230.000.000	79.43	275.000.000	2.08.2.14.2.13.01.0000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUAN ANAK
	Proporsi Kebutuhan KB yang Terpenuhi menurut Alat / Cara KB Modern (Demand Satisfied)	66,4	67,72	69,08	10.000.000	70,46	100.000.000	71,87	150.000.000	73,31	200.000.000	74,56	250.000.000	2.08.2.14.2.13.01.0000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUAN ANAK
2.14.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)														



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
		2024	2025	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya pembangunan keluarga	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	64,27	65,55	66,86	45.000.000	68,2	150.000.000	69,56	190.000.000	70,95	245.000.000	72	2.960.000.000	2.08.2.14.2.13.01.0000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUAN ANAK
	Prevalensi Stunting	20,4	16,2	15,39	108.000.000	14,62	300.000.000	13,88	300.000.000	13,19	300.000.000	13,12	300.000.000	2.08.2.14.2.13.01.0000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUAN ANAK
	Indeks Lansia Berdaya	50,3	0		25.000.000		75.000.000.000		120.000.000		175.000.000		230.000.000	2.08.2.14.2.13.01.0000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUAN ANAK
	Indeks Pengasuhan Keluarga yang Memiliki Remaja	65,9	0		25.000.000		65.000.000		100.000.000		150.000.000		175.000.000	2.08.2.14.2.13.01.0000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUAN ANAK
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN														
2.15.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														
Meningkatnya Kelancaran Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah	Meningkatnya penyelenggaraan penunjang urusan pemerintahan (%)	76,28 %	78,19 %	80,14 %	13.758.562.697	82 %	15.134.420.000	83 %	16.510.300.000	84 %	17.880.000.000	85 %	19.250.000.000	2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)														
Meningkatnya Ketersediaan layanan moda transportasi pada wilayah Kabupaten Balangan	Jumlah penumpang angkutan umum Terminal (orang)	4.858	4.979	5.104	417.080.700	5.200	350.000.000	5.300	400.000.000	5.400	400.000.000	5.500	400.000.000	2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN
	Jumlah uji kir angkutan umum (unit)	871	893	915	508.440.000	920	400.000.000	930	450.000.000	950	450.000.000	1.000	500.000.000	2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN
2.15.03. Program Pengelolaan Pelayaran														
	Jumlah Orang Melalui Dermaga	76.903	78.826	80.796	229.455.500	80.900	230.000.000	81.000	250.000.000	81.100	250.000.000	81.500	250.000.000	2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN
2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA														



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
		2024	2025	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
2.16.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														
Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan (Nilai)			100 %	300.000.000	100 %	350.000.000	100 %	400.000.000	100 %	450.000.000	100 %	500.000.000	2.16.2.20.2.21.01.0000 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2.16.02 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK														
Meningkatnya kepatuhan badan publik dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik	Persentase Badan Publik yang Informatif (%)			100%	300.000.000	100 %	350.000.000	100 %	400.000.000	100 %	450.000.000	100 %	500.000.000	2.16.2.20.2.21.01.0000 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA														
Meningkatnya Layanan Pemerintahan Berbasis Elektronik	Persentase Kematangan Layanan Pemerintah Berbasis Elektronik (%)	100 %	100 %	100 %	500.000.000	100 %	500.000.000	100 %	500.000.000	100 %	500.000.000	100 %	500.000.000	2.16.2.20.2.21.01.0000 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH														
2.17.03 - PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI														
Meningkatnya Koperasi Aktif	Presentase Koperasi Aktif (%)	246	246	342		342		342		342		342		2.17.3.32.2.07.01.0000 DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.17.05 - PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN														
Meingkatnya Kompetensi SDM Koperasi	Persentase Koperasi dengan SDM yang Kompeten (%)	100	125	130		130		130		130		130		2.17.3.32.2.07.01.0000 DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.17.06 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI														
Meningkatnya daya saing dan ketahanan Koperasi	Persentase Sisa Hasil Usaha (SHU) koperasi yang meningkat (%)	58	60	63		64		65		66		67		2.17.3.32.2.07.01.0000 DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.17.07 - PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)														



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
		2024	2025	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya UMKM yang memiliki legalitas usaha	Persentase Usaha mikro yang memenuhi kualifikasi standar kompetensi usaha (%)	2,80%	3%	3,50%		4%		4,70%		5,30%		5,90%		2.17.3.32.2.07.01.0000 DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.17.08 - PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM														
Meningkatnya Omset Usaha Mikro	Persentase usaha mikro yang omset usahanya meningkat (%)			5%		6%		7%		8%		9%		2.17.3.32.2.07.01.0000 DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL														
2.18.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														
Meningkatnya Kelancaran Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan (Nilai)	-	-	-	6.196.468.500	90	8.055.409.050	90	10.472.031.765	90	13.613.641.295	90	17.697.733.683	2.18.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL														
Meningkatnya Investasi Iklim	Nilai Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha (PPB) (Nilai)	BAIK	BAIK	BAIK	320.000.000	BAIK	416.000.000	BAIK	540.800.000	BAIK	703.040.000	BAIK	913.952.000	2.18.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.03 - PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL														
Meningkatnya Minat Investasi	Nilai Rencana Investasi Sektor Non Pertambangan (Nilai)	1.530.220.020.784	1.990.000.000	374.250.000	385.000.000	1.500.000.000.000	500.500.000	1.700.000.000.000	650.650.000	1.800.000.000.000	845.845.000	1.900.000.000.000	1.099.598.500	2.18.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.04 - PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL														
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal	Hasil Penilaian Mandiri Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Percepatan Pelaksanaan Berusaha (PBB) (Nilai)	BAIK	BAIK	BAIK	225.000.000	BAIK	292.500.000	BAIK	380.250.000	BAIK	494.325.000	BAIK	642.622.500	2.18.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	Mutu Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal (Nilai)	0 Pengaduan	5 Pengaduan	5 Pengaduan	66.550.000	20 Pengaduan	150.000.000	20 Pengaduan	195.000.000	20 Pengaduan	253.500.000	20 Pengaduan	329.550.000	2.18.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL														

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
		2024	2025	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya Kepatuhan Penyampaian LKPM	Persentase Pelaku Usaha yang menyampaikan LKPM (%)	64,08 (157 investor)	100 (245 investor)	100 (245 investor)	553.000.000	100 (370 investor)	718.900.000	100 (380 investor)	934.570.000	100 (390 investor)	1.214.941.000	100 (400 investor)	1.579.423.300	2.18.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL														
Meningkatnya Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase pemenuhan data dan informasi Penanaman Modal (%)	90	90	90	30.000.000	91	39.000.000	91	50.700.000	91	65.910.000		85.683.000	2.18.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA														
2.19.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														
Meningkatnya Kelancaran Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan	88	90	94	13.800	95	15.180	96	16.698	96	18.368	97	20.024	2.19.3.26.0.00.01.0000 DINAS KEBUDAYAAN KEPEMUDAAN PRAWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2.19.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN														
Meningkatnya Partisipasi Pemuda dalam Perekonomian	Rasio Wirausaha Pemuda (Persentase)	0	0	60	1.430	62	1.573	65	1.730	68	1.903	70	2.093	2.19.3.26.0.00.01.0000 DINAS KEBUDAYAAN KEPEMUDAAN PRAWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2.19.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN														
Meningkatnya Pembudayaan dan Prestasi Olahraga	Jumlah prestasi olahraga	8 Cabor	10 Cabor	8 Cabor	14.200	8 Cabor	15.620	9 Cabor	17.182	10 Cabor	18.900	10 Cabor	20.790	2.19.3.26.0.00.01.0000 DINAS KEBUDAYAAN KEPEMUDAAN PRAWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2.19.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN														
Meningkatnya Partisipasi Organisasi Kepramukaan	Persentase organisasi kepramukaan yang aktif (%)	100	100	100		100		100		100		100		2.19.3.26.0.00.01.0000 DINAS KEBUDAYAAN KEPEMUDAAN PRAWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK														



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
		2024	2025	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
2.20.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL														
Meningkatnya Akses Data Sektoral	Persentase Data Sektoral Yang Terpublikasikan dalam Portal data Daerah sebagai Upaya Mendukung Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah (%)	100	100	100		100		100		100		100		2.16.2.20.2.21.01.0000 BADAN PUSAT STATISTIK
2.21 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN														
2.21.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI														
Meningkatnya Penyelesaian Gangguan Keamanan Informasi	Persentase Gangguan yang Terselesaikan (%)	315.008.000	1.562.336.000	100 %	1.640.452.800	100 %	1.722.475.440	100 %	1.808.599.212	100 %	1.899.029.173	100 %	1.993.980.631	2.16.2.20.2.21.01.0000 DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN														
2.22.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN														
Meningkatnya ragam tradisi budaya daerah yang diaktualisasikan	Persentase pengembangan kebudayaan daerah	60	62	65	4.500	67	4.950	70	5.445	72	5.989	75	6.588	1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS KEBUDAYAAN KEPEMUDAAN PRAWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2.22.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL														
Meningkatnya ragam seni budaya daerah yang diaktualisasikan	Jumlah pelestarian kesenian tradisional	3	4	4	525	4	578	4	635	4	699	4	769	1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS KEBUDAYAAN KEPEMUDAAN PRAWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2.22.04 - PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH														
Meningkatnya pelestarian sejarah lokal	Persentase sejarah lokal yang dilestarikan (%)	100	100	100		100		100		100		100		1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS KEBUDAYAAN KEPEMUDAAN PRAWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2.22.05 - PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA														
Meningkatnya objek warisan budaya yang dilestarikan	Jumlah pelestarian cagar budaya	3 CB	3 CB	3 CB	475	3 CB	523	4 CB	575	4 CB	633	5 CB	696	1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS KEBUDAYAAN KEPEMUDAAN PRAWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
		2024	2025	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
2.22.06 - PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN														
Meningkatnya pengelolaan museum	Persentase koleksi museum yang dikelola (%)	0	0	50	250	52	275	54	303	56	334	58	368	1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS KEBUDAYAAN KEPEMUDAAN PRAWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN		9.730.455.743	13.844.924.100											
2.23.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		8.438.006.503	11.286.407.300		14.301.744.440		14.587.779.328		14.879.534.915		15.177.125.613		15.480.668.125	
Meningkatnya Kelancaran Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan (Nilai)	0	50	50		55		60		65		70		2.23.2.24.0.00.01.0000 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
Meningkatnya nilai hasil evaluasi AKIP Dinas	Nilai Evaluasi AKIP	65.45	65.45	67		68.5		70		71.5		73		
2.23.02 - PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN		1.292.449.240	1.723.308.600		16.794.477.334		1.631.463.512		1.664.092.782		1.697.374.638		1.731.322.131	
Meningkatnya Layanan Perpustakaan Sesuai Standar Perpustakaan	Persentase ketermanfaatan perpustakaan oleh masyarakat	0.1	0.1	0.05		75		0.1		125		150		2.23.2.24.0.00.01.0000 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
Meningkatnya ketercukupan koleksi perpustakaan standar nasional perpustakaan	Jumlah koleksi perpustakaan (eks)	0	0	250		250		250		300		300		
Meningkatnya Perpustakaan SDM sesuai dengan SNP	Jumlah tenaga perpustakaan yang mengikuti bimtek/diklat perpustakaan	0	0	15		20		25		30		35		
2.23.03 - PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO		0	0		680.901.023		694.519.043		708.409.424		722.577.612		737.029.165	
Meningkatnya Peran Serta Masyarakat Dalam Kegemaran Membaca	Jumlah Naskah Kuno yang Dilestarikan	0	0	1		1		1		1		1		2.23.2.24.0.00.01.0000 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2.24 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN														
2.24.02 - PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP		580.346.669	617.597.300		648.477.165		680.901.023		714.946.074		750.693.378		788.228.047	
Terkelolanya Arsip Daerah Dengan Baik	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal SKPD (Nilai)	56	56	40		42.5		45		47.5		50		2.23.2.24.0.00.01.0000 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2.24.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP		80.647.778	217.610.900		239.916.017		244.714.337		249.608.624		254.600.796		259.692.812	
Optimalnya Penyelamatan dan Perlindungan Arsip Perangkat Daerah	Jumlah arsip yang diselamatkan	0	0	1		1		1		1		1		2.23.2.24.0.00.01.0000 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
		2024	2025	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN														
3.25.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP														
Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	1.098,60	1.098,80	1.098,90	Rp 58000000	1.099	Rp 59000000	1.099,10	Rp 60000000	1.099,20	Rp 61000000	1.099,30	Rp62000000	2.09.3.27.3.25.01.0000 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	Jumlah sarana dan prasarana Perikanan Tangkap yang terjamin dan tersedia (Unit)	15	20	25	Rp 262000000	27	Rp 265000000	29	Rp 270000000	31	Rp 280000000	34	Rp 300000000	2.09.3.27.3.25.01.0000 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
3.25.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA														
Meningkatnya Produksi Perikanan budidaya	Produksi Perikanan budidaya (Ton)	8.740	8.968,04	9.018,04	Rp 3049606000	9.108,24	Rp 3800000000	9.199,30	Rp 4100000000	9.291,31	Rp 4 500000000	9.384,22	Rp 5000000000	2.09.3.27.3.25.01.0000 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
3.25.05 - PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN														
Meningkatnya Pengawasan Kawasan Perikanan dan Ketersediaan Sumber Daya Ikan Perairan Umum	Peningkatan kepatuhan Pelaku Usaha Perikanan (Kelompok)	40	45	50	Rp 25000000	55	Rp 30000000	60	Rp 40000000	65	Rp 45000000	70	Rp 50000000	2.09.3.27.3.25.01.0000 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	Jumlah Pelaksanaan Pengawasan Kegiatan Perikanan (Kali)	4	4	4	Rp 50000000	6	Rp 55000000	8	Rp 60000000	10	Rp 65000000	12	Rp 70000000	2.09.3.27.3.25.01.0000 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	Jumlah Kegiatan Restocking Ikan (Kali)	4	5	6	Rp 100000000	8	Rp 120000000	9	Rp 130000000	10	Rp 140000000	12	Rp 150000000	2.09.3.27.3.25.01.0000 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
3.25.06 - PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN														
Meningkatnya Produk Pengolahan Hasil Perikanan dan Konsusi Ikan	Jumlah Produk olahan hasil perikanan (Ton)	40	41	42	Rp 100000000	43	Rp 120000000	44	Rp 130000000	45	Rp 140000000	46	Rp 150000000	2.09.3.27.3.25.01.0000 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA														
3.26.02 - PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA														
Meningkatnya Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Jumlah Destinasi Wisata yang memenuhi Sapta Pesona	3 Objek	3 Objek	3 Objek	4.800	3 Objek	5.280	3 Objek	5.808	3 Objek	6.339	3 Objek	7.028	2.19.3.26.0.00.01.0000 DINAS KEBUDAYAAN, PRAWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
		2024	2025	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
3.26.03 - PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA														
Meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata	Persentase Kunjungan Wisata	80,6	90	85	910	88	1.001	90	1.101	92	1.211	95	1.332	2.19.3.26.0.00.01.0000 DINAS KEBUDAYAAN, PRAWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
3.26.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL														
Meningkatnya kualitas ekosistem ekonomi kreatif	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang memiliki Kekayaan intelektual (%)		10	15		20		25		30		35		2.19.3.26.0.00.01.0000 DINAS KEBUDAYAAN, PRAWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
3.26.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF														
Meningkatnya kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif	0	0	50	125	52	138	55	152	57	167	58	184	2.19.3.26.0.00.01.0000 DINAS KEBUDAYAAN, PRAWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN														
3.27.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					34.047.216.769		3.915.429.928.435		3.993.738.527.004		4.193.425.453.354		4.361.162.471.488	
Meningkatnya Kelancaran Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Layanan Keskretariatan (Nilai)	95	98	98	7.850.000.000	98	7.850.000.000	98	7.850.000.000	98	7.850.000.000	98	7.850.000.000	2.09.3.27.3.25.01.0000 DINAS PERTANIAN
3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN					6.240.000.000		9.048.000.000		9.771.840.000		11.628.489.600		11.977.344.288	
Meningkatnya Produktifitas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan	Produktivitas Padi (Ton)	30.024	30.315	31.812	800.000.000	32.875	850.000.000	33.254	900.000.000	33.720	950.000.000	34.117	1.000.000.000	2.09.3.27.3.25.01.0000 DINAS PERTANIAN
	Produktivitas Jagung (Ton)	22.756	23.057	23.507	3.000.000.000	23.957	3.500.000.000	24.182	4.000.000.000	24.332	4.500.000.000	24.407	5.000.000.000	2.09.3.27.3.25.01.0000 DINAS PERTANIAN
	Produktivitas Cabai (Ton)	4	3	4	90.000.000	6	120.000.000	7	150.000.000	7	180.000.000	8	210.000.000	2.09.3.27.3.25.01.0000 DINAS PERTANIAN
	Produktivitas Karet (Ton)	37.759	37.850.00	38.607	1.703.750	39.379	1.737.825	40.167	17.725.815	41.372	180.803.313	43.440	184.419.379	2.09.3.27.3.25.01.0000 DINAS PERTANIAN
	Produktivitas Sawit (Ton)	8.271	1.470	1.499	17.568.000	8.761	17.919.360	13.440	182.777.472	13.843	1.864.330.214	14.535	1.906.116.819	2.09.3.27.3.25.01.0000 DINAS PERTANIAN
	Produktivitas Kopi (Ton)	7	8	8	1.240.350	8	1.260.837	8	12.937.374	8	131.096.121	9	134.060.044	2.09.3.27.3.25.01.0000 DINAS PERTANIAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
		2024	2025	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Produksi Kakao (Ton)	1.447	1.470	1.499.40	170.679.401	1.529	174.092.998	1.560	177.574.858	1.607	181.126.355	1.687	187.448.882	2.09.3.27.3.25.01.0000 DINAS PERTANIAN
	Produksi Kelapa Dalam (Ton)	107	108	110	1.150.000	112	117.300.000	115	119.646.000	118	12.203.892	124	124.479.698	2.09.3.27.3.25.01.0000 DINAS PERTANIAN
	Populasi Ternak Itik (Ekor)	7.259	7.404	7.552	100.000.000	7.703	110.000.000	7.857	120.000.000	8.014	15.000.000	8.147	155.000.000	2.09.3.27.3.25.01.0000 DINAS PERTANIAN
	Populasi Ayam Buras (Ekor)	228.494	233.063	237.742	250.000.000	242.496	280.000.000	247.345	300.000.000	252.291	320.000.000	257.336	350.000.000	2.09.3.27.3.25.01.0000 DINAS PERTANIAN
	Populasi Kambing (Ekor)	2.954	3.027	3.087	400.000.000	3.164	500.000.000	3.243	550.000.000	3.324	600.000.000	3.407	700.000.000	2.09.3.27.3.25.01.0000 DINAS PERTANIAN
	Populasi Kerbau (Ekor)	42	24	26	250.000.000	28	300.000.000	30	350.000.000	32	3.800.000.000	34	400.000.000	2.09.3.27.3.25.01.0000 DINAS PERTANIAN
	Populasi Sapi Potong (Ekor)	3.617	3.743	3.874	1.500.000.000	4.009	2.000.000.000	4.149	35.000.000.000	4.294	4.250.000.000	4.444	5.000.000.000	2.09.3.27.3.25.01.0000 DINAS PERTANIAN
3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN					66.464.420.572		69.787.641.600		73.277.023.680		74.742.564.154		76.237.415.437	
Tersedianya dan berkembangnya infrastruktur yang mendukung kegiatan pertanian, yang tercermin dari meningkatnya rasio ketersediaan prasarana pertanian dan peningkatan cakupan pemenuhan prasarana	Jumlah Prasarana Pertanian yang terpenuhi (Unit)	82	85	164	65.000.000.000	170	67.000.000.000	175	69.000.000.000	177	70.000.000.000	180	72.000.000.000	2.09.3.27.3.25.01.0000 DINAS PERTANIAN
	Jumlah Peningkatan Lahan Pertanian berkelanjutan yang dikelola (Unit)	1.534	2.505	1.534	65.000.000.000	1.704	67.000.000.000	1.879	69.000.000.000	2.056	70.000.000.000	2.236	72.000.000.000	2.09.3.27.3.25.01.0000 DINAS PERTANIAN
3.27.04 - PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER					354.851.375		372.593.943		402.401.459		438.617.590		460.548.470	
peningkatan keamanan pangan dari produk hewan, pengendalian dan pencegahan penyakit zoonosis, peningkatan kesejahteraan hewan, serta peningkatan pelayanan kesehatan hewan dan sanitasi	Jumlah kasus penyakit hewan menular strategis yang ditanggulangi	3.000	3.000	3.020	239.896.000	3.040	289.674.420	3.060	304.158.141	3.080	32.544.921.087	3.100	35.473.963.985	2.09.3.27.3.25.01.0000 DINAS PERTANIAN
3.27.05 - PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN					1.790.000.000		2.040.600.000		2.183.442.000		2.379.951.780		2.617.946.958	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
		2024	2025	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Terciptanya ketahanan dan keberlanjutan sistem pertanian melalui upaya pencegahan, penanganan darurat, dan pemulihan pascabencana	Jumlah Luasan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (Ha)	400	400	400	205.504.000	450	22.810.944.000	475	25.548.257.200	500	306.579.087	525	34.336.857.700	2.09.3.27.3.25.01.0000 DINAS PERTANIAN
	Jumlah Luasan Pengendalian Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	400	400	400	216.320.000	450	24.011.520.000	475	27.373.132.800	500	30.626.565.300	525	3.082.650.000	2.09.3.27.3.25.01.0000 DINAS PERTANIAN
	Jumlah Luasan Pengendalian Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (Ha)	400	400	400	216.320	450	24.011.520.000	475	27.373.132.800	500	30.626.565.300	525	3.082.650.000	2.09.3.27.3.25.01.0000 DINAS PERTANIAN
3.27.06 - PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN					660.000.000		695.000.000		720.000.000		750.000.000		780.000.000	
Terfasilitasinya pelaku usaha untuk mendapatkan izin, peningkatan kepatuhan dan keberlanjutan usaha, serta terjaminnya kualitas dan keamanan produk pertanian	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Perimbangan Teknis Usaha Pertanian (Dokumen)	1	1	1	270.400.000	1	285.000.000	1	290.000.000	1	315.000.000	1	350.000.000	2.09.3.27.3.25.01.0000 DINAS PERTANIAN
3.27.07 - PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN					1.190.000.000		1.225.700.000		1.262.471.000		1.325.594.550		1.378.618.332	
Meningkatnya Sarana Penyuluhan Pertanian	Persentase Kelembagaan Penyuluh Yang Terfasilitasi (%)	6 Unit	6 Unit	6 Unit	432.640.000	6 Unit	450.000.000	6 Unit	450.000.000	6 Unit	470.000.000	6 Unit	480.000.000	2.09.3.27.3.25.01.0000 DINAS PERTANIAN
3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN														
3.31.01 – PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		86,92 %	Rp. 15.960.283.470	80 %	Rp 11627303689	81 %	Rp 11627303689	82 %	Rp 11627303689	83 %	Rp 11627303689	84 %	Rp 11627303689	
Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan (Nilai)	86,92 %	Rp. 15.960.283.470	80	Rp 11627303689	81	Rp 11627303689	82	Rp 11627303689	83	Rp 11627303689	84	Rp 11627303689	
3.30.02 - PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN				80 %	Rp 20000000	81 %	Rp 20000000	82 %	Rp 20000000	83 %	Rp 20000000	84 %	Rp 20000000	
Meningkatnya Tertib Sektor Perijinan Perdagangan	PERSENTASE PELAKU USAHA PERDAGANGAN YANG MEMPEROLEH IZIN SESUAI DENGAN KETENTUAN (%) (%)			80 %	Rp 10000000	81 %	Rp 10000000	82 %	Rp 10000000	83 %	Rp 10000000	84 %	Rp 10000000	3.31.3.30.0.00.01.0000 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
		2024	2025	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya Pengawasan Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, dan Pelabelan Bahan Berbahaya	PERSENTASE JUMLAH KEGIATAN PENGENDALIAN FASILITAS PENYIMPANAN BAHAN BERBAHAYA DAN PENGAWASAN DISTRIBUSI, PENGEMASAN DAN PELABELAN BAHAN BERBAHAYA DILAKSANAKAN (%)													3.31.3.30.0.00.01.0000 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
3.30.03 - PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN		97,02%	Rp. 3.144.758.480	80 %	Rp 20000000	81 %	Rp 20000000	82 %	Rp 20000000	83 %	Rp 20000000	84 %	Rp 20000000	
Meningkatnya Sarana Prasarana Perdagangan dalam Kondisi Baik	Persentase Pasar Di Kabupaten Barito Utara Yang Memenuhi Standar Kelayakan Pasar (%)	97,02%	Rp. 3.144.758.480	80 %	Rp 20000000	81 %	Rp 20000000	82 %	Rp 20000000	83 %	Rp 20000000	84 %	Rp 20000000	3.31.3.30.0.00.01.0000 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
3.30.04 - PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING		91,88 %	Rp. 4.782.051.000	80 %	Rp 672625000	81 %	Rp 672625000	82 %	Rp 672625000	83 %	Rp 672625000	84 %	Rp 672625000	
Meningkatnya Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Koefisien variasi harga barang kebutuhan pokok antar waktu (%)	91,88 %	Rp. 4.782.051.000	80 %	Rp 672625000	81 %	Rp 672625000	82 %	Rp 672625000	83 %	Rp 672625000	84 %	Rp 672625000	3.31.3.30.0.00.01.0000 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
3.30.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR		91,36 %	Rp. 1.110.786.750	80 %	Rp 1065000000	81 %	Rp 1065000000	82 %	Rp 1065000000	83 %	Rp 1065000000	84 %	Rp 1065000000	
Meningkatnya Cakupan Promosi Perdagangan	Cakupan Promosi Perdagangan Dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan (%) (%)	91,36 %	Rp. 1.110.786.750	80 %	Rp 1065000000	81 %	Rp 1065000000	82 %	Rp 1065000000	83 %	Rp 1065000000	84 %	Rp 1065000000	3.31.3.30.0.00.01.0000 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
3.30.06 - PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN		92,20 %	Rp. 231.128.350	80 %	Rp 40000000	81 %	Rp 40000000	82 %	Rp 40000000	83 %	Rp 40000000	84 %	Rp 40000000	
Meningkatnya Tertib Ukur	PERSENTASE JUMLAH KEGIATAN METROLOGI LEGAL DILAKSANAKAN (%)	92,20 %	Rp. 231.128.350	80 %	Rp 40000000	81 %	Rp 40000000	82 %	Rp 40000000	83 %	Rp 40000000	84 %	Rp 40000000	3.31.3.30.0.00.01.0000 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN														
3.31.02 - PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI		76,90 %	Rp. 661.926.550	80 %	Rp 60000000	81 %	Rp 60000000	82 %	Rp 60000000	83 %	Rp 60000000	84 %	Rp 60000000	
Meningkatnya Penerapan Teknologi pada IKM	PERSENTASE IKM YANG MENERAPKAN TEKNOLOGI INDUSTRI (%)	76,90 %	Rp. 661.926.550	80 %	Rp 60000000	81 %	Rp 60000000	82 %	Rp 60000000	83 %	Rp 60000000	84 %	Rp 60000000	3.31.3.30.0.00.01.0000 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
3.31.03 - PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI				80 %	Rp 30000000	81 %	Rp 30000000	82 %	Rp 30000000	83 %	Rp 30000000	84 %	Rp 30000000	
Meningkatnya kepatuhan pelaporan industri	PERSENTASE IKM YANG TERTIB LAPORAN (%)			80 %	Rp 30000000	81 %	Rp 30000000	82 %	Rp 30000000	83 %	Rp 30000000	84 %	Rp 30000000	3.31.3.30.0.00.01.0000 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
3.32 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI														
3.32.03 - PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI														

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
			2026		2027		2028		2029		2030			
		2024	2025	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET		PAGU
Meningkatnya SDM di lokasi Transmigrasi	persentase jumlah permukiman yang layak huni (%)		140.900.000	100%	112.500.000	100%	123.750.000	100%	136.125.000	100%	149.757.500	100%	164.711.250	2.17.3.32.2.07.01.0000 DINAS TENAGA KERJA,TRANSMIGRASI KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
3.32.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI														
Meningkatnya Sarana Prasarana Pendukung Untuk Transmigrasi	Persentase jumlah warga yang layak usaha (%)		40.000.000	100%	37.500.000	100%	41.250.000	100%	45.375.000	100%	49.912.500	100%	54.903.750	2.17.3.32.2.07.01.0000 DINAS TENAGA KERJA,TRANSMIGRASI KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
4.01 - SEKRETARIAT DAERAH														
4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														
	Indek Reformasi Birokrasi			B (60,01)	69.860.268.515	B (61)	71.606.775.228	B (61)	73.396.944.609	B (61)	75.231.868.224	B (65)	77112664929	4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH
	Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	B (63,74)	B (63,85)	B (63,90)		B (64)		B (65)		B (68)		BB (71)		4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH
	Mutu Pelayanan terhadap Kepuasan Masyarakat	B (77,00)	B (77,00)	B (78)		B (79)		B (80)		B (81)		B (82)		4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan			1 Tahun	40.740.000	1 Tahun	41.758.500	1 Tahun	42.802.463	1 Tahun	43.872.524	1 Tahun	44969337	Bagian Umum Setda
Koordinasi dan Penyusunan RKA-SKPD	Terlaksananya Penyusunan RKA-SKPD			1 Dok	10.185.000	1 Dok	10.439.625	1 Dok	10.700.616	1 Dok	10.968.131	1 Dok	11242334	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Terlaksananya Penyusunan RKA-SKPD Perubahan			1 Dok	10.185.000	1 Dok	10.439.625	1 Dok	10.700.616	1 Dok	10.968.131	1 Dok	11242334	
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Terlaksananya Penyusunan DPA-SKPD			1 Dok	10.185.000	1 Dok	10.439.625	1 Dok	10.700.616	1 Dok	10.968.131	1 Dok	11242334	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Terlaksananya Penyusunan DPA-SKPD Perubahan			1 Dok	10.185.000	1 Dok	10.439.625	1 Dok	10.700.616	1 Dok	10.968.131	6	11242334	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan			1 Tahun	23.195.929.097	1 Tahun	23.775.827.324	1 Tahun	24.370.223.008	1 Tahun	24.979.478.583	1 Tahun	25603965547	Bagian Umum Setda
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya SPP-SPM, untuk Gaji dan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP)			1 Dok	21.030.086.597	1 Dok	21.555.838.762	1 Dok	22.094.734.731	1 Dok	22.647.103.099	1 Dok	23213280677	
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Semua Dokumen SPJ dan SPP-SPM yang sudah di Verifikasi			100%	2.134.500.000	100%	2.187.862.500	100%	2.242.559.063	100%	2.298.623.039	100%	2356088615	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya hasil Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			1 Dok	10.392.500	1 Dok	10.652.313	1 Dok	10.918.620	1 Dok	11.191.586	1 Dok	11471375	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Dokumen Laporan Bulanan dan Tahunan, Triwulan/ Semesteran Sekretariat Daerah			3 Dok	20.950.000	3 Dok	21.473.750	3 Dok	22.010.594	3 Dok	22.560.859	3 Dok	23124880	
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terpenuhinya Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Sekretariat Daerah			1 Tahun	55.350.000	1 Tahun	56.733.750	1 Tahun	58.152.094	1 Tahun	59.605.896	1 Tahun	61096043	Bagian Umum Setda

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tersedianya dokumen rekonsiliasi barang milik daerah pada Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Utara			1 Dok	55.350.000	1 Dok	56.733.750	1 Dok	58.152.094	1 Dok	59.605.896	1 Dok	61096043	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat Keterampilan Aparatur			1 Tahun	777.993.500	1 Tahun	797.443.338	1 Tahun	817.379.421	1 Tahun	837.813.906	1 Tahun	858759254	Bagian Umum Setda
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atributnya	Tingkat Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimtek PNS			100%	115.500.000	100%	118.387.500	1	121.347.188	1	124.380.867	100%	127490389	
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Tingkat Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimtek PNS			100%	662.493.500	100%	679.055.838	1	696.032.233	1	713.433.039	100%	731268865	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah			1 Tahun	9.584.013.685	1 Tahun	9.823.614.027	1 Tahun	10.069.204.378	1 Tahun	10.320.934.487	1 Tahun	10578957849	Bagian Umum Setda
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tingkat Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			100%	211.615.000	100%	216.905.375	1	222.328.009	1	227.886.210	100%	233583365	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tingkat Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			100%	216.917.625	100%	222.340.566	1	227.899.080	1	233.596.557	100%	239436471	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Besarnya Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor			100%	2.629.119.560	100%	2.694.847.549	1	2.762.218.738	1	2.831.274.206	100%	2902056061	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Banyaknya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			100%	148.689.500	100%	152.406.738	1	156.216.906	1	160.122.329	100%	164125387	
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya Fasilitasi Kunjungan Tamu			100%	430.000.000	100%	440.750.000	1	451.768.750	1	463.062.969	100%	474639543	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tingkat Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			100%	5.947.672.000	100%	6.096.363.800	1	6.248.772.895	1	6.404.992.217	100%	6565117023	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tingkat Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			1 Tahun	19.084.980.000	1 Tahun	19.562.104.500	1 Tahun	20.051.157.113	1 Tahun	20.552.436.040	1 Tahun	21066246941	Bagian Umum Setda
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tingkat Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional			-	3.320.000.000	-	3.403.000.000	-	3.488.075.000	-	3.575.276.875	-	3664658797	
Pengadaan Mebel	Tingkat pengadaan Mebel di Sekretariat Daerah			100%	2.518.000.000	100%	2.580.950.000	1	2.645.473.750	1	2.711.610.594	100%	2779400859	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tingkat Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional			100%	6.876.500.000	100%	7.048.412.500	1	7.224.622.813	1	7.405.238.383	100%	7590369342	
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			100%	6.370.480.000	100%	6.529.742.000	1	6.692.985.550	1	6.860.310.189	100%	7031817943	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1 Tahun	7.399.765.148	1 Tahun	7.584.759.277	1 Tahun	7.774.378.259	1 Tahun	7.968.737.715	1 Tahun	8167956158	Bagian Umum Setda
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tingkat penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik			100%	3.889.925.148	100%	3.987.173.277	1	4.086.852.609	1	4.189.023.924	100%	4293749522	
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			100%	369.000.000	100%	378.225.000	1	387.680.625	1	397.372.641	100%	407306957	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terpenuhinya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			100%	3.140.840.000	100%	3.219.361.000	1	3.299.845.025	1	3.382.341.151	100%	3466899679	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang di Pelihara dengan Baik			100%	3.726.251.800	100%	3.819.408.095	1	3.914.893.297	1	4.012.765.630	100%	4113084771	Bagian Umum Setda

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
		2024	2025	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpenuhinya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			100%	590.415.000	100%	605.175.375	1	620.304.759	1	635.812.378	100%	651707688	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpenuhinya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			100%	2.091.599.800	100%	2.143.889.795	1	2.197.487.040	1	2.252.424.216	100%	2308734821	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpenuhinya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			100%	644.550.000	100%	660.663.750	1	677.180.344	1	694.109.852	100%	711462599	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpenuhinya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			100%	399.687.000	100%	409.679.175	1	419.921.154	1	430.419.183	100%	441179663	
Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Terpenuhinya Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			1 Tahun	1.345.769.428	1 Tahun	1.379.413.664	1 Tahun	1.413.899.005	1 Tahun	1.449.246.480	1 Tahun	1485477642	Bagian Umum Setda
Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Terpenuhinya Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			100%	667.819.328	100%	684.514.811	1	701.627.681	1	719.168.374	100%	737147583	
Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan KDH dan WKDH	Terpenuhinya Penyediaan Pakaian Dinas KDH dan WKDH			100%	168.000.000	100%	172.200.000	1	176.505.000	1	180.917.625	100%	185440566	
Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Terpenuhinya Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			100%	99.900.000	100%	102.397.500	1	104.957.438	1	107.581.373	100%	110270908	
Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Terpenuhinya Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			100%	410.050.100	100%	420.301.353	1	430.808.886	1	441.579.108	100%	452618586	
Fasilitasi Kerumahaan Sekreteriat Daerah	Terpenuhinya Kebutuhan Rumah Tangga KDH/WKDH dan Sekreteris Daerah			1 Tahun	809.594.107	1 Tahun	829.833.960	1 Tahun	850.579.809	1 Tahun	871.844.304	1 Tahun	893640411	Bagian Umum Setda
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah			1 Tahun	518.645.200	1 Tahun	531.611.330	1 Tahun	544.901.613	1 Tahun	558.524.154	1 Tahun	572487257	
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah			1 Tahun	286.698.907	1 Tahun	293.866.380	1 Tahun	301.213.039	1 Tahun	308.743.365	1 Tahun	316461949	
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga Sekretaris Daerah			1 Tahun	4.250.000	1 Tahun	4.356.250	1 Tahun	4.465.156	1 Tahun	4.576.785	1 Tahun	4691205	
4.01.02 - PENATAAN ORGANISASI														
	Indek Reformasi Birokrasi	B (69,49)	B (69,80)	B (69,90)	1.172.949.000	B (70,00)	1.202.272.725	BB (70,5)	1.232.329.543	BB (71)	1.263.137.782	BB (71,5)	1294716226	Bagian Organisasi Setda
	Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	B (63,74)	B (63,85)	B (63,90)		B (64)		B (65)		B (68)		BB (71)		
	Mutu Pelayanan terhadap Kepuasan Masyarakat	B (77,00)	B (77,00)	B (78)		B (79)		B (80)		B (81)		B (82)		
Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Perda Kelembagaan			1 Perda	391.151.000	1 Perda	400.929.775	1 Perda	410.953.019	1 Perda	421.226.845	1 Perda	431757516	



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
		2024	2025	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Perbup SOTK UPT			2 Perbup		1 Perbup		1 Perbup		1 Perbup		1 Perbup		
	Perbup SOTK Perangkat Daerah			7 Perbup		1 Perbup		1 Perbup		1 Perbup		1 Perbup		
	Kepbup SKJ JPT Pratama			1 Kepbup		1 Kepbup		1 Kepbup		1 Kepbup		1 Kepbup		
	Kepbup Peta Jabatan			1 Kepbup		1 Kepbup		1 Kepbup		1 Kepbup		1 Kepbup		
	Kepbup Penetapan Evaluasi Jabatan			1 Kepbup		1 Kepbup		1 Kepbup		1 Kepbup		1 Kepbup		
	Kepbup Penetapan Anjab dan ABK			1 Kepbup		1 Kepbup		1 Kepbup		1 Kepbup		1 Kepbup		
	Laporan Pengelolaan LHKPN			1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		
Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Perbup Pakaian Dinas			1 Perbub	342.827.000	1 Perbub	351.397.675	1 Perbub	360.182.617	1 Perbub	369.187.182	1 Perbub	378416862	
	Perbup Budaya Kerja			1 Perbup		1 Perbup		1 Perbup		1 Perbup		1 Perbup		
	Laporan Hasil Survei IKM			1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		
	Kepbup Standar Pelayanan Publik			1 Kepbup		1 Kepbup		1 Kepbup		1 Kepbup		1 Kepbup		
	Kepbup Standar Operasional Prosedur			1 Kepbup		1 Kepbup		1 Kepbup		1 Kepbup		1 Kepbup		
	Surat Edaran Jam Kerja			1 surat		1 surat		1 surat		1 surat		1 surat		
	Proposal Inovasi Pelayanan publik			1 Proposal		1 Proposal		1 Proposal		1 Proposal		1 Proposal		
Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	IKU Kabupaten			1 Kepbup	438.971.000	1 Kepbup	449.945.275	1 Kepbup	461.193.907	1 Kepbup	472.723.755	1 Kepbup	484541848	
	Laporan Mandiri Pkk Individu			1 Buku		1 Buku		1 Buku		1 Buku		1 Buku		
	LKIP Kabupaten			1 Buku		1 Buku		1 Buku		1 Buku		1 Buku		
	LKIP Setda			1 Buku		1 Buku		1 Buku		1 Buku		1 Buku		
	PK Individu Semua Perangkat Daerah			1 Buku		1 Buku		1 Buku		1 Buku		1 Buku		
	PK Individu Setda			1 Buku		1 Buku		1 Buku		1 Buku		1 Buku		
	PK Kabupaten			1 Buku		1 Buku		1 Buku		1 Buku		1 Buku		
	PK Setda			1 Buku		1 Buku		1 Buku		1 Buku		1 Buku		
	Pohon Kinerja			1 Buku		1 Buku		1 Buku		1 Buku		1 Buku		
	Quick Wins			1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		
Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Tingkat realisasi agenda kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah			1 Tahun	2.666.932.750	1 Tahun	2.733.606.069	1 Tahun	2.801.946.220	1 Tahun	2.871.994.876	1 Tahun	2943794748	Bagian Protokol Setda
Fasilitasi Keprotokolan	Terlaksananya Pelaksanaan Penyiapan dan Pelaksanaan Protokolers Untuk KDH/WKDH			100%	425.755.125	100%	436.399.003	1	447.308.978	1	458.491.703	100%	469953995	
Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Terlaksananya Fasilitas Komunikasi Pendampingan Kepala Daerah/Wakil kepala Daerah			100%	1.623.079.625	100%	1.663.656.616	1	1.705.248.031	1	1.747.879.232	100%	1791576213	
Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Terlaksananya Pendokumentasian Tugas Pimpinan			100%	618.098.000	100%	633.550.450	1	649.389.211	1	665.623.942	100%	682264540	
4.01.03 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT														
	Predikat Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) hasil penilaian Kemendagri	Rendah (2,2485)	Sedang (2,6100)	Sedang (2,6200)	42.169.764.525	Sedang (2,7500)	43.224.008.638	Sedang (2,8500)	44.304.608.854	Sedang (2,9500)	45.412.224.075	Sedang (3,0100)	46547529677	SEKRETARIAT DAERAH
Administrasi Pemerintahan	Predikat Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) hasil penilaian Kemendagri	Rendah (2,2485)	Sedang (2,6100)	Sedang (2,6200)	1.311.851.376	Sedang (2,7500)	1.344.647.660	Sedang (2,8500)	1.378.263.852	Sedang (2,9500)	1.412.720.448	Sedang (3,0100)	1448038459	Bagian Pemerintahan Setda



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
		2024	2025	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Penataan Administrasi Pemerintahan	Terwujudnya kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa, Peningkatan Kelembagaan Sosial Kemasyarakatan dan peringatan hari-hari besar serta terlaksananya harmonisasi antara Kec dan Desa			2 Keg	403.699.625	2 Keg	413.792.116	2 Keg	424.136.919	2 Keg	434.740.341	2 Keg	445608850	
Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Tersedianya data dan informasi untuk proses pemekaran, Pembakuan rupa bumi dan pemetaan di wilayah Kab. Barito Utara, Terwujudnya Tata Pemerintahan yang Baik, Penyelesaian masalah batas antar Desa/Kelurahan dan Kecamatan			10 Kelurahan	469.515.501	10 Kelurahan	481.253.389	10 Kelurahan	493.284.723	10 Kelurahan	505.616.841	10 Kelurahan	518257262	
Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Terlaksananya Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), Pelaporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ), Pelaporan Standar Pelayanan Minimal (SPM)			5 Keg	438.636.250	5 Keg	449.602.156	5 Keg	460.842.210	5 Keg	472.363.265	5 Keg	484172347	
Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Terlaksananya Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat			1 Tahun	39.505.663.899	1 Tahun	40.493.305.496	1 Tahun	41.505.638.134	1 Tahun	42.543.279.087	1 Tahun	43606861064	Bagian Kesra Setda
Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spritual	Terlaksananya kegiatan safari ramadhan di 9 kecamatan dan kegiatan keberangkatan dan kedatangan jamaah haji kabupaten barito utara.			100%	25.325.365.800	100%	25.958.499.945	1	26.607.462.444	1	27.272.649.005	100%	27954465230	
	Terlaksananya verifikasi untuk permohonan usulan dan pencairan dana hibah untuk lembaga agama, lembaga pendidikan agama dan rumah ibadah di 9 kecamatan			100%		100%		100%		100%		100%		
Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Terlaksananya verifikasi, memeriksa dan menyeleksi permohonan pencairan dana hibah dan bantuan sosial pada lembaga pendidikan umum, organisasi profesi/organisasi			100%	7.897.738.724	100%	8.095.182.192	1	8.297.561.747	1	8.505.000.791	100%	8717625810	
Pelakasanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Terlaksananya verifikasi, memeriksa dan menyeleksi permohonan pencairan dana hibah dan bantuan sosial pada lembaga pendidikan umum, organisasi profesi/organisasi			100%	6.282.559.375	100%	6.439.623.359	1	6.600.613.943	1	6.765.629.292	100%	6934770024	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
		2024	2025	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Tingkat penyelesaian Penyusunan dan Pendokumentasian produk hukum daerah serta Fasilitasi Bantuan Hukum			700 Produk Hukum	1.245.969.000	750 Produk Hukum	1.277.118.225	750 Produk Hukum	1.309.046.181	750 Produk Hukum	1.341.772.335	800 Produk Hukum	1375316644	Bagian Hukum Setda
Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah			100%	362.800.000	100%	371.870.000	1	381.166.750	1	390.695.919	100%	400463317	
Fasilitasi Bantuan Hukum	Terlaksananya Fasilitasi Bantuan Hukum			100%	376.131.125	100%	385.534.403	1	395.172.763	1	405.052.082	100%	415178384	
Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Terlaksananya Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum			100%	507.037.875	100%	519.713.822	1	532.706.667	1	546.024.334	100%	559674942	
Fasilitasi Kerjasama Daerah	Tersedianya kerjasama dalam pembangunan dan penataan batas daerah			1 Tahun	106.280.250	1 Tahun	108.937.256	1 Tahun	111.660.688	1 Tahun	114.452.205	1 Tahun	117313510	Bagian Pemerintahan Setda
Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri	Tingkat fasilitasi hubungan kerjasama antar pemerintah daerah			100%	69.046.500	100%	70.772.663	1	72.541.979	1	74.355.529	100%	76214417	
Fasilitasi Kerjasama Luar Negeri					-		-		-		-		-	
Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Fasilitasi hubungan kerjasama dengan baik			100%	37.233.750	100%	38.164.594	1	39.118.709	1	40.096.676	100%	41099093	
4.01.04 - PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN														
	Persentase pelaksanaan kebijakan dan pengawasan di bidang perekonomian dan pembangunan			100%	4.579.677.125	100%	4.694.169.053	100%	4.811.523.279	100%	4.931.811.361	100%	5055106645	SEKRETARIAT DAERAH
Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase Pelaksanaan Kebijakan dan Pengawasan di Bidang BUMD, BLUD, dan Perekonomian			100%	782.000.000	100%	801.550.000	100%	821.588.750	100%	842.128.469	100%	863181680	Bagian Ekonomi Setda
Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMN dan BLUD	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMN dan BLUD			100%	114.000.000	100%	116.850.000	1	119.771.250	1	122.765.531	100%	125834670	
Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Terlaksananya Pengendalian dan Distribusi Perekonomian			100%	180.000.000	100%	184.500.000	1	189.112.500	1	193.840.313	100%	198686320	
Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Terlaksananya Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil			100%	180.000.000	100%	184.500.000	1	189.112.500	1	193.840.313	100%	198686320	
Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BULD	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BULD			100%	258.000.000	100%	264.450.000	1	271.061.250	1	277.837.781	100%	284783726	
Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD			100%	50.000.000	100%	51.250.000	1	52.531.250	1	53.844.531	100%	55190645	
Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase Pelaksanaan Kebijakan Administrasi Pembangunan dan Pengendalian Program			100%	1.999.026.000	100%	2.049.001.650	100%	2.100.226.691	100%	2.152.732.359	100%	2206550667	Bagian Pembangunan Setda
Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun (Renja, Renstra dan RKA) serta Buku Saku Gambaran Umum Daerah			4 Dok	703.977.000	4 Dok	721.576.425	4 Dok	739.615.836	4 Dok	758.106.232	4 Dok	777058887	
Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Tingkat Pengendalian pelaksanaan pembangunan di kecamatan			1 Dok	693.395.000	1 Dok	710.729.875	1 Dok	728.498.122	1 Dok	746.710.575	1 Dok	765378339	



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
		2024	2025	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Tingkat Monitoring , evaluasi dan pelaporan			12 Dok	601.654.000	12 Dok	616.695.350	12 Dok	632.112.734	12 Dok	647.915.552	12 Dok	664113441	
4.01.05 - Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa														
	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa	78.48	78.55	78.55	1.570.664.125	79.20	1.609.930.728	79.30	1.650.178.996	79.40	1.691.433.471	79.50	1733719308	Bagian Pengadaan Barang/Jasa
Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Terlaksananya Tender Pengadaan Barang/Jasa			100%	563.229.625	100%	577.310.366	1	591.743.125	1	606.536.703	100%	621700120	
Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Terlaksananya Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah			100%	523.684.250	100%	536.776.356	1	550.195.765	1	563.950.659	100%	578049426	
Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Terlaksananya Peningkatan SDM Pelaksana Pemilihan Penyedia Barang/Jasa			100%	483.750.250	100%	495.844.006	1	508.240.106	1	520.946.109	100%	533969762	
Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Persentase pelaksanaan kebijakan dan pengawasan bidang Sumber Daya Alam			100%	227.987.000	100%	233.686.675	100%	239.528.842	100%	245.517.063	100%	251654989	Bagian Ekonomi Setda
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan			100%	108.193.500	100%	110.898.338	1	113.670.796	1	116.512.566	100%	119425380	
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup			100%	119.793.500	100%	122.788.338	1	125.858.046	1	129.004.497	100%	132229610	
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air					-		-		-		-		-	
4.02 - SEKRETARIAT DPRD														
4.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														
Meningkatnya Kelancaran Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan (Nilai)	100	100	100	21.046.971.268	100	23.151.668.395	100	25.466.835.234	100	28.013.518.758	100	30.814.870.633	4.02.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DPRD
Fungsi Perangkat Daerah	Kesekretariatan (Nilai)													- SEKRETARIAT DPRD
4.02.02 - PROGRAMDUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD														
Meningkatnya Kualitas layanan penyusunan dan pembahasan produk hukum daerah	Jumlah Rapat Kerja pembahasan Produk Hukum (Kali)	13	16	20	521.776.990	23	573.954.689	26	631.350.158	29	694.485.174	32	763.933.691	4.02.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DPRD
Persentase Terlaksananya Tugas dan Fungsi DPRD sesuai rencana kerja	Persentase Terlaksananya Tugas dan Fungsi DPRD sesuai rencana kerja (%)	100	100%	100%	31.287.472.530	100%	34.416.219.783	100%	37.857.841.761	100%	41.643.625.937	100%	45.807.988.531	4.02.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DPRD
Persentase Pelaksanaan pelatihan dan Pengembangan Kapasitas	Persentase Pelaksanaan pelatihan dan Pengembangan Kapasitas DPRD (%)	100	100%	100%	18.734.320.000	100%	20.607.752.538	100%	22.668.527.792	100%	24.935.380.571	100%	27.428.918.628	4.02.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DPRD
Sesuai rencana kerja DPRD	Persentase Terlaksananya Tugas dan Fungsi DPRD													

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
		2024	2025	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	sesuai rencana kerja (%)													4.02.0.00.0.00.01.0000
														- SEKRETARIAT DPRD
Persentase Pelaksanaan pelatihan dan Pengembangan Kapasitas	Persentase Pelaksanaan pelatihan dan Pengembangan													4.02.0.00.0.00.01.0000
Sesuai rencana kerja DPRD	Kapasitas DPRD (%)													- SEKRETARIAT DPRD
5.01 - PERENCANAAN														
5.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														
Meningkatnya Kelancaran Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan (Nilai)	0	90	90	14.738.880.000	90	15.000.000.000	90	15.905.347.035	90	15.500.047.000	90	16.105.847.000	5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5.01.02 - PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN5.01.02 - PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN														
Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Keselaran proritas daerah dengan prioritas Nasional (%)	100	100	100	2.353.938.100	100	2.453.938.100	100	2.553.938.100	100	2.653.938.100	100	2.753.938.100	5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5.01.03 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH														
Meningkatnya kualitas perencanaan perangkat daerah pemerintahan dan pembangunan manusia	Persentase Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan Nilai Baik (%)	100	100	100	2.099.999.600	100	2.199.999.600	100	2.299.999.600	100	2.399.999.600	100	2.499.999.600	5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Meningkatnya kualitas perencanaan perangkat daerah bidang ekonomi dan infrastruktur	Persentase Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan Nilai Baik (%)	100	100	100	1.897.586.600	100	2.097.586.600	100	2.197.586.600	100	2.297.586.600	100	2.397.586.600	5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5.02 - KEUANGAN														
5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														
Terlaksananya penunjang urusan Pemerintahan	Persentase Terlaksananya penunjang urusan Pemerintahan	100%	100%	100%	8.438.228.350	100%	864.815.905.875	100%	886.436.303.522	100%	908.597.211.110	100%	931.312.141.388	5.02.0.00.0.00.01.0000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN,& ASET DAERAH
5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH														
Penerbitan dokumen keuangan	Persentase Penerbitan dokumen keuangan tepat waktu	100%	100%	100%	324.223.581.564	100%	33.232.917.110.310	100%	34.063.740.038.068	100%	34.915.333.539.019	100%	35.788.216.877.495	5.02.0.00.0.00.01.0000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN,& ASET DAERAH
Meningkatnya Kualitas Penganggaran Daerah	Ketepatan Waktu Penyusunan APBD Sesuai dengan Tahapan dan Jadwal yang telah Ditetapkan Dalam Peraturan Perundang-Undangan (%)													5.02.0.00.0.00.01.0000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN,& ASET DAERAH
Terlaksananya Koordinasi Dalam Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah yang Berkualitas	Persentase Tertibnya SKPD dan BLUD dalam Konsolidasi Penyusunan Laporan Keuangan Daerah Sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (%)													5.02.0.00.0.00.01.0000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN,& ASET DAERAH



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
		2024	2025	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya Kualitas Urusan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Ketepatan waktu dalam menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (%)													5.02.0.00.0.00.01.0000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN,& ASET DAERAH
5.02.03 - PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH														
Meningkatnya persentase tanah pemerintah yang bersertifikat	Persentase tanah pemerintah yang bersertifikat	88,03%	90,45%	92,87%	1.022.128.853	95.29%	104.768.207.433	97.71%	107.387.412.618	100%	110.072.097.934	100%	112.823.900.382	5.02.0.00.0.00.01.0000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN,& ASET DAERAH
5.02.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH														
Meningkatnya Potensi Pajak Daerah	Persentase Penerimaan Pajak Daerah (%)	100	100	100	1.040.000.000	100	1.366.000.000	100	1.700.150.000	100	2.042.653.750	100	2.393.720.094	5.02.0.00.0.00.01.0000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN,& ASET DAERAH
Meningkatnya Kepatuhan Wajib Pajak Daerah	Presentase Kepatuhan Wajib Pajak Daerah (%)	100	100	100		100		100		100		100		5.02.0.00.0.00.01.0000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN,& ASET DAERAH
Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Presentase Realisasi Penerimaan APBD (%)	100	100	100		100		100		100		100		5.02.0.00.0.00.01.0000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN,& ASET DAERAH
5.03 - KEPEGAWAIAN														
5.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														
Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	Indeks Kepuasan Layanan Keseekretariatan (Nilai)	100	100	100	11.205.062.217	100	12.885.821.000	100	14.818.694.000	100	17.041.498.000	100	19.597.723.000	5.03.5.04.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.02 - PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH														
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Jumlah ASN yang sudah terlayani menggunakan Aplikasi berbasis elektronik	4.136	4.157	4.163	63.146.000	5.917	78.932.000	6.017	98.665.000	6.117	123.332.000	6.217	154.165.000	5.03.5.04.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Meningkatnya kesejahteraan ASN	Persentase ASN yang mendapatkan reward dari Pemerintah Daerah	73	85	97	278.786.000	100	320.600.000	100	368.700.000	100	424.000.000	100	487.600.000	5.03.5.04.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Meningkatnya kualitas pengembangan kompetensi ASN	Persentase pemenuhan hak pengembangan kompetensi ASN (aspek kompetensi teknis, fungsional, dan sosial kultural)	75%	75	75	2.407.196.500	78	2.768.000.000	80	3.183.500.000	83	3.661.000.000	85	4.210.000.000	5.03.5.04.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	Persentase pejabat struktural yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan	71	73	75	2.809.051.750	77	3.230.400.000	79	3.715.000.000	80	4.272.000.000	83	4.913.000.000	5.03.5.04.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Meningkatnya kualitas pengadaan ASN	Persentase ASN daerah sesuai kebutuhan daerah	87	87	80	586.700.000	81	675.000.000	83	776.000.000	85	892.000.000	87	1.026.000.000	- BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
5.04 - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN														

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030			
		2024	2025	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
5.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA														
Meningkatnya kualitas pengembangan kompetensi ASN	Persentase pemenuhan hak pengembangan kompetensi ASN (aspek kompetensi kepemimpinan) (%)	50	55	60	3.128.504.900	65	3.228.504.900	70	3.328.504.900	75	3.428.504.900	80	3.528.504.900	5.03.5.04.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN														
5.05.02 - PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH														
Meningkatnya pemanfaatan hasil kajian kelitbangan dalam perencanaan pembangunan daerah	Persentase Inovasi Perangkat Daerah yang tervalidasi (%)	0	0	0		0		0		0		0		5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	Nilai inovasi SKPD (Nilai)	0	50	55		60		65		70		75		5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
6.01 - INSPEKTORAT DAERAH														
6.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			20.513.807.000		22.529.595.641		26.167.835.532		26.822.031.420		27.492.582.206		28.179.896.761	
Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan (Nilai)		20.513.807.000		22.529.595.641		26.167.835.532		26.822.031.420		27.492.582.206		28.179.896.761	6.01.0.00.0.00.01.0000 INSPEKTORAT
6.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN														
Meningkatnya Kualitas Pengawasan	Persentase Hasil Pemeriksaan yang ditindaklanjuti	72%	1.206.625.000	72%	1.236.790.625	74%	1.267.710.391	75%	1.299.403.151	77%	1.332.394.180	80%	1.365.704.035	6.01.0.00.0.00.01.0000 INSPEKTORAT
Meningkatnya Pengelolaan Pengaduan	Persentase Pengaduan yang diselesaikan	100%	171.752.000	80%	176.045.800	81%	180.446.945	81%	184.958.119	82%	189.582.072	85%	194.321.624	6.01.0.00.0.00.01.0000 INSPEKTORAT
6.01.03 - PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI														
Meningkatnya Koordinasi, Supervisi dan Pencegahan	Nilai Capaian Skor MCP (Monitoring Center Prevention)	78	94.752.000	90	97.120.800	90	99.548.820	90	102.037.541	92	104.588.480	95	107.203.192	6.01.0.00.0.00.01.0000 INSPEKTORAT
Meningkatnya Kualitas Pengendalian Rencana Aksi Birokrasi (RB)	Persentase Kualitas dan Capaian Rencana Aksi Reformasi Brokrasi (RB)	49.000.000	49.000.000		50.225.000		51.480.625		52.767.641		54.086.648		55.438.630	6.01.0.00.0.00.01.0000 INSPEKTORAT
Meningkatnya unit kerja yang mendapatkan predikat Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM	Jumlah unit kerja yang diajukan ke Tim Penilai Nasional (TPN) yang masuk ke tahap wawancara (Unit Kerja)	193.965.000	193.965.000		198.814.125		203.784.478		208.879.090		214.101.067		219.453.594	6.01.0.00.0.00.01.0000 INSPEKTORAT
Meningkatnya Kapabilitas APIP	Level Kapabilitas APIP	Level 3	595.332.000	Level 3	610.215.300	Level 3	625.470.683	Level 3	641.107.450	Level 3	657.135.136	Level 3	673.563.514	6.01.0.00.0.00.01.0000 INSPEKTORAT
Meningkatnya Pengendalian Internal	Skor Maturitas SPIP	3,009	49.000.000	3,01	50.225.000	3,015	51.480.625	3,015	52.767.641	3,02	54.086.832	3,025	55.439.003	6.01.0.00.0.00.01.0000 INSPEKTORAT

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030			
		2024	2025	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
7.01 - KECAMATAN														
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														
Koordinasi dan Penyusunan RKA-SKPD	Tersusunnya dokumen RKA-SKPD	3,252,250.00	3,520,000.00	100%	360.800.000	100%	369.820.000	100%	379.065.500	100%	388.542.138	100%	398.255.691	7.01.0.00.0.00.08.0000 KECAMATAN GUNUNG TIMANG
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersusunnya dokumen Perubahan RKA-SKPD	3,102,400.00	3,412,500.00	100%	349.781.250	100%	358.525.781	100%	367.488.926	100%	376.676.149	100%	386.093.053	7.01.0.00.0.00.08.0000 KECAMATAN GUNUNG TIMANG
Koordinasi dan Penyusunan DPA - SKPD	Tersusunnya dokumen DPA-SKPD	1,939,900.00	3,475,000.00	100%	356.187.500	100%	365.092.188	100%	374.219.492	100%	383.574.979	100%	393.164.354	7.01.0.00.0.00.08.0000 KECAMATAN GUNUNG TIMANG
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Tersusunnya dokumen Perubahan DPA-SKPD	1,672,300.00	3,510,000.00	100%	359.775.000	100%	368.769.375	100%	377.988.609	100%	387.438.325	100%	397.124.283	7.01.0.00.0.00.08.0000 KECAMATAN GUNUNG TIMANG
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	JumlahKegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Desa	89	92	100	438.544.032.400	100	450.000.000.000	100	450.000.000.000	100	450.000.000.000	100	4,5E+11	7.01.0.00.0.00.07.0000 KECAMATAN LAHEI BARAT
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Desa	85	90	92	6.808.031.273	95	7.488.834.400	96	8.169.637.527	97	8.986.601.280	98	9054681593	7.01.0.00.0.00.02.0000 KECAMATAN TEWEH BARU
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Desa	85	90	92	2.698.614.353	95	5.698.614.353	96	6.698.614.353	97	7.698.614.353	98	8.698.614.353,00	7.01.0.00.0.00.06.0000 KECAMATAN TEWEH SELATAN
Meningkatnya Kelancaran Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan (Nilai)	0	90	90	4.725.120.157.389	90	4.843.312.918.903	91	4.968.432.962.327	93	5.105.859.547.947	95	5,25723E+12	7.01.0.00.0.00.01.0000 KECAMATAN TEWEH TENGAH
Meningkatnya Kelancaran Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan (Nilai)	0	89	89	3.541.943.770.842	89	3.604.666.892.063	90	3.682.787.557.542	92	3.767.336.520.897	93	38593372376	7.01.0.00.0.00.02.0000 KECAMATAN TEWEH BARU
Meningkatnya Kelancaran Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan (Nilai)	0	86	88	3.111.772.356.624	89	3.190.028.573.845	90	3.269.436.119.109	91	335.632.256.929	93	3,4518E+12	7.01.0.00.0.00.06.0000 KECAMATAN TEWEH SELATAN
Meningkatnya Kelancaran Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan (Nilai)	0	85	87	3.304.887.770.076	89	3.388.000.539.026	89	3.472.336.085.726	90	356.461.467.663	92	3,66601E+12	7.01.0.00.0.00.01.0000 KECAMATAN TEWEH TIMUR
Meningkatnya Kelancaran Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan (Nilai)	0	84	86	3.338.386.459.717	89	3.422.341.668.343	89	3.507.532.050.247	89	360.074.598.659	92	3,70317E+12	7.01.0.00.0.00.03.0000 KECAMATAN LAHEI
Meningkatnya Kelancaran Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan (Nilai)	0	83	85	3.797.723.778.266	87	3.893.230.603.147	88	3.990.142.551.572	89	4.096.182.036.818	91	4,2127E+12	7.01.0.00.0.00.05.0000 KECAMATAN MONTALLAT
Meningkatnya Kelancaran Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan (Nilai)	0	82	84	5.661.316.498.294	86	5.795.961.242.355	87	5.940.261.657.172	88	6.098.154.828.304	90	6,27165E+12	7.01.0.00.0.00.08.0000 KECAMATAN GUNUNG TIMANG
Meningkatnya Kelancaran Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan (Nilai)	0	80	83	4.694.046.958.554	85	4.814.399.175.256	87	4.935.882.405.182	88	5.068.938.787.459	90	5,21527E+12	7.01.0.00.0.00.04.0000 KECAMATAN GUNUNG PURE
Meningkatnya Kelancaran Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan (Nilai)	0	80	83	4.694.046.958.554	85	4.814.399.175.256	85	4.935.882.405.182	87	5.068.938.787.459	89	5,21527E+12	7.01.0.00.0.00.07.0000 KECAMATAN LAHEI BARAT

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
		2024	2025	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK														
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	JumlahPenyelenggaraanPemerintah an dan Pelayanan Publik	99	100	100	4.550.000.000	100	4.800.000.000	100	4.800.000.000	100	4.800.000.000	100	4800000000	7.01.0.00.0.00.07.0000 KECAMATAN LAHEI BARAT
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Jumlah Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	99	100	100	4.950.000.000	100	7.000.000.000	100	7.000.000.000	100	7.000.000.000	100	7000000000	7.01.0.00.0.00.02.0000 KECAMATAN TEWEH BARU
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Jumlah Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	99	100	100	14.998.500.000	100	20.000.000.000	100	20.000.000.000	100	20.000.000.000	100	20000000000	7.01.0.00.0.00.06.0000 KECAMATAN TEWEH SELATAN
Meningkatnya Fasilitasi Pelayanan Masyarakat	Mutu Pelayanan Masyarakat (Nilai)	88,44	89	90	936.536.701	91	960.089.138	91,25	9.839.880.815	91,5	101.013.792.322	91,75	1,03887E+11	7.01.0.00.0.00.01.0000 KECAMATAN TEWEH TENGAH
Meningkatnya Fasilitasi Pelayanan Masyarakat	Mutu Pelayanan Masyarakat (Nilai)	88	88	90	2.303.355.769	91	236.128.157.076	91,5	242.005.959.175	92	248.437.355.266	92,5	2,55504E+11	7.01.0.00.0.00.02.0000 KECAMATAN TEWEH BARU
Meningkatnya Fasilitasi Pelayanan Masyarakat	Mutu Pelayanan Masyarakat (Nilai)	0	89	89,5	274.449.156	90	28.135.112.526	90,5	2.883.546.386	91	29.601.776.158	91,5	30443819636	7.01.0.00.0.00.06.0000 KECAMATAN TEWEH SELATAN
Meningkatnya Fasilitasi Pelayanan Masyarakat	Mutu Pelayanan Masyarakat (Nilai)	85,25	88,6	89	22.954.416.806	89,5	235.316.845.623	90	241.174.452.296	90,5	247.583.750.677	91	25462644293	7.01.0.00.0.00.01.0000 KECAMATAN TEWEH TIMUR
Meningkatnya Fasilitasi Pelayanan Masyarakat	Mutu Pelayanan Masyarakat (Nilai)	0	88,57	88,75	2.804.790.361	89	39.054.726.271	89,5	413.293.422.773	90	439.224.699.932	91	46873259584	7.01.0.00.0.00.03.0000 KECAMATAN LAHEI
Meningkatnya Fasilitasi Pelayanan Masyarakat	Mutu Pelayanan Masyarakat (Nilai)	88,75	88,75	88,75	106.720.000	89	108.911.399.819	89,5	111.271.737.398	90	113.826.299.374	91	1,16606E+11	7.01.0.00.0.00.05.0000 KECAMATAN MONTALLAT
Meningkatnya Fasilitasi Pelayanan Masyarakat	Mutu Pelayanan Masyarakat (Nilai)	87,67	87,7	87,75	190.117.011	87,8	194.898.157.045	87,85	19.974.964.491	87,9	205.058.063.793	87,95	2,10891E+11	7.01.0.00.0.00.08.0000 KECAMATAN GUNUNG TIMANG
Meningkatnya Fasilitasi Pelayanan Masyarakat	Mutu Pelayanan Masyarakat (Nilai)	0	89	89,5	274.449.156	90	28.135.112.526	90,5	2.883.546.386	91	29.601.776.158	91,5	30443819636	7.01.0.00.0.00.04.0000 KECAMATAN GUNUNG PURE
Meningkatnya Fasilitasi Pelayanan Masyarakat	Mutu Pelayanan Masyarakat (Nilai)	0	89	89,5	274.449.156	90	28.135.112.526	90,5	2.883.546.386	91	29.601.776.158	91,5	30443819636	7.01.0.00.0.00.07.0000 KECAMATAN LAHEI BARAT
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN														
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	69	90	90	400.000.000	92	40.000.000.000	94	40.000.000.000	96	40.000.000.000	98	40000000000	7.01.0.00.0.00.02.0000 KECAMATAN TEWEH BARU
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	69	90	90	-	92	10.000.000.000	94	10.000.000.000	96	10.000.000.000	98	10000000000	7.01.0.00.0.00.06.0000 KECAMATAN TEWEH SELATAN
Meningkatnya Lembaga Kemasyarakatan (LKD) yang Aktif	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang Aktif (Nilai)	120	269	269	122.321.130	269	12.483.288.525	269	127.538.274.602	269	130.466.281.874	269	1,33652E+11	7.01.0.00.0.00.01.0000 KECAMATAN TEWEH TENGAH
Meningkatnya Lembaga Kemasyarakatan (LKD) yang Aktif	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang Aktif (Nilai)	90	180	180	84.693.659	180	86.823.572.091	180	88.984.821.509	180	9.134.962.532	180	93948129256	7.01.0.00.0.00.02.0000 KECAMATAN TEWEH BARU
Meningkatnya Lembaga Kemasyarakatan (LKD) yang Aktif	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang Aktif (Nilai)	0	60	76	2.106.753.517	91	170.850.537.911	106	17.455.322.633	116	178.560.597.014	121	1,82921E+11	7.01.0.00.0.00.06.0000 KECAMATAN TEWEH SELATAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
		2024	2025	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya Lembaga Kemasyarakatan (LKD) yang Aktif	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang Aktif (Nilai)	0	36	36	2.095.251.102	36	214.794.339.498	36	220.141.091.538	36	225.991.420.574	36	2,3242E+11	7.01.0.00.0.00.01.0000 KECAMATAN TEWEH TIMUR
Meningkatnya Lembaga Kemasyarakatan (LKD) yang Aktif	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang Aktif (Nilai)	0	30	30	9.909.875.128	35	1.011.339.176.213	40	1.033.254.821.226	45	105.697.277.561	50	1,08279E+12	7.01.0.00.0.00.03.0000 KECAMATAN LAHEI
Meningkatnya Lembaga Kemasyarakatan (LKD) yang Aktif	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang Aktif (Nilai)	0	23	23	90.241.098	23	92.510.520.811	23	94.813.331.641	23	97.333.030.861	23	1,00102E+11	7.01.0.00.0.00.05.0000 KECAMATAN MONTALLAT
Meningkatnya Lembaga Kemasyarakatan (LKD) yang Aktif	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang Aktif (Nilai)	0	10	20	1.510.689.634	40	154.868.112.025	60	158.723.154.583	80	162.941.279.925	100	1,67576E+11	7.01.0.00.0.00.08.0000 KECAMATAN GUNUNG TIMANG
Meningkatnya Lembaga Kemasyarakatan (LKD) yang Aktif	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang Aktif (Nilai)	75	100	16	18.590.706.041	32	1.905.823.328.113	48	1.953.263.891.207	64	2.005.172.587.251	80	2,06221E+12	7.01.0.00.0.00.04.0000 KECAMATAN GUNUNG PURE
Meningkatnya Lembaga Kemasyarakatan (LKD) yang Aktif	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang Aktif (Nilai)	0	10	20	1.510.689.634	40	154.868.112.025	60	158.723.154.583	80	162.941.279.925	100	1,67576E+11	7.01.0.00.0.00.07.0000 KECAMATAN LAHEI BARAT
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM														
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	JumlahKoordinasiKetentraman dan Ketertiban Umum	99	100	100	3.600.000.000	100	4.100.000.000	100	4.100.000.000	100	4.100.000.000	100	4100000000	7.01.0.00.0.00.07.0000 KECAMATAN LAHEI BARAT
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	83	94	95	3.000.000.000	96	5.500.000.000	96	5.500.000.000	97	5.500.000.000	98	5500000000	7.01.0.00.0.00.02.0000 KECAMATAN TEWEH BARU
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	83	94	95	3.000.000.000	96	5.500.000.000	96	5.500.000.000	97	5.500.000.000	98	5500000000	7.01.0.00.0.00.06.0000 KECAMATAN TEWEH SELATAN
Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan	Meningkatkan Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	0	100	100	1.128.875.489	100	11.572.649.433	100	1.186.072.073	100	121.759.236.527	100	1,25223E+11	7.01.0.00.0.00.01.0000 KECAMATAN TEWEH TENGAH
Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan	Meningkatkan Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	0	100	100	783.991.133	100	80.370.728.615	100	82.371.351.093	100	84.560.399.737	100	86965778492	7.01.0.00.0.00.02.0000 KECAMATAN TEWEH BARU
Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan	Meningkatkan Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	0	100	100	748.430.028	100	81.363.622.814	100	831.269.427	100	85.035.360.432	100	87111976888	7.01.0.00.0.00.06.0000 KECAMATAN TEWEH SELATAN
Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan	Meningkatkan Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	0	100	100	74.757.360	100	76.637.390.879	100	78.545.081.581	100	80.632.445.408	100	82926091658	7.01.0.00.0.00.01.0000 KECAMATAN TEWEH TIMUR
Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan	Meningkatkan Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	0	100	100	38.719.350	100	39.693.081.289	100	40.681.138.404	100	41.762.254.025	100	42950210373	7.01.0.00.0.00.03.0000 KECAMATAN LAHEI
Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan	Meningkatkan Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100	100	100	33.350.000	100	34.034.812.235	100	3.477.241.752	100	35.570.718.471	100	36439377917	7.01.0.00.0.00.05.0000 KECAMATAN MONTALLAT

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
		2024	2025	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan	Meningkatkan Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	0	100	100	307.142.828	100	43.004.755.632	100	43.936.758.734	100	44.945.453.496	100	46043049353	7.01.0.00.0.00.08.0000 KECAMATAN GUNUNG TIMANG
Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan	Meningkatkan Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	0	100	100	6.485.241	100	6.648.334.506	100	6.813.827.878	100	6.994.907.706	100	7193883144	7.01.0.00.0.00.04.0000 KECAMATAN GUNUNG PURE
Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan	Meningkatkan Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	0	100	100	6.485.241	100	6.648.334.506	100	6.813.827.878	100	6.994.907.706	100	7193883144	7.01.0.00.0.00.07.0000 KECAMATAN LAHEI BARAT
7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM														
Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan	Persentase Penurunan Angka Pelanggaran (%)	0	100	100	2.857.316.611	100	292.917.366.157	100	300.208.790.047	100	308.186.947.132	100	3,16954E+11	7.01.0.00.0.00.01.0000 KECAMATAN TEWEH TENGAH
Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan	Persentase Penurunan Angka Pelanggaran (%)	100	100	100	14.138.508.388	100	144.288.300.096	100	147.415.328.829	100	150.799.670.821	100	1,54482E+11	7.01.0.00.0.00.02.0000 KECAMATAN TEWEH BARU
Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan	Persentase Penurunan Angka Pelanggaran (%)	0	100	100	1.156.040.398	100	118.511.300.704	100	121.461.334.317	100	12.468.921.345	100	1,28236E+11	7.01.0.00.0.00.06.0000 KECAMATAN TEWEH SELATAN
Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan	Persentase Penurunan Angka Pelanggaran (%)	0	100	100	616.536.781	100	63.204.171.626	100	64.777.476.552	100	66.498.961.531	100	68390570863	7.01.0.00.0.00.01.0000 KECAMATAN TEWEH TIMUR
Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan	Persentase Penurunan Angka Pelanggaran (%)	0	100	100	289.429.976	100	27.377.603.294	100	27.970.933.144	100	2.861.308.606	100	2931183526	7.01.0.00.0.00.03.0000 KECAMATAN LAHEI
Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan	Persentase Penurunan Angka Pelanggaran (%)	0	100	100	109.163.888	100	6.806.962.447	100	6.954.483.504	100	7.114.143.961	100	7287876117	7.01.0.00.0.00.05.0000 KECAMATAN MONTALLAT
Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan	Persentase Penurunan Angka Pelanggaran (%)	0	100	100	91.944.616	100	9.425.687.822	100	9.660.316.411	100	991.704.271	100	10199139688	7.01.0.00.0.00.08.0000 KECAMATAN GUNUNG TIMANG
Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan	Persentase Penurunan Angka Pelanggaran (%)	0	0	0	-	100	7.728.529	100	7.896.022.705	100	8.077.298.631	100	8274551208	7.01.0.00.0.00.04.0000 KECAMATAN GUNUNG PURE
Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan	Persentase Penurunan Angka Pelanggaran (%)	0	0	0	-	100	7.728.529	100	7.896.022.705	100	8.077.298.631	100	8274551208	7.01.0.00.0.00.07.0000 KECAMATAN LAHEI BARAT
7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA														
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	JumlahPembinaan dan PengawasanPemerintahan Desa	99	100	100	358.720.000	100	36.500.000.000	100	36.500.000.000	100	36.500.000.000	100	36500000000	7.01.0.00.0.00.03.0000 KECAMATAN LAHEI
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	98	99	0	-	99	7.500.000.000	99	7.500.000.000	99	7.500.000.000	99	7500000000	7.01.0.00.0.00.02.0000 KECAMATAN TEWEH BARU

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
		2024	2025	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	98	99	0	117.000.000	99	17.500.000.000	99	17.500.000.000	99	17.500.000.000	99	17500000000	7.01.0.00.0.00.06.0000 KECAMATAN TEWEH SELATAN
Meningkatnya Keterisian Buku Administrasi Desa	Persentase Keterisian Buku Administrasi Pemerintahan Desa (%)	0	100	100	847.872.391	100	86.919.506.034	100	89.083.143.312	100	91.450.559.762	100	94051934466	7.01.0.00.0.00.01.0000 KECAMATAN TEWEH TENGAH
	Persentase Keterisian Buku Administrasi Keuangan dan Aset Desa (%)	0	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.02.0000 KECAMATAN TEWEH BARU
Meningkatnya Keterisian Buku Administrasi Desa	Persentase Keterisian Buku Administrasi Pemerintahan Desa (%)	0	100	100	1.584.779.994	100	161.599.103.172	100	165.237.334.045	100	169.030.445.653	100	1,73158E+11	7.01.0.00.0.00.06.0000 KECAMATAN TEWEH SELATAN
	Persentase Keterisian Buku Administrasi Keuangan dan Aset Desa (%)	0	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.01.0000 KECAMATAN TEWEH TIMUR
Meningkatnya Keterisian Buku Administrasi Desa	Persentase Keterisian Buku Administrasi Pemerintahan Desa (%)	100	100	100	95.594.440	100	97.557.386.316	100	99.671.658.924	100	10.195.990.781	100	1,0445E+11	7.01.0.00.0.00.03.0000 KECAMATAN LAHEI
	Persentase Keterisian Buku Administrasi Keuangan dan Aset Desa (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.05.0000 KECAMATAN MONTALLAT
Meningkatnya Keterisian Buku Administrasi Desa	Persentase Keterisian Buku Administrasi Pemerintahan Desa (%)	0	100	100	920.440.657	100	94.358.830.504	100	96.707.650.327	100	99.277.691.372	100	1,02102E+11	7.01.0.00.0.00.08.0000 KECAMATAN GUNUNG TIMANG
	Persentase Keterisian Buku Administrasi Keuangan dan Aset Desa (%)	0	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.04.0000 KECAMATAN GUNUNG PURE
Meningkatnya Keterisian Buku Administrasi Desa	Persentase Keterisian Buku Administrasi Pemerintahan Desa (%)	0	100	100	166.484.534	100	170.671.360.367	100	174.919.784.184	100	179.568.340.634	100	1,84676E+11	7.01.0.00.0.00.07.0000 KECAMATAN LAHEI BARAT
	Persentase Keterisian Buku Administrasi Keuangan dan Aset Desa (%)	0	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.05.0000 KECAMATAN MONTALLAT
Meningkatnya Keterisian Buku Administrasi Desa	Persentase Keterisian Buku Administrasi Pemerintahan Desa (%)	0	100	100	2.234.319.935	100	229.050.959.579	100	234.752.592.971	100	240.991.228.063	100	2,47846E+11	7.01.0.00.0.00.02.0000 KECAMATAN TEWEH BARU
	Persentase Keterisian Buku Administrasi Keuangan dan Aset Desa (%)	0	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.02.0000 KECAMATAN TEWEH BARU
Meningkatnya Keterisian Buku Administrasi Desa	Persentase Keterisian Buku Administrasi Pemerintahan Desa (%)	0	100	100	1.207.654.192	100	123.802.480.972	100	126.884.225.074	100	130.256.218.895	100	1,33961E+11	7.01.0.00.0.00.06.0000 KECAMATAN TEWEH SELATAN
	Persentase Keterisian Buku Administrasi Keuangan dan Aset Desa (%)	0	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.06.0000 KECAMATAN TEWEH SELATAN
Meningkatnya Keterisian Buku Administrasi Desa	Persentase Keterisian Buku Administrasi Pemerintahan Desa (%)	0	50	60	189.319.279	70	160.194.782.696	80	163.666.538.373	90	167.423.973.485	100	1,71513E+11	7.01.0.00.0.00.01.0000 KECAMATAN TEWEH TENGAH
	Persentase Keterisian Buku Administrasi Keuangan dan Aset Desa (%)	0	50	60		70		80		90		100		7.01.0.00.0.00.01.0000 KECAMATAN TEWEH TENGAH
Meningkatnya Keterisian Buku Administrasi Desa	Persentase Keterisian Buku Administrasi Pemerintahan Desa (%)	0	50	60	189.319.279	70	160.194.782.696	80	163.666.538.373	90	167.423.973.485	100	1,71513E+11	7.01.0.00.0.00.01.0000 KECAMATAN TEWEH TIMUR
	Persentase Keterisian Buku Administrasi Keuangan dan Aset Desa (%)	0	50	60		70		80		90		100		7.01.0.00.0.00.01.0000 KECAMATAN TEWEH TIMUR
8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK														
8.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														
Meningkatnya ketersediaan Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	100%	5.428.906.401	100%	5.971.797.041	100%	6.568.976.745	100%	7.225.874.419	100%	7.948.461.860	1.05.8.01.0.00.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.02 - PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN														

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
		2024	2025	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatkan Kesadaran, pemahaman dan Pengalaman nilai-nilai Pancasila, Wasbang dan Nasionalisme	Jumlah Pembinaan Ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa	5 Kali	5 Kali	5 Kali	1.633.500.000	5 Kali	1.796.850.000	5 Kali	1.976.535.000	5 Kali	2.174.188.500	5 Kali	2.391.607.350	1.05.8.01.0.00.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.03.2.01 Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik														
Meningkatkan Pendidkan Politik Masyarakat	Masyarakat yang Mangikuti Kegiatan Pendidikan Politik (orang)	200 Orang	200 Orang	200 Orang	1.377.217.633	200 Orang	1.514.939.396	200 Orang	1.666.433.335	200 Orang	1.833.076.668	200 Orang	2.016.384.334	1.05.8.01.0.00.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN														
Meningkatkan Kualitas Ormas dan LSM	Capaian Pembinaan Terhadap Ormas dan LSM, OKP Aktif (Persen)	80%	80%	80%	59.888.678	80%	65.877.485	80%	72.465.233	80%	79.711.756	80%	87.682.931	1.05.8.01.0.00.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.05 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA														
Peningkatan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan	Indeks Harmoni Indonesia	1250 Orang	1250 Orang	1250 Orang	266.200.000	1250 Orang	292.820.000	1250 Orang	322.102.000	1250 Orang	354.312.200	1250 Orang	389.743.420	1.05.8.01.0.00.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.06 - PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL														
Meningkatnya penyelesaian potensi konflik sosial di Masyarakat	Persentase Penyelesaian Konflik Sosial (Persen)	100%	100%	100%	2.533.987.582	100%	2.789.386.340	100%	3.068.324.974	100%	3.375.157.471	100%	3.712.673.218	1.05.8.01.0.00.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
TOTAL KESELURUHAN														
TOTAL PROGRAM	169													



Di samping program perangkat daerah pada Tahun 2026-2030, Pemerintah Kabupaten Barito Utara telah menyusun anggaran per program perangkat daerah per urusan tahun 2026. Rincian anggaran ini telah ditetapkan sebagaimana tercantum dalam APBD Tahun 2026 yang disinkronisasikan dengan dokumen RKPD Tahun 2026. Rincian tersebut seperti tersaji pada Tabel 4.2.



Tabel 4.2. Proyeksi Rincian Anggaran per Urusan per Program Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2026

Klasifikasi	Urusan	Program	Anggaran (Rp)				
			2026	2027	2028	2029	2030
Urusan Pemerintahan wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten	353.023.214.385	370.674.375.104	388.325.535.823	405.976.696.542	423.627.857.262
		Program pengelolaan pendidikan	91.350.928.874	95.918.475.319	100.486.021.759	105.053.568.202	109.621.114.647
		Program pengembangan kurikulum	29.254.377.215	30.717.096.076	32.179.814.936	33.642.533.797	35.105.252.658
		Program pendidik dan tenaga kependidikan	529.477.400	555.951.270	582.425.140	608.899.010	635.372.880
		Program pengendalian perizinan pendidikan	300.000.000	315.000.000	330.000.000	345.000.000	360.000.000
	Urusan Pemerintahan Bidang kesehatan	Program Penunjang Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	26.216.681.852	29.100.516.856	32.301.573.710	35.854.746.818	39.798.768.968
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	10.096.272.716	11.206.862.714	12.439.617.613	13.807.975.550	15.326.852.861
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	81.427.491.000	90.384.515.010	100.326.811.661	111.362.760.943	123.612.664.649
		Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	112.674.990.000	125.069.238.900	138.826.855.179	154.097.809.250	171.048.568.266
		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	90.946.018.500	100.950.080.536	112.054.589.394	124.380.594.228	138.062.459.592
	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	-	-	-	-	-
		Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	42.226.806.500	43.282.476.663	44.364.538.579	45.473.652.043	46.610.493.344
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	22.000.000.000	22.550.000.000	23.113.750.000	23.691.593.750	24.283.883.594
		Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	-	-	300.000.000	300.000.000	300.000.000
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	7.852.449.250	8.048.760.481	8.249.979.493	8.456.228.981	8.667.634.706



Klasifikasi	Urusan	Program	Anggaran (Rp)				
			2026	2027	2028	2029	2030
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	650.000.000	666.250.000	68.290.625	69.997.890	50.223.486
		Program Penataan Bangunan Gedung	157.000.000	160.925.000	164.948.125	169.071.828	173.298.624
		Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	-	-	-	-	-
		Program Penyelenggaraan Jalan	706.200.463.863	723.855.475.460	741.951.862.346	760.500.658.905	779.513.175.378
		Program Pengembangan Jasa Konstruksi	827.497.500	848.184.938	869.389.561	891.124.300	913.402.408
		Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	1.800.000.000	1.845.000.000	1.891.125.000	1.938.403.125	1.986.863.203
	Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten					
		Program Pengembangan Perumahan	-	-	1.500.000.000	1.625.000.000	1.750.000.000
		Program Kawasan Permukiman	3.000.000.000	3.000.000.000	3.150.000.000	3.225.000.000	3.300.000.000
		Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	3.500.000.000	5.900.000.000	8.000.000.000	13.750.000.000	17.000.000.000
		Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, Dan Registrasi Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman					
	Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	52.299.617.685	57.521.579.453	63.270.737.398	69.589.311.138	76.544.742.251
		Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	670.000.000	720.000.000	740.000.000	770.000.000	815.000.000
		Program Penanggulangan Bencana	7.228.293.521	7.951.122.872	8.746.235.161	9.620.858.676	10.582.944.543
		Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	12.238.000.000	13.461.800.000	14.807.980.000	16.288.778.000	17.917.655.800
	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	7.879.351.828	7.979.351.828	8.879.351.828	8.979.351.828	9.879.351.828



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Tahun 2025-2029

Klasifikasi	Urusan	Program	Anggaran (Rp)				
			2026	2027	2028	2029	2030
		Program Pemberdayaan Sosial	1.552.144.000	1.652.144.000	1.752.144.000	1.852.144.000	1.952.144.000
		Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan					
		Program Rehabilitasi Sosial	4.226.486.616	4.326.486.616	4.426.486.616	4.526.486.616	4.626.486.616
		Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	346.070.944	370.000.000	400.000.000	430.000.000	460.000.000
		Program Penanganan Bencana	1.948.100.000	2.000.000.000	2.100.000.000	2.200.000.000	2.300.000.000
		Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	72.800.000	100.000.000	150.000.000	200.000.000	250.000.000
Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	-	-	-	-	-
		Program Perencanaan Tenaga Kerja	157.317.000	171.317.000	191.317.000	211.317.000	231.317.000
		Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	2.200.000.000	2.500.000.000	2.800.000.000	3.100.000.000	3.400.000.000
		Program Penempatan Tenaga Kerja	151.317.000	171.317.000	191.317.000	211.317.000	231.317.000
		Program Hubungan Industrial	115.763.000	126.800.000	126.800.000	130.000.000	135.000.000
		Program Pengawasan Ketenagakerjaan					
	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	10.000.000	50.000.000	75.000.000	120.000.000	165.000.000
		Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	-	65.335.000.000	625.000.000	870.000.000	934.500.000
		Program Perlindungan Perempuan	35.000.000	100.000.000	150.000.000	200.000.000	250.000.000
		Program Peningkatan Kualitas Keluarga	10.000.000	144.145.900	175.000.000	230.000.000	280.000.000
		Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	35.000.000	75.000.000	125.000.000	175.000.000	230.000.000
		Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	40.000.000	140.000.000	185.000.000	240.000.000	280.000.000
		Program Perlindungan Khusus Anak	21.000.000	145.000.000	195.000.000	250.000.000	300.000.000
	Urusan Pemerintahan Bidang Pangan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten					



Klasifikasi	Urusan	Program	Anggaran (Rp)				
			2026	2027	2028	2029	2030
		Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	182.000.000	200.200.000	220.220.000	242.242.000	226.466.200
		Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	254.765.397	303.718.476	362.262.171	432.294.606	516.091.527
		Program Penanganan Kerawanan Pangan	80.445.000	88.445.000	97.289.500	107.018.450	117.720.295
		Program Pengawasan Keamanan Pangan	48.234.500	96.469.000	115.762.800	138.915.360	166.698.432
	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	-	-	-	-	-
		Program Redistribusi Tanah Dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee	117.405.000	117.405.000	201.910.000	117.405.000	117.405.000
		Program Penatagunaan Tanah	-	-	-	-	-
	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten					
		Program Perencanaan Lingkungan Hidup	791.120.710	909.788.817	1.046.257.139	1.203.195.710	1.383.675.066
		Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	2.672.405.000	3.073.265.750	3.534.255.613	4.064.393.954	4.674.053.048
		Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	467.567.200	537.702.280	618.357.622	711.111.265	817.777.955
		Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun	62.478.000	71.849.700	82.627.155	95.021.228	109.274.412
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)	368.906.000	424.241.900	487.878.185	561.059.913	645.218.900



Klasifikasi	Urusan	Program	Anggaran (Rp)				
			2026	2027	2028	2029	2030
		Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (Mha), Kearifan Lokal Dan Hak Mha Yang Terkait Dengan Pplh	284.672.000	327.372.800	376.478.720	432.950.528	497.893.107
		Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	279.952.000	321.944.800	370.236.520	425.771.998	489.637.798
		Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	20.000.000	23.000.000	26.450.000	30.417.500	34.980.125
		Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	240.227.900	276.262.085	317.701.398	365.356.607	420.160.099
		Program Pengelolaan Persampahan	10.602.770.000	12.193.185.500	14.022.163.325	16.125.487.824	18.544.310.997
	Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	8.604.827.134	9.465.309.847	9.713.924.758	-	-
		Program Pendaftaran Penduduk	554.399.536	609.839.490	670.823.439	737.905.782	81.169.636
		Program Pencatatan Sipil	362.362.500	398.598.750	438.458.625	482.304.486	530.534.936
		Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	40.000.000	440.000.000	484.000.000	532.400.000	585.640.000
		Program Pengelolaan Profil Kependudukan	45.000.000	49.500.000	54.450.000	59.895.000	65.884.500
	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten					
		Program Peningkatan Kerja Sama Desa	100.000.000	150.000.000	200.000.000	250.000.000	300.000.000
		Program Administrasi Pemerintahan Desa	844.303.728	887.303.728	930.303.728	973.303.728	1.016.303.728
		Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	8.210.000.000	8.620.500.000	9.030.500.000	9.440.500.000	9.850.500.000
	Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Program Pengendalian Penduduk	55.000.000	315.000.000	490.000.000	675.000.000	850.000.000
		Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)	35.000.000	225.000.000	325.000.000	430.000.000	525.000.000



Klasifikasi	Urusan	Program	Anggaran (Rp)				
			2026	2027	2028	2029	2030
		Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	203.000.000	755.150.000	710.000.000	870.000.000	1.001.000.000
	Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	13.758.562.697	15.134.420.000	16.510.300.000	17.880.000.000	19.250.000.000
		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)	925.520.700	750.000.000	850.000.000	850.000.000	900.000.000
		Program Pengelolaan Pelayaran	229.455.500	230.000.000	250.000.000	250.000.000	250.000.000
		Program Pengelolaan Perkeretaapian					
	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	300.000.000	350.000.000	400.000.000	450.000.000	500.000.000
		Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	300.000.000	350.000.000	400.000.000	450.000.000	500.000.000
		Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000
	Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten					
		Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam					
		Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	-				
		Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi					
		Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	-				
		Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	-				
		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	-				
		Program Pengembangan UMKM	-				
	Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	6.196.468.500	8.055.409.050	10.472.031.765	13.613.641.295	17.697.733.683



Klasifikasi	Urusan	Program	Anggaran (Rp)				
			2026	2027	2028	2029	2030
		Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	320.000.000	416.000.000	540.800.000	703.040.000	913.952.000
		Program Promosi Penanaman Modal	385.000.000	500.500.000	650.650.000	845.845.000	1.099.598.500
		Program Pelayanan Penanaman Modal	225.000.000	292.500.000	380.250.000	494.325.000	642.622.500
		Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	553.000.000	718.900.000	934.570.000	1.214.941.000	1.579.423.300
		Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	30.000.000	39.000.000	50.700.000	65.910.000	85.683.000
	Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	13.800.000.000	15.180.000.000	16.698.000.000	18.368.000.000	20.024.000.000
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	1.430.000.000	1.573.000.000	1.730.000.000	1.903.000.000	2.093.000.000
		Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	14.200.000.000	15.620.000.000	17.182.000.000	18.900.000.000	20.790.000.000
		Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	-	-	-	-	-
	Urusan Pemerintahan Bidang Statistik	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	-	-	-	-	-
	Urusan Pemerintahan Bidang Persandian	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	1.640.452.800	1.722.475.440	1.808.599.212	1.899.029.173	1.993.980.631
	Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten					
		Program Pengembangan Kebudayaan	4.500.000.000	4.950.000.000	5.445.000.000	5.989.000.000	6.588.000.000
		Program Pengembangan Kesenian Tradisional	525.000.000	578.000.000	635.000.000	699.000.000	769.000.000
		Program Pembinaan Sejarah	-	-	-	-	-
		Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	475.000.000	523.000.000	575.000.000	633.000.000	696.000.000
		Program Pengelolaan Permuseuman	250.000.000	275.000.000	303.000.000	334.000.000	368.000.000



Klasifikasi	Urusan	Program	Anggaran (Rp)				
			2026	2027	2028	2029	2030
	Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	14.301.744.440	14.587.779.328	14.879.534.915	15.177.125.613	15.480.668.125
		Program Pembinaan Perpustakaan	16.794.477.334	1.631.463.512	1.664.092.782	1.697.374.638	1.731.322.131
		Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno	680.901.023	694.519.043	708.409.424	722.577.612	737.029.165
	Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan	Program Pengelolaan Arsip	648.477.165	680.901.023	714.946.074	750.693.378	788.228.047
		Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	239.916.017	244.714.337	249.608.624	254.600.796	259.692.812
Urusan Pemerintahan Pilihan	Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten					
		Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil					
		Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	320.000.000	324.000.000	330.000.000	341.000.000	362.000.000
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	3.049.606.000	3.800.000.000	4.100.000.000	Rp 4 500000000	5.000.000.000
		Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	175.000.000	205.000.000	230.000.000	250.000.000	270.000.000
		Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	100.000.000	120.000.000	130.000.000	140.000.000	150.000.000
	Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	4.800.000.000	5.280.000.000	5.808.000.000	6.339.000.000	7.028.000.000
		Program Pemasaran Pariwisata	910.000.000	1.001.000.000	1.001.000.000	1.211.000.000	1.332.000.000
		Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	125.000.000	138.000.000	152.000.000	167.000.000	184.000.000
	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	34.047.216.769	39.154.299.284	39.937.385.270	41.934.254.534	43.611.624.715
		Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	6.240.000.000	9.048.000.000	9.771.840.000	11.628.489.600	11.977.344.288
		Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	66.464.420.572	69.787.641.600	73.277.023.680	74.742.564.154	76.237.415.437



Klasifikasi	Urusan	Program	Anggaran (Rp)				
			2026	2027	2028	2029	2030
		Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	354.851.375	372.593.943	402.401.459	438.617.590	460.548.470
		Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	1.790.000.000	2.040.600.000	2.183.442.000	2.379.951.780	2.617.946.958
		Program Penyuluhan Pertanian	1.190.000.000	1.225.700.000	1.262.471.000	1.325.594.550	1.378.618.332
	Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten					
		Program Pengelolaan Hutan					
		Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya					
		Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan					
		Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Das)					
	Urusan Pemerintahan Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten					
		Program Pengelolaan Aspek Kegeologian					
		Program Pengelolaan Mineral Dan Batubara					
		Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan					
		Program Pengelolaan Ketenagalistrikan					
	Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	11.627.303.689	11.627.303.689	11.627.303.689	11.627.303.689	11.627.303.689
		Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000
		Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000
		Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	672.625.000	672.625.000	672.625.000	672.625.000	672.625.000



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Tahun 2025-2029

Klasifikasi	Urusan	Program	Anggaran (Rp)				
			2026	2027	2028	2029	2030
		Program Pengembangan Ekspor	1.065.000.000	1.065.000.000	1.065.000.000	1.065.000.000	1.065.000.000
		Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000
		Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri					
	Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	60.000.000	60.000.000	60.000.000	60.000.000	60.000.000
		Program Pengendalian Izin Usaha Industri	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000
		Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional					
	Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi	Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi					
		Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	112.500.000	123.750.000	136.125.000	149.757.500	164.711.250
		Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	37.500.000	41.250.000	45.375.000	49.912.500	54.903.750
Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	Sekretariat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	201.901.042.045	206.948.568.100	212.122.282.303	217.425.339.356	222.860.972.836
		Program Pemerintahan Dan Otonomi Daerah					
		Program Kesejahteraan Rakyat	126.509.293.575	129.672.025.914	132.913.826.563	136.236.672.225	139.642.589.030
		Program Fasilitas Dan Koordinasi Hukum					
		Program Perekonomian Dan Pembangunan	10.141.729.125	10.395.272.353	10.655.154.162	10.921.533.017	11.194.571.340
		Program Kebijakan Dan Pelayanan Pengadaan Barang Dan Jasa	3.597.302.250	3.687.234.807	3.779.415.676	3.873.901.068	3.970.748.595
		Program Kebijakan Administrasi Pembangunan					
		Program Penataan Organisasi					
	Sekretariat DPRD	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	21.046.971.268	23.151.668.395	25.466.835.234	28.013.518.758	30.814.870.633
		Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	50.543.569.520	55.597.927.010	61.157.719.711	67.273.491.682	74.000.840.850



Klasifikasi	Urusan	Program	Anggaran (Rp)				
			2026	2027	2028	2029	2030
Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	Perencanaan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	14.738.880.000	15.000.000.000	15.905.347.035	15.500.047.000	16.105.847.000
		Program Perencanaan Pengendalian, Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	2.353.938.100	2.453.938.100	2.553.938.100	2.653.938.100	2.753.938.100
		Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	3.997.586.200	4.297.586.200	4.497.586.200	4.697.586.200	4.897.586.200
	Keuangan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	8.438.228.350	864.815.906	886.436.304	908.597.211	931.312.141
		Program Pengelolaan Keuangan Daerah	324.223.581.564	332.329.171.103	340.637.400.381	349.153.335.390	357.882.168.775
		Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.022.128.853	104.768.207.433	107.387.412.618	110.072.097.934	112.823.900.382
		Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	1.040.000.000	1.366.000.000	1.700.150.000	2.042.653.750	2.393.720.094
	Kepegawaian	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	11.205.062.217	12.885.821.000	14.818.694.000	17.041.498.000	19.597.723.000
		Program Kepegawaian Daerah	6.144.880.250	7.072.932.000	8.141.865.000	9.372.332.000	10.790.765.000
	Pendidikan dan Pelatihan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten					
		Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	3.128.504.900	3.228.504.900	3.328.504.900	3.428.504.900	3.528.504.900
	Penelitian Dan Pengembangan	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah					
	Pengelolaan Penghubung	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten					
		Program Pelayanan Penghubung					
Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan	Inspektorat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	22.529.595.641	26.167.835.532	26.822.031.420	27.492.582.206	28.179.896.761
		Program Penyelenggaraan Pengawasan	1.412.836.425	1.448.157.336	1.484.361.270	1.521.976.252	1.560.025.659
		Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	1.006.600.225	1.031.765.231	1.057.559.363	1.083.998.163	1.111.097.933



Klasifikasi	Urusan	Program	Anggaran (Rp)				
			2026	2027	2028	2029	2030
Unsur Pemerintahan Umum	Kesatuan Bangsa dan Politik	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	5.428.906.401	5.971.797.041	6.568.976.745	7.225.874.419	7.948.461.860
		Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	1.633.500.000	1.796.850.000	1.976.535.000	2.174.188.500	2.391.607.350
		Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	1.377.217.633	1.514.939.396	1.666.433.335	1.833.076.668	2.016.384.334
		Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	59.888.678	65.877.485	72.465.233	79.711.756	87.682.931
		Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	266.200.000	292.820.000	322.102.000	354.312.200	389.743.420
		Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	2.533.987.582	2.789.386.340	3.068.324.974	3.375.157.471	3.712.673.218
TOTAL			2.763.538.202.637	3.057.564.748.750	3.142.342.651.065	3.287.952.928.987	3.459.270.349.448

4.2. Kinerja Penyelenggara

4.2.1. Indikator Kinerja Utama

Kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan sekumpulan indikator yang menjadi tolok ukur ketercapaian pembangunan pada setiap tujuan, sasaran, dan program pemerintah daerah yang dijalankan selama 5 (lima) tahun ke depan.

Terdapat 2 (dua) indikator kinerja yang akan mengukur pembangunan, yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD). Daftar IKU dan IKD yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Barito Utara dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan adalah sebagai berikut.



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Tahun 2025-2029**

Tabel 4.3. Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Barito Utara Tahun 2025-2029

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Baseline		Target Tahun				
			2024	Target 2025	2026	2027	2028	2029	2030
Indikator Tujuan									
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Skor	72,31	72,75	73,00	73,40	73,85	74,35	74,76
2	Indeks Kualitas Keluarga	Indeks	74,00	74,20	74,25	74,28	74,30	74,50	75,00
3	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Indeks	64,27	65,55	66,86	68,20	69,56	70,95	72,00
4	Peningkatan aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah pemerataan akses mobilitas Masyarakat	%	31,5	40	50	58	64	70	75
5	Keseimbangan antara pembangunan dan kemampuan lingkungan kondisi lingkungan akibat aktivitas pembangunan	%	30	35	40	45	55	60	75
6	Indeks ketahanan pangan	Indeks	84,45	84,91	84,97	85,02	85,07	85,11	85,15
7	Rasio PDRB sektor industri pengolahan terhadap total PDRB	%	8,25	8,5	8,8	9,1	9,4	9,7	10,0
8	Jumlah UMKM aktif	Unit	7.500	7.800	8.200	8.700	9.200	9.800	10.400
9	Persentase perusahaan melaksanakan CSR dan pengawasan lingkungan	%	65	70	75	78	80	82	85
10	Kapasitas terpasang EBT	MW	2,5	2,8	3,2	3,6	4,0	4,5	5,0
11	Indeks Kepuasan Masyarakat/IKM	Point	NA	80	82	84	86	88	90
12	Indeks Reformasi Birokrasi	Point	NA	70	72	74	76	78	80
13	Persentase ASN bersertifikat kompetensi	%	NA	40	50	60	70	80	90
14	Opini BPK	WTP	NA	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
15	Nilai SAKIP minimal “B”	Kategori	NA	B	B	B	BB	BB	A
16	Jumlah forum konsultasi publik	Forum	NA	5	7	9	11	13	15
17	Indeks Demokrasi Daerah (IDD)	Point	NA	72	74	76	78	80	82



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Tahun 2025-2029**

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Baseline		Target Tahun				
			2024	Target 2025	2026	2027	2028	2029	2030
18	Indeks partisipasi lembaga adat dalam pembangunan daerah	Skor	NA	60	70	80	90	95	100
19	Persentase lembaga adat yang aktif berperan dalam pembinaan masyarakat	%	NA	65	70	75	80	85	90
Indikator Sasaran									
1	Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun	73,65	73,73	73,81	73,89	73,97	74,05	74,13
2	Prevalensi stunting	%	15,30	15,00	15,00	14,62	13,88	13,19	13,12
3	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	9,35	9,45	9,60	9,75	9,90	10,05	10,19
4	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	12,90	13,00	13,10	13,25	13,40	13,50	13,62
5	Persentase peningkatan audien MTQ/Pesparawi/Pesperapi/Utsawa Dharma Gita/Swayamvara Tripitaka Gatha	%	N/A	15,00	21,46	36,70	25,00	52,26	61,58
6	Persentase peningkatan peserta event budaya	%	N/A	0,00	19,86	3,33	3,87	18,57	23,16
7	Persentase lembaga agama dan sosial keagamaan yang telah menerima pendampingan atau pembinaan tata kelola kelembagaan	%	N/A	41,21	41,71	56,21	65,71	84,21	94,46
8	Tingkat Kemiskinan	%	5,67	4,61	4,19	3,77	3,35	2,93	2,52
9	Total kredit terhadap PDRB	%	20,8	21,80	23,85	25,90	27,95	30,00	32,05
10	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,08	6,5	7,0	7,3	7,5	7,5	7,8
11	Tingkat inflasi	%	1,01	2,5±1,0	2,5±1,0	2,5±1,0	2,5±1,0	2,5±1,0	2,5±1,0
12	Proporsi sekolah dengan akses ke: listrik, internet dan computer, air minum layak, fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, dan fasilitas cuci tangan (terdiri air/sanitasi/dan higienis bagi semua (wash).	%	67,54	70,6	75,88	81,16	86,44	91,72	97,00



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Tahun 2025-2029**

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Baseline		Target Tahun				
			2024	Target 2025	2026	2027	2028	2029	2030
13	Indeks pembangunan literasi masyarakat	Indeks	70,45	74,27	75,95	77,62	79,30	80,97	82,65
14	Indeks Literasi Digital	Indeks	3,55	3,70	3,75	3,80	3,85	3,90	3,95
15	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	Indeks	55,8	59,87	60,26	61,43	62,82	63,76	64,89
16	Laju pertumbuhan produktivitas pertanian pangan	%	102	106	110	113	116	118	120
17	Produksi perikanan tangkap & budidaya	Ton	5.400	5.700	6.050	6.350	6.600	6.850	7.000
18	Produksi hasil perkebunan unggulan (sawit/karet/kelapa)	Ton	15.300	15.800	16.400	16.900	17.300	17.600	17.900
19	Ekstensifikasi dan cetak sawah (sesuai rencana kawasan AOI KSPB Barito utara 38.170,90 ha)	%	0,00	1,05	3,15	7,33	11,79	17,82	23,59
20	Jumlah kelompok tani/nelayan binaan aktif	Unit	230	245	260	275	290	310	330
21	Persentase petani yang mengakses teknologi ramah lingkungan	%	25	30	35	40	45	50	55
22	Jumlah pelatihan pertanian berkelanjutan terlaksana	Kegiatan	18	20	22	24	26	28	30
23	Persentase rumah tangga tani di atas garis kemiskinan	%	72	74	76	78	80	82	85
24	Nilai Tukar Petani (NTP)		112	114	116	118	120	122	125
25	Persentase desa pertanian mandiri dan berkelanjutan	%	18	22	25	30	35	40	45
26	Persentase tenaga kerja sektor pertanian tersertifikasi	%	12	15	18	22	25	28	30
27	Rasio PDRB sektor industri pengolahan terhadap total PDRB	%	8,25	8,5	8,8	9,1	9,4	9,7	10,0
28	Nilai ekspor produk olahan lokal	Miliar Rp	220	250	280	310	350	390	430
29	Jumlah investasi baru	Miliar Rp	480	510	550	590	630	670	720



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Tahun 2025-2029**

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Baseline		Target Tahun				
			2024	Target 2025	2026	2027	2028	2029	2030
30	Jumlah UMKM aktif	Unit	7.500	7.800	8.200	8.700	9.200	9.800	10.400
31	Persentase UMKM dengan akses pembiayaan formal	%	38	41	44	48	52	56	60
32	Rasio wirausaha produktif terhadap penduduk usia kerja	%	1,8	2,0	2,2	2,4	2,6	2,8	3,0
33	Persentase perusahaan melaksanakan CSR dan pengawasan lingkungan	%	65	70	75	78	80	82	85
34	Luas areal rehabilitasi dan reklamasi	Ha	1.250	1.350	1.500	1.650	1.800	2.000	2.200
35	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	76,34	76,80	77,20	77,60	78,00	78,50	79,00
36	Kapasitas terpasang EBT	MW	2,5	2,8	3,2	3,6	4,0	4,5	5,0
37	Persentase energi terbarukan terhadap total konsumsi energi	%	7,5	8,0	9,0	10,0	11,0	12,0	13,0
38	Jumlah desa dengan infrastruktur EBT	Desa	5	7	10	13	16	20	25
39	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Point	NA	80	82	84	86	88	90
40	Indeks Reformasi Birokrasi	Point	NA	70	72	74	76	78	80
41	Persentase ASN bersertifikat kompetensi	%	NA	40	50	60	70	80	90
42	Indeks Profesionalisme ASN	Point	NA	65	68	71	74	77	80
43	Opini BPK	WTP	NA	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
44	Nilai SAKIP minimal "B"	Kategori	NA	B	B	B	BB	BB	A
45	Jumlah forum konsultasi publik	Forum	NA	5	7	9	11	13	15
46	Indeks Demokrasi Daerah	Point	NA	72	74	76	78	80	82
47	Persentase lembaga adat yang berpartisipasi aktif dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan	%	NA	65	70	75	80	85	90
48	Indeks pembangunan kebudayaan daerah	Skor	NA	45	50	60	70	75	80



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Tahun 2025-2029**

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Baseline		Target Tahun				
			2024	Target 2025	2026	2027	2028	2029	2030
49	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pelestarian budaya	%	NA	60	62	63	64	65	65
50	Jumlah komunitas budaya dan kesenian yang aktif	Komunitas	NA	70	75	80	85	90	95
51	Jumlah warisan tak benda (WBTb) dan benda yang diakui atau terdaftar	-	NA	61	62	63	64	65	65
52	Persentase Penduduk Miskin (P0)	%	5,67	5,60	5,40	5,20	5,00	4,80	4,60
53	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	%	0,89	0,85	0,80	0,75	0,70	0,65	0,60
54	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	%	0,22	0,20	0,19	0,18	0,17	0,16	0,15
55	Indeks Gini (Gini Ratio)	Indeks	0,269	0,265	0,261	0,257	0,253	0,249	0,245
56	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	87,96	88,14	88,32	88,50	88,68	88,86	89,04
57	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	87,49	87,88	88,29	88,69	89,09	89,49	89,89
58	Persentase Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak yang Tertangani	%	11	16	21	26	31	36	41
59	Prevalensi Stunting (Balita) (dalam persen)	%	20,4	19,3	18,2	17,1	16,0	14,9	13,8
60	Predikat Kabupaten Layak Anak (KLA)	Predikat	N/A	KLA	KLA	KLA	KLA	KLA	KLA

Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Barito Utara disusun dalam dua tingkatan indikator tujuan dan indikator sasaran untuk menjamin keselarasan antara arah strategis pembangunan dan hasil sektoral yang terukur.

1. Indikator tujuan menggambarkan keberhasilan pembangunan daerah secara makro, seperti kesejahteraan, pemerataan ekonomi, dan tata kelola.
2. Indikator sasaran menjabarkan keberhasilan sektoral yang lebih spesifik dan operasional, menjadi jembatan antara kebijakan strategis dan capaian program perangkat daerah.

Dengan kerangka ini, kinerja pemerintah daerah dapat diukur secara menyeluruh, lintas sektor, dan berorientasi hasil, sekaligus menjadi dasar penilaian akuntabilitas pembangunan tahunan dalam Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (LKPD) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD).

4.2.2. Indikator Kinerja Daerah dan Indikator Kinerja Kunci

Indikator Kinerja Daerah (IKD) merupakan ukuran keberhasilan pembangunan yang digunakan untuk memantau dan mengevaluasi capaian pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah dalam periode RPJMD. Penyusunan IKD Kabupaten Barito Utara 2025-2029 didasarkan pada pendekatan *outcome-based planning* sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, PermenPANRB Nomor 88 Tahun 2021, dan mengacu pada RPJPD Kabupaten Barito Utara 2025-2045.

IKD berfungsi sebagai instrumen evaluasi lintas urusan dan lintas perangkat daerah, yang mencerminkan empat dimensi pembangunan daerah, yaitu:

1. Aspek geografi dan demografi, menilai kondisi dasar lingkungan dan karakteristik penduduk;
2. Aspek kesejahteraan masyarakat, menggambarkan capaian ekonomi, sosial, dan pemerataan kesejahteraan;
3. Aspek daya saing daerah, mengukur produktivitas, kapasitas ekonomi, dan kemampuan inovasi;
4. Aspek pelayanan umum dan tata kelola pemerintahan, menilai efektivitas birokrasi, pelayanan publik, serta kualitas pengelolaan keuangan daerah.

IKD Kabupaten Barito Utara juga menjadi dasar pengukuran kinerja antarperiode RPJMD dan menjadi acuan dalam penetapan Indikator Kinerja Kunci (IKK) perangkat daerah,

agar tercipta keselarasan antara hasil pembangunan daerah dengan kinerja organisasi pelaksana. Indikator Kinerja Daerah (IKD) Kabupaten Barito Utara 2025-2029 disusun berdasarkan hasil analisis capaian IKD tahun 2019–2024 dan proyeksi 2025–2029.

Tabel 4.4. Indikator Kinerja Daerah (IKD) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kabupaten Barito Utara Tahun 2025-2029

No	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN						SKPD Penanggung Jawab
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
INDIKATOR KINERJA DAERAH (IKD)									
I	ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI								
1	Indeks Ketahanan Pangan	Angka	66,59	66,33	69,44	68,89	69,58	70,68	DISTAN
2	Rasio Elektrifikasi	%	88,42	93,44	91,50	94,28	91,32	91,46	DISPERKIMTAN
3	Akses Rumah Tangga terhadap Konsumsi Air Minum	Persentase	36,44	36,94	40,12	42,84	45,41	49,40	DISPERKIMTAN
4	Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah	kg/orang	6,43	9,59	12,69	15,46	18,99	21,05	DISLH
5	Proporsi rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah	Persentase	35,89	35,45	35,77	35,70	36,83	37,75	DISLH
6	Indeks Ketahanan Daerah	Angka	0,46	0,50	0,51	0,52	0,54	0,57	BPBD
7	Laju Pertumbuhan Penduduk	Persentase	1,20	1,20	1,23	1,19	1,23	1,18	DISDUKCAPIL
8	Rasio Penduduk	Persentase	97,18	100,34	99,88	98,63	94,74	95,07	DISDUKCAPIL
9	Kepadatan Penduduk	Orang/km²	16,04	16,00	16,00	16,97	16,57	16,73	DISDUKCAPIL
10	Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun	Tahun	8,62	8,86	8,93	8,84	9,24	9,28	DISDIK
11	Harapan lama sekolah	Tahun	12,16	12,90	12,65	13,21	13,72	13,60	DISDIK
12	Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi	Persentase	69,04	69,20	68,75	70,88	72,28	73,88	DISDIK
13	Proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi	Persentase	10,43	10,32	10,44	11,01	11,12	10,78	DISDIK
14	Luas layanan irigasi multikomoditas yang dibangun dan/atau ditingkatkan padi dan non padi	Hektare	1345,18	1402,47	1420,18	1483,96	1470,15	1508,67	DPUPR, DISTAN
15	Rasio luas daerah irigasi yang dilayani oleh jaringan irigasi	Persentase	23,84	25,18	28,01	29,80	32,23	35,74	DPUPR, DISTAN
16	Persentase Ketercapaian Pembangunan Fasilitas Internet di 376 Desa Tidak Terjangkau atau Kesulitan Jaringan Internet	Persentase	90,22	94,41	90,32	92,53	92,09	93,61	DISKOMINFOSANDI
17	Persentase penurunan emisi gas rumah kaca tahunan	Persentase	44,09	46,11	48,85	50,31	54,93	57,73	DISLH
18	Persentase penurunan emisi gas rumah kaca akumulatif	Persentase	26,03	27,14	27,21	29,29	29,59	30,45	DSILH
19	Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah	Persentase	13,95	16,33	18,08	19,81	21,69	23,64	DISLH
20	Proporsi rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah	Persentase	34,43	36,03	37,04	36,33	37,91	37,85	DISLH
21	Persentase satuan pendidikan yang melaksanakan pengarusutamaan kebudayaan	Persentase	92,91	93,81	92,03	94,30	92,48	90,07	DISBUDPARPURA
22	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang dilestarikan	Persentase	94,14	90,68	94,32	90,95	92,12	94,68	DISBUDPARPURA
23	Indeks Pembangunan Pemuda	Indeks	49,72	52,22	52,96	51,35	52,64	53,59	DISBUDPARPURA
24	Indeks Pembangunan Olahraga	Indeks	0,31	0,33	0,35	0,36	0,38	0,41	DISBUDPARPURA
25	Luas Wilayah dengan RTRW Terintegrasi	%	70,00	75,00	80,00	85,00	90,00	95,00	BAPERIDA, DPUPR
26	Rasio Kepadatan Penduduk	Jiwa/km²	18,00	18,50	19,00	19,50	20,00	20,50	DISDUKCAPIL, BPS
27	Rasio Wilayah Tertinggal/Terlayani Infrastruktur Dasar	%	32,00	28,00	25,00	22,00	20,00	18,00	DPUPR, DISPERKIMTAN
28	Indeks Ketahanan Bencana	Skor	60,00	65,00	70,00	75,00	80,00	85,00	BPBD
II	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT								
1	Proporsi penciptaan lapangan kerja formal	Persentase	49,03	49,19	52,33	53,88	55,38	56,48	DISNAKERTRANSKOPUKM
2	Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan	Persentase	46,86	50,02	50,55	50,20	51,15	51,58	DISNAKERTRANSKOPUKM
3	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (<i>treatment success rate</i>)	Persentase	82,60	83,52	85,25	83,52	81,85	82,08	DINKES
4	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional	Persentase	90,16	89,67	90,22	93,73	89,51	93,66	DINKES
5	Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan	Persentase	39,62	42,85	45,16	47,99	50,67	56,06	DISNAKERTRANSKOPUKM
6	Persentase penyandang disabilitas bekerja di sector formal	Persentase	36,11	38,34	41,03	44,85	45,74	47,51	DISNAKERTRANSKOPUKM
7	Persentase penduduk yang memiliki sumber penghasilan sebagai pelaku/pendukung kegiatan seni	Persentase	0,45	0,48	0,50	0,50	0,54	0,56	DISNAKERTRANSKOPUKM
8	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai	66,24	69,13	70,31	73,16	73,64	75,39	DISDIK
9	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	Indeks	68,70	70,35	70,36	72,82	73,59	73,51	DISDIK
10	Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun	70,50	70,90	71,30	71,80	72,20	72,60	DINKES
11	Prevalensi stunting	%	19,00	17,00	15,00	13,00	11,00	9,00	DINKES
12	Angka Partisipasi Murni (APM) SD	%	99,6	99,7	99,7	99,8	99,9	100,0	DISDIK



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Tahun 2025-2029

No	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN						SKPD Penanggung Jawab
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
13	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP	%	83,00	83,5	84,00	84,5	85,00	85,50	DISDIK
14	Angka Melek Huruf	%	99,75	99,80	99,85	99,90	99,92	99,98	DISDIK, BPS
15	Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	Tahun	9,45	9,60	9,75	9,90	10,05	10,20	DISDIK, BPS
16	Persentase keluarga miskin	%	5,20	4,60	4,00	3,40	2,90	2,28	DISSOSPMD, BPS
17	Rasio Kesenjangan Gender (GDI)	Indeks	91,00	91,5	92,00	92,5	93,00	93,50	DISDALDUKP3A
III	ASPEK DAYA SAING DAERAH								
1	Return on Asset (ROA) BUMD	Persentase	1,75	1,95	2,15	2,39	2,54	2,82	DISDAGRIN
2	Jumlah tamu wisatawan mancanegara (hotel berbintang)	Ribu Orang	4,99	5,31	5,67	6,02	6,32	6,93	DISBUDPARPURA
3	Koefisien variasi harga antarwilayah tingkat provinsi	Koefisien	3,92	3,82	3,82	3,70	3,66	3,63	DISDAGRIN
4	Total dana pihak ketiga terhadap PDRB	Persentase	21,51	23,35	24,59	25,56	28,43	30,10	BPKAD
5	Aset dana pensiun terhadap PDRB	Persentase	0,05	0,13	0,22	0,30	0,38	0,46	BPKAD
6	Inklusi keuangan	Persentase	81,12	81,59	80,58	85,25	83,47	86,62	BPKAD
7	Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB	Persentase	1,52	1,62	1,72	1,89	1,96	2,11	BPD
8	Aset Perbankan Syariah/PDRB	Persentase	1,08	1,19	1,26	1,26	1,31	1,38	BPD
9	Jumlah Produk Tersertifikasi Halal	Produk	12,98	13,08	12,69	12,99	12,93	13,42	DISDAGRIN
10	PDRB per kapita	miliar rupiah	8,79	9,16	9,52	9,89	10,26	14,13	BAPERIDA
11	Rasio Gini	%	319,50	316,00	312,50	309,00	305,50	302,00	BAPERIDA
12	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,57	4,43	4,29	4,15	4,01	3,87	BPS, DISNAKERTRANS
13	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap	%	72	75,00	78,00	81,00	85,00	87,80	DPUPR
14	Tingkat realisasi investasi	Miliar Rp	520	580,00	640,0	700,0	760,0	820,0	DPMPSTP
15	Pertumbuhan UMKM formal (%)	%	41,00	44,00	47,00	50,00	55,00	57,60	DISNAKERTRANSKOPUKM
16	Jumlah kunjungan wisatawan	Orang	36000	39000	42000	45000	48000	51000	DISBUDPARPORA
IV	ASPEK PELAYANAN UMUM								
1	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya	Persentase	69,05	69,87	69,05	70,68	73,14	71,91	KEPOLISIAN
2	Persentase Penegakan Perda	Persentase	61,42	64,43	67,16	69,28	70,74	73,04	SATPOLPP
3	Indeks Rasa Aman	Angka	63,24	65,61	66,76	65,58	66,84	66,09	SATPOLPP
4	Indeks Ketenteraman dan Ketertiban	Angka	67,20	68,45	70,89	71,59	70,26	70,44	SATPOLPP
5	Persentase Kepemilikan KTP elektronik	Persentase	89,10	91,69	92,63	89,89	93,99	93,26	DISDUKCAPIL
6	Persentase Identitas Kependudukan Digital (IKD) dari jumlah penduduk yang ber-KTP elektronik	Persentase	9,30	18,46	28,18	36,25	46,91	56,55	DISDUKCAPIL
7	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	Persentase	47,26	51,58	56,28	59,89	65,30	70,57	DISDUKCAPIL
8	Persentase cakupan kepemilikan akta kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan	Persentase	59,01	60,97	62,28	61,67	63,03	61,69	DISDUKCAPIL
9	Persentase cakupan kepemilikan buku nikah/akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan	Persentase	57,15	57,17	60,36	60,09	61,65	60,55	DISDUKCAPIL
10	Persentase cakupan kepemilikan akta perceraian pada semua individu yang perceraianannya dilaporkan	Persentase	55,84	59,60	60,26	60,59	61,44	61,45	DISDUKCAPIL
11	Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada anak usia 0-4 tahun	Persentase	89,18	91,58	89,06	91,26	94,55	93,62	DISDUKCAPIL
12	Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada anak usia 0-17 tahun	Persentase	89,53	90,91	90,60	91,86	93,48	91,28	DISDUKCAPIL
13	Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan	Nilai	49,33	59,91	64,64	69,11	75,65	80,06	DISDUKCAPIL
14	Tingkat Digitalisasi Arsip	Nilai	45,95	50,42	54,64	61,84	66,46	71,52	DISDUKCAPIL
15	Persentase Capaian Nilai Aksi HAM	Nilai	59,76	58,99	61,45	63,13	67,42	68,92	BAKESBANGPOL
16	Persentase penduduk dengan akses air minum layak	%	80,00	82,00	84,00	86,00	88,00	90,00	DPUR
17	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan	%	87,00	88,00	89,00	90,00	91,00	92,00	BAPERIDA
18	Persentase sampah terkelola	%	60,00	65,00	70,00	75,00	80,00	85,00	DISLH
V	TATA KELOLA PEMERINTAHAN								
1	Nilai SAKIP Pemerintah Daerah	Skor	75,00	78,00	81,00	84,00	87,00	90,00	BKPSDM



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Tahun 2025-2029

No	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN						SKPD Penanggung Jawab
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
2	Nilai Reformasi Birokrasi	Skor	70,00	75,00	80,00	85,00	90,00	95,00	INSPEKTORAT/ BPKA
3	Persentase tindak lanjut temuan BPK/Inspektorat	%	85,00	87,00	89,00	91,00	93,00	95,00	INSPEKTORAT
4	Nilai MCP KPK	Skor	80,00	82,00	84,00	86,00	88,00	90,00	INSPEKTORAT
5	Maturitas SPIP	Skor	75,00	77,00	79,00	81,00	83,00	85,00	INSPEKTORAT
INDIKATOR KINERJA KUNCI									
A	PENDIDIKAN								
1	Persentase anak usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah	Persentase	62,48	64,63	65,93	64,45	67,63	65,47	DISDIK
2	Persentase anak usia 4-18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus	Persentase	63,93	65,68	67,12	68,44	70,23	71,75	DISDIK
3	Harapan Lama Sekolah	Tahun	11,77	12,37	12,38	12,45	12,33	12,43	DISDIK
4	Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk di Atas Usia 15 Tahun	Tahun	8,62	8,99	8,60	8,71	8,87	9,21	DISDIK
5	Capaian Kualitas Pembelajaran SMA	Skala	Sedang	Sedang	Sedang	Baik	Baik	Baik	DISDIK
6	Capaian Kualitas Pembelajaran SMK	Skala	Sedang	Sedang	Sedang	Baik	Baik	Baik	DISDIK
7	Capaian Kualitas Pembelajaran SLB	Skala	Sedang	Sedang	Sedang	Baik	Baik	Baik	DISDIK
8	Persentase perangkat kurikulum yang dievaluasi dan dikembangkan untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan	%	94,69	94,35	92,39	90,54	94,96	92,03	DISDIK
9	Proposi Sekolah dengan Rasio Murid-Guru	%	70,89	71,00	71,61	73,05	77,03	77,65	DISDIK
10	Prosentase perizinan dan pengawasan pendirian USB (Unit Sekolah Baru)	%	92,93	94,53	91,06	93,99	90,82	91,17	DISDIK
11	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	9,45	9,60	9,75	9,90	10,05	10,20	DISDIK
12	Angka Partisipasi Kasar SMA/SMK	%	85,00	87,00	89,00	90,00	91,50	93,30	DISDIK
B	KESEHATAN								
1	Rasio daya tampung rumah sakit rujukan	Persentase	1,23	1,26	1,30	1,32	1,35	1,35	DINKES
2	Persentase RS rujukan yang terakreditasi	Persentase	92,06	90,87	92,24	93,46	94,17	94,49	DINKES
3	Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	Persentase	93,13	92,26	90,47	91,60	93,27	92,01	DINKES
4	Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB	Persentase	92,07	93,90	93,66	93,07	94,68	90,85	DINKES
5	Prevalensi Stunting Balita	%	19,00	17,00	15,00	13,00	11,00	9,00	DINKES
6	Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun	70,50	70,90	71,30	71,80	72,20	72,63	DINKES
C	Sosial		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	Tingkat Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	Persentase	93,64	94,11	92,67	94,32	93,05	92,66	DISSOPMD
2	Tingkat persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	Persentase	90,14	90,91	92,04	94,53	93,09	90,95	DISSOPMD
3	Tingkat Persentase Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi	Persentase	93,54	91,20	94,74	93,28	91,69	91,99	DISSOPMD
4	Kebutuhan dasarnya di dalam panti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	DISSOPMD
5	Tingkat Persentase Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	Persentase	91,07	93,76	90,13	91,01	94,59	91,06	DISSOPMD
D	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten								
1	Rasio luas kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir	Persentase	0,02	0,07	0,12	0,16	0,21	0,25	DPUPR
2	Rasio luas daerah irigasi yang dilayani oleh jaringan irigasi	Rasio	23,27	25,64	28,34	30,67	32,86	34,77	DPUPR
3	Persentase kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah terhadap kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum	Persentase	73,32	75,93	77,44	76,04	77,86	81,31	DPUPR
4	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	Persentase	74,50	81,02	84,96	87,21	89,29	93,57	DPUPR
5	Tingkat kemandapan jalan	Persentase	57,65	59,85	59,51	61,03	62,80	61,59	DPUPR
6	Rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli	Persentase	0,15	0,17	0,18	0,20	0,20	0,21	DPUPR
7	Penyelesaian Materi Teknis RTRW	Dokumen	1,84	1,84	-	-	-	-	DPUPR
8	Penyelesaian Materi Teknis RDTR	Dokumen	0,95	0,91	0,91	0,95	0,95	0,90	DPUPR



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Tahun 2025-2029

No	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN						SKPD Penanggung Jawab
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
9	Penetapan RTRW	Dokumen	0,94	0,91	0,90	-	-	-	DPUPR
10	Penetapan RDTR	Dokumen	0,92	0,95	0,94	0,94	0,93	0,93	DPUPR
11	Persentase Jalan Kabupaten Kondisi Mantap	%	72,00	75,00	78,00	81,00	85,00	87,80	DPUPR
E	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman								
1	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	Persentase	92,42	93,74	94,71	90,60	93,92	91,32	DISPERKIMTAN
2	Persentase warga negara yang terkena relokasi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah layak huni	Persentase	92,92	93,87	90,41	94,58	90,00	91,31	DISPERKIMTAN
3	Persentase Luas Kawasan kumuh 10-15 ha yang ditangani	Persentase	7,09	8,34	9,40	10,76	12,15	13,40	DISPERKIMTAN
4	Persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU	Persentase	78,08	78,23	80,60	79,51	81,38	84,26	DISPERKIMTAN
F	Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat								
1	Persentase gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang dapat diselesaikan	Persentase	61,14	63,66	66,01	68,05	71,08	73,29	SATPOLPP
2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Persentase	62,04	64,83	64,61	67,28	70,12	71,37	SATPOLPP
3	Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran	Daerah	9,22	9,34	9,22	9,45	9,42	9,38	BPBD
4	Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Daerah	13,61	13,97	14,00	13,77	13,95	13,62	BPBD
5	Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal	Persen	90,57	93,71	94,45	94,78	92,03	93,34	BPBD
6	Persentase penanganan pra bencana	Persen	92,98	91,23	90,89	92,45	92,84	91,32	BPBD
7	Persentase penanganan tanggap darurat bencana	Persen	94,17	93,44	93,46	93,87	94,53	94,82	BPBD
8	Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana	Persen	51,96	56,92	59,52	65,00	68,44	75,93	BPBD
9	Persentase penyelesaian dan pendampingan dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal	Persen	92,77	92,27	90,52	91,03	90,09	93,40	BPBD
10	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah	Persentase	92,48	91,08	93,67	90,14	91,52	94,29	BPBD
G	Tenaga Kerja								
1	Persentase menyusun rencana tenaga kerja	Persentase	83,97	91,99	92,36	92,71	90,19	94,71	DISNAKERTRANSKOPUKM
2	Jumlah Lulusan Pelatihan Vokasi yang Bersertifikat	Orang	102,88	242,79	296,23	361,97	417,80	449,09	DISNAKERTRANSKOPUKM
3	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase	0,47	0,64	0,93	1,11	1,32	1,50	DISNAKERTRANSKOPUKM
4	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata Kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	Persentase	1,90	2,02	1,99	2,14	2,32	2,47	DISNAKERTRANSKOPUKM
5	Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan di Dalam Negeri	Persentase	16,04	16,28	16,67	16,27	17,14	17,08	DISNAKERTRANSKOPUKM
6	Jumlah Perusahaan terlapor pada WLKP Online	Perusahaan	12759,04	13156,84	13284,08	13886,34	13743,92	13631,54	DISNAKERTRANSKOPUKM
H	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak								
1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	84,66	82,66	81,85	83,64	82,03	84,51	DISDALDUKP3A
2	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	Persentase	3,48	3,80	3,98	4,32	4,65	4,57	DISDALDUKP3A
3	Rasio kekerasan terhadap anak per 10.000 anak	Persentase	3,21	3,25	3,21	3,26	3,18	3,15	DISDALDUKP3A
4	Rasio kekerasan terhadap Perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk Perempuan)	Persentase	17,57	16,86	16,57	17,12	17,11	16,79	DISDALDUKP3A
5	Ketersediaan data terpilah gender dan anak	Dokumen	13,07	13,28	12,80	13,07	13,21	12,80	DISDALDUKP3A
6	Kesiapan sebagai kabupaten layak anak yang lolos verifikasi administrasi (VA) tingkat provinsi	Persentase	66,18	71,02	79,86	83,81	92,79	94,32	DISDALDUKP3A
7	Persentase perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan komprehensif	Persentase	83,54	83,00	85,02	81,42	81,07	84,22	DISDALDUKP3A
8	Persentase anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif	Persentase	82,58	84,41	84,64	84,74	82,84	81,43	DISDALDUKP3A
I	Pangan								
1	Persentase Cadangan Pangan	Persentase	90,18	118,87	139,62	154,35	178,72	183,99	DKPP
J	Pertanahan								
1	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	Persentase	9,16	10,13	11,30	12,10	13,22	13,69	DISPERKIMTAN
2	Persentase pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang selesai tepat waktu	Persentase	68,66	69,01	72,29	72,87	72,06	74,85	DISPERKIMTAN
3	Jumlah bidang tanah yang didistribusi	Bidang Tanah	911,75	955,33	1006,14	1060,80	1080,38	1164,94	DISPERKIMTAN
4	Jumlah Kepala Keluarga Penerima Akses Reforma Agraria	KK	93,39	95,28	99,47	108,53	109,57	112,73	DISPERKIMTAN



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Tahun 2025-2029

No	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN						SKPD Penanggung Jawab
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
K	Lingkungan Hidup								
1	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH, dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase	13,68	15,78	17,92	19,57	20,98	23,10	DISLH
L	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil								
1	Penyajian data kependudukan skala kabupaten dalam satu tahun	Persentase	90,23	93,03	91,25	90,45	92,19	91,06	DISDUKCAPIL
2	Pemanfaatan data kependudukan	Persentase	24,36	30,68	41,09	46,75	47,71	51,74	DISDUKCAPIL
3	Persentase Informasi Kependudukan yang dimanfaatkan	Persentase	24,22	31,23	39,86	45,30	48,91	53,80	DISDUKCAPIL
4	Persentae penyajian Profil Kependudukan	Persentase	90,02	91,84	94,31	94,24	93,77	92,86	DISDUKCAPIL
M	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa								
1	Persentase pengentasan desa tertinggal	Persentase	16,24	19,88	18,54	23,58	30,12	46,98	DISSOPMD
2	Persentase peningkatan status Desa Mandiri	Persentase	10,95	12,60	14,80	17,61	21,76	28,67	DISSOPMD
N	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana								
1	TFR (Angka Kelahiran Total)	Angka	2,08	2,09	2,06	2,07	2,07	2,07	DISDALDUKP3A
2	Persentase pemakaian kontrasepsi modern (<i>Modern Contraceptive Prevalence Rate/MCPR</i>)	Persentase	61,42	61,69	63,04	62,25	61,73	60,53	DISDALDUKP3A
3	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (<i>unmet need</i>)	Persentase	7,32	7,35	7,39	7,13	7,16	6,99	DISDALDUKP3A
4	Kehamilan Tidak Diinginkan (KTD)	Persentase	7,87	8,01	7,90	7,73	7,66	7,97	DISDALDUKP3A
5	Persentase kebutuhan KB yang terpenuhi menurut Alat/Cara KB Modern (<i>demand satisfied</i>)	Persentase	81,88	82,98	80,88	81,46	82,17	81,52	DISDALDUKP3A
6	Median Usia Kawin Pertama (MUKP) Wanita	Usia	18,86	18,91	19,39	19,99	19,70	19,85	DISDALDUKP3A
7	Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan	Indeks	53,89	54,95	54,41	53,87	55,23	53,33	DISDALDUKP3A
8	Indeks Pembangunan Keluarga (IBangga)	Indeks	58,47	57,77	56,96	57,62	58,21	58,51	DISDALDUKP3A
9	Angka kelahiran pada usia remaja umur 15-19 tahun/ <i>Age Specific Fertility Rate</i> (ASFR 15-19 Tahun)	Angka	35,98	35,18	34,50	35,52	35,24	34,01	DISDALDUKP3A
O	Perhubungan								
1	Rasio konektivitas	Rasio	0,60:0,64	0,61:0,65	0,62:0,66	0,64:0,68	0,65:0,69	0,66:0,70	DISHUB
2	V/C Rasio	Rasio	89,15	93,13	90,91	94,04	90,05	92,33	DISHUB
P	Komunikasi dan Informatika								
1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (Perangkat Daerah) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfosandi	Persentase	39,59	40,72	40,22	39,69	39,10	38,71	DISKOMINFOSANDI
2	Persentase Layanan Publik yang Diselenggarakan Secara Online dan Terintegrasi	Persentase	0,00	18,70	18,72	18,51	18,24	18,81	DISKOMINFOSANDI
3	Persentase Masyarakat yang menjadi Sasaran Penyebaran Indormasi Publik, Mengetahui Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah Daerah	Persentase	65,54	69,46	75,38	76,31	78,62	76,61	DISKOMINFOSANDI
Q	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah								
1	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	Persentase	10,88	11,06	11,26	11,99	11,85	12,35	DISNAKERTRANSKOPUKM
2	Meningkatnya Usaha Kecil yang menjadi wirausaha	Orang	3195,82	3286,16	3277,93	3340,05	3256,03	3390,71	DISNAKERTRANSKOPUKM
R	Penanaman Modal								
1	Persentase peningkatan investasi di kabupaten	Persentase	4,69	4,69	4,66	4,51	4,52	4,70	DPMP TSP
S	Kepemudaan dan Olahraga								
1	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Persentase	2,74	3,74	4,54	5,62	6,57	7,50	DISBUDPARPORA
2	Tingkat partisipasi pemuda organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Persentase	11,78	11,75	13,05	13,70	13,93	14,65	DISBUDPARPORA
3	Peningkatan Prestasi Olahraga	Medali	27,90	40,66	33,21	40,69	36,25	42,16	DISBUDPARPORA
T	Statistik								
1	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Persentase	79,58	78,91	81,78	84,54	85,88	92,66	BPS
2	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	Persentase	76,88	79,34	79,30	82,43	85,78	93,20	BPS
U	Persandian								
1	Tingkat keamanan informasi pemerintah	Indeks	395,36	404,13	413,41	408,03	405,14	410,65	DISKOMINFOSANDI
V	Kebudayaan								



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Tahun 2025-2029

No	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN						SKPD Penanggung Jawab
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Terlestarikannya Cagar Budaya	Persentase	95,00	93,46	92,14	92,08	90,77	91,47	DISBUDPARPORA
W	Perpustakaan								
1	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai	65,70	69,62	70,58	71,76	73,83	75,42	DISSIPTAKA
X	Kearsipan								
1	Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan	Nilai	47,51	59,65	63,11	69,61	73,44	76,95	DISSIPTAKA
2	Tingkat Digitalisasi Arsip	Nilai	45,91	51,00	55,80	60,32	67,58	70,47	DISSIPTAKA
Y	Perikanan								
1	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari seluruh Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi	Ton	270363,4	282024,4	298541,6	301714,9	321711,3	327468	
2	Persentase kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	Persentase	78,15	78,15	77,31	77,68	79,29	78,74	DKPP
Z	Pariwisata								
1	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	Persentase	0,45	0,56	0,66	0,74	0,84	0,91	DISBUDPARPORA
2	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan yang datang ke kabupaten	Persentase	0,91	1,16	1,39	1,62	1,82	2,10	DISBUDPARPORA
3	Tingkat hunian akomodasi	Persentase	36,62	37,97	41,12	42,80	44,02	45,11	DISBUDPARPORA
4	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB yang berlaku	Persentase	1,81	1,88	1,96	2,14	2,22	2,33	DISBUDPARPORA,BPPD
AA	Pertanian								
1	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	Persentase	330,75	326,32	345,78	345,84	349,32	348,69	DISTAN
2	Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	Persentase	18,18	23,51	22,68	30,06	46,91	90,98	DISTAN
3	Produktivitas perkebunan per hektar per tahun	Persentase	0,39	0,53	0,69	0,83	0,95	1,08	DISTAN
AB	Perdagangan								
1	Pertumbuhan nilai ekspor Non Migas	Persentase	2,27	2,81	3,21	4,16	5,11	5,54	DISDAGRIN
2	Persentase penanganan pengaduan konsumen	Persentase	92,32	90,42	93,14	90,23	92,49	93,00	DISDAGRIN
3	Persentase komoditi potensial yang sesuai dengan ketentuan berlaku	Persentase	93,44	92,70	92,67	90,51	91,71	94,67	DISDAGRIN
4	Tertib Usaha	Persentase							DISDAGRIN, DPMPSTP
5	Persentase kinerja realisasi pupuk	Persentase	63,13	66,45	70,06	71,73	73,23	79,09	DISDAGRIN
6	Persentase barang beredar yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	Persentase	91,22	92,99	92,98	94,37	91,80	92,71	DISDAGRIN
7	Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok	Persentase	5,03	4,64	4,56	4,15	3,76	3,63	DISDAGRIN
AC	Perindustrian								
1	Pertambahan Jumlah Industri Besar di Provinsi	Persentase	4,53	4,68	4,66	4,57	4,61	4,58	DISDAGRIN
2	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industry termasuk turunan indikator pembangunan industry dalam RPIP yang ditetapkan dalam RPIK	Persentase	91,18	91,60	94,52	93,70	91,72	93,72	DISDAGRIN
3	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Besar yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Persentase	91,78	92,67	90,66	92,93	94,61	90,13	DISDAGRIN
4	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan jumlah Izin Usaha Kawasan	Persentase	0,00	0,00	92,16	94,27	92,70	91,23	DISDAGRIN
5	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	Persentase	112,57	117,03	117,36	114,44	116,44	116,38	DISDAGRIN
AD	Transmigrasi								
1	Persentase Program Transmigrasi yang Dilaksanakan	Persentase	9,14	18,84	27,90	37,87	45,63	54,82	DISNAKERTRANSKOPUKM
2	Persentase Luas Kawasan Transmigrasi yang Berkembang	Persentase	9,00	18,38	36,51	45,15	56,99	74,25	DISNAKERTRANSKOPUKM
3	Persentase Transmigran yang dibina dan diberdayakan	Persentase	9,42	18,72	37,48	56,39	75,03	91,22	DISNAKERTRANSKOPUKM
AE	Pemerintahan Umum								
1	Nilai Indeks Kinerja Ormas (IKO)	Indeks	0,00	61,05	62,12	62,73	63,30	63,62	BAKESBANGPOL
2	Nilai Indeks Harmoni Indonesia (Ihal)	Indeks	6,31	6,34	6,33	6,52	6,41	6,56	BAKESBANGPOL
3	Prosentase Kasus yang berpotensi menimbulkan Konflik yang tertangani	Persen	56,60	56,70	59,33	61,21	66,39	69,70	BAKESBANGPOL
4	Pembinaan Ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa	Orang	92,79	90,09	92,75	93,97	94,00	91,87	BAKESBANGPOL
AF	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Perencanaan dan Keuangan Provinsi)								



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Tahun 2025-2029

No	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN						SKPD Penanggung Jawab
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Rasio Belanja Pegawai di luar Guru dan Tenaga Kesehatan	Persentase	5,82	5,74	5,88	5,81	5,74	5,73	BPKAD
2	Rasio PAD	Persentase	31,35	30,82	31,23	32,03	32,11	31,80	BPPD
3	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (Dikurang Transfer Expenditures)	Persentase	37,21	37,13	37,48	36,90	35,61	35,92	BPKAD
4	Opini Laporan Keuangan	Status	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	BPKAD
5	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)	Nilai	2,76	2,80	2,90	2,81	2,84	2,91	INSPEKTORAT
AG	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi)								
1	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	Persentase	0,45	0,56	0,65	0,74	0,83	0,90	BAPPEDALITBANG
2	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	Persentase	71,38	71,39	73,31	74,50	74,98	75,45	DPUPR
3	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	Persentase	42,48	42,32	43,27	44,67	47,48	47,19	BPKAD
4	Peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah	Persentase	92,36	93,24	90,90	94,47	90,94	93,58	BPKAD
AH	Fungsi Penunjang Pemerintah (Kepegawaian Provinsi)								
1	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Persentase	70,01	71,72	72,16	72,67	69,71	72,84	BPKPSDM
2	Rasio pegawai fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Persentase	21,62	21,46	21,87	22,61	22,85	21,89	BPKPSDM
3	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Persentase	65,74	68,14	68,06	67,53	66,00	68,00	BPKPSDM
AI	Fungsi Penunjang Pemerintahan (Manajemen Keuangan)								
1	Budget Execution: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	Persentase	-9,70	-9,93	-9,45	-9,31	-9,40	-9,10	BPKAD
2	Revenue Mobilization: Deviasi realisasi PAD terhadap Anggaran PAD dalam APBD	Kategori	2,73	2,72	2,82	2,74	2,82	2,84	BPKAD, BPPD
3	Assets Management	Persentase	3,44	3,36	3,46	3,44	3,46	3,43	BPKAD
4	Cash Management: Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	Persentase	3,43	3,48	3,50	3,50	3,43	3,39	BPKAD

Indikator Kinerja Daerah (IKD) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) memiliki keterkaitan langsung dengan sasaran pembangunan yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Barito Utara Tahun 2025–2029. IKD menggambarkan capaian kinerja makro daerah secara agregat, seperti pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, pengangguran, dan indeks pembangunan manusia (IPM), yang menjadi representasi dari hasil akhir (*outcome*) pembangunan lintas urusan. Sementara itu, IKK merupakan turunan dari IKD yang berfungsi untuk mengukur kinerja spesifik perangkat daerah pada masing-masing urusan pemerintahan, baik wajib maupun pilihan, sesuai dengan kewenangan Kabupaten Barito Utara. Dengan demikian, IKK menjadi indikator operasional yang menjembatani pencapaian tujuan strategis RPJMD melalui hasil-hasil program dan kegiatan perangkat daerah.

Penyusunan IKK Kabupaten Barito Utara dilakukan secara terintegrasi dengan pendekatan *result-based management* (RBM) dan *performance-based budgeting* (PBB), sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021. Pendekatan ini memastikan bahwa setiap sasaran kinerja daerah yang diukur melalui IKD memiliki turunan langsung dalam bentuk indikator kinerja perangkat daerah (IKK) yang dapat diukur secara kuantitatif, diverifikasi melalui sumber data resmi, dan dievaluasi secara periodik melalui mekanisme SAKIP dan LPPD.

Struktur hubungan antara IKD dan IKK di Kabupaten Barito Utara dapat digambarkan sebagai berikut:

1. IKD merepresentasikan *capaian makro* pembangunan daerah, seperti peningkatan kesejahteraan masyarakat, daya saing ekonomi, dan kualitas lingkungan hidup.
2. IKK merupakan *instrumen penggerak kinerja* pada level perangkat daerah yang secara langsung berkontribusi terhadap pencapaian indikator makro tersebut.
3. Keterkaitan IKD dan IKK dijaga melalui sistem pengukuran yang terintegrasi di dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT), yang menjadi bagian dari sistem akuntabilitas kinerja pemerintah (SAKIP).

Dengan demikian, keberhasilan pencapaian indikator IKD akan sangat bergantung pada konsistensi dan capaian indikator IKK di tingkat perangkat daerah. Melalui sinergi antara indikator makro (IKD) dan mikro (IKK), Pemerintah Kabupaten Barito Utara diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan program, efisiensi pengelolaan sumber daya, dan akuntabilitas hasil pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat

Kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Barito Utara selama periode RPJMD 2025-2029 diarahkan untuk memperkuat efektivitas pelaksanaan program pembangunan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Melalui penguatan sistem pengukuran kinerja yang berbasis indikator hasil (*outcome-based indicators*), setiap perangkat daerah diharapkan dapat menyusun rencana, melaksanakan, dan melaporkan capaian kinerjanya secara terukur, transparan, dan berkesinambungan. Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU), Indikator Kinerja Daerah (IKD), dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) dilakukan secara berjenjang dan saling terkait.

1. IKU berperan sebagai indikator strategis daerah yang mencerminkan keberhasilan visi dan misi kepala daerah.
2. IKD berfungsi sebagai indikator antara (*intermediate outcomes*) yang menilai capaian sasaran pembangunan daerah lintas bidang.
3. IKK berperan sebagai indikator operasional yang menilai efektivitas dan efisiensi pelaksanaan urusan pemerintahan oleh masing-masing perangkat daerah.

Sinergi ketiga tingkatan indikator ini akan memastikan bahwa setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah memiliki kontribusi nyata terhadap pencapaian sasaran strategis pembangunan Kabupaten Barito Utara. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Barito Utara berkomitmen untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel (*good governance*) melalui:

1. Penerapan sistem perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja;
2. Optimalisasi pelaksanaan evaluasi kinerja melalui SAKIP dan LPPD;
3. Integrasi sistem informasi berbasis SPBE dan *e-Government*; serta
4. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur untuk mengelola hasil pembangunan secara berkelanjutan.

Dengan penguatan sistem kinerja ini, diharapkan Kabupaten Barito Utara mampu mencapai target pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD 2025-2029, meningkatkan nilai SAKIP menuju predikat “A” pada tahun 2029, serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas, adil, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat.



BAB V PENUTUP



BAB V PENUTUP

5.1. Spirit Pembangunan Kabupaten Barito Utara

Secara substansi, dokumen RPJMD ini merupakan dokumen perencanaan yang menjadi pedoman bagi pemerintah daerah selama 5 tahun ke depan, khususnya pada periode 2025-2029. Dokumen ini telah secara rinci memberikan gambaran mengenai visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan, strategi, program prioritas, hingga program pembangunan di Kabupaten Barito Utara. Dokumen ini juga akan menjadi pedoman Pemerintah Kabupaten Barito Utara dalam menyusun rencana kerja setiap tahunnya, serta menjadi pedoman dalam penyusunan rencana strategis bagi perangkat daerah. Dokumen telah disusun secara komprehensif untuk memberikan kepastian perencanaan bagi pemerintah daerah.

Poin utama dalam perencanaan ini adalah bagaimana menciptakan *spirit* pembangunan di Kabupaten Barito Utara yang berdasarkan potensi lokal, alokasi sumber daya yang efisien, serta berpegang teguh pada kearifan lokal daerah. Selain itu, pembangunan harus dilaksanakan berdasarkan perencanaan yang matang dengan pertimbangan dan penilaian yang tepat agar dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat. Mandat nasional juga telah ditetapkan bagi Kabupaten Barito Utara, sehingga mandat ini menjadi pekerjaan penting untuk dieksekusi oleh pemerintah, selain memenuhi program prioritas pembangunan dalam lima tahun ke depan.

Upaya ini perlu didukung oleh berbagai pihak, tidak hanya pemerintah daerah saja, dalam pencapaiannya, termasuk dari pihak masyarakat, komunitas, media, bisnis, akademisi, hingga pihak-pihak berkepentingan lain yang memiliki satu *spirit* dalam mencapai visi dan melaksanakan misi daerah dalam RPJMD. Maka, prinsip kolaborasi harus didorong secara berkesinambungan di Kabupaten Barito Utara.

5.2. Kaidah Pelaksanaan

Dokumen perencanaan yang baik adalah dokumen yang dapat dilaksanakan sebagai acuan proses pembangunan daerah. Oleh karena itu, perlu beberapa penekanan skema pelaksanaan dalam setiap rancangan kebijakan, program, sampai dengan kegiatan dalam RPJMD yang nantinya akan dilakukan. Visi RPJMD Kabupaten Barito Utara Tahun 2025–2029 dapat terwujud melalui komitmen, kerjasama dan partisipasi seluruh *stakeholders*

pembangunan. Oleh karena itu, dibutuhkan kaidah pelaksanaan sebagai pedoman umum dalam pelaksanaan RPJMD. Kaidah pelaksanaan RPJMD Kabupaten Barito Utara tahun 2025–2029 sebagai berikut:

1. Dokumen ini merupakan dokumen acuan bagi bupati dan wakil bupati untuk melaksanakan pembangunan sekaligus merealisasikan program unggulan kepada masyarakat. Oleh karena itu, pelaksanaan kerja dan pencapaian kinerja RPJMD memerlukan kolaborasi semua pihak sesuai dengan kapasitas dan kewenangan masing-masing.
2. Penyusunan arah kebijakan dalam dokumen ini dilakukan secara *cascading* dengan memperhatikan RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2029, RPJPD Kabupaten Barito Utara Tahun 2025-2045, sekaligus arahan nasional dalam RPJMN Tahun 2025-2029, sehingga dokumen ini selaras dan *sinkron* dengan dokumen perencanaan pembangunan di level atasnya termasuk kebijakan pemerintah pusat yang terbit setelah penetapan Peraturan Daerah tentang RPJMD.
3. Rencana pembangunan jangka menengah harus selaras dan sinkron dengan rencana pembangunan tahunan, maka RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD setiap tahun dengan memperhatikan dinamika isu strategis, baik dari internal maupun eksternal daerah. Selanjutnya, RKPD Kabupaten Barito Utara menjadi acuan bagi Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah. Perangkat daerah memprioritaskan pelaksanaan sub kegiatan prioritas dalam Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah untuk mendukung pencapaian target program prioritas dalam RPJMD. Maka dengan demikian setiap Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara wajib berpedoman pada RPJMD dalam setiap penyusunan perencanaan dan perumusan kebijakan, seperti Renstra, Renja, serta perencanaan dan kebijakan sektoral lainnya, misalnya dalam bentuk *Masterplan* dan Rencana Induk.
4. Dalam rangka efektivitas pelaksanaan dan pencapaian kinerja RPJMD, maka dibutuhkan sinkronisasi dan dukungan kebijakan penganggaran. Oleh karena itu, RPJMD menjadi acuan bagi penyusunan kebijakan penganggaran setiap tahun. Pendanaan pembangunan tidak hanya mengandalkan APBD, tetapi dapat mengoptimalkan dan memanfaatkan pendanaan alternatif-inovatif melalui perluasan sumber-sumber pendanaan, penerapan skema atau mekanisme pendanaan yang baru, peningkatan kelembagaan pembiayaan yang adaptif.

5. Dokumen RPJMD Kabupaten Barito Utara Tahun 2025 – 2029 didesain secara adaptif. Oleh karena itu, memuat mekanisme perubahan yang memastikan adanya ruang penyesuaian terhadap berbagai faktor yang tidak dapat dikendalikan. Mekanisme perubahan dilakukan dengan mempertimbangkan *force majeure*, yaitu perubahan geopolitik, geo-ekonomi, bencana, serta penyimpangan pencapaian sasaran pembangunan yang signifikan dari tahapan-tahapan sebelumnya, sehingga tidak memungkinkan pencapaian sasaran pembangunan daerah. Setiap penyesuaian atau perubahan RPJMD Kabupaten Barito Utara Tahun 2025-2029 harus dengan prinsip akuntabel, transparan, efektif, dan efisien serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan peraturan yang berlaku.
6. Dalam rangka untuk memastikan pelaksanaan RPJMD Kabupaten Barito Utara Tahun 2025-2029 dapat berjalan dengan baik dan adaptif terhadap berbagai kondisi dinamis, maka dibutuhkan penerapan manajemen risiko pembangunan daerah mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Penerapan manajemen risiko dilakukan sesuai unsur SPIP, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan pengendalian *intern*. Berbagai risiko yang kemungkinan terjadi, baik konteks internal misalnya terkait dinamika koordinasi dan sinkronisasi lintas sektor maupun konteks eksternal misalnya terkait dinamika kebijakan nasional dan kondisi global yang berdampak pada perekonomian daerah, akan direspon melalui langkah mitigasi dan perumusan strategi dan arah kebijakan pembangunan yang lebih tepat.
7. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJMD, maka harus dilaksanakan kegiatan monitoring, evaluasi, dan pengendalian terhadap pelaksanaan RPJMD, serta hasil RPJMD tahun 2025-2029 secara periodik sesuai peraturan yang berlaku. Kemudian dilaporkan ke Bupati untuk selanjutnya dilaporkan ke Gubernur. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pengendalian pembangunan harus dilakukan secara konsisten dan tepat waktu sebagai proses pengendalian pembangunan daerah agar sesuai dengan tujuan dan target pembangunan.

5.3. Skema Monitoring dan Evaluasi

Proses monitoring dan evaluasi perlu dilakukan dalam rangka pengendalian proses pembangunan daerah serta pemantauan capaian target pembangunan sebagaimana telah dalam dokumen RPJMD ini. Terdapat tiga jenis monitoring dan evaluasi yang harus dilaksanakan, yaitu proses monitoring yang dilakukan setiap tahun yang juga diselaraskan

dengan proses pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahunnya, proses peninjauan kembali yang dapat dilakukan ketika terjadi kondisi force majeure selama masa pembangunan, dan proses evaluasi yang harus dilakukan sebelum proses perencanaan RPJMD pada periode selanjutnya. Detail proses monitoring dan evaluasi dapat dilihat pada Tabel 5.1.

Tabel 5.1. Skema Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi RPJMD Tahun 2025-2029

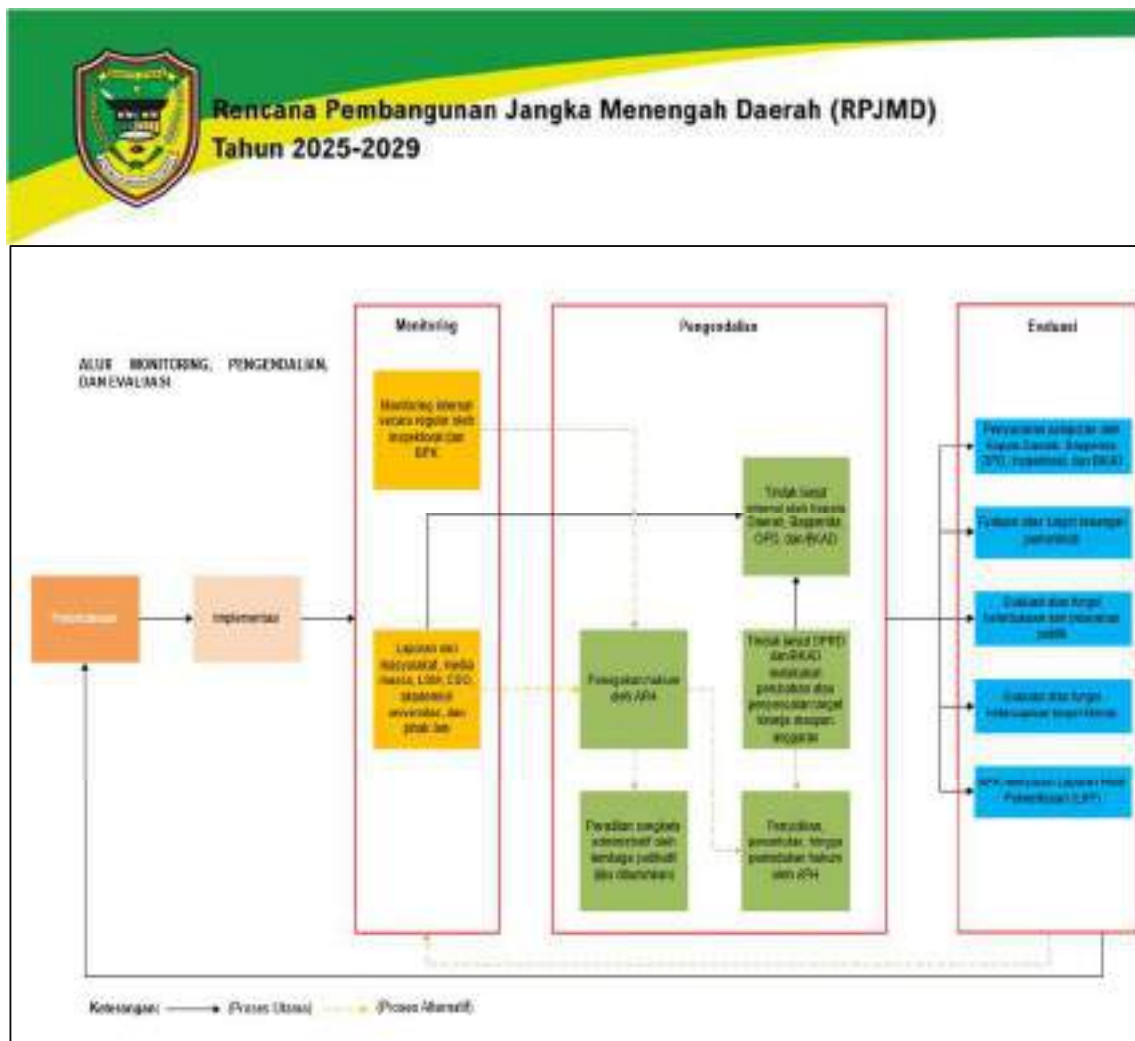
No	Jenis	Waktu					Target
		2025	2026	2027	2028	2029	
1	Monitoring	√	√	√	√		Penyelarasan pelaksanaan program dan kegiatan yang tertuang dalam RPJMD dengan RKPD; beserta monitoring capaian indikator kinerja dalam RPJMD dan RKPD
2	Peninjauan Kembali			√			Review terhadap dokumen RPJMD dapat dilakukan jika terjadi kondisi force majeure yang tidak bisa dihindarkan.
3	Evaluasi					√	Evaluasi dilakukan untuk menilai pencapaian target arah pembangunan dan pencapaian target indikator pembangunan, sebelum proses perencanaan RPJMD periode selanjutnya dilaksanakan.

Selain itu, pelaksanaan monitoring dan evaluasi pembangunan sebagaimana yang tertuang dalam dokumen RPJMD nantinya harus dilakukan dengan prinsip demokratis, artinya dapat melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan daerah. Hal ini difungsikan untuk meningkatkan partisipasi pembangunan oleh berbagai pihak. Beberapa forum dapat dirancang dalam upaya meningkatkan partisipasi pembangunan untuk dapat mengevaluasi ketercapaian pembangunan setiap tahunnya. Beberapa indikasi forum untuk monitoring dan evaluasi yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah seperti tersaji pada Tabel 5.2.

Tabel 5.2. Jenis Forum Monitoring dan Evaluasi RPJMD Tahun 2025-2029

No	Jenis Forum Monev	Sasaran Forum Monev	Waktu Pelaksanaan
1	Forum Monitoring Lintas OPD	Pelaksanaan forum dilakukan pada internal Pemerintah Daerah antar OPD	Dilaksanakan pada setiap tahun dan bertepatan dengan awal tahun anggaran
2	Forum Pengendalian Pembangunan Daerah	Forum ini disusun untuk memberikan ruang partisipasi pembangunan kepada seluruh pemangku kepentingan pembangunan daerah baik dari sisi eksekutif, legislatif, organisasi masyarakat, akademisi, serta media, dll.	Forum dillaksanakan setiap tahun pasca hasil monitoring kinerja setiap OPD dilaksanakan.
3	Publikasi dan Sosialisasi Hasil Pembangunan Daerah	Skema ini dilaksanakan dengan sasaran melakukan komunikasi dengan masyarakat terkait hasil pembangunan daerah yang telah dilaksanakan	Dilaksanakan setelah dua forum pengendalian pembangunan daerah.

Dengan demikian, proses monitoring, pengendalian, dan evaluasi membentuk suatu siklus yang berkesinambungan dan saling menguatkan. Ketiganya tidak berdiri sendiri, melainkan saling terhubung dalam sistem perencanaan pembangunan. Detail skema monitoring, pengendalian, dan evaluasi dapat ditinjau pada gambar berikut ini.



Gambar 5.1. Alur Pendetailan Monitoring, Pengendalian, dan Evaluasi.

Monitoring dimulai dengan proses pengawasan dan pelaporan, yakni:

1. Aktor pengawasan seperti Inspektorat dan BPK berperan melakukan pengawasan internal atas pelayanan dan keterbukaan publik, fungsi keuangan pemerintah, ketercapaian target kinerja, dan lain sebagainya. Lembaga pengawas tersebut dapat melakukan audit, review, hingga observasi lapangan.
2. Bersamaan, sebelum, atau sesudahnya dapat dilakukan pelaporan oleh masyarakat, media massa, LSM, CSO, dan akademisi/universitas. Mereka memberikan laporan berupa keluhan, kritik, indikasi penyimpangan, atau hasil riset terhadap implementasi program. Kedua jalur ini (pengawasan dan pelaporan) membentuk satu rantai deteksi awal yang bisa saling menguatkan. Laporan masyarakat bisa menjadi input bagi Inspektorat atau BPKP untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Begitu pula sebaliknya, hasil audit dapat memicu keterlibatan media dan masyarakat dalam menyuarakan temuan atau ketidakberesan.

Setelah temuan teridentifikasi, masuk tahap pengendalian untuk mencegah, memperbaiki, dan menindaklanjuti.

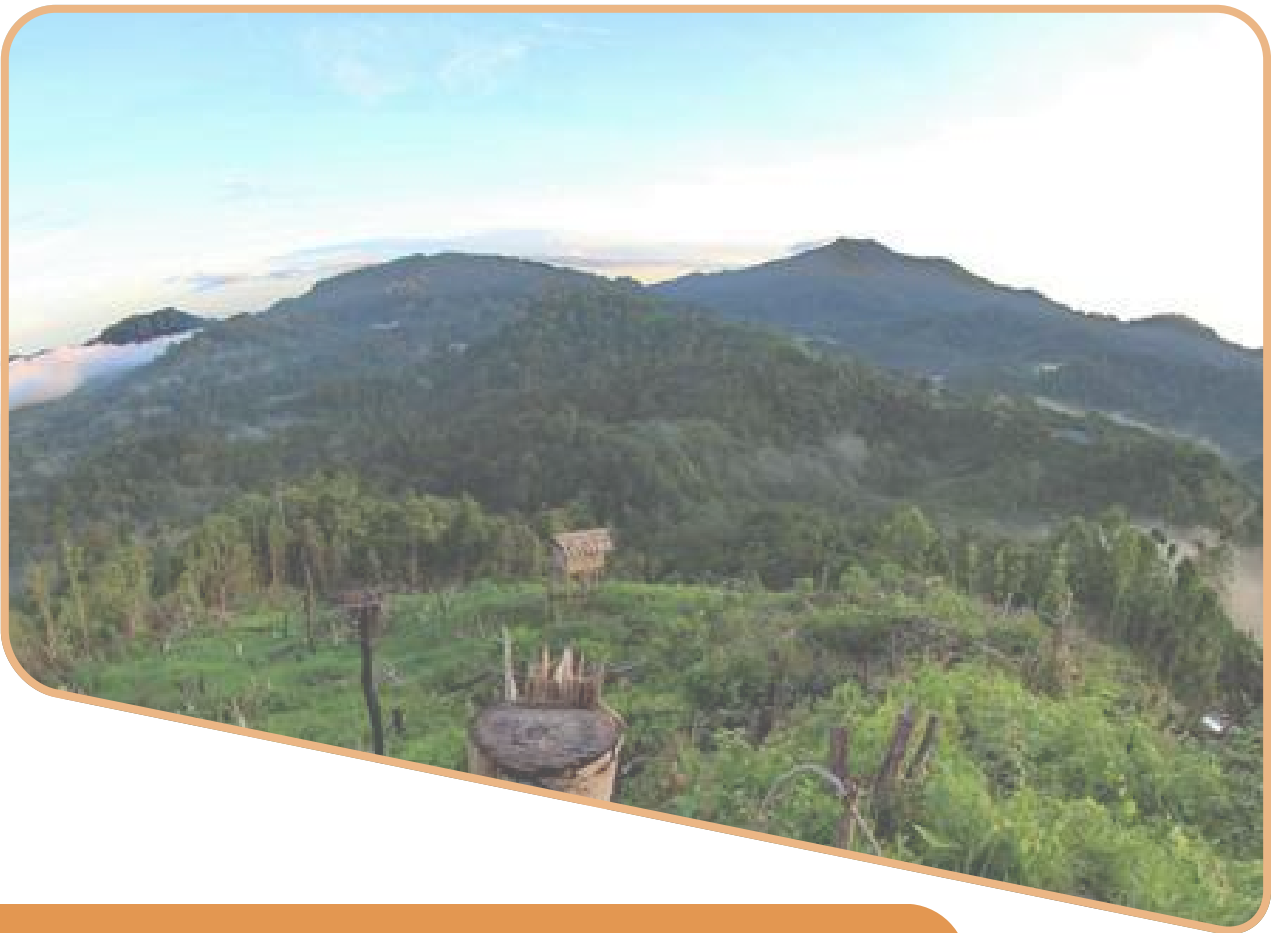
1. Kepala Daerah, Bappeda, OPD, dan BKAD akan menindaklanjuti monitoring internal secara regular yang dilakukan oleh Inspektorat maupun BPK. Kepala Daerah, Bappeda, OPD, dan BKAD bertanggung jawab untuk menyesuaikan pelayanan dan keterbukaan publik, keuangan pemerintah, target kinerja, hingga arah pelaksanaan program/kegiatan berdasarkan hasil temuan, rekomendasi, atau masukan.
2. DPRD dan BKAD kemudian melakukan penyesuaian, atau penundaan alokasi anggaran untuk program atau kegiatan yang bermasalah serta penyesuaian target kinerja. DPRD memanfaatkan temuan dari proses monitoring untuk menekan perbaikan anggaran dalam siklus anggaran tahun berjalan atau berikutnya.
3. Jika dalam proses monitoring terdapat dugaan pelanggaran atau penyimpangan, maka akan masuk ke fase penegakan hukum awal:
 - Aktor penegak hukum (APH) dapat mulai menyelidiki kasus, baik berdasarkan laporan resmi dari APIP maupun hasil investigasi masyarakat/sumber lain
 - Pada tahap ini, keterlibatan aktor penegak hukum bersifat respon terhadap indikasi awal pelanggaran.
4. Apabila muncul sengketa administratif atau hukum terkait hasil monitoring (misal: keberatan atas temuan atau sanksi), maka aktor peradilan sengketa yakni lembaga yudikatif akan masuk. Lembaga Yudikatif menjadi ruang penyelesaian formal jika ada konflik hukum antara pemerintah dan pihak lain berdasarkan hasil monitoring.
5. Jika ditemukan pelanggaran serius (korupsi, penyalahgunaan wewenang, atau pelanggaran hukum lainnya), maka aktor penegakan hukum kembali aktif:
 - APH akan melanjutkan proses ke tahap penyidikan, penuntutan, hingga penindakan hukum.
 - Proses ini berjalan paralel atau lanjutan dari temuan monitoring, khususnya jika ada indikasi tindak pidana.

Selanjutnya, evaluasi dilakukan setelah satu periode pelaksanaan program/kegiatan selesai, baik tahunan maupun akhir periode RPJMD/RKPD dengan didasarkan pada hasil monitoring regular maupun temuan lembaga pengawas. Detailnya:

1. Kepala Daerah, Bapperida, OPD, Inspektorat, dan BKAD menyusun laporan evaluasi internal secara regular yang berkaitan dengan ketercapaian target kinerja, fungsi keuangan pemerintah, keterbukaan dan pelayanan publik.

2. Sementara itu, lembaga pengawas yang berwenang juga dapat melakukan evaluasi atas ketercapaian target kinerja, fungsi keuangan pemerintah, keterbukaan dan pelayanan publik.
3. BPK secara regular juga akan menyusun Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang menjadi dasar akuntabilitas kepada DPR/DPRD.

Hasil evaluasi kemudian akan menjadi bahan perbaikan dan perencanaan ke depan. Selain itu, hasil evaluasi juga digunakan untuk menilai keberhasilan program. Jika terdapat temuan pelanggaran atau kegagalan kinerja, maka hasil evaluasi bisa kembali masuk ke siklus monitoring dan pengendalian baru, menciptakan loop perbaikan berkelanjutan. Namun, jika tidak ditemukan pelanggaran maka hasil evaluasi menjadi masukan dalam perencanaan dan/implementasi.



DAFTAR PUSTAKA



DAFTAR PUSTAKA

- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2019). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah*. Jakarta: Kemendagri.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2019). *Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah*. Jakarta: Kemendagri.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2020). *Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Kodefikasi Perencanaan dan Keuangan Daerah*. Jakarta: Kemendagri.
- Kementerian PANRB. (2020). *Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2020 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*. Jakarta: KemenPANRB.
- Kementerian PANRB. (2020). *Peraturan Menteri PANRB Nomor 26 Tahun 2020 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi 2020–2024*. Jakarta: KemenPANRB.
- Kementerian Keuangan RI. (2022). *Peraturan Menteri Keuangan tentang Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)*. Jakarta: Kemenkeu.
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas. (2024). *RKP 2025 dan Indikator Makro Nasional*. Jakarta: Bappenas.
- Badan Pusat Statistik. (2020). *Kabupaten Barito Utara dalam Angka 2020*. Muara Teweh: BPS Kabupaten Barito Utara.
- Badan Pusat Statistik. (2021). *Kabupaten Barito Utara dalam Angka 2021*. Muara Teweh: BPS Kabupaten Barito Utara.
- Badan Pusat Statistik. (2022). *Kabupaten Barito Utara dalam Angka 2022*. Muara Teweh: BPS Kabupaten Barito Utara.
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Kabupaten Barito Utara dalam Angka 2023*. Muara Teweh: BPS Kabupaten Barito Utara.
- Badan Pusat Statistik. (2024). *Kabupaten Barito Utara dalam Angka 2024*. Muara Teweh: BPS Kabupaten Barito Utara.
- Badan Pusat Statistik. (2025). *Kabupaten Barito Utara dalam Angka 2025*. Muara Teweh: BPS Kabupaten Barito Utara.
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indikator Sosial Ekonomi*. Jakarta: BPS.



Badan Pusat Statistik. (2024). *Statistik Kesejahteraan Rakyat*. Jakarta: BPS.

Badan Riset dan Inovasi Nasional. (2024). *Indeks Daya Saing Daerah 2023*. Jakarta: Penerbit BRIN.

Pemerintah Kabupaten Barito Utara. (2021). *Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2021*. Muara Teweh: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Utara.

Pemerintah Kabupaten Barito Utara. (2022). *Dokumen Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Utara Tahun 2022*. Muara Teweh: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Utara.

Pemerintah Kabupaten Barito Utara. (2022). *Laporan Study EHRA (Environmental Health Risk Assesment)*. Muara Teweh: Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Utara.

Pemerintah Kabupaten Barito Utara. (2023). *Laporan Akhir Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah (RISPAL) Kabupaten Barito Utara*. Muara Teweh: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Pemerintah Kabupaten Barito Utara. (2023). *Laporan Akhir Pemutakhiran Dokumen RISPAM Kabupaten Barito Utara*. Muara Teweh: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Utara.

Pemerintah Kabupaten Barito Utara. (2023). *Dokumen Informasi Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2023*. Muara Teweh: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Utara.

Pemerintah Kabupaten Barito Utara. (2024). *Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 Kabupaten Barito Utara*. Muara Teweh: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Utara.

Pemerintah Kabupaten Barito Utara. (2024). *RPJPD Kabupaten Barito Utara 2025–2045*. Muara Teweh: Bappeda Kabupaten Barito Utara.

Pemerintah Kabupaten Barito Utara. (2025). *Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2024*. Muara Teweh.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. (2025). *Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2029*. Palangkaraya: Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2023). *Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Nasional dan Daerah*. Jakarta: KLHK.

- Otoritas Jasa Keuangan. (2023). *Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD)*. Jakarta: OJK.
- Mahsun, M. (2016). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFE.
- Bastian, I. (2019). *Sistem Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Erlangga.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Osborne, S. P. (2010). *The New Public Governance?* London: Routledge.
- Bouckaert, G., & Halligan, J. (2008). *Managing Performance: International Comparisons*. New York: Routledge.
- Kementerian PANRB. (2021). *Pedoman Evaluasi SAKIP Pemerintah Daerah*. Jakarta: KemenPANRB.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika. (2021). *Pedoman SPBE Indonesia*. Jakarta: Kominfo.
- Kementerian Dalam Negeri. (2022). *Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik dan Inovasi Daerah*. Jakarta: Kemendagri.



RISALAH PEMBAHASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA
TAHUN 2025 - 2029



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA

Jalan. Akhmed Yani No.83 ☎ (0519) 21060 Fax (0519) 21481 Muara Teweh 73811

NOTULEN RAPAT PEMBAHASAN

Hari : Jum'at
Tanggal : 6 Maret 2026
Pukul : 08.00 WIB – selesai
Tempat : Ruang Rapat DPRD Kabupaten Barito Utara
Agenda : Rapat Pembahasan mengenai RPJMD Tahun 2025-2029

Pimpinan Rapat : **Hj. HENNY ROSGIATY RUSLI, S.P.,M.M.**

Peserta Rapat : - 14 (Empat Belas) orang Anggota DPRD Kab. Barito Utara.
(Fc daftar hadir terlampir).
- 24 (Dua Puluh Empat) orang Eksekutif dan Undangan.
(Fc daftar hadir terlampir).

Susunan Acara : - Pembukaan oleh Pimpinan Rapat
- Penjelasan
- Tanya Jawab
- Kesimpulan
- Penutup.

Kesimpulan :

1. Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 disepakati Bersama.
2. Saran dan usulan yang sudah diusulkan DPRD Kabupaten Barito Utara akan menjadi kesempurnaan dari Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.

Pimpinan Rapat,

Hj. HENNY ROSGIATY RUSLI, S.P.,M.M.

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Sekda Kab. Barito Utara,

EVEREADY NOOR, S.E.

Pencatat Rapat
Perisalah Legislatif Ahli Muda Bagian Persidangan
dan Per-UU-an Sekretariat DPRD Kab. Barut

KRISTIANI DAMAYANTI, S.E.